

SURVIVE DURING PANDEMIC COVID-19

Bertahan Di Tengah Pandemi Covid-19



LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT **2020**

SURVIVE DURING PANDEMIC COVID-19

Bertahan Di Tengah Pandemi Covid-19

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT 2020



TENTANG LAPORAN TAHUNAN

About Annual Report



Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Boma Bisma Indra (Persero) 2020 dengan tema “Bertahan ditengah Pandemi Covid-19”. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis sepanjang tahun 2020 serta masa depan keberlanjutan bisnis PT Boma Bisma Indra (Persero).

Laporan Tahunan PT Boma Bisma Indra (Persero) 2020 diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 66 dan pasal 67.

Dalam rangka menjalankan praktik terbaik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Benar / *Good Corporate Governance* (GCG), penyampaian laporan ini mengacu penyusunan Laporan Tahunan berlaku di Indonesia. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik dan criteria *Annual Report Award*.

Perseroan juga menyampaikan beberapa aspek yang merupakan bagian dari pengembangan dan Interpretasi atas isi laporan Tahunan. Dengan demikian, Perusahaan mengharapkan laporan Tahunan ini dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi yang wajar seiring dengan terpenuhinya aspek komposisi dan aspek substansi.

Penyebutan satuan mata uang “Rupiah”, “Rp” atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dollar AS” atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Tahunan PT Boma Bisma Indra (Persero) 2020 disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi PT Boma Bisma Indra (Persero) yaitu www.ptbbi.co.id.

Welcome to the 2020 Annual Report of PT Boma Bisma Indra (Persero) with the theme “Surviving the Covid-19 Pandemic”. The theme was chosen based on in-depth analysis and study based on facts and business developments throughout 2020 and the future of PT Boma Bisma Indra (Persero) 's business sustainability.

The 2020 Annual Report of PT Boma Bisma Indra (Persero) is issued in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in particular article 66 and article 67.

In order to carry out best practices towards the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG), the submission of this report also refers to the guidelines for preparing the Annual Report applicable in Indonesia, namely the Letter Financial Services Authority Circular No. 30 / SEOJK.04 / 2016 concerning the Form and Content of the Annual Report of the Issuer or Public Company and the criteria for the Annual Report Award.

The Company also conveyed several aspects which are part of development and Interpretation of the contents of the Annual report. Thus, the Company hopes that this Annual Report can encourage an increase in fair information disclosure in line with the fulfillment of the composition and substance aspects.

The mention of the currency unit “Rupiah”, “IDR” or IDR refers to the official currency of the Republic Indonesia, while “US Dollar” or USD refers to the official currency of the United States of America. All financial information is presented in Indonesian Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The 2020 Annual Report of PT Boma Bisma Indra (Persero) is presented in two languages, namely Indonesian and English using a type and size of letters that are easy to read and print with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the official website of PT Boma Bisma Indra (Persero), namely www.ptbbi.co.id.



SANGGAHAN & ARAHAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer & Limitations of Liability

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasional, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan PT Boma Bisma Indra (Persero), yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan ini memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta terkait lingkungan bisnis Perseroan di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. PT Boma Bisma Indra (Persero) tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan tahunan ini memuat kata "PT Boma Bisma Indra (Persero)" atau PT BBI (Persero) atau BBI atau "Perseroan" atau "Perusahaan" yang merujuk kepada PT Boma Bisma Indra (Persero) yang bergerak di bidang usaha Mesin Peralatan Industri, Manajemen Proyek dan Jasa serta Diesel Engine.

This annual report contains statements of financial condition, operational results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of PT Boma Bisma Indra (Persero), which are classified as forward statements in the implementation of applicable laws, except for historical matters. The statements contained in this Report have the prospect of risk, uncertainty, and may result in actual developments that are materially different from those reported.

Prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current and future conditions as well as related to the Company's business environment in which the Company conducts business activities. PT Boma Bisma Indra (Persero) does not guarantee that documents that have been verified as legality will bring certain results as expected.

This annual report contains the words "PT Boma Bisma Indra (Persero)" or PT BBI (Persero) or BBI or "Perseroan" or "Company" which refers to PT Boma Bisma Indra (Persero) which is engaged in the Industrial Machinery, Management Projects and Services and Diesel Engine.

ABG DEG-001

skrija SPERAMA



KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity



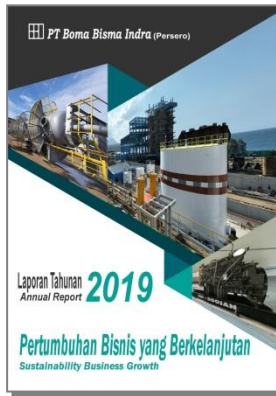
Sepanjang tahun 2020, PT Boma Bisma Indra (Persero) melaksanakan Program penguatan bisnis inti melalui produk-produk unggulannya dengan mengedepankan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) serta mengutamakan sinergi BUMN. Melalui tiga pilar program yaitu Restrukturisasi Perusahaan, Pengembangan Unit Bisnis Diesel dan Kerjasama Sinergi BUMN untuk mendukung proyek-proyek pemerintah. Hasil dari Program Restrukturisasi Perusahaan telah dirasakan mulai dari restrukturisasi organisasi, hutang, efisiensi biaya hingga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Namun pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah berpengaruh besar pada bisnis Perseroan, sehingga target Kinerja 2020 tidak tercapai bahkan mengalami sedikit penurunan. Dalam mengatasi kondisi ini, Perseroan menerapkan strategi bertahan ditengah Pandemi Covid-19 dengan harapan pada saatnya nanti di tahun 2021 dan seterusnya, setelah pandemi teratasi dengan tercapainya *herd immunity*, keberhasilan Program Restrukturisasi, Pengembangan Unit Bisnis Diesel serta Sinergi BUMN dalam meraih order, akan membuktikan bahwa PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai salah satu industri manufaktur yang berkontribusi maksimal bagi pembangunan Indonesia.

Throughout 2020, PT Boma Bisma Indra (Persero) implemented a core business strengthening program through its superior products by promoting AKHLAK (Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) and prioritizing BUMN synergy. Through the three pillars of the program, namely Company Restructuring, Diesel Business Unit Development and BUMN Synergy Cooperation to support government projects. The results of the Company's Restructuring Program have been felt, ranging from organizational restructuring, debt, cost efficiency to increased workforce productivity. However, the Covid-19 pandemic that has hit the world has had a major impact on the Company's business, so that the 2020 Performance target was not achieved and even decreased slightly. In overcoming this condition, the Company implemented a survival strategy in the midst of the Covid-19 Pandemic with the hope that in the future in 2021 and beyond, after the pandemic is resolved with the achievement of herd immunity, the success of the Restructuring Program, Development of the Diesel Business Unit and the Synergy of BUMN in achieving Orders, will prove that PT Boma Bisma Indra (Persero) is one of manufacturing industry that contributes maximally to Indonesia's development.

2020

BERTAHAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Survive During
Pandemic Covid-19



► **PERTUMBUHAN BISNIS YANG BERKELANJUTAN**

Sustainability Business Growth

Pada Tahun 2019 Perseroan memberikan pencapaian yang positif serta terus tumbuh dengan memperkuat Bisnis Inti.

In 2019, the Company made positive achievements and continues to grow by strengthening its Core Business



► **KEMAMPULABAAN BISNIS PERUSAHAAN**

Company's Business Profitability

Pada Tahun 2018 Perseroan mampu mempertahankan dan meningkatkan kemampulabaan bisnis Perusahaan

In 2018 the Company was able to maintain and increase the Company's business profitability

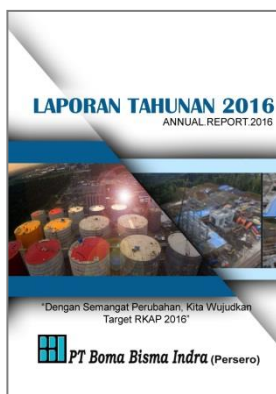


► **KERJA KERAS, CERDAS, DAN IKHLAS MEJUNU LABA**

Work Hard, Smart and Sincere to Profitable

Setelah bertahun-tahun mengalami kerugian, ditahun 2017 Perseroan mampu mencetak Laba bersih sebagai awal kebangkitan menuju Perusahaan Sehat

After years of experiencing losses, in 2017 the Company was able to score a net profit as the beginning of a revival towards a Healthy Company



► **SEMANGAT PERUBAHAN UNTUK MENCAPAI TARGET**

Spirit of Change to Achieving The Target

Dengan semangat perubahan kita wujudkan target rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2016

In the spirit of change, we will achieve the target of the 2016 corporate work plan and budget

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility





Column & Pressure Vessel Proyek Jambaran Tiung Biru

Column & Pressure Vessel of Jambaran Tiung Biru Project

Proyek Pembangunan Lapangan Gas Utilisasi Jambaran Tiung Biru (JTB) merupakan Proyek Strategis Nasional. Pada kesempatan kali ini, BBI berkontribusi sebagai *manufacturing* 20 unit *Pressure Vesel Cladding* dan 2 unit *Column* (*Selexol Regenerator dan Absorber*) yang merupakan *critical equipment* di lokasi Gas Processing Facility (GPF)-JTB.

The Jambaran Tiung Biru (JTB) Gas Utilization Field Development Project is a National Strategic Project. On this occasion, BBI contributed to manufacturing 20 units of Pressure Vesel Cladding and 2 units of Columns (Selexol Regenerator and Absorber) which are critical equipment at the Gas Processing Facility (GPF) -JTB location.



DAFTAR ISI

Table of Contents

PENDAHULUAN

Preface

iii	Tentang Laporan Tahunan About Annual Report
vi	Kesinambungan Tema Theme Continuity
x	Daftar Isi Table of Contents
xvi	Pencapaian Penting Important Achievements
xviii	Keunggulan Kami Our Advantages

KILAS KINERJA

2020 Corporate
Performances

1

3	Pilar Program “Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19” Pillar Programs “Survive Around Pandemic Covid-19”
5	Perkembangan Proyek Strategis Tahun 2020 Development of Strategic Project in 2020
7	Ikhtisar Operasional Operational Highlight
8	Ikhtisar Keuangan Financial Summary
11	Ikhtisar Saham Share Highlight
12	Peristiwa Penting 2020 Event Highlight 2020

17	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification
----	--

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

2

23	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioner's Report
33	Laporan Direksi Board of Directors Report
43	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 PT Boma Bisma Indra (Persero) Responsibility Statement of Board of Directors and Board

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

3

47	Identitas Perusahaan Corporate Identity
49	Sejarah Singkat Perusahaan Brief History of the Company
51	Jejak Langkah Milestone
55	Bidang Usaha Business Fields
59	Jaringan Bisnis dan Wilayah Usaha Business Network and Area

61	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture
64	Makna Logo & Tagline Logo and Tagline Meanings
66	Struktur Organisasi Organization Structure
67	Profil Dewan Komisaris Commissioners Profiles
69	Profile Direksi Director's Profile
71	Profile Pejabat Executive Executive Officers Profiles
77	Demografi Karyawan Employee Demographic
78	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition
80	Entitas Anak Dan/Atau Entitas Sosial Subsidiaries and/or Associated Entities
82	Lembaga/Profesi Penunjang Perusahaan Institutions/Professions Supporting Company
84	Informasi Pada Website Perusahaan Information and Company Website
86	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite, Sekretariat Perusahaan, Audit Internal Education and/or Training for The Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Units

92	Nama & Alamat Entitas Anak, Kantor Cabang, dan Kantor Divisi Names and Address of Subsidiaries, Overseas Brand Offices, and Region Offices
----	--

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

4

95	Sumber Daya Manusia Human Capital
105	Investasi Bidang Sumber Daya Manusia Investment in Human Capital
108	Teknologi Informasi Information Technology

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

5

115	Tinjauan Umum General Review
117	Tinjauan Ekonomi Economic Review
119	Tinjauan Industri Industrial Review

122	Tinjauan Operasional Operational Review	164	Prospek Usaha Perusahaan Company Business Process
127	Tinjauan Persegmen Usaha Business Segment Overview	166	Kebijakan Pembayaran Pajak Tax Payment Policy
134	Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review	176	Kebijakan Akuntansi Significant Significant Accounting Policies
152	Analisa Kinerja Rasio Keuangan Financial Ratio Performance Analyst	180	Kebijakan Perusahaan di Tahun 2020 Corporate Policy in 2020
156	Kebijakan Manajemen Struktur Modal Capital Structure Management Policy	182	Informasi Kelangsungan Usaha Capital Structure Management Policy
160	Kejadian Luar Biasa Selama Tahun 2020 Incredible Events During 2020	183	Tinjauan Keberadaan Posisi Perusahaan Overview Of Company's Position
160	Tinjauan Komponen Pendapatan Dan Beban Lain-Lain Overviews Of Other Income And Expenses Component	184	Pemenuhan Peraturan Dan Ketentuan Terkait Fulfillment Of Related And Conditions
163	Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Laporan Akuntan Material Information and Facts That Happened After Accountant's Report	185	Pernyataan Atas Pengecualian Pengungkapan Pelaporan Statement Of Exclusion Of Reporting Disclosure
		186	Penutup Closing

TATAKELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

6

189	Komitmen Perusahaan Dalam Menerapkan Tatakelola Perusahaan Company Commitment In Implementing Corporate Governance
195	Peningkatan Kualitas Penerapan Corporate Governance Corporate Governance Quality Improvements
202	Penilaian Penerapan Tatakelola Perusahaan Assessment of Good Corporate Governance
207	Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Structure And Mechanism Corporate Governance
210	Sosialisasi Dan Internalisasi Tatakelola Perusahaan Yang Baik Socialization and Internalization of Good Corporate Governance
210	Penanggungjawaban Penerapan Tatakelola Perusahaan Yang Baik Responsibilities For The Implementation of Good Corporate Governance
211	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
222	Dewan Komisaris Board of Commissioners
248	Komisaris Independen Independent Commissioners

251	Direksi Board Of Directors
270	Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy of The Board of Commissioners and Boar of Directors
273	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi Diversity Of Composition Board Of Commissioners And Director
276	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Meeting
286	Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Bodies
287	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of The Board of Directors
291	Komite Audit Audit Committee
299	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
303	Satuan Pengawas Internal Internal Control Unit
311	Akuntan Publik Public Accountant
314	Manajemen Risiko Risk Management
320	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
323	Permasalahan Hukum/Litigasi Perusahaan dan Anak Perusahaan Legal Issue Encountered by The Company and Subsidiaries

325 Akses Informasi dan Data Perusahaan

Company Data and Information Access

327 Kode Etik Perusahaan

Internal Control System

331 Kebijakan Anti Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi

Anti Corruption Policy and Gratification Control

335 Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Obligation of State Administrator Wealth Report (LHKPN)

337 Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency of Bad Governance Practices

338 Kebijakan Partisipasi Dalam Politik

Participation Policy in Politics

339 Sistem Pelaporan Pelanggaran

Violation Reporting System

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

7
343 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

345 Tanggung Jawab Sosial Di Bidang Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility in Social Sector

353 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dibidang Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)

Corporate Social Responsibility in the Field and Community Development (PKBL)

355 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi Yang Adil

Corporate Social Responsibility Related To Fair Operation

358 Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia

Corporate Social Responsibility Related to Human Right

362 Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility Related to Environment

366 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenaga Kerjaan, Kesehatan, Dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility Related to Employment, Health, and Work Safety

371 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Corporate Social Responsibility Related to Consumers

375 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab Kepada Pemasok

Corporate Social Responsibility Related to Suppliers

LAPORAN KEUANGAN AUDIT 2020

2020 Audited Financial Report

8



Erection Process: Spent Catalyst Hopper
Proyek Pembangunan Workshop dan Warehouse
Pertamina RDMP RU V-Balikpapan

Pencapaian Penting 2020

Important Achievements



KONTRAK

BARU *New Contract*

Rp **661 M**

PENJUALAN *Sales*

Rp **241 M**



LABA *Comprehensive Profit*

KOMPREHENSIF

Rp **75,7 M**

ASET *Asset*

Rp **916 M**

Pencapaian Penting 2020

Important Achievements

EKUITAS

Equity

Rp **125 M**

NILAI GCG

Score Good Corporate Governance

78 = "Baik"

Good

KESEHATAN

Health

KURANG SEHAT (B)

Unwell

KEUNGGULAN KAMI

Our Advantages

1. Kompetensi Bidang Mesin Diesel

Pada bulan Agustus tahun 2019, *launching* perdana mesin diesel, hasil kerja BBI dengan Doosan Infracore. Proyek Manufaktur Engine Nasional ini dimaksudkan untuk membangun kembali manufaktur mesin diesel dan gas di Indonesia. Kerja sama ini merupakan upaya kedua belah pihak untuk mendukung program pemerintah, dalam pemenuhan National Capacity Building (NCB) untuk mesin nasional. Kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan bisnis mesin. Mulai dari langkah awal hingga finalisasi 100 persen mesin diesel, dengan cara transfer for technology (TFT). Produk mesin diesel ini ditargetkan dapat memenuhi pasar Indonesia untuk mesin kelautan, alat berat dan pertanian, genset, dan sebagainya.

2. Kompetensi Bidang Industri Berat

Kapasitas dan Kababilitas BBI dibidang Industri berat tidak diragukan lagi. Kapasitas produksi Pabrik BBI dan Entitas 9,600 ton per tahun. Lokasi Pabrik berada di Pasuruan dan Surabaya, memiliki system manajemen mutu bersertifikat : ASME STAMP, ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001. Corecompetency industri pendukung bisnis oil and gas, power plant, agro industri, mining, chemical, and transportation. Memiliki reputasi Internasional dan produk sudah diterima di pasar global : Condensor, Boiler, Pressure Vessel, Heat Exchanger, Column (Selexols & Sulfur Absorber), Tank System dan Material Handling.

3. Penguatan Branding & Image

Berbagai upaya perbaikan dilakukan Perseroan baik aspek teknis dan non teknis. Road show yang dilakukan pihak manajemen kepada pelanggan dan pemasok untuk mempromosikan kondisi perusahaan yang membaik dan siap memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Image Perseroan dibangun dengan melakukan promosi diberbagai media yang telah berhasil mengembalikan kepercayaan pelanggan maupun mitra kerja.

1. Competence Of Diesel Engine

In August 2019, the launch of first diesel engine, the work of BBI with Doosan Infracor. The National Engine Manufacturing Project is intended to rebuild diesel and gas engine manufacturing in Indonesia. This cooperation is an effort of both parties to support the government program, in fulfilling the National Capacity Building (NCB) for national machinery. Both parties agreed to develop the machinery business. Starting from the initial step to finalize 100 percent of diesel engines, by way of transfer for technology (TFT). This diesel engine product is targeted to meet the Indonesian market for marine engines, heavy equipment and agriculture, generators, and so on.

2. Competence of Heavy Industry

There is no doubt about the capacity and capability of BBI in the heavy industry sector. The production capacity of the BBI Factory and Entities is 9,600 tons per year. Factory locations are in Pasuruan and Surabaya, have certified quality management systems: ASME STAMP, ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Corecompetency of supporting industries for oil and gas business, power plant, agro-industry, mining, chemical, and transportation. Has an international reputation and products have been accepted in the global market: Condenser, Boiler, Pressure Vessel, Heat Exchanger, Column (Selexols & Sulfur Absorber), Tank System and Material Handling.

3. Strengthening Branding & Image

Various improvement efforts have been carried out by the Company in terms of both technical and non-technical aspects. Road shows conducted by the management to customers and suppliers to promote the company's back to an improved condition and are ready to provide the highest quality service. Image The Company to built by conducting promotions in various media that have succeeded in

returning the trust of customers and business partners

4. Pembentukan Holding Industri Manufaktur

Sinergi BUMN semakin menguat melalui pendekatan bisnis di tingkat eksekutif dengan dibentuknya klaster Industri Manufaktur sebagai cikal bakal Holding bersama Barata Indonesia, INKA, IKI, DPS, DKB & REKIN. Adanya sinergi industri manufaktur ini diharapkan memberikan keuntungan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas manufaktur penguatan struktur pendanaan, efisiensi dan melakukan penghematan biaya investasi dengan sinergi perencanaan pembangunan. Selain itu pembentukan Klaster Industri Manufaktur ini bertujuan untuk melakukan restrukturisasi terpadu dalam rangka penyehatan dan pengembangan BUMN Industri Manufaktur agar menjadi kuat dan berdaya saing untuk meningkatkan peran sektor industri menuju Indonesia Maju.

4. Establishment of Holding Manufacturing Industry

BUMN synergy is getting stronger through a business approach at the executive level with the formation of the Manufacturing Industry cluster as the forerunner of Holding together with Barata Indonesia, INKA, IKI, DPS, DKB & REKIN. The synergy of the manufacturing industry is expected to provide benefits for building infrastructure and manufacturing facilities, strengthening the funding structure, efficiency and saving investment costs with the synergy of development planning. In addition, the establishment of the Manufacturing Industry Cluster aims to carry out an integrated restructuring in the context of restructuring and developing BUMN Manufacturing Industries to become strong and competitive to increase the role of the industrial sector towards an advanced Indonesia.

5. Penguatan Sumber Daya Manusia

Terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mampu mendukung operasional teknis dan non teknis. Berbagai aktifitas peningkatan kompetensi berupa assessment serta pelatihan-pelatihan yang bersifat inhouse dan outhouse dilakukan secara terstruktur. Training dari Tim Doosan Infracor dalam rangka Transfer for Teknologi bertahap dilaksanakan untuk penguatan tim Sales dan Engineer BBI dalam memperkuat bisnis Diesel.

5. Strengthening Human Resources

There is an increase in the quality and quantity of human resources that can support technical and non-technical operations. Various competency improvement activities in the form of assessments and internal and external trainings are conducted in structurally. Training from the Doosan Infracor Team in the context of the Transfer for Technology gradually carried out to strengthen the Sales and Engineer team of BBI in strengthening the Diesel business.





The background image shows a large, grey, cylindrical industrial vessel, possibly a storage tank or part of a refinery, being transported on a blue multi-axle flatbed trailer. The vessel has several smaller cylindrical sections and flanges. Yellow lifting equipment is visible on the left side of the vessel. The scene is set outdoors on a paved area under a blue sky with some clouds.

01

KILAS KINERJA 2020

2020 Corporate Performances

PILAR PROGRAM

“BERTAHAN DITENGAH PANDEMI COVID-19”

Pillar Program “Survive Around Pandemic Covid-19”

VISION

Regional Leader in the manufacturing industrial equipment and diesel engine.



COMPANY RESTRUCTURING



Debt
Restructuring



Strengthening
Company's
Working
Capital



Cost Efficiency



Marketing, Sale,
Operation



Re-Organization



DEVELOPING DIESEL BUSINESS UNIT



Service & After
Market Spare Part



Diesel
development



Construction of
Assembly & CKD
Preparation
Facilities



Engine Business
Application



BUMN SYNERGY TO GET NEW ORDER



Marketing &
Sales

RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN Corporate Restructuring	PENGEMBANGAN UNIT BISNIS DIESEL Developing Diesel Business Unit	SINERGI BUMN UNTUK MERAH ORDER BARU BUMN synergy to get new orders
<p>Restrukturisasi Hutang Melakukan relaksasi pembayaran utang Perseroan (hutang & bunga) Penyelesaian hutang PPA.</p> <p>Penguatan Modal Kerja Perseroan Dengan menjaga kepercayaan yang diberikan bank & Lembaga keuangan nonbank serta pendanaan investasi dari lembaga keuangan non bank.</p> <p>Efisiensi Biaya Mengurangi biaya Operasional di segala lini untuk mencapai profitabilitas dan sustainability.</p> <p>Pemasaran, Penjualan & Operasional Melakukan penguatan bisnis <i>heavy Industry</i> dan Mesin <i>Diesel</i>; Meningkatkan kemampuan Engineering; Ontime delivery dan kepuasan pelanggan. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen terintegrasi.</p> <p>Penataan Organisasi Struktur Organisasi yang lebih Optimal dan fleksibel untuk menghadapi tantangan, perubahan dan volume usaha dengan membangun kapabilitas tenaga kerja untuk mendorong dan mempertahankan kemampuan serta peningkatan produktivitas.</p> <p>Debt Restructuring Relaxing Company's debt payments (debt & interest). PPA debt settlement.</p> <p>Strengthening working capital By maintaining the trust given by banks & non-bank financial institutions as well as investment funding from non-bank financial institutions.</p> <p>Cost Efficiency Reducing operational costs on all fronts to achieve profitability and sustainability.</p> <p>Marketing, Sales & Operations Strengthening the Heavy Industry and Diesel Engine business; Improve engineering skills; On time delivery and customer satisfaction. Development of an integrated Management Information System.</p> <p>Organizational Arrangement A more optimal and flexible organizational structure to face challenges, changes and business volume by building workforce capabilities to encourage and maintain capabilities and increase productivity</p>	<p>Membangun Industri Diesel Nasional, Program kerja tahun 2020 : Service & After Market Spare Part Perluasan Jaringan Service & After Market Spare Part</p> <p>Pengembangan Biodiesel B20-B30</p> <p>Pembangunan Fasilitas Assembly & Persiapan CKD Konsep Desain</p> <p>Engine Business Application Untuk Palm Oil Transporter, Gasifikasi & Kapal Ikan</p> <p>Building the National Diesel Industry, 2020 work program: Service & After Market Spare Part Expansion of Service & After Market Spare Part Network</p> <p>Biodiesel Development B20-B30</p> <p>Construction of CKD Assembly & Preparation Facilities Design Concept</p> <p>Business Application Engine For Palm Oil Transporter, Gasification & Fishing Vessels</p>	<p>Pemasaran & Penjualan Bersama PT Barata Indonesia membentuk Divisi Usaha bersama. Membentuk klaster Industri Manufaktur sebagai cikal bakal holding untuk mengefisienkan rantai pasok bersama Barata Indonesia, INKA, IKI, DPS, DKB & REKIN dibawah pembinaan Danareksa-PPA. Diharapkan dengan terbentuknya Holding BUMN Industri Manufaktur menjadi besar, kuat, kompetitif dan lincah.</p> <p>Marketing & Sales Together with PT Barata Indonesia to form a joint Business Division. Forming a Manufacturing Industry cluster as the embryo of holding to streamline the supply chain with Barata Indonesia, INKA, IKI, DPS, DKB & REKIN under the guidance of Danareksa-PPA. It is hoped that with the formation of BUMN Holding, the Manufacturing Industry will become big, strong, competitive and agile.</p>

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

PERKEMBANGAN PROYEK STRATEGIS

TAHUN 2020

Development of Strategic Projects in 2020



PEMBANGUNAN LAPANGAN GAS UTILISASI PROYEK JAMBARAN TIUNG BIRU (JTB)

Manufacturing 20 unit Pressure
Vessel Cladding & 2 unit Column.

100%

Memasok gas untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah sebanyak 172 juta MMSCFD. Mendukung kelistrikan Jawa-Bali.

To supply gas for East Java and Central Java with 172 million MMSCFD. Supports Java-Bali electricity



REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN (RDMP) PERTAMINA BALIKPAPAN

Manufacturing Pipa Pancang Ba
Proyek EPC - Relokasi Flare BPP

100%

Menambah kapasitas produksi sebesar 100.000 barel per hari dan memproduksi kualitas bensin EURO V.

Increase production capacity by 100,000 barrels per day and produce quality gasoline EURO V.



PEMBANGUNAN KILANG REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN (RDMP) PERTAMINA BALIKPAPAN

Manufacturing Pressure Vessel (PV):

- a. Small Vessels 29 units
- b. Medium Vessels 48 units
- c. PV (SRU/HRU) 15 units

71%

Meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260 menjadi 360 ribu barel per hari serta meningkatkan kualitas produk BBM menjadi setara Euro V.

Increase refinery processing capacity from 260 to 360 thousand barrels per day and improve the quality of fuel products to be equivalent to Euro V

REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN (RDMP) PERTAMINA BALONGAN

Manufacturing Column dan
Pressure Vessel

57%

Meningkatkan fleksibilitas unit pengolahan & meningkatkan kapasitas produksi dari 125 ribu menjadi 150 ribu barel per hari (MBSD)

Increase the flexibility of processing units & increase production capacity from 125 thousand to 150 thousand barrels per day (MBSD)



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASCA PANEN MODEREN PERUM BULOG

Engineering, Procurement & Construction (EPC) :

a. Rice Milling Plant (MRMP) 2 Lot
Jember, Banyuwangi, Sumbawa,
Bojonegoro, & Magetan.

(menggunakan diesel engine
generator 5 unit)

b. Rice to Rice (RTR). 2 Lot

DKI Jakarta, Indramayu, Makasar
Sidrap, Sukoharjo, Sidoarjo & Lombok 11 mur
(menggunakan diesel engine generator 7 unit)

33%

Mendukung Pemerintah dalam program kedaulatan pangan dengan meningkatkan hasil mutu produksi menjadi beras kualitas premium.

Supporting the Government in the food sovereignty program by increasing the quality of production to become premium quality rice.



PROYEK AKASIA BAGUS PERTAMINA EP INDRAMAYU

Gas Engine Generator 2 unit
Diesel Engine Generator 1 unit

100%

Meningkatkan produksi minyak PT Pertamina EP dalam mewujudkan ketahanan energi nasional

Increasing oil production of PT Pertamina EP in realizing national energy security



IKHTISAR OPERASIONAL

Operational Highlight

Order Masuk

New Contract

(dalam Jutaan Rupiah)

(in Million Rupiah)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Divisi Mesin Peralatan Industri	121.823	124.551	207.762	108.669	72.992	Industrial Equipment Machinery Division
Divisi Manajemen Proyek & Jasa	452.778	65.184	150.308	141.167	119.970	Project Management & Services Division
Divisi Diesel	14.433	27.154	1.332	0	0	Diesel Division
Entitas Anak (PT Bosto)	71.839	78.168	64.782	54.970	41.962	Subsidiaries
Total Order Masuk	660.873	295.057	424.184	304.806	234.924	Total new contracts

Penjualan

Sales

(dalam Jutaan Rupiah)

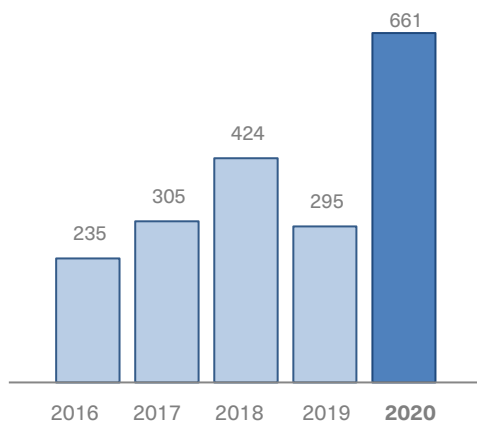
(in Million Rupiah)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Divisi Mesin Peralatan Industri	78.241	65.800	82.626	105.536	63.302	Industrial Equipment Machinery Division
Divisi Manajemen Proyek & Jasa	72.344	128.900	120.700	103.053	83.371	Project Management & Services Division
Divisi Diesel	13.061	-	-	-	-	Diesel Division
Entitas Anak (PT Bosto)	77.682	71.804	61.600	54.897	31.898	Subsidiaries
Total Penjualan	241.328	266.504	264.926	263.486	178.571	Total Sales

Total Order Masuk

Total New Contract

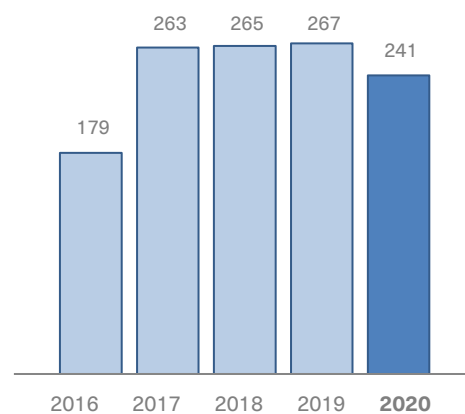
(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



Total Penjualan

Total Sales

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Summary

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statements of Financial Position

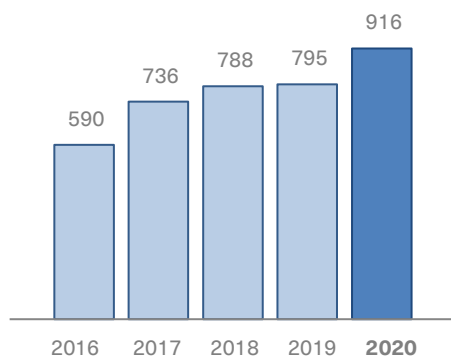
dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Aset Lancar	366.124	397.315	395.895	316.800	170.651	Current Assets
Aset Tidak Lancar	550.243	397.805	392.374	419.155	419.167	Non-Current Assets
Jumlah Aset	916.366	795.120	788.269	735.955	589.818	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	613.619	520.789	436.619	413.238	325.887	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	177.887	186.643	206.887	96.336	32.534	Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	791.506	707.432	643.506	509.574	358.421	Total Liabilities
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada:						Equity Attributable to :
Pemilik Entitas Induk	124.907	87.737	144.847	226.491	231.446	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	(47)	(49)	(84)	(110)	(49)	Non-Controlling Interests
Jumlah Ekuitas	124.860	87.688	144.763	226.381	231.397	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	916.366	795.120	788.269	735.955	589.818	Total Liabilities & Equity

Total Aset

Total Assets

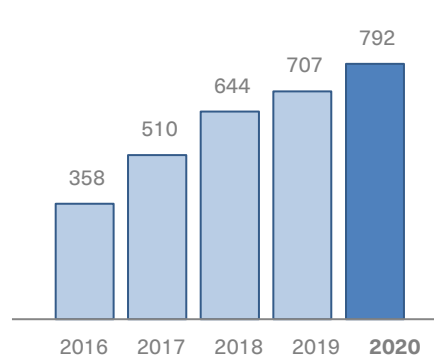
(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



Total Liabilitas

Total Liabilities

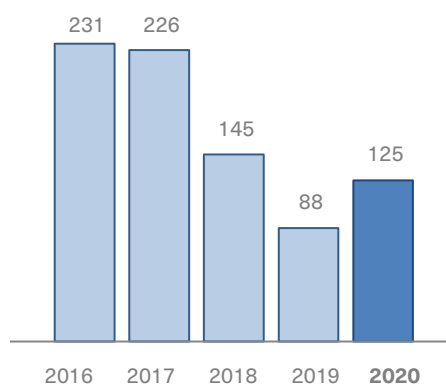
(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



Total Ekuitas

Total Equity

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit or Loss Other Comprehensive Income

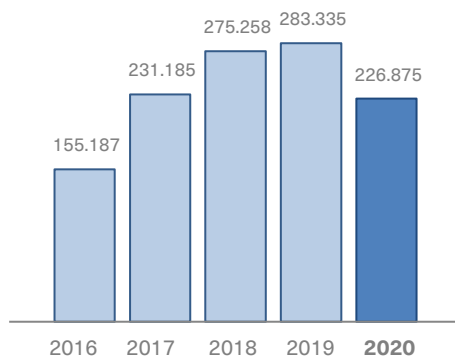
dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Penjualan	241.328	266.504	264.926	263.485	178.571	Revenue
Harga Pokok Penjualan	(226.875)	(283.335)	(275.258)	(231.185)	(155.187)	Cost of Good Sold
Laba/(Rugi) Kotor	14.453	(16.831)	(10.333)	32.300	23.384	Gross Profit
Beban Usaha	(73.388)	(36.626)	(36.661)	(25.650)	20.719	Operating Expense
Laba/(Rugi) Usaha	(58.934)	(53.456)	(46.994)	6.650	2.665	Operation Income
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(6.882)	5.366	(1.251)	(4.073)	(12.883)	Other Income (Expenses)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	(65.816)	(48.090)	(48.245)	2.577	(10.218)	Income/(Loss) before tax
Beban/(Manfaat) Pajak Penghasilan	(7.642)	4.990	5.991	(751)	514	Income Tax Expenses / (Benefits)
Laba Bersih Tahun berjalan	(73.458)	(43.100)	(42.253)	1.826	(9.704)	Net Profit (Loss) for The Year
Pendapatan Komprehensif lain	149.143	(2.973)	(5.536)	(5.152)	566	Comprehensive income
Laba Komprehensif tahun berjalan	75.684	(46.073)	(47.789)	(3.326)	(9.138)	Income Comprehensive for the year
Laba /(Rugi) Komprehensif Tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						Comprehensive Income /(Loss) for the year Attributable to
Pemilik Entitas Induk	75.681	(46.091)	(47.815)	(3.372)	(9.152)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	3	18	25	46	15	Non-controlling Interests
Total	75.684	(46.073)	(47.790)	(3.326)	(9.137)	Total

Harga Pokok Penjualan

Cost of Good Sold

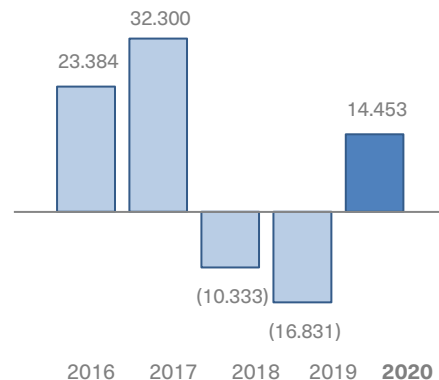
(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



Laba (Rugi) Kotor

Gross Profit (Loss)

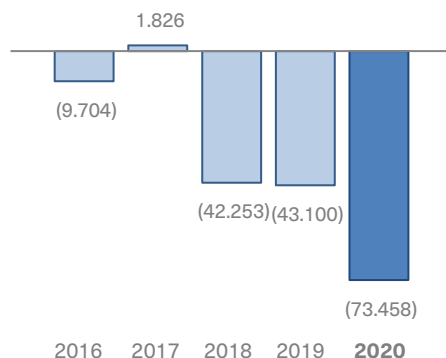
(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Net Profit (Loss) for The Year

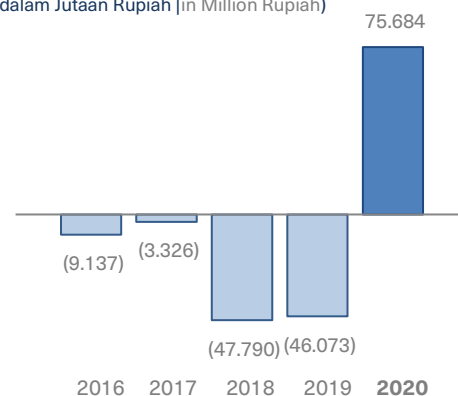
(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



Laba Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Net Profit

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



Rasio-Rasio Keuangan

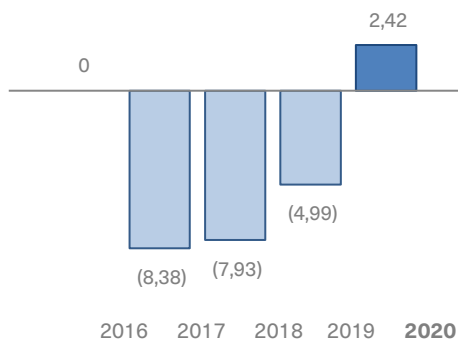
Financial Ratios

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	Description
						LIQUIDITY (%)
Arus Kas Operasi (Rp Juta)	2,42	(4,99)	(7,93)	(8,38)	0,08	Operating Cash Flow (Million Rupiah)
Rasio Lancar	59,67	76,29	90,67	76,66	52,37	Current Ratio
Rasio Kas	6,83	2,91	2,90	7,18	3,5	Gross Profit
						PROFITABILITY (%)
EBITDA (Rp Juta)	(50.785)	(39.482)	(38.284)	10.378	2.010	EBITDA (Million Rupiah)
Rasio Margin Laba/(Rugi) kotor	5,99	(6,32)	(3,90)	12,26	13,10	Gross Profit Margin Ratio (GPM)
Rasio Margin Laba/(Rugi) Usaha	(24,42)	(20,06)	(17,74)	2,52	1,49	Operating Profit Margin Ratio (OPM)
Rasio Margin Laba/(Rugi) Bersih	(30,44)	(16,17)	(15,95)	0,69	(5,43)	Net Profit Margin Ratio (NPM)
Rasio Pengambilan atas Ekuitas	60,62	(52,54)	(33,01)	(1,47)	(3,95)	Return on Equity Ratio (ROE)
Rasio Total Hutang terhadap Investasi	(5,54)	(4,97)	(4,86)	1,41	0,34	Total Liabilities To Investment Ratio (ROI)
						SOLVABILITY (kali)
Debt to EBITDA	(1.559)	(1.792)	(1.681)	4.910	17.832	Debt to EBITDA
Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas	6,34	8,07	4,45	2,25	1,55	Debt To Equity Ratio (DER)
Rasio Total Hutang terhadap Asset	0,86	0,77	0,70	0,56	0,39	Debt To Asset Ratio (DAR)
						AKTIVITAS
Rasio Perputaran Persediaan (hari)	170	85	100	39	13	Inventory Turn Over (Day)
Rasio Perputaran Piutang (hari)	51	162	172	89	287	Collection Period (Day)
Rasio Perputaran Total Aset (%)	13,63	11,03	18,36	30,76	39,23	Collection Period (%)

Arus Kas Operasi

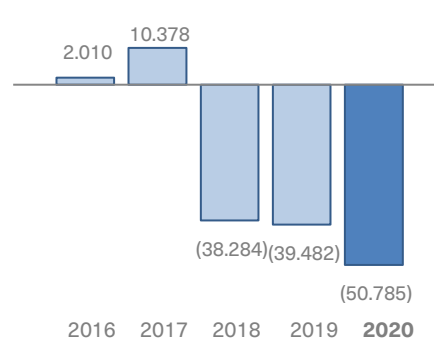
Operating Cash Flow

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



EBITDA

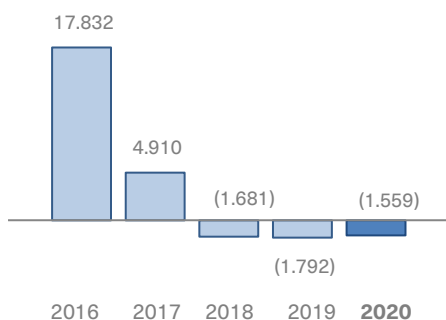
(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



Debt to EBITDA

(Kali | Times)

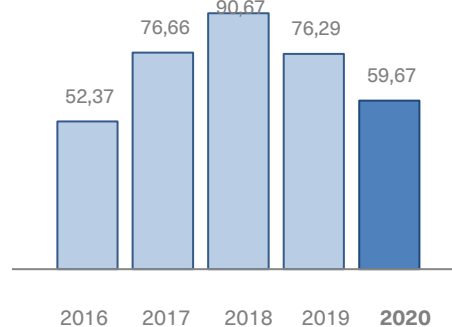
(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)



Rasio Lancar

Current Ratio

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)





IKHTISAR SAHAM

Share Highlight

Saat ini PT Boma Bisma Indra (Persero) belum terdaftar sebagai perusahaan Go Public. Seluruh modal saham dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia.

At present PT Boma Bisma Indra (Persero) has not been registered as a Go Public Company. All share capital is owned by the Republic of Indonesia's government..

IKHTISAR OBLIGASI / SUKUK / OBLIGASI KONVERSI

Bond / Sukuk Overview / Convertible Bonds

Hingga 31 Desember 2020, PT Boma Bisma Indra (Persero) belum pernah menerbitkan obligasi/ sukuk/ obligasi konversi atau efek dalam bentuk apapun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/ sukuk/ obligasi konversi yang beredar (outstanding), tingkat bunga/ imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/ sukuk yang dapat disampaikan pada Laporan Tahunan ini.

Until 31 december 2019, PT Boma Bisma Indra (Persero) had never issued bonds / sukuk / convertible bonds or securities in any form, so there was no information regarding the number of outstanding bonds / sukuk / convertible bonds, interest rates / rewards, dates maturity and bond / sukuk rating that can be submitted in this Annual Report.

PERISTIWA PENTING 2020

Event Highlight 2020



Sarasehan Millenial merupakan kegiatan rutin tahunan, pada tahun ini mengusung Tema “Millenial BBI Pelopor Perubahan”

Sarasehan for Millenial is an annual routine activity, this year raised the theme "Millennial BBI Pioneers of Change"

10 Januari 2020



Sebagai tindak lanjut penugasan Kementerian BUMN dalam meningkatkan nilai tambah. PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Boma Bisma Indra (Persero) menandatangani perjanjian **Pembentukan Divisi Usaha Bersama sekaligus Kick Off Program Percepatan Pembangunan Kilang PT Pertamina.**

As a follow-up to the Ministry of BUMN's assignment to increase added value. PT Barata Indonesia (Persero) and PT Boma Bisma Indra (Persero) signed an agreement to form a Joint Business Division as well as a Kick Off Program for the Acceleration of PT Pertamina Refinery Development

20 Januari 2020



Pengiriman ABSORBER untuk memenuhi pesanan dari PT Rekayasa Industri - Pertamina EP Cepu untuk proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru - Bojonegoro.

The ABSORBER delivery fulfilled an order from PT Rekayasa Industri - Pertamina EP Cepu for the Jambaran-Tiung Biru - Bojonegoro Unitization Field Gas Development project.

6 Februari 2020



Pengiriman SPENT CATALYST HOPPER memenuhi pesanan dari PT.PP (Persero) untuk Proyek Pembangunan Workshop & Warehouse Pertamina RDMP RU V Balikpapan.

The delivery of the SPENT CATALYST HOPPER fulfilled the order from PT.PP (Persero) for the Pertamina RDMP RU V Balikpapan Workshop & Warehouse Development Project.

18 Februari 2020

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility



Pelantikan dan Pelaksanaan Raker RKAP 2020 dilaksanakan di Hotel Singgasana dengan Tema “Sinergi Harmoni dan Profesional Untuk Meraih Sukses Target RKAP 2020”

Inauguration and Implementation of the RKAP Meeting at Singgana Hotel with the theme “Harmonious and Professional Synergy to Achieve Successful RKAP 2020 Target”

20 Februari 2020



Focus Group Discussion Pemahaman dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau biasa disebut PSAK 72. PSAK 72 dipimpin oleh Bapak Aang Kunaifi SE., M.SA.Ak selaku Komite Audit PT BBI

Focus Group Discussion on Understanding and Application of Statement of Financial Accounting Standards or commonly known as PSAK 72. PSAK 72 is led by Mr. Aang Kunaifi SE., M.SA.Ak as the Audit Committee of PT BBI

4 Maret 2020



Sosialisasi Penyebaran dan Pencegahan Covid-19 di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Perseo)

Socialization of “How can Covid-19 spread and how to take prevention of Covid-19 in PT Boma Bisma Indra (Perseo)”

17 Maret 2020



Exit meeting assessment GCG 2019 oleh BPKP Jatim. Dalam exit meeting tersebut, BBI memperoleh nilai 75.293 dengan kategori “cukup baik”

The GCG 2019 exit meeting assessment by the East Java BPKP. In the exit meeting, BBI received a score of 75,293 in the “good enough” category.

18 Maret 2020



Pemberian Santunan Kepada Panti Asuhan, Fakir Miskin, dan Anak Yatim sebagai wujud Corporate Social Responsibility (CSR)

Providing Compensation to Orphanages, the Poor, and Orphans As a form of Corporate Social Responsibility (CSR)

21 Mei 2020



RUPS Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 di PT BBI

disetujui. Indeks penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) tahun 2019 dengan klasifikasi "Cukup Baik" (75,29), sedangkan untuk hasil penilaian KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) mendapatkan klasifikasi "Early Improvement" dengan nilai 398.25

GMS Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the 2019 Fiscal Year at PT BBI is approved. The assessment index for the implementation of Corporate Governance (GCG) in 2019 is classified as "Good Enough" (75.29), while the results of the KPKU assessment (Superior Performance Assessment Criteria) are classified as "Early Improvement" with a value of 398.25

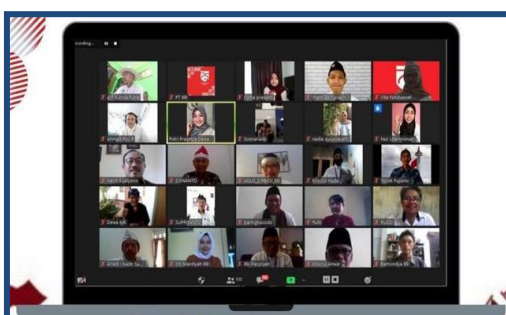
30 Juni 2020



Pisah sambut Komisaris Utama PT BBI berlangsung di PT BBI, dihadiri oleh Direksi, BOD-1, Bapak Masrokan selaku Komisaris Utama PT BBI periode saat ini dan Bapak Arman selaku Komisaris Utama periode sebelumnya.

The farewell of the President Commissioner PT BBI took place at PT BBI, attended by Directors, BOD-1, Mr. Masrokan as the President Commissioner of PT BBI for the current period and Mr. Arman as the President Commissioner of the previous period.

29 Juli 2020



Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 75 secara virtual. Sebelum Hari-H, peserta diminta untuk mempersiapkan baju adat untuk digunakan upacara.

Virtually 75th Anniversary of the Republic of Indonesia. Before the D-Day, participants are asked to prepare traditional clothes for the ceremony.

17 Agustus 2020



Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun BBI ke-49 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dilakukan secara terpisah di masing-masing ruangan dan virtual.

49th anniversary of PT BBI have implemented with health protocols. Performed separately in each room and virtual.

30 Agustus 2020



Tasyakuran perolehan order Bulog, BBI berikan bantuan untuk panti asuhan dan beasiswa kepada yatim piatu.

Tasyakuran order for Bulog, BBI provided assistance for orphanages and scholarships for orphans

10 September 2020



Covid Rangers BBI membagikan masker kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk dukungan perusahaan atas program Pemerintah "Wajib Masker"

The BBI Covid Rangers distributed masks to the surrounding community as a form of company support for the Government's "Mandatory Mask" program.

30 September 2020



PT Boma Bisma Indra (Persero) menjalani audit eksternal Sitem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dari PT Sucofindo.

PT Boma Bisma Indra (Persero) underwent an external audit of the Anti-Bribery Management System (SMAP) ISO 37001: 2016 from PT Sucofindo.

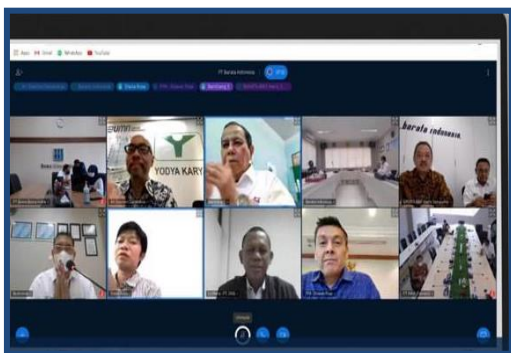
9 November 2020



PT BBI telah menuntaskan pesanan 20 Pressure Vessel untuk Proyek Pengembangan Gas Utilisasi Jambaran Tiung Biru.

PT BBI has completed an order for 20 Pressure Vessels for the Jambaran Tiung Biru Gas Utilization Development Project.

25 November 2020



Penandatanganan perjanjian kerjasama strategis sinergi bisnis antara PT Barata Indonesia, PT BBI, PT DKB, PT DPS, PT IKI, dan PT INKA untuk meneruskan sinergitas dan kerjasama bisnis sesuai roadmap yang telah disusun.

The signing of a strategic business synergy agreement between PT Barata Indonesia, PT BBI, PT DKB, PT DPS, PT IKI, and PT INKA to continue the synergy and business cooperation according to the roadmap that has been prepared.

11 Desember 2020



Komisaris Utama BBI kunjungi Workshop BBI Pasuruan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kondisi workshop serta jalannya proses produksi.

The President Commissioner of BBI visits the BBI Pasuruan Workshop. The visit was aimed to directly observe the conditions of the workshop and the course of the production process.

17 Desember 2020



Surveillance Audit ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 oleh TUV Rheinland bertujuan untuk melakukan audit pengawasan terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan.

Surveillance Audit ISO 9001: 2015, 14001: 2015, 45001: 2018 by TUV Rheinland aims to conduct surveillance audits of the implementation of the Quality, K3 and Environmental Management System.

29 Desember 2020

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 2020

Awards and Certifications 2019



 LAPORAN KINERJA SUPPLIER			
Diberikan Kepada:			
PT Boma Bisma Indra			
Hasil penilaian kinerja perusahaan periode 2019-2020 di PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat			
Indikator	Bobot	Level (1-5)	Nilai
Aspek Integritas	20%	4.00	0.8
Aspek Kerja Sama	15%	2.00	0.3
Aspek Mutu	15%	4.00	0.6
Aspek Waktu	15%	4.00	0.6
Aspek Harga	15%	3.50	0.53
Aspek Pelaksanaan Norma K3	5%	4.00	0.2
Aspek Pelaksanaan Norma Lingkungan	5%	4.00	0.2
Aspek Pelaksanaan Norma Keselamatan	5%	4.00	0.2
Aspek Pelaksanaan Norma Man. Energi	5%	4.00	0.2
TOTAL NILAI			3.43
PREMIAT			GOOD
<p>Atas nama manajemen PT PJB kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan selamat atas kinerja Saudara, mohon dapat ditingkatkan lagi.</p> <p>Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Surabaya, 16 Desember 2020</p>  <p>MIFFAHUT HUDA Regional Director Supply Chain Management</p>			

Penghargaan

Awards

No.	Jenis Penghargaan Awards	Pemberi Awarded by	Periode Period
1	Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER Peringkat BIRU)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	2019-2020
2	Laporan Kinerja Supplier: GOOD	PT Pembangkit Jawa Bali	2019-2020



Sertifikasi Certification

No.	Jenis Sertifikasi Certification	Instansi Penerbit Issuer	Masa Berlaku Expired Date
1.	ASME _s	American Society of Mechanical Engineer	20/12/2018 - 22/12/2021
2.	ASME _u	American Society of Mechanical Engineer	20/12/2018 - 22/12/2021
3.	ASME _{u2}	American Society of Mechanical Engineer	20/12/2018 - 22/12/2021
4.	ISO 9001:2015	TUV Rheinland	01/02/2020 - 27/01/2023
5.	ISO 14001:2015	TUV Rheinland	01/02/2020 - 27/01/2023
6.	ISO 45001:2018	TUV Rheinland	01/02/2020 - 27/01/2023
7.	ISO 37001:2016	Sucofindo	08/12/2020 - 07/12/2023





02

LAPORAN MANAJEMEN 2020

Management Report

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengelola Perseroan menghasilkan Sinergi yang mampu mempertahankan Kinerja Perseroan.

”

Good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors in managing the Company produces synergies that are able to maintain the Company's performance.



Masrokan

Komisaris Utama
President Commissioner

“

Melalui aktifitas pengawasan secara ketat, Dewan Komisaris menilai, Direksi telah berhasil mempertahankan kinerja Perseroan, ditengah Pandemi Covid-19 dengan berbagai tantangan selama Tahun 2020.

Through strict supervisory activities, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has succeeded in maintaining the Company's performance, amidst the Covid-19 Pandemic with various challenges during 2020.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Mengawali penyajian Laporan Dewan Komisaris, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PT Boma Bisma Indra (Persero) dapat melalui tahun 2020 dengan capaian kinerja cukup baik.

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat secara independen kepada Direksi sesuai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi Ekonomi Global dan Nasional

Bencana Pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian global dan nasional secara dalam. Meski demikian, kondisi ekonomi nasional masih cenderung lebih baik dibandingkan dengan kondisi global.

Pada awal tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dunia dimulai dengan optimisme yang cukup baik. World Economic Outlook (WEO) dari IMF saat itu diperkirakan mencapai 3,3%. Amerika Serikat-China melakukan perundingan hubungan dagang dalam tahap pertama dan Brexit pun masuk dalam masa transisi. Namun kondisi ekonomi mulai tampak suram ketika masuk pertengahan Maret, yakni dengan pengumuman pandemi Covid-19 oleh WHO. Pandemi membuat berbagai negara di dunia menerapkan restriksi atau pembatasan yang berpengaruh pada volatilitas harga komoditas.

Pada pertengahan tahun 2020, IMF mengeluarkan proyeksi kinerja ekonomi dunia menjadi -4,9%. Namun pada triwulan IV-2020 kondisi ekonomi mulai membaik dengan mulai dilakukan vaksinasi secara terbatas di Rusia maupun di China, selain itu terpilihnya Joe Biden pada pemilihan umum Amerika memberi optimisme pada pelaku ekonomi dan kontraksi

Dear Shareholders and Stakeholders,

Starting the presentation of the Board of Commissioners' Report, we are grateful for the presence of God Almighty who has bestowed His grace and grace on all of us, so that PT Boma Bisma Indra (Persero) can go through 2020 with quite good performance achievements.

The Board of Commissioners has independently supervised and provided advice to the Board of Directors in accordance with the duties, powers, obligations and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Global and National Economic Conditions

The Covid-19 pandemic disaster has deeply pressed the global and national economy. Even so, national economic conditions still tend to be better than global conditions.

At the beginning of 2020, world economic growth began with good optimism. At that time, the World Economic Outlook (WEO) was estimated at 3.3%. The United States-China is conducting trade relations negotiations in the first stage and Brexit is entering into a transition period. However, economic conditions began to look gloomy when it entered mid-March, with the announcement of the Covid-19 pandemic by WHO. The pandemic has made various countries in the world impose restrictions or restrictions that affect the volatility of commodity prices.

In mid-2020, the IMF issued a projection of world economic performance to be -4.9%. However, in the fourth quarter of 2020, economic conditions began to improve with limited vaccinations started in Russia and in China. In addition, the election of Joe Biden in the US general election gave economic players optimism and the US economic contraction

ekonomi Amerika Serikat mulai melunak. Begitu juga dengan Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, Tiongkok dan Vietnam mempertahankan pertumbuhan positif. Seiring membaiknya kondisi global, harga komoditas internasional mengalami peningkatan.

Kondisi perekonomian global terus membaik yang ditunjukkan oleh kontraksi ekonomi di berbagai negara yang semakin kecil. Meskipun kasus Covid-19 secara global masih terus meningkat dan dibayangi oleh mutasi baru, ketersediaan vaksin menjadi harapan pemulihan ekonomi global.

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Sepanjang tahun 2020, Perseroan melaksanakan Program penguatan bisnis inti melalui produk-produk unggulannya dengan mengimplementasikan Core Value AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Selain melakukan Restrukturisasi Perusahaan, Perseroan fokus pada penguatan kepercayaan kepada konsumen dan strategi partnership melalui Sinergi BUMN untuk meraih order.

Penyelesaian restrukturisasi utang PPA, KMK, dan Pihak ke-III merupakan hal yang patut kami apresiasi tinggi, mengingat restrukturisasi utang tersebut akan mendukung keuangan Perseroan menjadi lebih sehat. Dengan beban bunga dan kewajiban pembayaran pokok pinjaman yang lebih ringan, sehingga Perseroan dapat terus melakukan perbaikan kinerjanya dan memperkuat arus kas.

Dewan Komisaris mendukung upaya strategi pengembangan Unit Bisnis Diesel dengan Alih teknologi (*Transfer For Technology/TFT*) bekerja sama dengan Doosan Infracor guna menjamin kelangsungan Bisnis BBI.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah regenerasi karyawan dan peningkatan *leadership* dan sertifikasi kompetensi untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif. Juga membentuk Tim Satgas Covid-19 dalam menanggulangi dan menangani bencana pandemic Covid-19 untuk menjamin Perusahaan tetap berjalan dengan normal.

began to soften. Likewise with Japan and South Korea. Meanwhile, China and Vietnam maintained positive growth. As global conditions improve, international commodity prices have increased.

Global economic conditions continued to improve, as indicated by the smaller economic contraction in various countries. Although Covid-19 cases globally continue to increase and are overshadowed by new mutations, the availability of vaccines is the hope for global economic recovery.

Assessment of the Performance of the Board of Directors

Throughout 2020, the Company implemented a core business strengthening program through its superior products by implementing the AKHLAK Core Values (Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative). In addition to conducting Company Restructuring, the Company focuses on strengthening trust in consumers and a partnership strategy through BUMN Synergy to obtain orders.

The settlement of PPA, KMK, and Third Party debt restructuring is something that we should highly appreciate, considering that the debt restructuring will support the Company's finances to be healthier. With lighter interest expenses and loan principal repayment obligations, the Company can continue to improve its performance and strengthen cash flow.

The Board of Commissioners supports the strategic efforts to develop the Diesel Business Unit with technology transfer (*Transfer For Technology / TFT*) in collaboration with Doosan Infracor to ensure the continuity of the BBI Business.

The Board of Commissioners also appreciates the steps for employee regeneration and increased leadership and competency certification to prepare Competitive Human Resources. Also formed a Covid-19 Task Force Team to cope with and deal with the Covid-19 pandemic disaster to ensure the Company continues to run normally.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Di sisi keuangan, Dewan Komisaris berharap Direksi dapat terus meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan. Realisasi penjualan Perseroan tercatat sejumlah Rp 241.328 juta dari Rp 523 Milyar. Selain itu akibat Pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas perkantoran dan kegiatan publik lainnya dan lockdown yang diperlakukan beberapa negara semakin memperberat bisnis BBI. Kami mengapresiasi Perseroan yang masih mampu membukukan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 75.684 juta.

Dengan mengacu pada penilaian, baik yang dilaksanakan oleh lembaga independen maupun penilaian secara mandiri, Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi atas pengelolaan Perseroan selama tahun 2020 telah mengarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan dengan pokok-pokok capaian sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Berdasarkan perhitungan rasio keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi, BBI pada tahun 2020 memperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan dengan skor 32,0 predikat "Kurang Sehat (B)" sebagaimana Peraturan Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002.

2. Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Hasil penilaian internal atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan tahun 2020 sebesar 78,105 dengan klasifikasi "Baik". Mengalami peningkatan bila dibandingkan hasil penilaian di tahun 2019 sebesar 75,293 dengan klarifikasi "Cukup Baik".

3. Opini Audit Independen

Opini Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar (RSM AAJ) adalah Wajar tanpa Pengecualian dalam semua hal yang material, dan Perseroan berhasil mempertahankan opini tersebut dari tahun-tahun sebelumnya Dewan.

Direksi BBI telah bekerja maksimal dalam memperbaiki kinerja Perusahaan, meski masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan. Dewan Komisaris tetap mengingatkan Direksi

On the financial side, the Board of The Board of Directors can continue to improve its performance in a sustainable manner. The realization of the Company's sales was recorded at Rp 241,328 million from Rp 523 billion. In addition, due to the Covid-19 Pandemic, the Government issued a policy of limiting office activities and other public activities and the lockdown that was treated by several countries. further aggravated the BBI business. We appreciate the Company which is able to maintain a comprehensive profit for the year reaching Rp 75,684 million.

With reference to the assessment, whether carried out by an independent institution or an independent assessment, the Board of Commissioners assesses that the performance of the Board of Directors in managing the Company during 2020 has led to the achievement of the Company's vision, mission and objectives with the following points of achievement

1. Company Soundness Level

Based on the calculation of financial ratios, operational aspects and administrative aspects, BBI in 2020 obtained the results of a health level assessment with a score of 32.0 with predicate "Unhealthy (B)" as stated in the Regulation of the Minister of BUMN No: KEP-100 / MBU / 2002.

2. Assessment of Corporate Governance

The results of the internal assessment of the Implementation of Good Corporate Governance in 2020 amounted to 78,105 with a classification of "Good". There has been an increase when compared to the results of the assessment in 2019 of 75,293 with a clarification of "Good Enough".

3. Independent Audit Opinion

The Independent Auditor's Opinion on the Company's 2020 Financial Statements which has been audited by the Public Accountant Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar (RSM AAJ) is fair without exception in all material matters, and the Company has succeeded in defending this opinion from the years previously Council.

The Board of Directors of BBI has worked optimally in improving the Company's performance, although there are still many things that need to be improved. The Board of

agar terus focus melakukan perbaikan proses bisnis secara internal sehingga keberlangsungan usaha Perseroan dapat terus terjaga.

Mekanisme Pengawasan , Frekwensi dan Tata Cara pemberian Nasihat Kepada Direksi

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Direksi. Langkah pengawasan itu dilakukan antara lain melalui telaahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Tindak Lanjut atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Laporan Kinerja Bulanan, Evaluasi PKPT SPI, Evaluasi/ Telaahan Laporan Triwulanan dan Tahunan, Telaahan Laporan Keuangan Audited, Evaluasi Manajemen Risiko, Evaluasi pelaksanaan GCG, Koordinasi audit KAP dan SPI, Tindak Lanjut Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP atau SPI, Penunjukan KAP, Pemantauan kinerja proyek dan sebagainya serta berbagai agenda konsultasi dalam pertemuan rutin maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga memberikan arahan, pembinaan dan memberikan saran terkait kepengurusan perusahaan kepada Direksi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa mekanisme antara lain melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan mekanisme surat menyurat. Selama tahun 2020, telah dilaksanakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 (dua belas). Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai kinerja perusahaan secara berkala, laporan Manajemen Perusahaan, tindak lanjut rapat sebelumnya, serta beberapa agenda lainnya.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan

Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi dalam implementasi strategi bisnis Perseroan. Pada tahun ini, Dewan Komisaris menilai langkah yang diambil oleh Direksi sudah berjalan cukup baik dan terbukti mampu menekan beban Operasional Perseroan. Dewan Komisaris mengapresiasi

Commissioners continues to remind the Board of Directors to continue to focus on improving internal business processes so that the Company's business continuity can be maintained.

Supervision Mechanism, Frequency and Procedure for Providing Advice to the Board of Directors

During 2020, the Board of Commissioners has supervised the performance of the Board of Directors. This supervisory step is carried out, among others, through reviewing the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Follow-up to the General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions, Monthly Performance Reports, PKPT SPI Evaluation, Evaluation / Review of Quarterly and Annual Reports, Review of Audited Financial Statements, Evaluation of Risk Management, Evaluation of GCG implementation, coordination of KAP and SPI audits, Follow-up Monitoring Follow-up on the results of BPK, BPKP or SPI audits, appointment of KAP, monitoring of project performance and so on as well as various consultation agendas in routine meetings or at any time if needed.

As part of its supervisory function, the Board of Commissioners also provides direction, guidance and provides advice regarding the management of the company to the Board of Directors which is carried out using several mechanisms, including through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors and correspondence mechanisms. During 2020, 12 (twelve) joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been held. The meeting discussed periodic company performance, Company management reports, follow-ups to previous meetings, and several other agendas.

Supervision of Implementation Company Strategy

The Board of Commissioners has carried out the supervisory function and evaluated the performance of the Board of Directors in the implementation of the Company's business strategy. This year, the Board of Commissioners assesses that the steps taken by the Board of Directors have been running well and proven to be able to reduce the

seluruh inisiatif strategi yang telah ditetapkan Direksi yang berfokus pada 3 pilar program, yaitu restrukturisasi perusahaan, pengembangan Unit Bisnis Diesel serta Sinergi BUMN dalam meraih order.

Dewan Komisaris juga melihat kebijakan restrukturisasi utang dan pengembangan unit bisnis Diesel menjadi sebuah terobosan besar bagi Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Melalui komunikasi yang efektif dengan Direksi, kami telah memberikan berbagai arahan dan rekomendasi atas implementasi strategi Perseroan. Kami menilai Direksi telah melaksanakan semua arahan tersebut dan kami menyakini bahwa langkah-langkah yang ditempuh Perseroan sudah tepat dan terbukti mampu menjawab beratnya tantangan yang dihadapi Perseroan.

Pandangan Atas Prospek Usaha Tahun 2020

Ke depan, prospek usaha akan menyimpan tantangan yang lebih berat. Dewan Komisaris menilai Direksi telah memperhitungkan faktor-faktor risiko yang dapat timbul. Namun, kami meyakini bahwa peluang akan selalu terbuka di setiap tantangan yang terjadi.

Semester pertama tahun 2021 diprediksi akan menjadi awal yang masih berat bagi Indonesia karena wabah Covid-19. Namun Sejalan dengan perkembangan ekonomi Global, pertumbuhan ekonomi Nasional terus membaik secara bertahap dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2021. Meskipun kasus Covid-19 secara global masih terus meningkat dan dibayangi oleh mutase baru, ketersediaan vaksin menjadi harapan pemulihan ekonomi global.

Terhadap Prospek Usaha, Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan, harapan dan saran kepada Direksi sebagaimana berikut:

1. Manajemen agar melakukan antisipasi perubahan kondisi eksternal perusahaan yang dinamis dan sewaktu-waktu diluar kendali manajemen, terutama terkait asumsi penyusunan proyeksi keuangan yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai

Company's operational burden. The Board of Commissioners appreciates all strategic initiatives that have been set by the Board of Directors which focus on the 3 pillars of the program, namely corporate restructuring, the development of the Diesel Business Unit and BUMN Synergy in obtaining orders.

The Board of Commissioners also sees the debt restructuring policy and the development of the Diesel business unit as a major breakthrough for the Company to maintain long-term business continuity. Through effective communication with the Board of Directors, we have provided various directions and recommendations on the implementation of the Company's strategy. We assess that the Board of Directors has carried out all of these directives and we believe that the steps taken by the Company are correct and proven to be able to answer the tough challenges faced by the Company.

Outlook on Business Prospects in 2020

In the future, business prospects will hold tougher challenges. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has taken into account the risk factors that may arise. However, we believe that opportunities will always be open in every challenge that occurs.

The first semester of 2021 is predicted to be a tough start for Indonesia due to the Covid-19 outbreak. However, in line with global economic development, national economic growth continues to improve gradually and is expected to continue to increase in 2021. Even though the Covid-19 cases globally continue to increase and are overshadowed by new mutations, the availability of vaccines is the hope of global economic recovery.

Regarding Business Prospects, the Board of Commissioners submit responses, hopes and suggestions to the Board of Directors as follows:

1. Management to anticipate changes in the company's dynamic external conditions and from time to time beyond management's control, particularly in relation to financial projection assumptions, namely economic growth, inflation rate, rupiah exchange rate,

tukar rupiah, suku bunga SPN dan suku bunga pinjaman;

2. Dalam 5 tahun pertama kerjasama Boma Bisma Indra dengan Doosan Intracore, diharapkan bisnis mesin diesel perseroan sudah berada pada tahap awal pelaksanaan local content untuk selanjutnya dikembangkan sampai pada tahap kemampuan rancang bangun industri mesin diesel. Kerjasama tersebut diharapkan mampu menopang pendapatan BBI dalam pencapaian RJPP 2020 - 2024 dan menciptakan kemandirian industri diesel Indonesia;
3. Dalam periode tahun 2020 - 2024 diharapkan sinergitas Boma Bisma Indra dengan Barata Indonesia dapat memberikan hasil positif dengan meningkatnya pendapatan perseroan lewat konsep strategic partnership dimulai dari getting order sampai pelaksanaan order;

Menyadari semakin beratnya tantangan ke depan, Dewan Komisaris berharap Direksi dan seluruh jajaran Manajemen tetap menunjukkan semangat dan soliditas tinggi dalam bekerja sehingga target Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya dapat terlaksana sesuai rencana sebagaimana tertuang dalam RKAP tahun 2021.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan Pemangku Kepentingan lainnya memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dengan baik dan secara konsisten dalam melakukan praktek usaha yang menjunjung tinggi etika, moral serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat mengoptimalkan nilai Perusahaan agar berdaya saing tinggi.

Dewan Komisaris mengapresiasi langkah yang dilakukan manajemen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap struktur dan mekanisme penerapan GCG di Perusahaan yaitu dengan selalu mengedepankan praktek usaha sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan kewajaran.

SPN interest rate and loan interest rate;

2. In the first 5 years of cooperation between Boma Bisma Indra and Doosan Intracore, it is hoped that the company's diesel engine business is already in the early stages of implementing local content, which will then be developed to the stage of the diesel engine industrial design capability. This collaboration is expected to be able to support BBI's revenue in achieving RJPP 2020-2024 and create independence for the Indonesian diesel industry;
3. In the period 2020 - 2024, it is hoped that the synergy between Boma Bisma Indra and Barata Indonesia will give positive results by increasing the company's revenue through the concept of a strategic partnership starting from getting orders to executing orders;

Realizing the heavier challenges ahead, the Board of Commissioners hopes that the Board of Directors and all levels of Management will continue to show high enthusiasm and solidity in their work so that the Company's target is to improve. Its performance can be carried out according to the plan as stated in the 2021 RKAP.

Views on the Implementation of Corporate Governance

The Board of Commissioners, Board of Directors, Employees and other Stakeholders are committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) properly and consistently in carrying out business practices that uphold ethics, morals and compliance with existing laws and regulations so as to optimize the Company's values so that high competitiveness.

The Board of Commissioners appreciates the steps taken by management to continue to make improvements and refinements to the structure and mechanisms for implementing GCG in the Company, namely by always prioritizing business practices in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Selama tahun 2020, Perusahaan melaksanakan berbagai kegiatan terkait GCG diantaranya sosialisasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sosialisasi dan Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi serta Whistle Blowing System.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi hasil assessment GCG pada tahun 2020 dengan skor 78,105 dengan klasifikasi "Baik". Mengalami peningkatan bila dibandingkan hasil penilaian di tahun 2019. Peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan GCG dilakukan melalui pelaksanaan tindak lanjut terhadap arahan RUPS maupun rekomendasi assessor.

Mengingat status Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dewan Komisaris juga menyambut baik upaya Direksi dan manajemen yang saat ini tengah berusaha meraih Sertifikasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Inisiatif ini diharapkan dapat membawa perubahan dan perbaikan yang positif dari sisi internal perusahaan, terutama dalam mencegah terciptanya budaya suap dan KKN di lingkup Perseroan.

Dewan Komisaris berharap agar fokus penerapan GCG Perseroan tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi menjadi sebuah kesadaran penuh yang harus dimiliki oleh setiap insan Perseroan demi terwujudnya BUMN bersih.

Pandangan Atas Penerapan WBS

Perseroan telah memiliki kebijakan tentang Whistle Blowing System (WBS) atau Sistem Pelaporan Pelanggaran yang merupakan komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Jajaran Manajemen untuk dilaksanakan secara sesuai ketentuan yang ada, secara konsisten, terstruktur dan massif terhadap seluruh insan BBI dan telah disosialisasikan.

Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen dan upaya manajemen dalam penerapan WBS, sebagai bentuk penerapan dan penegakan kode Etik Perusahaan. Penanganan atas pelanggaran pada WBS dilakukan, secara bertahap, dengan melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengawasan Komite

During 2020, the Company carried out various activities related to GCG including socialization of the State Officials' Wealth Result Report (LHKPN), Socialization and Implementation of the Gratification Control Program and the Whistle Blowing System.

The Board of Commissioners also appreciates the results of the GCG assessment in 2020 with a score of 78.105 with the classification "Good". There has been an increase when compared to the results of the 2019 assessment. Improving the quality and effectiveness of GCG implementation is carried out through the implementation of follow-up actions to the GMS directives and the assessor's recommendations.

Given the Company's status as a State-Owned Enterprise (BUMN), the Board of Commissioners also welcomes the efforts of the Board of Directors and management who are currently trying to achieve ISO 37001 Certification on Anti-Bribery Management Systems. This initiative is expected to bring about positive changes and improvements from the internal side of the company, especially in preventing the creation of a culture of bribery and corruption, collusion and nepotism within the Company.

The Board of Commissioners hopes that the focus of the implementation of the Company's GCG is not only seen as a form of compliance with laws and regulations, but becomes a full awareness that every individual of the Company must have for the realization of a clean BUMN.

View on WBS Application

The Company has a policy regarding the Whistle Blowing System (WBS) or Whistleblowing System which is a commitment of the Board of Commissioners, Directors and Management to be implemented according to existing regulations, consistently, structurally and massively to all BBI personnel and has been socialized.

The Board of Commissioners appreciates management's commitment and efforts in implementing WBS, as a form of implementation and enforcement of the Company's code of ethics. Handling of WBS violations is carried out, in stages, by involving the Board of Directors and the Board of

Audit.

Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung upaya Manajemen dalam meningkatkan peran WBS agar fraud yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin, sehingga lebih efektif. Dewan Komisaris menyarankan kepada manajemen untuk terus melakukan sosialisasi kepada semua lini organisasi terkait kebijakan WBS sehingga persoalan-persoalan yang timbul dapat dikendalikan secara lebih dini tidak berdampak keluar yang dapat mempengaruhi citra perusahaan.

Penilaian terhadap Kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengelola Perseroan didukung oleh Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas dukungan Komite dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020. Komite Audit telah menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Komite Audit berperan membantu memberikan pendapat terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Pada tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan sejumlah kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan penugasan yang diberikan antara lain :

1. Melakukan analisis dan evaluasi atas Laporan
2. Kinerja Perseroan;
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Akuntan Publik;
4. Menyusun Piagam Komite Audit dan melakukan penilaian atas efektifitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern;
5. Melakukan telaahan atas Sistem Pengendalian Intern.

Commissioners on the supervision of the Audit Committee.

The Board of Commissioners fully supports Management's efforts in enhancing the role of WBS so that fraud that occurs can be detected and prevented as early as possible, so that it is more effective. The Board of Commissioners advises management to continue to disseminate information to all lines of the organization regarding WBS policies so that problems that arise can be controlled early and do not have an outward impact that can affect the company's image.

Assessment of the Performance of Committees under the Board of Commissioners

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising and managing the Company is supported by the Audit Committee and the Secretary of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners appreciates the Committee's support in increasing the effectiveness of the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners throughout 2020. The Audit Committee has shown quite good performance.

The Audit Committee plays a role in helping to provide opinions on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners. In 2019, the Audit Committee carried out a number of activities in accordance with the work plans that have been prepared and the assignments given include:

1. Analyze and evaluate the report
2. Company performance;
3. Evaluating the implementation of duties of the Public Accountant Office;
4. Compile the Audit Committee Charter and assess the effectiveness of the supervision carried out by the Internal Supervisory Unit;
5. Conduct a review of the Internal Control System.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PT Boma Bisma Indra (Persero) mengalami perubahan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 30 Juli 2020 yang memberhentikan dengan hormat Saudara Arman Hakinm Nasution sebagai Komisaris Utama. Rapat juga mengangkat Saudara Masrokh sebagai Komisaris Utama. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris PT Boma Bisma Indra (Persero) adalah sebagai berikut:

Masrokh : Komisaris Utama

Jumain Appe : Komisaris

Atas nama Dewan Komisaris, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Saudara Arman Hakim Nasution atas dedikasi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Apresiasi

Mewakili Dewan Komisaris, Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Direksi, manajemen dan seluruh jajaran karyawan PT Boma Bisma Indra (Perseo) atas kerja keras, dedikasi dan inovasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham serta semua pemangku kepentingan, atas kepercayaan, dukungan dan kerja sama yang terus diberikan kepada PT Boma Bisma Indra (Persero) dalam mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.

Semoga di masa depan, kerjasama yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan dan menciptakan kinerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

The composition of the Board of Commissioners of PT Boma Bisma Indra (Persero) has changed according to the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which was held on July 30, 2020 which honors Mr. Arman Hakinm Nasution as President Commissioner. Meeting too appointed Brother Masrokh as President Commissioner. Thus, the composition of the Board of Commissioners of PT Boma Bisma Indra (Persero) is as follows:

Masrokh : President Commissioner

Jumain Appe : Commissioner

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our appreciation and gratitude to Arman Hakim Nasution for his dedication during his tenure as a member of the Company's Board of Commissioners.

Appreciation

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our high appreciation to the Board of Directors, management and all employees of PT Boma Bisma Indra (Perseo) for the hard work, dedication and innovation that has been carried out throughout 2020. We would also like to thank the Shareholders and all stakeholders, for the trust, support and cooperation that continues to be given to PT Boma Bisma Indra (Persero) in realizing the Company's Vision and Mission.

Hopefully in the future, the existing cooperation can continue to be improved and create sustainable performance and growth for the Company, and can provide added value and greater benefits for shareholders and stakeholders.

Surabaya, 31 Mei 2021

Surabaya, May 31, 2021

Atas Nama Dewan Komisaris

On Behalf of the Coard Commissioner



Masrokh

Komisaris Utama
President Commissioner



“

Sejalan dengan dinamisnya tantangan usaha, Perseroan telah mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya adalah Pengembangan Unit Bisnis Diesel, agar dapat menunjang pertumbuhan yang berkelanjutan.

In line with dynamic business challenges, the Company has taken strategic steps, one of which is the Development of the Diesel Business Unit in order.

Yoyok Hadi Satriyono

Direktur Utama
President Director

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami mewakili Manajemen PT Boma Bisma Indra (Persero) menyampaikan laporan tahunan untuk tahun buku 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah bagi PT Boma Bisma Indra (Persero), Pandemi Covid-19 serta berbagai tantangan dan kendala menghampiri ditengah ketatnya persaingan usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan telah melakukan sejumlah upaya dan strategi yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja Perusahaan dari sisi Operasional maupun Finansial

Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 beserta Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) yang memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Analisa Ekonomi Global dan Nasional

Kondisi Ekonomi tahun 2020 diwarnai Pandemi Covid-19 yang menekan perekonomian global dan nasional secara dalam yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi hingga minus 4,9% pada pertengahan tahun 2020. Meski demikian, kondisi ekonomi nasional masih cenderung lebih baik dibandingkan dengan kondisi global.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi Global, pertumbuhan ekonomi Nasional terus membaik secara bertahap dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2021. Perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif sejumlah indikator seperti peningkatan mobilitas masyarakat di

Dear Shareholders and Stakeholders,

By giving thanks for the presence of God Almighty, we represent the Management of PT Boma Bisma Indra (Persero) to submit an annual report for the 2020 financial year as a form of accountability to Shareholders and all other stakeholders.

2020 is not an easy year for PT Boma Bisma Indra (Persero), the Covid-19 Pandemic and various challenges and obstacles are approaching in the midst of intense business competition. To overcome this, the Company has made a number of efforts and strategies which are expected to improve the Company's performance from both the Operational and Financial side.

Furthermore, allow us to submit an accountability report for the management of the company for the financial year ending on 31 December 2020 along with the Financial Statements that have been audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) which obtained a fair opinion in all material matters as part of the application of the principles of Good Corporate Governance.

Global and National Economic Analysis

Economic conditions in 2020 were marked by the Covid-19 Pandemic which deeply suppressed the global and national economy which resulted in slowing economic growth to minus 4.9% in mid-2020. However, national economic conditions still tend to be better than global conditions.

In line with global economic developments, national economic growth continues to improve gradually and is expected to continue to increase in 2021. This development is indicated by the continued positive performance of a number of indicators such as increased community mobility in several

beberapa daerah, berlanjutnya perbaikan PMI Manufaktur, menguatnya keyakinan serta ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Ke depan, vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol covid-19 merupakan kondisi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mulai positif pada triwulan IV 2020 dan pada kisaran -1% hingga -2% pada 2020, serta selanjutnya meningkat pada kisaran 4,8-5,8% pada 2021.

Stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Nilai tukar Rupiah terjaga didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Sementara itu, inflasi tetap rendah seiring permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Sejalan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar dan mendorong penurunan suku bunga. Ketahanan sistem keuangan tetap kuat, meskipun risiko meluasnya dampak Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Di sisi lain, transaksi Sistem Pembayaran, baik tunai maupun nontunai menunjukkan peningkatan sejalan perbaikan ekonomi, disertai percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait. Seluruh instrumen kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan.

Tantangan yang Dihadapi Perseroan

Tahun 2020, Perseroan menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pandemi Covid-19 terutama menjadi salah satu faktor penghambat arus transaksi perdagangan global sepanjang tahun ini. Selain itu, fluktuasi harga pasar material dan lockdown yang diberlakukan di banyak negara menghambat proses bisnis Perseroan. Sejak pelaksanaan pesta Demokrasi di tahun 2019, berlanjut

regions, continued improvement in the Manufacturing PMI, strengthening consumer confidence and expectations of income, availability of employment, and business activities. In the future, vaccination and discipline in implementing the Covid-19 protocol are prerequisite conditions for the national economic recovery process. Under these conditions, Indonesia's economic growth is predicted to start positively in the fourth quarter of 2020 and in the range of -1% to -2% in 2020, and then increase in the range of 4.8-5.8% in 2021.

Macroeconomic stability is well maintained. The Indonesian Balance of Payments (BOP) is predicted to remain robust, thus supporting external sector resilience. The rupiah exchange rate was maintained on the back of stabilization measures by Bank Indonesia and continued inflows of foreign capital into the domestic financial market. Meanwhile, inflation remains low in line with insufficient demand and adequate supply. In line with Bank Indonesia's accommodative monetary and macroprudential policies, liquidity conditions remained loose and led to lower interest rates. Financial system resilience remains strong, despite the risk of widespread Covid-19 impact on financial system stability. On the other hand, Payment System transactions, both cash and non-cash, showed an increase in line with economic improvement, accompanied by the acceleration of economic and financial digitization.

Bank Indonesia will continue to strengthen policy coordination with the government and relevant authorities. All Bank Indonesia policy instruments will be directed at supporting national economic recovery, while maintaining control of inflation and maintaining stability of the Rupiah exchange rate, as well as supporting financial system stability.

Challenges Faced by the Company

In 2020, the Company faces various obstacles and challenges in achieving the targets that have been set. The Covid-19 pandemic has been one of the factors inhibiting the flow of global trade transactions throughout this year. In addition, fluctuations in material market prices and lockdowns imposed in many countries hampered the Company's business processes. Since the implementation of the Democracy party in 2019, continued with the

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

dengan terjadinya pandemi Covid-19, sebagian besar pelaku usaha memilih menunda Investasi sehingga banyak proyek mengalami penundaan baik Proyek Pemerintah maupun Swasta. Penundaan tersebut mengakibatkan perolehan Order masuk BBI tahun 2019 tidak tercapai yang berimbas pada kurangnya ketersediaan Order di awal tahun 2020 sehingga tidak bisa menopang tercapainya target Penjualan tahun 2020.

Dari sisi internal Perseroan menghadapi seretnya pendanaan untuk melaksanakan proyek/order sehingga mengakibatkan lambatnya penyelesaian proyek/order. Berbagai terobosan telah dilakukan manajemen untuk menangani permasalahan tersebut. Masih terdapat akumulasi kerugian usaha, sehingga meskipun Perseroan mencatat laba, namun laba tersebut dipergunakan untuk modal kerja dan mengurangi akumulasi kerugian. Permasalahan regenerasi, yaitu kesiapan sumber daya manusia, untuk itu Perseroan berupaya mengurangi *lag* dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM agar dapat menunjang pencapaian rencana bisnis Perseroan.

Covid-19 pandemic, most business actors have chosen to postpone investment so that many projects have experienced delays, both Government and private projects. This delay resulted in the acquisition of the 2019 BBI entry order not being achieved which resulted in the lack of Order availability at the beginning of 2020 so that it could not support the achievement of the 2020 Sales target.

From the internal side, the Company faces a lack of funding to carry out projects / orders which results in slow completion of projects / orders. Various breakthroughs have been made by management to deal with these problems. There are still accumulated operating losses, so even though the Company records profit, the profits are used for working capital and reduce accumulated losses. The problem of regeneration, namely the readiness of human resources, therefore the Company seeks to reduce lag by increasing the capacity and competence of human resources in order to support the achievement of the Company's business plan.

Kebijakan dan Langkah Strategis

Tahun 2020 menjadi tahun yang menantang bagi PT Boma Bisma Indra (Persero). Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi bahkan minus, BBI bertahan mempertahankan kinerja. Kondisi tersebut membuat BBI harus terus melakukan pembenahan dan peningkatan di berbagai aspek. Menghadapi kondisi tersebut, tahun 2020 manajemen BBI telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis yang utamanya terbagi menjadi tiga pilar utama yaitu program Restrukturisasi Perusahaan, Pengembangan Unit Bisnis Diesel dan Kerjasama Sinergi BUMN untuk mendukung proyek-proyek pemerintah.

1. Restrukturisasi Perusahaan

Program restrukturisasi yang dilaksanakan diantaranya:

- Restrukturisasi Hutang

- Hutang pokok PPA sebesar Rp 67,8 milyar dengan bunga Rp 33,8 milyar diupayakan untuk diselesaikan dengan tiga alternatif :
 - i. Pembahasan debt to equity dengan mekanisme convertible bond
 - ii. Pembahasan hak penggunaan

Policies and Strategic Measures

2020 is a challenging year for PT Boma Bisma Indra (Persero). In the middle slowing economic growth even minus, BBI maintains its performance. These conditions make BBI have to continue to make improvements and improvements in various aspects. Facing these conditions, the BBI management has decided in 2020 a number of strategic policies which are mainly divided into three main pillars, namely the Company Restructuring program, Diesel Business Unit Development and BUMN Synergy Cooperation to support government projects.

1. Company Restructuring

The restructuring program implemented includes:

- Debt Restructuring

- The PPA principal payable of Rp. 67.8 billion with interest of Rp. 33.8 billion is attempted to be settled with three alternatives:
 - i. Debt to equity discussion with the convertible bond mechanism.
 - ii. Discussion of the right to use

jaminan bersama (paripaso)

iii. Pembahasan asset settlement (optimalisasi asset) Rp 300 M

- Kredit Modal Kerja (KMK) yang sudah tertarik Rp 66,6 milyar dilakukan perpanjangan dan penambahan plafon kredit yang semula Rp 200 milyar menjadi Rp 375 milyar yang terdiri dari Non Cash Loan (NCL) Rp 196 milyar KMK Rp 179 milyar
- Hutang pokok Pihak III sebesar Rp 55,6 milyar sudah dilakukan pembahasan dan kesepakatan untuk di-reschedule : Rp 30,3 milyar dan dilakukan pelunasan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp 25,3 milyar
- Menyelesaikan tunggakan PPN WAPU 30,5 milyar, segera bertemu dengan KPP BUMN & mengajukan restrukturisasi tunggakan pajak

- Penguatan Modal Kerja Perseroan

Dengan menjaga kepercayaan yang diberikan bank & Lembaga keuangan nonbank serta pendanaan investasi dari lembaga keuangan non bank.

- Efisiensi Biaya

Mengurangi biaya Operasional di segala lini untuk mencapai profitabilitas dan sustainability.

- Pemasaran, Penjualan & Operasional

Melakukan penguatan bisnis heavy industry dan mesin diesel, meningkatkan kemampuan bidang Engineering, On-time delivery dan kepuasan pelanggan. Serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen terintegrasi

- Penataan Organisasi

Awal tahun 2020 telah dilakukan penataan Struktur Organisasi yang lebih optimal dan fleksibel untuk menghadapi tantangan, perubahan dan volume usaha dengan membangun kapabilitas tenaga kerja untuk mendorong dan mempertahankan kemampuan serta peningkatan produktivitas.

2. Pengembangan Unit Bisnis Diesel

Membangun Industri Diesel Nasional berkerjasama dengan Doosan Infracore dengan system Transfer for Technology (TFT), dengan program kerja tahun 2020 :

collective guarantee (paripaso)

iii. Discussion on asset settlement (asset optimization) of Rp. 300 billion

- Working capital loans (KMK) that have been attracted by Rp.66.6 billion are extended and added to the credit ceiling from Rp. 200 billion to Rp. 375 billion, consisting of Non-Cash Loans (NCL) of Rp. 196 billion, KMK of Rp. 179 billion
- Discussion on the principal debt of the Third Party amounting to Rp. 55.6 billion and an agreement to reschedule: Rp. 30.3 billion and repayment until December 2020 in the amount of Rp. 25.3 billion.
- Resolving WAPU VAT arrears: 30.5 billion, immediately met with KPP BUMN & proposed restructuring of tax arrears.

- Strengthening the Company's Working Capital

By maintaining the trust given by banks & non-bank financial institutions as well as investment funding from non-bank financial institutions.

- Cost Efficiency

Reducing operational costs on all fronts to achieve profitability and sustainability.

- Marketing, Sales & Operations

Strengthen the heavy industry and diesel engine business, improve engineering capabilities, on-time delivery and customer satisfaction. As well as the development of an integrated Management Information System

- Organizational Structuring

Early 2020, a more optimal and flexible Organizational Structure was structured to face challenges, changes and business volume by building workforce capabilities to encourage and maintain capabilities and increase productivity.

2. Development of the Diesel Business Unit

Building the National Diesel Industry in collaboration with Doosan Infracore with the Transfer for Technology (TFT) system, with the 2020 work program:

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

- Perluasan Jaringan Service & After Market Spare Part
- Pengembangan Biodiesel B20-B30
- Pembangunan Fasilitas Assembly & Persiapan CKD, masih pada tahap Konsep Desain karena terkendala dalam pendanaan
- Engine Business Application untuk Palm Oil Transporter, Gasifikasi & Kapal Ikan

- Expansion of Service & After Market Spare Part Network
- Development of Biodiesel B20-B30
- Construction of CKD Assembly & Preparation Facilities, is still at the Design Concept stage due to funding constraints
- Engine Business Application for Palm Oil Transporter, Gasification & Fishing Vessels

3. Sinergi BUMN untuk meraih order-order baru

Bersama PT Barata Indonesia membentuk Divisi Usaha bersama. Membentuk klaster Industri Manufaktur sebagai cikal bakal holding untuk mengefisiensikan rantai pasok bersama Barata Indonesia, INKA, IKI, DPS, DKB & REKIN dibawah pembinaan Danareksa-PPA. Diharapkan dengan terbentuknya Holding BUMN Industri Manufaktur menjadi besar, kuat, kompetitif dan lincah.

Kebijakan strategi lain yang dijalankan Perseroan dimasa Pandemi ini adalah dibentuknya Tim Satgas Covid-19 yang tugasnya adalah menanggulangi dan menangani Covid-19 di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) agar Operasional Perusahaan tetap berjalan dengan normal.

3. BUMN synergy to get new orders

Together with PT Barata Indonesia to form a joint Business Division. Forming a Manufacturing Industry cluster as the embryo of holding to streamline the supply chain with Barata Indonesia, INKA, IKI, DPS, DKB & REKIN under the guidance of Danareksa-PPA. It is hoped that with the formation of Holding BUMN the Manufacturing Industry will become big, strong, competitive and agile.

Another strategic policy carried out by the Company during this Pandemic was the formation of the Covid-19 Task Force Team whose task was to tackle and handle Covid-19 in the PT Boma Bisma Indra (Persero) Environment so that the Company's operations would continue normally.

Kinerja Boma Bisma Indra tahun 2020

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, tahun 2020 PT Boma Bisma Indra berhasil membukukan kinerja yang positif. Perseroan mencatat penjualan sebesar Rp241.328 Juta. Penurunan penjualan tersebut utamanya disebabkan menurunnya nilai kontrak baru yang diperoleh Perseroan tahun 2019 akibat tertundanya lelang di berbagai proyek di tahun 2019 dan 2020. Namun demikian pada BBI berhasil meraih Order masuk Rp 660.873 juta.

Imbas penurunan penjualan yang dibukukan Perseroan ditahun 2020, BBI memperoleh laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 75.685.

Selain itu ditahun 2020 BBI mencatat Total Aset sebesar Rp 916.366 juta terdapat pertumbuhan sebesar Rp121.246 juta atau 15,25% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp 795.120 juta dan pertumbuhan ekuitas sebesar Rp 124.860 juta.

Boma Bisma Indra's performance in 2020

In the midst of various challenges faced, in 2020 PT Boma Bisma Indra managed to record a positive performance. The Company recorded sales of Rp.241,328 million. The decline in sales was mainly due to the decrease in the value of new contracts obtained by the Company in 2019 due to delays in auctions for various projects in 2019 and 2020. However, BBI managed to get an incoming order of Rp. 660,873 million.

As a result of the decline in sales recorded by the Company in 2020, BBI earned a comprehensive profit for the year of Rp 75,685.

In addition, in 2020 BBI recorded Total Assets of Rp. 916,366 million, there was a growth of Rp. 121,246 million or 15.25% from the realization in 2019 of Rp. 795,120 million and equity growth of Rp. 124,860 million.

Perbandingan Target dan Realisasi 2020

Sepanjang tahun 2020 manajemen BBI berupaya untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020. Kendati masih terdapat beberapa indikator target yang belum tercapai, namun secara umum kinerja yang dibukukan BBI tahun 2019 cukup baik, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Description	Target RKAP 2020 (Rp Milyar) 2020 RKAP Target (Rp Billion)	Realisasi 2020 (Rp Milyar) of 2020 Realization (Rp Billion)	Pencapaian Target (%) Target Achievement (%)
Order Tersedia order available	591,7	865,1	146,2%
Order Masuk Order entry	459,4	660,9	143,9%
Penjualan Sales	324,240	241,3	74,4%
Laba Bersih Net Profit	7,289	(73,458)	(-1007,08%)

Analisa Prospek Usaha

Ekonomi Indonesia tahun 2021 diprediksi akan kembali mengalami pertumbuhan yang positif. Meskipun kasus Covid-19 secara global masih terus meningkat namun di Indonesia sudah kian melandai. Ketersediaan vaksin menjadi harapan pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan berada pada kisaran 5,0% dengan tingkat inflasi yang terjaga pada level 3%. Presiden Joko Widodo yang kembali memimpin untuk periode kedua akan terus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan pengembangan infrastruktur di berbagai daerah. Kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2021 merupakan pembangunan berkelanjutan pascapandemi Covid-19 dengan penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi Rp 417,8 triliun. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan roadmap pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 yang akan difokuskan pada tiga kerangka utama, yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Perkotaan, yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital.

2020 Target and Realization Comparison

Throughout 2020, BBI management strives to realize the targets set in the 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). Although there are still several target indicators that have not been achieved, in general the performance recorded by BBI in 2019 is quite good, with the following details:

Business Prospect Analysis

The Indonesian economy in 2021 is predicted to experience positive growth again. Even though the Covid-19 cases globally are still increasing, in Indonesia it is getting sloping. Availability of vaccines is the hope of national economic recovery. Bank Indonesia predicts that Indonesia's economic growth in 2021 will be in the range of 5.0% with the inflation rate being maintained at the level of 3%. President Joko Widodo, who is returning to lead for the second term, will continue to encourage the acceleration of national economic growth, one of which is the development of infrastructure in various regions. The infrastructure development policy in 2021 is a post-Covid-19 post-pandemic sustainable development by strengthening digital infrastructure and encouraging logistical efficiency and connectivity. The government has allocated a budget for infrastructure development to Rp 417.8 trillion. In addition, the Government has also set a roadmap for infrastructure development for the 2020-2024 period which will focus on three main frameworks, namely Basic Service Infrastructure, Economic Infrastructure and Urban Infrastructure, which are supported by energy and electricity development and implementation of digital transformation.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19, mencapai target pertumbuhan PDB scenario menengah dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp6.421 Triliun atau rata-rata 6,08% dari PDB, sehingga stok kapital infrastruktur akan mencapai 50% dari PDB di tahun 2024. Namun demikian, kemampuan penyediaannya hanya sebesar 3,46% dari PDB, sehingga terdapat gap cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Untuk itu diperlukan upaya kreatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan kapasitas pendanaan infrastruktur, seperti review kebijakan tarif, peningkatan kapasitas fiskal dan realokasi belanja Pemerintah.

Berdasarkan pada asumsi-asumsi tersebut BBI optimis menghadapi tahun 2021. BBI memasuki tahun 2021 dengan Order tersedia sebesar Rp623,8 milyar. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut BBI perlu focus pada pengembangan usaha dan inovasi, memastikan keberlangsungan perusahaan, meningkatkan pendapatan berkelanjutan serta meningkatkan rasio laba.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) terus menunjukkan kemajuan. Hal ini didasari kesadaran BBI bahwa GCG merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Kompleksitas dan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan menjadikan penerapan prinsip GCG merupakan hal wajib yang tidak dapat ditawar. Berlandaskan pada kesadaran tersebut, BBI terus berupaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan struktur, mekanisme dan infrastruktur GCG yang dimiliki dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No: PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jo Peraturan Menteri BUMN No: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

In an effort to recover the national economy after Covid-19, achieving the medium scenario GDP growth target in the 2020-2024 RPJMN, the need for infrastructure spending is estimated to reach IDR 6,421 trillion or an average of 6.08% of GDP, so that the stock of infrastructure capital will reach 50% of GDP in 2024. However, its provision is only 3.46% of GDP, so there is a significant gap in infrastructure funding. For this reason, creative efforts are needed to encourage public and business entity participation through the Government Cooperation with Business Entities (PPP) schemes and Government Non-Budget Investment Financing (PINA). In addition, the Government will also make several efforts to increase infrastructure funding capacity, such as reviewing tariff policies, increasing fiscal capacity and reallocation of Government spending.

Based on these assumptions, BBI is optimistic in facing 2021. BBI enters 2021 with an available order of IDR 623.8 billion. To optimize this potential, BBI needs to focus on business development and innovation, ensuring the sustainability of the company, increasing sustainable income and increasing profit ratios.

Implementation of Good Corporate Governance

The implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) continues to show progress. This is based on BBI's awareness that GCG is a very important factor in achieving the company's vision and mission. The complexity and level of risk faced by the company make the application of GCG principles a non-negotiable mandatory thing. Based on this awareness, BBI continues to strive to improve and refine its GCG structure, mechanisms and infrastructure by referring to the Regulation of the Minister of BUMN No: PER01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. (BUMN) Jo Regulation of the Minister of BUMN No: PER-09 / MBU / 2012 dated 6 July 2012 concerning Amendments to PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance and socializing to all BBI

dan Benar (Good Corporate Governance) dan menyosialisasikan kepada seluruh insan BBI yang meliputi:

- Pedoman GCG
- Board Manual
- Kode Etik
- Pedoman LHKPN
- Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
- Pedoman Sistem Manajemen Risiko
- Pedoman Klasifikasi dan Pengungkapan Informasi

Secara berkesinambungan BBI terus melakukan implementasi GCG pada setiap pelaksanaan Operasional perusahaan. Tujuannya tak lain agar GCG menjadi ruh dalam operasional BBI sehari-hari di setiap tingkatan organisasi, sehingga GCG dapat menjadi pilar utama yang akan menopang pertumbuhan usaha Perusahaan.

Untuk tahun 2020, penilaian/assessment GCG dilakukan oleh assessor internal. Hasil dan Rekomendasi Assessment GCG Hasil penilaian GCG BBI pada tahun 2020 mencapai skor 78.1050% (kategori: Baik) sedangkan tahun sebelumnya sebesar 75.293%.

Penerapan Manajemen Risiko

BBI menerapkan Manajemen Risiko sebagai upaya yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Jajaran Manajemen, dan karyawan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan.

Penerapan manajemen risiko merupakan bagian dari penerapan GCG, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Direksi wajib menyusun manajemen risiko manual dan membangun serta melaksanakan program manajemen risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan GCG, dan menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

personnel include:

- GCG Guidelines
- Manual board
- Code of Ethics
- LHKPN guidelines
- Violation Reporting System Guidelines
- Risk Management System Guidelines
- Guidelines for Classification and Information Disclosure

On an ongoing basis, BBI continues to implement GCG in every operational implementation of the company. The aim is none other than so that GCG becomes the spirit in the daily operations of BBI at every level of the organization, so that GCG can become the main pillar that will support the Company's business growth.

For 2020, the GCG assessment is carried out by an internal assessor. GCG Assessment Results and Recommendations The results of BBI's GCG assessment in 2020 reached a score of 78.1050% (category: Good) while the previous year was 75.293%.

Application of Risk Management

BBI implements Risk Management as an effort carried out by the Board of Commissioners, Directors, Management, and employees to identify, analyze, manage, and manage risks that can affect the achievement of company goals.

The implementation of risk management is part of the implementation of GCG, based on the Regulation of the Minister of BUMN Number: PER-01 / MBU / 2011 dated 1 August 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The Board of Directors is required to compile a manual risk management and develop and implement an integrated corporate risk management program as part of the implementation of GCG, and submit a risk management profile report and its handling at the same time company periodicals.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BBI menyadari bahwa Perseroan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat umum. Perseroan meyakini bahwa keberadaan dan kemajuan usahanya haruslah memiliki nilai untuk sesama. Wujud tanggung jawab tersebut dituangkan melalui berbagai aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah menjadi aktivitas tidak terpisahkan dalam Operasional Perusahaan.

Pelaksanaan CSR terfokus pada 4 (empat) program utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu bidang social, pendidikan, agama, dan lingkungan.

Sepanjang tahun 2020, BBI telah merealisasikan penyaluran dana untuk Pengembangan Sosial Kemasyarakatan melalui PKBL. Penerimaan dana PKBL didapat dari alokasi laba bersih tahun sebelumnya, dengan dasar pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri BUMN

Apresiasi

Menutup Laporan ini, Direksi menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada Dewan Komisaris atas nasihat, rekomendasi serta arahan dalam pengelolaan operasi dan bisnis Perseroan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan, demikian pula kepada regulator, pelanggan, pemasok dan mitra usaha, Direksi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah tercipta. sehingga seluruh kegiatan pengelolaan Perseroan dapat berjalan lancar sepanjang tahun ini.

Kepada Jajaran Manajemen dan seluruh karyawan BBI, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan. Semoga ke depan, Perseroan dapat terus memberikan manfaat yang lebih besar kepada Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya, sehingga performa bisnis Perseroan dapat terealisasi lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang.

Corporate social responsibility

BBI realizes that the Company also has a responsibility towards the general public. The Company believes that the existence and progress of its business must have value for others. This responsibility is manifested in various Corporate Social Responsibility (CSR) activities which have become inseparable activities in the Company's operations.

CSR implementation focuses on 4 (four) main programs that are in direct contact with the community, namely the social, education, religious and environmental fields.

Throughout 2020, BBI has realized the distribution of funds for Community Social Development through PKBL. PKBL fund receipts are obtained from the allocation of the previous year's net profit, on the basis of implementing Regulation of the Minister of BUMN Number: PER02 / MBU / 7/2017 dated July 5, 2017 concerning changes to regulations of the Minister of BUMN

Appreciation

Closing this report, the Board of Directors would like to respect and thank the Board of Commissioners for their advice, recommendations and direction in managing the operations and business of the Company. The Board of Directors would also like to thank the Shareholders for their trust and support, as well as to regulators, customers, suppliers and business partners, the Board of Directors would like to thank for the cooperation that has been created. so that all management activities of the Company can run smoothly throughout this year.

To the Management and all BBI employees, the Board of Directors would like to express its highest appreciation for the dedication that has been given. Hopefully in the future, the Company can continue to provide greater benefits to Shareholders and other Stakeholders, so that the Company's business performance can be realized even better in the coming years.

Surabaya, 31 Mei 2021

Surabaya, May 31, 2021

Atas Nama Dewan Komisaris

On Behalf of the Board Commissioner



Yoyok Hadi Satriyono

Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)

Responsibility Statement of Board of Directors and Board of Commissioners
for 2020 Annual Report of PT Boma Bima Indra (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Boma bisma Indra (Persero) tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Mei 2021

Direksi,

Board of Directors,



Yoyok Hadi Satriyono

Direktur Utama
President Directors



M. Agus Budiyo

Direktur
Director

We, the undersigned, hereby declare that all information in 2019 Annual Report of PT Bpma Bisma Indra (Persero) has been fully disclosed and we are solely responsible upon the accuracy of all contents of the Annual Report.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, May 31, 2021

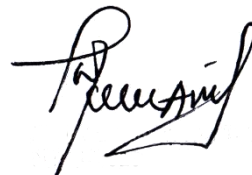
Dewan Komisaris,

Board of Directors,



Masrokan

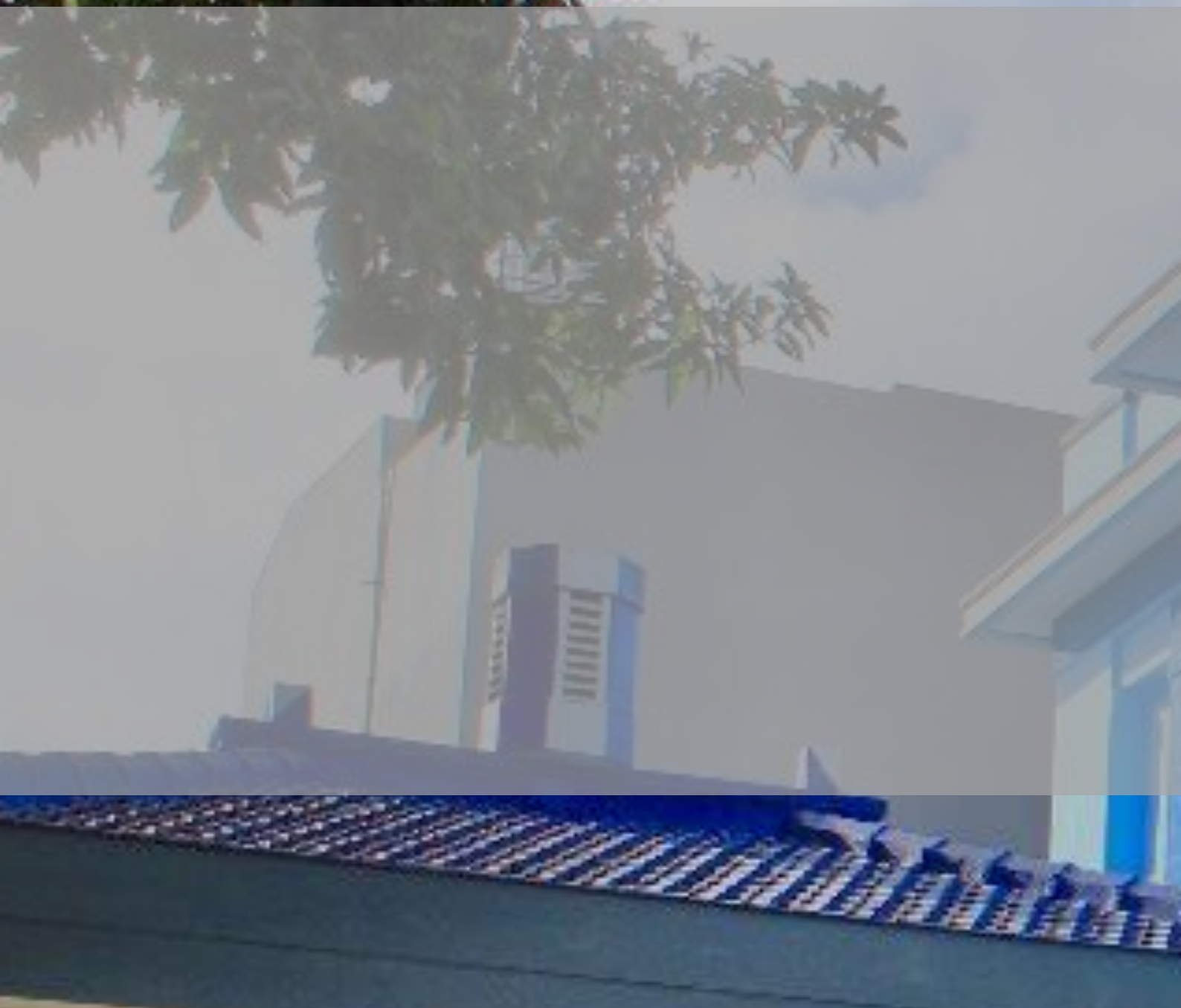
Komisaris Utama
President Commissioners



Jumain Appe

Komisaris
Commissioner







03

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

IDENTITAS PERUSAHAAN

Corporate Identity

Nama <i>Name</i>	PT Boma Bisma Indra (Persero)	<i>PT Boma Bisma Indra (Persero)</i>
Nama Panggilan <i>Familiar Name</i>	BBI	<i>BBI</i>
Bidang Usaha <i>Business Field</i>	Manufaktur dan Konstruksi (Heavy Industri dan Mesin Diesel)	<i>Manufacturing and Construction (Heavy Industry and Diesel Engines)</i>
Tanggal Pendirian <i>Establishment Date</i>	30 Agustus 1971	<i>August 30, 1971</i>
Jenis/Badan Hukum <i>Legal Status</i>	Perusahaan Perseroan Terbatas/Badan Usaha Milik Negara	<i>Limited Liability Company/ State-Owned Enterprise</i>
Dasar Hukum Pendirian <i>Establishment Legal Basis</i>	Akta Pendirian Perusahaan No. 76 tanggal 30 Agustus 1971 yang dibuat dihadapan Bebasa Daeng Lalo Notaris di Jakarta dan anggaran dasar PT BBI (Persero) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No: 41 Tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Hj. Eva Fitri Sagitarina, S.H., Notaris di Surabaya dan telah disahkan oleh Menteri Kemenkumham Republik Indonesia No. SK. AHU-AH.01.03-0401105 Tahun 2020.	<i>Company Establishment Deed No. 76 dated 30 August 1971 which was drawn up before Bebasa Daeng Lalo Notary in Jakarta and the articles of association of PT BBI (Persero) as having undergone several changes, most recently with Notary Deed No: 41 dated 22 October 2020 drawn up before Hj. Eva Fitri Sagitarina, S.H., Notary in Surabaya and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. SK. AHU-AH.01.03-0401105 Year 2020.</i>
Kepemilikan <i>Ownership</i>	100% saham dimiliki oleh Negara, dengan kewenangan tertinggi dikelola oleh negara yang dikuasakan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berdasarkan SKK-44/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020.	<i>100% of the shares are owned by the State, with the highest authority being managed by the state which is authorized by PT. Asset Management Company (Persero) based on SKK-44 / MBU / 09/2020 dated September 30, 2020.</i>
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	Rp 1.300.000.000.000, (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) terbagi atas : 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan 1.299.999 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).	<i>Rp. 1,300,000,000,000, (one trillion three hundred billion rupiah), divided into: 1 (one) series A Dwiwarna share; and 1,299,999 (one million two hundred ninety nine thousand nine hundred and ninety nine rupiah) series B shares, each with a nominal value of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah).</i>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Fully Paid in Capital</i>	Rp 340.916.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar Sembilan ratus enam belas juta rupiah) ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 340.916 (tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus enam belas) saham. 100% telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.	<i>Rp. 340,916,000,000, - (three hundred and forty billion nine hundred and sixteen million rupiah) was issued and subscribed by the Republic of Indonesia as much as 340,916 (three hundred forty thousand nine hundred and sixteen) shares. 100% fully paid by the Republic of Indonesia.</i>
Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	344 orang (induk)	<i>344 employees (Perent)</i>
Alamat Kantor Pusat <i>Head Office Address</i>	PT Boma Bisma Indra (Persero) Jl. KHM Mansyur 229, Surabaya 60162 Jawatimur, Indonesia Phone :+62 31 3530513, +62 31 3530514 Fax : +62 31 3531686, Email: corporate@ptbbi.co.id Website: www.ptbbi.co.id	<i>PT Boma Bisma Indra (Persero) Jl. KHM Mansyur 229, Surabaya 60162 Jawatimur, Indonesia Phone :+62 31 3530513, +62 31 3530514 Fax : +62 31 3531686, Email: corporate@ptbbi.co.id Website: www.ptbbi.co.id</i>
Kantor Cabang Jakarta <i>Jakarta Branch Office</i>	MENARA MTH 10 Floor Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono,	<i>MENARA MTH 10 Floor Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono,</i>

	Jakarta Selatan 12820 Email: marketing@ptbbi.co.id	<i>Jakarta Selatan 12820 Email: marketing@ptbbi.co.id</i>
Media Sosial <i>Sosial Media</i>	Facebook : Boma Bisma Indra Twitter : bbi_persero Instagram : bbi.persero YouTube : Corporate PT BBI	<i>Fase Book : Boma Bisma Indra Twitter : bbi_persero Instagram : bbi.persero YouTube : Corporate PT BBI</i>
Entitas Anak <i>Subsidiary</i>	PT Bromo Steel Indonesia	<i>PT Bromo Steel Indonesia</i>



SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

Brief History of the Company

1865

Perusahaan Belanda
De Bromo NV

Dutch Company
De Bromo NV

1878

Perusahaan Belanda
De Industrie NV

Dutch Company
De Industrie NV

1918

Perusahaan Belanda
De Vulkan

Dutch Company
De Industrie NV

1957 | DINASIONALKAN

Ketiga Perusahaan Belanda tersebut
DINASIONALKAN menjadi **PN BOMA; PN
BISMA; PN INDRA** dibawah koordinasi
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

1957 | NATIONALIZED

The three Dutch companies were **NATIONALIZED** to
become **PN BOMA; PN BISMA; PN INDRA** is under
the coordination of **DEPARTMENT OF INDUSTRY**

1971 | BERDIRINYA BBI

Pada tahun ini PT Boma Bisma Indra resmi **didirikan**
dari ketiga Perusahaan Belanda tersebut. Hingga
saat ini diperingati sebagai tahun kelahiran PT Boma
Bisma Indra (BBI)

1971 | ESTABLISHMENT OF BBI

In this year PT Boma Bisma Indra was officially
established from the three Dutch companies.
Until now it is celebrated as the year of birth of PT
Boma Bisma Indra (BBI)

1989

PT BBI **mengambil alih 100%** PT BROMO
STEEL INDONESIA (PT BOSTO)

PT BBI **takes over 100%** of PT BROMO
STEEL INDONESIA (PT BOSTO)



1998

PT BBI berubah status menjadi **anak perusahaan PT Pakarya Industri (Persero)** berdasarkan Peraturan Pemerintah No 35/1998 dan Instruksi Presiden Nomor 15/1998

PT BBI changed its status to a **subsidiary of PT Pakarya Industri (Persero)** based on Government Regulation No 35/1998 and Presidential Instruction Number 15/1998

1999

Adanya **perubahan Anggaran Dasar** PT Pakarya Industri (Persero) menjadi **PT Bahana Pakarya Industri Strategis/PT BPIS (Persero)**. Hal itu membuat PT BBI menjadi salah satu **anak perusahaan PT BPIS (Persero)**

There was a **change in the Articles of Association** of PT Pakarya Industri (Persero) to **PT Bahana Pakarya Strategic Industries / PT BPIS (Persero)**. That made PT BBI a **subsidiary of PT BPIS (Persero)**

2002

Pembubaran PT BPIS (Persero) dan adanya Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke PT BBI membuat **PT BBI** menjadi Persero **dibawah** koordinasi **Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara**

The dissolution of PT BPIS (Persero) and the inclusion of the Republic of Indonesia's State Capital in PT BBI made **PT BBI** a Persero **under** the coordination of the **State Ministry of State-Owned Enterprises**

2008 - SEKARANG

Atas dasar perubahan anggaran dasar BBI yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maksud dan tujuan didirikannya BBI adalah untuk turut serta melaksanakan dan **menunjang** program **pemerintah** di **bidang ekonomi dan pembangunan**, khususnya dalam bidang **Industri Konversi Energi, Industri Permesinan, Sarana dan Prasarana Industri serta Agro Industri, Jasa dan Perdagangan**.

On the basis of changes to the BBI's articles of association that have been ratified by the Minister of Law and Human Rights, the purpose and objective of establishing BBI is to participate in implementing and supporting government programs in the economic and development fields, particularly in the fields of Energy Conversion Industry, Machinery Industry, Facilities and Industrial Infrastructure and Agro Industry, Services and Trade

JEJAK LANGKAH

Milestone

Dalam perjalanan bisnisnya, PT Boma Bisma Indra (Persero) layaknya sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan.

On this business process, PT Boma Bisma Indra such as a ship that's sailing in the Ocean.

2013 Karam

Pada tahun 2013 BBI mengalami kondisi yang buruk dan kerugian layaknya seperti kapal yang sedang karam. Penjualan yang diperoleh tahun 2013 sebesar 166 Miliar dengan rugi usaha 11 Miliar dan rugi bersih 19 M. Pada tahun 2013 EBITDA BBI sebesar -10 M. Disisi lain jumlah aset 254 M, liabilitas 322 M, dan ekuitas -68 M.

2013 Sinking Ship

In 2013 BBI experienced bad conditions and losses like a shipwreck. Sales obtained in 2013 amounted to 166 billion with an operating loss of 11 billion and a net loss of 19 billion. In 2013 BBI's EBITDA was -10 billion. On the other hand, total assets were 254 billion, liabilities were 322 billion, and equity was -68 billion.

2014 – 2015 Selamatkan Kapal

Boma Bisma Indra (BBI) pada tahun 2014-2015 melakukan strategi **"selamatkan kapal"**.

Rangkaian program korporasi yang telah dilaksanakan:

- Rasionalisasi karyawan, pemangkasan Biaya
- Penjualan aset tidak produktif
- Agent of Change (AOC)
- Restrukturisasi organisasi
- Revaluasi aset
- Tax amnesty

2014 – 2015 Save the Ship

Boma Bisma Indra (BBI) in 2014-2015 carried out the **"save the ship"** strategy.

A series of corporate programs that have been implemented:

- Employee rationalization, Cost cutting
- Sales of unproductive assets
- Agent of Change (AOC)
- Organizational restructuring
- Asset revaluation
- Tax amnesty

2016-2017 BBI Sukses Laba

Diakhir tahun 2016 BBI berhasil mencapai kinerja laba usaha, hal inilah yang telah menumbuhkan kembali rasa percaya diri kepada seluruh stakeholder sehingga dengan adanya stakeholder yang kuat, core bisnis yang menjadi andalan, team manajemen yang solid dan bahu membahu untuk mencapai laba dan dukungan sumber pembiayaan yang kuat dari perbankan, supplier, subkon serta partnership

2016 – 2017 BBI Profit Success

At the end of 2016 BBI succeeded in achieving operating profit performance, this is what has regenerated confidence in all stakeholders so that with the presence of strong stakeholders, mainstay business cores, a solid management team and work hand in hand to achieve profits and support from reliable sources of financing. Strong support from banks, suppliers, subcontractors and partnerships with strategic

dengan perusahaan strategis menjadi modal untuk survive.

Awal tahun 2017 BBI, mencanangkan program "Turn Around BBI from Zero to Hero, dari Rugi Usaha menjadi Laba Usaha". Hal ini yang menjadi titik point untuk menuju kemajuan dan rail track yang positif. Manajemen telah melakukan banyak terobosan agar perusahaan menjadi semakin sehat dan terus berkembang. Program korporasi yang telah dilaksanakan diantaranya:

- Positif laba usaha
- Positif laba bersih
- Kredit modal kerja positif
- Mengatasi seretnya arus kas
- Solusi dari tekanan untuk membayar kewajiban.

2018 – 2019 BBI Terlahir Kembali

Pada tahun 2018-2019, layaknya kapal yang sedang berlayar BBI melakukan perbaikan kapal (perusahaan) guna melahirkan kembali bisnis perusahaan yang semakin baik. Pada tahun 2018-2019 BBI dengan konsisten melakukan strategi-strategi meliputi:

1. Semangat tumbuh, berpikir lebih kreatif
2. Bermitra untuk membangun industri manufaktur mesin diesel
3. Memperkuat core business Diesel Engine, Condensor, Boiler, & Pressure Vessel
4. Optimalisasi asset: sekema redesign workshop diesel engine & debt restrict to PPA
5. Mengembangkan artificial intelegencia product, smart bridge
6. Early delivery sebagai kinerja unggul BBI

Pada tanggal 23 Agustus 2018 telah dilakukan penandatanganan LOI antara PT Boma Bisma Indra (Persero) Doosan Infracore dan PT Equity Teknologi Manajemen. Kerjasama ini bertujuan mengembangkan kembali produk diesel engine. Tanggal 21 Agustus 2019 Boma Bisma Indra telah melaksanakan launching Diesel Engine yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini M. Sumarno.

companies are the capital to survive.

In early 2017, BBI launched the program "Turn Around BBI from Zero to Hero, from Operating Loss to Operating Profit". This is the point for progress and a positive rail track. Management has made many breakthroughs so that the company becomes healthier and continues to grow. Corporate programs that have been implemented include:

- Positive operating profit
- Positive net profit
- Positive working capital credit
- Overcome the drag of cash flow
- Solutions from pressure to pay obligations

2018 – 2019 BBI Reborn

In 2018-2019, like a ship that is sailing, BBI repairs the ship (company) to regenerate the company's business which is getting better. In 2018-2019 BBI consistently carried out strategies including:

1. Spirit to grow, think more creatively
2. Partnering to build a diesel engine manufacturing industry
3. Strengthening the core business of Diesel Engine, Condenser, Boiler, & Pressure Vessel
4. Asset optimization: diesel engine workshop redesign scheme & debt restrict to PPA
5. Develop artificial intelligence products, smart bridges
6. Early delivery as BBI's superior performance

On August 23, 2018, the LOI was signed between PT Boma Bisma Indra (Persero) Doosan Infracore and PT Equity Teknologi Manajemen. This collaboration aims to redevelop diesel engine products. On August 21, 2019, Boma Bisma Indra has launched the Diesel Engine which was inaugurated by the Minister of SOEs Rini M. Sumarno.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

**2020****Bertahan ditengah Pandemi**

Sepanjang tahun 2020, PT Boma Bisma Indra (Persero) melaksanakan Program penguatan bisnis inti melalui produk-produk unggulannya dengan mengedepankan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) melalui tiga pilar program yaitu Restrukturisasi Perusahaan, Pengembangan Unit Bisnis Diesel dan Kerjasama Sinergi BUMN. Namun pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah berpengaruh besar pada bisnis Perseroan, sehingga target Kinerja 2020 tidak tercapai bahkan mengalami sedikit penurunan. Dalam mengatasi kondisi ini, Perseroan menerapkan strategi bertahan ditengah Pandemi Covid-19.

Pada awal tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia membentuk Klaster Industri Manufaktur yang beranggotakan PT Boma Bisma Indra, PT Barata Indonesia, PT INKA, PT IKI, PT DKB dan PT DPS yang kemudian ditambah PT Rekind. Akhir tahun 2020, anggota Klaster Industri Manufaktur yaitu Barata Indonesia, Boma Bisma Indra, IKI, DPS dan DKB masuk kedalam Klaster Danareksa-PPA untuk menjalankan proses restrukturisasi keuangan dibawah supervisi Danareksa dan PPA selaku kuasa pemegang saham berdasarkan Surat kuasa khusus nomor : SKK-44/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020.

2020**Survive Around Pandemic**

Throughout 2020, PT Boma Bisma Indra (Persero) implemented a core business strengthening program through its superior products by prioritizing AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) through three program pillars namely Company Restructuring, Diesel Business Unit Development and SOE Synergy Cooperation. However, the Covid-19 pandemic that has hit the world has had a major impact on the Company's business, so the 2020 Performance target was not achieved and even experienced a slight decline. In overcoming this condition, the Company implemented a strategy to survive in the midst of the Covid-19 Pandemic.

In early 2020, the government of the Republic of Indonesia formed a Manufacturing Industry Cluster consisting of PT Boma Bisma Indra, PT Barata Indonesia, PT INKA, PT IKI, PT DKB and PT DPS which was later added by PT Rekind. At the end of 2020, members of the Manufacturing Industry Cluster namely Barata Indonesia, Boma Bisma Indra, IKI, DPS and DKB entered the Danareksa-PPA Cluster to carry out the financial restructuring process under the supervision of Danareksa and PPA as the proxy of shareholders based on special power of attorney number: SKK-44 /MBU/09/2020 on 30 September 2020.

MILESTONE



2020

**Survive Arround
Pandemic Covid-19**



2018-2019

BBI Reborn

Repair the ship



2014-2015

Save the ship

Preare the ship



2016-2017

Profit Success

Floating the ship



2013

Sinking Ship

*"BBI such as a ship that's
sailing in the ocean"*



BIDANG USAHA

Business Fields

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, yang disahkan berdasarkan Akta No. 62 tanggal 27 Februari 2017 dihadapan Hj. Eva Fitri Sagita, SH beserta perubahannya, pada pasal 3 menyebutkan bahwa Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha dibidang industri konversi energy, industry permesinan, sarana 7 prasaranaindustri dan agro industry, jasa dan perdagangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang tertera pada Anggaran Dasar Perusahaan tersebut, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan pada tahun 2019 antara lain adalah:

- a. Pembuatan motor diesel dan bensin, alat-alat pertanian, mesin mekanis dan peralatan pabrik, mesin dan peralatan listrik, alat angkut, alat konstruksi dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan bidang energi dan migas.
- b. Pembuatan desain dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi baja, plat pengecoran logam dan konstruksi bangunan (baik kering maupun basah) yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- c. Jasa perakitan dan pemasangan (montage) dari barang-barang produksi sendiri maupun pihak lain.
- d. Jasa kerekayasaan meliputi penelitian, perencanaan desain dan konstruksi.
- e. Jasa manajemen dan konsultasi pembangunan proyek.
- f. Jasa pemeliharaan dan reparasi peralatan industri.
- g. Jasa pengukuran dan kalibrasi peralatan industri.
- h. Perdagangan barang dan jasa hasil produksi sendiri maupun pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- i. Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan

In accordance with the latest Articles of Association of the Company, which was ratified by Deed No. 62 on 27 February 2017 in front of Hj. Eva Fitri Sagita, SH and its amendments, in article 3 states that the Company was established with the intent and purpose to conduct business in the energy conversion industry, machinery industry, industrial and agro-industry infrastructure, services and trade as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce goods and services of high quality and strong competitiveness to gain/pursue profits in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Business Activities Undertaken

To achieve the aims and objectives stated in the Articles of Association of the Company, the business activities carried out by the Company in 2019 include:

- a. Manufacture of diesel and gasoline motors, agricultural equipment, mechanical machinery and factory equipment, electrical machinery and equipment, transportation equipment, construction equipment and other equipment related to the energy and oil and gas sector.
- b. Design and implementation of steel construction work, metal casting plates and building construction (both dry and wet) related to these activities.
- c. Assembly and installation services (montage) of goods produced by themselves and other parties.
- d. Engineering services include research, design planning and construction.
- e. Project development management and consulting services.
- f. Industrial equipment maintenance and repair services.
- g. Industrial equipment measurement and calibration services.
- h. Trade in goods and services produced by themselves and other parties, both domestically and abroad.
- i. The Company can conduct business activities in order to optimize the utilization

sumber daya yang dimiliki perseroan untuk pergudangan, properti, penampungan dan penyaluran bahan-bakar, pendidikan dan penelitian.

Terdapat beberapa kegiatan usaha utama maupun pendukung yang belum dijalankan oleh Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan masih berfokus untuk mengembangkan lini bisnis yang kini sedang dijalankan.

Produk dan Jasa

BBI merupakan perusahaan Manufaktur dan konstruksi yang terdiri dari 2 (dua) bisnis utama yaitu heavy industri dan mesin diesel yang dibagi dalam 3 (tiga) lini usaha yaitu Mesin Peralatan Industri, Manajemen Proyek dan Jasa, serta Diesel Engine. Bergerak di sektor oil and gas, energi, cement and mining dan sektor agro. Segmen pasar yang dibidik BBI adalah proyek-proyek Industri dan konstruksi beserta turunannya baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, sesama BUMN maupun oleh pihak swasta.

Produk dan jasa yang ditawarkan BBI adalah sebagai berikut:

1. Divisi Mesin Peralatan Industri (MPI)

Bidang usaha Divisi MPI memiliki variasi dari produk-produk pendukung Industrial Plant dan konstruksi. Manufaktur dengan fabrikasi baja menghasilkan produk seperti condenser, pressure vessel, high exchanger, column, FWST, high pressure heater, modules & skids, konstruksi baja, struktur rangka baja, conveyor, piping, tower, jembatan rangka baja, dan steel plate work lainnya serta casting untuk:

- Industri konversi energi
- Industri permesinan
- Sarana dan prasarana industri
- Pemeliharaan Equipment

2. Divisi Manajemen Proyek dan Jasa (MPJ)

Bidang usaha Divisi MPJ meliputi :

- Subsistem Engineering Procurement dan Construction (EPC) dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan meliputi engineering, pekerjaan erection, installation, mechanical, piping dan electrical serta
- Industrial Plant yaitu membangun suatu processing plant, yang terdiri atas fasilitas bangunan, serangkaian fasilitas mesin,

of the resources owned by the Company for warehousing, property, storage and distribution of fuel, education and research.

There are several main and supporting business activities that have not been carried out by the Company. This is because the Company is still focusing on developing the business lines that are currently being run.

Products And Services

BBI is a Manufacturing and construction company consisting of 2 (two) main businesses, namely heavy industry and diesel engines which are divided into 3 (three) business lines, namely Industrial Equipment Machinery, Project Management and Services, and Diesel Engines. Engaged in the oil and gas sector, energy, cement and mining and the agro sector. The market segments targeted by BBI are Industrial and construction projects and their derivatives, both those developed by the Government, fellow SOEs and by the private sector.

The products and services offered by BBI are as follows:

1. Industrial Equipment Machinery Division (MPI)

The MPI Division's line of business has a variety of supporting products for Industrial Plants and construction. Manufacturing with steel fabrication produces products such as condensers, pressure vessels, high exchangers, columns, FWST, high pressure heaters, modules & skids, steel construction, steel frame structures, conveyors, piping, towers, steel truss bridges, and other steel plate work as well as casting for:

- Energy conversion industry
- Machinery industry
- Industrial facilities and infrastructure
- Equipment Maintenance

2. Project Management and Services Division (MPJ)

MPJ Division's business fields include:

- Engineering Procurement and Construction (EPC) subsystem with the scope of work carried out covering engineering, erection, installation, mechanical, piping and electrical work as well as
- Industrial Plant, namely building a processing plant, which consists of

peralatan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya sehingga dapat terbentuk suatu proses produksi dari raw material menjadi produk tertentu.

Produk dan jasa meliputi:

- a. Oil and Gas (Storage Tank, Pipeline , Airport Fuel Depot)
- b. Power Plant (PLTD/MG, PLTG/GU, PLTU, PLTP, PLTS/B)
- c. Industrial Plant (Pabrik Semen, Material Handling, Pabrik Kelapa Sawit, Pabrik Gula, Pabrik Bio-Etanol)
- d. Kalibrasi, Inspection, dan Testing
- e. Pemeliharaan(Operation/Maintenance)
- f. Supply chain

3. Divisi Diesel

Bersama dengan doosan infracore Co., Ltd., Korea. BBI membangun kembali industri manufaktur mesin diesel dengan fokus untuk menggabungkan teknologi dan produksi massal mesin infracore Doosan dengan menggunakan fasilitas produk BBI dan kompetensi bisnis lokal. Produk Divisi Diesel meliputi :

- a. Bare Engine, Diesel Pembangkit, Diesel Marine, dan Gas Engine
 - Diesel engine untuk main engine dan Generator Set
 - Diesel engine untuk heavy equipment
 - Diesel engine untuk traktor, agri culture, forklift, dan pompa
 - Diesel engine & CNG untuk bus dan truk Nasional
 - Diesel engine & gas untuk genset dan prime mover lainnya
- b. Spare Part

Sistem Manajemen BBI

Untuk memastikan BBI selalu menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan tuntutan pelanggan, penerapan Sistem Manajemen BBI menjadi kunci keberhasilan BBI. Sistem Manajemen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- b. Sistem Manajemen Mutu
- c. Sistem Manajemen Risiko
- d. Sistem Manajemen Lingkungan
- e. Sistem Manajemen Anti Penyuapan

building facilities, a series of machine facilities, equipment and other supporting facilities so that a production process can be formed from raw materials into certain products.

Products and services include:

- a. Oil and Gas (Storage Tank, Pipeline, Airport Fuel Depot)
- b. Power Plant (PLTD/MG, PLTG/GU, PLTU, PLTP, PLTS/B)
- c. Industrial Plant (Cement Factory, Material Handling, Palm Oil Mill, Sugar Factory, Bio-Ethanol Factory)
- d. Calibration, Inspection, and Testing
- e. Maintenance(Operation/Maintenance)
- f. supply chain

3. Diesel Division

Together with doosan infracore Co., Ltd., Korea. BBI is rebuilding the diesel engine manufacturing industry with a focus on combining technology and mass production of Doosan infracore engines using BBI's product facilities and local business competencies. Diesel Division products include:

- a. Bare Engine, Generating Diesel, Marine Diesel and Gas Engine
 - Diesel engine for main engine and Generator Set
 - Diesel engines for heavy equipment
 - Diesel engines for tractors, agri culture, forklifts, and pumps
 - Diesel engine & CNG for National buses and trucks
 - Diesel engine & gas for generators and other prime movers
- b. Spare Part

Management System in BBI

To ensure that BBI always produces products and services in accordance with customer demands, the implementation of the BBI Management System is the key to BBI's success. The Management System in question is as follows:

- a. Occupational Health and Safety Management System
- b. Quality management system
- c. Risk Management System
- d. Environmental Management System
- e. Anti-Bribery Management System

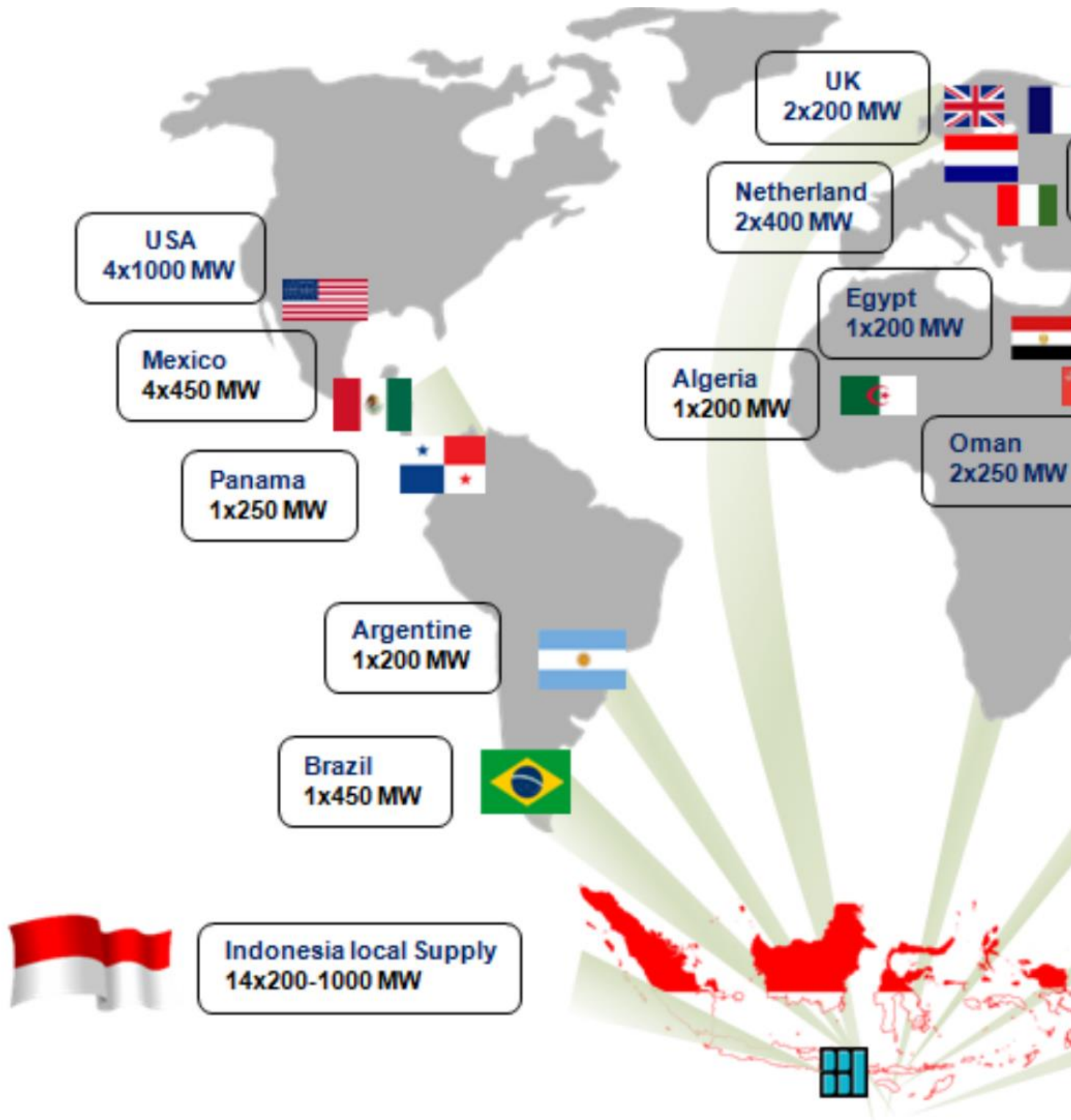


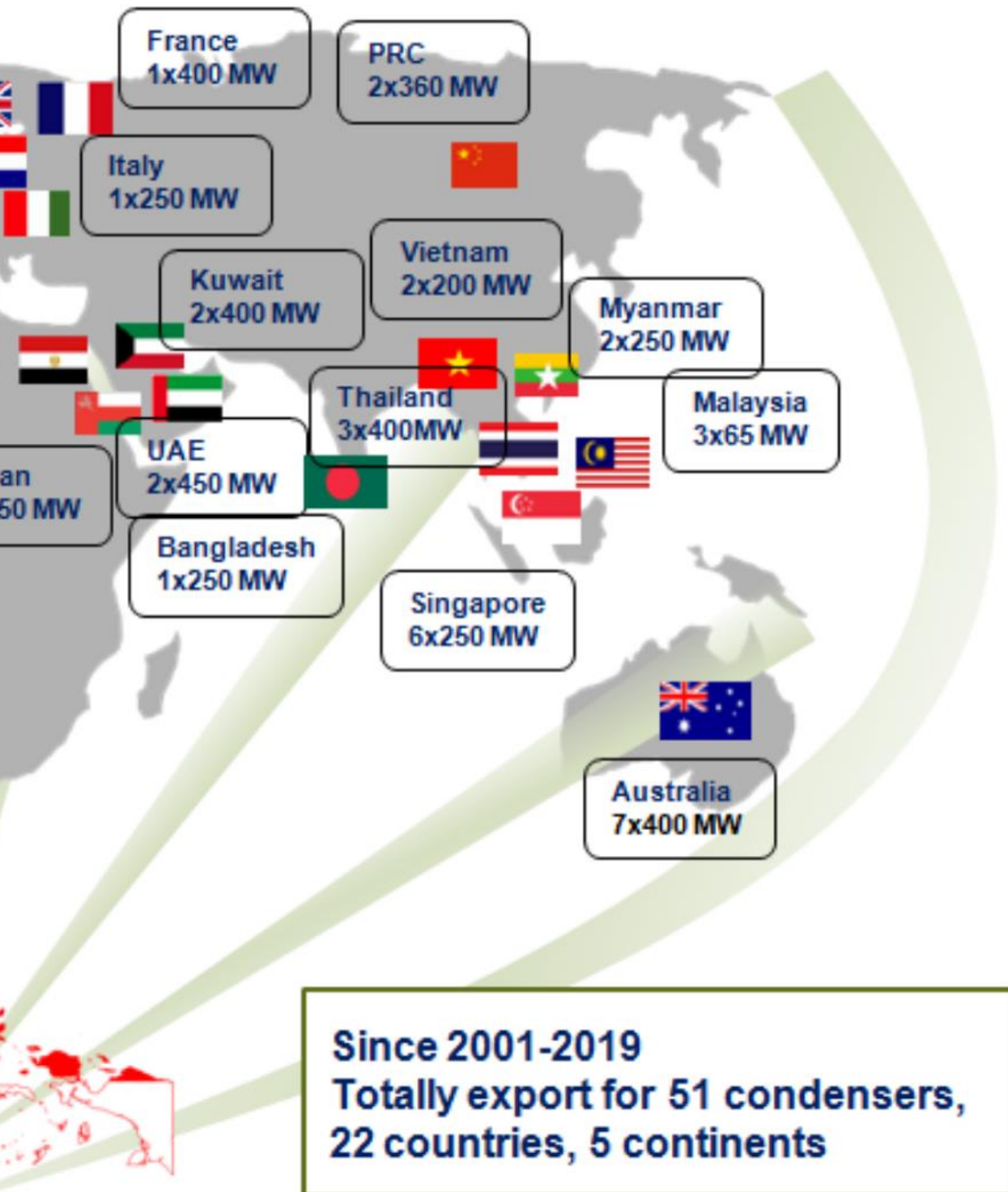
Pipepile
Product of PT Bosto
Relokasi Flare BPP-II RDMP RU V Balikpapan

JARINGAN BISNIS

EKSPORT PT BBI

PT BBI Export Network





VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Vision, Mission and Corporate Value

Visi

Menjadi Regional Leader dibidang Manufaktur Peralatan Industri dan Mesin Diesel berteknologi tinggi dan ramah lingkungan

Becoming a Regional Leader in the Manufacturing of Industrial Equipment and Diesel Engines with high technology and environmentally friendly

Misi

1. Memperkuat kompetensi bidang manufaktur dan konstruksi yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi
Strengthening competence in manufacturing and construction that is able to adapt to advances in information technology
2. Menumbuhkan industri mesin diesel yang mampu menjawab tuntutan pasar, standar regulasi yang berlaku dengan harga yang kompetitif
Growing a diesel engine industry capable of responding to market demands, applicable regulatory standards at competitive prices
3. Menumbuhkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi proses produksi disertai dengan peningkatan kandungan lokal untuk meningkatkan daya saing produk
Foster innovation to improve the efficiency of the production process accompanied by an increase in local content to increase product competitiveness
4. Solution Provider Orientation melalui bisnis terintegrasi baik sesama unit bisnis dalam satu perusahaan ataupun sinergi BUMN dan mitra strategis dengan pihak ke tiga
Solution Provider Orientation through integrated business, both among business units within the same company or the synergy of BUMN and strategic partners with third parties

Review Terhadap Visi dan Misi Perusahaan

Pada tahun 2019, BBI telah melakukan kajian dan review mengenai kesesuaian Visi dan Misi Perusahaan terhadap kondisi Perseroan saat ini serta tantangan usaha yang akan dihadapi ke depan. Berdasarkan review yang dilakukan Manajemen, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyetujui visi dan misi tersebut yang kemudian ditetapkan dalam surat keputusan Direksi No. 053/Kpts.1000/1100/09.2020 tentang Penetapan Visi & Misi, Tujuan, Sasaran, Nilai Perusahaan, Tag Line dan Strategi dan Kompetensi Inti Perusahaan di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero).

Dengan penetapan visi tersebut, diharapkan perusahaan dapat beroperasi dengan standar internasional serta mampu bersaing di pasar regional. Usaha untuk mencapai visi perusahaan tersebut, tercermin dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020–2024 dimana arah pengembangan perusahaan yang ingin dicapai adalah menjadikan PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai Regional Leader dibidang Manufaktur Peralatan Industri dan Mesin Diesel berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.

Melalui visi tersebut, dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, Perseroan akan selalu memberikan pelayanan dan solusi terbaik bagi para pelanggan. Berkomitmen untuk selalu meningkatkan benefit kepada seluruh stakeholder. Senantiasa memberikan layanan produk dan jasa dengan kualitas tinggi kepada pelanggan, harga yang kompetitif, serta pelayanan yang memuaskan. Sedangkan kepada karyawan, Perseroan berupaya memberikan penghasilan yang baik dengan jaminan kelangsungan kerja dan sistem karir yang memadai serta rasa bangga kepada perusahaan. Kepada pemegang saham, Perseroan berkomitmen untuk selalu meningkatkan laba serta nilai pasar (market value) perusahaan. Demikian pula untuk stakeholder lainnya, perusahaan akan memberikan benefit sesuai dengan porsinya.

Review of the Company's Vision and Mission

In 2019, BBI has conducted a study and review regarding the suitability of the Company's Vision and Mission to the current condition of the Company and the business challenges that will be faced in the future. Based on the review conducted by the Management, the Board of Commissioners and the Board of Directors have approved the vision and mission which is then stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 053/Kpts.1000/1100/09.2020 concerning the Establishment of Vision & Mission, Goals, Targets, Corporate Values, Tag Line and Strategy and Company Core Competencies within PT Boma Bisma Indra (Persero).

With the establishment of this vision, it is hoped that the company can operate with international standards and be able to compete in the regional market. Efforts to achieve the company's vision are reflected in the Company's Long Term Plan for 2020–2024 where the direction of company development to be achieved is to make PT Boma Bisma Indra (Persero) a Regional Leader in the Manufacturing of Industrial Equipment and Diesel Engines with high technology and environmentally friendly.

Through this vision, with its capabilities and experience, the Company will always provide the best services and solutions for its customers. Committed to always increase the benefits to all stakeholders. Always provide products and services with high quality to customers, competitive prices, and satisfactory service. As for employees, the Company strives to provide good income with guaranteed work continuity and an adequate career system as well as a sense of pride for the company. To shareholders, the Company is committed to always increasing the company's profits and market value. Likewise for other stakeholders, the company will provide benefits in accordance with the portion.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

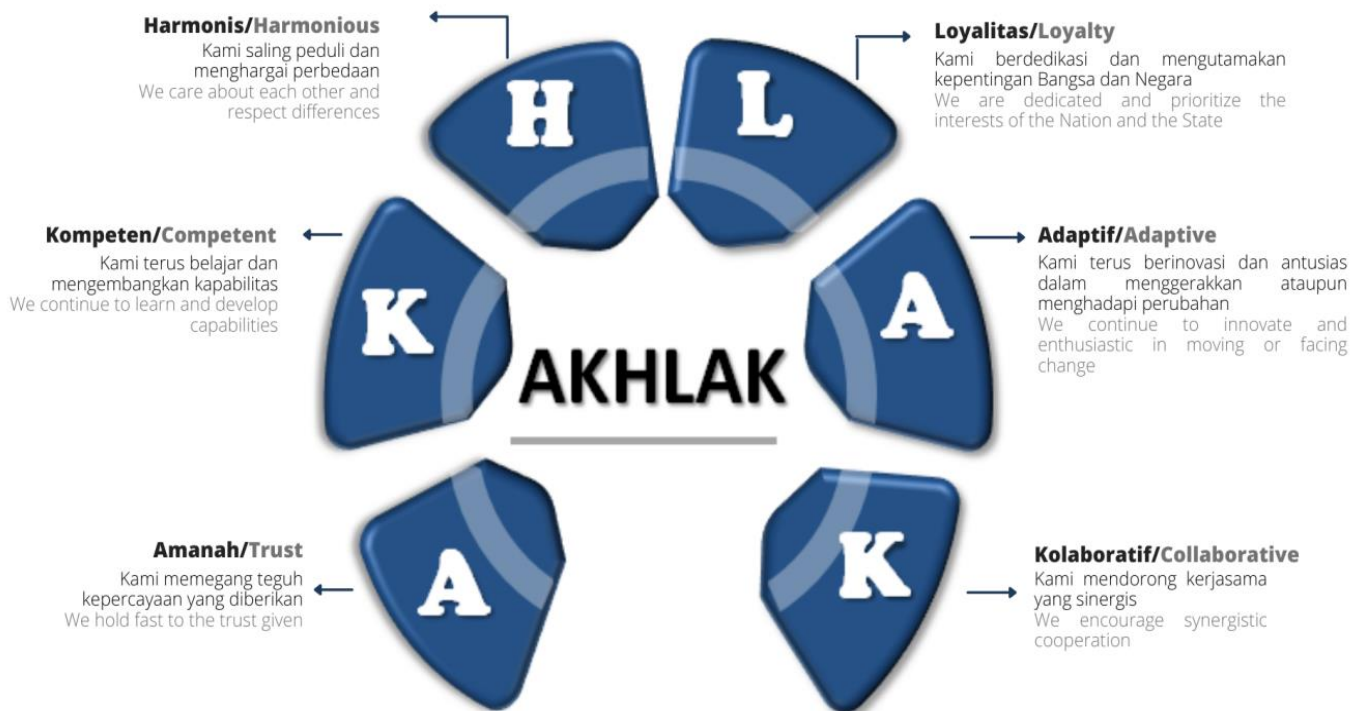
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Nilai Budaya Perusahaan

Nilai dan Budaya Perusahaan yang dikembangkan BBI adalah AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Budaya Perusahaan ini dikukuhkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 053/Kpts.1000/1100/09.2020 tanggal 14 September 2020. Nilai dan Budaya Perusahaan memiliki arti yang sangat penting dalam proses mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan. Karena itu, nilai AKHLAK harus dipahami dengan baik dan menjadi pedoman bagi seluruh insan BBI. Penjabaran nilai-nilai tersebut dilakukan dalam keseharian, melekat menjadi Budaya Perusahaan dan menjadi kepribadian insan BBI serta brand image Perusahaan.

Corporate Culture Values

The corporate values and culture developed by BBI are AKHLAK (Many, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative). This corporate culture was confirmed in the Directors' Decree Number 053/Kpts.1000/1100/09.2020 dated 14 September 2020. Corporate values and culture have a very important meaning in the process of realizing the Company's Vision and Mission. Therefore, the value of AKHLAK must be well understood and become a guideline for all BBI personnel. The elaboration of these values is carried out in daily life, attached to the Corporate Culture and becomes the personality of BBI people as well as the Company's brand image.



MAKNA LOGO DAN TAGLINE

Logo and Tagline Meanings



Makna Logo

Pada tahun 1971, Boma Bisma Indra terbentuk atas penyatuan 3 (tiga) perusahaan : PN Boma, PN Bisma dan PN Indra, yang dilandasi dengan semangat nasionalisme tinggi.

Logo Perusahaan terdiri dari 3 inisial huruf yaitu "B", "B", dan "I" yang dijadikan dalam satu kesatuan menjadi "BBI".

"B" pertama kepanjangan dari "Boma"

"B" kedua kepanjangan dari "Bisma"

dan "I" kepanjangan dari Indra

Makna Logo secara keseluruhan adalah "Insan BBI Dinamis dalam mengikuti perkembangan, tepat sasaran dan menunjukkan jati diri sebagai masyarakat Industri berat".

- Menggunakan Warna biru langit sesuai dengan corporate identity BBI, yang melambangkan profesionalisme.
- Bayangan putih sebagai gradasi, menunjukkan kedinamisan BBI sebagai perusahaan yang terus berkembang.
- Frame Hitam menunjukkan ketegasan, bermakna sebagai Industri Berat yang Kokoh dan Kuat.

Logo Meaning

In 1971, Boma Bisma Indra was formed as a result of the union of 3 (three) companies: PN Boma, PN Bisma and PN Indra, which were based on a high spirit of nationalism.

The Company's logo consists of 3 initials, namely "B", "B", and "I" which are combined into a single unit to become "BBI".

The first "B" stands for "Boma"

The second "B" stands for "Bhishma"

and "I" stands for Indra

The meaning of the logo as a whole is "BBI personnel are dynamic in following developments, right on target and showing their identity as a heavy industry community".

- Using sky blue color in accordance with BBI's corporate identity, which symbolizes professionalism.
- The white shadow as a gradation, shows the dynamics of BBI as a company that continues to grow.
- Black Frame shows firmness, meaning a Sturdy and Strong Heavy Industry.

Tagline Perusahaan

Balance Business Innovation

Balance (*Maintaining balance in every aspect*)
Keseimbangan dalam aspek perusahaan-keluarga, hak-kewajiban, jasmani-rohani, dan lain-lain.

Business (*Giving the best profit*)
Berbisnis harus memberikan keuntungan untuk kehidupan seluruh stakeholder.

Innovation (*Bringing new thing forward*)
Selalu berusaha mencari yang terbaik.

Melalui Tagline ini diharapkan dapat mendukung bisnis BBI, yaitu dapat memberikan keuntungan untuk semua pihak, dengan terus menciptakan inovasi-inovasi yang seimbang dalam segala aspek kehidupan. Selain itu untuk difahami serta diaplikasikan dalam setiap kegiatan bisnis Perseroan, sekaligus memberikan informasi kepada khalayak bahwa BBI berbisnis dengan berinovasi untuk terus melakukan perbaikan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan citra Perseroan dimata pelanggan maupun stakeholder.

Balance (*Maintaining balance in every aspect*)
Balance in aspects of company-family, rights-responsibilities, physical-spiritual, and others.

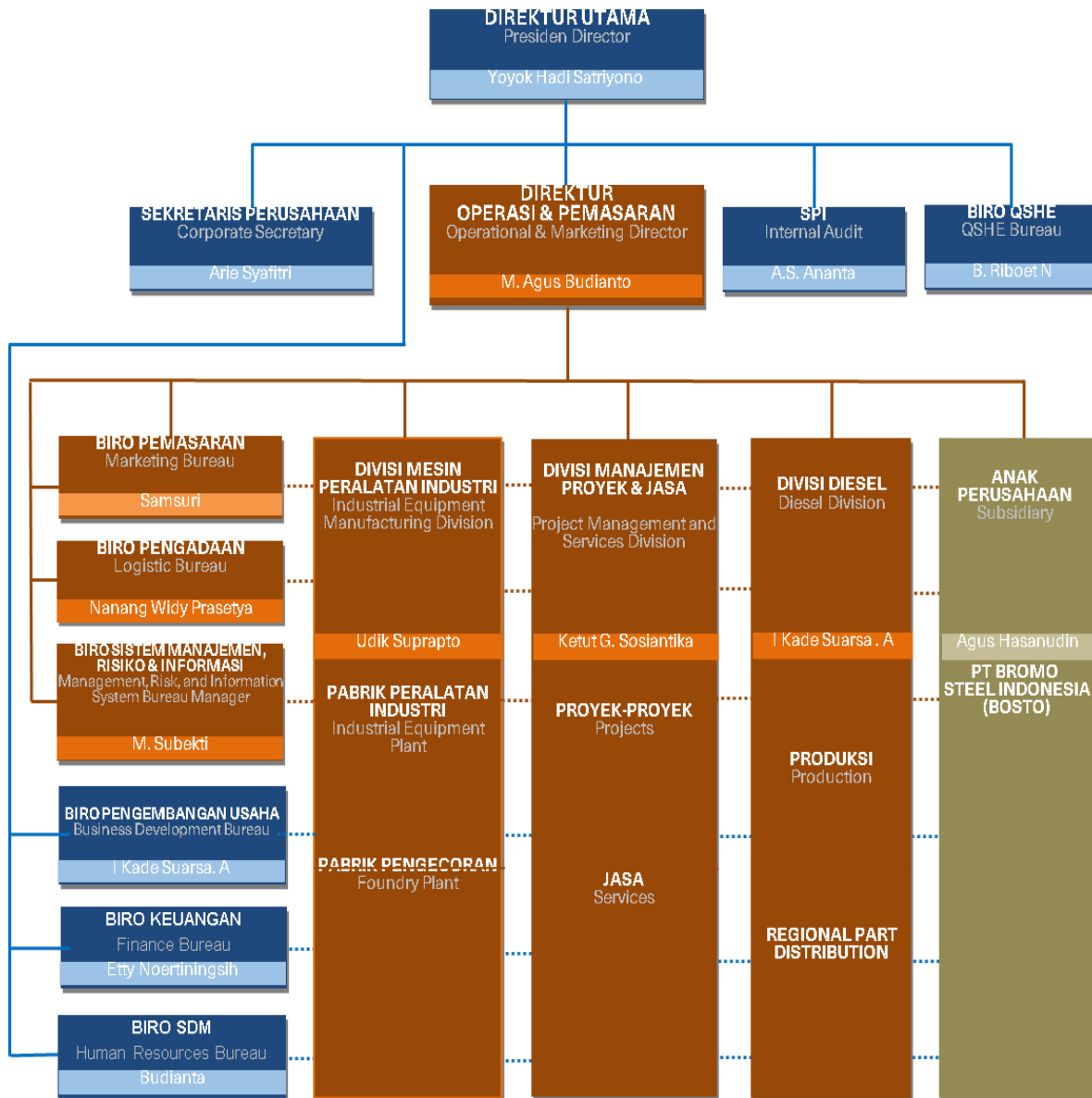
Business (*Giving the best profit*)
Doing business must provide benefits for the lives of all stakeholders.

Innovation (*Bringing new things forward*)
Always trying to find the best.

Through this Tagline, it is hoped that it can support BBI's business, which is to provide benefits for all parties, by continuing to create balanced innovations in all aspects of life. In addition, to be understood and applied in every business activity of the Company, as well as to provide information to the public that BBI does business by innovating to continuously make improvements. This is expected to improve the Company's image in the eyes of customers and stakeholders.

STRUKTUR ORGANISASI

Organization Structure



Seiring dengan dinamika perkembangan bisnis, Struktur Organisasi BBI telah mengalami beberapa kali perubahan. Per 2 Januari 2020, berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 001/Kpts.1000.1400/1.2020 Struktur Organisasi BBI adalah sebagaimana tersebut diatas.

Along with the dynamics of business development, The BBI organizational structure has undergone several changes. As of January 2, 2020, based on the Attachment to the Decree of the Board of Directors No. 001/Kpts.1000.1400/1.2020 The organizational structure of BBI is as mentioned above.

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Commissioners' Profiles

Drs. Masrokh an, MPA

Komisaris Utama

President Commissioner



Usia <i>Age</i>	54 tahun	54 years old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada, tahun 2008 • Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fisip Universitas Diponegoro, tahun 1992 	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Public Administration, Gadjah Mada University, 2008 • Bachelor of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University, 1992
Riwayat Pekerjaan <i>Employment History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Komunikasi (2019 – 2020) • Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, Kementerian Sekretaris Negara (2018 – 2019) • Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretaris Negara, Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Sekretaris Negara RI (2015 – 2018) • Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Kementerian Sekretaris Negara RI (2011 – 2015) 	<ul style="list-style-type: none"> • Expert Staff of the Minister of Industry in the Field of Communication, (2019 – 2020) • Assistant Deputy for State and Regional Institution Relations, Ministry of State Secretary (2018 - 2019) • Assistant Deputy for Public Relations Ministry of State Secretary, Chief of Information and Documentation Management Officer of the Ministry of State Secretary of the Republic of Indonesia (2015 - 2018) • Head of Public Information Management, Ministry of State Secretary of the Republic of Indonesia (2011 - 2015)
Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektur Jendral Kementerian Perindustrian, (2020 – sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspector General of the Ministry of Industry, (2020 - present)
Penghargaan Presiden RI <i>RI President Award</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Satyalancana Wira Karya, 2015 • Satyalancana Karya Satya XX Tahun, 2015 • Satyalancana Karya Satya X Tahun, 2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Satyalancana Wira Karya, 2015 • Satyalancana Karya Satya XX Tahun, 2015 • Satyalancana Karya Satya X Tahun, 2006
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali <i>Legal Basis for First Appointment</i>	Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2020 yang tertuang dalam Akta Keputusan RUPS Nomor 34 tanggal 22 Juli 2020.	Appointed for the first time as President Commissioner based on the resolution of the General Meeting of Shareholders which was held on July 15, 2020 as stated in the Deed of GMS Decree Number 34 dated July 22, 2020..
Kepemilikan Saham <i>Shareholding</i>	Tidak memiliki saham di PT Boma Bisma Indra (Persero)	Does not have shares in PT Boma Bisma Indra (Persero)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of

	maupun Pemegang Saham	Directors and Shareholders
Periode Jabatan <i>Position Tenure</i>	15 Juli 2020 - sekarang	15 July 2020 - present



DR. Ir. Jumain Appe, M.Si
Komisaris
Commissioner

Usia <i>Age</i>	61 tahun	61 years old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> Doktor/S3 Manajemen Bisnis, Universitas Padjajaran Bandung, tahun 2010 S2 Ekonomi Pembangunan, Universitas Darul Ulum Jombang, tahun 2002 S2 Digital Communication, Monash University Australia, tahun 1993 Sarjana Teknik Elektro Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 1985 	
Riwayat Pekerjaan <i>Employment History</i>	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT INTI (Persero), (2006-2012) Sekretaris Utama BPPT, (2005-2014) Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Pengawasan, Kementerian Riset dan Teknologi (2003-2005) Kepala Biro Perencanaan, KORPRI (1998-2001) 	
Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i>	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Jendral Penguatan Inovasi, (2015 – sekarang) 	
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali <i>Legal Basis for First Appointment</i>	<p>Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2018 yang tertuang dalam Akta Keputusan RUPS Nomor 46 tanggal 8 Maret 2018</p>	
Kepemilikan Saham <i>Shareholding</i>	<p>Tidak memiliki saham di PT Boma Bisma Indra (Persero)</p>	
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi maupun Pemegang Saham</p>	
Periode Jabatan <i>Position Tenure</i>	12 Februari 2018 - sekarang	February 12 2018 - present

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

PROFIL DIREKSI

Directors' Profiles



Drs. Yoyok Hadi Satriyono, MM

Direktur Utama
President Direktur

Usia <i>Age</i>	57 tahun	<i>57 years old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	<i>Indonesian</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta dan Surabaya	<i>Jakarta and Surabaya</i>
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Manajemen, STIE IPWIJA, tahun 2002 • Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Diponegoro, tahun 1987 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Master of Management, STIE IPWIJA, 2002</i> • <i>Bachelor of Management Economics, Diponegoro University, 1987</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Employment History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan dan SDM, PT Barata Indonesia (Persero), (2014 – 2019) • Manager Keuangan & Human Capital Departemen Investasi Power PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk (2013 – 2014) • Kepala Satuan Pengawasan Internal PT WIKA Intrade (2012 – 2013) • Pjs Manager Pengembangan Usaha PT WIKA Intrade (2010-2011) • Manager Biro Keuangan PT WIKA Intrade (2000-2012) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Director Keuangan dan SDM, PT Barata Indonesia (Persero), (2014 - 2019)</i> • <i>Manager of Finance & Human Capital Power Investment Department PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk (2013 - 2014)</i> • <i>Head of PT WIKA Intrade's Internal Control Unit (2012 - 2013)</i> • <i>Acting Manager of Business Development at PT WIKA Intrade (2010-2011)</i> • <i>Manager of the Finance Bureau of PT WIKA Intrade (2000-2012)</i>
Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i>	-	-
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali <i>Legal Basis for First Appointment</i>	Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 2019 yang tertuang dalam Akta Keputusan RUPS Nomor 07 tanggal 7 Agustus 2019	<i>Appointed for the first time as President Director based on the resolution of the General Meeting of Shareholders which was held on August 1, 2019 as stated in the Deed of GMS Resolution Number 07 dated August 7, 2019</i>
Kepemilikan Saham <i>Shareholding</i>	Tidak memiliki saham di PT Boma Bisma Indra (Persero)	<i>Does not have shares in PT Boma Bisma Indra (Persero)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi maupun Pemegang Saham	<i>Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Shareholders</i>
Periode Jabatan <i>Position Tenure</i>	1 Agustus 2019 - sekarang	<i>August 1, 2019 - present</i>



Ir. M. Agus Budianto
Direktur Operasi & Pemasaran
Operational & Marketing Direktur

Usia <i>Age</i>	57 tahun	57 years old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Sidoarjo	Sidoarjo
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, tahun 1986. 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Naval Architecture and Shipbuilding Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya, 1986
Riwayat Pekerjaan <i>Employment History</i>	<ul style="list-style-type: none"> General Manager Divisi General Engineering PT PAL Indonesia (Persero), (2014 – 2015) General Manager Pemasaran dan Pengembangan Bisnis PT PAL Indonesia (Persero) (2012 – 2014) Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia (Persero) (2011 – 2012) 	<ul style="list-style-type: none"> General Manager of General Engineering Division of PT PAL Indonesia (Persero), (2014 - 2015) General Manager of Marketing and Business Development of PT PAL Indonesia (Persero) (2012 - 2014) Corporate Secretary of PT PAL Indonesia (Persero) (2011 - 2012)
Jabatan Lainnya <i>Other Positions</i>	Komisaris Utama Entitas Anak yaitu PT Bromo Steel Indonesia (2018 – sekarang)	President Commissioner of the Subsidiary, namely PT Bromo Steel Indonesia (2018 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali <i>Legal Basis for First Appointment</i>	Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2016 yang tertuang dalam Akta Keputusan RUPS Nomor 63 tanggal 21 April 2016	Appointed for the first time as Director of Operations and Marketing based on the resolution of the General Meeting of Shareholders which was held on April 12, 2016 as stated in the Deed of GMS Resolution Number 63 dated April 21, 2016
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir <i>Legal Basis for Final Appointment</i>	Diangkat kembali sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2021 yang tertuang dalam Akta Keputusan RUPS Nomor 78 tanggal 30 April 2021	Reappointed as Director of Operations and Marketing based on the resolution of the General Meeting of Shareholders held on April 28, 2021 as stated in the Deed of GMS Resolution Number 78 dated April 30, 2021
Kepemilikan Saham <i>Shareholding</i>	Tidak memiliki saham di PT Boma Bisma Indra (Persero)	Does not have shares in PT Boma Bisma Indra (Persero)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi maupun Pemegang Saham	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Shareholders
Periode Jabatan <i>Position Tenure</i>	28 April 2021 - sekarang	April 28, 2021 - present

PROFIL PEJABAT EXECUTIVE

Executive Officers' Profiles



I Kade Suarsa Ariadi

General Manager Divisi Diesel,

merangkap sebagai Manager Biro Pengembangan Usaha

General Manager of the Diesel Division,

concurrently as Manager of the Business Development Bureau

Usia Age	52 tahun	52 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Sidoarjo	Sidoarjo
Riwayat Pendidikan Education History	<ul style="list-style-type: none"> • Master Computational Engineering, Universitas New South Wales Sydney, tahun 1993 • Sarjana Teknik Mesin, Universitas Brawijaya Malang, tahun 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Computational Engineering, University of New South Wales Sydney, 1993 • Bachelor of Mechanical Engineering, Brawijaya University Malang, 2000.
Riwayat Pekerjaan Employment History	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager Divisi Operasi dan Restrukturisasi (2018 – 2020) • Sekretaris Perusahaan (2014 – 2018) • Kepala Divisi Pengembangan Teknik & Pengembangan Usaha (2011 – 2014) • Kepala Divisi Pengadaan (2010-2011) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Umum Divisi Operasi dan Restrukturisasi (2018 - 2020) • Corporate Secretary (2014 - 2018) • Head of Technical Development & Business Development Division (2011 - 2014) • Head of the Procurement Division (2010-2011)
Dasar Hukum Pengangkatan pertama kali Legal Basis for First Appointment	Menjabat sebagai General Manager Diesel, merangkap sebagai Manager Biro Pengembangan Usaha berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/Skept.1000.1400/01.2020	Serves as General Manager of Diesel, concurrently as Manager of the Business Development Bureau based on the Decree of the Board of Directors No. 006 / Skept.1000.1400 / 01.2020



Udik Suprpto

General Manager Divisi Mesin Peralatan Industri

General Manager of Industrial Equipment Manufacturing Division

Usia Age	50 tahun	50 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Bangil	Bangil
Riwayat Pendidikan Education History	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Teknik, Institut Teknologi Nasional Malang, tahun 2010 • Sarjana Teknik Mesin, Universitas Widya Gama, tahun 1997 	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Engineering, Malang National Institute of Technology, 2010 • Bachelor of Mechanical Engineering, Widya Gama University, 1997
Riwayat Pekerjaan Employment History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT BOSTO (2012 – 2020) • Direktur Operasional PT BOSTO (2010 – 2012) • Asisten Direktur Utama PT BOSTO (2009 – 2010) • Kepala Departemen Pemasaran & Produksi PT BOSTO (2006-2009) • Kepala Departemen Pemasaran PT BOSTO (2004-2006) 	<ul style="list-style-type: none"> • President Director of PT BOSTO (2012 - 2020) • Operations Director of PT BOSTO (2010 - 2012) • Assistant to the President Director of PT BOSTO (2009 - 2010) • Head of Marketing & Production Department of PT BOSTO (2006-2009) • Head of Marketing Department of PT BOSTO (2004-2006)
Dasar Hukum Pengangkatan pertama kali Legal Basis for First Appointment	Menjabat sebagai General Manager Divisi Mesin Peralatan Industri berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 042/Skept-1000.1400/08.2020	Serves as General Manager of the Industrial Equipment Machinery Division based on the Decree of the Board of Directors No. 042 / Skept-1000.1400 / 08.2020



Ketut Gde Sosiantika
General Manager Divisi Manajemen
Proyek dan Jasa
*General Manager of Project
Management and Services Division*

Usia <i>Age</i>	54 tahun	54 years old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Sidoarjo	Sidoarjo
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, tahun 2000 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Bachelor of Mechanical Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya, 2000</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Employment History</i>	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Produksi Divisi Manajemen Proyek & Jasa (2015 – 2020) Kepala Dinas Quality Assurance, K3LH dan Kalibrasi (2012 – 2015) Kepala Dinas Fasilitas Proyek (2004 – 2007) Kepala Bagian Logistik (2002 – 2004) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Production Manager, Project Management & Services Division (2013 - 2020)</i> <i>Head of Quality Assurance, SHE and Calibration Service (2012 – 2015)</i> <i>Head of Project Facilities Agency (2004 - 2007)</i> <i>Head of Logistics (2002 - 2004)</i>
Dasar Hukum Pengangkatan pertama kali <i>Legal Basis for First Appointment</i>	Menjabat sebagai General Manager Divisi Manajemen Proyek dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/Skept.1000.1400/01.2020	<i>Serves as General Manager of Diesel, concurrently as Manager of the Business Development Bureau based on the Decree of the Board of Directors No. 006 / Skept.1000.1400 / 01.2020</i>



Moch Subekti
Manajer Biro Sistem Manajemen, Risiko, dan Informasi
Management, Risk, and Information System Bureau Manager

Usia <i>Age</i>	54 tahun	54 years old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Surabaya	Surabaya
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, tahun 1990 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Bachelor of Mechanical Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya, 1986</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Employment History</i>	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Biro Quality, Safety, Health and Environment (QSHE), (2020) General Manager Divisi Manajemen Proyek dan Jasa (2018 – 2020) General Manager Divisi Operasional (2016 – 2020) Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Jasa (2012-2016) Kepala Divisi Produksi EPC (2009-2012) Kepala Divisi Engineering (2004-2009) Manager Engineering (1997 - 2004) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Manager of the Bureau of Quality, Safety, Health and Environment (QHSE), (2020)</i> <i>General Manager of the Project Management and Services Division (2018 - 2020)</i> <i>General Manager Operations Division (2016 - 2020)</i> <i>Head of Project Management and Services Division (2012-2016)</i> <i>Head of the EPC Production Division (2009-2012)</i> <i>Head of Engineering Division (2004-2009)</i> <i>Engineering Manager (1997-2004)</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Menjabat sebagai Manajer Biro Sistem Manajemen, Risiko, dan Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 043/Skept.1000.1400/08.2020	<i>Served as Manager of the Management, Risk, and Information System Bureau based on the Decree of the Board of Directors No. 043 / Skept.1000.1400 / 08.2020</i>



Samsuri
Manajer Biro Pemasaran
Marketing Bureau Manager

Usia <i>Age</i>	55 tahun	55 years old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Sidoarjo	Sidoarjo
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • S2 Manajemen Bisnis Institut Teknologi Bandung, tahun 2005 • Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, tahun 1990 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Master of Business Management, Bandung Institute of Technology, 2005</i> • <i>Bachelor of Mechanical Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya, 1990</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Employment History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager Pemasaran dan Penjualan pada tahun (2018 - 2020) • Wakil Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Jasa merangkap Kepala Departemen Pemasaran dan Penjualan (2015 - 2018) • Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Manajemen Proyek dan Jasa (2011 - 2015) • Kepala Divisi Penjualan EPC (2009-2011) • Manajer Project Services (2008-2009) • Kepala Divisi Operasional (2005-2008) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>General Manager of Marketing and Sales in the year (2018 - 2020)</i> • <i>Deputy Head of the Project Management and Services Division concurrently as Head of the Marketing and Sales Department (2015 - 2018)</i> • <i>Head of Marketing and Sales Division of Project Management and Services (2011 - 2015)</i> • <i>Head of EPC Sales Division (2009-2011)</i> • <i>Project Services Manager (2008-2009)</i> • <i>Head of Operations Division (2005-2008)</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Menjabat sebagai Manajer Biro Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/Skept.1000.1400/01.2020	<i>Serves as Manager of Marketing Bureau based on Directors Decree No. 006 / Skept.1000.1400 / 01.2020</i>



Bambang Ribut Nusantara
Manajer Biro Quality, Safety, Health and Environment (QSHE)
Quality, Safety, Health and Environment (HSE) Bureau Manager

Usia <i>Age</i>	54 tahun	54 years old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	Indonesian
Domisili <i>Domicile</i>	Pasuruan	Pasuruan
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma 3 Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, tahun 1989 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diploma 3 in Mechanical Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya, 1989</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Employment History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager Divisi Mesin Peralatan Industri (2018 - 2020) • Kepala Departemen Produksi Mesin Peralatan Industri (2012 - 2018) • Kepala Engineering Pabrik (2009 - 2012) • Kepala Dinas PPC (2006 - 2009) • Kepala Dinas Field Test & Maintenance (2005 - 2016) • Kepala Gambar (1998 - 2005) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>General Manager of Industrial Equipment Manufacture Division (2018 - 2020)</i> • <i>Head of Department of Industrial Equipment Manufacture Production (2012 - 2018)</i> • <i>Head of Factory Engineering (2009 - 2012)</i> • <i>Head of PPC Agency (2006 - 2009)</i> • <i>Head of Field Test & Maintenance (2005 - 2016)</i> • <i>Drawing Head (1998 - 2005)</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Menjabat sebagai Manajer Biro Quality, Safety, Health and Environment (QSHE) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 044/Skept.1000.1400/08.2020	<i>Serves as Manager of the Quality, Safety, Health and Environment (HSE) Bureau based on the Decree of the Board of Directors No. 044 / Skept.1000.1400 / 08.2020</i>



Nanang Widy Prasetya
Manajer Biro Quality, Safety, Health and Environment (QSHE)
Quality, Safety, Health and Environment (QHSE) Bureau Manager

Usia Age	53 tahun	53 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Surabaya	Surabaya
Riwayat Pendidikan Education History	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Mesin, Universitas Brawijaya Malang, tahun 1993 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Mechanical Engineering, Brawijaya University Malang, 1993
Riwayat Pekerjaan Employment History	<ul style="list-style-type: none"> General Manager Divisi Pengadaan (2018 - 2020) Kepala Departemen Pengadaan (2015 - 2018) Pjs. Kepala Divisi Pengadaan (2013 - 2015) Kepala Departemen Pengadaan Divisi Manajemen Proyek & Jasa (2009 - 2013) Kepala Bagian Pengadaan (2005 - 2009) 	<ul style="list-style-type: none"> General Manager of Procurement Division (2018 - 2020) Head of the Department of Procurement (2015 - 2018) Acting Head of Procurement Division (2013 - 2015) Head of Procurement Department, Project & Service Management Division (2009 - 2013) Head of Procurement Section (2005 - 2009)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Menjabat sebagai Manajer Biro Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/Skept.1000.1400/01.2020	Serves as Manager of the Procurement Bureau based on the Decree of the Board of Directors No. 006 / Skept.1000.1400 / 01.2020



Etty Noertiningsih
Manajer Biro Keuangan
Finance Bureau Manager

Usia Age	56 tahun	56 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Surabaya	Surabaya
Riwayat Pendidikan Education History	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Putra Bangsa Surabaya, tahun 1990 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Economics in Accounting, Putra Bangsa University Surabaya, 1990
Riwayat Pekerjaan Employment History	<ul style="list-style-type: none"> General Manager Divisi Keuangan (2018 - 2020) Kepala Subdirektorat Keuangan (2015 - 2018) Kepala Departemen Anggaran & Perbendaharaan (2012 - 2015) Kepala Dinas Akuntansi Biaya (2009 - 2012) Kepala Perbendaharaan (1996 - 2009) Kepala Bagian Pengendali Keuangan (1994 - 1996) 	<ul style="list-style-type: none"> General Manager of the Finance Division (2018 - 2020) Head of Sub-directorate of Finance (2015 - 2018) Head of the Budget & Treasury Department (2012 - 2015) Head of Cost Accounting Office (2009 - 2012) Head of Treasury (1996 - 2009) Head of Financial Control (1994 - 1996)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Menjabat sebagai Manajer Biro Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/Skept.1000.1400/01.2020	Serves as Manager of the Procurement Bureau based on the Decree of the Board of Directors No. 006 / Skept.1000.1400 / 01.2020



Budi Anta

Manajer Biro Sumber Daya Manusia
Human Resources Bureau Manager

Usia Age	51 tahun	51 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Sidoarjo	Sidoarjo
Riwayat Pendidikan Education History	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi Manajemen, IKIP Negeri Surabaya, tahun 1992 	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Management Economics, IKIP Negeri Surabaya, 1992
Riwayat Pekerjaan Employment History	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager Divisi SDM (2018 - 2020) • Sekretaris Perusahaan (2016 - 2018) • Kepala Subdirektorat SDM (2015 - 2016) • Kepala Biro Humas, Protokol & Kesekretariatan (2012 - 2015) • Kepala Divisi SDM (2010 - 2012) • Kepala Dinas Hubungan Industrial & Administrasi Personil (2004 - 2008) 	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager of HR Division (2018 - 2020) • Corporate Secretary (2016 - 2018) • Head of Human Resources Sub-directorate (2015 - 2016) • Head of Public Relations, Protocol & Secretarial Bureau (2012 - 2015) • Head of HR Division (2010 - 2012) • Head of Department of Industrial Relations & Personnel Administration (2004 - 2008)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Menjabat sebagai Manajer Biro Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/Skept.1000.1400/01.2020	Serves as the Manager of the Human Resources Bureau based on the Decree of the Board of Directors No. 006 / Skept.1000.1400 / 01.2020



A.S. Ananta

Kepala Satuan Pengawas Interen
Head of Internal Supervisory Unit

Usia Age	54 tahun	54 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Surabaya	Surabaya
Riwayat Pendidikan Education History	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, tahun 1992 	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Mechanical Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya, 1992
Riwayat Pekerjaan Employment History	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Pengembangan Usaha & Restrukturisasi (2018 - 2019) • Manajer Manajemen Representatif (2016 - 2018) • Kepala Departemen Produksi Divisi Manajemen Proyek & Jasa (2013 - 2016) • Kepala Dinas Quality Control Proyek (2009 - 2013) • Kepala Dinas Quality Control Engineering (2004 - 2006) 	<ul style="list-style-type: none"> • Business Development & Restructuring Manager (2018 - 2019) • Representative Management Manager (2016 - 2018) • Head of Production Department, Project Management & Services Division (2013 - 2016) • Head of the Project Quality Control Service (2009 - 2013) • Head of Quality Control Engineering Service (2004 - 2006)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Interen berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/Skept.1000.1400/01.2020	Serves as the Head of Internal Supervisory Unit based on the Decree of the Board of Directors No. 006 / Skept.1000.1400 / 01.2020



Arie Safitri
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Usia Age	36 tahun	36 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Surabaya	Sidoarjo
Riwayat Pendidikan Education History	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tahun 2007 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Law, Wijaya Kusuma University Surabaya, 2007
Riwayat Pekerjaan Employment History	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Bidang Hukum (2015 - 2020) Staf Biro Hukum (2013 - 2015) Sekretaris Direksi (2011 - 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Legal Manager (2015 - 2020) Legal Bureau staff (2013 - 2015) Secretary of the Board of Directors
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 036/Skept.1000.1400/08.2020	Serves as the Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors No. 036 / Skept.1000.1400 / 08.2020



Agus Hasanudin
Direktur Utama PT Bosto
President Director of PT Bosto

Usia Age	54 tahun	54 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Pasuruan	Pasuruan
Riwayat Pendidikan Education History	<ul style="list-style-type: none"> Diploma 3 Teknik Produksi, Politeknik Universitas Brawijaya Malang tahun 1989 	<ul style="list-style-type: none"> Diploma 3 of Production Engineering, Polytechnic of Brawijaya University Malang in 1989
Riwayat Pekerjaan Employment History	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Perusahaan PT Boma Bisma Indra (Persero) (2018 - 2020) Kepala Divisi Mesin Peralatan Industri (2014 - 2018) Pjs. Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan Mesin Peralatan Industri (2011 - 2014) Kepala Dinas Penjualan (2009 - 2004) 	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Secretary of PT Boma Bisma Indra (Persero) (2018 - 2020) Head of Industrial Equipment Manufacture Division (2014 - 2018) Acting. Division Head of Marketing & Sales of Industrial Equipment Manufactory (2011 - 2014) Head of Sales Office (2009 - 2004)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2020 yang tertuang dalam Akta Keputusan RUPS Nomor 63 tanggal 21 April 2016	Serves as the Manager of the Human Resources Bureau based on the Decree of the Board of Directors No. 006 / Skept.1000.1400 / 01.2020

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

DEMOGRAFI KARYAWAN

Employee Demographics

Per 31 Desember 2020, jumlah karyawan tetap Perseroan tercatat sebanyak 302 orang, atau turun 7.6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 325 orang. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan zero growth dan karyawan pensiun pada tahun 2020. Pada tabel berikut ini dapat dilihat demografi karyawan tetap Perseroan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir yang semakin menurun jumlahnya berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia:

As of December 31, 2020, the number of permanent employees of the Company was recorded at 302 people, or decreased by 7.6% compared to the previous year of 325 people. This decline was due to the zero growth policy and the retirement of employees in 2020. The following table shows the demographics of the Company's permanent employees in the last 3 (three) years, which are decreasing in number based on gender classification, education level, and age:

Jumlah Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

Number of Employees based on Gender

Uraian Description	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Laki-laki Male	277	91.7	299	92.0	306	92.7
Perempuan Female	25	8.3	26	8.0	24	7.3
Jumlah Total	302	100.0	325	100	330	100

Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Number of Employees based on Education Level

Uraian Description	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Pascasarjana Postgraduate Degree	3	0.87	4	0.81	2	0.6
Sarjana Bachelor	87	25.29	91	20.95	62	18.8
Diploma dan Sederat Diploma and Equivalent	41	11.91	45	10.17	29	8.8
SMU dan Sederajat High School and Equivalent	213	61.91	245	68.07	24	71.8
Jumlah Total	344	100.0	385	100.0	330	100.0

Jumlah Karyawan berdasarkan Usia

Number of Employees based on Age

Uraian Description	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
> 30 tahun years	77	22.38	81	12.9	28	8.5
31-40 tahun years	34	9.88	41	26.10	28	8.5
41 – 50 tahun years	128	37.2	168	43.89	157	47.6
> 51 tahun years	105	30.52	95	17.11	117	35.5
Jumlah Total	344	100.0	385	100.0	330	100.0

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Composition

Permodalan PT Boma Bisma Indra (Persero) sepenuhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian BUMN RI, sesuai Anggaran Dasar No. 41, tanggal 22 Oktober 2020 dengan Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, yang telah mendapatkan persetujuan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0401105 Tahun 2020 dijelaskan tentang besarnya modal dasar Perusahaan yaitu Rp 1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar rupiah), terbagi atas : 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan 1.299.999 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah RI 340.916 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp340.916.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah). Yang terdiri dari : 1 (satu) saham seri A Dwiwarna senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 340.915 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 340.915.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah). Dari komposisi pemegang saham tersebut, maka Direksi dan Komisaris tidak memiliki saham di PT Boma Bisma Indra (Persero)

The capital of PT Boma Bisma Indra (Persero) is wholly (100%) owned by the Government of the Republic of Indonesia c.q. The Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia, according to Articles of Association No. 41, dated October 22, 2020 with Notary Deed Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, who has received approval from the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0401105 Year 2020 explained the amount of the Company's authorized capital, which is Rp. 1,300,000,000,000,- (one trillion three hundred billion rupiah), divided into: 1 (one) Dwiwarna A series share; and 1,299,999 (one million two hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine) series B shares, each with a nominal value of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah). Then the Government of RI has issued and paid 340,916 shares with a nominal value of Rp. 340,916,000,000,- (three hundred and forty billion nine hundred and sixteen million rupiah). Consisting of: 1 (one) Dwiwarna series A share worth Rp 1,000,000 (one million rupiah) and 340,915 series B shares with a nominal value of Rp 340,915,000,000 (three hundred forty billion nine hundred fifteen million rupiah). From the composition of shareholders, the Board of Directors and Commissioners do not own shares in PT Boma Bisma Indra (Persero).

STRUKTUR DAN KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN PT Boma Bisma Indra (Persero)

Structure and Composition of Share Ownership PT Boma Bisma Indra (Persero)

Modal Capital	Jumlah Saham Total Shares	Nominal Amount
Modal Dasar Authorized Capital	<p>1.300.000 (satu juta tiga ratus) lembar saham, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 (satu) saham seri A Dwiwarna ✓ 1.299.999 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B <p>1,300,000 (one million three hundred) shares, consisting of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 (one) Dwiwarna A Series share ✓ 1,299,999 (one million two hundred ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine) shares of series B 	<p>Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar rupiah), terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rp1.000.000 (satu juta rupiah) seri A Dwiwarna ✓ Rp1.299.999.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) saham seri B <p>Rp1,300,000,000,000,- (one trillion three hundred billion rupiah), consisting of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rp 1,000,000 (one million rupiah) series A Dwiwarna ✓ Rp 1,299,999,000,000 (one trillion two hundred ninety-nine billion nine hundred ninety-nine million rupiah) series B shares

Modal Capital	Jumlah Saham Total Shares	Nominal Amount
Modal Ditempatkan Issued Capital	<p>340.916 (tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam belas) lembar saham, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna ✓ 340.915 (tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus lima belas) lembar saham seri B <p>340,916 (three hundred forty thousand nine hundred and sixteen) shares, consisting of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 (one) share of series A Dwiwarna ✓ 340,915 (three hundred forty thousand nine hundred and fifteen) shares of series B 	<p>Rp340.916.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah), terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rp1.000.000 (satu juta rupiah) seri A Dwiwarna ✓ Rp340.915.000.000 (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) saham seri B <p>Rp340.916 million,- (three hundred and forty billion nine hundred and sixteen million rupiah), consisting of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rp1,000,000 (one million rupiah) series A Dwiwarna ✓ Rp340.915 million (three hundred and forty billion nine hundred and fifteen million rupiah) series B saham shares

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

Stock Issuance Chronology

Sampai dengan akhir tahun 2020, PT Boma Bisma Indra (Persero) belum pernah mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (corporate action), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa. Selain itu BBI juga tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2020, PT Boma Bisma Indra (Persero) has never listed shares on the Stock Exchange, so there is no information regarding the listing chronology, types of corporate actions, changes in the number of shares, or the name of the stock exchange. In addition, BBI also does not trade shares so that there is no information on the highest share price, lowest share price and closing share price and the volume of shares traded.

KRONOLOGI OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA

Chronology Of Bond And Other Securities

Sampai dengan akhir tahun 2020, PT Boma Bisma Indra (Persero) tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2020, PT Boma Bisma Indra (Persero) did not issue bonds, sukuk and convertible bonds so there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rate/yield, maturity date and bond/sukuk ratings.

ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

Subsidiaries and/or Associated Entities

STRUKTUR GROUP PERUSAHAAN Company Group Structure



Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility



Profil Entitas Anak PT Bromo Steel Indonesia

PT Bromo Steel Indonesia (PT BOSTO) adalah entitas anak PT Boma Bisma Indra (Persero) berdomisili di Jl. Laks. RE. Martadinata 18-20, Pasuruan, Jawa Timur yang mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1989, sesuai hasil RUPS PT Boma Stork berdasarkan Akta Notaris No. 47 tanggal 10 April 1974. PT Boma Bisma Indra (Persero) membeli seluruh saham PT Boma Stork, sehingga PT Boma Stork menjadi anak perusahaan PT Boma Bisma Indra (Persero) dan berubah nama menjadi PT Bromo Steel Indonesia sesuai dengan SK Menteri Kehakiman RI No. C2-5175.HT'97 tertanggal 17 Juli 1997. Kepemilikan mayoritas saham ini bertujuan agar dapat membangun aliansi strategis dan sinergi untuk memberikan nilai tambah PT Boma Bisma Indra (Persero).

Bidang Usaha PT BOSTO

Sesuai dengan Anggaran Dasar No. 13, tanggal 15 Mei 2018 PT Bromo Steel Indonesia bergerak dibidang Industri dan Perbengkelan dengan kegiatan usaha:

- Merencanakan, mekontruir, menggambar, membuat, menyerahkan, dan memasang ondersil, alat-alat, instalasi-instalasi & pabrik-pabrik lengkap untuk industri gula dan industri-industri lain.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk pergudangan, property, penampungan dan penyaluran bahan bakar, pendidikan dan pelatihan.

Komposisi Kepemilikan Saham PT BOSTO

PT BBI (Persero) memiliki saham 99%
Koperasi Karyawan Bosto "KABOSTO" memiliki saham 1%

Susunan Komisaris dan Direksi PT BOSTO di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris : Moch. Agus Budiyo
Dewan Direksi
Direktur : Agus Hasanudin

Profile of Subsidiaries PT Bromo Steel Indonesia

PT Bromo Steel Indonesia (PT BOSTO) is a subsidiary of PT Boma Bisma Indra (Persero) domiciled on Jl. Laksh. RE. Martadinata 18-20, Pasuruan, East Java which started operations on November 1, 1989, according to the results of the General Meeting of Shareholders of PT Boma Stork based on Notarial Deed No. 47 dated April 10, 1974. PT Boma Bisma Indra (Persero) bought all shares of PT Boma Stork, so that PT Boma Stork became a subsidiary of PT Boma Bisma Indra (Persero) and changed its name to PT Bromo Steel Indonesia in accordance with the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-5175.HT'97 dated July 17, 1997. The ownership of this majority share aims to build strategic alliances and synergies to provide added value to PT Boma Bisma Indra (Persero).

Business Fields of PT BOSTO

In accordance with the Articles of Association No. 13, May 15 2018 PT Bromo Steel Indonesia is engaged in Industry and Workshop with the following business activities:

- Plan, construct, draw, manufacture, deliver and install parts, tools, installations & complete factories for the sugar industry and other industries.
- Optimizing the utilization of the Company's resources for warehousing, property, fuel storage and distribution, education and training.

Composition of Share Ownership of PT BOSTO

PT BBI (Persero) owns 99% shares
The Bosto Employee Cooperative "KABOSTO" owns 1% shares

The composition of the Commissioners and Directors of PT BOSTO in 2020 is as follows:

Board of Commissioners
Commissioner : Moch. Agus Budiyo
Board of Directors
Director : Agus Hasanudin

LEMBAGA/PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

Institutions/Professions Supporting Company

NAMA & LEMBAGA PROFESI Name Of Supporting Profession		ALAMAT Address
Notaris Notary	HJ. Eva Fitri Sagitarina, SH	Jl. Wonosari Kidul No. 11 Surabaya, 60242 Telp. +62 31 566 0063 Email hajjahgaul@yahoo.com
Pendampingan Hukum Legal Assistance	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Jl. Ahmad Yani No. 54, Gayungan, Surabaya Jawa Timur, 60234 Telp +62 31 8291066
Penilai GCG GCG Assessor	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur	Jl. Raya Bandara Juanda No.38, Semabung, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254 Telp. + 62 31 867 0360, + 62 31 867 036 Fax. + 62 31 867 7039 Email jatim@bpkp.go.id
Penilai KPKU KPKU Assessor	Forum Excellent BUMN	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Gambir Jakarta Pusat 10110 Telp. +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 Website www.bumn.go.id
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	KAP RSM Indonesia	Plaza ASIA, Level 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Telp. +62 21 51401340 Fax. +62 21 51401350 Website www.rsmindonesia.id
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	KAP Thoufan dan Rosyid	Kantor Pusat Headquarters Dinoyo Permai Timur KAv. 7 A-4 Jl. MT Haryono Malang, Jawa Timur Telp. +62 341 307 0518 Fax. +62 341 307 0518 Email kaptnr@yahoo.com
Jasa Aktuaria Actuarial Services	PT Binaputra Jaga Hikmah	Jl Rasamala Raya 47 C Komp. BI Pancoran Tebet Jakarta 12870 Telp. + 62 21 83786912-14 Fax. + 62 21 83786911 E-mail binaputerajagahikmah@yahoo.com bjhcs@bjh.co.id Website www.bjh.co.id
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Public Appraisal Services Office	Toto Suharto & Rekan Cabang Surabaya	Jl Jemur Andayani, No.50, Komp. Ruko Permata Inti, Jemur Wonosari, Surabaya, Jawa Timur 60236 Telp./Fax. : + 62 31 8475455, 31 8415455 Website www.tnr.co.id

NAMA & LEMBAGA PROFESI Name Of Supporting Profession		ALAMAT Address
Konsultan (Asesmen) Consultant (Assessment)	LP3T (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Psikologi Terapan) Universitas Airlangga	Fakultas Psikologi, Jl. Airlangga No.4-6, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286 Telp. +62 31 5034792 E-mail lp3t@psikologi.unair.ac.id
	Iradat Konsultan	Gedung Vinilon, 3 rd Floor Jl. Raden Salah No. 13-17 Jakarta Pusat, Jakarta 10430 Telp. +62 221 29578187 E-mail iradat@iradatkonsultan.com
	Brilian Psikologi	Perumahan Pondok Maritim Indah i-57, Wiyung Surabaya Telp. +62 81233098645 E-mail brilianpsikolodi@gmail.com
Gabungan Kontraktor Kelistrikan dan Mekanikal Indonesia (GAKLINDO) Association of Indonesian Electrical and Mechanical Contractors		DPD Provensi Jawa Timur Jl. Kutisari Indah Selatan VI / 29 Surabaya Telp./Fax. +62 31 8433229 E-mail gaklindojatim@yahoo.co.id
Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI) Association of Indonesian National Design and Build Companies		Perkantoran Buncit Mas Blok B No. 11 Jl. Mamapang Prapatan Raya No. 108, Jakarta Selatan Telp. +62 21 7946375 – 7980554 Fax. +62 21 7980554 E-mail gapenri@idola.net.id Website www.gapenri.or.id
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Chambers of Trade and Industry		Jl. HOS Cokroaminoto No. 122 Menteng – Jakarta Pusat Telp. +62 21 21393583 E-mail sekretariat@kadinindonesia.or.id kadin@kadinindonesia.or.id
Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Indonesian Contractors Association		Wijaya Graha Puri Blok D1 Jl. Darmawangsa Raya No. 2 Jakarta Selatan Telp. +62 21 7200794 Fax. +62 21 7206805 E-mail akinet@aki.or.id Website www.aki.or.id

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Information on Company Website

PT Boma Bisma Indra (Persero) selalu berusaha memperbaiki pelayanan kepada publik, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan informasi yang up to date melalui website yang dapat diakses di www.ptbbi.co.id. Pada website tersebut terdapat Informasi mengenai:

1. Profil Perusahaan

Memuat informasi mengenai Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, profil Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Sejarah Perusahaan, Visi Misi, Corporate Value, Stuktur Organisasi, Komposisi Personil, serta Sertifikasi yang dimiliki serta dan Logo.

2. Unit Bisnis

Dalam menu Unit Bisnis memuat informasi mengenai Bidang Usaha yang dilakukan oleh Perseroan. Meliputi tiga bidang yakni Mesin Peralatan Industrial, Manajemen Proyek dan Jasa, & Diesel.

3. Portofolio

Dalam menu Portofolio berisi tentang informasi Produk-produk dan proyek-proyek yang telah dikerjakan BBI.

4. Fasilitas Produksi

Dalam menu Fasilitas menginformasikan Fasilitas-Fasilitas Produksi yang dimiliki BBI.

5. Informasi Publik

Dalam menu info Publik memuat

- Berita Korporasi, berisi tentang Siaran Pers yang dipublikasikan oleh perusahaan ke media massa sebagai informasi mengenai perkembangan maupun berita terbaru perusahaan kepada masyarakat, stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya.
- informasi implementasi GCG meliputi: Pedoman GCG, Komitment GCG, Manajemen Resiko, Tata Kelola IT, Whistle Blowing & Gratifikasi, SMAP serta Internal Audit Charter.
- Annual Report
- Informasi Karier, memuat informasi tentang rekrutmen, lowongan pekerjaan

PT Boma Bisma Indra (Persero) always strives to improve services to the public, customers and other stakeholders by providing up to date information through a website that can be accessed at www.ptbbi.co.id. On the website there is information about:

1. Company Profile

Contains information regarding the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, profiles of the Board of Commissioners and Board of Directors, Company History, Vision and Mission, Corporate Values, Organizational Structure, Personnel Composition, and Certifications and Logo.

2. Business Unit

The Business Unit menu contains information regarding the Business Fields carried out by the Company. Covering three fields namely Industrial Equipment Machinery, Project Management and Services, & Diesel.

3. Portfolio

The Portfolio menu contains information on products and projects that have been carried out by BBI.

4. Production Facilities

In the Facilities menu, inform the Production Facilities owned by BBI.

5. Public Information

In the Public info menu load

- Corporate News, contains Press Releases published by the company to the mass media as information on developments and the latest company news to the public, stakeholders or other stakeholders.
- GCG implementation information includes: GCG Guidelines, GCG Commitment, Risk Management, IT Governance, Whistle Blowing & Gratification, SMAP and Internal Audit Charter.
- Annual Report
- Career Information, contains information about recruitment, job vacancies and

serta posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan bagi para pelamar.

6. Keterbukaan Informasi

Menu E-PPID menyiapkan layanan informasi yang dapat diakses secara online sebagai upaya untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam mendapatkan layanan informasi dan dokumentasi dari BBI, yang meliputi:

- Profil : menginformasikan Seputar Layanan Informasi Publik BBI dan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)
- Regulasi yang mengatur Keterbukaan Informasi di BBI
- Informasi Publik BBI
- Prosedur Layanan Informasi Publik

7. Pengaduan

Menu Pengaduan merupakan wujud implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT Boma Bisma Indra (Persero) berisi fasilitas untuk mencegah adanya tindakan-tindakan yang dilarang dan melanggar Code of Conduct Perseroan. Serta untuk mencegah adanya praktik benturan kepentingan, gratifikasi, penyuapan dan korupsi di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero)

Selain website, BBI juga memiliki akun media social antara lain Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube yang dikelola oleh Fungsi Humas dan Kesekretariatan BBI sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan Komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

positions required by the company for applicants.

6. Information Disclosure

The E-PPID menu provides information services that can be accessed online in an effort to make it easier for applicants for public information to obtain information and documentation services from BBI, which include:

- Profile : informing about BBI's Public Information Service and Public Information Management Officer (PPID)
- Regulations governing Information Disclosure at BBI
- BBI Public Information
- Public Information Service Procedure

7. Complaints

The Complaint Menu is a form of implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PT Boma Bisma Indra (Persero) containing facilities to prevent prohibited actions and violate the Company's Code of Conduct. As well as to prevent the practice of conflicts of interest, gratification, bribery and corruption within PT Boma Bisma Indra (Persero)

In addition to the website, BBI also has social media accounts including Facebook, Instagram, Twitter and Youtube which are managed by BBI's Public Relations and Secretariat Functions as part of information disclosure and communication to all stakeholders.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Education and/or Training for The Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Units

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, anggota Dewan Komisaris BBI telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Board of Commissioners Education and/or Training

Throughout 2020, members of the BBI Board of Commissioners have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan / Workshop / Konferensi / Seminar Name of Training / Workshop / Conference / Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
Masrokhan	Komisaris Utama President Commissioner	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) The Ministry of SOEs in collaboration with the International Financial Corporation (IFC)	4 November 2020 – PT BBI Surabaya November 4, 2020 – PT BBI Surabaya
Jumain Appe	Komisaris Commissioner	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) The Ministry of SOEs in collaboration with the International Financial Corporation (IFC)	4 November 2020 – PT BBI Surabaya November 4, 2020 – PT BBI Surabaya

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

Sepanjang tahun 2020, anggota Direksi BBI telah mengikuti berbagai program peningkatan

Board of Directors Education and/or Training

Throughout 2020, members of the BBI Board of Directors have participated in various competency improvement programs in the

kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan / Workshop / Konferensi / Seminar Name of Training / Workshop / Conference / Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
Yoyok Hadi Satriyono	Direktur Utama President Director	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) The Ministry of SOEs in collaboration with the International Financial Corporation (IFC)	4 November 2020 – PT BBI Surabaya November 4, 2020 – PT BBI Surabaya
M. Agus Budiyanto	Direktur Operasi dan Pemasaran Director of Operations and Marketing	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) The Ministry of SOEs in collaboration with the International Financial Corporation (IFC)	4 November 2020 – PT BBI Surabaya November 4, 2020 – PT BBI Surabaya
		Webinar Optimalisasi Aset BUMN di Era New Normal Webinar on Optimizing BUMN Assets in the New Normal Era	Forum BUMN SOE Forum	21 Juli 2020 – PT BBI Surabaya July 21, 2020 – PT BBI Surabaya

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit BBI telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Audit Committee Education and/or Training

Throughout 2020, the BBI Audit Committee has participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan / Workshop / Konferensi / Seminar Name of Training / Workshop / Conference / Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
Aang Kunaifi	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) The Ministry of SOEs in collaboration with the International Financial Corporation (IFC)	4 November 2020 – PT BBI Surabaya November 4, 2020 – PT BBI Surabaya

Pendidikan dan/atau Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan BBI telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Pelatihan

Corporate Secretary Education and/or Training

Throughout 2020, the Corporate Secretary of BBI has participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan / Workshop / Konferensi / Seminar Name of Training / Workshop / Conference / Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
Arie Safitri	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pelatihan Antikorupsi Dasar Basic Anti-Corruption Training	Pusat Edukasi Antikorupsi Anti-Corruption Education Center	6-9 Juli 2020 – PT BBI Surabaya 6-9 July 2020 – PT BBI Surabaya
		Employee Engagement Through Coaching Employee Engagement Through Coaching	Forum Human Capital Indonesia Indonesian Human Capital Forum	13 Agustus 2020 – PT BBI Surabaya August 13, 2020 – PT BBI Surabaya
		Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) The Ministry of SOEs in collaboration with the International Financial Corporation (IFC)	4 November 2020 – PT BBI Surabaya November 4, 2020 – PT BBI Surabaya
		Business Judgement Rule Vs Tindak Pidana Korupsi Business Judgment Rule vs Corruption Crime	Visi Integritas	20 November 2020 – PT BBI Surabaya November 20, 2020 – PT BBI Surabaya

Pendidikan dan/atau Pelatihan Unit Internal Audit Unit Education and/or Training

Sepanjang tahun 2020, Unit Audit Internal BBI telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Throughout 2020, the BBI Internal Audit Unit has participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan / Workshop / Konferensi / Seminar Name of Training / Workshop / Conference / Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
A.S. Ananta	Kepala Satuan Pengawas Interen Head of Internal Audit Unit	FGD Terkait Penerapan PSAK 72 FGD Related to the Implementation of PSAK 72	Komite Audit PT BBI PT BBI Audit Committee	4 Maret 2020 – PT BBI Surabaya 4 Maret 2020 – PT BBI Surabaya
		Audit Internal SMAP ISO 37001:2016 Internal Audit SMAP ISO 37001:2016	SUCOFINDO	10-12 Agustus 2020 – PT BBI Surabaya 10-12 August 2020 – PT BBI Surabaya
		Pelatihan Antikorupsi Dasar Basic Anti-Corruption Training	Pusat Edukasi Antikorupsi Anti-Corruption Education Center	6-9 Juli 2020 – PT BBI Surabaya 6-9 July 2020 – PT BBI Surabaya
Wayu Arga Andriyanto	Staf Muda Pemeriksa Inspector Young Staff	FGD Terkait Penerapan PSAK 72 FGD Related to the Implementation of PSAK 72	Komite Audit PT BBI PT BBI Audit Committee	4 Maret 2020 – PT BBI Surabaya March 4, 2020 – PT BBI Surabaya
		Webinar ISO 37001 Anti Penyuapan Webinar ISO 37001 Anti Penyuapan	Sinaux (The Learning Expert)	11 Mei 2020 – PT BBI Surabaya 11 May 2020 – PT BBI Surabaya
		Awariness SNI ISO 37001:2016 Awareness SNI ISO 37001:2016	SUCOFINDO	30 Juni 2020 – PT BBI Surabaya 30 Juni 2020 – PT BBI Surabaya
		Workshop SNI ISO 37001:2016 Awareness SNI ISO 37001:2016	SUCOFINDO	1-3 Juli 2020 – PT BBI Surabaya 1-3 Juli 2020 – PT BBI Surabaya
		Sharing Session Scheduling and Cost Management Sharing Session Scheduling and Cost Management	BBI	29 Juli 2020 – PT BBI Surabaya 29 July 2020 – PT BBI Surabaya
		Audit Internal SMAP ISO 37001:2016 Audit Internal SMAP ISO 37001:2016	SUCOFINDO	10-12 2020 Agustus – PT BBI Surabaya 10-12 2020 August – PT BBI Surabaya
Nadia Ayu Wijayanti	Staf Muda Pemeriksa Inspector Young Staff	Membangun Integrasi Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) Membangun Integrasi Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001)	Akademi Antikorupsi Anti-Corruption Academy	17 September 2020 – PT BBI Surabaya 17 September 2020 – PT BBI Surabaya

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite-Komite : Manajemen Risiko, KPKU, GCG dan SMAP

Sepanjang tahun 2020, Komite-Komite di BBI diantaranya : Manajemen Risiko, KPKU, GCG dan SMAP, telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Education and/or Training Committees: Risk Management, KPKU, GCG and SMAP

Throughout 2020, the Committees at BBI including: Risk Management, KPKU, GCG and SMAP, have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan / Workshop / Konferensi / Seminar Name of Training / Workshop / Conference / Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
M. Subekti	Manajer Biro Manajemen Sistem Risiko dan Informasi Management, Risk, and Information System Bureau Manager	FGD Terkait Penerapan PSAK 72 FGD Related to the Implementation of PSAK 72	Komite Audit PT BBI PT BBI Audit Committee	4 Maret 2020 – PT BBI Surabaya March 4, 2020– PT BBI Surabaya
		Membangun Integrasi Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) Building Corporate Integration through Anti-Bribery Management System (ISO 37001)	Akademi Antikorupsi Anti-Corruption Academy	17 September 2020 – PT BBI Surabaya 17 September 2020 – PT BBI Surabaya
Novie Yuanita Habsari	Pjs. Manajer Bidang Manajemen Risiko Acting. Manager of Risk Management	The International Conference on Business and Engineering Management (ICON BEM)	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	1 Februari 2020 – Surabaya February 1, 2020 – Surabaya
		Webinar ISO 37001 Anti Penyuapan ISO 37001 Anti-Bribery Webinar	Sinaux (The Learning Expert)	11 Mei 2020 – PT BBI Surabaya 11 Mei 2020 – PT BBI Surabaya
		Awariness SNI ISO 37001:2016 Awariness SNI ISO 37001:2016	SUCOFINDO	30 Juni 2020 – PT BBI Surabaya 30 Juni 2020 – PT BBI Surabaya
		Workshop SNI ISO 37001:2016 Workshop SNI ISO 37001:2016	SUCOFINDO	1-3 Juli 2020 – PT BBI Surabaya 1-3 Juli 2020 – PT BBI Surabaya
		Digital Public Training Interpretasi KPKU KPKU Interpretation Digital Public Training	FEB (Forum Ekselen BUMN)	1-3 Juli 2020 – PT BBI Surabaya 1-3 July 2020 – PT BBI Surabaya
		Audit Internal SMAP ISO 37001:2016 Internal Audit SMAP ISO 37001:2016	SUCOFINDO	10-12 Agustus 2020 – PT BBI Surabaya 10-12 August 2020 – PT BBI
Sismiadi	Manajer Bidang Sitem Manajemen Manager of Management System	Audit Internal SMAP ISO 37001:2016 Internal Audit SMAP ISO 37001:2016	SUCOFINDO	10-12 Agustus 2020 – PT BBI Surabaya 10-12 Agustus 2020 – PT BBI Surabaya
Anita Anggraini	Leader Implementasi GCG GCG	Audit Internal SMAP ISO 37001:2016 Internal Audit SMAP ISO 37001:2016	SUCOFINDO	10-12 Agustus 2020 – PT BBI Surabaya 10-12 Agustus 2020

Pendahuluan
Preliminary

Klas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Implementation Leader	– PT BBI Surabaya		
	Awareness SNI ISO 37001:2016 Awareness SNI ISO 37001:2016	SUCOFINDO	30 Juni 2020 – PT BBI Surabaya Awareness SNI ISO 37001:2016
	Workshop SNI ISO 37001:2016 Workshop SNI ISO 37001:2016	SUCOFINDO	1-3 Juli 2020 – PT BBI Surabaya 1-3 Juli 2020 – PT BBI Surabaya

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, KANTOR CABANG, DAN KANTOR DIVISI

Names and Address of Subsidiaries,
Overseas Branch Offices, and Region Offices

PT Boma Bisma Indra (persero)	Alamat Address
Head Office Kantor Pusat	Jl. KHM Mansyur No. 229, Surabaya 60162 Jawatimur, Indonesia Phone :+62 31 3530513, +62 31 3530514 Email: corporate@ptbbi.co.id Website: www.ptbbi.co.id
Kantor Cabang Jakarta Jakarta Branch Office	MENARA MTH 10 Floor Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono, Jakarta Selatan 12820 Email: marketing@ptbbi.co.id
Divisi Manajemen Proyek dan Jasa	Jl. KHM Mansyur No. 229, Surabaya 60162 Jawatimur, Indonesia Phone :+62 31 3530513, +62 31 3530514
Divisi Mesin Peralatan Industri	Jl. Imam Bonjol No. 18 Pasuruan 67122 Jawatimur, Indonesia Phone :+62 343 421063, +62 343 421116 Email: info@ptbbipas.com
Divisi Diesel	Jl. KHM Mansyur No. 229, Surabaya 60162 Jawatimur, Indonesia Phone :+62 31 3530513, +62 31 3530514
Subsidiaries Anak Usaha	Alamat Address
PT Bromo Steel Indonesia	Jl. Laksama RE. Martadinata No. 18-20 Pasuruan Jawatimur, Indonesia Phone :+62 343 421074 Email: operasionalbosto@yahoo.com Website: www.bromosteelindonesia-ptbosto.com





04

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Business Support Function

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Capital

PT Boma Bisma Indra (Persero) memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran kunci bagi kesuksesan dan keberlanjutan Perseroan dan memandang SDM sebagai mitra strategis dalam menjalankan usaha. Oleh karenanya PT BBI senantiasa berupaya mengelola dan meningkatkan kompetensi serta menciptakan lingkungan kerja kondusif untuk memastikan kinerja SDM yang optimal, efisien dan produktif.

PT BBI meyakini bahwa SDM yang kompeten sangat dibutuhkan dalam meningkatkan performa dan keunggulan perusahaan serta mencapai target-target kerja, baik target masing-masing lini bisnis maupun target Perseroan secara keseluruhan. Untuk tujuan tersebut, Perseroan senantiasa memberikan perhatian besar kepada pengembangan dan pemanfaatan SDM secara efektif sejalan dengan visi dan misi Perseroan.

Kebijakan Pengelolaan SDM

Dalam rangka membangun insan BBI yang mampu mengaktualisasikan budaya perusahaan, serta dalam upaya membangun dan meningkatkan kompetensi insan BBI sesuai dengan standar kompetensi (knowledge, skill dan attitude), BBI telah melaksanakan kebijakan Sumber Daya Manusia untuk seluruh karyawan dan saat ini tengah melakukan proses penyempurnaan strategis pengelolaan SDM yang disesuaikan dengan kebijakan yang dimiliki. Kebijakan pengelolaan SDM selama ini berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja RI serta Standard Operasional Prosedur (SOP).

Biro Sumber Daya Manusia

Penganggung jawab pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia PT Boma Bisma Indra (Persero) berada di Biro Sumber Daya Manusia. Divisi ini bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan dan pengembangan *Human Capital*, mulai dari

PT Boma Bisma Indra (Persero) views Human Resources (HR) as one of the stakeholders who have a key role for the success and sustainability of the Company and views HR as a strategic partner in running the business. Therefore, PT BBI always strives to manage and improve competence and create a conducive work environment to ensure optimal HR performance, efficient and productive.

PT BBI believes that competent human resources are needed in improving the company's performance and excellence as well as achieving work targets, both targets for each line of business and targets for the Company as a whole. For this purpose, the Company always pays great attention to the development and use of human resources effectively in line with the Company's vision and mission.

HR Management Policy

In order to build BBI people who are able to actualize corporate culture, as well as in an effort to build and improve the competence of BBI people in accordance with competency standards (knowledge, skills and attitudes), BBI has implemented a Human Resources policy for all employees and is currently carrying out a strategic improvement process. HR management that is adjusted to the existing policies. Human resource management policies so far have adhered to the applicable laws and regulations as well as Collective Labor Agreements (PKB) that have been registered with the Indonesian Manpower Office and Standard Operating Procedures (SOP).

Human Capital Bureau

The person in charge of the management and development of PT Boma Bisma Indra's Human Resources (Persero) is in the Human Resources Bureau. This division is responsible for the entire process of managing and developing Human Capital, starting from the

proses perencanaan hingga melakukan evaluasi dari setiap program kerja yang dijalankan. Struktur Organisasi Biro Sumber Daya Manusia PT BBI tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 001/Kpts.1000.1400/01.2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Perubahan Pokok-Pokok Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi Dibawahnya. Adapun Struktur Organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

planning process to evaluating each work program that is carried out. The Organizational Structure of PT BBI's Human Resources Bureau is stated in the Decree of the Board of Directors Number: 001/Kpts.1000.1400/01.2020 dated January 2, 2020 concerning Changes in the Principals of the Organizational Structure and Functions of the Organization Below. The Organizational Structure in question is as follows.



Direktorat Sumber Daya Manusia didukung oleh Divisi *Human Capital* yang secara umum dipisahkan dalam 3 (tiga) bagian utama, yaitu Remunerasi dan Kepersonaliaan, Pengembangan SDM dan Sistem Organisasi, Rekrutmen dan Assessment. Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut:

The Human Resources Directorate is supported by the Human Capital Division which is generally separated into 3 (three) main sections, namely Remuneration and Personnel, Human Resources Development and Organizational System, Recruitment and Assessment. The duties and responsibilities of each of these sections are as follows:

Bidang Sector	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibility
Remunerasi dan Kepersonaliaan Remuneration and Personnel	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan dan bertanggungjawab terhadap ketertiban administrasi serta kesejahteraan karyawan - Mengelola Administrasi Kepersonaliaan meliputi; Kedisiplinan Karyawan, Cuti karyawan, Dana SIMPONI, BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan, SPPD dan Detasering / Tugas lapangan, dan lain-lain. - Menjaga hubungan Industrial yang harmonis dalam lembaga bipartit. - Merencanakan pelaksanaan reward dan punishment. - Menjamin ketersediaan informasi rencana Man Power Planning sesuai RKAP Perusahaan. - Menjamin ketersediaan data anggaran Penggajian tepat waktu sebelum tanggal 25 setiap bulan berjalan - Organizing and being responsible for administrative order and employee welfare - Managing Personnel Administration includes; Employee Discipline, Employee Leave, SIMPONI Fund, BPJS Employment and Health, SPPD and Detasering / Field Tasks, and others. - Maintaining harmonious industrial relations in bipartite institutions. - Planning the implementation of rewards and punishments. - Ensure the availability of information on Man Power Planning plans in accordance with the Company's RKAP. - Ensure the availability of Payroll budget data on time before the 25th of each month.
Pengembangan SDM dan Sistem Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa, dan evaluasi pengembangan sumber daya

Human Resources Development and Organizational System	<p>manusia dan sistem organisasi perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjamin terlaksananya pengembangan SDM meliputi; Diklat, pengembangan kompetensi dan sertifikasi dengan parameter 5% Man Hour / Thn dengan anggaran 5 % dari biaya SDM. - Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan SDM. - Sebagai partner strategis manajemen untuk merumuskan kebijakan bidang Pengembangan SDM dan Sistem Organisasi. - Menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait untuk program kerja perusahaan dalam peningkatan kompetensi personil. - Organizing and being responsible for planning, organizing, implementing, and evaluating the development of human resources and the company's organizational system. - Ensuring the implementation of HR development includes; Training, competency development and certification with parameters of 5% Man Hour / Year with a budget of 5% of HR costs. - Conducting coaching, monitoring, and evaluating the implementation of HR development. - As a strategic management partner to formulate policies in the field of HR Development and Organizational Systems. - Establishing relationships and cooperation with relevant agencies for the company's work program in improving the competence of personnel.
Rekrutmen dan Assessment Recruitment and Assessment	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas ketersediaan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. - Menjamin terlaksananya perekrutan karyawan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan - Menyediakan kesepakatan upah yang diperoleh dari calon karyawan. - Peningkatan monitoring dan pengendalian Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan produksi. - Melakukan penilaian kinerja karyawan tetap, PKWT/THL secara berkala menggunakan alat ukur yang telah ditetapkan oleh Direksi. - Melaksanakan asesmen untuk pengembangan karir seluruh karyawan secara berkala. - Organize and be responsible for the availability of human resources both quantity and quality in accordance with the needs of the company. - Ensuring the implementation of employee recruitment in accordance with the competencies required by the company - Provide wage agreements obtained from prospective employees. - Improved monitoring and control of Human Resources in the implementation of production. - Conducting performance appraisals of permanent employees, PKWT/THL periodically using measuring tools that have been determined by the Board of Directors. - Carry out assessments for the career development of all employees on a regular basis.

Target dan Rencana Biro Sumber Daya Manusia

Tahun 2020, Biro SDM telah menyusun rencana kerja dan menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai. Tahun 2020, sasaran utama Biro SDM khususnya dalam pengelolaan *Human Capital* adalah memperkuat kapabilitas SDM yang didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif, produktif dan inovatif.

Selain itu, Biro SDM juga telah melakukan 10 sertifikasi kompetensi pegawai/brevet/lisensi. Sasaran tersebut dituangkan dalam program kerja dan penetapan sejumlah target.

Tahun 2020, jumlah training sebanyak 73 jenis dengan total karyawan yang mengikuti sebanyak 608 karyawan/wati.

Human Capital Bureau Targets and Plans

In 2020, the HR Bureau has prepared a work plan and set a number of targets to be achieved. In 2020, the main target of the HR Bureau, especially in the management of Human Capital, is to strengthen HR capabilities supported by a conducive, productive and innovative work environment.

In addition, the HR Bureau has also conducted 10 employee competency certifications / brevets / licenses. These targets are stated in the work program and the determination of a number of targets.

In 2020, there were 73 types of training with a total of 608 employees participating.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kompetensi / keahlian SDM, BBI melakukan program pengembangan SDM melalui Diklat, training, workshop, seminar, sosialisasi dan sertifikasi keahlian. Berbagai macam program tersebut dilaksanakan secara in-house training maupun di lembaga pendidikan / pelatihan luar.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan jumlah program training PT BBI memfokuskan diri dalam usaha peningkatan kompetensi karyawan melalui program training tahunan yang telah disusun berdasarkan Training Need Analysis (TNA) serta mengacu pada Personal Competency Assessment dari masing-masing karyawan serta selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Program pelatihan / training telah dilaksanakan dari tahun ketahun meliputi Training Ketrampilan, Training Keahlian dan Training Manajemen (Leadership & Managerial Training).

Tahun Year	Program Pelatihan Training Program	Jam Training Training Hours	Jumlah Karyawan Total Employees	Biaya Budget
2018	30	79.977	401	Rp 165,384,290.00
2019	69	29.925	391	Rp 375,260,469.00
2020	73	4.540	608	Rp 269,801,687.00

PT BBI memfokuskan diri dalam usaha peningkatan kompetensi karyawan melalui program training tahunan yang telah disusun berdasarkan Training Need Analysis (TNA) serta mengacu pada Personal Competency Assessment dari masing-masing karyawan serta selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Program pelatihan / training telah dilaksanakan dari tahun ketahun meliputi pelatihan dasar, training pengembangan, keahlian atau sertifikasi, dan Manajerial. Berikut adalah sejumlah program training yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2020 yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal.

Human Resources Development

To improve HR competencies/skills, BBI conducts HR development programs through education and training, training, workshops, seminars, socialization and expertise certification. These various programs are carried out in-house training as well as in external educational/training institutions.

Employee Training and Development

From 2017 to 2019 there has been an increase in the number of training programs PT BBI focuses on efforts to increase employee competence through an annual training program that has been prepared based on the Training Need Analysis (TNA) and refers to the Personal Competency Assessment of each employee and is in line with the Long Term Plan. Company (RJPP). Training programs have been implemented from year to year covering Skills Training, Expertise Training and Management Training (Leadership & Managerial Training).

PT BBI focuses on efforts to improve employee competence through an annual training program that has been prepared based on the Training Need Analysis (TNA) and refers to the Personal Competency Assessment of each employee and is in line with the Company's Long Term Plan (RJPP).

Training programs have been implemented from year to year covering Basic Training, Development Training, Expertise or certification, and Managerial. The following are a number of training programs that have been carried out during the period of 2020 which were carried out internally and externally.

Pelatihan Dasar

1. Millennial Gathering
2. Indonesia Muda Club
3. Great Leaders Start From Great Followers

Pengembangan

1. Pelatihan Evaluasi Hasil Usaha & Komersial
2. Pelatihan Management Maintenance
3. Seminar Product Launch
4. FGD Terkait Penerapan PSAK 72
5. FGD Komersial
6. FGD Publik Super Tax Deduction
7. Step by Step Pembuatan Job Description
8. Step by Step Pembuatan KPI
9. Webinar ISO 37001 Anti Penyuapan
10. Perjanjian Kerja PKWT dan PKWTT
11. Penerapan New Normal Bidang HR
12. Webinar ISO 37001 Anti Penyuapan
13. Sosialisasi/ tool box meeting covid19
14. Penanganan Kesehatan Jiwa Tenaga Kerja pada Pandemi COVID-19
15. Webinar tantangan K3 di Era New Normal Pandemi covid 19
16. Sharing session Proyek Bukit Asam
17. Sharing Session Implementasi KPKU BUMN
18. Building Agility for the Next Generation Organizations
19. Awareness SNI ISO 37001:2016
20. Digital Public Training Interpretasi KPKU
21. Workshop SNI ISO 37001:2016
22. Pelatihan Antikorupsi Dasar
23. Sharing Session Proyek JTB
24. Sharing Session Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan
25. Urgensi K3 dalam New Normal
26. Sharing Session Scheduling and Cost Management
27. Webinar Peningkatan Peran Disabilitas di BUMN
28. Webinar Modifikasi Gaya Hidup untuk Tingkatkan Imunitas
29. FGD PKBL (Penetapan Sasaran Prioritas Sustainable Goals oleh BUMN)
30. Internal Audit SNI ISO 37001:2016
31. Basic Human Resources Professional (BHRP)
32. FGD PKBL (Penyusunan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Klaster IM)
33. Webinar Tax Forum BUMN 2020 Agt
34. Modelling Procedure-Fixed Tubesheet Heat Exchanger
35. Akselerasi Internalisasi Budaya AKHLAK
36. Kelas Daring Media Literasi Angkatan I
37. Welding Quality Management System
38. How to Persuade Others

Basic Training

1. Millennial Gathering
2. Indonesia Muda Club
3. Great Leaders Start From Great Followers

Development Training

1. Business Commercial Evaluation Training
2. Maintenance Management Training
3. Product Launch Seminar
4. FGD Implementation PSAK 72
5. Commercial FGD
6. Super Tax Deduction Public FGD
7. Step by Step Making Job Description
8. Step by Step Making KPI
9. ISO 37001 Anti-Bribery Webinar
10. PKWT and PKWTT Work Agreements
11. Implementation of the New Normal in HR
12. ISO 37001 Anti-Bribery Webinar
13. Socialization/tool box meeting covid19
14. Handling Mental Health of Workers in the COVID-19 Pandemic
15. OHS challenge webinar in the New Normal Era of the Covid 19 Pandemic
16. Bukit Asam Project Sharing session
17. Sharing Session of BUMN KPKU Implementation
18. Building Agility for the Next Generation Organizations
19. Awareness of SNI ISO 37001:2016
20. KPKU Interpretation Digital Public Training
21. Workshop on SNI ISO 37001:2016
22. Basic Anti-Corruption Training
23. JTB Project Sharing Session
24. Sharing Session of Quality, K3 and Environmental Management System
25. The urgency of K3 in the New Normal
26. Sharing Session Scheduling and Cost Management
27. Webinar on Increasing the Role of Disabilities in SOEs
28. Lifestyle Modification Webinar to Boost Immunity
29. PKBL FGD (Setting Priority Sustainable Goals by BUMN)
30. Internal Audit SNI ISO 37001:2016
31. Basic Human Resources Professional (BHRP)
32. PKBL FGD (Development of IM Cluster Social and Environmental Responsibilities)
33. BUMN Tax Forum Webinar 2020 Aug
34. Modeling Procedure-Fixed Tubesheet Heat Exchanger
35. Acceleration of Internalization AKHLAK
36. Class I Media Literacy Online Class
37. Welding Quality Management System
38. How to Persuade Others
39. Building Corporate Integration through

39. Membangun Integrasi Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001)
40. Webinar Tax Forum BUMN 2020 September
41. Online Seminar Fire Layer Protection
42. Bela Negara
43. Webinar Kelas Komunikasi
44. Webinar "Kegiatan Kepresidenan Era Kebiasaan Baru"
45. Integrated Sawing Solution : How to Optimize Your Productivity"
46. Webinar Tax Forum BUMN 2020 November "Implementasi Perpajakan UU Omnibus Law"
47. Online Course Digital Business Transformation
48. Online Course Business Analytic
49. Webinar PHK dan Pesangon UU Cipta Kerja
50. Webinar Business Judgment Rule Vs Tindak Pidana Korupsi
51. Sosialisasi Limbah B3 dan Sertifikasi Laik Fungsi sesuai dengan UU Cipta Kerja
52. Webinar Salary Adjustment
53. Training Online Certified Human Resources Staf
54. Training Online Certified Human Resources Recruitment and Selection Staff

Keahlian/Sertifikasi

1. Sertifikasi Pengawas K3 Migas
2. Sertifikasi Operator Genset
3. Sertifikasi Confined Space
4. Re-sertifikasi AK3 Umum
5. Resertifikasi Konstruksi
6. Re-sertifikasi lisensi crane
7. Sertifikasi Leader As A Coach batch 3
8. Sertifikasi Integrasi ISO/OHSAS & Lingkungan
9. Internal Auditor SNI ISO 37001:2016
10. Sertifikasi Authorized Gas Tester

Manajerial

1. Webinar I'm A Leader
2. Webinar Manajemen proyek konstruksi
3. How to maintain organization effectiveness during the Pandemic of Covid-19
4. Winning team
5. Building Agility for the next generation organization
6. Employee Engagement Through Coaching

- Anti-Bribery Management System (ISO 37001)
40. SOEs 2020 September 2020 Tax Forum Webinar
41. Online Seminar on Fire Layer Protection
42. Defend the Country
43. Communication Class Webinar
44. Webinar "New Custom Era Presidential Activities"
45. Integrated Sawing Solution: How to Optimize Your Productivity"
46. SOE 2020 Tax Forum Webinar November "Implementation of Taxation of the Omnibus Law"
47. Online Course Digital Business Transformation
48. Online Course Business Analytics
49. Layoffs and Severance pay webinar
50. Webinar Business Judgment Rule Vs Corruption Crime
51. Socialization of Hazardous Waste and Functional Eligibility Certification
52. Webinars Salary Adjustments
53. Certified Human Resources Staff Online Training
54. Online Training Certified Human Resources Recruitment and Selection Staff

Expertise/Certification

1. Oil and Gas K3 Supervisor Certification
2. Generator Operator Certification
3. Confined Space Certification
4. General AK3 Re-certification
5. Construction Recertification
6. Re-certification of crane license
7. Certification of Leader As A Coach batch 3
8. ISO/OHSAS & Environment Integration Certification
9. Internal Auditor SNI ISO 37001:2016
10. Authorized Gas Tester Certification

Manajerial

1. Webinars I'm A Leader
2. Construction project management webinar
3. How to maintain organization effectiveness during the Pandemic of Covid-19
4. Winning team
5. Building Agility for the next generation organization
6. Employee Engagement Through Coaching

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Rekrutmen SDM

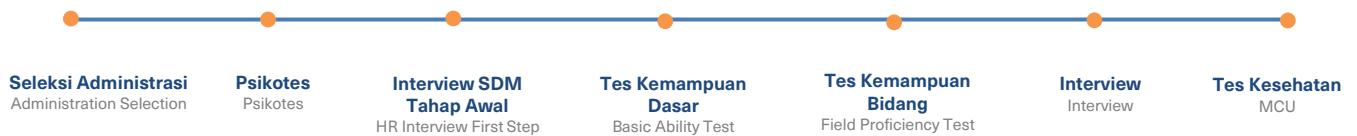
Untuk meningkatkan kompetensi / keahlian SDM, BBI melakukan program pengembangan SDM melalui Diklat, training, workshop, seminar, sosialisasi dan sertifikasi keahlian. Berbagai macam program tersebut dilaksanakan secara in-house training maupun di lembaga pendidikan / pelatihan luar.

HR Recruitment

To improve HR competencies/skills, BBI conducts HR development programs through education and training, training, workshops, seminars, socialization and expertise certification. These various programs are carried out in-house training as well as in external educational/training institutions.

Tahapan Program Rekrutmen dan Seleksi Karyawan

Stages of Employee Recruitment and Selection



a. Program Rekrutmen dan Seleksi Karyawan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja baru, BBI melakukan rekrutmen. Rekrutmen dilakukan dengan menerbitkan informasi lowongan kerja yang disebarluaskan melalui sosial media perusahaan (instagram, fb) dan bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga (jasa lowongan kerja), hal ini ditujukan agar mampu mendapatkan calon karyawan sebanyak mungkin sehingga dapat diseleksi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

b. Realisasi Karyawan Baru

Penerimaan karyawan baru pada tahun 2020 berjumlah 47, dengan rincian 20 karyawan project; 14 karyawan regenerasi; dan 3 *professional hire* dengan rincian pada tahun 2020 yaitu sebanyak orang.

a. Recruitment and Selection Program

Employee In order to meet the needs of new workers, BBI conducts recruitment. Recruitment is carried out by publishing job vacancy information that is distributed through company social media (instagram, fb) and in collaboration with several third parties (job vacancies), this is intended to be able to get as many prospective employees as possible so that they can be selected according to the qualifications required by the company.

b. New Employee Realization

New employee recruitment in 2020 amounted to 47, with details of 20 project employees; 14 regeneration employees; and 3 professional hires with details in 2020 as many as 5,000 people.

Kesejahteraan Karyawan

Perusahaan telah menjalankan semua kewajibannya sesuai dengan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Tahun 2020.

Penilaian Kinerja Karyawan

Penilaian Kinerja Karyawan mengacu pada Keputusan Direksi Nomer: 007 / Kpts-1000 / 02.2018 tentang Penilaian Karyawan berbasis performance. Penilaian karyawan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

Employee Welfare

The company has carried out all its obligations in accordance with the 2020 Collective Labor Agreement (PKB).

Employee Performance Appraisal

Employee Performance Assessment refers to Board of Directors Decree Number: 007 / Kpts-1000 / 02.2018 regarding Performance-based Employee Assessment. Employee assessment is grouped into 3 parts, namely:

kelompok struktural, fungsional dan pelaksana / operator. Apresiasi diberikan kepada karyawan atas hasil kinerja yang diperolehnya selama satu tahun dalam bentuk kenaikan indeks (sesuai dengan Skala Gaji sistem indeks).

structural, functional and implementer/operator groups. Appreciation is given to employees for the performance results obtained for one year in the form of an increase in the index (according to the Salary Scale of the index system).

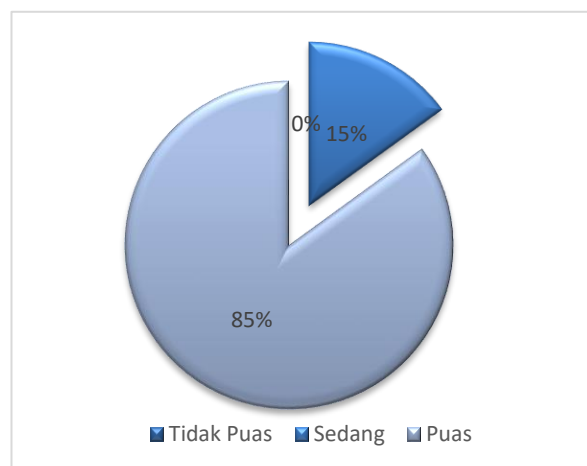
Kepuasan Karyawan

Hasil survei rata-rata tingkat kepuasan masing-masing karyawan BBI menunjukkan data bahwa dari 91 Karyawan yang mengisi survey tingkat kepuasan karyawan menunjukkan 15 karyawan merasa sedang dan 77 karyawan menyatakan dirinya puas bekerja di PT Boma Bisma Indra (Persero). Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Karyawan PT BBI puas.

Employee Satisfaction

The results of the survey on the average satisfaction level of each BBI employee show data that of 91 employees who filled out the employee satisfaction level survey, 15 employees felt moderate and 77 employees stated that they were satisfied working at PT Boma Bisma Indra (Persero). With these results it can be concluded that PT BBI employees are satisfied.

Diagram Kepuasan Karyawan
Diagram of Employee Satisfaction



Terdapat 5 faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan karyawan, faktor yang memiliki nilai tertinggi adalah (1) Pengembangan Diri dan (2) Work It Self / Pekerjaan itu sendiri. Sedangkan faktor yang memiliki nilai terendah adalah Gaji dan Kesejahteraan. Perusahaan perlu mempertahankan 2 faktor tertinggi tersebut dengan terus berkomitmen memberikan kesempatan yang sama pada semua karyawan untuk mengembangkan diri, melaksanakan promosi sesuai dengan SOP, memberikan tantangan kepada karyawan, mengkaji ulang kesesuaian TUPOKSI, melakukan analisis beban kerja karyawan dan memberikan reward untuk karyawan. Sedangkan untuk faktor yang terendah, perusahaan perlu terus berkomitmen dalam pembayaran gaji dan kesejahteraan secara tepat waktu sesuai dengan prosedur, melaksanakan

There are 5 factors that influence employee satisfaction, the factors that have the highest value are (1) Self Development and (2) Work It Self / the work itself. While the factors that have the lowest value are Salary and Welfare. Companies need to maintain these 2 highest factors by continuing to be committed to providing equal opportunities for all employees to develop themselves, carry out promotions in accordance with SOPs, provide challenges to employees, review the suitability of TUPOKSI, analyze employee workloads and provide rewards for employees. As for the lowest factor, the company needs to continue to be committed to paying salaries and welfare in a timely manner in accordance with

penilaian yang objektif dan credible serta melakukan benchmark Sistem Penggajian dengan industri sejenis.

procedures, carrying out objective and credible assessments and benchmarking the Payroll System with similar industries.

Diagram Nilai Faktor Kepuasan Karyawan
Diagram of Value of Employee Satisfaction Factors

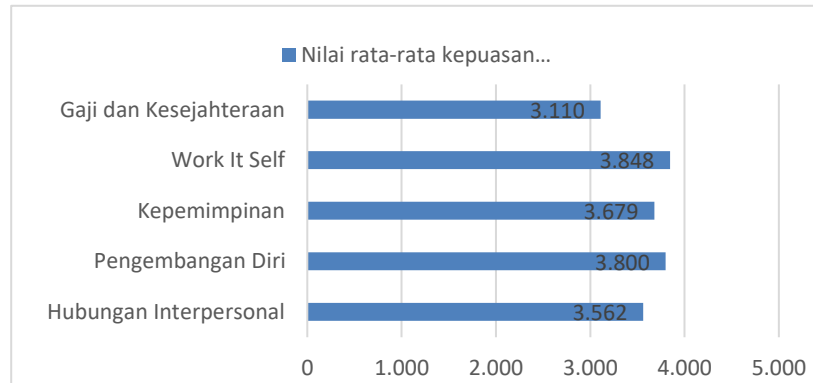


Diagram tersebut menunjukkan nilai kepuasan berdasarkan faktor yang mempengaruhi. Terlihat bahwa faktor Pengembangan Diri dan Work It Self / Pekerjaan itu sendiri memiliki nilai yang tertinggi.

The diagram shows the value of satisfaction based on the influencing factors. It can be seen that the factors of Self Development and Work It Self / Work itself has the highest value.

Faktor Pengembangan Diri tersebut terdiri dari: prospek dan kesempatan promosi, kesempatan meningkatkan kemampuan melalui pelatihan, serta kesediaan karyawan menerima pekerjaan dan tantangan. Perusahaan perlu mempertahankan performa faktor Pengembangan Diri dengan cara, yaitu:

The Self-Development factors consist of: prospects and promotion opportunities, opportunities to improve skills through training, and the willingness of employees to accept jobs and challenges. Companies need to maintain the performance of the Personal Development factor by:



- Terus berkomitmen memberikan kesempatan yang sama pada semua karyawan untuk mengembangkan diri baik melalui pelatihan maupun sertifikasi/SKA.
- Melaksanakan promosi sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- Memberikan tantangan dalam pekerjaan untuk memacu karyawan terus berinovasi.

Faktor Work It Self / Pekerjaan Itu Sendiri terdiri dari: kepuasan, kebahagiaan, dan kebanggaan terhadap pekerjaan yang didapatkan oleh karyawan. Untuk mempertahankan performa factor tersebut, perusahaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengkaji ulang kesesuaian TUPOKSI dengan keadaan real di lapangan dan oleh karena perubahan organisasi, sehingga semakin meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan.
- Melakukan analisis beban kerja karyawan secara bertahap untuk mengetahui kesesuaian tingkat beban kerja karyawan.
- Memberikan motivasi karyawan dengan memberikan reward terhadap kinerja yang baik serta menerapkan punishment sesuai prosedur

Sedangkan Faktor yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah Gaji dan Kesejahteraan, faktor tersebut terdiri dari: penghargaan atas kinerja karyawan, sistem penggajian, tunjangan dan kesejahteraan lainnya.

- Continue to be committed to providing equal opportunities for all employees to develop themselves either through training or certification/SKA.
- Carry out promotions in accordance with SOPs that have been determined by the company.
- Provide challenges at work to encourage employees to continue to innovate.

The Work It Self factor consists of: satisfaction, happiness, and pride in the work obtained by employees. To maintain the performance of these factors, companies need to pay attention to the following:

- Reviewing the suitability of the TUPOKSI with real conditions in the field and due to organizational changes, thereby increasing employee efficiency and productivity.
- Conduct employee workload analysis in stages to determine the suitability of employee workload levels.
- Motivate employees by giving rewards for good performance and applying punishment according to procedures.

While the factors that have the lowest average value are Salary and Welfare, these factors consist of: rewards for employee performance, salary system, benefits and other welfare.



INVESTASI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

Investment in Human Capital



Komitmen BBI terhadap pengelolaan dan pengembangan SDM juga tercermin dari investasi yang dilakukan Perseroan dalam program pendidikan dan pengembangan kompetensi karyawan. Tahun 2020, BBI mengikuti pelatihan dan pendidikan sebanyak 73 program, dengan total 4.540 jam, dan diikuti oleh 608 pegawai sebagai peserta pelatihan. Total investasi yang dibenamkan Perseroan untuk pelaksanaan program tersebut adalah sebesar Rp 269.801.687,-

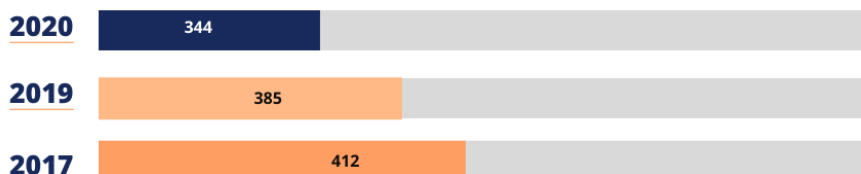
BBI's commitment to HR management and development is also reflected in the Company's investments in employee education and competency development programs. In 2020, BBI participated in 73 training and education programs, with a total of 4,540 hours, and was attended by 608 employees as training participants. The total investment invested by the Company for the implementation of the program is Rp. 269,801,687,-

Demografi Karyawan

Employee Demography

Jumlah Karyawan PT Boma Bisma Indra (2018-2020)

Total Employee of PT Boma Bisma Indra (2018-2020)



Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Employee Composition Based on Employee Status

Status Karyawan Employee Status	2019		2020	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
Karyawan Tetap Permanent Employee	325	84.42%	302	87.79%
Karyawan Tidak Tetap Non-Permanent Employee	60	15.58%	42	12.20%
Jumlah Total	385	100.00%	344	100.00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Employee Composition Based by Age

Rentang Usia Age Range	2019		2020	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
>30	81	12.90%	77	22.38%
31 – 40	41	26.10%	34	9.88%
41 – 50	168	43.89%	128	37.2%
>51	95	17.11%	105	30.52%
Jumlah Total	385	100.00%	344	100.00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Employee Composition Based on Education

Jenjang Pendidikan Education	2019		2020	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
SMU dan Sederajat High School and Equivalent	245	68.07%	213	61.91%
Diploma dan Setara Diploma and Equivalent	45	10.17%	41	11.91%
Sarjana Bachelor Degree	91	20.95%	87	25.29%
Pascasarjana Postgraduate Degree	4	0.81%	3	0.87%
Jumlah Total	385	100.00%	344	100.00%

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Employee Composition Based Position Level

Level Jabatan Position Level	2019		2020	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
General Manajer	9	2.33%	11	3.19%
Manager	49	12.72%	34	9.88%
Supervisor	24	6.23%	9	2.61%
Leader	16	4.15%	47	13.66%
Staff	138	35.84%	148	43.02%
Executor	149	38.70%	95	27.61%
Jumlah Total	385	100.00%	344	100.00%

Tingkat Turnover Karyawan

Employee Composition Based Position Level

Keterangan Discription	2019		2020	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
Mundur Diri Resign	2	5.8%	6	13.04%
Habis Kontrak Contract Ends	13	38.23%	12	26.08%
Mutasi Mutation	0	0%	3	6.52%
Pensiun Pension	19	55.88%	25	54.34%
Jumlah Total	34	100.00%	46	100.00%

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

Perkembangan kebutuhan bisnis dan organisasi mengharuskan Perseroan untuk menata dan membenahi diri dalam menyiapkan teknologi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung pengembangan dan perluasan bisnis, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen melalui layanan berbasis teknologi informasi. Di era globalisasi, kehandalan teknologi informasi merupakan salah satu unsur penting yang mendukung proses bisnis dan layanan yang prima. Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Perseroan menyediakan produk dan jasa kepada konsumen, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya. Pengelolaan Teknologi Informasi di PT Boma Bisma Indra (Persero) berada di bawah naungan Biro Sistem Manajemen, Risiko, dan Informasi. Sehingga kebijakan terkait Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) lebih terarah dan berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan.

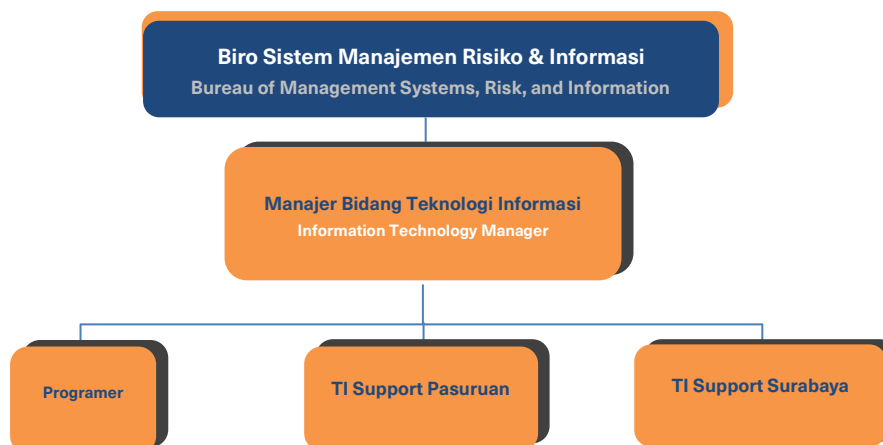
The development of business and organizational needs requires the Company to organize and improve itself in preparing the technology needed to be able to support business development and expansion, as well as provide the best service to consumers through information technology-based services. In the era of globalization, the reliability of information technology is one of the important elements that support excellent business processes and services. Technology is the main key that enables the Company to provide products and services to consumers, measure and track business performance, and make the right management decisions for the continuity of its business. Management of Information Technology at PT Boma Bisma Indra (Persero) is under the auspices of the Bureau of Management, Risk and Information Systems. So that policies related to Information and Communication Technology (ICT) are more focused and run in accordance with the company's vision and mission.

Biro Sistem Manajemen, Risiko, Dan Informasi

Penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan TIK di PT BBI adalah Bidang Teknologi Informasi (TI) yang berada di bawah naungan Biro Sistem Manajemen, Risiko, dan Informasi (SMRI).

Bureau Of Management Systems, Risk, And Information

The person in charge of ICT management and development at PT BBI is the Information Technology (IT) Division which is under the auspices of the Management, Risk, and Information Systems Bureau (SMRI).



Struktur Organisasi Biro Manajemen, Risiko, dan Informasi merupakan kerangka kerja tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penerapan tata kelola TIK sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

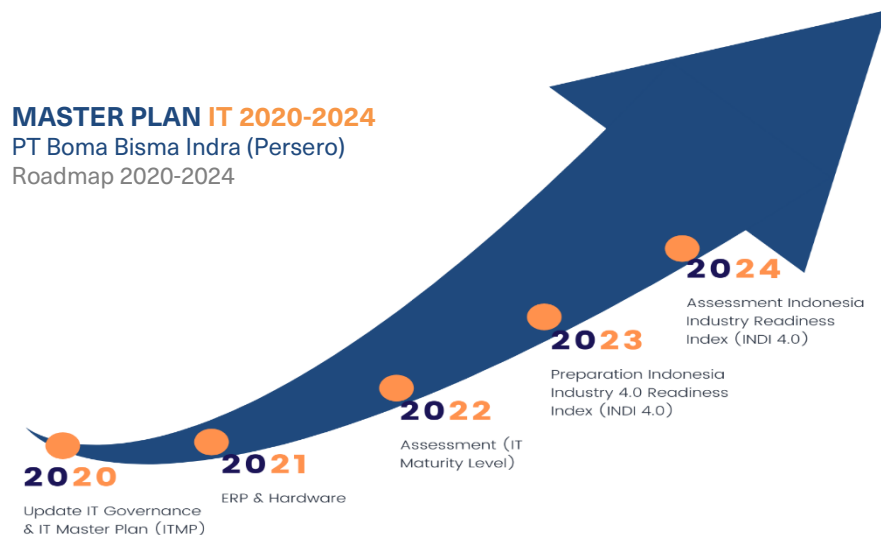
The Organizational Structure of the Bureau of Management, Risk, and Information is a governance framework for Information and Communication Technology (ICT). Implementation of ICT governance in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/02/2018 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for the Preparation of Information Technology Management for State-Owned Enterprises.

Roadmap Teknologi Informasi Pt Boma Bisma Indra

Teknologi Informasi dhencanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan kedepan, dengan langkah awal adalah penyediaan aplikasi atau sistem ERP (Enterprise Resource Planning) dan upgare hardware pendukungnya. Dengan adanya ERP akan mempermudah pengelolaan perusahaan secara digital dan akan mempermudah dan cepat dalam pengambilan keputusan- Untuk konsep detailnya sepertigambar dibawah ini:

Roadmap Information Technology Pt Boma Bisma Indra

Information technology is planned according to the company's future needs, with the initial step being the provision of an ERP (Enterprise Resource Planning) application or system and upgrading its supporting hardware. With ERP, it will make it easier to manage the company digitally and will make it easier and faster to make decisions - For the detailed concept as shown below:



2020	2021	2022	2023	2024
Pembaharuan Tata Kelola IT dan Master Plan TI Sesuai dengan strategi dan tujuan Perusahaan. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2018. Renewal of IT Governance and IT Master Plan in accordance with the Company's strategy and objectives. This refers to the Minister of SOE Regulation Number PER-02/MBU/2018.	A. Upgrade Hardware / Infrastruktur B. ERP <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation 2. Blueprint 3. Realization 4. Final Preparation 5. Go Live C. IT Maturity Level <ol style="list-style-type: none"> 1. Self-Assessment 	IT Maturity Level IT Maturity Level Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) Persiapan 1 Preparation 1 Persiapan 2 Preparation 2 Persiapan 3 Preparation 3		

Peran Teknologi Informasi Di Pt Boma Bisma Indra

Peran TIK Dalam Program Kerja Digitalisasi Proses Bisnis:

1. Efisiensi Perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah serta lebih cepat dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan yang diberikan
2. Excellence Mendukung eksekusi dari strategi bisnis perusahaan yang akan berdampak pada risiko serta biaya operasional yang efisien, serta menghasilkan nilai tambah baik bagi pengguna dan para pemegang kepentingan
3. Customer Experience Pengelolaan pelanggan dengan memberikan nilai tambah melalui peningkatan keterikatan dengan pelanggan untuk membangun customer experience.

Tahun 2020, Bidang Teknologi Informasi telah merealisasikan berbagai program kerja yang mengacu pada Master Plan TIK, antara lain melakukan revisi Tata Kelola TIK yang merupakan bagian dari penerapan Tata kelola yang dilandaskan kepada Permen BUMN No.03 tahun 2018 perubahan atas permen BUMN No. 02 tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

Adapun perubahan yang telah dilakukan terkait dengan Teknologi Informasi di PT BBI adalah merombak website Perusahaan secara keseluruhan dengan mengedepankan tampilan

The Role Of Information Technology At Pt Boma Bisma Indra

The Role of ICT in the Business Process Digitization Work Program:

1. Efficiency Process improvement so that it becomes cheaper and faster while still paying attention to the quality of the work provided
2. Excellence Supporting the execution of the company's business strategy that will have an impact on risk and efficient operational costs, as well as generate added value for both users and stakeholders
3. Customer Experience Management of customers by providing added value through increasing engagement with customers to build customer experience.

In 2020, the Information Technology Sector has realized various work programs that refer to the ICT Master Plan, including revising ICT Governance which is part of the implementation of governance based on SOE Ministerial Regulation No. 03 of 2018 amendments to SOE Regulation No. 02 of 2013 concerning Guidelines for the Preparation of Information Technology management for State-Owned Enterprises.

The changes that have been made related to Information Technology at PT BBI are overhauling the Company's website as a whole

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

yang lebih elegan dan menggunakan CSM (Content Management System) dalam pengelolaannya, sehingga memudahkan admin lebih leluasa mengelola website.

Bidang TI berupaya dalam mewujudkan transformasi digital kegiatan operasional perusahaan. Transformasi digital pada proses bisnis, produk dan layanan dalam rangka peningkatan keunggulan bersaing perusahaan. Fokus utama transformasi digital untuk mendukung dan memberikan nilai tambah jasa yang ditawarkan perusahaan.

Dalam menunjang transformasi digital, Bidang TI berperan penting dalam membangun dan merilis aplikasi yang dapat memperlancar dan mempercepat proses bisnis kegiatan operasional dan pendukung. Enterprise Resource Planning (ERP) yang bisa menjadi sistem aplikasi tulang punggung (Backbone Application System) untuk proses penerimaan order sampai penerbitan invoice dan kemudahan lainnya demi Sumber Daya yang lebih efektif belum berhasil diterapkan di Perusahaan, namun TI telah merealisasikan pembuatan aplikasi web based Sistem Informasi Keuangan (SIK) yang saat ini digunakan untuk pengelolaan kasbon keuangan serta pengembangan aplikasi website yang disebut dengan Sistem Informasi Dokumen (SID). SID berfungsi untuk menampung seluruh dokumen perusahaan yang berisi kebijakan, QP, QI, dan MDR. Tetapi dikarenakan kapasitas yang terbatas, kami belum bisa memberikan fasilitas unggah MDR.

Investasi Teknologi Informasi

PT Boma Bisma Indra (Persero) memahami arti penting TI sebagai pendukung pengembangan usaha Perseroan. Untuk itu, setiap tahun perusahaan menyediakan anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan TI. Anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan investasi sesuai dengan roadmap pengembangan TI yang telah ditetapkan di dalam Master Plan TI. Hingga saat ini investasi TI yang diharapkan bisa membawa perubahan besar adalah Enterprise Resource Planning (ERP) Merah Putih yang sampai saat ini belum sempat terealisasikan.

by prioritizing a more elegant appearance and using CSM (Content Management System) in its management, making it easier for admins to more freely manage the website.

The IT sector strives to realize the digital transformation of the company's operational activities. Digital transformation of business processes, products and services in order to increase the company's competitive advantage. The main focus of digital transformation is to support and provide value added services offered by the company.

In supporting digital transformation, the IT sector plays an important role in building and releasing applications that can streamline and accelerate business processes for operational and supporting activities. Enterprise Resource Planning (ERP) which can be a backbone application system (Backbone Application System) for the process of receiving orders to issuing invoices and other facilities for more effective resources has not been successfully implemented in the Company, but IT has realized the creation of a web application based on Information Systems. Finance (SIK) which is currently used for the management of financial cash receipts and the development of a website application called the Document Information System (SID). SID serves to accommodate all company documents containing policies, QP, QI, and MDR. However, due to limited capacity, we have not been able to provide MDR upload facilities.

Technology Information Investment

PT Boma Bisma Indra (Persero) understands the importance of IT as a supporter of the Company's business development. For this reason, every year the company provides a budget for IT management and development. The budget is adjusted to investment needs in accordance with the IT development roadmap that has been set out in the IT Master Plan. Until now, the IT investment that is expected to bring about big changes is the Red and White Enterprise Resource Planning (ERP), which has not yet been realized.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Revisi kebijakan Tatakelola Teknologi Informasi yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dalam rangka penyesuaian dengan peraturan menteri. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara sebagai acuan penerbitan Keputusan Direks No. 072/Kpts.1000/1100/07.2020 tentang Pedoman Pengendalian Informasi; 076/Kpts.1000/2100/12.2020 tentang tata Kelola Teknologi Informasi; serta 077/Kpts.1000/2011/12.2020 tentang Pedoman Master Plan Teknologi Informasi.

Selain sasaran mutu, sasaran penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi di PT BBI (Persero) nantinya adalah peningkatan indeks kematangan pengelolaan TI (IT Maturity).

Technology Infromation Governance

Revision of Information Technology Governance policies that have been set in 2019 in order to adjust to ministerial regulations. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/02/2018 concerning Amendment to Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for the Preparation of Information Technology Management for State-Owned Enterprises as a reference for the issuance of Director's Decree No. 072/Kpts.1000/1100/07.2020 concerning Information Control Guidelines; 076/Kpts.1000/2100/12.2020 concerning Information Technology Governance; and 077/Kpts.1000/2011/12.2020 regarding Information Technology Master Plan Guidelines.

In addition to quality goals, the target of implementing Information Technology Governance at PT BBI (Persero) will be an increase in the IT management maturity index (IT Maturity).

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

WORLD TRAFFIC



Total Orders

13,678

+0.25% LAST MONTH

Total Sales

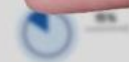
11,892

-0.22% LAST MONTH

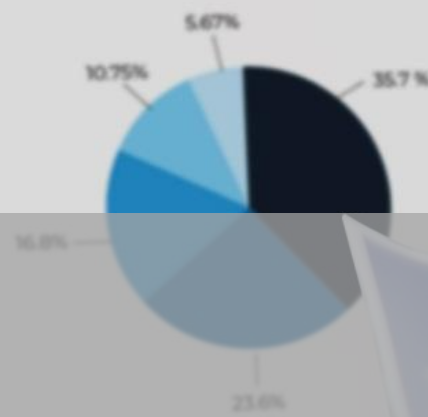
Total Profit

\$6,789

+1% LAST MONTH



Analysis



A hand wearing a yellow sleeve points towards the left. In the background, there is a potted plant with dark green leaves and a small succulent. The overall scene is a blurred office or study environment.

05

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis



TINJAUAN UMUM

General Review

Industri merupakan komponen penggerak berlangsungnya pembangunan dan merupakan salah satu komponen penggerak roda perekonomian baik di negara berkembang ataupun di negara maju Di Indonesia. Industri merupakan bidang strategis yang terus tumbuh seiring dengan perkembangan perekonomian nasional.

Dalam aplikasinya dan berdasarkan fungsinya, industri terdiri dari 3 (tiga) kelompok pelaku yaitu industri hulu, industri antara dan industri hilir yang keberadaan ketiganya saling terkait. PT Boma Bisma Indra (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang termasuk dalam kelompok Industri Antara yang menempati posisi sebagai produsen barang modal dan berperan strategis dalam memberikan nilai tambah mulai dari industri hulu sampai ke industri hilir.

Sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini yaitu menciptakan kedaulatan ekonomi melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi serta program infrastruktur prioritas, maka industri antara dan industri hilir dituntut kesiapannya untuk dapat berpartisipasi aktif dalam program prioritas tersebut.

Sektor Industri di Indonesia menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan hal ini telah menempatkan industri manufaktur sebagai motor sektor riil. Dibutuhkan strategi

Industry is the driving component for the ongoing development and is one of the components that drive the economy in both developing and developed countries. In Indonesia. Industry is a strategic field that continues to grow in line with the development of the national economy.

In its application and based on its function, industry consists of 3 (three) groups of actors, namely the upstream industry, intermediate industry and downstream industry, the existence of which all three are interrelated. PT Boma Bisma Indra (Persero) is a state-owned company belonging to the Antara Industry group which functions as a producer of capital goods and plays a strategic role in providing added value from the upstream to the downstream industries.

In line with the current government's priority program, namely creating economic sovereignty through food sovereignty and energy sovereignty as well as priority infrastructure programs, the intermediate and downstream industries are required to be ready to be active in these priority programs.

The industrial sector in Indonesia is the motor that drives the national economy and this has positioned the manufacturing industry as the real motor sector. It takes a precise and

yang tepat dan konsisten dalam membangun sektor ini sehingga dapat mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun di pasar global.

consistent strategy in building this sector so that it can create a strong and competitive industry both in the domestic market and in the global market.

Pendahuluan Preliminary	Kilas Kinerja 2020 2020 Performance Highlights	Laporan Manajemen Management Reports	Profil Perusahaan Company Profile	Sumber Daya Manusia Human resources	Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
----------------------------	---	---	--------------------------------------	--	---	---	---

TINJAUAN EKONOMI

Economy Review

Tinjauan Kondisi Perekonomian Global

Sepanjang tahun 2020, perekonomian global mengalami kontraksi yang berat. Dimulai dari adanya virus Covid-19 yang muncul pada akhir 2019 di Kota Wuhan, China, mengakibatkan pandemi berkepanjangan, terjadi hingga berbagai negara di dunia termasuk China terpaksa menutup beberapa kota dan menghentikan seluruh aktivitas perekonomiannya. Imbas adanya virus Covid-19 mengakibatkan hampir semua negara menerapkan pembatasan (*lockdown*) yang berpengaruh negatif terhadap kondisi perekonomian dunia. Hal tersebut juga berdampak terhadap hampir seluruh sektor mengalami kondisi yang kian memburuk.

Adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, perekonomian global mengalami penurunan signifikan karena pada umumnya masing-masing negara melakukan pembatasan perjalanan hingga terlambatnya proses pendistribusian, dan tingginya pengangguran. Jumlah kasus Covid-19 terus meningkat pesat di tahun 2020. Hingga akhir tahun 2020, kondisi global belum kembali pulih. Utilitas Manufaktur pun anjlok karena disrupsi supply chain yaitu pabrik-pabrik tutup dan harga material melonjak.

Titik terang pemulihan pandemi dimulai dengan adanya pengembangan Vaksin yang menjadi harapan sejak akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 yang akan dilakukan dengan segera. Harapan dan optimisme terhadap pelaksanaan vaksin mendukung penguatan kondisi perekonomian. Diperkirakan ekonomi dunia akan mulai membaik pada tahun 2021, karena masing-masing negara akan mendorong dengan stimulus kebijakan dan aktivitas ekonomi akan berangsur normal. Data proyeksi perekonomian global tahun 2021, seperti dari IMF, World Bank hingga konsensus Bloomberg menunjukkan proyeksi yang optimis. Data menyebutkan proyeksi perekonomian dunia dapat tumbuh dari antara 4,20% hingga 5,20%.

Review of Global Economic Conditions

Throughout 2020, the global economy experienced a severe contraction. Starting from the Covid-19 virus that emerged at the end of 2019 in the city of Wuhan, China, causing a prolonged pandemic, it occurred until various countries in the world including China were forced to close several cities and stop all economic activities. The impact of the Covid-19 virus has resulted in almost all countries implementing restrictions (*lockdowns*) which have a negative effect on world economic conditions. This also has an impact on almost all sectors experiencing worsening conditions.

Due to the Covid-19 pandemic that has hit the world, the global economy has experienced a significant decline because in general each country has imposed travel restrictions, resulting in delays in the distribution process, and high unemployment. The number of Covid-19 cases continued to increase rapidly in 2020. Until the end of 2020, global conditions had not yet recovered. Manufacturing utility also fell due to supply chain disruption, where factories closed and material prices soared.

The bright spot for the recovery of the pandemic begins with the development of a vaccine that has been a hope since the end of 2020 and the beginning of 2021 which will be carried out immediately. Hope and optimism for the implementation of the vaccine supports the strengthening of economic conditions. It is estimated that the world economy will begin to improve in 2021, because each country will push with policy stimulus and economic activity will gradually return to normal. Data on global economic projections for 2021, such as from the IMF, World Bank to the Bloomberg consensus show optimistic projections. The data shows that the world economy is projected to grow from 4.20% to 5.20%.

Tinjauan Indonesia

Kondisi

Perekonomian

Review of Indonesian Economic Condition

Perekonomian nasional tahun 2020 dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang melambat, telah berimbas negatif pada banyak negara, termasuk Indonesia. Adanya virus Covid-19 yang memasuki Indonesia di awal bulan Maret 2020 menyebabkan krisis di berbagai sektor, salah satunya sektor industri manufaktur. Berbagai negara mengalami resesi ekonomi termasuk Indonesia.

Adanya Pandemi COVID-19, untuk pertama kalinya sejak krisis moneter tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami resesi sebesar minus 5,32% pada triwulan II dan minus 3,49% pada triwulan III. Pergerakan mata uang Rupiah melemah hingga Rp16.495 per US Dollar pada bulan April 2020. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, seperti melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, dan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah.

Akhir tahun 2020 vaksin Covid-19 mulai ditemukan, perekonomian Indonesia secara perlahan mengalami perbaikan di triwulan IV. Nilai tukar Rupiah di akhir tahun ditutup pada level Rp14.050 per US Dollar. Tekanan perekonomian juga bisa dilihat dari laju inflasi sepanjang tahun 2020 yang tercatat pada angka 1,68% (YoY), angka tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2019 pada angka 2,59% (YoY).

Pemerintah Indonesia menyusun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada September 2020 guna mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat pandemi. PEN memiliki enam program prioritas; peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi dengan memberikan dukungan pada kawasan strategis nasional, penguatan jaring pengaman nasional lewat program Padat Karya Tunai (PKT) serta pembelian produk rakyat dan pengusaha lokal (UMKM), dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sumber: BPS Official Statistics News February 2021, Quarter III Monetary Policy Report 2020 by Bank Indonesia, Indonesian Banking Statistics November 2020

The national economy in 2020 is influenced by global economic developments that are still faced with uncertainty and slowing growth, which has had a negative impact on many countries, including Indonesia. The existence of the Covid-19 virus that entered Indonesia in early March 2020, the spread of the virus so quickly caused crises in various sectors, one of which was the manufacturing industry sector. Various countries experienced economic recession, including Indonesia.

Due to the COVID-19 pandemic, for the first time since the 1998 monetary crisis, the Indonesian economy experienced a recession of minus 5.32% in the second quarter and minus 3.49% in the third quarter. The movement of the Rupiah weakened to Rp16,495 per US Dollar in April 2020. The government has implemented various policies to help improve the Indonesian economy, such as through incentives in terms of taxation, state spending, and continues to encourage various sectoral and regional activities.

At the end of 2020 the Covid-19 vaccine began to be found, the Indonesian economy slowly improved in the fourth quarter. The Rupiah exchange rate at the end of the year closed at the level of Rp14,050 per US Dollar. Economic pressures can also be seen from the inflation rate throughout 2020 which was recorded at 1.68% (YoY), this figure experienced a significant decrease compared to 2019 at 2.59% (YoY).

The Indonesian government has compiled a National Economic Recovery (PEN) program in September 2020 to accelerate economic recovery and social reform due to the Covid-19 pandemic. PEN has six priority programs, namely increasing food security, developing connectivity, improving public health and the environment, increasing investment by providing support to national strategic areas, strengthening national safety nets through the Cash-Intensive Program (PKT) and purchasing products from the people and local entrepreneurs (SMEs), and increasing disaster resilience and climate change.

Source: BPS Official Statistics News February 2021, Quarter III Monetary Policy Report 2020 by Bank Indonesia, Indonesian Banking Statistics November 2020

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

TINJAUAN INDUSTRI

Industrial Review

Tinjauan Industri Manufaktur

Indonesia merupakan salah satu negara industri terbesar di dunia, dimana dengan letak geografis diapit dua benua, saat ini Indonesia berhasil masuk dalam 10 besar sebagai negara penghasil nilai tambah terbesar dunia dari sektor Industri dan peringkat ke-4 dari segi persentase kontribusi industri. Sektor Industri di Indonesia menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan hal ini telah menempatkan industri manufaktur sebagai motor sektor riil. Industri yang menjadi andalan Indonesia adalah pengolahan non-migas dengan cabang industri logam dasar, industri makanan dan minuman, industri mesin dan perlengkapan, serta industri alat dan transportasi. Dibutuhkan strategi yang tepat dan konsisten dalam membangun sektor ini sehingga dapat mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun di pasar global.

Pada awal tahun 2020 secara year on year, dilihat dari indikator perekonomian nasional pada kuartal I industri pengolahan nonmigas tumbuh melambat sebesar 2,01%, dan kemudian akibat Covid-19 maka pada kuartal II terkontraksi di minus 5,74%. Adanya pandemi yang berkepanjangan mengakibatkan menurunnya produktivitas, utilisasi industri pengolahan nonmigas berkurang hingga 59%. Rata-rata utilisasi industri berada di bawah 50% untuk beberapa sektor dan subsektor. Pada kuartal III tahun 2020 pertumbuhan sektor industri manufaktur tumbuh sebesar 5,25%.

Walaupun masih di masa pandemi, resiliensi dari sektor industri manufaktur tergolong cukup kuat. Semangat pelaku industri tetap memberikan kontribusi terhadap ekonomi juga tinggi terbukti dengan banyaknya perusahaan perusahaan industri yang mengajukan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) kepada Kementerian Perindustrian.

Mengutip penjabaran Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian pada Triwulan

Review of Manufactur Industry

Indonesia is one of the largest industrialized countries in the world, where geographically flanked by two continents, Indonesia is currently in the top 10 as the world's largest producer of added value from the industrial sector and is ranked 4th in terms of the percentage of industrial contribution. The industrial sector in Indonesia has become the driving force for the national economy and this has positioned the manufacturing industry as the motor for the real sector. The industry that is a mainstay of Indonesia is non-oil and gas processing with branches of the base metal industry, the food and beverage industry, the machinery and equipment industry, as well as the tool and transportation industry. It takes a precise and consistent strategy in building this sector so that it can create a strong and competitive industry both in the domestic market and in the global market.

At the beginning of 2020 on a year on year basis, judging by the indicators of the national economy in the first quarter of the non-oil and gas processing industry, the growth slowed by 2.01%, and then due to Covid-19, in the second quarter it contracted at minus 5.74%. The existence of a prolonged pandemic resulted in a decrease in productivity, the utilization of the non-oil and gas processing industry was reduced by 59%. The industry's average utilization is below 50% for several sectors and sub-sectors. In the third quarter of 2020, the manufacturing industry sector grew by 5.25%.

Although still in the pandemic period, the resilience of the manufacturing industry sector is quite strong. The enthusiasm of industry players to continue to contribute to the economy is also high, as evidenced by the large number of industrial companies applying for the Operational and Mobility Industrial Activities Permit (IOMKI) to the Ministry of Industry.

Quoting the elaboration of the 2015-2019 National Industrial Policy published by the Ministry of Industry in the first quarter of 2017,

I tahun 2017 disampaikan bahwa Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang disusun untuk melaksanakan amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 dan PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 Pasal 3 telah ditentukan sasaran pembangunan industri diantaranya:

1. Meningkatkan laju pertumbuhan industri pengolahan tanpa migas.
2. Meningkatkan peran industri pengolahan tanpa migas dalam perekonomian.
3. Mengurangi ketergantungan impor.
4. Meningkatkan ekspor produk industri.
5. Meningkatkan persebaran dan pemerataan kegiatan industri.
6. Meningkatkan peran industri kecil dan menengah.
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
9. Memperkuat struktur industri.
10. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
11. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional.

Dalam hal mana salah satu sasaran adalah menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam sehingga diharapkan pertumbuhan industri nasional mencapai pertumbuhan 2 digit pada tahun 2035 dan nilai kontribusi dalam Produk Domestik Bruto mencapai 30%. Tidak lepas dari fungsinya sebagai pelaku industri antara dan perannya dalam industri manufaktur, posisi Perseroan dalam industri sejenis cukup mantap dan bersaing.

Tinjauan Bisnis Utama Perusahaan

Dalam kondisi dinamika makro ekonomi global dan nasional, capaian kinerja BBI sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan. Namun demikian perusahaan tetap fokus terhadap penguatan kepercayaan kepada konsumen dan strategi partnership untuk mendapatkan order pada sektor Oil & Gas, Energi, Cement & Mining, Agro dan Construction.

Pada tahun 2020 perseroan memberikan capaian penjualan Rp 241.328 juta dan laba komprehensi tahun berjalan sebesar Rp 75.684 juta. Walaupun demikian Perseroan tetap semangat untuk bangkit dengan memperkuat core bisnis melalui produk-produk

it is stated that the National Industrial Policy (KIN) was formulated to carry out the mandate of Law No. 3 of 2014 concerning Industry Article 12 and PP No. 14 of 2015 concerning the 2015-2035 National Industrial Development Master Plan Article 3 has determined industrial development targets including:

1. Increase the growth rate of the processing industry without oil and gas.
2. Increase the role of the processing industry without oil and gas.
3. Reducing dependence on imports.
4. Increase exports of industrial products.
5. Increase the distribution and distribution of industrial activities.
6. Increasing the role of small and medium industries.
7. Increase innovation and technology utilization.
8. Increase labor absorption.
9. Strengthening industrial structures.
10. Increase the added value of natural resources.
11. Strengthening national economic connectivity.

In which case one of the targets is to strengthen the industrial structure with the growth of upstream and intermediate industries based on natural resources so that it is hoped that the national industrial growth will reach double-digit growth in 2035 and the contribution value in Gross Domestic Product reaches 30%. Regarding its function as intermediate industry player and its role in the manufacturing industry, the Company's position in similar industries is quite solid and competitive.

Main Business Review of the Company

Under conditions of global and national macroeconomic dynamics, BBI's performance in 2020 has decreased. However, the company remains focused on strengthening trust in consumers and partnership strategies to obtain orders in the Oil & Gas, Energy, Cement & Mining, Agro and Construction sectors.

In 2020 the company was able to provide sales of Rp 344 billion and a net profit of Rp 10 billion. The Company has a growing passion to strengthen its core business through Diesel Engine, Gas Engine, Boiler, Gas Compressor, Air Compressor, Pressure Vessel, Heat



unggulan seperti Diesel Engine, Gas Engine, Boiler, Gas Compressor, Air Compressor, Pressure Vessel, Condenser, Heat Exchanger, Dehydration Unit, Column, Tankage System, Material Handling, serta produk-produk Foundry. Selain itu melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui program Transformasi.

Exchanger, Dehydration Unit, Selexols & Sulfur Absorber, Tankage System and Material Handling, as well as making continuous improvements.

TINJAUAN OPERASIONAL

Operational Review

Strategi Perusahaan

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat menantang bagi PT BBI. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berpengaruh negatif terhadap kondisi usaha Perseroan. Adanya pandemi mengakibatkan lockdown di beberapa daerah yang menyebabkan keterlambatan kedatangan material sehingga berpengaruh terhadap terlambatnya proses operasional perusahaan termasuk penyelesaian proyek yang terganggu. Kondisi kondusif perekonomian diperlukan untuk memberikan peluang yang luas dan beragam.

Secara umum, Strategi Perusahaan dalam rangka menghadapi Covid-19 untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan cash flow.
 - a. Prioritas pembayaran kepada vendor untuk mendapatkan uang tunai
 - b. Mengajukan insentif pajak
 - c. Negosiasi ulang untuk vendor agar menyetujui TOP baru
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan kredit di BNI termasuk permintaan untuk mengurangi bunga
 - e. Mengurangi jumlah karyawan kontrak sementara
 - f. Melakukan penagihan piutang
 - g. Menawarkan jadwal proyek yang kompetitif, kualitas, dan harga untuk proyek-proyek baru
- 2) Boost demand dengan cara renegosiasi dengan pemilik untuk kontrak yang ada dengan mata uang IDR sementara pengadaan materialnya dari luar negeri / impor.
- 3) Support key suppliers dengan menjaga komunikasi terbuka dengan supplier
- 4) Secure internal product capacity yaitu mempertahankan keterikatan yang sudah bagus dengan karyawan.
- 5) Optimalisasi Aset Jl KHM Mansyur 229 Surabaya dengan PPA untuk memperbaiki debt to ebitda yaitu utang PPA dan utang bank.

Corporate Strategy

2020 has been a very challenging year for PT BBI. Slowing global economic growth caused by the Covid-19 pandemic which negatively affected the Company's business conditions. The existence of a pandemic resulted in a lockdown in several areas which caused delays in the arrival of materials so that it affected the delay in the company's operational processes, including the completion of disrupted projects. Conducive economic conditions are needed to provide broad and diverse opportunities.

In general, the Company's Strategy in dealing with Covid-19 to achieve the company's goals and objectives in 2020 can be explained as follows:

- 1) Maintain cash flow.
 - a. Priority payments to vendors to get cash
 - b. Applying for tax incentives
 - c. Re-negotiation for vendors to agree on new TOP
 - d. Submitting an application for a credit extension at BNI including a request to reduce interest
 - e. Reducing the number of temporary contract employees
 - f. Collecting accounts receivable
 - g. Offer competitive project schedule, quality and price for new projects
- 2) Boost demand by negotiating with the owner for an existing contract in IDR while procuring materials from abroad/imports.
- 3) Support key suppliers by maintaining open communication with suppliers
- 4) Secure internal product capacity, namely maintaining a good relationship with employees.
- 5) Optimization of Assets on Jl KHM Mansyur 229 Surabaya with PPA to improve debt to debt, namely PPA debt and bank debt.

Perseroan telah melakukan transformasi bidang usaha di tahun 2020 yang memberikan pengaruh pada perluasan lingkup market yang dijadikan sasaran. Transformasi tersebut merumuskan kembali bidang usaha menjadi 3 (tiga) Divisi yang menekankan pada penguasaan mendalam pada masing-masing bidang usaha untuk tujuan penguasaan pangsa pasar yang lebih tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam bab Profile Perusahaan, bidang usaha tersebut meliputi :

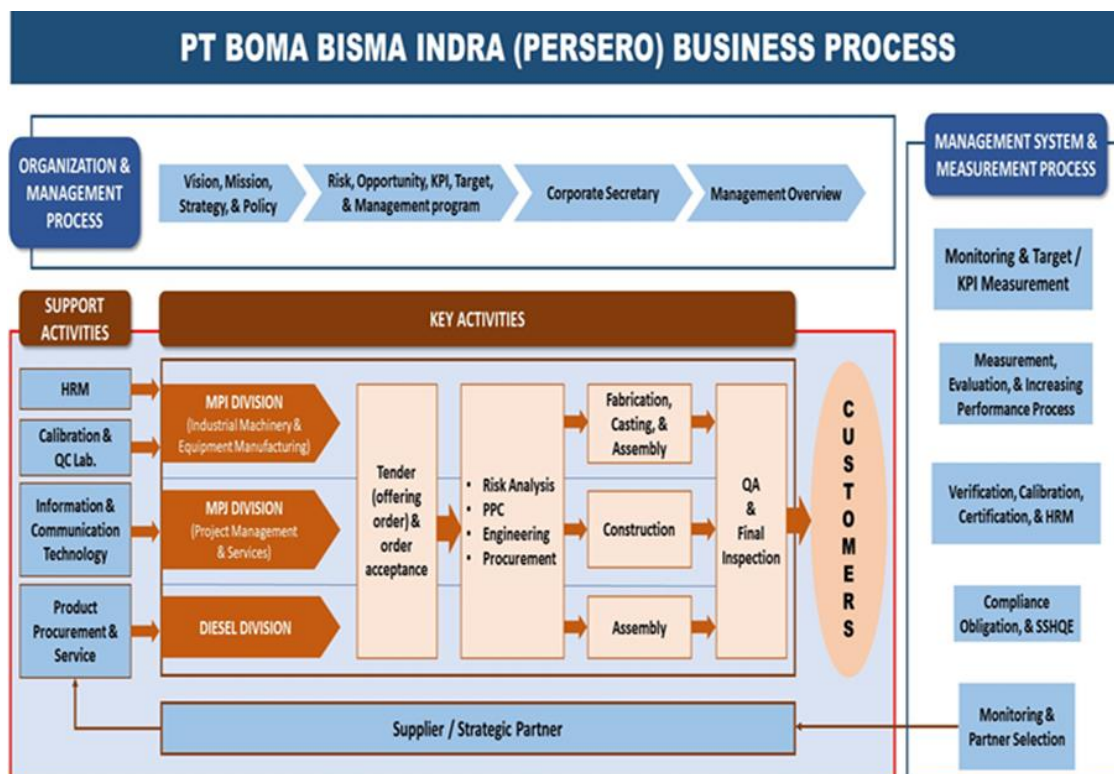
1. Divisi Mesin Peralatan Industri (MPI)
2. Divisi Manajemen Proyek & Jasa (MPJ)
3. Divisi Diesel

Ditinjau dari pengendalian operasional, Perseroan telah memiliki sistem dan prosedur yang harus diterapkan di semua Divisi. Secara mendasar, melalui Biro Sistem Informasi dan Manajemen, telah diformulasikan flow process baru yang mendasari semua kegiatan operasional Perseroan sehingga terdapat standar yang sama dengan tujuan memberikan keyakinan kepada stake holder atas kepastian operasional yang terkontrol dengan baik. Flow Process dimaksud tergambar sebagai berikut:

The Company has transformed the business sector in 2019 which has an impact on expanding the scope of the targeted market. The transformation reformulated the line of business into 3 (three) Divisions which emphasized in-depth mastery of each line of business for the purpose of mastering a higher market share. As explained in the Company Profile chapter, the fields/lines of business include:

1. Industrial Equipment Machinery Division (MPI)
2. Project Management & Services Division (MPJ)
3. Diesel Division

In terms of operational control, the Company has systems & procedures that must be implemented in all Divisions. Basically, through the Information Systems & Management Bureau, a new flow process has been formulated that underlies all of the Company's operational activities so that there are the same standards with the aim of providing confidence to stakeholders in the certainty of a well controlled operation. Flow Process is illustrated as follows:



Flow Process ini telah menjadi standar operasional dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan pembuatan Prosedur Kerja. Perseroan didalam menjalankan bisnis telah mengimplementasikan system manajemen integrasi Mutu, K3L sesuai ISO 9001;2015, ISO 14000:2015 untuk sektor pengamanan lingkungan, dan ISO 45001:2018 untuk sektor pengamanan Safety, Health & Environment. Dan juga mengacu pada standard ASME STAMP (S,U,U2) dan R Stamp untuk pengerjaan produk-produk minyak & gas.

Secara organisasi, Perseroan juga telah memiliki bentuk optimal sebagai acuan koordinasi operasional lintas bagian sehingga flow process yang telah ditentukan bisa terapkan dengan baik. Garis komando yang diturunkan oleh Direksi bisa langsung diaplikasikan secara berjenjang dengan baik. Sebagaimana disajikan dalam bab Profil Perusahaan, tampak bahwa terdapat beberapa Biro yang mendukung dan menyediakan berbagai kebutuhan Divisi yang merupakan ujung tombak dalam pencetakan pendapatan Perseroan.

Dari sisi pencapaian tahun 2020 dalam kaitannya dengan output operasional bisa disampaikan bahwa kontrak dihadapi mencapai Rp 871.001 juta dan mendapat kontrak baru sebesar Rp 660.873 juta. Total Aset sebesar Rp 916.366 juta terdapat pertumbuhan sebesar Rp121.246 juta atau 15,25% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp 795.120 juta.

Aspek Pemasaran

Program kerja Divisi Pemasaran dan Penjualan tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Sinergi antar BUMN
- 2) Sinergi dengan mitra bisnis dengan prioritas bisa membantu pendanaan.
- 3) Mencari Bisnis yang dikuasai dan bernilai tambah tinggi.
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan pihak ke III untuk pencapaian order
- 5) Meningkatkan promosi dengan mengikuti pameran dan media sosial.
- 6) Meningkatkan penetrasi pasar
- 7) Penambahan dan peningkatan tenaga sales dan estimasi untuk menunjang pencapaian order.
- 8) Merencanakan bentuk bisnis baru yang bisa dilaksanakan oleh perusahaan selain bisnis

This flow process has become an operational standard and is subsequently used as a reference for making work procedures. In running the business, the Company has implemented an integrated Quality management system, K3L according to ISO 9001; 2015, ISO 14000: 2015 for the environmental safeguard sector, and ISO 45001: 2018 for the safety, Health & Environment sector. And also refers to the ASME STAMP standard (S, U, U2) and R Stamp for working on oil & gas products.

As an organization, the Company also has an optimal form as a reference for cross-division operational coordination so that the predetermined flow process can be applied properly. The line of command passed down by the Board of Directors can be immediately applied in stages properly. As presented in the Company Profile chapter, it appears that there is a Bureau Division that supports and provides for the various needs of the Division which is the spearhead in the printing of the Company's revenue.

In terms of achievements in 2020 in relation to operational output, it can be said that the contracts faced reached Rp. 871.001 million and got a new contract of Rp. 660,873 million. Total Assets of Rp. 916,366 million, there was a growth of Rp. 121,246 million or 15.25% from the realization in 2019 of Rp. 795,120 million.

Marketing Aspect

The work program of the Marketing and Sales Division in 2020 is as follows:

- 1) Increasing Synergy between SOEs
- 2) Synergy with business partners with priorities can help with funding.
- 3) Looking for a business that is controlled and has high added value.
- 4) Increase cooperation with third parties for order achievement
- 5) Increase promotion by participating in exhibitions and social media.
- 6) Increase market penetration
- 7) Addition and improvement of sales force and estimation to support order achievement.
- 8) Planning new forms of business that can be implemented by the company other than

saat ini yang telah dijalankan.

- 9) Memperbanyak variasi Bidang bisnis, masuk intensif ke bidang maintenance dan instalasi equipment di lapangan.

Pangsa Pasar

Mengawali Rencana Jangka Panjang 2020-2024, filosofi bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan semakin menipis suatu saat, namun demikian bagi BBI, kondisi tersebut justru menyediakan peluang guna memenuhi kebutuhan komponen industri yang terus menerus tersedia baik yang menggunakan energi fosil maupun non fosil. hal ini akan terus menciptakan sumber pendapatan yang berkesinambungan bagi Perusahaan dan diimplementasikan kedalam dua kelompok bisnis yaitu:

1. Heavy Industry
2. Diesel

Pada tahun 2020, Perusahaan telah mengembangkan penguasaan pasar atas produk-produk yang dihasilkan. Potensi pasar Heavy Industry bagi BBI masih cukup besar. Pada tahun 2020 nilai kontrak yang dapat dikerjakan mencapai Rp 660.873 juta dan diperkirakan pada tahun 2024 akan tumbuh lebih dari 100%, sedangkan potensi pasar bagi Diesel - BBI masih cukup besar juga. Pada tahun 2019 memiliki nilai market share sebesar 1% dari pangsa pasar yang ada, sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu menjadi 20% dari pangsa pasar. Untuk dapat mewujudkan target market share pada tahun 2024 tentu harus melalui beberapa strategi seperti penguatan sales network and after sales services, pengembangan SDM yang kompeten, analisis risiko yang jelas dan terukur, serta pengembangan kualitas dari produk Diesel.

the current business that has been run.

- 9) Expanding the variety of business fields, entering intensively into the field of maintenance and equipment installation in the field.

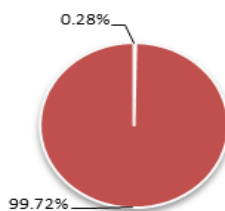
Market share

Starting the 2020-2024 Long Term Plan, the philosophy that non-renewable natural resources will be depleted one day, however, for BBI, this condition actually provides an opportunity to meet the needs of industrial components that are continuously available, both those that use fossil and non-fossil energy. . This will continue to create a sustainable source of income for the Company and is implemented into two business groups, namely:

1. Heavy Industry
2. Diesel

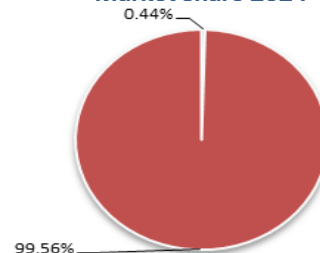
In 2020, the Company has developed a market share for the products it produces. Heavy Industry market potential for BBI is still quite large. In 2019 the contract value that can be worked on is Rp 660,873 million and it is estimated that in 2024 it will grow more than 100%, while the market potential for Diesel - BBI is still quite large. In 2019 it has a market share value of 1% of the existing market share, while in 2024 it is expected to experience a fairly high increase, namely to 20% of the market share. To be able to realize the target market share in 2024, of course, one must go through several strategies such as strengthening sales network and after sales services, developing competent human resources, clear and measurable risk analysis, and developing the quality of Diesel products.

Market share 2020



Tahun 2020
Market Size : 485 Tn
BBI : 1,349 Tn

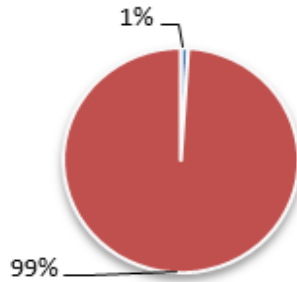
Market share 2024



Tahun 2024
Market Size : 691 Tn
BBI : 3,045 Tn

Pangsa Pasar Heavy Industry 2020 & 2024 | Market Share of Heavy Industry 2020 & 2024

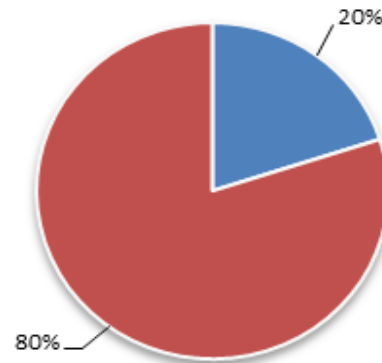
Market share 2020



Tahun 2020

Market Size = 48.169 Unit
BBI = 481 Unit

Market share 2024



Tahun 2024

Market Size = 63.624 Unit
BBI = 12.724 Unit

Pangsa Pasar Diesel 2020 & 2024 | Market Share of Diesel 2019 & 2024

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

TINJAUAN PER SEGMENT USAHA

Business Segment Overview

DASAR PENETAPAN SEGMENT USAHA

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Entitas :

- 1) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- 2) Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- 3) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan mengklasifikasikan segmen operasi meliputi:

- 1) Induk Usaha
- 2) Anak Usaha

TINJAUAN OPERASI INDUK USAHA

Pada tahun 2016-2020 Perusahaan mendapatkan dan menyelesaikan order/proyek strategis antara lain:

- Export to Argentina Condenser 365 ton 1 complete set, Mitshubishi Corporation
- Condenser Jawa 2 and muara karang CAPP project, Mitshubishi Corporation
- CA21 - Surface Condenser 10PC 1 Lot, General Electric
- Hight Pressure Hitter (HPH) PJB Paiton
- Pengadaan Tower Jambaran Tiung Biru (JTB), Absorber, Selexol Regenerator
- Eco Hopper & Buckstay Central Jawa-2 Power Plant, Sumitomo Corporation
- Tanki paket 4 PLTMG
- Pembangunan Workshop Machining Center,

BASIC BUSINESS SEGMENT DETERMINATION

Operating segments are identified based on internal reports regarding components of the Group which are regularly reviewed by the “operational decision maker” in order to allocate resources and assess the performance of operating segments.

An operating segment is a component of the Entity:

- 1) Engaged in business activities from which it earns revenues and incurs expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- 2) whose operating results are regularly reviewed by the chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- 3) Separate financial information is available.

In this regard, the Company classifies operating segments including:

- 1) Holding Company
- 2) Subsidiary

OVERVIEW OF MAIN BUSINESS OPERATIONS

In 2016-2020 the Company obtained and completed strategic orders/projects, including:

- Export to Argentina Condenser 365 tons 1 complete set, Mitsubishi Corporation
- Condenser Jawa 2 and Muara Karang CAPP project, Mitsubishi Corporation
- CA21 - Surface Condenser 10PC 1 Lot, General Electric
- Hight Pressure Hitter (HPH) PJB Paiton
- Procurement of Jambaran Tiung Biru (JTB) Tower, Absorber, Selexol Regenerator
- Eco Hopper & Buckstay Central Jawa-2 Power Plant, Sumitomo Corporation
- Tank package 4 PLTMG
- Construction of Machining Center Workshop, PT Barata Indonesia

- PT Barata Indonesia
- EPC Sistem Penerimaan Batubara Dermaga Kertapati, PT Bukit Asam
- Depot Fuel Bandara Oecusse, Timor Leste
- Boiler & Tanki Pabrik Minyak Goreng Sei Mangke
- Tangki fire fighting 3000 KL, PJB Indramayu
- Fabrikasi Arc Box Jembatan Holtekam Papua
- Fabrikasi Arc Box Jembatan Kalikuto Semarang
- Fabrikasi Arc Box Jembatan Tejawangi Pandaan
- Steel Pipe Pile EPC – Relokasi Flare BPP-II RDMP R-V Project Balikpapan
- Separator dan Scrubber, Peerless Asia Pacific Pte. Ltd
- Pressure Vessel untuk Elution Kedua, PT Bumi Suksesindo
- Pengadaan OEM HP Heater, Unit 1 PLTU Asam Asam, PT PLN
- Reshelling Perforated, PT Pemukasakti Manis Indah
- Pressure Vessel, PT Enviromate Technology International
- Condenser, PT Allied Process Technologies Indonesia
- Pengadaan GEG dan DEG Pembangunan Fasilitas Produksi Lapangan Akasia Bagus Development Project, PT Pertamina EP
- Jasa Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Pembangunan Infrastruktur Pascapanen Rice To Rice (RTR) LOT 1 dan LOT 2 – Perum Bulog
- Pekerjaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Pembangunan Infrastruktur Pascapanen Modern Rice Milling Plant (MRMP) untuk lokasi Jember, Banyuwangi, Sumbawa, Bojonegoro, dan Magetan – Perum Bulog
- Storage Tank TSL Ausmelt Kap. 40.000 Ton Crude Tin – PT Wika
- Penyedia Barang / Jasa Reshelling Roll Gilingan PG Kolektif 1 – PTPN XI
- Pressure Vessel : Preflash Column dan Preflash Condenser Dram for EPC RDMP RU VI BALONGAN PHASE-1 : CDU Light Distillate Section Upgrading Project – PT Rekayasa Industri

Realisasi penjualan tahun 2020 berdasarkan lini bisnis adalah sebagai berikut:

- 1) Divisi Mesin Peralatan Industri Rp 143M
- 2) Divisi Manajemen Proyek & Jasa sebesar Rp 115M
- 3) Divisi Diesel sebesar Rp 14M

- Kertapati Pier Coal Reception System EPC, PT Bukit Asam
- Depot Fuel Oecusse Airport, Timor Leste
- Boiler & Tank of Sei Mangke Cooking Oil Factory
- 3000 KL fire fighting tank, PJB Indramayu
- Papua Holtekam Bridge Arc Box Fabrication
- Fabrication of the Kalikuto Bridge Arc Box Semarang
- Fabrication of the Pandaan Tejawangi Bridge Arc Box
- Steel Pipe Pile EPC – Relocation of Flares BPP-II RDMP R-V Project Balikpapan
- Separators and Scrubber, Peerless Asia Pacific Pte. Ltd
- Pressure Vessel for Second Elution, PT Bumi Suksesindo
- Procurement of OEM HP Heater, Unit 1 PLTU Asam Asam, PT PLN
- Reshelling Perforated, PT Pemukasakti Manis Indah
- Pressure Vessel, PT Enviromate Technology International
- Condenser, PT Allied Process Technologies Indonesia
- Procurement of GEG and DEG Production Facility Development of Acacia Bagus Field Development Project, PT Pertamina EP
- Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Services for Rice To Rice (RTR) Postharvest Infrastructure Development LOT 1 and LOT 2 – Perum Bulog
- Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Infrastruktur Development for Post-harvest Modern Rice Milling Plant (MRMP) for the locations of Jember, Banyuwangi, Sumbawa, Bojonegoro, and Magetan – Perum Bulog
- Storage Tank TSL Ausmelt Kap. 40,000 Tons of Crude Tin – PT Wika
- PG Collective 1 Reshelling Roll Milling Service Provider – PTPN XI
- Pressure Vessel : Preflash Column and Preflash Condenser Dram for EPC RDMP RU VI BALONGAN PHASE-1 : CDU Light Distillate Section Upgrading Project – PT Rekayasa Industri

Sales realization in 2020 based on business lines are as follows:

- 1) Industrial Equipment Machinery Division Rp 143M
- 2) Project Management & Services Division of IDR 115M
- 3) Diesel Division Rp. 14M

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

KINERJA SEGMENT INDUK USAHA

Kondisi ekonomi yang menantang di tahun 2020 akibat pandemic memberikan dampak yang cukup besar terhadap kinerja Induk usaha Boma Bisma Indra sendiri. Namun Kontrak baru yang berhasil dibukukan tahun 2020 cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp223.253 miliar di tahun 2019 menjadi Rp583.191 miliar. Demikian juga halnya dengan Kontrak Dihadapi mengalami peningkatan 104,07% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp773.319 miliar dari Rp378.950 miliar di tahun 2019.

PARENT BUSINESS SEGMENT PERFORMANCE

Challenging economic conditions in 2020 due to the pandemic had a considerable impact on the performance of the parent company Boma Bisma Indra itself. However, the new contracts that were successfully booked in 2020 were quite large compared to the previous year, from Rp223,253 billion in 2019 to Rp583,191 billion. Likewise, Contracts Faced experienced an increase of 104.07% compared to the previous year, which was to Rp773,319 billion from Rp378,950 billion in 2019.

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Kontrak Baru New Contract	583.191	223.253	359.938	161,22
Kontrak Dihadapi Order Book	773.319	378.950	394.369	104,07

Posisi Keuangan Segmen Induk Usaha

Financial Position of Parent Business Segment

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Aset Assett	840.873	745.941	94.932	12,73
Liabilitas Liability	747.402	664.205	83.197	12,53
Ekuitas Equity	93.471	81.785	11.686	14,29

Aset PT Boma Bisma Indra Induk tahun 2020 mencapai Rp 840.873 juta meningkat 12,73% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 745.941 juta. Jumlah liabilitas tahun 2020 mencapai sebesar Rp 747.402 juta meningkat sebesar 12,53% dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp 664.205 juta. Ekuitas tahun 2020 mencapai sebesar Rp 93.471 juta meningkat sebesar 14,29% dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp 81.785 juta.

The assets of PT Boma Bisma Indra Induk in 2020 reached IDR 840,873 million, an increase of 12.73% from the previous year which reached IDR 745,941 million. Total liabilities in 2020 reached Rp 747,402 million, an increase of 12.53% from the previous year which reached Rp 664,205 million. Equity in 2020 reached Rp. 93,471 million, an increase of 14.29% from the previous year which reached Rp. 81,785 million.

Profitabilitas Segmen Induk Usaha

Profitability of Parent Business Segment

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Penjualan Sales	163.646	194.700	(31,054)	(15,95)
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(156,825)	(220.557)	(63,733)	(28,90)
Laba (Rugi) Bruto Gross Profit (Loss)	6.821	(25.857)	32.679	(126,38)
Beban Usaha General Expenses	(68.543)	(32.211)	36.332	112,79
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Revenue (Expenses)	(3.927)	6.180	(10.107)	(163,54)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan Profit (Loss) Before Tax	(65.649)	(51.888)	(13.760)	(26,52)
Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(7.069)	5.550	(12.619)	(227,37)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(72.718)	(46.338)	(26.379)	(56,93)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan-Setelah Pajak Total Other Comprehensive Income For The Year – Net of Tax	119.098	(2.722)	121.820	4475,39
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Income (Loss)	46.381	(49.061)	95.441	194,39
Jumlah Aset Total Assets	840.873	745.941	94.932	12,73

Profitabilitas Segmen Induk Usaha mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan menurunnya perolehan Penjualan ditahun 2020 sebesar Rp163.646 juta atau menurun 15,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp194.700 juta. Beban Pokok Penjualan juga menurun 28,9% dari tahun 2019. Selain itu, Beban usaha dan Pendapatan (Beban) Lain-lain juga mengalami penurunan. Situasi Pandemi memaksa kita untuk bertahan dengan kondisi yang ada. Namun dengan dilakukan aksi korporasi Revaluasi Aset Tetap maka di tahun 2020 membukukan Laba Komprehensif Induk Usaha sebesar Rp46.381 juta atau meningkat 194,39% dibandingkan tahun sebelumnya rugi sebesar Rp49.061 juta.

SEGMENTASI ANAK USAHA

Untuk terus berkembang dan meningkatkan nilai Perseroan, BBI terus memperkuat sinergi dan membangun kemitraan dengan entitas anak guna mendukung bisnis perseroan dan mendorong peningkatan nilai tambah bagi kedua belah pihak

Perseroan hanya memiliki satu Entitas Anak yaitu PT Bromo Steel Indonesia (PT BOSTO), sesuai dengan Anggaran Dasar No. 13, tanggal 15 Mei 2018 bergerak dibidang Industri dan perbengkelan dengan kegiatan usaha :

- Merencanakan, mekonstruir, menggambar, membuat, menyerahkan, dan memasang ondersil, alat-alat, instalasi-instalasi dan

The profitability of the Parent Business Segment has decreased. This is in line with the decline in Sales in 2020 by Rp. 163,646 million or a decrease of 15.95% compared to the previous year of Rp. 194,700 million. Cost of Goods Sold also decreased by 28.9% from 2019. In addition, Operating Expenses and Other Income (Expenses) also decreased. The pandemic situation forces us to survive with the existing conditions. However, with the Fixed Asset Revaluation corporate action, in 2020, the Parent Company's Comprehensive Profit was recorded at Rp.46,381 million, an increase of 194.39% compared to the previous year's loss of Rp.49,061 million.

SEGMENTATION OF SUBSIDIARIES

To continue to grow and increase the value of the Company, BBI continues to strengthen synergies and build partnerships with subsidiaries to support the company's business and encourage increased added value for both parties.

The Company only has one subsidiary, namely PT Bromo Steel Indonesia (PT BOSTO), in accordance with Articles of Association No. 13, dated May 15, 2018 engaged in Industry and workshop with business activities:

- Planning, contracting, drawing, manufacturing, submitting, and installing metal parts, tools, installations and

pabrik-pabrik lengkap untuk industri gula dan industri-industri lain.

- ii. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk pergudangan, property, penampungan dan penyaluran bahan bakar, pendidikan dan pelatihan.

complete factories for the sugar industry and other industries.

- ii. Optimizing the utilization of resources owned by the Company for warehousing, property, storage and distribution of fuel, education and training.

Kontrak baru yang dibukukan tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp71.804 juta di tahun 2019 menjadi Rp 77.628 juta di tahun 2020. Demikian juga halnya dengan Kontrak Dihadapi yang mengalami kenaikan 6,4% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp97.682 miliar dari Rp91.804 miliar di tahun 2019.

New contracts booked in 2020 increased compared to the previous year, from Rp. 71,804 billion in 2019 to Rp. 75,493 billion in 2020. Likewise with Contracts Facing which increased 6.4% compared to the previous year, which was Rp. 97 .682 billion from Rp91,804 billion in 2019.

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Kontrak Baru New Contract	77.628	71.804	5.878	8,19
Kontrak Dihadapi Order Book	91.804	91.804	5.878	6,40

Posisi Keuangan Segmen Entitas Anak

Subsidiary Segment Financial Position

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Aset Asset	75.493	49.179	26.314	53,51
Liabilitas Liability	44.104	43.227	877	2.03
Ekuitas Equity	31.389	5.952	25.437	427.37

Aset PT Bromo Steel Indonesia tahun 2020 mencapai Rp 75.493 juta meningkat 53,51% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 49.179 juta.

The assets of PT Bromo Steel Indonesia in 2020 reached IDR 75,493 million, an increase of 53.51% from the previous year which reached IDR 49,179 million.

Jumlah liabilitas PT Bosto tahun 2020 mencapai sebesar Rp 44,104 juta atau meningkat 2,03% dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp 43,227 juta.

Total liabilities of PT Bosto in 2020 reached Rp. 44,104 million, an increase of 2.03% from the previous year which reached Rp. 43,227 million.

Ekuitas PT Bosto tahun 2020 mencapai sebesar Rp 31.389 juta meningkat sebesar 427,37% dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp 5,952 juta.

PT Bosto's equity in 2020 reached Rp. 31,389 million, an increase of 427.37% from the previous year which reached Rp. 5,952 million.

Profitabilitas Segmen Entitas Anak

Profitability of Parent Business Segment

(dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah)

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Penjualan Sales	77.682	71.804	5.878	8,19
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(70.050)	(62.777)	7.273	11,59
Laba Bruto Gross Profit	7.632	9.027	(1.395)	(15,45)
Beban Usaha General Expenses	(4.845)	(4.415)	430	9,74
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Revenue (Expenses)	(2.955)	(814)	2.141	263,02
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan Profit (Loss) Before Tax	(168)	3.798	(3.966)	(104,42)
Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(573)	(560)	(13)	(2,32)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(741)	3.238	(3.979)	(122,88)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan-Setelah Pajak Total Other Comprehensive Income For The Year – Net of Tax	30.045	(251)	30.296	12.070,12
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Income (Loss)	29.304	2.988	26.317	880,89
Jumlah Aset Total Assets	75.493	49.179	26.314	53,51

Tinjauan terhadap kinerja pendapatan usaha, harga pokok penjualan, beban usaha dan laba (rugi) setelah Pajak dari segmen entitas anak sebagai berikut :

Hasil penjualan entitas anak meningkat dari tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp 71.804 juta menjadi sebesar Rp 77,682 juta atau naik 8,19%

Harga Pokok Penjualan (HPP) entitas anak tahun 2020 tercatat sebesar Rp 70,050 atau naik 11.59% dari HPP tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp 62,777 juta.

Beban Usaha entitas anak tahun 2020 tercatat sebesar Rp 4.845 atau naik 9.74% dari beban usaha tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp 4.415 juta.

Dalam tahun 2020 mengalami rugi bersih Rp741 juta dari sebelumnya laba sebesar Rp3.238 juta di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3,979 juta atau 122,88% ditahun 2019. Namun dengan dilakukan aksi korporasi Revaluasi Aset Tetap maka di tahun 2020 membukukan Laba Komprehensif Anak Usaha sebesar Rp29.304 juta atau meningkat 880,89% dibandingkan tahun sebelumnya laba sebesar Rp2.988 juta.

An overview of the performance of operating revenues, cost of goods sold, operating expenses and profit (loss) after tax from the subsidiary segments as follows:

The proceeds from the sale of subsidiaries increased from 2019 which was recorded at Rp. 71,804 million to Rp. 77.682 million, an increase of 8.19%

Cost of Goods Sold (HPP) of subsidiaries in 2020 was recorded at Rp. 70.050, an increase of 11.59% from COGS in 2019 which was recorded at Rp. 62.777 million.

Operating expenses of subsidiaries in 2020 was recorded at Rp 4,845, an increase of 9.74% from operating expenses in 2019 which was recorded at Rp 4,415 million.

In 2020, it experienced a net loss of Rp. 741 million from the previous profit of Rp. 3,238 million in 2019 which decreased by Rp. 3,238 million or 53.51% in 2019. However, with the corporate action of Revaluation of Fixed Assets, in 2020, the Subsidiaries' Comprehensive Profit of Rp. Rp29,304 million or an increase of 880.89% compared to the previous year's profit of Rp2,988 million.

TINJAUAN PROFITABILITAS KONSOLIDASIAN

Peningkatan kinerja Perseroan merupakan tujuan utama Perseroan yang ingin dicapai. Salah satu elemen penting dalam peningkatan kinerja Perseroan tersebut adalah perolehan laba bersih yang terus meningkat guna menjamin keberlanjutan usaha bisnisnya dengan berlandaskan pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan peraturan perundangan lainnya.

Di tahun 2020, profitabilitas Perseroan secara konsolidasian mencatat Laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp75.685 juta, naik 264.27% dari rugi Rp 46.073 juta di tahun 2019. Profitabilitas Perseroan tersebut termasuk berasal dari entitas anak dengan rincian sebagai berikut:

CONSOLIDATED OVERVIEW

Improving the Company's performance is the main goal of the Company to be achieved. One of the important elements in improving the Company's performance is the net profit that continues to increase in order to ensure the sustainability of its business operations based on the principles of Good Corporate Governance and other laws and regulations.

In 2020, the Company's profitability consolidatedly recorded a comprehensive profit for the year of Rp.75,685 million, an increase of 264.27% from a loss of Rp. 46,073 million in 2019. The Company's profitability includes those from subsidiaries with the following details:

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
PT Boma Bisma Indra (Persero)	46.381	(49.338)	95.441	194,54
PT Bromo Steel Indonesia	29.304	3.798	26.317	880,89
Total	75.685	(46.073)	121.758	264,27

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

ANALISA KINERJA KEUANGAN

Di dalam ulasan mengenai kinerja keuangan ini, penyusunan didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Boma Bisma Indra (Persero) dan entitas anaknya, yang disajikan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Boma Bisma Indra (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dapat disimpulkan, kinerja keuangan Perseroan di tahun 2020 secara umum sangat tertekan dengan situasi dan kondisi Pandemi. Perseroan berupaya untuk bertahan dengan menjalankan berbagai strategi agar perusahaan tetap berjalan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Aset Perseroan

Aset Perseroan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga 31 Desember 2020, total aset Perseroan tumbuh mencapai Rp916.366 juta, mengalami kenaikan sebesar 15,25% dari tahun sebelumnya Rp795.120 juta. Kondisi tersebut disebabkan oleh bertambahnya aset tidak lancar sebesar Rp 152.438 juta atau 38,32% dan turunya aset lancar sebesar Rp 31.191 juta atau 7.85% dari tahun sebelumnya.

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

In this review of financial performance, the preparation is based on the Consolidated Financial Statements of PT Boma Bisma Indra (Persero) and its subsidiaries, which are presented in accordance with generally accepted financial accounting principles in Indonesia (PSAK) for the year ended December 31, 2020 and 2019.

The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan and obtained a fair opinion in all material respects, the consolidated financial position of PT Boma Bisma Indra (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2020, as well as the financial performance and their consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The achievement of the Company's assets in 2020 exceeded 2.78% above the target set in the 2019 RKAP of IDR 861,748 million. The composition of current assets to total assets of the Company is 52.78% and non-current assets are 47.22% of the total assets of the Company.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Company Assets

The Company's assets always increase from year to year. As of December 31, 2020. The Company's total assets grew to Rp. 916,366 million, an increase of 15.25% from the previous year of Rp. 795,120 million. This condition was caused by an increase in non-current assets of Rp. 152,438 million or 38.32% and a decrease in current assets of Rp. 31,191 million or 7.85% from the previous year.

Berikut ini rincian capaian aset Perseroan tahun 2019 dan 2020.

The following are the details of the Company's asset achievements in 2019 and 2020.

Tabel Aset Perusahaan

Table of Company Assets

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

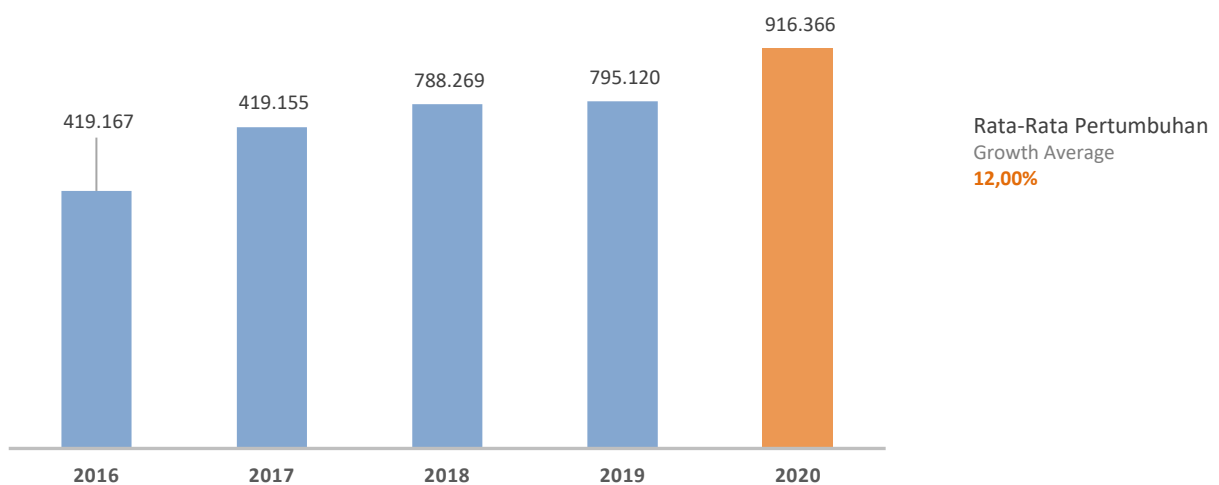
Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Aset Lancar Current Assets	366.124	397.315	(31.191)	(7,85)
Aset Tidak Lancar Non Current Assets	550.243	397.805	152.438	38,32
Jumlah Aset Total Assets	916.366	795.120	121.246	15,25

Aset Perseroan selama periode lima tahun terakhir (2016 – 2020) secara berkelanjutan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 12%. Dalam periode tersebut pertumbuhan tertinggi capaian aset Perseroan terdapat di tahun 2017 yakni mencapai 24,78% dan pertumbuhan yang terendah terdapat di tahun 2019 sebesar 0,87% sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini:

The Company's assets during the last five years (2016 – 2020) have continuously increased with an average asset growth of 12%. In that period, the highest growth in the Company's asset achievements was in 2017 which reached 24.78% and the lowest growth was in 2019 at 0.87% as illustrated in the diagram below:

Grafik Aset Perusahaan

Company Assets' Chart



Aset Lancar

Realisasi aset lancar hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp 366.124 juta dan merupakan 40% dari jumlah keseluruhan aset Perseroan. Dibandingkan dengan realisasi jumlah aset lancar tahun sebelumnya sebesar Rp 366.124 juta turun sebesar 8% atau setara dengan Rp 31.190 juta. Dalam tahun 2020 komposisi terbesar aset lancar adalah Persediaan sebesar 31%. diikuti Tagihan Bruto dari

Current Assets

Realization of current assets by the end of 2019 reached IDR 467,462 million or 18.88% above the RKAP target of IDR 366,124 million and represents 52.78% of the total assets of the Company. Compared to the realization of total current assets in the previous year amounting to Rp 415,712 million, an increase of 12.45% or equivalent to Rp 51,750 million. In 2018, the largest composition of current assets was other

pemberi kerja sebesar 22% dan uang muka dan beban dibayar dimuka sebesar 16% dari jumlah keseluruhan aset lancar.

receivables amounting to 54.06%. followed by trade receivables amounting to 22.92% and advances and prepaid expenses of 15.80% of the total current assets.

Rincian capaian Aset Lancar Perseroan tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

The details of the Company's Current Assets achievements in 2019 and 2020 are as follows:

Tabel Aset Lancar

Table of Current Assets

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

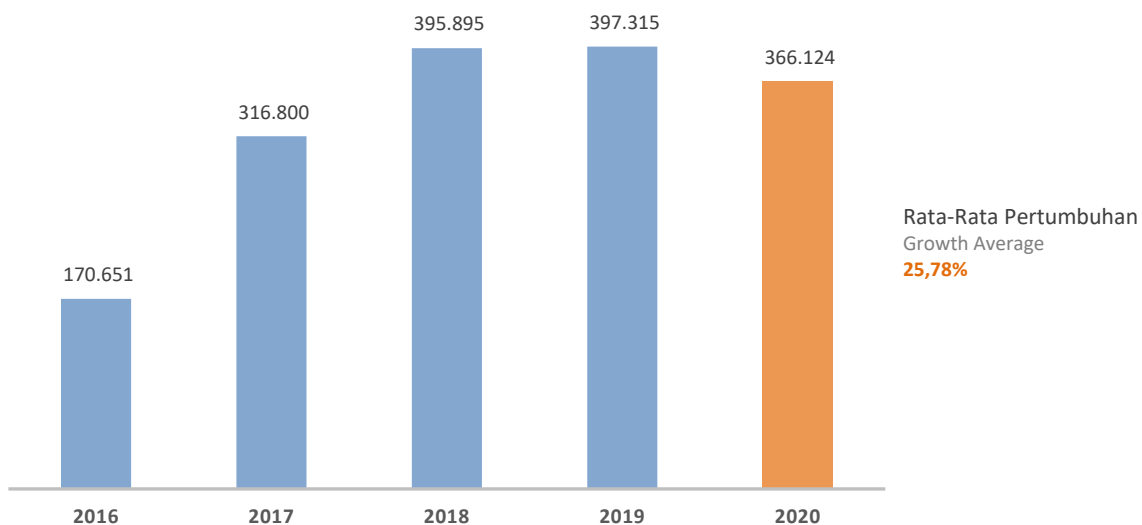
Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	41.893	15.166	26.727	176
Piutang Usaha Accounts Receivable	33.519	118.369	(84.850)	(72)
Tagihan Bruto dari pemberi kerja Gross Amount Due from Customers	78.742	73.032	5.710	8
Piutang Lain-lain Other Receivables	53	53	-	-
Persediaan Stock	112.387	61.941	50.446	81
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka Prepaid Advances and Expenses	57.216	59.214	(1.998)	(3)
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	42.314	69.539	(27.225)	(39)
Aset Lancar Lainnya Other Currents Assets	-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	366.124	397.315	(31.190)	(8)

Dalam periode lima tahun terakhir jumlah aset lancar tumbuh rata-rata sebesar 25,78%. Aset lancar dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada 2017 yang mencapai 85,64% dan pertumbuhan aset lancar terendah terdapat pada 2020 mencapai sebesar negatif 7,85%. Perkembangan aset lancar selama lima tahun sebagaimana digambarkan dalam diagram sbb:

In the last five years, total current assets grew by an average of 31.42%. Current assets with the highest growth were in 2017 which reached 85.64% and the lowest growth in current assets was in 2018 which reached negative 3.65%. The development of current assets for five years is illustrated in the following diagram:

Grafik Aset Lancar

Current Assets' Chart



Piutang Usaha

Piutang usaha Perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp33.519 juta, mengalami penurunan 72% dari posisi di tahun 2019 sebesar Rp118.3 juta. Persediaan naik signifikan 81% dari Rp 61.941 juta pada tahun 2019 menjadi Rp112.387 juta pada tahun 2020.

Kas dan Setara Kas

Posisi kas dan setara kas pada akhir tahun 2020 adalah Rp41.893 juta atau naik 176,23% dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp 15.166 juta.

Aset Tidak Lancar

Realisasi aset tidak lancar hingga tahun 2020 mencapai Rp550.243 juta. Dibandingkan dengan realisasi jumlah aset tidak lancar tahun sebelumnya sebesar Rp397.805 juta meningkat 38,32% atau setara dengan Rp 152.438 juta. Komposisi terbesar aset tidak lancar ada pada aset tetap yaitu sebesar 83,11% dan selebihnya sebesar 16,89% merupakan kontribusi dari aset tak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset tidak lancar lainnya. Rincian capaian Aset Tidak Lancar Perseroan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel Aset Tidak Lancar

Table of Non-Current Assets

Uraian Description	2020	2019	dalam Jutaan Rupiah in Million Rupiah	
			Pertumbuhan Nominal	Growth %
Kas yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash	2.256	2.337	(81)	(3,47)
Properti Investasi Investment Properties	65.523	48.679	16.844	34,60
Aset Tetap Fixed Assets	457.284	326.041	131.243	40,25
Aset Hak-Guna Right-of-use Assets	1.430	-	1.430	100,00
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	-	654	419.155	(100,00)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax	14.953	11.270	735.955	32,68
Aset Tidak Lancar Lainnya Stock	8.798	8.825	(27)	(0,31)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Current Assets	550.243	397.805	152.438	38,32

Aset tidak lancar selama periode lima tahun terakhir terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,73%. Pertumbuhan aset tidak lancar tertinggi terdapat di tahun 2020 yang mencapai 38,32% dan pertumbuhan

Accounts Receivable

The Company's trade receivables in 2020 were recorded at Rp33,519 million, a decrease of 72% from the position in 2019 of Rp118.3 million. Inventories increased significantly by 81% from IDR 61,941 million in 2019 to IDR 112,387 million in 2020.

Cash and Cash Equivalents

The position of cash and cash equivalents at the end of 2020 was Rp. 41,893 million, an increase of 176.23% compared to the previous year's position of Rp. 15,166 million.

Non-Current Assets

Realization of non-current assets until 2020 reached Rp550,243 million. Compared to the realization of non-current assets in the previous year of Rp. 397,805 million, an increase of 38.32% or equivalent to Rp. 152,438 million. The largest composition of non-current assets is fixed assets at 83.11% and the remaining 16.89% is a contribution from intangible assets, deferred tax assets and other non-current assets. The details of the Company's Non-Current Assets achievements in 2020 and 2019 are as follows:

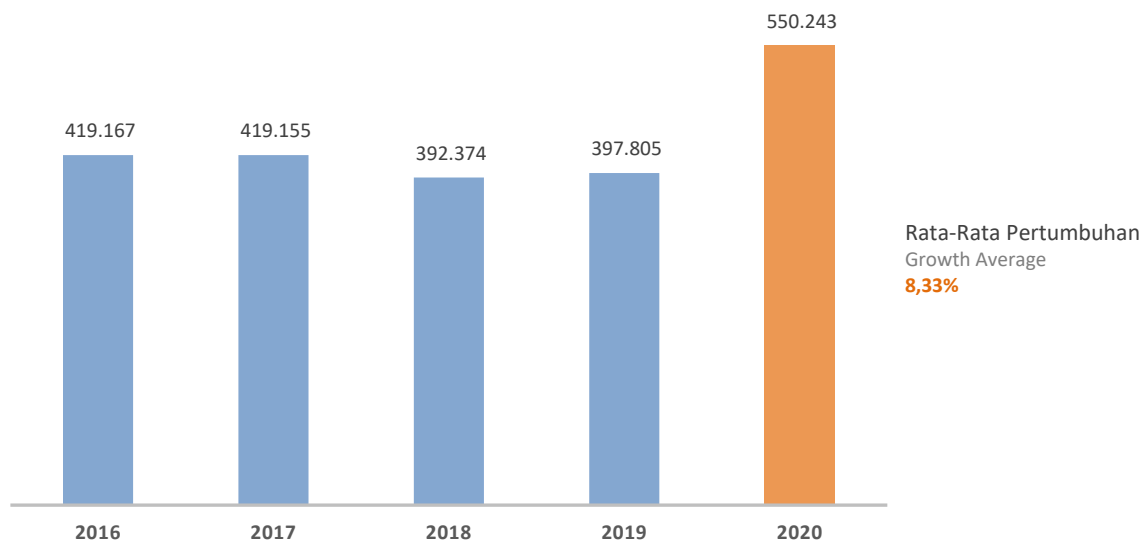
In the last five years, total current assets grew by an average of 31.42%. Current assets with the highest growth were in 2017 which reached 85.64% and the lowest growth in current assets was in 2018 which reached

terendah terdapat di tahun 2018 karena menurun sebesar 6,39% sebagaimana digambarkan dalam diagram dibawah ini:

negative 3.65%. The development of current assets for five years is illustrated in the following diagram:

Grafik Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets' Chart



Liabilitas

Hingga akhir Desember tahun 2020, posisi liabilitas Perseroan yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang mencapai Rp791.506 juta. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp707.432 juta mengalami peningkatan sebesar 11,88% atau setara dengan Rp84.074 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya liabilitas jangka pendek sebesar 17,82% atau sama dengan Rp92.830 juta dan menurunnya liabilitas jangka panjang sebesar 4,69% atau sama dengan Rp8.756 juta.

Komposisi Liabilitas jangka pendek terhadap total liabilitas Perseroan adalah sebesar 77,53% dan liabilitas jangka panjang sebesar 22,47% dari total liabilitas Perseroan.

Rincian capaian Liabilitas Perseroan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Non-Current Asset

Until the end of December 2020, the position of the Company's liabilities which consisted of short-term liabilities and long-term liabilities reached Rp791,506 million. Compared to the previous year of Rp707,432 million, an increase of 11.88% or equivalent to Rp84,074 million. This increase was mainly due to an increase in current liabilities by 17.82% or equal to Rp92,830 million and a decrease in long-term liabilities by 4.69% or equal to Rp8,756 million.

The composition of short-term liabilities to the Company's total liabilities is 77.53% and long-term liabilities are 22.47% of the Company's total liabilities.

The details of the achievement of the Company's Liabilities in 2020 and 2019 are as follows:

Tabel Liabilitas Perusahaan

Table of Company Liabilities

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

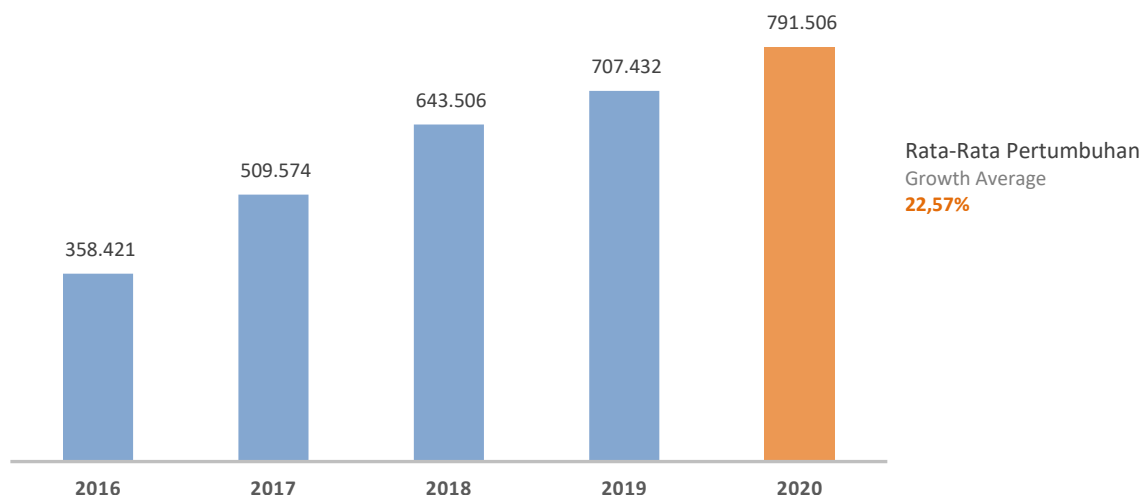
Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities	613.619	520.789	92.830	17,82
Liabilitas Jangka Panjang Long-term liabilities	177.887	186.643	(8.756)	(4,69)
Jumlah Liabilitas Total liabilities	791.506	707.432	84.074	11,88

Liabilitas Perseroan selama periode lima tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 22,57% dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2017 sebesar 42,17%, sebagaimana digambarkan dalam diagram dibawah ini:

The Company's liabilities during the last five years grew by an average of 22.57% with the highest growth in 2017 of 42.17%, as illustrated in the diagram below:

Grafik Liabilitas Perusahaan

Graph of Company Liabilities



Liabilitas Jangka Pendek

Perseroan telah mencatatkan realisasi liabilitas jangka pendek tahun 2020 sebesar Rp613.619 juta, meningkat sebesar Rp 92.832 juta atau 17,83% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 520.789 juta.

Rincian capaian liabilitas jangka pendek tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Short-term Liabilities

The Company has recorded the realization of short-term liabilities in 2020 of Rp. 613,619 million, an increase of Rp. 92,832 million or 17.83% compared to the previous year of Rp. 520,789 million.

The details of the achievement of short-term liabilities in 2019 and 2020 are as follows:

Tabel Liabilitas Jangka Pendek

Table of Short Term Liabilities

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

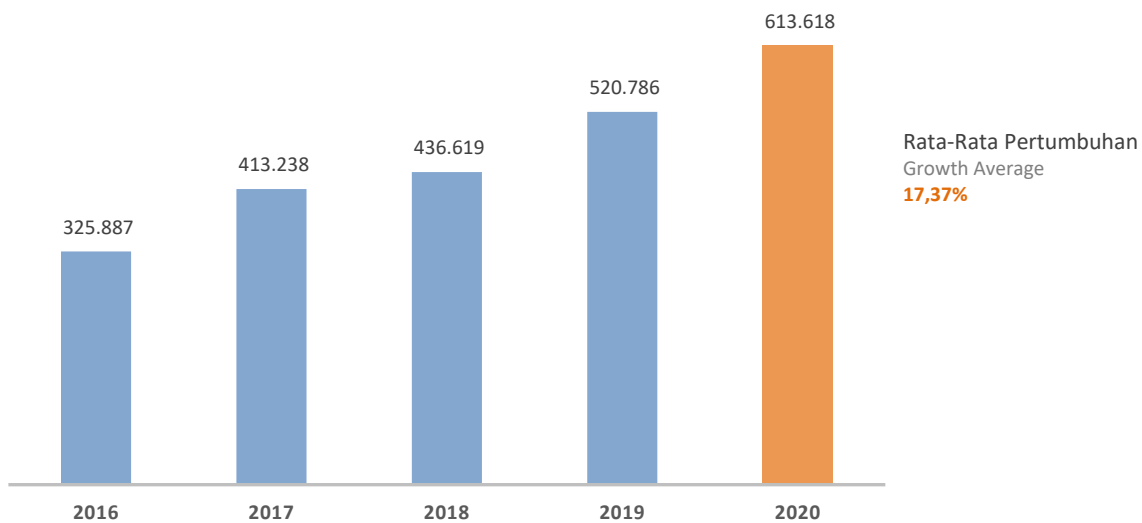
Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Utang Usaha Account Payable	124.851	129.576	(4.725)	(3,65)
Utang Bank Bank Debt	88.498	75.826	12.672	16,71
Uang Muka Penjualan Deposits on Sales	138.473	83.681	54.792	65,48
Utang Pajak Tax Debt	73.538	81.309	(7.771)	(9,56)
Beban Akrua Accrued Expenses	133.193	100.165	33.028	32,97
Utang Lain-lain Other Debt	55.065	50.229	4.836	9,63
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term	613.619	520.789	92.832	17,83

Liabilitas jangka pendek selama periode lima tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 17,37% dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2017 sebesar 26,80%, sebagaimana digambarkan dalam diagram dibawah ini:

Short-term liabilities during the last five years grew by an average of 17.37% with the highest growth in 2017 of 26.80%, as illustrated in the diagram below:

Grafik Liabilitas Jangka Pendek

Graph of Short Term Liabilities



Liabilitas Jangka Panjang

Perseroan telah mencatatkan realisasi liabilitas jangka panjang tahun 2020 sebesar Rp 177.887 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 8.757 juta atau 4,69% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 186.644 juta.

Rincian capaian liabilitas jangka panjang tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Long-Term Liabilities

The Company has recorded the realization of long-term liabilities in 2020 of Rp. 177,887 million, a decrease of Rp. 8,757 million or 4.69% when compared to the previous year which was Rp. 186,644 million.

The details of the achievement of long-term liabilities in 2019 and 2020 are as follows:

Tabel Liabilitas Jangka Panjang

Table of Non-Current Liabilities

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

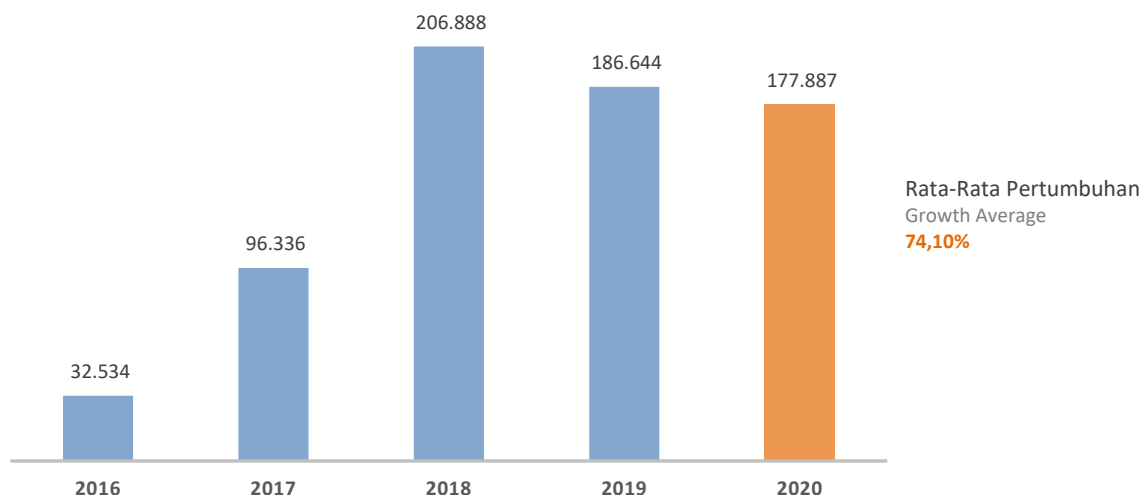
Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Diterima di Muka Uneamed Revenue	46.654	49.616	(2.962)	(5,97)
Utang Dana Kreditur Lainnya Other Creditors Debts	96.571	101.504	(4.933)	(4,86)
Utang Bank Long Term Bank Loans	2.770	3.578	(808)	(22,58)
Liabilitas Sewa Lease Liability	721	-	721	-
Utang Pembiayaan Finance Liability	55	280	(225)	(80,36)
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liability	31.116	31.666	(550)	(1,74)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	177.887	186.644	(8.757)	(4,69)

Liabilitas jangka panjang selama periode lima tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 104,04% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi ditahun 2017 sebesar 131.631, sebagaimana digambarkan dalam diagram dibawah ini:

Long-term liabilities during the last five years grew an average of 104.04% with the highest growth occurring in 2017 of 131,631, as illustrated in the diagram below:

Grafik Liabilitas Jangka Panjang

Graph of Non-Current Liabilities



Ekuitas Perusahaan

Perseroan telah mencatatkan ekuitas tahun 2020 sebesar Rp 124.860 juta, meningkat sebesar Rp 37.170 juta atau 42,39% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 87.737 juta. Rincian capaian ekuitas tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Non-Current Asset

The Company has recorded equity in 2020 of Rp 124,860 million, an increase of Rp 37,170 million or 42.39% compared to the previous year which was Rp 87,737 million. The details of equity achievements in 2020 and 2019 are as follows:

Tabel Ekuitas Perusahaan

Table of Company's Equity

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

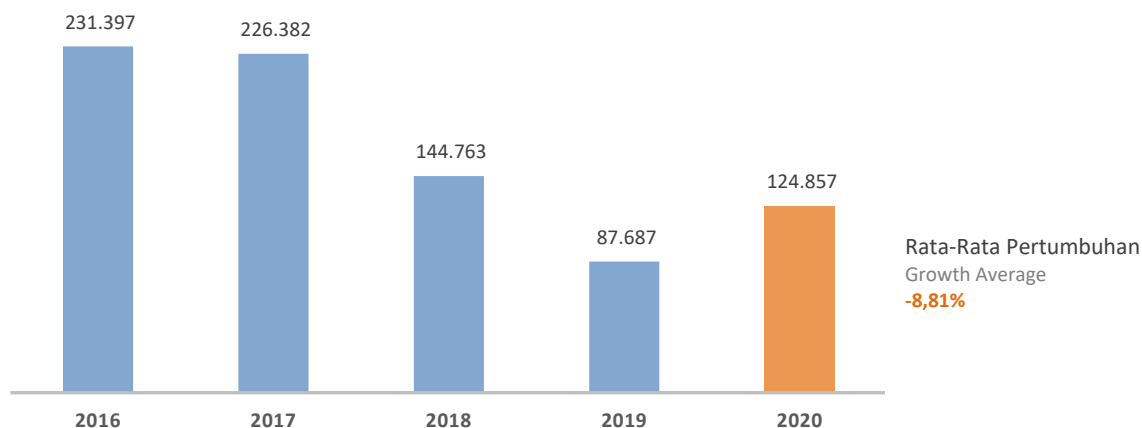
Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Modal Dasar Paid-up Capital	340.916	340.916	-	-
Cadangan Likuidasi Liquidation Reserves	33	33	-	-
Modal Hibah Grant Capital	22.808	22.808	-	-
Penghasilan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income	445.295	296.156	149.139	50,36
Defisit Defisit	(684.145)	(572.176)	(111.969)	19,36
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	124.907	87.737	37.170	42,37
Kepentingan non Pengendali Non-Controlled Interest	(47)	(50)	-	-
Jumlah Ekuitas Total Equity	124.860	87.687	37.170	42,39

Ekuitas perusahaan selama periode lima tahun terakhir menurun rata-rata sebesar 8,81% dengan penurunan terendah pada tahun 2019 sebesar 39,43%, sebagaimana digambarkan dalam diagram dibawah ini:

The company's equity during the last five years decreased by an average of 8.81% with the lowest decline in 2019 of 39.43%, as illustrated in the diagram below:

Grafik Ekuitas Perusahaan

Graph of Company's Equity



Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan Penjualan

Perseroan telah mencatatkan pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 241.328 juta, menurun sebesar Rp 25.176 juta atau 9,45% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 266.504 juta.

Kebijakan-kebijakan Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan penjualan adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan modal kerja perseroan untuk meningkatkan daya saing, dengan langkah-langkah:
 - i. Menjaga kepercayaan yang saat ini telah diberikan Bank BNI ke BBI sehingga ke depan platform permodalan dapat ditingkatkan
 - ii. Project financing dengan Mitra Strategis
- b) Penguatan Bisnis Perseroan dalam rangka meningkatkan daya saing Perusahaan dengan mengoptimalkan fungsi Riset & Pengembangan, dalam pengembangan teknologi, inovasi bisnis & produk serta meningkatkan kompetensi inti
- c) Mendukung Program pemerintah dalam bidang:
 - Pembangunan Infrastruktur.
 - Hilirisasi pertambangan.
 - Modernisasi Pertanian.
 - Revitalisasi industri.
 - Transformasi sistem jasa
- d) Menerapkan Sistem Remunerasi berbasis Kinerja dalam membina SDM unggul dengan mengalokasikan anggaran Program Pengembangan SDM sebesar 5% biaya SDM
- e) Mengimplementasikan Integrated Talent Management System (ITMS), selaras dengan Kementerian BUMN.
- f) Mengutamakan Sinergi BUMN dalam Pengadaan Barang dan Jasa
- g) Peningkatan fasilitas produksi.
- h) Menerapkan Sistem Insentif untuk percepatan penyelesaian Order/Proyek.
- i) Menumbuhkan business culture perseroan lewat Tata Nilai Perusahaan AKHLAK

Kebijakan perusahaan dalam rangka menghadapi Covid-19 adalah:

- a) Pembentukan tim khusus satuan tugas Covid19 untuk melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid19 di lingkungan PT BBI.

INCOME STATEMENT

Sales revenue

The Company has recorded revenue in 2020 of Rp 241,328 million, a decrease of Rp. 25,176 million or 9.45% compared to the previous year which was Rp. 266,504 million.

The Company's policies in order to increase sales revenue are as follows:

- a) Strengthening the company's working capital to increase competitiveness, by taking the following steps:
 - I. Maintaining the trust that currently has been given by Bank BNI to BBI so that in the future the capital platform can be improved
 - II. Project financing with Strategic Partners
- b) Strengthening the Company's Business in order to increase the Company's competitiveness by optimizing the Research & Development function, in technology development, business & product innovation as well as improving core competencies
- c) Supporting government programs in the fields of:
 - Infrastructure development.
 - Mining downstream.
 - Agricultural Modernization.
 - Industrial revitalization.
 - Service system transformation
- d) Implementing a Performance-based Remuneration System in fostering superior HR by allocating a HR Development Program budget of 5% of HR costs
- e) Implementing the Integrated Talent Management System (ITMS), in line with the Ministry of SOEs.
- f) Prioritizing SOE Synergy in the Procurement of Goods and Services
- g) Improvement of production facilities.
- h) Implementing an Incentive System to accelerate the completion of Orders/Projects.
- i) Growing the company's business culture through Corporate Values AKHLAK

The company's policies in dealing with Covid-19 are:

- a) Formation of a special team for the Covid19 task force to handle and prevent the spread of the Covid-19 virus within PT BBI.

- b) Kebijakan social distancing antara lain:
- Menerapkan program work from home dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.
 - Melakukan virtual meeting agar proses bisnis perusahaan berjalan dengan lancar.
 - Pembatasan akses langsung dengan stakeholder
- c) Penyusunan SOP karyawan dan tamu dalam memasuki lingkungan perusahaan.
- d) Program efisiensi biaya (cost cutting).
- e) Melayani priority and loyal customer diantaranya klaster industri manufaktur, Pertamina, BUMN Karya, dan Rekayasa Industri.
- f) Bermitra dengan priority supplier untuk membentuk kemitraan selektif, dan untuk mendapatkan bahan-bahan yang sangat kritis serta sulit didapat juga melakukan negosiasi harga yang lebih rendah melalui pengadaan bersama dan pembagian risiko.

- b) Social distancing policies include:
- Implement a work from home program in order to maintain the health and safety of employees.
 - Conduct virtual meetings so that the company's business processes run smoothly.
 - Restrictions on direct access with stakeholders
- c) Preparation of SOP for employees and guests in entering the company environment.
- d) Program of cost efficiency (cost cutting).
- e) Serving priority and loyal customers including manufacturing industry clusters, Pertamina, BUMN Karya, and Industrial Engineering.
- f) Partner with priority suppliers to form selective partnerships, and to procure highly critical and hard-to-find materials as well as negotiate lower prices through joint procurement and risk sharing.

Tabel Pendapatan Penjualan

Table of Sales Revenue

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

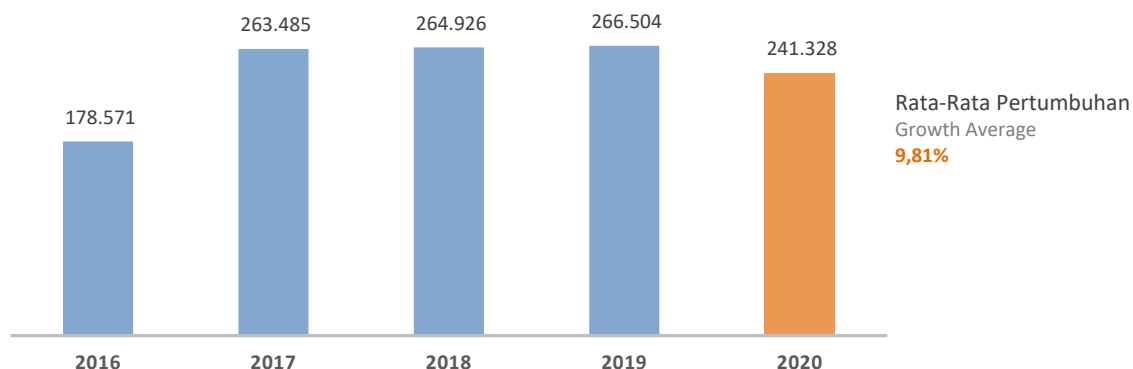
Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Divisi Mesin Peralatan Industri Industrial Equipment Machinery Division	78.241	65.800	12.441	18,91
Divisi Manajemen Proyek dan Jasa Project Management and Services Division	72.344	128.900	(56.556)	(43,88)
Divisi Diesel Diesel Division	13.061	-	13.061	-
PT Bromo Steel Indonesia – Anak Usaha subsidiary	77.682	71.804	5.878	8,19%
Total Pendapatan Penjualan Total Sales Revenue	241.328	266.504	(25.176)	(9,45)

Pendapatan penjualan perusahaan selama periode lima tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 9,81% dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2017 sebesar 47,55%, sebagaimana digambarkan dalam diagram dibawah ini:

The company's sales revenue during the last five years grew an average of 9.81% with the highest growth in 2017 of 47.55%, as illustrated in the diagram below:

Grafik Pendapatan Penjualan

Graph of Sales Revenue



Beban Pokok Penjualan

Perseroan telah mencatatkan beban pokok penjualan tahun 2020 sebesar Rp226.875 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 56.459 juta atau 19,93% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 283.335 juta.

Rincian capaian beban pokok penjualan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Cost of Goods sold

The Company has recorded cost of goods sold in 2020 of Rp.226,875 million, a decrease of Rp. 56,459 million or 19.93% when compared to the previous year of Rp. 283,335 million.

The details of the achievement of cost of goods sold in 2020 and 2019 are as follows:

Tabel Beban Pokok Penjualan

Cost of Goods Sold Table

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

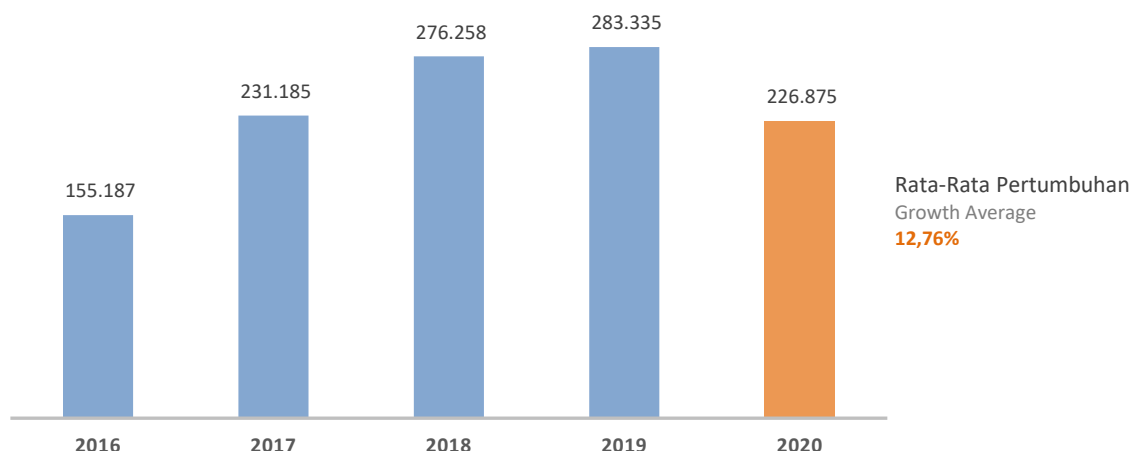
Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Beban Bahan Material Expenses	59.197	33.171	26.026	78,46
Beban Tenaga Kerja Labor expenses	59.823	97.866	(38.043)	(38,87)
Beban Overhead Overhead expenses	167.634	143.274	24.360	17,00
Persediaan dalam Proses Work in Process	(57.466)	13.234	(70.700)	(534,23)
Pekerjaan dalam Konstruksi Construction in Progress	(2.312)	(4.210)	1.898	(45,08)
Total Beban Pokok Penjualan Total Cost of Goods Sold	226.876	283.335	(56.459)	(19,93)

Beban pokok penjualan perusahaan selama periode lima tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 12,76% dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2017 sebesar 48,97%, digambarkan dalam diagram dibawah ini:

The company's cost of goods sold during the last five years grew an average of 12.76% with the highest growth in 2017 of 48.97%, illustrated in the diagram below:

Grafik Beban Pokok Penjualan

Graph of Goods Sold Table



Beban Usaha

Perseroan telah mencatatkan beban usaha tahun 2020 sebesar Rp 73.389 juta, meningkat sebesar Rp 36.763 juta atau 100,37% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 36.626 juta.

Rincian capaian beban usaha tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Operating Expenses

The Company has recorded operating expenses in 2020 of Rp. 73,389 million, an increase of Rp. 36,763 million or 100.37% compared to the previous year which was Rp. 36,626 million.

The details of operating expenses in 2018 and 2019 are as follows:

Tabel Beban Usaha

Table of Operating Expenses

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

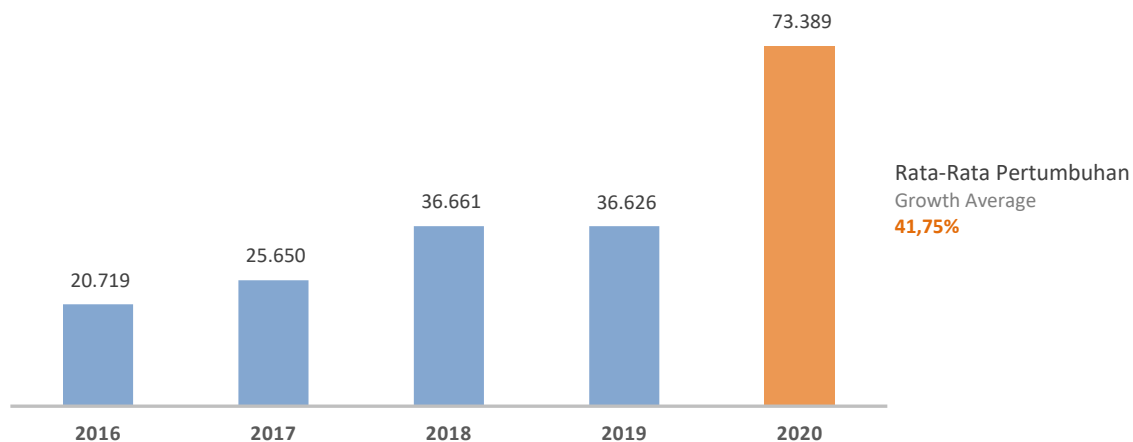
Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Beban Administrasi dan Umum General and Administrative Expenses	3.819	5.174	(1.355)	(26,19)
Beban Penjualan Sales expenses	69.570	31.452	38.118	121,19
Total Beban Usaha Total Operating Expenses	73.389	36.626	36.763	100,37

Beban usaha perusahaan selama periode lima tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 41,75% dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2020 sebesar 100,37%, sebagaimana digambarkan dalam diagram dibawah ini:

The company's operating expenses during the last five years grew an average of 41.75% with the highest growth in 2020 of 100.37%, as illustrated in the diagram below:

Grafik Beban Usaha

Graph of Operating Expenses



Laba Tahun Berjalan

Perseroan telah mencatatkan rugi tahun berjalan tahun 2020 sebesar Rp 73.458 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 30.358 juta atau 70,44% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga rugi sebesar Rp 43.100 juta.

Rincian capaian laba tahun berjalan tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Current Year Profit

The Company has recorded a loss for the year 2020 of Rp. 73,458 million, a decrease of Rp. 30,358 million or 70.44% compared to the previous year which also lost Rp. 43,100 million.

The details of profit achievement for the year 2019 and 2020 are as follows:

Tabel Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Table of Current Year Profit (Loss)

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

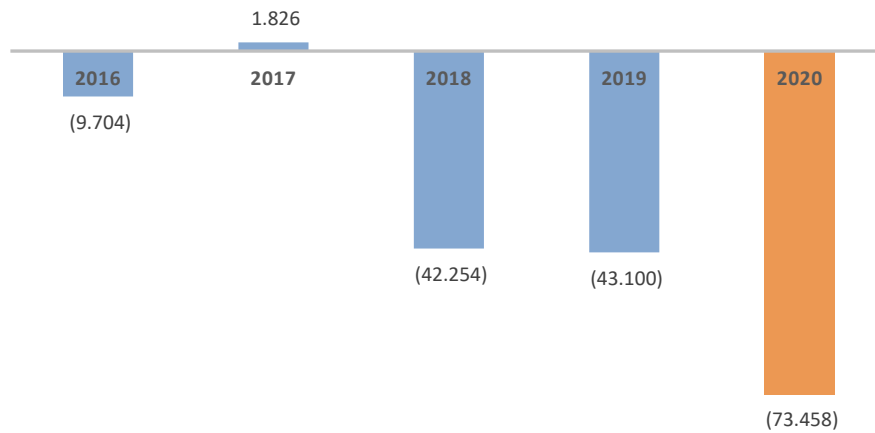
Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Penjualan Sales	241.328	266.504	(25.176)	(9,45)
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	226.875	283.335	(56.460)	(19,93)
Beban Usaha Operating Expenses	73.389	36.626	36.763	100,37
Laba Tahun Berjalan Current Year Profit	(73.458)	(43.100)	(30.358)	(70,44)

Laba (Rugi) tahun berjalan selama periode lima tahun terakhir dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2017, sebagaimana digambarkan dalam diagram dibawah ini:

Profit (Loss) for the current year during the last five years with the highest growth in 2017, as illustrated in the diagram below:

Grafik Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Graph of Current Year Profit (Loss)



Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perseroan telah mencatatkan laba komprehensif tahun berjalan tahun 2020 sebesar Rp 75.685 juta, meningkat sebesar Rp 121.758 juta atau 264,27% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rugi sebesar Rp 46.073 juta.

Rincian capaian laba komprehensif tahun berjalan tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Comprehensive Profit for the Year

The Company has recorded comprehensive profit for the year 2020 of Rp 75,685 million, an increase of Rp 121,758 million or 264.27% compared to the previous year's loss of Rp 46,073 million.

The details of the achievement of comprehensive income for the year 2019 and 2020 are as follows:

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Table of Current Year Comprehensive Profit

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

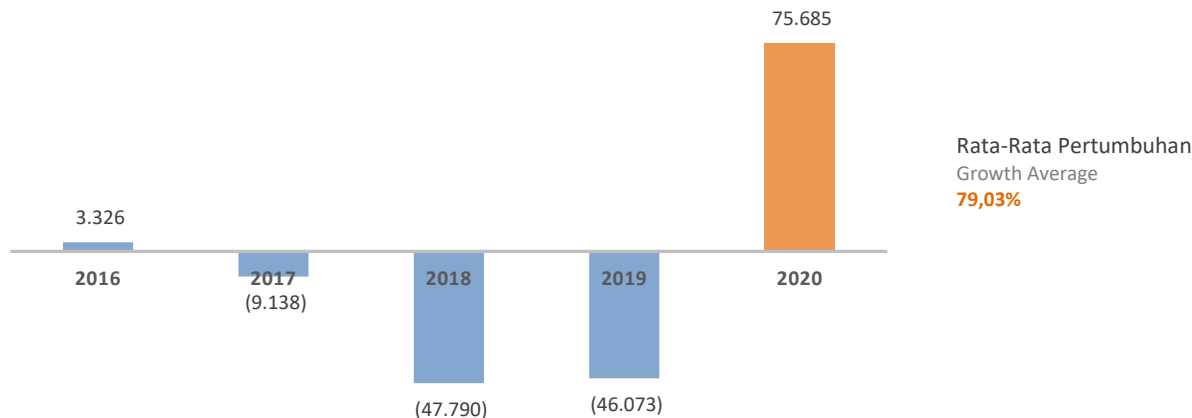
Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Laba Setelah Pajak Profit after Tax	(73.458)	(43.100)	(30)	(70)
Pendapatan Komprehensif Lain : Other Comprehensive Income:	149.143	(2.973)	152.116	5116,58
Kerugian Aktuaria Profit after Tax	(1.665)	(3.964)	2.299	58,00
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Profit after Tax	(980)	991	(1.971)	198,89
Surplus Revaluasi Aset Tetap Tanah Profit after Tax	151.788	-	151.788	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	75.684	(46.073)	121.758	265,27

Peningkatan Laba Komprehensif tahun 2020 terjadi karena aksi korporasi Revaluasi Aset Tetap Tanah dan Properti sebesar Rp 151.788 juta, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 215,36% atau sebesar Rp121.758 juta, sebagaimana digambarkan dalam diagram dibawah ini:

The increase in Comprehensive Profit in 2020 occurred due to the corporate action of Revaluation of Fixed Assets of Land and Property of Rp. 151,788 million, with the highest growth occurring in 2020 of 215.36% or Rp. 121,758 million, as illustrated in the diagram below:

Grafik Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Graph of Current Year Comprehensive Profit



LAPORAN ARUS KAS

Penyajian Laporan Arus Kas Perseroan mengacu kepada PSAK 2 (Revisi 2014) merupakan informasi perubahan kas dan setara kas, yang disusun dengan menggunakan metode langsung, ditujukan untuk menilai kemampuan Perseroan menghasilkan arus kas dan setara kas serta memenuhi kebutuhan dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Perseroan terus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerjanya dalam upaya peningkatan produktivitas guna memperkuat arus kas.

CASH FLOW STATEMENT

The presentation of the Company's Cash Flow Statement refers to PSAK 2 (Revised 2014) which is information on changes in cash and cash equivalents, which are prepared using the direct method, aimed at assessing the Company's ability to generate cash and cash equivalents and meet the needs in operating activities, investment and funding. The Company continues to take steps to improve its performance in an effort to increase productivity in order to strengthen cash flow.

Tabel Arus Kas

able of Cash Flow

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	14.838	(26.003)	40.841	157,06
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities	(36)	(386)	350	(90,67)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Funding Activities	11.925	28.898	(16.973)	(58,73)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents	26.726	2.508	24.218	965,63
Saldo Awal Kas dan Setara Kas Initial Balance of Cash and Cash Equivalent	15.166	12.659	2.507	19,80
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas Ending Cash and Cash Equivalent Balance	41.893	15.166	26.727	176,23

Laporan arus kas perseroan terdiri dari 3 (tiga) aktivitas arus kas masuk dan arus kas keluar yang terdiri dari arus kas aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

The company's cash flow statement consists of 3 (three) cash inflows and outflows activities, which consist of cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, and cash flows from financing activities.

Arus Kas Dari Kegiatan Operasional

Realisasi kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2020 mencapai Rp 14.838 juta lebih tinggi 157,06% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp (26.003) juta. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp320.615 juta menurun 6,65% dari tahun sebelumnya sebesar Rp343.458 juta dengan pertumbuhan selama lima tahun terakhir rata-rata 23,66%.
- 2) Pengeluaran kas untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp288.846 juta menurun 18,70% dari tahun sebelumnya Rp 355.302 juta dengan pertumbuhan selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata 34,29%.
- 3) Pembayaran untuk operasional lain pada tahun 2020 sebesar Rp10.632 juta meningkat 26,48% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 8.406 juta dengan penurunan selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata 13,05%.
- 4) Penerimaan dari (pembayaran) perpajakan pada tahun 2020 sebesar Rp6.300 juta meningkat 9,51% dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.753 juta dengan penurunan selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata 8,56%.

Cash Flow From Operating Activities

Realization of net cash from operating activities in 2020 reached Rp. 14,838 million, 157.06% higher than the realization in 2019 of Rp. (26,003) million. This is caused by:

- 1) Cash receipts from customers amounted to Rp320,615 million, a decrease of 6.65% from the previous year of Rp343,458 million with an average growth over the last five years of 23.66%.
- 2) Cash disbursements for payments to suppliers amounted to Rp.288,846 million, a decrease of 18.70% from the previous year of Rp. 355,302 million, with growth over the last five years reaching an average of 34.29%.
- 3) Payments for other operations in 2020 amounted to IDR 10,632 million, an increase of 26.48% from the previous year of IDR 8,406 million with a decrease over the last five years reaching an average of 13.05%.
- 4) Tax revenue (payments) in 2020 amounted to IDR 6,300 million, an increase of 9.51% from the previous year of IDR 5,753 million with a decrease over the last five years reaching an average of 8.56%.

Tabel Arus Kas Kegiatan Operasi

Table of Cash Flow from Operational Activities

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	2020	% Pertumbuhan Growth
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	186.045	189.792	408.363	343.458	320.615	23,66
Pembayaran untuk Pemasok Payment to Suppliers	(127.428)	(164.476)	(386.186)	(355.302)	(288.846)	34,29
Pembayaran untuk Operasional Lain Payment to Other Operation	(48.597)	(53.749)	(50.586)	(8.406)	(10.632)	(13,05)
Penerimaan dari (Pembayaran) Perpajakan Receipt from (Payment) Taxation	(9.764)	(6.208)	(6.208)	(5.753)	(6.300)	(8,56)

Arus Kas Dari Kegiatan Pendanaan

Realisasi kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2020 mencapai Rp 11.925 juta menurun 58,73% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 28.898 juta. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Penerimaan kas dari utang bank pada tahun 2020 sebesar Rp 49.572 juta turun 34,48% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 75.658 juta. Dengan pertumbuhan selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata 28,25%.
- 2) Pembayaran utang bank pada tahun 2020 sebesar Rp 37.607 juta turun 20,45% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 47.272 juta. Penurunan selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata (30,11)%.
- 3) Penerimaan kas dari utang pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp 2.500 juta naik 308,50% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 612 juta. Dengan pertumbuhan selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata 77,12%.
- 4) Pembayaran utang pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp 2.541 juta, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 100 juta. Pertumbuhan selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata 560,61%.

Cash Flow From Funding Activities

Net cash realization from financing activities in 2020 reached Rp. 11,925 million, a decrease of 58.73% compared to the realization in 2019 of Rp. 28,898 million. This is caused by:

- 1) Cash receipts from bank loans in 2020 amounted to IDR 49,572 million, a decrease of 34.48% from the previous year of IDR 75,658 million. With growth over the last five years reaching an average of 28.25%.
- 2) Payment of bank loans in 2020 amounted to Rp 37,607 million, down 20.45% from the previous year of Rp 47,272 million. The decline over the last five years reached an average of (30.11)%.
- 3) Cash receipts from debt financing in 2020 amounted to Rp. 2,500 million, an increase of 308.50% from the previous year of Rp. 612 million. With growth over the last five years reaching an average of 77.12%.
- 4) Payment of debt financing in 2020 is IDR 2,541 million, while in 2019 it is IDR 100 million. Growth over the last five years reached an average of 560.61%.

Tabel Arus Kas Kegiatan Pendanaan

Table of Cash Flow from Funding Activities

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	2020	% Pertumbuhan Growth
Penerimaan Utang Bank Receipt of Bank Loans	-	58.780	24.780	75.658	49.572	28,25
Pembayaran Utang Bank Payment to Bank Loan	(510)	-	-	(47.272)	(37.607)	(30,11)
Penerimaan Utang Pembiayaan Receipt of Financing Debt	-	-	-	612	2.500	77,12
Pembayaran Utang Pembiayaan Payment of Financing Debt	(5.609)	-	(6.940)	(100)	(2.541)	560,61

ANALISA KINERJA RASIO KEUANGAN

Financial Ratio Performance Analysis

Perseroan telah melakukan analisis terhadap rasio keuangan pada periode tertentu untuk menganalisis kondisi keuangan. Dengan merujuk pada Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, PT Boma Bisma Indra (Persero) dikelompokkan dalam kategori BUMN Non Infrastruktur melakukan penilaian tingkat kesehatan Perseroan menggunakan sejumlah rasio keuangan.

Dari evaluasi tahun 2016 – 2020 capaian persentase rata-rata pertumbuhan rasio keuangan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan pengelolaan operasional dan keuangan perseroan.

Rincian kinerja rasio keuangan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The Company has conducted an analysis of financial ratios in a certain period to analyze the financial condition. With reference to the Decree of the Minister of SOEs No: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises, PT Boma Bisma Indra (Persero) is grouped in the category of Non-Infrastructure SOEs to assess the health level of the Company using a number of financial ratios.

From the 2016 - 2020 evaluation, the average percentage of financial ratio growth can provide an overview of the success of the company's operational and financial management.

Details of the performance of financial ratios in the last five years are as follows:

Tabel Kinerja Rasio Keuangan

Table of Financial Ratio Performance

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	Rata-Rata Pertumbuh an Average Growth	Description
LIKUIDITAS (%)							LIQUIDITY (%)
Arus Kas Operasi (Rp Juta)	2,42	(4,99)	(7,93)	(8,38)	0,08	(3,76)	Operating Cash Flow (Million Rupiah)
Rasio Lancar	59,67	76,29	90,67	76,66	52,37	71,13	Current Ratio
Rasio Kas	6,83	2,91	2,90	7,18	3,5	4,66	Gross Profit
PROFITABILITAS (%)							PROFITABILITY (%)
EBITDA (Rp Juta)	(50.785)	(39.482)	(38.284)	10.378	2.010	(23.232,60)	EBITDA (Million Rupiah)
Rasio Margin /(Rugi) kotor	5,99	(6,32)	(3,90)	12,26	13,10	4,23	Gross Profit Margin Ratio (GPM)
Ratio Margin Laba/(Rugi) Usaha	(24,42)	(20,06)	(17,74)	2,52	1,49	(11,64)	Operating Profit Margin Ratio (OPM)
Ratio Margin Laba/(Rugi) Bersih	(30,44)	(16,17)	(15,95)	0,69	(5,43)	(13,46)	Net Profit Margin Ratio (NPM)
Rasio Pengambilan atas Ekuitas	60,62	(52,54)	(33,01)	(1,47)	(3,95)	(6,07)	Return on Equity Ratio (ROE)
Rasio Total Hutang terhadap Investasi	(5,54)	(4,97)	(4,86)	1,41	0,34	(2,72)	Total Liabilities To Investment Ratio (ROI)
SOLVABILITAS (kali)							SOLVABILITY (times)
Debt to EBITDA	(1.559)	(1.792)	(1.681)	4.910	17.832	3.542,00	Debt to EBITDA
Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas	6,34	8,07	4,45	2,25	1,55	4,53	Debt To Equity Ratio (DER)
Rasio Total Hutang terhadap Asset	0,86	0,77	0,70	0,56	0,39	0,66	Debt To Asset Ratio (DAR)
AKTIVITAS							ACTIVITY
Rasio Perputaran Persediaan (hari)	170	85	100	39	13	81,40	Inventory Turn Over (Day)
Rasio Perputaran Piutang (hari)	51	162	172	89	287	152,20	Collection Period (Day)
Rasio Perputaran Total Aset (%)	13,63	11,03	18,36	30,76	39,23	22,60	Collection Period (%)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

PT Boma Bisma Indra (Persero) berkomitmen untuk mempunyai kemampuan membayar utang dan meningkatkan kolektibilitas piutang. Oleh karena itu, BBI senantiasa melakukan analisis terhadap pengelolaan utang untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan perseroan dalam membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta gambaran mengenai kemampuan perseroan dalam melakukan kolektibilitas piutang.

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan BBI dalam membayar utang pada tahun 2020 tergambar dari sejumlah indikator penilaian berupa likuiditas, solvabilitas, penilaian utang terhadap modal dan tingkat kesehatan Perseroan.

- a) Rasio likuiditas dinilai dari rasio lancar dan rasio kas. Pada lima tahun terakhir, perseroan masih mencatatkan persentase pertumbuhan yang positif. Ditinjau dari rasio lancar perseroan pada tahun 2020 sebesar 59,67%. Rasio ini menurun 16,62% dibandingkan rasio lancar yang dicapai pada tahun sebelumnya yaitu 76,29%. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya aset lancar pada tahun 2020 sebesar 7,85% yang mana lebih kecil dari peningkatan liabilitas jangka pendek yang mencapai sebesar 11,88%. Sedangkan rasio kas perseroan selama lima tahun terakhir menunjukkan persentase pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2020, perseroan mencatatkan rasio kas sebesar 6,83% yang meningkat 3,94% dari tahun sebelumnya sebesar 2,91%.

Aset lancar perseroan tahun 2020 turun 7,85% dari Rp 397.315 (2019) menjadi Rp 366.124 juta pada tahun 2020. Sedangkan liabilitas jangka pendek naik 11,88% dari Rp 520.789 juta (2019) menjadi Rp 613.619 juta pada tahun 2020. Capaian rasio likuiditas menunjukkan bahwa perseroan berat untuk membayar utang jangka pendek.

- b) Rasio solvabilitas dinilai dari rasio total utang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap total ekuitas. Kedua rasio

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLE COLLECTIBILITY

PT Boma Bisma Indra (Persero) is committed to having the ability to pay debts and increase the collectibility of receivables. Therefore, BBI always conducts an analysis of debt management to obtain an overview of the company's ability to pay all its debts, both short and long term, as well as an overview of the company's ability to collect receivables.

Ability to Pay Debt

BBI's ability to pay debts in 2020 is illustrated by a number of assessment indicators in the form of liquidity, solvency, debt to equity assessment and the soundness of the Company.

- a) Liquidity ratio is assessed from current ratio and cash ratio. In the last five years, the company still recorded a positive percentage growth. Judging from the company's current ratio in 2020 it was 59.67%. This ratio decreased by 16.62% compared to the current ratio achieved in the previous year, which was 76.29%. This condition was caused by the decline in current assets in 2020 by 7.85%, which was smaller than the increase in short-term liabilities which reached 11.88%. Meanwhile, the company's cash ratio for the last five years shows a positive percentage growth. In 2020, the company recorded a cash ratio of 6.83%, an increase of 3.94% from the previous year of 2.91%.

The company's current assets in 2020 decreased by 7.85% from Rp. 397,315 (2019) to Rp. 366,124 million in 2020. Meanwhile, short-term liabilities increased by 11.88% from Rp. 520,789 million (2019) to Rp. 613,619 million in 2020. Achievement ratio Liquidity shows that the company is difficult to pay short-term debt.

- b) The solvency ratio is assessed from the ratio of total debt to total assets and the ratio of total debt to total equity. Both

tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif namun pada tahun 2020 mengalami penurunan rasio total hutang terhadap ekuitas. Perseroan berhasil mencatatkan rasio total utang terhadap total aset naik 0,09x dari 0,77x (2019) menjadi 0,86x pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh aset perseroan yang meningkat dari sebesar Rp 795.120 juta di tahun 2019 menjadi Rp 916.366 juta pada tahun 2020 atau naik sebesar 15,25%. Capaian rasio ini menunjukkan bahwa perseroan masih memiliki kemampuan untuk membayar utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

Sedangkan rasio total utang terhadap total ekuitas tahun 2020 sebesar 6,34x turun 1,73x dari tahun sebelumnya sebesar 8,07x. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan utang sebesar 11,88% yang lebih kecil dari peningkatan jumlah ekuitas yang mengalami peningkatan sebesar 42,39%. Jumlah ekuitas di tahun 2020 mencapai sebesar Rp 124.860 juta naik 42,39% dari sebelumnya sebesar Rp 87.687 juta. Sedangkan jumlah utang pada tahun 2020 naik 11,88% mencapai sebesar Rp 791.506 juta dari sebelumnya sebesar Rp 707.432 juta.

Pada tahun 2020 perseroan berupaya untuk menyeimbangkan antara utang dan ekuitas meskipun pada tahun 2020 jumlah utang masih melebihi jumlah ekuitas sebesar 6,34x. Namun jumlah aset yang dimiliki perseroan pada tahun 2020 masih dapat menutupi dan membayar semua utang perusahaan.

Kolektibilitas Piutang

Kolektibilitas piutang dipengaruhi oleh kemampuan perseroan dalam menagih piutangnya. Dengan memperhatikan karakteristik bisnis perseroan, maka dalam transaksinya dengan pemesan, perseroan berupaya untuk mendapatkan order dengan uang muka, termin yang ringan, dan margin yang mencukupi.

Perputaran piutang tahun 2020 adalah 51 hari, menurun 111 hari dari yang sebelumnya 162 hari. Hal ini menunjukkan terdapat penurunan waktu penagihan piutang kepada pihak ketiga. Perseroan senantiasa berkomitmen dan

ratios have a positive average growth but in 2020 the total debt to equity ratio decreased. The Company managed to record a ratio of total debt to total assets increasing by 0.09x from 0.77x (2019) to 0.86x in 2020. This condition was influenced by the company's assets which increased from Rp. 795,120 million in 2019 to Rp. 916,366 million in 2020 or an increase of 15.25%. The achievement of this ratio shows that the company still has the ability to pay short-term debt and long-term debt.

Meanwhile, the ratio of total debt to total equity in 2020 was 6.34x, down 1.73x from the previous year of 8.07x. This condition was influenced by an increase in debt by 11.88% which was smaller than the increase in total equity which increased by 42.39%. Total equity in 2020 reached Rp 124,860 million, an increase of 42.39% from the previous Rp 87,687 million. Meanwhile, the amount of debt in 2020 increased by 11.88% to reach Rp. 791,506 million from the previous Rp. 707,432 million.

In 2020 the company seeks to balance debt and equity although in 2020 the total debt still exceeds the total equity by 6.34x. However, the total assets owned by the company in 2020 can still cover and pay all the company's debts.

Accounts Receivable

The collectibility of receivables is influenced by the company's ability to collect its receivables. By taking into account the company's business characteristics, in its transactions with customers, the company seeks to obtain orders with advances, light terms, and sufficient margins.

Accounts receivable turnover in 2020 is 51 days, a decrease of 111 days from the previous 162 days. This shows that there is a decrease in the time of collection of receivables from third parties. The Company is always

menjalin hubungan bisnis yang baik dengan seluruh pihak ketiga.

committed and maintains good business relationships with all third parties.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG BERDASARKAN TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan tingkat kesehatan perusahaan, yang dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

Implementasi Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, PT BBI pada tahun 2020 memperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan konsolidasian dengan skor 32,0 (predikat kurang sehat "B"). Dengan perolehan skor penilaian tingkat tersebut, menunjukkan bahwa perseroan dalam kondisi kurang sehat dan belum optimal pada tahun 2020. Perseroan akan terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya.

Rincian kinerja rasio keuangan berdasarkan Tingkat Kesehatan Perusahaan lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

ABILITY TO PAY DEBT BASED ON THE COMPANY'S LEVEL OF HEALTH

The ability to pay debts can also be reflected based on the soundness of the company, which is assessed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises.

Implementation of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises, PT BBI in 2020 obtained the results of an assessment of the health level of a consolidated company with a score of 32.0 (unhealthy predicate "B"). With the acquisition of the health rating score, it shows that the company is in an unhealthy condition and has not been optimal in 2020. The company will continue to strive and be committed to improving its performance in the following years.

Details of the performance of financial ratios based on the Company's Health Level for the last five years are as follows:

Tabel Tingkat Kesehatan Perusahaan

Table of Company Health Level

Aspek Penilaian Assesment Aspects	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Average
Aspek Keuangan Financial Aspect	21.90	27.50	14,00	12,70	14,00	18,02
Aspek Operasional Operational Aspect	8.40	13.90	14,81	13,52	6,00	11,33
Aspek Administratif Administrative Aspect	9.00	9.00	12,95	11,00	12,00	10,79
Skor Penilaian Assessment Score	39.30	50.40	41,76	37,22	32,00	40,14
Predikat Penilaian Assessment Predicate	Kurang Sehat B	Kurang Sehat BBB	Kurang Sehat BB	Kurang Sehat B	Kurang Sehat B	

KEBIJAKAN MANAJEMEN STRUKTUR MODAL

Capital Structure Management Policy

Dalam mendukung pengelolaan ekuitas Manajemen menetapkan sebagai berikut:

In support of the management of equity, the Management has determined the following:

Struktur Modal Perusahaan

Pada tahun 2020, komposisi struktur modal yang dimiliki oleh perseroan adalah 86,37% berasal dari liabilitas dan 13,63% berupa ekuitas. Komposisi struktur modal yang berasal dari liabilitas mengalami penurunan dari semula 88,97% menjadi 86,37% sedangkan ekuitas mengalami kenaikan dari semula 11,03% menjadi 13,63%. Struktur modal perseroan dalam lima tahun terakhir sebagaimana gambaran berikut:

Company Capital Structure

In 2020, the composition of the capital structure owned by the company is 86.37% from liabilities and 13.63% from equity. The composition of the capital structure derived from liabilities decreased from 88.97% to 86.37% while equity increased from 11.03% to 13.63%. The company's capital structure in the last five years is as illustrated below:

Tabel Struktur Modal Perusahaan

Table of Company Capital Structure

Uraian Description	Satuan Unit	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Average
Liabilitas Liabilities	%	358.421	509.574	643.506	707.432	791.506	602.088
Ekuitas Equity	%	231.397	226.382	144.763	87.737	124.860	163.028
Aset Assets	%	589.818	735.955	788.269	795.120	916.366	765.106

Kebijakan Manajemen

Dasar kebijakan Perseroan dalam pengelolaan struktur modal adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, dan PSAK 50 (revisi 2014).

Kebijakan pengelolaan ekuitas dilaksanakan secara seimbang yaitu dengan memanfaatkan sumber dana sendiri (ekuitas), dengan ketentuan:

- 1) Modal disetor merupakan modal yang telah efektif diterima entitas penyelenggara dari pemerintah sebesar nilai nominal saham.

Management Policy

The basis of the Company's policy in managing capital structure is Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 19 of 2003 concerning BUMN, and PSAK 50 (revised 2014).

Equity management policies are implemented in a balanced manner, namely by utilizing their own sources of funds (equity), with the following provisions:

- 1) Paid-in capital is capital that has been effectively received by the implementing entity from the government in the amount of

Modal disetor terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

- 2) Jumlah modal disetor tidak boleh berkurang bahkan harus diperkuat. Penambahan modal disetor dapat dilakukan melalui konversi atau kapitalisasi dari cadangan umum Perseroan sesuai amanat RUPS.
- 3) Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya, Perseroan dan Entitas Anak dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi liabilitas.
- 4) Dalam rangka pengembangan usaha tahun 2020, perseroan melakukan perubahan struktur modal dengan menambah jumlah liabilitas menjadi sebesar Rp 791.506 juta atau naik 11,88% dan menambah ekuitas menjadi sebesar Rp 87.737 juta atau naik sebesar 42,31%. Sehingga perbandingan liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 menjadi 86,4:13,6 sedangkan pada tahun 2019 perbandingannya yaitu 89,0:11,0.
- 5) Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Para Pemegang Saham Perusahaan No. 41 tanggal 22 Oktober 2020 dari Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH Notaris di Surabaya, para pemegang Saham telah menyetujui perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham seri A Dwiwarna dan saham Seri B yang perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0401105 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 dengan susunan permodalan menjadi sebagai berikut:
 - Modal Dasar, Rp 1.300.000.000.000, (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) terbagi atas : 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan 1.299.999 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, Rp 340.916.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar Sembilan ratus enam belas

the nominal value of the shares. Paid-up capital consists of the entire nominal value of shares and at least 25% of the authorized capital must be issued and fully paid up.

- 2) The amount of paid-up capital should not be reduced, even strengthened. Additional paid-in capital can be made through conversion or capitalization of the general reserves of the Company in accordance with the mandate of the GMS.
- 3) To maintain or adjust its capital structure, the Company and its Subsidiaries may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce liabilities.
- 4) In the context of business development in 2020, the company made changes to the capital structure by increasing the total liabilities to Rp. 791,506 million or an increase of 11.88% and increasing equity to Rp. 87,737 million or an increase of 42.31%. So that the ratio of liabilities and equity in 2020 will be 86.4:13,6 while in 2019 the ratio is 89.0:11.0.
- 5) Based on the Notary Deed of Statement of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company No. 41 dated 22 October 2020 from Notary Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH Notary in Surabaya, the shareholders have approved the change in the type of shares which were originally without series to consist of series A Dwiwarna shares and Series B shares whose changes have been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Letter of Acceptance No. AHU-AH.01.03-0401105 Year 2020 dated October 23, 2020 with the following capital structure:
 - Authorized Capital, Rp. 1,300,000,000,000, (one trillion three hundred billion rupiah) divided into: 1 (one) Dwiwarna A series share; and 1,299,999 (one million two hundred ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine rupiahs) series B shares, each with a nominal value of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah).
 - Issued and Fully Paid Up Capital, Rp 340,916,000,000,- (three hundred and forty billion nine hundred sixteen million rupiah) issued and subscribed by the Republic of Indonesia in the amount of 340,916 (three hundred forty thousand nine hundred and sixteen) shares. 100%

juta rupiah) ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 340.916 (tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus enam belas) saham. 100% telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.

- Cadangan Likuiditas, berasal dari cadangan eks Likuidasi dari PN menjadi Persero tahun 1971 sebesar Rp35.170.071 berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-537/MK/011/1987 tanggal 9 Mei 1987. Sebagian cadangan likuidasi tersebut sebesar Rp2.426.093 dikonversikan sebagai tambahan setoran modal pemerintah, sehingga cadangan likuidasi yang tersisa menjadi Rp32.743.977.
- Modal Hibah. Pada laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2020, Manajemen mencatat Modal Hibah sumbangan berupa mesin dan dana yang digunakan untuk investasi kepada Entitas Anak "PT Bromo Steel Indonesia" sejumlah Rp13.244.845.407. Pencatatan ini tidak sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Entitas Anak "PT Bromo Steel Indonesia" No. 54 tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp14.217.194.575 dikarenakan perbedaan pencatatan nilai mesin sejumlah Rp972.349.168.

has been fully paid by the Republic of Indonesia.

- Liquidity Reserves, derived from ex-liquidation reserves from PN to Persero in 1971 amounting to Rp35,170,071 based on the letter of the Minister of Finance No. S-537/MK/011/1987 dated May 9, 1987. Some of the liquidation reserves amounting to Rp2,426,093 were converted as additional government capital payments, so that the remaining liquidation reserves became Rp32,743,977.
- Grant Capital. In the consolidated financial statements of December 31, 2020, Management recorded the Capital Grants in the form of machines and funds used for investment to the Subsidiary "PT Bromo Steel Indonesia" amounting to Rp13,244,845,407. This listing is not in accordance with the Deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Subsidiaries "PT Bromo Steel Indonesia" No. 54 dated 29 September 2020 in the amount of Rp. 14,217,194,575 due to differences in the recording of the machine value of Rp. 972,349,168.

Manajemen Permodalan

Tujuan manajemen permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup (going concern), memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham.

Grup secara rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Grup, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Capital Management

The objectives of capital management are to maintain the Group's business continuity (going concern), maximize benefits for shareholders and other stakeholders and maintain an optimal capital structure to reduce costs.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders.

The Group regularly reviews and manages the capital structure to ensure optimal capital structure and returns to shareholders, taking into account future capital requirements and the Group's capital efficiency, current and future profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

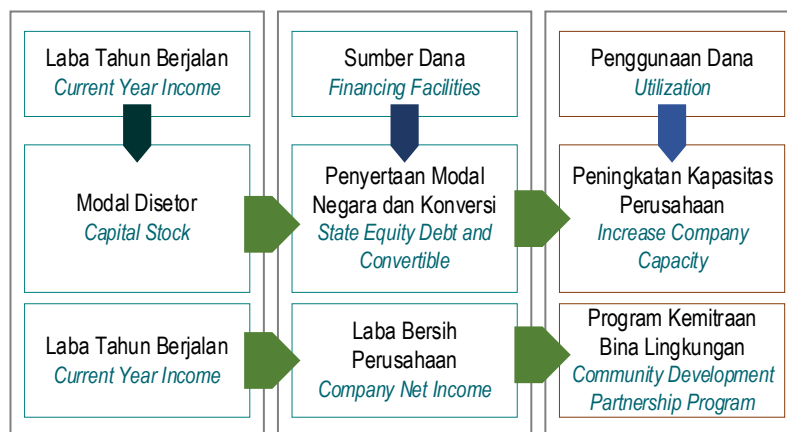
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Skema Pelaksanaan Ekuitas

Sebagai gambaran dalam pelaksanaan ekuitas Perseroan, disajikan skema sebagai berikut:

Equity Execution Scheme

As an illustration in the implementation of the Company's equity, the following scheme is presented:



KEJADIAN LUAR BIASA SELAMA TAHUN 2020

Incredible Events During 2020

Laporan Keuangan PT BBI (Persero) yang diaudit untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 memiliki informasi keuangan yang bersifat luar biasa yaitu Revaluasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp 151.788 juta yang mempengaruhi laporan keuangan Perseroan.

The audited Financial Statements of PT BBI (Persero) for the year ended December 31, 2020 contain extraordinary financial information, namely the Revaluation of Fixed Assets of Land amounting to Rp. 151,788 million which affected the Company's financial statements.

TINJAUAN KOMPONEN PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

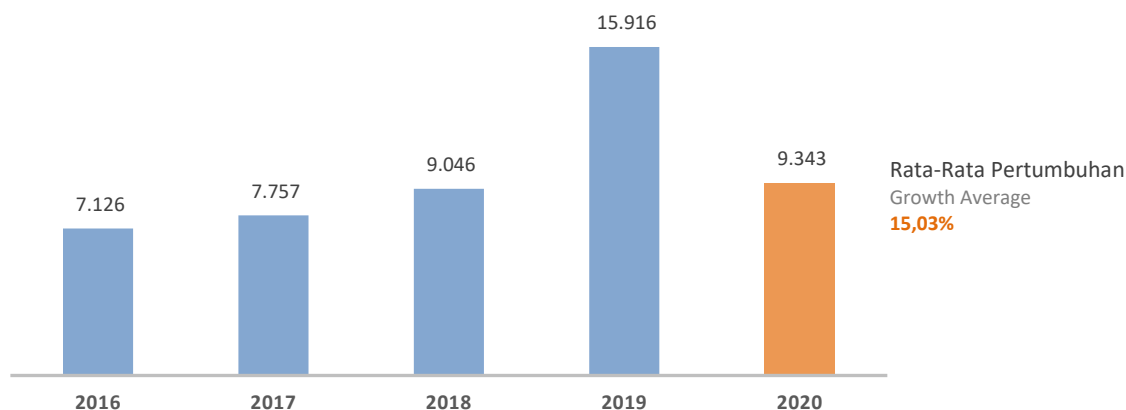
Overview Of Other Income and Expenses Components

Perseroan telah mencatatkan pendapatan lain-lain pada tahun 2020 sebesar Rp 9.343 juta menurun 41,30% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 15.916 juta. Hal yang mempengaruhi penurunan pendapatan lain-lain berasal dari penurunan pendapatan dari sewa dan jasa lainnya sebesar 44,47% dari pendapatan sewa dan jasa tahun sebelumnya. Pendapatan lain-lain pada tahun 2020 ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan penjualan Aval, Bunga Deposito dan Giro serta Pendapatan Diskonto dari utang karyawan sebagaimana digambarkan dalam diagram dibawah ini:

The Company has recorded other income in 2020 of Rp 9,343 million, a decrease of 41.30% from the previous year which was recorded at Rp 15,916 million. The thing that affected the decrease in other income came from the decrease in income from rental and other services by 44.47% of the rental income and services in the previous year. Other income in 2020 was also affected by the increase in sales of Aval, Interest on Deposits and Current Accounts as well as Discount Income from employee debt as illustrated in the diagram below:

Grafik Pendapatan Lain-lain

Graph of Others Income

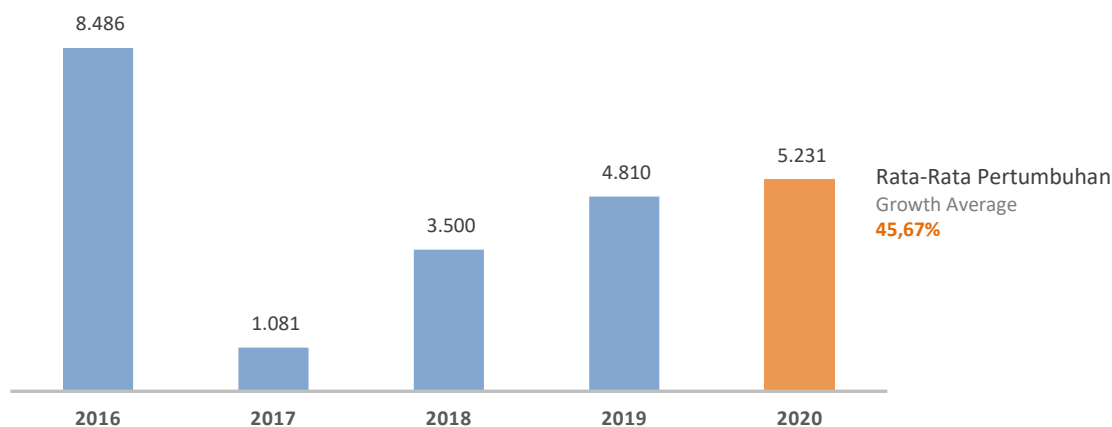


Realisasi beban lain-lain tahun 2020 sebesar Rp5.231 juta naik sebesar 8,75% dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.810 juta. Peningkatan beban lain-lain tahun 2020 ini didorong oleh adanya peningkatan beban denda klaim Rp 4.373 juta dan beban beda kurs sebesar Rp 180 juta dari tahun sebelumnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya penurunan beban lain-lain sebesar Rp 4.131 juta dari tahun 2019. Rata-rata pertumbuhan dari beban lain-lain yaitu (45,67)%, sebagaimana digambarkan dalam diagram dibawah ini:

Realization of other expenses in 2020 amounted to Rp5,231 million, an increase of 8.75% from the previous year of Rp4,810 million. The increase in other expenses in 2020 was driven by an increase in claim fines of Rp. 4,373 million and foreign exchange expenses of Rp. 180 million from the previous year. In addition, it was also affected by a decrease in other expenses of Rp. 4,131 million from 2019. The average growth of other expenses was (45.67)%, as illustrated in the diagram below:

Grafik Beban Lain-lain

Graph of Others Expanse



Dampak Perubahan Harga Penjualan / Pendapatan Perusahaan Serta Laba

Pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 2020 yang antara lain dipengaruhi oleh perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, secara langsung berdampak terhadap harga barang impor dan perubahan harga pasar. Sebagai Perseroan dengan bisnis inti di bidang manufaktur Industri dan mesin diesel, pelemahan nilai tukar rupiah dan mata uang sejumlah negara telah memberikan pengaruh terhadap pembayaran dan pembelian bahan baku / row material dan mesin-mesin diesel yang sebagian besar didatangkan dari Korea, dan beberapa dari Jepang, singapura dan Eropa.

The Impact of Changes in Sales Prices / Company Revenues and Profits

The weakening of the rupiah exchange rate in 2020, which was influenced, among other things, by the trade war between the United States and China, had a direct impact on the prices of imported goods and changes in market prices. As a company with core business in manufacturing Industry and diesel engines, the weakening of the rupiah exchange rate and the currencies of a number of countries has had an impact on payments and purchases of raw materials / row materials and diesel engines, most of which are imported from Korea, and some from Japan. , Singapore and Europe.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH LAPORAN AKUNTAN

Material Information And Facts That Happened After The Accountant's Report

Berikut informasi dan fakta material yang terjadi setelah laporan dari Akuntan:

- a. Tidak terdapat restitusi pajak yang diterima PT Boma Bisma Indra (Persero) pada tahun 2020.
- b. Restrukturisasi Fasilitas Kredit dengan BNI Berdasarkan Perjanjian Kredit pada tanggal 12 Juli 2021, Perusahaan mendapatkan persetujuan perpanjangan kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Surat No. KPS3/4.1279/R dengan merestrukturisasi fasilitas kredit menjadi sebagai berikut:
 - Fasilitas Term Loan Restrukturisasi maksimum Rp92.041.138.591.
 - Fasilitas Non-Cash Loan (NCL) maksimum Rp107.057.880.606Jangka waktu perpanjangan Fasilitas kredit ini 96 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit.
- c. Permasalahan Hukum dengan PT Kapuasindo Palm Industry Berdasarkan Releas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 775 K/PDT/2021 Jo. No. 500/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 2021, Mahkamah Agung mengadili:
 - Menolak permohonan kasasi dari PT Kapuasindo Palm Industry sebagai Pemohon Kasasi; dan
 - Menghukum PT Kapuasindo Palm Industry sebagai Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000.

This following material information and facts from the accountant:

- a. There were no tax refunds received by PT Boma Bisma Indra (Persero) in 2020.
- b. Restructuring of Credit Facilities with BNI Based on the Credit Agreement dated July 12, 2021, the Company received approval for a credit extension from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk through Letter No. KPS3/4.1279/R by restructuring the credit facilities as follows:
 - Term Loan Restructuring facility with a maximum of Rp92,041,138,591.
 - Non-Cash Loan (NCL) facility maximum of Rp107,057,880,606The extension period for this credit facility is 96 months from the signing of the Credit Agreement.
- c. Legal Issues with PT Kapuasindo Palm Industry Based on the Release of the Contents of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 775 K/PDT/2021 Jo. No. 500/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dated December 16, 2021, the Supreme Court tried:
 - Reject the appeal from PT Kapuasindo Palm Industry as the Cassation Petitioner; and
 - Sentencing PT Kapuasindo Palm Industry as the Cassation Petitioner to pay court fees of Rp500,000.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Company Business Prospects

Pada tahun 2020, Grup mengalami kerugian sebesar Rp73.458.456.772 dan akumulasi defisit pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp684.145.308.831 atau (201%) dari modal disetor. Disamping itu, rasio likuiditas Grup sebesar 60% dimana jumlah aset lancar Grup sebesar Rp366.123.737.812 tidak cukup untuk menutupi kewajiban lancar Grup sebesar Rp613.619.035.720.

Selain itu, sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, pandemi virus Covid-19 masih belum berakhir, Manajemen menyatakan bahwa Grup mengalami dampak signifikan per tanggal posisi keuangan. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian material atas kinerja Grup dimasa mendatang dan dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Sebagai upaya untuk tetap dapat menjaga kesinambungan kelangsungan usaha Grup, Manajemen akan melakukan langkah strategis sebagai berikut:

- Transformasi bisnis melalui fokus terhadap core business yaitu Manufacture (Industry Equipment) dan Assembly/ Packager Subsystem Component Energy yang berbasis Diesel/ Gas Engine;
- Peningkatan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri);
- Pengembangan produk unggulan yaitu dengan cara meningkatkan inovasi peralatan komponen migas yang berbasis diesel dan gas engine (Gas Compressor, Gas Generator, Air Compressor, Dehydration Unit, CO2 Removal, DEG, GEG dan sebagainya);
- Pelaksanaan Investasi Baru di Pasuruan, Assembly Line dan Software Engineering);
- Memperluas Pangsa Pasar produk unggulan dengan kerjasama Klaster Manufaktur, OEM dan Partner Strategis;
- Melakukan Optimalisasi/ Pelepasan Aset;
- Restrukturisasi Utang.

In 2020, the Group experienced a loss of Rp73,458,456,772 and an accumulated deficit as of December 31, 2020 of Rp684,145,308,831 or (201%) of the paid-in capital. In addition, the Group's liquidity ratio is 60% where the Group's total current assets of Rp366,123,737,812 are not sufficient to cover the Group's current liabilities of Rp613,619,035,720.

In addition, as of the issuance date of the consolidated financial statements, the Covid-19 virus pandemic has not yet ended. Management stated that the Group experienced a significant impact as of the date of its financial position. These conditions may result in material uncertainty over the Group's future performance and may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern.

In an effort to maintain the continuity of the Group's business continuity, the Management will take the following strategic steps:

- Business transformation through a focus on core business, namely Manufacturing (Industry Equipment) and Assembly/Packager Subsystem Component Energy based on Diesel/Gas Engine;
- Increased TKDN (Level of Domestic Content);
- Development of superior products by increasing the innovation of oil and gas component equipment based on diesel and gas engines (Gas Compressor, Gas Generator, Air Compressor, Dehydration Unit, CO2 Removal, DEG, GEG and so on);
- Implementation of New Investment in Pasuruan, Assembly Line and Software Engineering);
- Expanding the market share of superior products with the cooperation of Manufacturing Clusters, OEMs and Strategic Partners;
- Optimizing/Disposal of Assets;
- Debt Restructuring.

Laporan keuangan konsolidasian terlampir disusun dengan asumsi bahwa Grup tetap akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dimana Grup dapat merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban dalam kondisi usaha normal.

Manajemen berkeyakinan bahwa langkah-langkah tersebut akan efektif dalam mengatasi dampak dari kondisi bisnis saat ini.

The accompanying consolidated financial statements have been prepared with the assumption that the Group will continue to operate as an entity with the ability to continue as a going concern, whereby the Group can realize its assets and settle its liabilities in the normal course of business.

Management believes that these measures will be effective in overcoming the impact of the current business conditions.

KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK

Tax Payment Policy

Perseroan berkontribusi kepada negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan, baik Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, maupun Pajak Pertambahan Nilai.

Pada tahun 2020, perseroan telah mencatatkan pembayaran pajak sebesar Rp 7.642 juta yang terdiri dari pajak kini sebesar Rp 413 juta dan pajak tangguhan sebesar Rp 7.229 juta.

The Company contributes to the state through the fulfillment of tax obligations, both Income Tax, Land and Building Tax, and Value Added Tax.

In 2020, the company has recorded tax payments of Rp. 7,642 million, which consists of current tax of Rp. 413 million and deferred tax of Rp. 7,229 million.

Tabel Pajak

Table of Tax

dalam Jutaan Rupiah | in Million Rupiah

Uraian Description	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Kini Current Tax	-	373	509	604	413
Pajak Tangguhan Deferred Tax	6.234	5.898	(6.500)	(5.595)	7.229
Total Pajak Total Tax	6.234	6.271	(5.991)	(4.990)	7.642

Informasi Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Atau Restrukturisasi

Sepanjang tahun 2020, PT BBI tidak melakukan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi serta tidak terdapat aktivitas terkait restrukturisasi utang dan modal.

Program Kepemilikan Saham

PT Boma Bisma Indra (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan tidak diperdagangkan di bursa efek manapun.

Hingga 31 Desember 2020, PT BBI (Persero) belum mencatatkan dan melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan.

Investment, Expansion, Divestment, Acquisition or Restructuring Information

Throughout 2020, PT BBI did not invest, expand, divest, acquire and there were no activities related to debt and capital restructuring.

Program Kepemilikan Saham

PT Boma Bisma Indra (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan tidak diperdagangkan di bursa efek manapun.

Hingga 31 Desember 2020, PT BBI (Persero) belum mencatatkan dan melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

PT Boma Bisma Indra (Persero) saat ini bukan dan belum menjadi perusahaan publik, sehingga tidak memiliki catatan mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Kebijakan Perusahaan Atas Transaksi Usaha Dengan Pihak Berelasi

BBI beserta entitas anak telah menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), yang mengatur mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Transaksi usaha antara Perseroan dengan Badan Usaha Milik Negara diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak yang berelasi sesuai PSAK 7 (Revisi 2010), yaitu:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; atau
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
- 2) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Satu entitas adalah ventura Bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - b. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang atau anggota keluarga terdekat yang memenuhi definisi pihak yang berelasi; atau

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

PT Boma Bisma Indra (Persero) saat ini bukan dan belum menjadi perusahaan publik, sehingga tidak memiliki catatan mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Company Policy on Business Transactions with Related Parties

BBI and its subsidiaries have implemented PSAK 7 (Revised 2010), which regulates "Related Party Disclosures". Business transactions between the Company and State-Owned Enterprises are treated as transactions with related parties according to PSAK 7 (Revised 2010), namely:

- 1) The person or the closest family member who has a relationship with the reporting entity if that person:
 - a. Have control or joint control over the reporting entity; or
 - b. Has significant influence over the reporting entity; or
 - c. Key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity
- 2) The person or the closest family member who has a relationship with the reporting entity if that person:
 - a. One entity is a Joint venture of a third entity and the other entity is an associate of a third entity.
 - b. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity.
 - c. An entity that is controlled or jointly controlled by a person or a close family member who meets the definition of a related party; or
 - d. A person or immediate family member who has significant influence over the entity or key management personnel of

d. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

the entity (or a parent of the entity).

Pihak Yang Bertransaksi Usaha Dan Sifat Hubungan Berelasi

BBI beserta entitas anak telah melakukan transaksi tertentu dengan beberapa pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2011) yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian.

Semua transaksi dan saldo dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan syarat dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Business Transaction Parties and Nature of Relationships

BBI and its subsidiaries have entered into certain transactions with several related parties in accordance with PSAK 7 (Revised 2011) which requires disclosure of related party relationships, transactions and balances, including commitments in the consolidated financial statements.

All transactions and balances with related parties, whether or not conducted under normal terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

No.	Pihak-pihak Berelasi Related parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Jenis Transaksi Type of Transaction
1	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Pemegang Saham Shareholders	Dividen Dividend
2	Bank Milik Pemerintah Government Owned Bank		
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	• Penempatan Giro dan Deposito Placement of Current Account and Deposit
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	• Penempatan Giro Placement of Current Account
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	• Penempatan Giro dan Deposito, Fasilitas Modal Kerja Placement of Current Account and Deposit, Working Capital Loan Facility
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	• Penempatan Giro Placement of Current Account
3	Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprises		
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan Account Receivables, Gross Amount from Customers, Accounts Payable, Other Payables, Revenue
	PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Uang Muka

	Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Pemesan, Pendapatan, Pembelian Account Receivables, Accounts Payable, Other Payables, Advance from Customers, Revenue, Purchase
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang usaha, Utang lain-lain Accounts receivable, Other Payables
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Pendapatan Account Receivables, Gross Amount from Customers, Revenue

No.	Pihak-pihak Berelasi Related parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Jenis Transaksi Type of Transaction
	PT Pindad (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Pendapatan Account Receivables, Gross Amount from Customers, Revenue
	PT Pabrik Gula Rajawali II	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja Account Receivables, Gross Amount from Customers
	PT Pembangunan Perusahaan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Pendapatan Account Receivables, Gross Amount from Customers, Revenue
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Account Receivables, Revenue
	PT PAL Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang usaha, Utang Usaha, Pendapatan Accounts receivable, Accounts Payable, Revenue
	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Pendapatan Account Receivables, Gross Amount from Customers, Revenue
	PT Superintending Company of Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Utang usaha Accounts Payable
	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Pembiayaan Dana Talangan Bailout Financing Activity
	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang Usaha, Uang Muka Pendapatan Account Receivables, Advance from Customers, Revenue
	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang usaha, pendapatan Accounts Receivable, Revenue
	PT Perkebunan Nusantara	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Uang Muka Pemesan, Pendapatan Accounts receivable, Gross Amount from Customers, Advance from Customers, Revenue
	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja

	Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Account Receivables, Gross Amount from Customers
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Uang Muka Pemesan, Pendapatan/ Gross Amount from Customers, Advance from Customers, Revenue
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Piutang usaha, Pendapatan Accounts receivable, Revenue
PT Bhandha Ghara Reksha (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Utang usaha Accounts Payable
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Utang usaha Accounts Payable
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Utang usaha Accounts Payable
PT Krakatau Steel (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Utang usaha Accounts Payable
PT Asuransi Jasa Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Utang Lain-lain Other Payable
PT Semen Tonasa	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas Company that is controlled by an entity which has significant influence	Piutang usaha Accounts receivable
PT Pupuk Kujang	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas Company that is controlled by an entity which has significant influence	Piutang usaha Accounts receivable
PT Puspetindo	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas Company that is controlled by an entity which has significant influence	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Utang Usaha, Uang Muka Pemesan, Pendapatan Accounts Receivables, Gross Amount from Customers, Accounts Payable
PT Pembangkit Jawa Bali	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas Company that is controlled by an entity which has significant influence	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Utang Usaha, Uang Muka Pemesan, Pendapatan Accounts Receivables, Gross Amount from Customers, Accounts Payable
PT Rekayasa Industri	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas Company that is controlled by an entity which has significant influence	Piutang usaha Accounts receivable
PT Indonesia Power	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas Company that is controlled by an	Piutang usaha, Pendapatan Accounts receivable, Revenue

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

	entity which has significant influence	
Koperasi Karyawan PT Bromo Steel Indonesia	Pemegang Saham Shareholder	Utang usaha, Pembelian Accounts Payable, Purchase
Direksi/ Director	Manajemen Kunci Key Personnel	Utang Lain-lain Other Payable

PT BBI (Persero) beserta entitas anak dalam melaksanakan transaksi usaha dengan perusahaan berelasi senantiasa dilakukan dalam batas kewajaran dan berdasarkan analisa risiko yang menyeluruh sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat benturan kepentingan dan memiliki asas sebagai berikut:

- 1) Legalitas, yaitu kegiatan transaksi usaha dengan Perseroan berelasi memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan sah secara hukum guna menghindari terjadinya pengingkaran pelaksanaan transaksi diantara kedua belah pihak.
- 2) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan
- 3) Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat
- 4) Akuntabilitas, yaitu dalam proses dan capaian hasil dari kegiatan transaksi usaha dengan perusahaan berelasi dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
- 5) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- 6) Kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- 7) Kepatuhan, yaitu kegiatan transaksi usaha dengan perusahaan berelasi harus dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan mekanisme kerjasama yang telah ditetapkan Bersama.
- 8) Keterbukaan, yaitu kegiatan transaksi usaha dengan perusahaan berelasi

PT BBI (Persero) and its subsidiaries in carrying out business transactions with related companies are always carried out within reasonable limits and based on a thorough risk analysis so that in its implementation there is no conflict of interest and has the following principles:

- 1) Legality, namely business transaction activities with related companies have legal force and are declared legally valid in order to avoid denial of transaction implementation between the two parties.
- 2) Transparency, namely openness in carrying out the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the company
- 3) Independence, namely a condition in which the company is managed professionally without any conflict of interest and influence from any party that is not in accordance with the laws and regulations and sound corporate principles.
- 4) Accountability, namely in the process and achievement of results from business transaction activities with related companies can be accounted for in accordance with the provisions of laws and regulations and applicable procedures.
- 5) Accountability, namely conformity in company management to laws and regulations and sound corporate principles
- 6) Fairness, namely conformity in the management of the company to the laws and regulations and sound corporate principles
- 7) Compliance, namely business transaction activities with related companies must be carried out consistently and based on the cooperation mechanism that has been jointly determined.
- 8) Transparency, namely business transaction activities with related companies are

dilaksanakan secara jelas dan terbuka meskipun memiliki batasan-batasan tertentu, sehingga terhindar dari rasa saling curiga dalam pengelolaan informasi dan pengelolaan keuangan.

- 9) Obyektivitas, yaitu kegiatan transaksi usaha dengan perusahaan berelasi dilaksanakan secara jujur, benar, lengkap dan tidak diskriminatif berdasarkan fakta atau bukti yang akurat.

Alasan Dilakukannya Transaksi Usaha

PT BBI (Persero) beserta entitas anak dalam setiap melaksanakan transaksi usaha dengan pihak berelasi berdasarkan pada prinsip dan alasan, antara lain:

- 1) Kegiatan transaksi usaha dibutuhkan dan memberikan keuntungan bagi perseroan dan pihak berelasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perseroan, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.
- 2) Mendorong terciptanya sinergi dengan pihak berelasi sebagai upaya Bersama untuk membangun ekonomi nasional.
- 3) Memberikan manfaat atau kegunaan yang seimbang bagi Perseroan dan pihak berelasi sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
- 4) Tingkat suku bunga yang diperoleh dari penempatan kas pada bank, dan deposito berjangka pada bank pihak berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga. Tingkat suku bunga deposito rata-rata tahun 2020 berkisar 0,50% - 1,00% per tahun untuk USD dan 5,00% - 8,00% per tahun untuk Rupiah.

Realisasi Transaksi Usaha dan Saldo dengan Pihak Berelasi Pada Periode Berjalan

PT BBI (Persero) mencatatkan seluruh realisasi transaksi usaha dengan pihak berelasi dan pihak ketiga pada periode tahun 2020. Meskipun demikian dalam laporan ini hanya disajikan transaksi usaha dengan pihak berelasi yang memiliki nominal diatas

carried out in a clear and open manner even though they have certain limitations, so as to avoid mutual suspicion in the management of information and financial management.

- 9) Objectivity, namely business transaction activities with related companies are carried out honestly, correctly, completely and non-discriminatory based on facts or accurate evidence.

Reasons for Conducting Business Transactions

PT BBI (Persero) and its subsidiaries in carrying out business transactions with related parties based on the principles and reasons, among others:

- 1) Business transaction activities are needed and provide benefits for the company and related parties in order to increase the capacity and capability of the company, so as to obtain good results.
- 2) Encouraging the creation of synergies with related parties as a joint effort to build the national economy.
- 3) Providing balanced benefits or uses for the Company and related parties so that the goals and objectives that have been set can be achieved optimally.
- 4) The interest rate obtained from the placement of cash in banks and time deposits with related party banks is comparable to the interest rate obtained from third party banks. The average deposit interest rates in 2020 ranged from 0.50% - 1.00% per annum for USD and 5.00% - 8.00% per annum for Rupiah.

Realization of Business Transactions and Balances with Related Parties in the Current Period

PT BBI (Persero) recorded all realizations of business transactions with related parties and third parties in the year 2020. However, this report only presents business transactions with related parties with a nominal value of over Rp. 1,000 million. In 2020, the magnitude

Rp1.000 juta. Pada tahun 2020, besaran realisasi transaksi usaha BBI dengan pihak berelasi dan Saldo dengan Pihak Berelasi pada periode berjalan adalah:

of the realization of BBI's business transactions with related parties and the Balance with Related Parties in the current period are:

Nama Pihak Name of Party	Jumlah (Rp/Juta) Total (Rp/Million)	%
Penjualan Revenue		% terhadap Jumlah Pendapatan % to Total Revenue
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik	48.163	19,96
PT Rekayasa Industri	46.281	19,18
PT Barata Indonesia (Persero)	13.394	5,55
PT Puspindo	7.031	2,91
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	7.813	3,24
PT Perkebunan Nusantara	7.885	3,27
PT Pertamina	1.611	0,67
Badan Tenaga Nuklir Nasional	135	0,06
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	91	0,04
PT Wijaya Karya (Persero)	63	0,03
Beban Keuangan Financial Cost		% terhadap Jumlah Beban Keuangan % to Total Financial Cost
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.510	59,21
PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero)	1.400	12,73
PT Asuransi Jasa Indonesia	937	8,52
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	301	2,73
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	164	1,49
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	130	1,18
Kas dan Stara Kas Cash and Cash Equivalents		% terhadap Jumlah Aset % to Total Assets
Rupiah :		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	28.931	3,16
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.191	0,78
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.292	0,14
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	159	0,02
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15	0,00
Dolar Amerika Serikat US Dollars :		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	302.524	0,03
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18.402	0,00
Deposito Time Deposits :		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.901	0,21
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5	0,00
Piutang Usaha Accounts Receivable		
PT Barata Indonesia (Persero)	8.391	0,92
PT Wijaya Karya (Persero)	5.049	0,55
PT Puspindo	4.466	0,49
PT Bukit Asam (Persero)	4.714	0,51
PT Perkebunan Nusantara (Persero)	4.411	0,48
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	835	0,09
PT Pembangkit Jawa Bali	832	0,09
PT Rajawali II	426	0,05
PT PLN (Persero)	366	0,04
PT Pertamina	350	0,04
PT Pindad (Persero)	285	0,03
PT Adhi Karya	173	0,02
PT Semen Tonasa	115	0,01

PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	94	0,01
PT Energy Management Indonesia (Persero)	59	0,01
PT PAL Indonesia (Persero)	50	0,01
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	2	0,00
Utang Usaha		
Accounts Payable		
Utang Subkontraktor		
Subcontractor's Debt		
PT Wijaya Karya (Persero)	14.857	1,88
PT PAL Indonesia (Persero)	5.893	0,74
PT Barata Indonesia (Persero)	2.363	0,30
PT Bhanda Ghara Rekso (Persero)	1.658	0,21
PT Puspetindo	386	0,05
PT Surveyor Indonesia (Persero)	79	0,01
PT Biro Klasifikasi Indonesia	54	0,01
PT Superintending Company of Indonesia (Persero)	40	0,01
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	29	0,00
Utang Material Lokal		
Local Material Debt		
PT Krakatau Steel (Persero)	2.394	0,30
Koperasi Karyawan PT Bromo Steel Indonesia	306	0,04
Utang Bank		
Bank Loans		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	84.140	10,63
Utang Lain-lain		
Other Accounts Payable		
PT Asuransi Jasa Indonesia	6.345	0,80
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	6.297	0,80
Direksi/ Director	438	0,06
Utang Lain-lain		
Other Accounts Payable		
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik	66.111	8,35
PT Puspetindo	45.169	5,71
PT Energy Management Indonesia (Persero)	72	0,01
Utang Dana Kreditur		
Other Creditor Debts		
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	101,704	12,85

Kebijakan Perusahaan Terkait dengan Mekanisme Review atas Transaksi

PT BBI (Persero) senantiasa melaksanakan kajian dan analisa atas setiap transaksi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak berelasi. Kajian dan analisa dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten seperti Komite Audit, Tim Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan pihak terkait lainnya. BBI juga melibatkan pihak ketiga (konsultan) guna mendapatkan hasil kajian dan analisa yang lebih komprehensif.

Company Policy Related to Transaction Review Mechanism

PT BBI (Persero) always carries out studies and analysis of every transaction in conducting business transactions with related parties. The study and analysis is carried out thoroughly by involving competent parties such as the Audit Committee, the Procurement Team of Goods and/or Services, and other related parties. BBI also involves third parties (consultants) to obtain more comprehensive study and analysis results.

Kebijakan Perusahaan Terkait dengan Mekanisme Review atas Transaksi

PT BBI (Persero) senantiasa melaksanakan kajian dan analisa atas setiap transaksi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak berelasi. Kajian dan analisa dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten seperti Komite Audit, Tim Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan pihak terkait lainnya. BBI juga melibatkan pihak ketiga (konsultan) guna mendapatkan hasil kajian dan analisa yang lebih komprehensif.

Company Policy Related to Transaction Review Mechanism

PT BBI (Persero) always carries out studies and analysis of every transaction in conducting business transactions with related parties. The study and analysis is carried out thoroughly by involving competent parties such as the Audit Committee, the Procurement Team of Goods and/or Services, and other related parties. BBI also involves third parties (consultants) to obtain more comprehensive study and analysis results.

Pemenuhan Terkait Peraturan Dan Ketentuan Terkait

PT BBI (Persero) telah menetapkan kebijakandan memiliki komitmen untuk melakukan penundaan terhadap transaksi usaha dengan pihak lain apabila terindikasi kecurangan dan/atau penyimpangan serta bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Setiap transaksi usaha yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator maupun perseroan.

Fulfillment of Related Regulations and Provisions

PT BBI (Persero) has established policies and is committed to delaying business transactions with other parties if there are indications of fraud and/or irregularities as well as contrary to the principles of good corporate governance. Every business transaction carried out must comply with the rules and regulations set by the regulator and the company.

KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Significant Accounting Policies

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan 2020 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The following are the accounting policies applied in the preparation of the 2020 financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants (DSAK - IAI).

Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on the going concern assumption and on the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows. The basis of measurement in the preparation of these consolidated financial statements is the cost concept, except for certain accounts which are based on other measurements as described in the respective accounting policies. Cost is generally based on the fair value of the consideration given in the acquisition of the asset.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah which is the Group's functional currency. Each entity in the Group sets its own functional currency and items in the financial statements of each entity are measured in that functional currency.

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada/atau setelah 1 Januari 2020 yaitu:

- 1) PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- 2) PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- 3) PSAK 73: "Sewa";
- 4) PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";
- 5) Amandemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- 6) PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- 7) ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- 8) PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- 9) PSAK 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- 10) PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- 11) ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan";
- 12) ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- 13) ISAK 36: "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa";
- 14) PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- 15) Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup

Statements and Interpretations of New and Revised Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are revisions, amendments and adjustments to Financial Accounting Standards (SAK) as well as interpretations of SAKs effective for the financial year starting on/or after January 1, 2020, namely:

- 1) PSAK 71: "Financial Instruments";
- 2) PSAK 72: "Revenue from Contracts with Customers";
- 3) PSAK 73: "Lease";
- 4) PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contracts on Implementing PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts";
- 5) Amendments to PSAK 15: "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures";
- 6) PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instruments on the Features of Accelerated Repayment with Negative Compensation";
- 7) ISAK 35: "Presentation of Financial Statements of Non-Profit-Oriented Entities";
- 8) PSAK 1 (Annual Amendments and Adjustments 2019): "Presentation of Financial Statements concerning the Title of Financial Statements";
- 9) PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- 10) PSAK 102 (Revised 2019): "Murabaha Accounting";
- 11) ISAK 101: "Recognition of Tangguh Murabahah Revenue Without Significant Risks related to Inventory Ownership";
- 12) ISAK 102: "Impairment of Murabahah Receivables";
- 13) ISAK 36: "Interpretation of Interaction between Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Lease";
- 14) PPSAK 13: "Revocation of PSAK 45: Financial Reporting of Non-Profit Entities";
- 15) Amendment to PSAK 71, Amendment to PSAK 55, Amendment to PSAK 60, concerning Reform of Interest Rate Reference.

Except for the changes described below, the implementation of these standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and did not have a material

dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

- 1) PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.
- 2) PSAK 65PSAK 72 menggantikan PSAK 23: "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).
- 3) PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa yang aset dasarnya nilai rendah.

Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1d.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan entitas anak yang secara langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal di mana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus

impact on the consolidated financial statements in the current or prior year.

- 1) PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the valuation of the business model and contractual cash flows, recognition and measurement of allowance for impairment losses on financial instruments using the expected credit loss model, which replaces the incurred credit loss model and provides a simpler approach to hedge accounting.
- 2) PSAK 65 PSAK 72 replaces PSAK 23: "Revenue" and introduces a 5 (five) step revenue recognition model and determines revenue recognition, which occurs when control over goods has been transferred or when (or during) services are rendered (performance obligations have been fulfilled).
- 3) PSAK 73 replaces PSAK 30: "Leases" which requires the Group as lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to lease transactions previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases where the underlying asset is valued low.

Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries as mentioned in Note 1d.

The Group's financial statements include the results of operations, cash flows, assets and liabilities of the Company and its subsidiaries which are directly controlled by the Company. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until the date that control expires.

The parent entity prepares the consolidated financial statements using the same accounting policies for transactions and other events in similar circumstances. All intra-group transactions, balances, profits, expenses and

kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh, untuk mencerminkan Posisi Keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak.

Selisih antara jumlah di mana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

cash flows related to inter-group transactions are eliminated in full, to reflect the Financial Position as a single business entity.

The Group attributes profit or loss and each component of other comprehensive income to owners of the parent and non-controlling interests even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interests in equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owners' equity of the parent.

Changes in the parent's interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners).

When the proportion of equity held by non-controlling interests changes, the Group adjusts the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect the changes in their relative ownership interests in the subsidiaries.

The difference between the amount by which the non-controlling interest is adjusted and the fair value of the amount received or paid is recognized directly in equity and attributed to owners of the parent.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TAHUN 2020

Corporate Policy in 2020

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah berpengaruh besar pada bisnis Perseroan, sehingga target Kinerja 2020 tidak tercapai bahkan mengalami penurunan. Dalam mengatasi kondisi ini, Perseroan menerapkan strategi bertahan ditengah Pandemi Covid-19. Dalam rangka mencapai target RKAP tahun 2020 Perseroan telah menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan cash flow.
 - a. Prioritas pembayaran kepada vendor untuk mendapatkan uang tunai
 - b. Mengajukan insentif pajak
 - c. Negosiasi ulang untuk vendor agar menyetujui TOP baru
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan kredit di BNI termasuk permintaan untuk mengurangi bunga
 - e. Mengurangi jumlah karyawan kontrak sementara
 - f. Melakukan penagihan piutang
 - g. Menawarkan jadwal proyek yang kompetitif, kualitas, dan harga untuk proyek-proyek baru
- 2) Boost demand dengan cara renegosiasi dengan pemilik untuk kontrak yang ada dengan mata uang IDR sementara pengadaan materialnya dari luar negeri / impor.
- 3) Support key suppliers dengan menjaga komunikasi terbuka dengan supplier
- 4) Secure internal product capacity yaitu mempertahankan keterikatan yang sudah bagus dengan karyawan.
- 5) Pembentukan tim khusus satuan tugas Covid19 untuk melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid19 di lingkungan PT BBI.
- 6) Kebijakan social distancing antara lain:
 - a. Menerapkan program work from home dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.
 - b. Melakukan virtual meeting agar proses bisnis perusahaan berjalan dengan lancar.
 - c. Pembatasan akses langsung dengan stakeholder
- 7) Penyusunan SOP karyawan dan tamu dalam

The Covid-19 pandemic that has hit the world has had a major impact on the Company's business, so the 2020 Performance target was not achieved and even experienced a decline. In overcoming this condition, the Company implemented a strategy to survive in the midst of the Covid-19 Pandemic. In order to achieve the 2020 RKAP target, the Company has established the following policies:

- 1) Maintain cash flow.
 - a. Priority payments to vendors to get cash
 - b. Applying for tax incentives
 - c. Re-negotiation for vendors to agree on new TOP
 - d. Submitting an application for a credit extension at BNI including a request to reduce interest
 - e. Reducing the number of temporary contract employees
 - f. Doing debt collection
 - g. Offer competitive project schedule, quality and price for new projects
- 2) Boost demand by renegotiating with the owner for existing contracts in IDR currency while procuring materials from abroad/imports.
- 3) Support key suppliers by maintaining open communication with suppliers
- 4) Secure internal product capacity, namely maintaining a good relationship with employees.
- 5) Formation of a special team for the Covid19 task force to handle and prevent the spread of the Covid-19 virus within PT BBI.
- 6) Social distancing policies include:
 - a. Implement a work from home program in order to maintain the health and safety of employees.
 - b. Conduct virtual meetings so that the company's business processes run smoothly.
 - c. Restrictions on direct access with stakeholders
- 7) Preparation of SOP for employees and guests in entering the company environment.
- 8) Program of cost efficiency (cost cutting).
- 9) Serve priority and loyal customers including



- memasuki lingkungan perusahaan.
- 8) Program efisiensi biaya (cost cutting).
 - 9) Melayani priority and loyal customer diantaranya klaster industri manufaktur, Pertamina, BUMN Karya, dan Rekayasa Industri.
 - 10) Bermitra dengan priority supplier untuk membentuk kemitraan selektif, dan untuk mendapatkan bahan-bahan yang sangat kritis serta sulit didapat juga melakukan negosiasi harga yang lebih rendah melalui pengadaan bersama dan pembagian risiko.
- manufacturing industry clusters, Pertamina, BUMN Karya, and Industrial Engineering.
- 10) Partner with priority suppliers to form selective partnerships, and to procure highly critical and hard-to-find materials as well as negotiate lower prices through co-procurement and risk sharing.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Business Continuous Information

Pada tahun 2020, Grup mengalami kerugian sebesar Rp73.458.456.772 dan akumulasi defisit pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp684.145.308.831 atau (201%) dari modal disetor. Disamping itu, rasio likuiditas Grup sebesar 60% dimana jumlah aset lancar Grup sebesar Rp366.123.737.812 tidak cukup untuk menutupi kewajiban lancar Grup sebesar Rp613.619.035.720.

Selain itu, sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, pandemi virus Covid-19 masih belum berakhir, Manajemen menyatakan bahwa Grup mengalami dampak signifikan per tanggal posisi keuangan. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian material atas kinerja Grup dimasa mendatang dan dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Sebagai upaya untuk tetap dapat menjaga kesinambungan kelangsungan usaha Grup, Manajemen akan melakukan langkah strategis sebagai berikut:

- Transformasi bisnis melalui fokus terhadap core business yaitu Manufacture (Industry Equipment) dan Assembly/ Packager Subsystem Component Energy yang berbasis Diesel/ Gas Engine;
- Peningkatan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri);
- Pengembangan produk unggulan yaitu dengan cara meningkatkan inovasi peralatan komponen migas yang berbasis diesel dan gas engine (Gas Compressor, Gas Generator, Air Compressor, Dehydration Unit, CO2 Removal, DEG, GEG dan sebagainya);
- Pelaksanaan Investasi Baru di Pasuruan, Assembly Line dan Software Engineering);
- Memperluas Pangsa Pasar produk unggulan dengan kerjasama Klaster Manufaktur, OEM dan Partner Strategis;
- Melakukan Optimalisasi/ Pelepasan Aset;
- Restrukturisasi Utang.

Laporan keuangan konsolidasian terlampir disusun dengan asumsi bahwa Grup tetap

In 2020, the Group experienced a loss of Rp73,458,456,772 and an accumulated deficit as of December 31, 2020 of Rp684,145,308,831 or (201%) of the paid-in capital. In addition, the Group's liquidity ratio is 60% where the Group's total current assets of Rp366,123,737,812 are not sufficient to cover the Group's current liabilities of Rp613,619,035,720.

In addition, as of the issuance date of the consolidated financial statements, the Covid-19 virus pandemic has not yet ended. Management stated that the Group experienced a significant impact as of the date of its financial position. These conditions may result in material uncertainty over the Group's future performance and may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern.

In an effort to maintain the continuity of the Group's business continuity, the Management will take the following strategic steps:

- Business transformation through a focus on core business, namely Manufacturing (Industry Equipment) and Assembly/Packager Subsystem Component Energy based on Diesel/Gas Engine;
- Increased TKDN (Level of Domestic Content);
- Development of superior products by increasing the innovation of oil and gas component equipment based on diesel and gas engines (Gas Compressor, Gas Generator, Air Compressor, Dehydration Unit, CO2 Removal, DEG, GEG and so on);
- Implementation of New Investment in Pasuruan, Assembly Line and Software Engineering);
- Expanding the market share of superior products with the cooperation of Manufacturing Clusters, OEMs and Strategic Partners;
- Optimizing/Disposal of Assets;
- Debt Restructuring.

The accompanying consolidated financial statements have been prepared with the

akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dimana Grup dapat merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban dalam kondisi usaha normal.

Manajemen berkeyakinan bahwa langkah-langkah tersebut akan efektif dalam mengatasi dampak dari kondisi bisnis saat ini.

assumption that the Group will continue to operate as an entity with the ability to continue as a going concern, whereby the Group can realize its assets and settle its liabilities in the normal course of business.

Management believes that these measures will be effective in overcoming the impact of the current business conditions.

TINJAUAN KEBERADAAN POSISI PERUSAHAAN

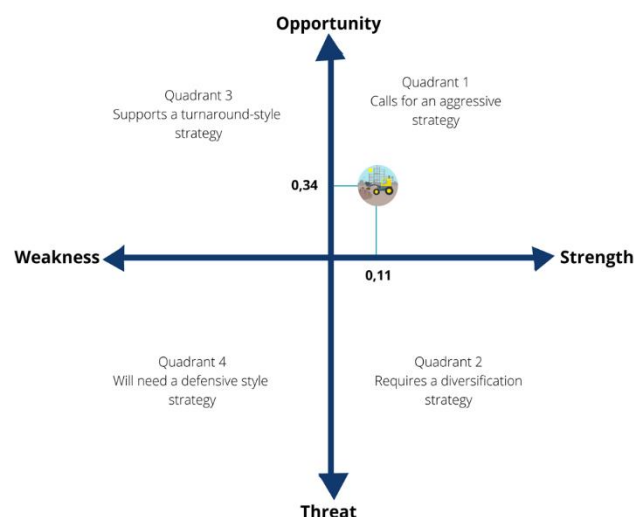
Overview Of The Company's Position

BBI pada tahun 2020 telah mengidentifikasi dan menganalisa kembali peluang dan tantangan ke depan dari sisi eksternal serta kekuatan dan kelemahan dari sisi internal.

Dari hasil analisis dan identifikasi tersebut diketahui peluang dan kekuatan Perseroan lebih besar dari ancaman dan kelemahan, sehingga Perseroan berada pada posisi Expansion (strategi ofensif) dengan sejumlah pembenahan internal yang terus dilakukan. Strategi ofensif ini juga berarti perseroan pada tahun terletak pada kuadran 1 (Calls for an aggressive strategy) yang mengartikan bahwa perusahaan harus fokus pada strategi-strategi yang agresif dalam pencapaian order guna memaksimalkan peluang yang ada dengan kekuatan yang dimiliki.

BBI in 2020 has identified and reanalyzed the opportunities and challenges ahead from the external side as well as the strengths and weaknesses from the internal side.

From the results of the analysis and identification, it is known that the Company's opportunities and strengths are greater than threats and weaknesses, so that the Company is in an Expansion position (offensive strategy) with a number of internal improvements that are continuously being made. This offensive strategy also means that the company is in quadrant 1 (Calls for an aggressive strategy) which means that the company must focus on aggressive strategies in achieving orders in order to maximize the opportunities that exist with its strengths.



PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Fulfillment of Related Rules And Conditions

Setiap transaksi yang dilakukan oleh perseroan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh perseroan maupun regulator antara lain:

Undang-undang :

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
3. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Perturan Presiden :

1. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan dan Keputusan Menteri :

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
2. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
3. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-102/M-BUMN/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara

Every transaction carried out by the company is in accordance with the rules and regulations set by the company and the regulator, including:

Constitution :

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
2. Law no. 13 of 2003 concerning Employment
3. Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises
4. Law no. 17 of 2003 concerning State Finance

Government regulations :

1. Government Regulation No. 64 of 1999 concerning Amendments to Government Regulation no. 24 of 1998 concerning the Company's Annual Financial Information
2. Government Regulation no. 12 of 1998 concerning Limited Liability Companies (Persero)
3. Government Regulation no. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises.

Presidential Decree:

1. Presidential Regulation No. 80 of 2003 concerning Guidelines for the Implementation of Government Procurement of Goods/Services

Ministerial Regulations and Decrees:

1. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises
2. Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises No. KEP-101/MBU/2002 concerning Preparation of Work Plans and Budgets for State-Owned Enterprises
3. Decree of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. KEP-102/M-BUMN/2002 concerning Preparation of Long-Term Plans for State-Owned Enterprises

4. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/M-BUMN/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

4. Decree of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. KEP-100/M-BUMN/2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises.

PERNYATAAN ATAS PENGECUALIAN PENGUNGKAPAN PELAPORAN

Statement Of The Exclusion Of Reporting Disclosure

Sehubungan dengan keberadaan BBI sebagai Perseroan yang bergerak di bidang industri manufaktur dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia (100%) dan tidak menjual sahamnya kepada pasar modal, dengan ini menyatakan bahwa perseroan tidak memiliki dan melaksanakan beberapa hal, sehingga tidak disajikan dalam Laporan Tahunan 2020 sebagai berikut:

1. Kronologi Pencatatan Saham
2. Kepemilikan saham karyawan dan manajemen (ESOP/MSOP)
3. Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

In connection with the existence of BBI as a company engaged in the manufacturing industry where all of its shares are owned by the government of the Republic of Indonesia (100%) and do not sell their shares to the capital market, hereby declare that the company does not own and carry out several things, so it is not presented in the Annual Report 2020 as follows:

1. Chronology of Share Listing
2. Employee and management share ownership (ESOP/MSOP)
3. Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition or Debt/Capital Restructuring

PENUTUP

Closing

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Direksi dan segenab jajarannya yang secara maksimal telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan sehingga dapat bertahan selama tahun 2020 ditengah pandemic Covid-19.

Dewan komisaris menaruh harapan agar Perseroan dan anak usaha dapat terus tumbuh. Semoga pencapaian kinerja tahun 2020 menjadi pemacu semangat seluruh pemangku kepentingan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

The Board of Commissioners would like to thank the Board of Directors and all of their staff who have carried out their duties and responsibilities optimally to realize the Company's vision and mission so that it can survive in 2020 amidst the Covid-19 pandemic.

The board of commissioners hopes that the Company and its subsidiaries can continue to grow. We hope that the achievement of performance in 2020 will motivate all stakeholders to achieve even better performance in the future.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility





06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM MENERAPKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Company Commitment in Implementing Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan pondasi bagi terbentuknya sistem, struktur, dan kultur perusahaan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diyakini mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan corporate value dan kepercayaan investor, serta daya saing perusahaan secara berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan di atas, tidak ada lain kecuali komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada semua organ dan jenjang organisasi secara terencana, terarah, dan terukur sedemikian rupa sehingga penerapan GCG dapat berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan praktik-praktik terbaik penerapan GCG.

Sebagai BUMN, Boma Bisma Indra (Persero) berkomitmen menerapkan dan mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan untuk mengembangkan dan memperkuat kerangka tata kelola perusahaan yang baik. Menciptakan Perseroan profesional, transparan, dan efisien dengan peningkatan keterbukaan, akuntabilitas, adil dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang bertanggung jawab. Prinsip GCG sejauh ini diterapkan secara menyeluruh dalam sistem tata kerja perusahaan yang wajib dipenuhi seluruh insan BBI. Penerapan GCG di BBI tidak lagi sebagai sesuatu yang bersifat mandatory melainkan sudah menjadi budaya dan kebutuhan dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari mulai dari manajemen puncak hingga staf. Komitmen BBI untuk menjadi perusahaan yang bersih dan bebas korupsi sebagai suatu rangkaian Road Map BUMN Bersih terangkum dalam rangkaian program-program kerja compliance seperti, implementasi Whistleblowing System (WBS), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

The implementation of Good Corporate Governance is the foundation for the formation of a system, structure and corporate culture that is adaptive to changes in the increasingly competitive business environment and is able to build a reliable system of internal control and risk management. The implementation of Good Corporate Governance is believed to be able to strengthen the company's competitive position, manage resources and risks more efficiently and effectively, increase corporate value and investor confidence, as well as the company's competitiveness on an ongoing basis.

To achieve the above objectives, there is nothing but a high commitment to implement the principles of GCG at all organs and levels of the organization in a planned, directed, and measurable manner so that the implementation of GCG can take place consistently and in accordance with the best practices of GCG implementation.

As a BUMN, Boma Bisma Indra (Persero) is committed to implementing and implementing GCG in a sustainable manner to continue to develop and strengthen the framework of good corporate governance. Creating a professional, transparent, and efficient Company by increasing openness, accountability, fairness and reliability through responsible business management. So far, the principles of GCG have been applied in a comprehensive manner in the company's work system that must be fulfilled by all BBI personnel. The implementation of GCG at BBI is no longer mandatory but has become a culture and a necessity in carrying out daily business activities from top management to staff. BBI's commitment to become a clean and corruption-free company as a series of Clean BUMN Road Map is summarized in a series of compliance work programs such as the implementation of the Whistleblowing System (WBS), the State Administrators Wealth Report (LHKPN), and the Gratification Control Unit (UPG).

Komitmen Perseroan untuk senantiasa mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan tersebut, didukung dengan adanya infrastruktur berikut ini :

- Visi, misi, dan tata nilai Perseroan yang jelas dan realistis yang dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
- Pedoman Good Corporate Governance;
- Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual);
- Penetapan pedoman perilaku (code of conduct) yang dilakukan secara konsisten dan membudaya;
- Pedoman Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System) yang kuat;
- Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran;
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
- Internal Audit Charter
- Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan;
- Sistem dan Prosedur (Administrative/ Operating Procedure)

Dasar Penerapan Corporate Governance

Penerapan atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Benar (Good Corporate Governance) mengacu kepada beberapa ketentuan yang berlaku, diantaranya:

- Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan

The Company's commitment to continuously implement GCG in a sustainable manner is supported by the following infrastructure:

- Clear and realistic vision, mission, and values of the Company which are evaluated periodically by the Board of Commissioners and Board of Directors;
- Good Corporate Governance Guidelines;
- Guidelines for the Board of Directors and the Board of Commissioners (Board Manual);
- Determination of the code of conduct that is carried out consistently and culturally;
- Strong Internal Control System Guidelines;
- Implementation of the Violation Reporting System;
- Gratification Control Guidelines;
- Internal Audit Charter
- Sustainable social and environmental responsibility programs;
- System and Procedure (Administrative/ Operating Procedure)

Fundamentals of Corporate Governance Implementation

The implementation of Good Corporate Governance refers to several applicable provisions, including:

- Law No. 19 of 2003 dated June 19, 2003 concerning State-Owned Enterprises
- Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
- Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises
- Regulation of the Minister of BUMN Number: PER-09/MBU/2012 concerning amendments to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011
- Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN,

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Social Corporate Social Responsibility

- Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN,
- g. Keputusan Menteri BUMN Kep-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara
 - h. Anggaran Dasar PT Boma Bisma Indra (Persero)
 - g. Decree of the Minister of SOEs Kep-117/MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises
 - h. Articles of Association of PT Boma Bisma Indra (Persero).

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perusahaan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek bisnis dan operasional dengan mengacu pada pemenuhan lima prinsip dasar GCG yaitu:

1. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Responsibilitas

Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Independensi

Keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Principles of Good Corporate Governance

The company implements GCG principles in every aspect of its business and operations by referring to the fulfillment of the five basic principles of GCG, namely:

1. Transparency

Openness in carrying out the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the company.

2. Accountability

Clarity of function, implementation and accountability of organs so that the management of the company is carried out effectively.

3. Responsibility

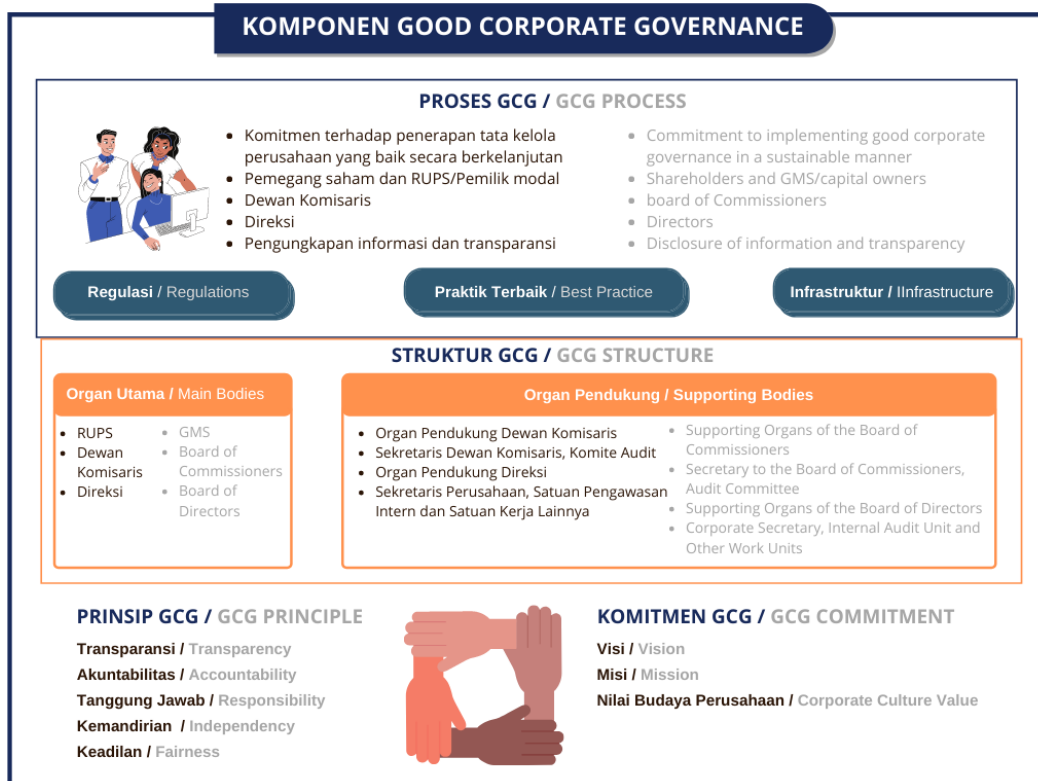
Conformity in the management of the company to the laws and regulations and sound corporate principles.

4. Independence

The condition of the company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations and sound corporate principles.

5. Fairness and Equality

Justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and laws and regulations.



Governance Framework

Komitmen Perseroan dalam menerapkan corporate governance diwujudkan dalam Corporate Governance Framework sebagai berikut:

Governance Framework

The Company's commitment to implementing corporate governance is manifested in the Corporate Governance Framework as follows:

GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME
<ol style="list-style-type: none"> Organ Utama Organ Pendukung: <ol style="list-style-type: none"> Organ Pendukung Dekom Organ Pendukung Direksi Infrastruktur: <ol style="list-style-type: none"> Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) Board Manual (Pedoman Direksi & Komisaris) Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code Of Conduct) di Lingkungan Pedoman Sistem Pengendalian Interen Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle Blowing System (WBS) Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pedoman Kerja Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) Pakta Integritas Kebijakan dan Prosedur Lain 	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan <ol style="list-style-type: none"> Penerapan atas Sistem, Pedoman dan/atau Prosedur yang lain Pemenuhan Hak Pemegang Saham dan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham Pemenuhan hak para Pemangku Kepentingan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Review Assesment Audit 	<ol style="list-style-type: none"> Memaksimalkan Tata Nilai Perusahaan sehingga memiliki daya saing yang kuat Mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan, efektif dan efisien Mendorong Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab soasil Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan hidup
<ol style="list-style-type: none"> Main Organs Supporting Organs: <ol style="list-style-type: none"> BoC Supporting Organs BoD Supporting Organs Infrastructure: 	<ol style="list-style-type: none"> Implementation <ol style="list-style-type: none"> Application of other Systems, Guidelines and/or Procedures Fulfillment of Shareholders' Rights and equal treatment to all shareholders 	<ol style="list-style-type: none"> Maximizing the Company's Values so that it has strong competitiveness Encouraging professional, transparent, effective and efficient Company management Encouraging the Company's organs in making decisions and carrying out

- a. Good Corporate Governance (GCG) Guidelines
- b. Board Manual (BoD & BoC Guidelines)
- c. Code of Conduct
- d. Internal Control System Guideline
- e. Whistle Blowing System
- f. Gratification Control System
- g. Internal Audit Charter
- h. Integrity Charter
- i. Policies and Procedures

- c. Fulfillment of the rights of the Stakeholders
- d. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners
- e. Transparency of financial and non-financial conditions
- 2. Review
- 3. Assessment
- 4. Audit

actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibility to stakeholders and environmental sustainability

Governance Process

Proses pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Perseroan dilakukan secara berkesinambungan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, termasuk Penilaian Efektivitas Pelaksanaan GCG.

Dalam menerapkan prinsip tata kelola dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang akan mempengaruhi pengontrolan serta pengarahan di perusahaan.

Governance Process

The process of implementing the Company's GCG principles is carried out continuously as a form of accountability to Shareholders and Stakeholders, including Assessment of the Effectiveness of GCG Implementation.

In applying the principles of good governance and achieving the goals that have been set, a series of processes, habits, policies, and rules are carried out that will affect the control and direction in the company.

Governance Outcome

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari governance outcome yang telah diperoleh. Perseroan dan para pemangku kepentingan telah mendapatkan manfaat dari penerapan GCG dengan dicapainya kinerja keuangan maupun operasional yang baik di tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penjualan mencapai: Rp 241.328 Juta
2. Laba komprehensif tahun berjalan mencapai: Rp 75.685 juta.
3. Kontrak Dihadapi mencapai: Rp 871.001 juta
4. Kontrak Baru mencapai: Rp 660.873 juta

Di samping itu, hasil dari implementasi GCG juga terlihat dari kepercayaan pihak eksternal kepada Perseroan, antara lain:

1. Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: PROPER Peringkat BIRU oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk periode 2019 – 2020
2. Penghargaan dari PT Pembangkit Jawa Bali dalam Laporan Kinerja Supplier dengan kategori: GOOD

Governance Outcome

The effectiveness of GCG implementation is reflected in the governance outcomes that have been obtained. The Company and its stakeholders have benefited from the implementation of GCG by achieving good financial and operational performance in 2020 as follows:

1. Sales reached: IDR Rp 241,328 million
2. Comprehensive on going profit reached: Rp 75.685 million
3. Contracts Faced reached: Rp. 871.001 million
4. New Contracts reached: Rp 660.873 billion

In addition, the results of the implementation of GCG can also be seen from the trust of external parties to the Company, including:

1. Award for Company Performance Rating Program in Environmental Management: PROPER BLUE Rating by the Ministry of Environment for the period 2019 – 2020
2. Award from PT Pembangkit Jawa Bali in the Supplier Performance Report with the category: GOOD

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa bisnis BBI mampu menarik apresiasi public dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk Stakeholder.

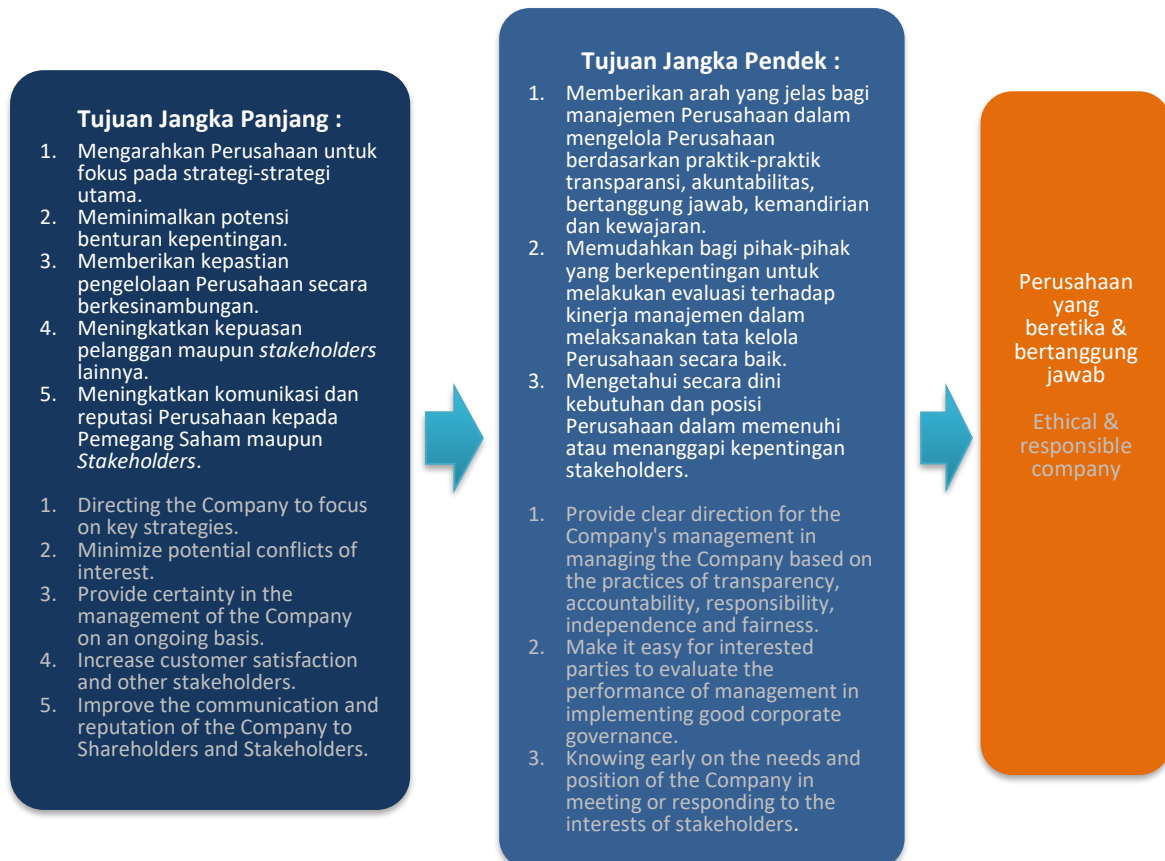
This award is proof that BBI's business is able to attract public appreciation and is committed to providing the best service to stakeholders.

Road Map Tatakelola Perusahaan

Berikut gambaran tahapan penerapan GCG Perseroan dengan tujuan menjadi perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab.

Corporate Governance Road

Map The following describes the stages of implementing the Company's GCG with the aim of becoming an ethical and responsible company.



Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance Quality improvements

Komitmen dan konsistensi akan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik memperlihatkan peningkatan kualitas Perseroan dari tahun ke tahun baik dalam kinerja keuangan maupun operasional. Tidak menjadi puas akan pencapaian yang diperoleh, PT BBI terus melakukan berbagai upaya dan kegiatan untuk senantiasa menyempurnakan penerapan GCG yang telah dilakukan sebelumnya, agar dapat menciptakan budaya dan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BBI meyakini bahwa pelaksanaan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya Perusahaan, memaksimalkan nilai Perusahaan dalam jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan para stakeholders.

BBI mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek bisnis dan operasional dengan mengacu pada pemenuhan lima prinsip dasar GCG yaitu.

1. Transparansi

BBI bersifat terbuka dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengutamakan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Informasi mengenai Perusahaan dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas melalui website Perusahaan. yaitu <http://www.ptbbi.co.id>. Informasi tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, visi, misi, tata nilai perusahaan, strategi perusahaan, dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan. Meskipun demikian, pelaksanaan prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban

Commitment and consistency to the implementation of Good Corporate Governance shows an increase in the quality of the Company from year to year in both financial and operational performance. Not being satisfied with the achievements obtained, PT BBI continues to make various efforts and activities to continuously improve the GCG implementation that has been carried out previously, in order to create a sustainable culture and added value for the interests of shareholders and other stakeholders, in the short and long term.

BBI believes that the consistent implementation of GCG will strengthen the Company's position in facing business competition, increase effectiveness and efficiency in managing the Company's resources, maximize the value of the Company in the long term and increase the trust of stakeholders.

BBI implements the principles of GCG in every aspect of business and operations by referring to the fulfillment of the five basic principles of GCG, namely.

1. Transparency

BBI is open in carrying out the decision-making process and prioritizes transparency in disclosing material and relevant information about the Company. Information about the Company can be easily accessed by stakeholders and the wider community through the Company's website. namely <http://www.ptbbi.co.id>. The information includes, but is not limited to, the vision, mission, corporate values, corporate strategy, and implementation of Good Corporate Governance (GCG), and important events that may affect the condition of the Company. Nevertheless, the implementation of the principle of transparency does not reduce the obligation to comply with the provisions on Company confidentiality.

untuk memenuhi ketentuan tentang kerahasiaan Perusahaan.

2. Akuntabilitas

BBI memiliki pedoman pengelolaan perusahaan yang mengatur dengan jelas pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap fungsi / jabatan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Untuk menegakkan prinsip akuntabilitas, Perusahaan memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan secara efektif, memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran sesuai dengan sasaran usaha, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment). Seluruh komponen Perusahaan wajib berpegang pada etika usaha dan etika kerja (code of conduct) yang berlaku di Perusahaan.

3. Responsibilitas

Setiap pekerja harus melaksanakan tugas secara efektif dan bertanggungjawab sesuai pedoman pengelolaan perusahaan. Prinsip responsibilitas juga diimplementasikan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan serta melaksanakan tanggung jawab sosial untuk menjaga kesinambungan usaha jangka panjang.

4. Independensi

BBI memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan dilakukan secara independen, bebas dari benturan kepentingan dan tanpa pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun agar pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif semata-mata untuk kepentingan Perusahaan yang telah sesuai dengan strategi perusahaan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

BBI menerapkan perlakuan wajar dan adil dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan serta standar etika yang pantas dalam dunia usaha. Hubungan dengan pekerja dijaga dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pekerja dalam berkarir dan

2. Accountability

BBI has corporate management guidelines that clearly regulate the implementation and accountability of each function/position so that the management of the Company is carried out effectively. To enforce the accountability principle, the Company ensures that the internal control system runs effectively, has performance measures for all levels in accordance with business objectives, and has a reward and punishment system. All components of the Company must adhere to the business ethics and work ethics (code of conduct) that apply in the Company.

3. Responsibility

Every employee must carry out their duties effectively and responsibly according to company management guidelines. The principle of responsibility is also implemented by complying with laws and regulations, company regulations and implementing social responsibility to maintain long-term business sustainability.

4. Independence

BBI ensures that the management of the Company is carried out independently, free from conflicts of interest and without influence from any party that is not in accordance with the laws and regulations and sound corporate principles. The Company avoids domination by any party so that decision making is carried out objectively solely for the benefit of the Company which is in accordance with the company's strategy.

5. Fairness and Equality

BBI applies fair and equitable treatment in fulfilling the rights of stakeholders as long as it meets the laws and regulations and appropriate ethical standards in the business world. Relations with employees are maintained by providing equal opportunities to employees in their careers and carrying out their duties

melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan jender. Perseroan telah menetapkan sejumlah standar etika perilaku dan bisnis untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Untuk mendukung upaya tersebut, Perseroan membentuk governance structure, sebuah kerangka kerja tata kelola perusahaan untuk mengatur hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta para pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengacu pada kerangka kerja ini, Perseroan menjalankan Governance Process dan meraih Governance Outcome yang mendukung kesehatan finansial dan pencapaian tujuan Perusahaan sesuai aspirasi pemangku kepentingan.

professionally regardless of ethnicity, religion, class, and gender. The Company has established a number of ethical standards of conduct and business to protect the interests of shareholders and stakeholders. To support these efforts, the Company established a governance structure, a corporate governance framework to regulate the relationship between the Company and its Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other stakeholders. By referring to this framework, the Company implements the Governance Process and achieves a Governance Outcome that supports financial health and the achievement of the Company's goals in accordance with the aspirations of stakeholders.

BBI memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar tata kelola yang baik dan berupaya keras menerapkan GCG secara berkesinambungan lebih dari sekedar kepatuhan terhadap standar dan peraturan perundangan, dimana dalam implementasi GCG BBI mengadopsi standar ketentuan Kementerian Negara BUMN.

BBI has a commitment to always apply good governance standards and strives to implement GCG in a sustainable manner more than just compliance with standards and laws and regulations, where in implementing GCG BBI adopts the standards stipulated by the Ministry of State-Owned Enterprises.

BBI meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan pondasi bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya perusahaan yang dapat menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

BBI believes that the implementation of Good Corporate Governance in a sustainable and sustainable manner is the foundation for the formation of a system, structure and corporate culture that can be a means to achieve the Company's vision and mission.

Sebagai sebuah sistem yang membutuhkan komitmen dalam penerapan penegakan secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan, maka tantangan terbesar dalam implementasi GCG adalah memberikan kesadaran (*awareness*), kepemilikan bersama (*ownership*), serta keterlibatan (*involvement*) seluruh insan BBI.

As a system that requires a commitment to implementing planned, systemic, and sustainable enforcement, the biggest challenge in implementing GCG is to provide awareness, ownership, and involvement of all BBI personnel.

Menghadapi tantangan implementasi tersebut, Perseroan telah menetapkan Road Map Tata Kelola Perusahaan sebagai acuan bagi seluruh unit dan insan perusahaan dalam memberikan dukungan dan kontribusi bagi terciptanya GCG yang efektif secara sistemik dan sistematis dalam setiap aktifitas operasional.

Facing these implementation challenges, the Company has established a Corporate Governance Road Map as a reference for all units and employees of the company in providing support and contribution to the creation of an effective GCG systemically and systematically in every operational activity.

Berdasarkan road map tata kelola, secara terencana Boma Bisma Indra telah memenuhi ketentuan yang terkandung dalam prinsip-prinsip GCG. Berbagai upaya telah dilakukan BBI antara lain:

1. Menerapkan GCG soft structure yang terdiri dari:
 - a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - b. Board Manual
 - c. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku
 - d. Piagam Komite Audit
 - e. Piagam Internal Audit
 - f. Pakta Integritas
 - g. Kebijakan dan Prosedur lainnya
2. Melakukan evaluasi dan menyampaikan rekomendasi atas hasil assessment GCG BBI Tahun 2019 kepada organ dan fungsi Perseroan terkait.
3. Melakukan assessment terhadap penerapan GCG di BBI untuk periode tahun 2020.
4. Mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para pejabat yang wajib lapor di BBI.
5. Melakukan sosialisasi/edukasi terkait GCG di lingkungan BBI secara internal.
6. Melakukan internalisasi mengenai perangkat GCG dan program-program kerja terkait GCG dan compliance.
7. Melaksanakan kegiatan usaha dan kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan standard operating procedure yang jelas dan transparan.

Penerapan GCG soft structure dalam menjalankan Operasional Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan merupakan sekumpulan nilai dan praktik perusahaan yang menjadi dasar dan acuan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, segenap jajaran manajemen dalam mengelola perusahaan dan berhubungan dengan pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders). Pedoman Tata Kelola Perusahaan memuat prinsip-prinsip penerapan GCG yang selaras dengan perundang-undangan, visi dan misi, serta budaya perusahaan.

2. Board Manual

Board Manual merupakan kompilasi dari praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang bersumber dari regulasi (undang-

Based on the governance road map, in a planned manner, Boma Bisma Indra has complied with the provisions contained in the GCG principles. Various efforts have been made by BBI, including:

1. Implementing a GCG soft structure consisting of:
 - a. Corporate Governance Guidelines
 - b. Manual Board
 - c. Code of Business Ethics and Code of Conduct
 - d. Audit Committee Charter
 - e. Internal Audit Charter
 - f. integrity pact
 - g. Other Policies and Procedures
2. Evaluate and submit recommendations on the results of the 2019 BBI GCG assessment to the relevant organs and functions of the Company.
3. Conducting an assessment of the implementation of GCG at BBI for the period 2020.
4. Managing State Administrators Wealth Reports (LHKPN) for officials who are required to report to BBI.
5. Conducting socialization/education related to GCG within BBI internally.
6. Internalization of GCG tools and work programs related to GCG and compliance.
7. Carry out business activities and other supporting activities in accordance with clear and transparent standard operating procedures.

The implementation of GCG soft structure in carrying out the Company's Operations is as follows:

1. Corporate Governance Guidelines

The Corporate Governance Guidelines are a set of corporate values and practices that become the basis and reference for Shareholders, the Board of Commissioners, all levels of management in managing the company and dealing with other interested parties (stakeholders). The Corporate Governance Guidelines contain the principles of GCG implementation that are in line with the legislation, vision and mission, as well as corporate culture.

2. Board Manual

The Board Manual is a compilation of company management practices sourced from regulations (laws/regulations), Articles

undang/Peraturan), Anggaran Dasar dan best practices yang disepakati bersama dalam rangka implementasi GCG. Board Manual digunakan oleh organ-organ perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan, yakni Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku merupakan pedoman bagi individu perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan budaya yang diharapkan. Merupakan etika bisnis perusahaan dan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Merupakan komitmen tertulis tentang GCG oleh manajemen dan karyawan Perseroan.

4. Piagam Komite

Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris Memiliki peran sebagai panduan bagi Komite Audit dalam pelaksanaan tugas sebagai organ pendukung Dewan Komisaris.

5. Piagam Internal Audit

Piagam Internal Audit memiliki peran untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan memastikan kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan main yang berlaku.

6. Pakta Integritas

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakta Integritas diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan kecurangan. Pakta Integritas menjadi komitmen bersama Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Insan Perseroan dalam menjalankan perusahaan secara profesional.

7. Berbagai Kebijakan dan Prosedur lain

Boma Bisma Indra memiliki berbagai kebijakan lain yang terkait dengan kepengurusan berbasis GCG.

of Association and best practices that are mutually agreed upon in the context of implementing GCG. The Board Manual is used by the company's organs that function to supervise and manage the Company, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors.

3. Code of Conduct

The Code of Conduct is a guideline for individual companies in carrying out company activities in accordance with the expected culture. It is the company's business ethics and values that govern how to manage the company in achieving its vision, mission and goals. It is a written commitment on GCG by the management and employees of the Company.

4. Committee Charter

Committee Charter under the Board of Commissioners Has a role as a guide for the Audit Committee in carrying out its duties as a supporting organ for the Board of Commissioners.

5. Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter has a role to improve the supervisory function and ensure that operational activities have been carried out properly in accordance with the applicable rules of the game.

6. Integrity Pact

Integrity Pact is a statement or promise about a commitment to carry out all duties and responsibilities in accordance with applicable regulations. Integrity Pacts are needed to prevent the occurrence of corrupt and fraudulent practices. The Integrity Pact is a joint commitment of the Board of Commissioners, Board of Directors and all Company personnel in running the company professionally.

7. Other Policies and Procedures

Boma Bisma Indra has various other policies related to GCG-based management.

Kebijakan GCG Perusahaan

PT Boma Bisma Indra (Persero) telah memiliki kelengkapan kebijakan-kebijakan yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan GCG atau Soft-structure GCG disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada berbagai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Penerapan atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Benar (*Good Corporate Governance*) mengacu:

- a. Keputusan Direksi Nomor 046 /Kpts.1000 /1100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020, tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG)
- b. Keputusan Direksi Nomor 051 /Kpts.1000 /2100 /09.2020 tanggal 1 September 2020, tentang Kebijakan Manajemen Risiko
- c. Keputusan Direksi Nomor 045 /Kpts.1000 /1100 /07.2020 tanggal 29 Juli 2020, tentang Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- d. Keputusan Direksi Nomor 016/ Kpts.1000/ 2100/03.2020 tanggal 20 Maret 2020, tentang Board Manual
- e. Keputusan Direksi Nomor 017/ Kpts.1000/ 1100/03.2020 tanggal 20 Maret 2020, tentang Kebijakan Penyampaian Kewajiban Penyampaian LHKPN
- f. Keputusan Direksi Nomor 047/ Kpts.1000/ 1100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020, tentang Kebijakan Code of Conduct (COC)
- g. Keputusan Direksi Nomor 020/ Kpts.1000/ 1100/03.2020 tanggal 27 Maret 2020, tentang Kebijakan Pelatihan Bagi Direksi dan Komisaris
- h. Keputusan Direksi Nomor 019/ Kpts.1000/ 1100/03.2020 tanggal 26 Maret 2020, tentang Kebijakan Tata Tertib Rapat Direksi
- i. Keputusan Direksi Nomor 048/ Kpts.1000/ 1100/08.2020 tanggal 27 Agustus 2020, tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Gratifikasi
- j. Keputusan Direksi Nomor 055/ Kpts.1000/ 1100/09.2020 tanggal 14 September 2020, tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle Blowing System (WBS)
- k. Keputusan Direksi Nomor 049/ Kpts.1000/ 1100/08.2020 tanggal 28

Company GCG Policy

PT Boma Bisma Indra (Persero) already has complete policies that regulate various aspects of GCG implementation or GCG Soft-structure arranged in such a way as to suit the needs and refer to various applicable regulations in Indonesia. The implementation of Good Corporate Governance refers to:

- a. Decision of the Board of Directors Number 046 /Kpts.1000/1100/07.2020 dated 29 July 2020, regarding Corporate Governance (GCG) Policy
- b. Decision of the Board of Directors Number 051 /Kpts.1000 /2100 /09.2020 dated September 1, 2020, regarding Risk Management Policy
- c. Decision of the Board of Directors Number 045 /Kpts.1000 /1100 /07.2020 dated 29 July 2020, concerning Anti-Bribery Management System Policy
- d. Decision of the Board of Directors Number 016/ Kpts.1000/ 2100/03.2020 dated March 20, 2020, regarding the Board Manual
- e. Decision of the Board of Directors Number 017/ Kpts.1000/1100/03.2020 dated March 20, 2020, regarding Policy for Submission of Obligation to Submit LHKPN
- f. Decision of the Board of Directors Number 047/ Kpts.1000/1100/07.2020 dated July 29, 2020, regarding Code of Conduct (COC) Policy
- g. Decision of the Board of Directors Number 020/Kpts.1000/1100/03.2020 dated 27 March 2020, regarding Training Policy for Directors and Commissioners
- h. Decision of the Board of Directors Number 019/ Kpts.1000/1100/03.2020 dated March 26, 2020, regarding the Policy on Procedures for the Board of Directors Meeting
- i. Decision of the Board of Directors Number 048/ Kpts.1000/1100/08.2020 dated 27 August 2020, concerning Gratification Control System Policy
- j. Decision of the Board of Directors Number 055/ Kpts.1000/1100/09.2020 dated September 14, 2020, regarding the Whistle Blowing System (WBS) Policy
- k. Decision of the Board of Directors Number 049/ Kpts.1000/1100/08.2020 dated 28 August 2020, regarding Conflict of Interest Policy
- l. Decision of the Board of Directors Number 072/ Kpts.1000/10.2020 dated October 15,

Agustus 2020, tentang Kebijakan
Benturan Kepentingan

2020, regarding Information Control
Guidelines

- I. Keputusan Direksi Nomor 072/
Kpts.1000/ 10.2020 tanggal 15 Oktober
2020, tentang Pedoman Pengendalian
Informasi

PENILAIAN PENERAPAN TATAKELOLA PERUSAHAAN

Assessment of Corporate Governance Implementation

Good Corporate Governance Assesment

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) setiap tahun dilakukan assessment dan evaluasi, baik oleh Assessor Independen maupun Assessor Internal. BBI melakukan penilaian sendiri terhadap implementasi GCG pada Perseroan secara berkala, dengan mengacu pada Kerangka Acuan Pelaksanaan Assessment dan Reassessment Penerapan Good Corporate Governance di BUMN yang dikembangkan Kementerian BUMN yang ruang lingkupnya meliputi seluruh aspek GCG dalam pengelolaan perusahaan untuk periode tahun buku laporan.

Prosedur Pelaksanaan sebagai bagian dari proses penerapan GCG yang berkelanjutan, BBI melaksanakan penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dari tahun ke tahun guna memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG terhadap praktik kerja terbaik di lingkungan BBI. Adapun salah satu tujuan dari penilaian atas penerapan GCG adalah untuk mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian BBI. Parameter yang digunakan dan Pihak yang melakukan Penilaian Pelaksanaan assessment GCG mengacu pada parameter yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) BUMN. Secara garis besar, indikator/parameter penilaian atas penerapan GCG di BBI meliputi:

- Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
- Pemegang Saham dan RUPS;
- Dewan Komisaris;
- Direksi;
- Pengungkapan Informasi dan Transparansi; serta
- Aspek Lainnya

Good Corporate Governance Assessment

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is carried out annually by assessment and evaluation, both by Independent Assessors and Internal Assessors. BBI conducts a self-assessment of the implementation of GCG in the Company on a regular basis, by referring to the Terms of Reference for the Implementation of the Assessment and Reassessment of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs developed by the Ministry of SOEs whose scope includes all aspects of GCG in company management for the period of the reporting year.

Implementation Procedures As part of the process of implementing sustainable GCG, BBI conducts an assessment of the implementation of good corporate governance from year to year in order to obtain an overview of the condition of GCG implementation on best work practices within BBI. One of the objectives of the assessment of the implementation of GCG is to encourage the management of SOEs in a professional, efficient, effective manner, as well as to empower functions and increase the independence of BBI. The parameters used and the Party conducting the GCG assessment implementation refers to the parameters regulated in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN. Broadly speaking, the indicators/parameters:s

- Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance in a Sustainable manner
- Shareholders and GMS
- Board of Commissioners
- Directors
- Information Disclosure and Transparency; as well as
- Other Aspects.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Penilaian dan evaluasi terhadap penerapan GCG di BBI setiap dua tahun sekali dilakukan oleh assessor independen/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Untuk tahun 2020, penilaian/assessment GCG dilakukan oleh assessor internal. Hasil dan Rekomendasi Assessment GCG Hasil penilaian GCG BBI pada tahun 2020 mencapai skor 78.1050% (kategori: Baik) sedangkan tahun sebelumnya sebesar 75.293%.

Assessment and evaluation of the implementation of GCG at BBI every two years is carried out by an independent assessor/Financial and Development Supervisory Agency of the Republic of Indonesia. For 2020, the GCG assessment is carried out by an internal assessor. GCG Assessment Results and Recommendations The results of BBI's GCG assessment in 2020 reached a score of 78.1050% (category: Good) while the previous year was 75.293%.

No	Aspek Pengujian Testing Aspect	Bobot Weight	Sekor Score	Capaian Achievement
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	6,2390	89,13
II	Pemegang Saham Shareholders	9	8,5180	94,64
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	28,0600	80,17
IV	Direksi Board of Commissioners	35	27,9690	79,91
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9	7,3190	81,32
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5	0,000	0,000
Skor Keseluruhan Overall Score		100	78.1050	
Kualitas penerapan GCG Quality of GCG Implementation			"Baik" "Good"	

Rekomendasi Hasil Penilaian GCG BBI pada tahun 2020, sebagai berikut:

1. Memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan dilaksanakan secara konsisten.
2. Mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan sehubungan penerapan praktik tata kelola secara memadai.

Recommendations for BBI GCG Assessment Results in 2020, as follows: 1. Ensure that company policies and procedures are implemented consistently. 2. Document the activities carried out in connection with the implementation of adequate governance practices.

Skor Self Assessment GCG 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.

The GCG Self Assessment scores for the last 5 (five) years are as follows.

Tahun Pelaksanaan Asesmen GCG Implementation Year GCG Assessment	Skor Asesment GCG GCG Assessment Score	Kategori Category	Pelaksana Executor
2020	78.105	Baik Good	Self Assesment
2019	75.293	Cukup Baik Pretty good	BPKP
2018	75.307	Cukup Baik Pretty good	Self Assesment
2017	64.015	Cukup Baik Pretty good	BPKP
2016	60.049	Kurang Baik Not good	Self Assesment

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

BBI melakukan penilaian implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang bertujuan untuk membantu Perseroan dalam menilai upaya perbaikan, mendiagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan dan mengidentifikasi kekuatan serta peluang-peluang untuk melakukan perbaikan.

KPKU merupakan salah satu perangkat penilaian kinerja dan pengelolaan keseluruhan aspek organisasi dari Kementerian BUMN menggunakan kriteria KPKU versi Tahun 2017 yang mengadopsi "Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBNQA)".

Penyelenggaraan MBNQA bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan yang dapat dijadikan role model bagi perusahaan lain.

Kriteria yang Digunakan

Sistem Penilaian pada Evaluasi Kinerja BUMN ini didasarkan pada metode yang diuraikan dalam dokumen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

Laporan atas pemenuhan persyaratan pada suatu subkategori dinilai dengan mempertimbangkan; persyaratan subkategori tersebut, faktor-faktor bisnis utama yang dilaporkan dalam Profil Perusahaan, kesempurnaan sistem yang diterapkan di Perusahaan, keluasan cakupan penerapan sistem, serta konsistensi peningkatan kualitas proses dan kinerja sebagaimana diatur dalam sistem pemberian skor. Evaluasi kinerja BUMN berdasarkan dua dimensi penilaian; proses dan hasil. Faktor penilaian untuk masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penilaian Proses

Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah Metode/Sistem (Approach), Penerapan (Deployment), Pembelajaran (Learning), dan Integrasi (Integration) atau disingkat ADLI.

a. Metode/Sistem (Approach) adalah metode/sistem yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada:

- Kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi Perusahaan;

Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU)

BBI assesses the implementation of the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) which aims to assist the Company in assessing improvement efforts, diagnosing the overall performance management system and identifying strengths and opportunities for improvement.

KPKU is one of the performance assessment tools and overall management of organizational aspects from the Ministry of SOEs using the 2017 version of the KPKU criteria which adopts the "Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBNQA)".

The implementation of MBNQA aims to identify a company that can be used as a role model for other companies.

Criteria Used The Assessment

System for the Performance Evaluation of SOEs is based on the method described in the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) document.

Reports on compliance with requirements in a subcategory are assessed by considering; the requirements of these subcategories, the main business factors reported in the Company Profile, the perfection of the system implemented in the Company, the breadth of the scope of the system implementation, as well as the consistency of improving process quality and performance as stipulated in the scoring system. SOE performance evaluation is based on two assessment dimensions, namely process and results. The assessment factors for each of these dimensions are as follows:

1. Process Assessment Factor

The factors used to assess the process are Method/System (Approach), Application (Deployment), Learning (Learning), and Integration (Integration) or abbreviated ADLI.

a. Method/System (Approach) is a method/system designed to carry out work. Assessment refers to:

- The suitability of the method/system with the requirements of the BUMN KPKU and the Company's operating environment

- Efektivitas dari penggunaan metode/sistem tersebut;
 - Sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang (repeatable) dan didasarkan pada data dan informasi yang reliable (misalnya, terstruktur dan sistematis).
- b. Penerapan (Deployment) mengacu pada sejauh mana:
- Metode/Sistem diterapkan sesuai dengan desainnya;
 - Metode/Sistem diterapkan secara konsisten;
 - Metode/Sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang relevan sesuai dengan desainnya.
- c. Pembelajaran (Learning) mengacu pada:
- Penyempurnaan Metode/sistem melalui siklus evaluasi dan perbaikan (improvement);
 - Inovasi metode/sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan (breakthrough);
 - Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap metode/sistem, kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang relevan dalam Perusahaan.
- d. Integrasi (Integration) mengacu pada:
- Keselarasan sistem/metode dengan kebutuhan perusahaan yang dijelaskan pada Profil Perusahaan dan pada subkategori proses lainnya;
 - Ukuran, informasi dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses;
 - Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran dan tindakan, diharmonisasikan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran Perusahaan.
2. Faktor Penilaian
- Hasil-hasil Faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah Level, Trend, Comparison dan Integration (LeTCI).
- a. Level mengacu pada: tingkat pencapaian kinerja saat ini/tahun ini/tahun terakhir.
- b. Trend mengacu pada:
- Tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik (yakni, kecuraman data trend) dari waktu ke waktu (minimum dalam 3 tahun terakhir);
- Effectiveness of using the method/system
 - The extent to which the method/system is repeated and based on reliable data and information (eg structured and systematic).
- b. Deployment refers to the extent to which:
- Methods/Systems are applied according to their design
 - Methods/Systems are applied consistently
 - The method/system is implemented by all relevant functions/work units according to their design.
- c. Learning (Learning) refers to:
- Improvement of the method/system through the cycle of evaluation and improvement (improvement)
 - Method/system innovation to promote breakthrough change
 - Sharing the results of improvements and innovations to methods/systems, to other work units and other relevant process owners within the Company.
- d. Integration (Integration) refers to:
- Alignment of systems/methods with company needs described in the Company Profile and in other process subcategories
 - Measures, information and improvement systems have complemented/matched each other across work units and across processes
 - Work programs, processes, results, analysis, lessons learned and actions, are harmonized across processes and across work units to support the achievement of the Company's goals.
2. Rating Factor
- Results Factors used to evaluate company results are Level, Trend, Comparison and Integration (LeTCI).
- a. Level refers to: current/current/last year's level of performance achievement.
- b. Trends refer to:
- The level of improvement in performance or the ability to maintain already good performance (ie, steepness of trend data) over time (at least in the last 3 years)

- Keluasan (tingkat penerapan) dari hasil/hasil kinerja.
- c. Comparison mengacu pada:
- Perbandingan kinerja perusahaan relatif terhadap pembandingan yang sesuai, misalnya, pesaing atau perusahaan dalam industri sejenis;
 - Perbandingan kinerja perusahaan relatif terhadap benchmarks atau pemimpin industrinya, atau dengan perusahaan kelas dunia.
- d. Integration mengacu pada:
- Ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama, yang dijelaskan dalam Profil Perusahaan dan dalam sub-sub kategori pada kategori 1 s.d 6;
 - Hasil-hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang;
 - Hasil-hasil diharmonisasikan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran Perusahaan.

- The breadth (level of application) of the performance results.
- c. Comparison refers to:
- Comparison of company performance relative to appropriate benchmarks, for example, competitors or companies in similar industries
 - Comparison of the company's performance relative to benchmarks or industry leaders, or with world-class companies.
- d. Integration refers to:
- Measures of results related to customer performance requirements, products, markets, processes, and main work programs, which are described in the Company Profile and in sub-categories in categories 1 to 6
 - Results that include valid indicators of future performance
 - Results are harmonized across processes and across units to support the Company's goals.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan pelaksanaannya diselenggarakan bersama Forum Ekselen BUMN (FEB).

Skor Penilaian

Skor Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN PT BBI tahun 2019 adalah 398.25 dan masuk sebagai "Early Improvement".

The Party Conducting the Assessment

The assessment of the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) is carried out by the Ministry of State-Owned Enterprises and its implementation is held together with the SOE Excellence Forum (FEB).

Rating Score

The score for the 2019 BBI BUMN Superior Performance Assessment Criteria is 398.25 and is included as "Early Improvement".

Pendahuluan
Preliminary

Klasifikasi Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Structure And Mechanism Corporate Governance

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola perusahaan di BBI terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu, BBI membentuk organ pendukung yang terdiri dari Komite Audit, Sekretaris Perseroan, Satuan Pengawasan Intern, serta Sistem Manajemen Risiko dan Informasi. Seluruh organ tata kelola perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan ketentuan lainnya untuk kepentingan Perusahaan.

Corporate Governance Structure

The corporate governance structure at BBI consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. In addition, BBI has established a supporting organ consisting of the Audit Committee, Corporate Secretary, Supervisory Unit Internal, as well as Risk and Information Management System. All organs of corporate governance carry out their functions in accordance with the provisions of the legislation, the Articles of Association, and other provisions for the benefit of the Company.



Untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola secara berkelanjutan, BBI telah menyusun dan menerapkan sejumlah kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan. GCG soft structure yang telah dimiliki oleh Perseroan antara lain adalah:

1. Anggaran Dasar PT Boma Bisma Indra (Persero). No 62 tanggal 27 Februari 2017;
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code of CG) PT Boma Bisma Indra (Persero) Tahun 2020, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 046/Kpts.1000/1100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020;
3. Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Boma Bisma Indra (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama No. 016/Kpts.1000/2100/03.2020 tanggal 20 Maret 2020;
4. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) PT Boma Bisma Indra (Persero) yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan No. 016/Kpts.1000/2100/03.2020 tanggal 29 Juli 2020;
5. Prosedur Pengendalian Gratifikasi No. 016/Kpts.1000/2100/03.2020 tertanggal 27 Agustus 2020;
6. Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS) No. 055/kpts.1000/1100/09.2020 tertanggal 14 September 2020;
7. Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan No. 066/Kpts.1000/1100/09.2020 tertanggal 17 September 2020
8. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. No.049/Kpts.1000/1100/08.2020 tertanggal 28 Agustus 2020
9. Piagam Komite Audit No. 41.1 /Kom/BBI/XI/2016 tertanggal 1 Nopember 2016 yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 51/KOM/BBI/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020;
10. Kebijakan Sistem Manajemen Risiko No. 050/kpts.1000/2100/09.2020 tertanggal 1 September 2020
11. Prosedur-Prosedur Perusahaan lainnya

To improve the quality of governance implementation in a sustainable manner, BBI has developed and implemented a number of operational policies for all work units in line with the principles of corporate governance. The GCG soft structures owned by the Company include:

1. Articles of Association of PT Boma Bisma Indra (Persero). No. 62 dated 27 February 2017
2. Guidelines for Good Corporate Governance (Code of CG) of PT Boma Bisma Indra (Persero) in 2020, which has been updated based on the Decree of the Board of Directors No. 046/Kpts.1000/1100/07.2020 July 29, 2020
3. Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Boma Bisma Indra (Persero) Tbk. which has been updated based on the Joint Decree No. 016/Kpts.1000/2100/03.2020 dated March 20, 2020
4. PT Boma Bisma Indra (Persero) Code of Conduct which has been updated based on Decree No. 016/Kpts.1000/2100/03.2020 dated 29 July 2020
5. Gratification Control Procedure No. 016/Kpts.1000/2100/03.2020 dated 27 August 2020
6. Whistle Blowing System (WBS) Violation Reporting System No. 055/kpts.1000/1100/09.2020 dated September 14, 2020
7. Subsidiary Management Policy No. 066/Kpts.1000/1100/09.2020 dated 17 September 2020
8. Guidelines for Handling Conflicts of Interest. No.049/Kpts.1000/1100/08.2020 dated 28 August 2020
9. Audit Committee Charter No. 41.1 /Kom/BBI/XI/2016 dated November 1, 2016 which has been updated based on the Decree of the Board of Commissioners No. 51/KOM/BBI/XII/2020 dated December 2, 2020
10. Risk Management System Policy No. 050/kpts.1000/2100/09.2020 dated 1 September 2020
11. Other Company Procedures

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Social Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Perseroan melaksanakan mekanisme GCG dalam sebuah tatanan, di mana seluruh organ GCG memiliki tanggung jawab tersendiri namun tetap melaksanakan implementasi GCG secara terintegrasi. Berdasarkan mekanisme tersebut, RUPS memiliki kewenangan tertinggi, sedangkan Dewan Komisaris memiliki fungsi Pengawasan dan Menasehati Direksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan Dewan Komisaris dibantu oleh organ Dewan Komisaris yaitu Komite Audit.

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, di mana dalam menjalankan tugas pengurusan tersebut Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Sistem Manajemen, Risiko dan Informasi, serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perusahaan.

Di samping itu, Perseroan juga melakukan audit independen terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Proses ini menjadi penting, di mana laporan keuangan menjadi salah satu informasi fundamental yang mencerminkan kinerja Perseroan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen.

Corporate Governance Mechanism

The Company implements the GCG mechanism in an order, where all GCG organs have their own responsibilities but still carry out integrated GCG implementation. Based on this mechanism, the GMS has the highest authority, while the Board of Commissioners has the function of Supervising and Advising the Board of Directors. In carrying out the work of the Board of Commissioners, it is assisted by the organ of the Board of Commissioners, namely the Audit Committee.

The Board of Directors is responsible for the management of the Company, where in carrying out the management duties the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary, Internal Control Unit, Management System, Risk and Information, as well as other work units that carry out the management function of the Company.

In addition, the Company also conducts an independent audit of the presentation of financial statements by a Public Accountant. This process is important, where financial statements are one of the fundamental information that reflects the Company's performance and the management carried out by management.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Socialization And Internalization of Good Corporate Governance

Perseroan mensosialisasikan Pedoman GCG Perusahaan kepada Insan BBI sebagai dasar implementasi prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Perusahaan.

The Company socializes the Company's GCG Guidelines to BBI Personnel as the basis for implementing GCG principles in the Company's activities.

Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Sosialisasi terhadap pihak internal dititikberatkan pada adanya pemahaman GCG dan timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja yang dilaksanakan Perusahaan sesuai prinsip-prinsip GCG.

Socialization activities are carried out for internal and external parties of the Company. Socialization to internal parties is emphasized on the understanding of GCG and the emergence of awareness and the need to implement GCG consistently. Socialization to external parties is intended to provide an understanding of how the Company works in accordance with GCG principles.

PENANGGUNGJAWAB PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Responsibilities For The Implementation of Good Corporate Governance

Perseroan telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu melalui surat penugasan No. 005/Penug.1000/02.2019 tanggal 1 Februari 2019 dan SK Direksi No. 001/Kpts.1000.1400/1.2020 tentang Struktur Organisasi PT Boma Bisma Indra (Persero) tanggal 2 Januari tahun 2020. Dalam lampiran SK tersebut menjelaskan Fungsi terkait Good Corporate Governance (GCG) berada dibawah Direktur Operasi dan Pemasaran, Fungsi tersebut berada pada Biro Sistem Manajemen, Risiko dan Informasi yang bertugas untuk mengelola, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengembangkan kerangka Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) secara efektif dan efisien sekaligus melakukan pendampingan pelaksanaan audit Good Corporate Governance.

The Company has appointed a member of the Board of Directors as the person in charge of implementing and monitoring Good Corporate Governance, namely through assignment letter No. 005/Penug.1000/02.2019 dated February 1, 2019 and the Decree of the Board of Directors No. 001/Kpts.1000.1400/1.2020 regarding the Organizational Structure of PT Boma Bisma Indra (Persero) dated January 2, 2020. In the attachment to the decree, it explains the functions related to Good Corporate Governance (GCG) under the Director of Operations and Marketing, these functions are in the Management System Bureau , Risk and Information which is in charge of managing, implementing, evaluating, and developing the framework of Corporate Governance (Corporate Governance) effectively and efficiently as well as providing assistance to the implementation of the Good Corporate Governance audit.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Penyelenggaraan RUPS merupakan kewajiban Perusahaan sebagai wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan penting, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, dimana setiap pengambilan keputusan dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan.

Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi.

Pelaksanaan RUPS didahului dengan proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan RUPS disampaikan bersamaan dengan pemanggilan RUPS. Namun jika hal tersebut belum tersedia pada saat pemanggilan RUPS, maka bahan informasi tersebut akan disampaikan pada saat RUPS diselenggarakan.

RUPS dapat membahas hal-hal penting yang diajukan oleh Dewan komisaris dan/atau Pemegang Saham, yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a governance organ that holds the highest power in the Company and holds all authorities that are not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners. The holding of the GMS is the Company's obligation as a forum for shareholders to make important decisions, taking into account the provisions of the articles of association and laws and regulations where every decision-making in the GMS must be based on the Company's business interests.

The powers of the GMS include appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, approving amendments to the Articles of Association, approving the annual report and determining the form and amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as making decisions related to corporate actions or other strategic decisions submitted by the Board of Directors.

The implementation of the GMS is preceded by the process of announcement and summons for the GMS which is carried out in accordance with applicable regulations. The necessary information materials related to the implementation of the GMS are submitted together with the summons for the GMS. However, if this is not available at the time of the GMS invitation, then the information material will be submitted at the time the GMS is held.

The GMS may discuss important matters proposed by the Board of Commissioners and/or Shareholders, which represent at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights. The proposal must have been received by the Board of Directors before the date of the summons for the Annual GMS. Proposals from the Board of Commissioners and/or Shareholders that are not in accordance with

AD/ART Perseroan hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut dan keputusan RUPS atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.

RUPS Boma Bisma Indra (BBI) terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan.
Dalam rapat tersebut, Direksi menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk proyeksi Laporan Keuangan serta hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam rapat tersebut, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, usulan penggunaan laba bersih Perseroan, serta hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain, diwilayah Republik Indonesia.

Dasar Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS Pertamina didasari oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata

the provisions of the Company's Articles of Association can only be discussed and decided by the GMS provided that all shareholders or their legal representatives attend and approve the additional agenda and the GMS's decision on the proposal must be approved by vote.

The General Meeting of Shareholders of Boma Bisma Indra (BBI) consists of:

1. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) to approve the Company's Work Plan and Budget is held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year of the relevant Company's Work Plan and Budget year. In the meeting, the Board of Directors submits the draft of the Company's Work Plan and Budget including the projection of the Financial Statements as well as other matters that need approval from the GMS for the benefit of the Company that have not been included in the Draft Company's Work Plan and Budget.
2. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) to approve the Annual Report is held no later than June after the close of the relevant financial year. In the meeting, the Board of Directors submits the Company's Annual Report, the proposed use of the Company's net profit, as well as other matters that need approval from the GMS for the benefit of the Company.
3. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), namely the GMS which is held at any time based on the need for the benefit of the Company.

The General Meeting of Shareholders (GMS) must be held at the Company's domicile or elsewhere, in the territory of the Republic of Indonesia.

GMS Implementation Basis

The holding of Pertamina's GMS is based on the following laws and regulations:

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
3. Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Social Perusahaan
Corporate Social Responsibility

- Kelola Perusahaan Yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.
- Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
 - Anggaran Dasar PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Perubahan No. 62 tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017, yang dibuat oleh Notaris Hj Eva Fitri Sagitarina, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0115677. Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017. Perubahan dilakukan pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 30 Perubahan ini tertuang dalam Surat Kementerian BUMN No. S-96/MBU/01/2017 tanggal 31 Januari 2017
 - Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and its amendments.
 - Decree of the Minister of SOE No Kep-117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises.
 - Articles of Association of PT Boma Bisma Indra (Persero) as amended and lastly by Deed of Amendment No. 62 of 2017 dated 27 February 2017, made by Notary Hj Eva Fitri Sagitarina, SH and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No: AHU-AH.01.03-0115677. Year 2017 dated March 8, 2017. Changes were made to Article 4 paragraph (3), Article 6, Article 8, Article 11, Article 12, Article 14, Article 15, Article 26, Article 28 and Article 30. These changes are contained in the Letter of the Ministry of SOEs No. S-96/MBU/01/2017 dated January 31, 2017.

Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Pemegang Saham Perseroan terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Komposisi Pemegang Saham BBI pada 31 Desember 2020 adalah 100% milik Pemerintah Republik Indonesia:

Shareholders

Shareholders are individuals or legal entities that legally own the Company's shares. Shareholders do not intervene in the functions, duties, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Based on the Articles of Association, the Company's Shareholders consist of Series A Dwiwarna Shares which can only be owned by the Republic of Indonesia and Series B Shares which can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public.

The composition of BBI's Shareholders as of December 31, 2020 is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia:

Nama Pemegang Saham Name of Shareholder	Jumlah Saham Number of Shares	Prosentase Kepemilikan % Held
Pemerintah Republik Indonesia Republic of Indonesia	1.300.000 (satu juta tiga ratus) lembar saham, terdiri dari : ✓ 1 (satu) saham seri A Dwiwarna ✓ 1.299.999 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B 1,300,000 (one million three hundred) shares, consisting of: ✓ 1 (one) Dwiwarna A Series share	100%

✓ 1,299,999 (one million two hundred ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine) shares of series B

Hak Pemegang Saham

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat waktu, dan teratur
3. Memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen)
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan

Wewenang RUPS

1. Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
2. Menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan untuk:
 - a. Laba yang ditahan dan cadangan,
 - b. Dividen kepada Pemegang Saham,
 - c. Bonus Direksi, Komisaris, dan Pekerja;
3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;
4. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Komisaris;
5. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun masing-masing Direksi dan Komisaris;
6. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan;
7. Menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi;
8. Menetapkan Kebijakan/pedoman mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan Komisaris;
9. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Komisaris;
10. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan;

Shareholders' Rights

1. Attend the GMS and vote at the GMS
2. Obtain material information (including the right to ask questions) both from the Commissioners and Directors regarding finances or other matters concerning the Company in a complete, timely and orderly manner
3. Obtain the Company's profit sharing (dividends)
4. Holding a GMS in the event that the Board of Directors and/or Commissioners fail to convene the Annual GMS and from time to time request the holding of an Extraordinary GMS if deemed necessary, for example if the Company faces a significant decline in performance.

GMS Authority

1. Approve or reject the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Company's Work Plan and Budget (RKAP)
2. Determine the calculation of the company's profit allocation for:
 - a. Retained earnings and reserves
 - b. Dividends to Shareholders
 - c. Bonuses for Directors, Commissioners, and Employees
3. Appoint and dismiss the Board of Directors and Commissioners
4. Set performance targets for each Board of Directors and Commissioners
5. Conduct collective and individual performance appraisals of the Board of Directors and Commissioners
6. To appoint an external auditor to conduct a financial audit of the financial statements
7. Determine the remuneration of the Commissioners and Directors
8. Establish policies/guidelines regarding the possibility of conflicts of interest related to the Commissioners
9. Determine the maximum number of positions a Commissioner may hold concurrently
10. Determine the maximum number of Commissioner positions that may be held concurrently by the Board of Directors in Subsidiaries

11. Mendelegasikan kepada Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.

11. Delegating to the Board of Commissioners the division of duties and authorities of the members of the Board of Directors.

Pendelegasian Wewenang RUPS

RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kuasa RUPS sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga independensi antar Organ Perusahaan, Kuasa RUPS bukan Komisaris Perusahaan.

Delegation of Authority of the GMS

The GMS may delegate its authority to the GMS Proxy in accordance with the provisions contained in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. In order to maintain the independence between the Company's Organs, the Proxy of the GMS is not a Commissioner of the Company.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, BBI menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 kali, yaitu RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 dan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2020. Rincian dari penyelenggaraan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

Implementation of the 2020 GMS

Throughout 2020, BBI held the Annual GMS 2 times, namely the GMS for 2020 Work Plan and Corporate Budget and the GMS for the 2020 Fiscal Year Annual Report. The details of the holding of the GMS are as follows:

RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020

Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2020 mulai pukul 09.30 s.d 10.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13-Jakarta 10110, dengan dihadiri oleh:

GMS Work Plan and Corporate Budget (RKAP) 2020

The meeting was held on Friday, January 27, 2020 starting at 09.30 to 10.30 WIB at the Meeting Room of the Ministry of State-Owned Enterprises, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13-Jakarta 10110, attended by:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Arman Hakim Nasution	Direktur Utama President Director	Yoyok Hadi Satriyono
Komisaris Commissioner	Jumain Appe	Direktur Director	M. Agus Budiyanto

Rapat juga dihadiri oleh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yaitu Wakil Menteri BUMN 1, Budi Gunadi Sadikin. Dengan demikian ketentuan kuorum RUPS telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat.

The meeting was also attended by the Shareholders/Proxy of Shareholders, namely the Deputy Minister of BUMN 1, Budi Gunadi Sadikin. Thus, the provisions of the GMS quorum have been fulfilled and the GMS is held valid and can take binding decisions.

Rapat memiliki 5 (empat) agenda dengan rincian sebagai berikut:

The meeting has 5 (four) agendas with the following details:

No	Agenda dan Keputusan Agenda and Decisions																																											
1	Agenda Agenda Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 Approval of the Company's 2020 Work Plan and Budget																																											
	Keputusan Decisions Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 PT Boma Bisma Indra (Persero) dengan pokok-pokok sebagai berikut: Approved the 2020 Company Work Plan and Budget of PT Boma Bisma Indra (Persero) with the following points:																																											
	a.Asumsi Assumption Pertumbuhan Ekonomi Economic growth : 5,3% Inflasi Inflation : 3,1% Suku Bunga SPN SPN Interest Rate : 5,4% Nilai Tukar Rupiah Rupiah exchange rate : Rp14.400/US\$																																											
	b.Laba-Rugi Konsolidasian Consolidated Profit and Loss <table><tr><td>Penjualan Sale</td><td>Rp</td><td>523.000</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Beban Pokok Penjualan Cost of goods sold</td><td>Rp</td><td>(455.569)</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Laba Kotor Gross profit</td><td>Rp</td><td>67.431</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Beban Usaha Operating expenses</td><td>Rp</td><td>(34.325)</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) Business</td><td>Rp</td><td>33.106</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Beban Keuangan Financial Burden</td><td>Rp</td><td>(14.732)</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Laba (rugi) sebelum pajak Profit (loss) before tax</td><td>Rp</td><td>18.373</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Pendapatan (Beban) Pajak Income (Expense) Tax</td><td>Rp</td><td>(4.593)</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income for the year</td><td>Rp</td><td>13.781</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>EBITDA</td><td>Rp</td><td>40.882</td><td>Juta Million</td></tr></table>				Penjualan Sale	Rp	523.000	Juta Million	Beban Pokok Penjualan Cost of goods sold	Rp	(455.569)	Juta Million	Laba Kotor Gross profit	Rp	67.431	Juta Million	Beban Usaha Operating expenses	Rp	(34.325)	Juta Million	Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) Business	Rp	33.106	Juta Million	Beban Keuangan Financial Burden	Rp	(14.732)	Juta Million	Laba (rugi) sebelum pajak Profit (loss) before tax	Rp	18.373	Juta Million	Pendapatan (Beban) Pajak Income (Expense) Tax	Rp	(4.593)	Juta Million	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income for the year	Rp	13.781	Juta Million	EBITDA	Rp	40.882	Juta Million
Penjualan Sale	Rp	523.000	Juta Million																																									
Beban Pokok Penjualan Cost of goods sold	Rp	(455.569)	Juta Million																																									
Laba Kotor Gross profit	Rp	67.431	Juta Million																																									
Beban Usaha Operating expenses	Rp	(34.325)	Juta Million																																									
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) Business	Rp	33.106	Juta Million																																									
Beban Keuangan Financial Burden	Rp	(14.732)	Juta Million																																									
Laba (rugi) sebelum pajak Profit (loss) before tax	Rp	18.373	Juta Million																																									
Pendapatan (Beban) Pajak Income (Expense) Tax	Rp	(4.593)	Juta Million																																									
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income for the year	Rp	13.781	Juta Million																																									
EBITDA	Rp	40.882	Juta Million																																									
	c.Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian Consolidated Financial Position <table><tr><td>Total Aset Total Assets</td><td>Rp</td><td>907.594</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Aset Lancar Current assets</td><td>Rp</td><td>406.941</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Aset Tidak Lancar Non-Current Assets</td><td>Rp</td><td>500.653</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Total Liabilitas Total Liability</td><td>Rp</td><td>626.756</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Liabilitas Lancar Current Liabilities</td><td>Rp</td><td>270.521</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Liabilitas Tidak Lancar Non-Current Liabilities</td><td>Rp</td><td>356.235</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Ekuitas Equity</td><td>Rp</td><td>280.838</td><td>Juta Million</td></tr></table>				Total Aset Total Assets	Rp	907.594	Juta Million	Aset Lancar Current assets	Rp	406.941	Juta Million	Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	Rp	500.653	Juta Million	Total Liabilitas Total Liability	Rp	626.756	Juta Million	Liabilitas Lancar Current Liabilities	Rp	270.521	Juta Million	Liabilitas Tidak Lancar Non-Current Liabilities	Rp	356.235	Juta Million	Ekuitas Equity	Rp	280.838	Juta Million												
Total Aset Total Assets	Rp	907.594	Juta Million																																									
Aset Lancar Current assets	Rp	406.941	Juta Million																																									
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	Rp	500.653	Juta Million																																									
Total Liabilitas Total Liability	Rp	626.756	Juta Million																																									
Liabilitas Lancar Current Liabilities	Rp	270.521	Juta Million																																									
Liabilitas Tidak Lancar Non-Current Liabilities	Rp	356.235	Juta Million																																									
Ekuitas Equity	Rp	280.838	Juta Million																																									
	d.Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flow <table><tr><td>Kas diperoleh dari aktifitas operasi Cash is obtained from operating activities</td><td>Rp</td><td>51.293</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Kas diperoleh dari aktifitas investasi Cash is obtained from investing activities</td><td>Rp</td><td>(26.795)</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Kas diperoleh dari aktifitas pendanaan Cash is obtained from funding activities</td><td>Rp</td><td>5.625</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Kenaikan bersih kas dan setara kas Net increase in cash and cash equivalents</td><td>Rp</td><td>30.123</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year</td><td></td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>21.651</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Kas dan setara kas akhir tahun End of year cash and cash equivalents</td><td>Rp</td><td>51.774</td><td>Juta Million</td></tr></table>				Kas diperoleh dari aktifitas operasi Cash is obtained from operating activities	Rp	51.293	Juta Million	Kas diperoleh dari aktifitas investasi Cash is obtained from investing activities	Rp	(26.795)	Juta Million	Kas diperoleh dari aktifitas pendanaan Cash is obtained from funding activities	Rp	5.625	Juta Million	Kenaikan bersih kas dan setara kas Net increase in cash and cash equivalents	Rp	30.123	Juta Million	Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year		Rp				21.651	Juta Million	Kas dan setara kas akhir tahun End of year cash and cash equivalents	Rp	51.774	Juta Million												
Kas diperoleh dari aktifitas operasi Cash is obtained from operating activities	Rp	51.293	Juta Million																																									
Kas diperoleh dari aktifitas investasi Cash is obtained from investing activities	Rp	(26.795)	Juta Million																																									
Kas diperoleh dari aktifitas pendanaan Cash is obtained from funding activities	Rp	5.625	Juta Million																																									
Kenaikan bersih kas dan setara kas Net increase in cash and cash equivalents	Rp	30.123	Juta Million																																									
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year		Rp																																										
		21.651	Juta Million																																									
Kas dan setara kas akhir tahun End of year cash and cash equivalents	Rp	51.774	Juta Million																																									
	e.Anggaran Investasi Investment Budget <table><tr><td>Gedung dan Perlengkapannya Building and Equipment</td><td>Rp</td><td>3,327</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Mesin & Peralatan Machinery & Equipment</td><td>Rp</td><td>20.285</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Perabot dan Inventaris Kantor Office furniture & inventory</td><td>Rp</td><td>1,945</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Software</td><td>Rp</td><td>911</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Lisensi / Sertifikat License/Certificate</td><td>Rp</td><td>852</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Software Desain Engineering</td><td>Rp</td><td>1425</td><td>Juta Million</td></tr><tr><td>Total Investasi Total Investment</td><td>Rp</td><td>29,295</td><td>Juta Million</td></tr></table>				Gedung dan Perlengkapannya Building and Equipment	Rp	3,327	Juta Million	Mesin & Peralatan Machinery & Equipment	Rp	20.285	Juta Million	Perabot dan Inventaris Kantor Office furniture & inventory	Rp	1,945	Juta Million	Software	Rp	911	Juta Million	Lisensi / Sertifikat License/Certificate	Rp	852	Juta Million	Software Desain Engineering	Rp	1425	Juta Million	Total Investasi Total Investment	Rp	29,295	Juta Million												
Gedung dan Perlengkapannya Building and Equipment	Rp	3,327	Juta Million																																									
Mesin & Peralatan Machinery & Equipment	Rp	20.285	Juta Million																																									
Perabot dan Inventaris Kantor Office furniture & inventory	Rp	1,945	Juta Million																																									
Software	Rp	911	Juta Million																																									
Lisensi / Sertifikat License/Certificate	Rp	852	Juta Million																																									
Software Desain Engineering	Rp	1425	Juta Million																																									
Total Investasi Total Investment	Rp	29,295	Juta Million																																									
	f. Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's level of health <table><tr><td>Aspek Keuangan Financial Aspect</td><td>:</td><td>40,50</td></tr><tr><td>Aspek Operasional Operational Aspect</td><td>:</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Aspek Administrasi Administrative Aspect</td><td>:</td><td>15,00</td></tr><tr><td>SKOR Score</td><td>:</td><td>70,50</td></tr><tr><td>Kriteria Criteria</td><td>:</td><td>"A" – SEHAT/</td></tr></table>				Aspek Keuangan Financial Aspect	:	40,50	Aspek Operasional Operational Aspect	:	15,00	Aspek Administrasi Administrative Aspect	:	15,00	SKOR Score	:	70,50	Kriteria Criteria	:	"A" – SEHAT/																									
Aspek Keuangan Financial Aspect	:	40,50																																										
Aspek Operasional Operational Aspect	:	15,00																																										
Aspek Administrasi Administrative Aspect	:	15,00																																										
SKOR Score	:	70,50																																										
Kriteria Criteria	:	"A" – SEHAT/																																										

g. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris | Board of Commissioners Work Plan and Budget
Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2020 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP.

Approved the 2020 Work Plan and Budget for the Board of Commissioners as an integral part of the RKAP.

Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Follow up on Meeting Decisions

Keputusan langsung berlaku

Decision immediately applied

Status | Status

Terealisasi

Realized

2 Agenda | Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2020

Ratification of the 2020 Partnership and Community Development Program (PKBL) Work Plan and Budget

Keputusan | Decisions

Mengesahkan RKA PKBL tahun 2020 PT Boma Bisma Indra (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Approved the 2020 Company Work Plan and Budget of PT Boma Bisma Indra (Persero) with the following points:

Program Kemitraan

1. Rencana penyaluran dana Program Kemitraan pada RKA 2020 sebesar Rp150.201.279,- atau 751,01% dari Prognosa 2019 sebesar Rp20.000.000, atau 100% dari dana tersedia yang bersumber dari dana bergulir PK.
The planned distribution of Partnership Program funds in the 2020 RKA is Rp. 150,201,279, - or 751.01% of the 2019 Prognosis of Rp. 20,000,000, or 100% of the available funds sourced from PK revolving funds.
2. Penyaluran pinjaman PK sebesar Rp150.201.279,- atau 100% dari dana tersedia tersebut dilakukan secara mandiri kepada 14 MB baru yang terdiri dari 1 MB pada sektor Jasa dan 13 MB pada sektor perdagangan.
The PK loan disbursement of Rp150,201,279,- or 100% of the available funds was carried out independently to 14 new MBs consisting of 1 MB in the services sector and 13 MB in the trade sector.
3. Tingkat efektivitas Program Kemitraan di tahun 2020 direncanakan sebesar 100% atau dengan skor 3. Sedangkan tahun 2019 diproyeksikan tingkat efektivitas mencapai 80,07% atau dengan skor 1.
The effectiveness level of the Partnership Program in 2020 is planned at 100% or with a score of 3. Meanwhile in 2019 it is projected that the effectiveness level will reach 80.07% or with a score of 1.
4. Tingkat kolektibilitas Program Kemitraan di tahun 2020 direncanakan minimal sebesar 75% atau dengan skor 3. Sedangkan tahun 2019 diproyeksikan tingkat kolektibilitas mencapai 47,87% atau dengan skor 2.
The collectibility rate of the Partnership Program in 2020 is planned to be at least 75% or with a score of 3. While in 2019 the collectibility rate is projected to reach 47.87% or with a score of 2.
5. Jumlah Mitra Binaan baru tahun 2020 ditargetkan sebanyak 9 MB.
The number of new Foster Partners in 2020 is targeted at 9 MB.

Program Bina Lingkungan

Rencana penyaluran dana Program Bina Lingkungan pada RKA 2020 sebesar Rp65.000.000,- atau 0,65% dari prognosa laba 2019 yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada tahun 2020. Dalam hal Rp65.000.000, melebihi 4% dari laba audit tahun buku 2019 maka biaya BL yang dianggarkan adalah maksimal 4% dari laba audit tahun buku 2019.

The planned distribution of Community Development Program funds in the 2020 RKA is Rp. 65,000,000,- or 0.65% of the 2019 profit forecast which is sourced from the budget which is calculated as a cost in 2020. In the case of Rp. 65,000,000, exceeding 4% of the audit profit for the financial year In 2019, the budgeted BL fee is a maximum of 4% of the audit profit for the 2019 financial year.

Program Corporate Social Responsibility

Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) PT Boma Bisma Indra (Persero) pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp750.000.000,- atau naik dari Prognosa tahun 2019 sebesar Rp190.680.000,-

The distribution of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT Boma Bisma Indra (Persero) in 2020 is budgeted at IDR 750,000,000, or an increase from the 2019 prognosis of IDR 190,680,000.

Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Follow up on Meeting Decisions

Keputusan langsung berlaku

Decision immediately applied

Status | Status

Terealisasi Realized	
3	<p>Agenda Agenda Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran tingkat kesehatan perusahaan Tahun 2020. Determination of Operational Aspect Indicators for measuring the company's health level in 2020.</p> <p>Keputusan Decisions Menetapkan Indikator Aspek Operasional PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk pengukuran tingkat kesehatan perusahaan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 Establishing the Operational Aspect Indicators of PT Boma Bisma Indra (Persero) for measuring the company's health level in 2020 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002</p> <p>Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow up on Meeting Decisions Keputusan langsung berlaku Decision immediately applied</p> <p>Status Status Terealisasi Realized</p>
4	<p>Agenda Agenda Penetapan Key Performance Indicator yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Boma Bisma Indra (Persero) Determination of Key Performance Indicators contained in the 2020 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders of PT Boma Bisma Indra (Persero).</p> <p>Keputusan Decisions Menetapkan Indikator-indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2020 PT Boma Bisma Indra (Persero) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Kuasa Pemegang Saham sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah ini Establish Key Performance Indicators as contained in the 2020 Management Contract of PT Boma Bisma Indra (Persero) between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Proxy of Shareholders as attached which is an integral part of this Minutes</p> <p>Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow up on Meeting Decisions Keputusan langsung berlaku Decision immediately applied</p> <p>Status Status Terealisasi Realized</p>
5	<p>Agenda Agenda Penetapan Key Performance Indicator Dewan Komisaris Tahun 2020. Determination of Key Performance Indicators for the Board of Commissioners in 2020.</p> <p>Keputusan Decisions Menetapkan Indikator-indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Buku RKAP Tahun 2020 PT Boma Bisma Indra (Persero) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah ini. Establishing Key Performance Indicators for the Board of Commissioners as stated in the 2020 RKAP Book of PT Boma Bisma Indra (Persero) and is an integral part of this Minutes.</p> <p>Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow up on Meeting Decisions Keputusan langsung berlaku Decision immediately applied</p> <p>Status Status Terealisasi Realized</p>

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019

RUPS ini diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2019 mulai pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB secara Teleconference yang dihadiri oleh:

GMS Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for Fiscal Year 2019

This GMS was held on Tuesday, June 30, 2019 starting at 14.00 to d. 15.30 WIB by Teleconference attended by:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Arman Hakim Nasution	Direktur Utama President Director	Yoyok Hadi Satriyono
Komisaris Commissioner	Jumain Appe	Direktur Director	M. Agus Budiyo

Rapat juga dihadiri Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yaitu Asisten Deputy Bidang Industri Pertahanan dan Manufaktur, Liliek Mayasari. Dengan demikian ketentuan kuorum RUPS telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat.

The meeting was also attended by the Shareholders/Proxy of Shareholders, namely Assistant Deputy for Defense and Manufacturing Industries, Liliek Mayasari. Thus, the provisions of the GMS quorum have been fulfilled and the GMS is held valid and can take binding decisions.

Rapat memiliki 5 (empat) agenda dengan rincian sebagai berikut:

The meeting has 5 (four) agendas with the following details:

No

Agenda dan Keputusan | Agenda and Decisions

1

Agenda | Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.
Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2019 and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2019

Keputusan | Decisions

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Thoufan dan Rosyid sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 0002412.0989/AU.1/0411049-3111112020 tanggal 28 Februari 2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
Approved the 2019 Fiscal Year Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2019 Fiscal Year which had been audited by KAP Thoufan and Rosyid as stated in their report Number 0002412.0989/AU.1/0411049-3111112020 dated 28 February 2020 with "reasonable" opinion in all material respects, as well as providing full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the Financial Year ending on December 31, 2019 as long as such action is not a criminal act and is reflected in the books of the Company's reports, with the following points:

a.Laporan Posisi Keuangan (Neraca) | Financial Position Statement

Aset | Assets

Aset Lancar | Current assets

Aset Tidak Lancar | Non-Current Assets

Jumlah Aset | Total Assets

Rp 467.462

Rp 418.246

Rp 885.708

Juta|Million

Juta|Million

Juta|Million

Liabilitas dan Ekuitas | Leability and Equity

Liabilitas Lancar Current Liabilities	Rp 450.846	Juta Million
Liabilitas Tidak Lancar Non-Current Liabilities	Rp 200.099	Juta Million
Ekuitas Equity	Rp 234.763	Juta Million
Jumlah Liabilitas Total Liability	Rp 885.708	Juta Million

b.Laporan Laba-Rugi Komprehensif | Comprehensive Income Statement

Pendapatan Revenue	Rp 343.983	Juta Million
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	Rp (307.401)	Juta Million
Laba Kotor Gross profit	Rp 36.582	Juta Million
Beban Usaha Operating expenses	Rp (31 .857)	Juta Million
Laba Usaha Operating profit	Rp 4.725	Juta Million
Pendapatan (Beban) Lain Other Income (Expense)	Rp 6.210	Juta Million
Laba (rugi) sebelum pajak Profit (loss) before tax	Rp 10.935	Juta Million
Manfaat (beban) pajak Tax benefit (expense)	Rp (988)	Juta Million
Laba Tahun Berjalan Current year profit	Rp 9.947	Juta Million
Penghasilan (beban) komprehensif lain Other comprehensive income (expenses)	Rp (3.927)	Juta Million
	Juta Million	
Laba komprehensif tahun berjalan Comprehensive income for the year	Rp 40.882	Juta Million

c.Tingkat Kesehatan | Health Level : Sehat (BBB), Skor 59,4 | Healthy (BBB), Score 59.4
Skor KPI | KPI Score : 81,42

Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Follow up on Meeting Decisions

Telah direalisasikan pada tahun lalu | Has been realized in the financial year

2 Agenda | Agenda

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 Approval and Ratification of the Company's Partnership and Community Development Program Report for Fiscal Year 2019

Keputusan | Decisions

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh KAP Thoufan dan Rosyid sesuai dengan laporan Nomor 00026/2.09891AU.110411049-3111112020 tanggal 28 Februari 2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material," serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Approved and ratified the Annual Report of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for the 2019 Fiscal Year including the Financial Statements of PKBL which had been audited by KAP Thoufan and Rosyid in accordance with report Number 00026/2.09891AU.110411049-3111112020 dated February 28, 2020 with the opinion "fair in all respects". material matters," as well as providing settlement and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of PKBL for the 2019 Financial Year, as long as the action is not a criminal act and is reflected in the report.

Pokok-pokok laporan keuangan PKBL Perseroan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The main points of the Company's 2018 PKBL financial statements are as follows:

a.Laporan Posisi Keuangan | Financial Position Statement

Aset | Assets

Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalents	Rp 17	Juta Million
Piutang Pinjaman MB MB Loans Receivable	Rp 0	Juta Million
Jumlah Aset Total Assets	Rp 17	Juta Million

Liabilitas dan Aset Bersih | Liabilities and Net Assets

Liabilitas	Rp 0	Juta Million
Aset Neto Net Asset	Rp 0	Juta Million
Jumlah Liabilitas dan Aset Bersih Total Liabilities and Net Assets	Rp 17	Juta Million

b.Laporan Aktifitas | Activity Report

Pendapatan Revenue	Rp 13	Juta Million
Penyaluran, Beban dan Pengeluaran Distribution, Expenses and Expenses	Rp 8	Juta Million
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Increase (Decrease) in Net Assets		
Tidak Terikat Not bound	Rp 5	Juta Million

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Aset Neto pada Awal Periode Net Assets at the Beginning of the Period	Rp 12	Juta Million
Aset Neto pada Awal Periode Net Assets at the Beginning of the Period	Rp 17	Juta Million

Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Follow up on Meeting Decisions

Telah direalisasikan pada tahun buku | has been realized in the financial year

3 Agenda | Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Determination of Operational Aspect Indicators for measuring the company's health level in 2020.

Keputusan | Decisions

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Yang Diatribusikan Kepada pemiiif Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp9.847.420.460, seluruhnya sebagai Cadangan.

Determined the use of Net Profit for the Year Attributable to Parent Entity owners for the 2019 Financial Year of Rp9,847,420,460, all as Reserves

Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Follow up on Meeting Decisions

Telah direalisasikan pada tahun buku | has been realized in the financial year

4 Agenda | Agenda

Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2019.

Determination of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2020 as well as bonuses for Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2019

Keputusan | Decisions

Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun. Buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2019, akan ditetapkan secara tersendiri.

Determination of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company Year. Book 2020 as well as bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of the 2019 Financial Year, will be determined separately.

Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Follow up on Meeting Decisions.

Telah direalisasikan pada tahun buku | has been realized in the financial year.

5 Agenda | Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020

Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements for the Implementation of the Partnership Program and Community Development Program for Fiscal Year 2020.

Keputusan | Decisions

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan

Buku 2020 dilakukan secara tersendiri oleh Menteri usulan Dewan Komisaris dan Bina Lingkungan untuk Tahun BUMN selaku RUPS berdasarkan

The appointment of a Public Accounting Firm (KAP) that will audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Book Partnership Program 2020 is carried out separately by the Minister proposed by the Board of Commissioners and Community Development for the Year of BUMN as the GMS based on

Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Follow up on Meeting Decisions

Telah direalisasikan pada tahun buku | has been realized in the financial year

RUPS Luar Biasa

Extraordinary GMS Throughout 2020

Sepanjang tahun 2020, BBI tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. BBI did not hold an Extraordinary GMS.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Sebagai salah satu organ Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki fungsi utama untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perseroan, mengawasi dan memberi arahan atas kinerja Direksi, memberi nasihat dan memastikan bahwa Direksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan stakeholder.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Dasar Hukum

Dasar hukum pengangkatan Dewan Komisaris:

1. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN;
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

As one of the Company's organs, the Board of Commissioners has the main function to carry out general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association and provide direction to the Board of Directors in carrying out the management of the company. The Board of Commissioners has the task of monitoring the effectiveness of GCG practices implemented by the Company, supervising and providing direction on the performance of the Board of Directors, providing advice and ensuring that the Board of Directors carries out their duties in accordance with the interests of stakeholders.

Each member of the Board of Commissioners must have high integrity, knowledge, ability and commitment to provide time in carrying out their duties. Thus, the role of the Board of Commissioners is very strategic. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners must enable effective, precise and fast decision makers. In addition, the Board of Commissioners is also required to act independently, in the sense that it does not have a conflict of interest that can interfere with its ability to carry out tasks independently and critically, both in relation to one another and the relationship to the Board of Directors.

Legal basis

Legal basis for the appointment of the Board of Commissioners:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of SOEs;
4. Company's Articles of Association.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Manual) yang telah sesuai dengan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang disusun, disepakati dan telah diperbahari dalam Keputusan Direksi Nomor 016/Kpts.1000/2100/03.2020 tanggal 20 Maret 2020.

Secara garis besar Board Manual Dewan Komisaris mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
3. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
4. Pembagian Kerja Dewan Komisaris
5. Persyaratan Dewan Komisaris
6. Keanggotaan Dewan Komisaris
7. Rangkap Jabatan
8. Masa Jabatan Dewan Komisaris
9. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris
10. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris
11. Pengisian Jabatan Lowong Anggota Dewan Komisaris
12. Keadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong
13. Komisaris Independen
14. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
15. Waktu Kerja Dewan Komisaris
16. Etika Jabatan Dewan Komisaris
17. Ketentuan Etika Rapat Dewan Komisaris
18. Organ Pendukung Dewan Komisaris
19. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
20. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
21. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
22. Remunerasi Dewan Komisaris

Selain Board Manual, yang mengatur hubungan tata kerja seluruh organ Perusahaan terutama mencakup Direksi dan Dewan Komisaris serta organ pendukungnya, Dewan Komisaris juga memiliki Pedoman Tata Kerja (Board Charter) yang tergabung dalam

Board of Commissioners Work

Guidelines In carrying out its duties, functions and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Articles of Association, Guidelines and Work Rules of the Board of Commissioners (Board Manual) which have been in accordance with the Corporate Governance policies that were prepared, agreed upon and have been updated in the Decision of the Board of Directors Number 016/Kpts.1000 / 2100/03.2020 March 20, 2020.

Broadly speaking, the Board Manual of the Board of Commissioners regulates the following:

1. Functions of the Board of Commissioners
2. Duties and Obligations of Commissioners
3. Rights and Authorities of Commissioners
4. Division of Work of Commissioners
5. Requirements of Commissioners
6. Membership of the Board of Commissioners
7. Multiple Positions
8. Term Office of Commissioners
9. Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners
10. Resignation of Members of the Board of Commissioners
11. Filling of Vacancies for Members of the Board of Commissioners
12. The condition of all members of the Board of Commissioners is vacant
13. Independent Commissioner
14. Capabilities Recognition and Improvement Program
15. Working Hours of Commissioners
16. Ethics of the Board of Commissioners
17. Ethical Provisions for Commissioners Meeting
18. Supporting Organs of Commissioners
19. Performance Evaluation of Commissioners
20. Reporting and Accountability of the Board of Commissioners
21. Work Plan and Budget of the Board of Commissioners
22. Remuneration of the Board of Commissioners

In addition to the Board Manual, which regulates the working relationship of all the Company's organs, it mainly includes The Board of Directors and the Board of Commissioners as well as their supporting organs, the Board of Commissioners also has a

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) yang ditetapkan melalui keputusan Direksi No.046/Kpts1000/1100/07.2020 tanggal 29 Juli 2020.

Persyaratan Dewan Komisaris

Terdapat 2 (dua) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Dewan Komisaris Persyaratan tersebut adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus.

a. Persyaratan Umum

Persyaratan umum merupakan persyaratan dasar bagi Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Orang perseorangan;
2. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
4. Memahami Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya; Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
5. Mampu bekerjasama sebagai anggota Dewan Komisaris;
6. Tidak pernah menjadi Direktur atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;
8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedara sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direktur lainnya;
9. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai;
10. Memenuhi syarat integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat;
11. Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang ditempat yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja sebelum pencalonan;
12. Perbuatan pidana yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati ditempat yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja sebelum pencalonan;

Board Charter which is incorporated in the Code of Corporate Governance which was stipulated through the Decree of the Board of Directors No.046/Kpts1000/1100/07.2020 dated 29 July 2020.

Board of Commissioners Requirements

There are 2 (two) types of requirements that must be met by a candidate for Member of the Board of Commissioners. These requirements are general requirements and special requirements.

a. General requirement

The general requirements are the basic requirements for the Board of Commissioners determined by the applicable laws and regulations, namely:

1. Individuals
2. Have good character and morals;
3. Able to carry out legal actions;
4. Understand the Articles of Association and the laws and regulations related to their duties; Never been declared bankrupt by the Court within 5 (five) years prior to the nomination;
5. Able to work together as a member of the Board of Commissioners;
6. Never been a Director or Member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination;
7. Never been sentenced for committing a criminal act that was detrimental to state finances within 5 (five) years prior to his appointment;
8. Do not have a family relationship up to the third degree, either in a straight line or a side line or a marriage relationship (son-in-law or brother-in-law) with other Members of the Board of Commissioners and/or Directors;
9. Have a commitment to provide adequate time;
10. Meet the integrity and moral requirements, that the person concerned has never been involved;
11. Engineering acts and deviant practices at the place where the person concerned works or has worked before the nomination;
12. Acts of default that can be categorized as not fulfilling the agreed commitments at the place concerned work or have worked before the nomination;
 - a) Acts that are categorized as being able to provide personal benefits to prospective members of the Board of

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

- a) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon Anggota Direksi dan pegawai tempat yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja sebelum pencalonan;
 - b) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan pengurusan perusahaan yang sehat.
13. Memiliki keahlian dan kompetensi untuk mempertimbangkan dan menganalisa suatu masalah secara memadai dan independen;
 14. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 15. Bukan pengurus partai politik dan/ atau calon I anggota legislative;
 16. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan atau bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai Anggota Dewan Komisaris

b. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan yang bergerak di jasa energi dan juga sebagai perusahaan terbuka. Disamping Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kompetensi teknis I keahlian terkait hal tersebut, yang bersangkutan juga harus:

1. Memiliki pengalaman korporasi sebagai senior management dan dapat memberikan rekomendasi dan solusi yang diperlukan;
2. Memahami ketentuan-ketentuan terkait dengan perusahaan terbuka dan pasar modal;
3. Berani dan cepat (less bureaucracy) didalam pengambilan keputusan;
4. Mempunyai rekam jejak yang bersih dari aspek integritas;
5. Memiliki leadership, sense of entrepreneurship dan pengalaman;
6. Networking yang memadai dan interpersonal skill;
7. Menjadi jembatan komunikasi yang baik dengan pemegang saham pengendali.

Persyaratan khusus menjadi salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan oleh Dewan Komisaris. Pengembangan persyaratan khusus dimaksudkan untuk memperoleh calon Anggota Dewan Komisaris yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

- Directors and employees where the person concerned works or has worked before nomination;
- b) Acts that can be categorized as a violation of the provisions relating to the management of a healthy company.
13. Have the expertise and competence to consider and analyze a problem adequately and independently;
 14. Have a commitment to comply with the applicable laws and regulations;
 15. Not an administrator of a political party and/or candidate I for a member of the legislature;
 16. Not currently holding a position that has the potential to cause a conflict of interest with the company or willing to resign if elected as a Member of the Board of Commissioners

b. Special Requirements

Special requirements are requirements that are tailored to the needs and nature of the Company's business engaged in energy services and also as a public company. In addition to members of the Board of Commissioners must have technical competence I expertise related to this matter, the person concerned must also:

1. Having corporate experience as senior management and able to provide recommendations and solutions needed;
2. Understand the provisions related to public companies and the capital market;
3. Courageous and fast (less bureaucracy) in decision making;
4. Have a clean track record in terms of integrity;
5. Have leadership, sense of entrepreneurship and experience;
6. Adequate networking and interpersonal skills;
7. To be a good communication bridge with the controlling shareholders.

Specific requirements are one of the substances of the nomination and selection system and procedure developed by the Board of Commissioners. The development of special requirements is intended to obtain candidates for members of the Board of Commissioners who are in accordance with the needs of the company.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan masa jabatan masing-masing Anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Masa jabatannya berakhir;
2. Mengundurkan diri;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang – undangan;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Meninggal dunia

RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai Anggota Dewan Komisaris untuk mengisi jabatan seorang Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang digantikan.

Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2020 Menteri BUMN selaku RUPS memutuskan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT BBI satu kali sebagai berikut:
Keputusan No.SK - 240/MBU/07/2020 tanggal 15 Juli 2020, Memberhentikan dengan hormat: Sdr. Arman Hakim Nasution sebagai Komisaris Utama dan Mengangkat: Sdr. Masrokan sebagai Komisaris Utama.

Mengacu pada UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 27, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Boma Bisma Indra (Persero). Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015

Term of Office the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS with the term of office of each Member of the Board of Commissioners starting from the date of the GMS that appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the date of appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time before the term of office. ends by stating the reasons. After their term of office ends, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS.

The term of office of members of the Board of Commissioners ends if:

1. His term of office ends
2. Resign
3. No longer fulfills the requirements of the legislation
4. Dismissed based on the resolution of the GMS
5. Died

The GMS may appoint a person as a Member of the Board of Commissioners to fill the position of a Member of the Board of Commissioners who is dismissed from his position or to fill a vacancy for the term of office of a person who is appointed to replace the Member of the Board of Commissioners who is dismissed or to fill the vacancy is the remaining term of office of the Member of the Board of Commissioners who is replaced.

Composition of the Board of Commissioners

During 2020 the Minister of SOEs as the GMS decided to dismiss and appoint members of the Board of Commissioners of PT BBI once as follows: Decree No. SK - 240/MBU/07/2020 dated July 15, 2020, Honorably dismissed: Br. Arman Hakim Nasution as President Commissioner and Appointed: Mr. Masrokan as President Commissioner

Referring to Law No.19 of 2003 concerning BUMN, Article 27, the appointment and dismissal of Commissioners is carried out by the Minister of BUMN as the GMS of PT Boma Bisma Indra (Persero). The requirements and procedures for the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners refer to the Minister of SOE Regulation

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

tanggal 17 Februari 2015 dan No.PER-10/MBU/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

No.PER-02/MBU/02/2015 dated 17 February 2015 and No.PER-10/MBU/10/2020 dated 09 October 2020 concerning Amendments to Regulations Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan per Juli 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Commissioners as of July 2020 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Masa Menjabat tenure	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1. Masrokhan	Komisaris Utama President Commissioner	Jakarta, Indonesia	Juli 2020 - sekarang July 2020 - now	Penetapan sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Boma Bisma Indra (Persero) No. SK - 240/MBU/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 Appointment as President Commissioner based on the Decree of the Minister of BUMN as the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Boma Bisma Indra (Persero) No. SK - 240/MBU/07/2020 dated 15 July 2020
2. Jumain Appe	Komisaris Commissioner	Jakarta, Indonesia	Februari 2018- sekarang February 2018-now	Penetapan sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Boma Bisma Indra (Persero) No. SK- 49/MBU/02/2018 tanggal 21 Februari 2018 Appointment as President Commissioner based on the Decree of the Minister of BUMN as the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Boma Bisma Indra (Persero) No. SK-49/MBU/02/2018 dated 21 February 2018

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Fit and Proper Assessment and Basis for Appointment of the Board of Commissioners

Seluruh anggota Dewan Komisaris BBI telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait, termasuk ketentuan tentang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan lulus fit and proper test sebagai berikut:

All members of the Board of Commissioners of BBI have met the criteria and conditions required in the fit and proper test based on the Limited Liability Company Law, the Company's Articles of Association, regulations related to Good Corporate Governance, as well as other relevant rules and regulations, including provisions regarding Independent Commissioners. All members of the Board of Commissioners have adequate integrity, competence and reputation. This is evidenced by obtaining approval to pass the fit and proper test as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Tanggal Efektif Effective Date
1. Masrokhan	Komisaris Utama President Commissioner		
2. Jumain Appe	Komisaris Commissioner		

Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertindak secara Independent dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Independensi Dewan Komisaris Perseroan juga dapat dilihat dari kepemilikan saham dan rangkap jabatannya, dimana tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di Perseroan dan perusahaan lain yang berhubungan dengan Perseroan, serta tidak merangkap jabatan di perusahaan yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan, seperti tersaji dalam tabel berikut:

Independence of the Board of Commissioners

In carrying out its functions, the Board of Commissioners acts independently and is free from the interests of any party. The independence of the Company's Board of Commissioners can also be seen from share ownership and concurrent positions, where there are no members of the Board of Commissioners who own shares in the Company and other companies related to the Company, and do not hold concurrent positions in companies that have business relations with the Company, as shown in the table following:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Masrokhan	Jumain Appe
1. Bukan Pemegang Saham mayoritas atau pejabat pada institusi Pemegang Saham mayoritas atau terasosiasi langsung dengan Pemegang Saham mayoritas Not the majority shareholder or official in the institution of the majority shareholder or directly associated with the majority shareholder	√	√
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan atau afiliasinya Not serving as a Board of Directors in the Company or its affiliates	√	√
3. Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir Not working in the Company or its affiliates within the last 1 (one) year	√	√
4. Tidak mempunyai keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya Does not have a financial relationship, either directly or indirectly, with the Company or other companies that provide services and products to the Company and its affiliates	√	√
5. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkungan Perseroan Free from conflicts of interest and business activities or other relationships that may hinder or interfere with the ability of the Board of Commissioners concerned to act or think freely within the Company.	√	√

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Concurrent Positions of The Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Internal Internal Position	Jabatan External External Position
3. Masrokhan	Komisaris Utama/ Komisaris Independen/ Ketua dan Anggota Komite Audit President Commissioner/ Independent Commissioner/ Chairman and Members of the Audit Committee	Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Komunikasi Expert Staff of the Minister of Industry for Communication
4. Jumain Appe	Komisaris Commissioner	Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Director General of Strengthening Innovation Ministry of Research, Technology and Higher Education

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Perseroan mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Share Ownership of the Board of Commissioners

The Company requires members of the Board of Commissioners to disclose their share ownership, both in the Company and in other companies, domiciled at home and abroad in a report that must be updated annually.

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Shareholder		
		PT BBI	Entitas Anak dan Afiliasi PT BBI Subsidiary and Affiliate of PT BBI	Perusahaan Lain Other Company
1. Masrokhan	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
2. Jumain Appe	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris bila di antara para anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dan Pemegang Saham memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Board of Commissioners Affiliations

The Company's Articles of Association states that the GMS can dismiss members of the Board of Commissioners if among the members of the Board of Commissioners, between the members of the Board of Directors and the Shareholders have a family relationship of up to the third degree, either vertically or horizontally, including relationships arising from marriage.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Shareholders		Ya Yes	Tidak No
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No		
Masrokan	Komisaris Utama President Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Jumain Appe	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√

Fungsi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan perusahaan;
- Memastikan efektivitas praktik good corporate governance yang diterapkan perusahaan.

Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris terwujud dalam 2 (dua) tingkatan:

- Level Performance*, yaitu fungsi Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada RUPS.
- Level Conformance*, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku

Pedoman Umum pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris:

- Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, termasuk terkait dengan kebijakan perusahaan, jalannya kebijakan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi;
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris mewakili kepentingan perusahaan, bertindak atas nama Dewan dan tidak dapat bertindak sebagai individu;

Functions of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the following functions:

- Supervise the management of the company by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors for the interests and objectives of the company;
- Ensure the effectiveness of good corporate governance practices implemented by the company.

The supervisory function of the Board of Commissioners is realized in 2 (two) levels:

- Performance Level, which is the function of the Board of Commissioners to supervise by providing direction and guidance to the Board of Directors as well as providing input to the GMS.
- Conformance level, which is in the form of carrying out supervisory activities at a later stage to ensure that the advice has been carried out and the provisions in the legislation and the applicable Articles of Association are complied with.

General Guidelines for the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners:

- The Board of Commissioners supervises the management of the company by the Board of Directors, including those related to management policies, the course of policies in general, both regarding the company and the company's business and providing advice to the Board of Directors;
- In carrying out supervision, the Board of Commissioners represents the interests of the company, acts on behalf of the Board and cannot act as an individual;

- c. Dalam melakukan pengawasan tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Hal-hal yang bersifat strategis menurut Direksi dan berdampak material terhadap perusahaan dapat diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuannya;
 - d. Pengawasan dilaksanakan pada keputusan - keputusan yang sudah diambil (expost facto) maupun keputusan - keputusan yang akan diambil (preventive basis);
 - e. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan atas informasi dari Direksi dan RUPS, tetapi juga dapat berdasarkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis dan aspek operasional perusahaan;
 - g. Tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan.
- c. In carrying out supervision, they are not allowed to participate in making operational decisions. The Board of Commissioners can make decisions regarding matters stipulated in the Articles of Association or laws and regulations, the decision making is carried out in its function as a supervisor, so that decisions on operational activities remain the responsibility of the Board of Directors. Matters that are strategic according to the Board of Directors and have a material impact on the company may be submitted to the Board of Commissioners for approval;
 - d. Supervision is carried out on decisions that have been taken (expost facto) and decisions that will be taken (preventive basis);
 - e. Supervision is carried out not only based on information from the Board of Directors and the GMS, but can also be based on information from other sources that can be accounted for;
 - f. Supervision is carried out not only by approving or disapproving of actions that require the approval of the Board of Commissioners, but also by covering all business and operational aspects of the company;
 - g. Subject to the provisions of the Company's Articles of Association, resolutions of the GMS and the prevailing laws and regulations;
 - h. In good faith and with full responsibility to carry out duties for the interests and business of the company.

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

a. Prinsip Dasar

Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), peraturan perundang-undangan.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

a. Basic principles

The duties of the Board of Commissioners are to supervise the management of the company carried out by the Board of Directors and to provide advice to the Board of Directors including the implementation of the Company's Long Term Plan (RJPP), the Company's Budget Work Plan (RKAP) as well as the provisions of the Articles of Association and General Meeting of Shareholders (GMS), laws and regulations. invitation.

b. Kebijakan Umum

Dalam melakukan pengawasan atas pengurusan perusahaan Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris yang khusus dihadiri oleh Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
2. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain pada saat pengangkatan dan diperbaharui setiap akhir tahun;
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
4. Menetapkan batasan-batasan nilai perbuatan hukum Direksi, yang memerlukan persetujuan tertulis Komisaris;
5. Memberikan putusan terhadap usulan perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis;
6. Memberikan tanggapan tertulis, untuk memberikan pendapat dan saran kepada RUPS atau usulan perbuatan hukum yang akan dilaksanakan oleh Direksi yang diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan;
7. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku berikutnya dimulai;
8. Mengusulkan penunjukan akuntan untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan perusahaan untuk mendapat persetujuan RUPS;
9. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain (bila ada), termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan, serta menandatangani Laporan Tahunan;
10. Memastikan efektifitas sistem pengendalian internal;
11. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan dilaporkan kepada RUPS;
12. Memberikan arahan antara lain tentang:

b. Public policy

In supervising the management of the company, the Board of Commissioners is obliged to:

1. Prepare the minutes of the Board of Commissioners meeting specifically attended by the Board of Commissioners and keep a copy thereof
2. Reporting to the company regarding its share ownership and/or family in the company and other companies at the time of appointment and renewed at the end of each year;
3. Provide a report on the supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the GMS;
4. Establish limits on the value of the legal actions of the Board of Directors, which require the written approval of the Commissioner;
5. To give a decision on the proposed legal action of the Board of Directors which requires written approval;
6. Provide written responses, to provide opinions and suggestions to the GMS or proposals for legal actions to be carried out by the Board of Directors submitted to the GMS for approval;
7. Approve the Company's Annual Work Plan and Budget at least 30 (thirty) days before the start of the next financial year;
8. Propose the appointment of an accountant to conduct an examination of the company's financial condition for approval of the GMS;
9. Researching and reviewing the Annual Report prepared by the Board of Directors and ensuring that the Company's Annual Report contains information regarding the identity, main occupations, positions of members of the Board of Commissioners in other companies (if any), including meetings held in one financial year (internal meeting or joint meeting with the Board of Directors), as well as honorarium, facilities, and/or other allowances received from the company concerned, as well as signing the Annual Report;
10. Ensure the effectiveness of the internal control system;
11. Assess the performance of the Board of Directors individually and report to the GMS;
12. Provide direction, among others, regarding:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a) Hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan, secara tepat waktu dan relevan; b) Sistem Teknologi Informasi dan pelaksanaannya; c) Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir; d) Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum di Indonesia; e) Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya; f) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan I perusahaan patungan; g) Kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut Pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga; <p>13. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP. Dimana RKA Dekom memuat indikator kinerja utama berdasarkan arahan pemegang saham dan telah mempertimbangkan RKAP. Dalam proses penyusunan RKA Dekom, Sekretaris Dekom menyiapkan rancangan RKA Dekom dan dibahas pada rapat internal Dekom. setelah dilakukan pembahasan, RKA Dekom disampaikan kepada Direksi sebelum rancangan RKAP disampaikan kepada pemegang saham untuk dimasukkan ke dalam RKAP;</p> <p>14. Melakukan evaluasi tindak lanjut rapat sebelumnya jika ada;</p> <p>15. Setiap akhir tahun buku melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a) Important matters regarding changes in the business environment that are expected to have a major impact on the company's business and performance, in a timely and relevant manner; b) Information Technology System and its implementation; c) Policy and implementation of career development; d) Accounting policies and preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia; e) Procurement policy and its implementation; f) Supervision of the implementation of the policy on the Management of Subsidiary I of the joint venture company; g) Quality and service policies as well as the implementation of these policies Supervision of the Board of Directors in carrying out the applicable laws and regulations and agreements with third parties; <p>13. Prepare the work plan and budget of the Board of Commissioners for the current year period which is an integral part of the RKAP. Where the RKA Dekom contains the main performance indicators based on the direction of the shareholders and has considered the RKAP. In the process of preparing the RKA Dekom, the Secretary of the Dekom prepares the draft RKA Dekom and discussed it at the internal meeting of the Board of Commissioners. after discussion, the RKA Dekom is submitted to the Board of Directors before the draft RKAP is submitted to shareholders for inclusion in the RKAP;</p> <p>14. Evaluate the follow-up to the previous meeting, if any;</p> <p>15. At the end of each financial year, evaluate the performance of the committees that assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.</p> |
|--|---|

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhak untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan / atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan Direksi;
5. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
7. Menerima uang jasal honorarium, asuransi, tantiem berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk uang jasa masa akhir jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Tantiem dapat diberikan, apabila telah dianggarkan dan dihitung sebagai biaya jika tantiem tersebut dikaitkan dengan kinerja perusahaan atau diberikan dari laba bersih perusahaan.

Wewenang Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak bisa setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar serta peraturan lainnya atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada dalam hal Direksi sakit dan tidak dapat menjalankan tugas. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara Dewan Komisaris diwajibkan menjelaskan kepada RUPS selanjutnya RUPS akan memutuskan apakah Direktur yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukannya sementara Anggota Direksi

Rights and Authorities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the right to:

1. View books, letters and other documents, check cash for verification purposes and other securities and check company assets;
2. Entering yards, buildings and offices used by the company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the company;
4. Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Requesting the Board of Directors and or other officers under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting;
6. Attending Board of Directors meetings and providing views on the matters discussed;
7. Receive fees for honorarium, insurance, bonuses along with other facilities and allowances, including service fees for the end of office, the amount of which is determined by the GMS. The bonus can be given, if it has been budgeted and calculated as a fee if the bonus is related to the company's performance or given from the company's net profit.

Authority of the Board of Commissioners:

1. The Board of Commissioners with a majority of votes may at any time be entitled to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors, if he (they) acts contrary to the Articles of Association and other regulations or neglects his obligations or there are urgent reasons for the company, including but not limited to: in the event that the Board of Directors is sick and unable to carry out their duties. The said temporary dismissal must be notified to the person concerned along with the reasons for the action. Within 30 (thirty) days after the temporary dismissal, the Board of Commissioners is required to explain to the GMS further the GMS will decide whether the Director concerned will be permanently dismissed or returned to his position while the temporarily dismissed Member of the

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir membela diri. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir dalam rapat atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat;

2. Dalam hal jabatan salah seorang anggota Direksi lowong baik mengundurkan diri maupun diberhentikan dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka Dewan Komisaris berwenang menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dan Direktur tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta menunjuk pihak lain untuk mewakili perusahaan dalam hal terjadi benturan kepentingan perusahaan dengan kepentingan semua anggota Direksi;
3. Menetapkan komposisi Direksi berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh RUPS;
4. Mendapatkan informasi dari Direksi Anak Perusahaan terkait dengan kondisi Anak Perusahaan;
5. Berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis terhadap rencana Direksi
 - a) Membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan aktiva tetap atau aktiva lain milik perusahaan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - b) Menghapuskan piutang dari pembukuan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c) Mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - d) Menerima atau memberikan pinjaman jangka waktu panjang, menengah dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - e) Melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal perusahaan dalam badan usaha lainnya, termasuk mengambil atau melepaskan partisipasi (working interest) melebihi

Board of Directors is given the opportunity to attend to defend himself. This meeting is chaired by the President Commissioner and if the President Commissioner is not present at the meeting or is unable to attend, which does not need to be proven to a third party, the meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is present at the meeting;

2. In the event that the position of a member of the Board of Directors is vacant, either resigns or is dismissed and a replacement does not exist or has not assumed his position, the Board of Commissioners has the authority to appoint a member of the Board of Directors to carry out the duties of other members of the Board of Directors to carry out the work of the vacant member of the Board of Directors with power. and the same authority and the Director may act for and on behalf of the Board of Directors and appoint other parties to represent the company in the event of a conflict of interest between the company and the interests of all members of the Board of Directors;
3. Determine the composition of the Board of Directors based on the authority delegated by the GMS;
4. Obtain information from the Board of Directors of the Subsidiary regarding the condition of the Subsidiary;
5. Authorized to give written approval or rejection of the plan of the Board of Directors
 - a) Buy, release, sell, pledge or pledge fixed assets or other assets of the company with a certain value determined by the Board of Commissioners;
 - b) Write off receivables from the books at a certain value determined by the Board of Commissioners;
 - c) Bind the company as guarantor (borg or avalist) with a certain value determined by the Board of Commissioners;
 - d) Receive or provide long-to-medium term loans and receive or provide short-term loans that are not operational in nature with a certain value determined by the Board of Commissioners;
 - e) Conduct equity participation or divestment of the company's capital participation in other business entities, including taking or relinquishing participation (working interest) exceeding a certain amount determined by the Board of Commissioners;
 - f) Establishing a Subsidiary;

- jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- f) Mendirikan Anak Perusahaan;
 - g) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - h) Mengadakan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari transaksi jual beli valuta asing, transaksi pinjam meminjam dari produk terstruktur lainnya serta turunan dari transaksi komoditas;
 - i) Membuat, mengubah mengakhiri atau membatalkan perjanjian lisens (license agreement).

- g) Merging, consolidating, taking over or separating each of them as defined in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- h) Conducting derivative transactions which are derivatives of buying and selling foreign exchange transactions, lending and borrowing transactions of other structured products and derivatives of commodity transactions;
- i) Create, modify, terminate or cancel the license agreement.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual. Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 31/KOM/BBI/IX/2020 tanggal 15 September 2017 tentang Kebijakan Pembagian Tugas Dewan Komisaris dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Perusahaan Perseroan PT Boma Bisma Indra. Adapun pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama:

- a. Koordinasi pelaksanaan pengawasan;
- b. Pengawasan terhadap kinerja keuangan, termasuk di dalamnya kebijakan terkait dengan:
 - 1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - 2) Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
 - 3) Pengendalian 3 Indikator Utama yaitu EBITDA, Operation Cash Flow dan Debt to EBITDA;
- c. Pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan audit eksternal;
- e. Pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

Division of Duties of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has carried out the division of tasks among the members of the Board of Commissioners as stated in the Company's Articles of Association and the Board Manual. The division of duties of the Board of Commissioners is determined based on the Decree of the Board of Commissioners Number: 31/KOM/BBI/IX/2020 dated September 15, 2017 concerning the Policy for the Division of Duties of the Board of Commissioners in Carrying out the Supervisory Duties of the Company's Company PT Boma Bisma Indra. The division of tasks is as follows:

1. President Commissioner:

- a. Coordinating the implementation of supervision;
- b. Supervision of financial performance, including policies related to:
 - 1) Company Work Plan and Budget;
 - 2) Company's Long Term Plan;
 - 3) Control of 3 Main Indicators namely EBITDA, Operation Cash Flow and Debt to EBITDA
- c. Supervision of good corporate governance (Good Corporate Governance);
- d. Supervision of the implementation of Internal Control and the effectiveness of the implementation of external audits;
- e. Supervision of the Partnership and Community Development Program;

- f. Pengawasan terhadap keterbukaan informasi dan teknologi informasi;

2. Anggota Dewan Komisaris

- a. Pengawasan terhadap aspek Sumber Daya Manusia dan pengembangan karyawan, termasuk sistem remunerasi berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan terukur;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Direksi kepada peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
- d. Pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyelarasannya terhadap PSAK;
- e. Pengawasan terhadap inisiatif strategis yang ditetapkan;
- f. Pengawasan terhadap kebijakan operasional dan pengembangan usaha;

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan hal-hal berikut:

1. Mengikuti RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2020 dan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2019.
2. Melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali dan rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi sebanyak 12 kali.
3. Untuk mendukung kegiatan Dewan Komisaris, diselenggarakan rapat Komite, baik rapat internal Komite maupun rapat bersama dengan mitra terkait dan pihak eksternal, sebanyak 17 kali.

Dengan memerhatikan isu-isu penting yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris, maka dengan dukungan Komite Audit, Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan pengawasan, antara lain:

1. Melakukan review kegiatan internal audit, membahas temuan strategis, hasil audit investigasi serta tindak lanjut temuan audit Internal Audit dan Audit BPK.
2. Mengajukan surat penetapan KAP kepada RUPS, melakukan review program audit KAP, monitoring pelaksanaan audit Laporan Keuangan Tahun 2020 dan memberikan pendapat tentang

- f. Supervision of information disclosure and information technology;

2. Member of the Board of Commissioners

- a. Supervision of aspects of Human Resources and employee development, including a remuneration system based on objective and measurable performance appraisals;
- b. Supervision of the implementation of the Company's risk management
- c. Supervision of the Board of Directors' compliance with laws and regulations and agreements with third parties;
- d. Supervision of accounting policies and their alignment with PSAK;
- e. Supervision of established strategic initiative;
- f. Supervision of operational policies and business development;

Implementation of the Duties of the Board of Commissioners

To support the implementation of tasks in 2020, the Board of Commissioners has done the following:

1. Attended the GMS for 2 (two) times, namely the GMS for Ratification of the 2020 RKAP and the GMS for Ratification of the 2019 Annual Report.
2. Conducted internal meetings of the Board of Commissioners 12 times and meetings of the Board of Commissioners invited the Board of Directors 12 times.
3. To support the activities of the Board of Commissioners, Committee meetings were held, both internal Committee meetings and joint meetings with related partners and external parties, 17 times.

By paying attention to important issues that are the focus of supervision of the Board of Commissioners, with the support of the Audit Committee, the Board of Commissioners consistently carries out supervision, including:

1. Review internal audit activities, discuss strategic findings, investigative audit results and follow-up on findings from the Internal Audit and BPK Audits.
2. Submitting a letter of determination of KAP to the GMS, reviewing the KAP audit program, monitoring the implementation of the 2020 Financial Statement audit and

- independensi auditor dalam melaksanakan jasa non audit.
3. Melakukan review dan monitoring atas temuan WBS dan laporan masyarakat, serta monitoring sistem IT.
 4. Melakukan review laporan keuangan tahun 2019 dan Triwulan I-III Tahun 2020, Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dan Triwulan I-III Tahun 2020.
 5. Identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan tugas-tugas lain Dewan Komisaris, antara lain:
 - a. Memberikan tanggapan RKAP 2020.
 - b. Monitoring dan analisis atas arus kas, piutang, utang, tahun 2019, Triwulan I-III Tahun 2020.
 - c. Monitoring kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2020 dan Triwulan I-III Tahun 2020.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi No.019/Kpts.1000/1100/03.2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pedoman Tata Tertib Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, mekanisme pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris:
 - a. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara tertulis atas usulan tindakan Direksi yang disampaikan dalam rapat Dewan Komisaris maksimal 7 (tujuh) hari sampai 14 (empat belas) hari;
 - b. Keputusan tersebut harus di setujui secara tertulis oleh semua anggota Dewan Komisaris;
 - c. Dewan Komisaris mengkomunikasikan keputusan rapat maksimal 7 (tujuh) hari sejak keputusan tersebut disahkan atau ditandatangani.
2. Pengambilan Keputusan melalui Rapat Dewan Komisaris-Direksi
 - a. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara tertulis atas usulan tindakan Direksi yang disampaikan dalam rapat Dewan Komisaris – Direksi maksimal 7(tujuh) hari sampai 14(empat belas) hari;

- providing opinions on the independence of auditors in carrying out non-audit services.
3. Reviewing and monitoring WBS findings and community reports, as well as monitoring IT systems.
 4. Reviewing the financial statements of 2019 and Quarter I-III of 2020, Realization of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2019 and Quarter I-III of 2020.
 5. Identification of matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners, including:
 - a. Provide response to RKAP 2020.
 - b. Monitoring and analysis of cash flows, receivables, payables, 2019, Quarter I-III of 2020.
 - c. Monitoring the performance of the Partnership and Community Development Program in 2020 and Quarter I-III of 2020.

Board of Commissioners Decision Making Mechanism

Referring to the Decree of the Board of Directors No.019/Kpts.1000/1100/03.2020 dated March 26, 2020 regarding the Guidelines for the Meeting Rules of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the decision-making mechanism is as follows:

1. Decision making through the Board of Commissioners meeting:
 - a. Decision making of the Board of Commissioners in writing on the proposed actions of the Board of Directors submitted at the meeting of the Board of Commissioners for a maximum of 7 (seven) days to 14 (fourteen) days;
 - b. The decision must be approved in writing by all members of the Board of Commissioners;
 - c. The Board of Commissioners communicates the decision of the meeting a maximum of 7 (seven) days after the decision is ratified or signed.
2. Decision-making through the Board of Commissioners-Board of Directors Meeting
 - a. Decision making of the Board of Commissioners in writing on the proposed actions of the Board of Directors submitted in the meeting of the Board of Commissioners - Board of

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

- b. Keputusan tersebut harus di setuju secara tertulis oleh semua anggota Dewan Komisaris;
 - c. Dewan Komisaris mengkomunikasikan keputusan rapat maksimal 7 (tujuh) hari sejak keputusan tersebut disahkan atau ditandatangani
3. Pengambilan Keputusan diluar rapat (Sirkuler dan lain-lain).
 Pengambilan Keputusan diluar rapat adalah pengambilan keputusan atas tindakan Direksi dengan tingkat kesegeraan sebagai berikut:
 - a. Atas tindakan Direksi, maka Dewan Komisaris harus memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi.
 - b. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan secara tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris
4. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan rapat Dewan Komisaris apabila keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
5. Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris

- Directors a maximum of 7 (seven) days to 14 (fourteen) days;
 - b. The decision must be approved in writing by all members of the Board of Commissioners;
 - c. The Board of Commissioners communicates the decision of the meeting a maximum of 7 (seven) days after the decision is ratified or signed
3. Decision making outside the meeting (Circular and others).
 Decision-making outside the meeting is the decision-making on the actions of the Board of Directors with the following level of immediacy:
 - a. For the actions of the Board of Directors, the Board of Commissioners must give written approval within 30 (thirty) days from the receipt of the application or explanation and complete documents from the Board of Directors.
 - b. If within a period of 30 (thirty) days, the Board of Commissioners does not give written approval, the GMS can make decision without a written response from the Board of Commissioners.
4. Binding decisions can also be taken without holding a meeting of the Board of Commissioners if the decision is approved in writing and signed by all members of the Board of Commissioners.
5. Decisions concerning strategic aspects must be made through the mechanism of the Board of Commissioners meeting. These strategic aspects include, among others, all actions of the Board of Directors which must obtain the approval of the GMS after obtaining a written recommendation from the Board of Commissioners as well as all actions of the Board of Directors which must obtain written approval from the Board of Commissioners.

Persetujuan Dewan Komisaris atas Transaksi Material

Selama tahun 2020, beberapa transaksi atau tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan/tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 8 dan 10, antara lain sebagai berikut:

Approval of the Board of Commissioners on Material Transactions

During 2020, several transactions or actions carried out by the Board of Directors required written approval/response from the Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association Article 11 Paragraphs 8 and 10, including the following:

No	Transaksi / Tindakan Direksi Transactions / Actions of the Board of Directors	Tanggal Date
1.	Permohonan Tanggapan Laporan Manajemen Perusahaan UN-AUDIT PT Boma Bisma Indra (Persero) Tahun 2019 Request for Responses to PT Boma Bisma Indra (Persero) UN-AUDIT Company Management Reports for 2019	10 Januari 2020
2.	Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Fasilitas Kredit Diskonto Documentary Collections Invoice Financing oleh PT Bank Bukopin Tbk. Application for Issuance of Power of Attorney for Documentary Collections Invoice Financing Discount Credit Facility by PT Bank Bukopin Tbk.	21 Februari 2020
3	Tanggapan atas laporan Tahunan 2019 2019 Annual Report Response	28 Februari 2020
4.	Permohonan Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Application for Approval of Credit Facility Extension at PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	21 April 2020
5.	Tanggapan atas laporan manajemen Triwulan I Tahun 2020	24 April 2020
6.	Pergantian Direksi Anak Perusahaan	4 Mei 2020
7.	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan I tahun 2020 PT BBI The Board of Commissioners' Response to the First Quarter 2020 Company Management Report of PT BBI	15 Mei 2020
8.	Tanggapan Dewan Komisaris atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 PT BBI The Board of Commissioners' Response to the 2020 Revised Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT BBI	8 Juni 2020
9.	Permohonan Tanggapan Tertulis Tentang Kajian Rencana Pelaksanaan Optimalisasi Aset Tetap Request for Written Response Regarding the Study on the Implementation Plan for Optimizing Fixed Assets	18 Juni 2020
10.	Tanggapan Usulan Efisiensi Beban Biaya Perusahaan Response to the Company's Cost Efficiency Proposal	26 Juni 2020
11.	Pergantian Sekretaris Perusahaan	10 Juli 2020
12.	Tanggapan Dewan Komisaris atas Konsep Revisi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT BBI tahun 2020-2024 The Board of Commissioners' Response to the Revision of the Company's Long Term Plan (RJPP) Concept of PT BBI for 2020-2024	15 Juli 2020
13.	Tanggapan atas laporan manajemen Semester I Tahun 2020	28 Juli 2020
14.	Surat Permohonan Persetujuan Penerimaan Pembayaran Melalui Fasilitas Invoice Finance Bank Mandiri Application for Approval of Payment Receipts Through Bank Mandiri Invoice Finance Facility	12 Agustus 2020
15.	Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2020	14 Oktober 2020
16.	Tanggapan atas Rancangan RKAP 2021	25 Nopember 2020

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan adalah kondisi tertentu di mana kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Perseroan

Management of Conflicts of Interest of the Board of Commissioners

Conflict of interest is a certain condition in which the individual interests of the members of the Board of Commissioners have the potential to conflict with the interests of the

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kilmeria 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

untuk meraih laba, meningkatkan nilai Perseroan, mencapai visi dan menjalankan misi Perseroan serta melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

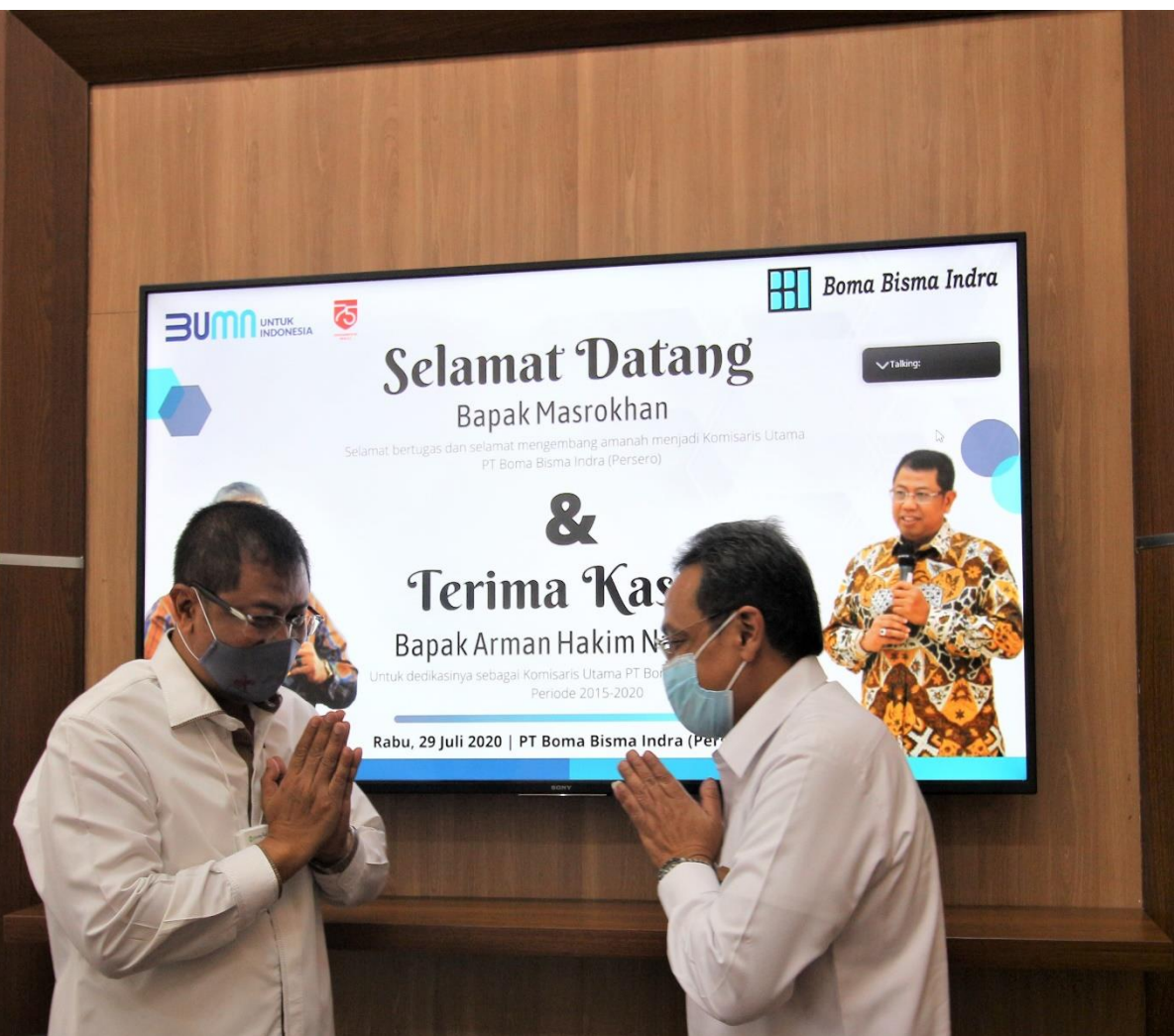
Atas hal tersebut maka Anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

Company to gain profit, increase the value of the Company, achieve the vision and carry out the mission of the Company and implement the decisions of the General Meeting of Shareholders.

For this matter, the Member of the Board of Commissioners should always:

1. Prioritizing the interests of the Company and not reducing the Company's finances in the event of a conflict of interest.
2. Avoid making decisions in situations and conditions of a conflict of interest.
3. Disclosure of family relationships, financial relationships, management relationships, ownership relationships with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Company and/or other parties in the context of the Company's business.
4. Disclosure in terms of decision making must still be taken in conditions of a conflict of interest.



Program Pengenalan Perusahaan Bagi Komisaris Baru

Ketentuan mengenai Program Pengenalan bagi Komisaris Baru diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo. No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN dan Surat Keputusan Direksi No.046/Kpts.1000/1100/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan No. 016/Kpts.1000/1100/03.2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pedoman Board Manual.

Program Pengenalan Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris sangat penting untuk dilaksanakan karena Anggota Dewan Komisaris memiliki latar belakang berbeda yang berasal dari beberapa pihak yang merepresentasikan Pemegang Saham. Tujuan Program Pengenalan ini agar para anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif.

Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi perusahaan secara umum;
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Corporate Secretary atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Corporate Secretary. Untuk itu Dewan Komisaris menyampaikan surat kepada Direksi untuk diadakannya program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Penyelenggaraan program pengenalan ini wajib terdokumentasi dengan baik termasuk pencatatan tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Dewan Komisaris tersebut dalam mengikuti program tersebut;
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan;
 - b. Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan

Company Introduction Program for New Commissioners

Provisions regarding the Introduction Program for New Commissioners are regulated in the Minister of SOE Regulation No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 jo. No.PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN and Decree of the Board of Directors No.046/Kpts.1000/1100/07/2020 dated July 29, 2020 concerning Guidelines Corporate Governance and No. 016/Kpts.1000/1100/03.2020 dated March 20, 2020 regarding the Board Manual.

Introduction Program The introduction program for members of the Board of Commissioners is very important because members of the Board of Commissioners have different backgrounds who come from several parties who represent Shareholders. The purpose of this Introduction Program is so that the members of the Board of Commissioners can get to know each other and establish cooperation as a solid, comprehensive and effective team.

Provisions regarding the introduction program include the following:

1. For newly appointed members of the Board of Commissioners, an Introduction Program must be given regarding the general condition of the company;
2. The responsibility for conducting the introduction program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as Corporate Secretary. For this reason, the Board of Commissioners submits a letter to the Board of Directors for an introduction program for newly appointed members of the Board of Commissioners. The implementation of this introduction program must be well documented including recording the level of attendance/activity of the Member of the Board of Commissioners in participating in the program;
3. The introduction program includes:
 - a. Implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Company;
 - b. A description of the company related to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

- operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
- c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal;
 - d. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
 - e. Pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku dilingkungan perusahaan serta masyarakat setempat;
4. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas perusahaan, kunjungan ke kantor-kantor cabang, pengkajian dokumen perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan;
 5. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru
- performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, internal control and other strategic issues;
- c. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies;
 - d. Information regarding the obligations, duties, responsibilities and rights of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as things that are not allowed;
 - e. Understanding related to ethical principles and norms that apply within the company and the local community;
4. The introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to company facilities, visits to branch offices, reviewing company documents or other programs deemed appropriate to the needs
 5. This introduction program is carried out no later than 3 (three) months after the appointment of new members of the Board of Commissioners.

Pada tahun 2020, BBI telah mengangkat Masrokhan sebagai Komisaris Utama dan sudah mengikuti program pengenalan Perusahaan PT BBI.

In 2020, BBI has appointed Masrokhan as President Commissioner and has participated in the PT BBI Company introduction program.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

- a. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris
 1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
 2. Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.
 3. RUPS dapat memberhentikan Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
 - a) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,
 - b) Tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar,
 - c) Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau Negara yang disebabkan kelalaian

Mechanisme of Resignation and dismissal of the board of commissioners

- a. Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners
 1. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS through a transparent process.
 2. Shareholders/GMS shall determine the guidelines for the appointment and dismissal of the Board of Commissioners.
 3. The GMS may dismiss a Member of the Board of Commissioners at any time before his/her term of office ends by stating the reasons, including but not limited to:
 - a) Unable to carry out their duties properly,
 - b) Not implementing the laws and/or provisions of the Articles of Association,
 - c) Engaging in actions that are detrimental to the company and/or the State due to

- atau kesalahan oleh Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan,
- d) Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Proses pemberhentian Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali pemberhentian dimaksud disebabkan karena keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau mengundurkan diri, maka Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.
5. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS; Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut tetap diminta pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun buku sampai dengan tanggal efektif pemberhentiannya, sepanjang tindakan Dewan Komisaris tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan.
- b. Pengunduran Diri Anggota Komisaris
1. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, suatu pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan oleh Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut kepada perusahaan, dengan tembusan ke Dewan Komisaris, sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri dan yang bersangkutan tetap diminta pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun buku sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, sepanjang tindakan Direktur tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun yang bersangkutan Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
2. Dalam hal perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan berlalunya waktu tersebut pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
- negligence or error by the relevant Member of the Board of Commissioners,
- d) Is declared guilty by a court decision that has permanent legal force.
4. The process of dismissing the members of the Board of Commissioners by the GMS will be carried out in accordance with the provisions of the legislation, unless the dismissal is due to a court decision which has permanent legal force and/or resigns, the member of the Board of Commissioners concerned is given the opportunity to attend the GMS to defend self.
5. Such dismissal is effective as of the closing of the GMS which decided the dismissal, unless otherwise determined by the GMS; The dismissed Board of Commissioners will still be held accountable from the beginning of the financial year until the effective date of their dismissal, as long as their actions are taken. The Board of Commissioners is reflected in the Annual Report of the relevant financial year.
- b. Resignation of Member of Commissioner
1. In the event that a member of the Board of Commissioners resigns, a written notification must be submitted by the member of the Board of Commissioners who resigns to the company, with a copy to the Board of Commissioners, at least 30 (thirty) days before the date of resignation and the person concerned is still requested responsibilities starting from the beginning of the financial year until the effective date of his resignation, as long as the Director's actions are reflected in the Annual Report of the year concerned. The company is obliged to hold a GMS to decide on the application for resignation of the Member of the Board of Commissioners within a period of no later than 30 (thirty) days after receipt of the letter. resignation;
2. In the event that the company does not hold a GMS within that time period, then with the passage of time the resignation of a Member of the Board of Commissioners becomes valid without requiring the approval of the GMS;

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Dalam hal perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan berjalannya waktu pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS; 4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; 5. Perusahaan wajib melaporkan pengunduran diri tersebut diatas dalam RUPS berikutnya; 6. Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap diminta pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, sepanjang tindakan Dewan Komisaris tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan | <ol style="list-style-type: none"> 3. In the event that the company does not hold a GMS within that time period, then with the passage of time the resignation of a Member of the Board of Commissioners becomes valid without requiring the approval of the GMS; 4. Before the resignation becomes effective, the relevant Member of the Board of Commissioners remains responsible for the implementation of his duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the laws and regulations; 5. The company is obliged to report the resignation mentioned above in the next GMS 6. The Board of Commissioners who resign are still held accountable from the beginning of the year until the effective date of their resignation, as long as the actions of the Board of Commissioners are reflected in the Annual Report of the financial year concerned. |
|--|--|

Peningkatan kompetensi komisaris

Sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan, Dewan Komisaris setiap tahunnya melakukan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan/ kompetensi Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020 pelatihan, seminar dan pendidikan yang pernah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Competency Improvement

As a form of implementing continuous learning, the Board of Commissioners annually conducts competency development programs aimed at increasing the knowledge/competency of the Board of Commissioners.

Throughout 2020 the training, seminars and education attended by the Board of Commissioners are as follows:

No	Tanggal Date	Nama Anggota dewan Komisaris Member's name board of Commissioners	Jabatan Position	Kegiatan Activity
1	4 November 2020 PT BBI Surabaya November 4, 2020 – PT BBI Surabaya	Masrokan	Komisaris Utama President Commissioner	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN
2	4 November 2020 PT BBI Surabaya November 4, 2020 – PT BBI Surabaya	Jumain Appe	Komisaris Commissioner	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN

Penilaian Kinerja Komite yang Berada di Bawah Komisaris

Dewan Komisaris memiliki komite penunjang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris. Komite tersebut telah memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terarah dan efektif. Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit.

Komite Audit

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, internal audit, proses pelaporan keuangan. Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan Baik.

Kriteria Penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

1. Tingkat efektivitas Komite Audit dalam menjalankan fungsinya;
2. Tingkat pemahaman dan penguasaan anggota Komite Audit atas berbagai permasalahan dalam Perseroan, serta kontribusinya dalam pelaporan dan rekomendasi penyelesaiannya;
3. Pelaporan tepat waktu.

Penilaian Kinerja Komite yang Berada di Bawah Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris PT BBI mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan didasarkan kepada Pasal 44 Bab XII, Permen BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Tahun 2017.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja

Performance Assessment of Committees Under the Commissioner

The Board of Commissioners has a supporting committee that has duties and responsibilities to support the performance of the Board of Commissioners. The committee already has clear work guidelines, so that the implementation of its duties can be directed and effective. The committee under the Board of Commissioners is the Audit Committee.

Audit Committee

Has the duty and responsibility to supervise the effectiveness of the internal control system, risk management, internal audit, financial reporting process. The Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities well.

The assessment criteria used by the Board of Commissioners include:

1. The level of effectiveness of the Audit Committee in carrying out its functions;
2. The level of understanding and mastery of members of the Audit Committee on various problems in the Company, as well as their contribution to reporting and recommendations for their resolution;
3. Timely reporting.

Performance Assessment of Committees Under the Commissioner

The performance assessment of the Board of Commissioners of PT BBI refers to the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) and is based on Article 44 Chapter XII, SOE Ministerial Regulation No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 regarding the Implementation Evaluation of the Implementation of the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) Year 2017.

The results of the evaluation of the performance of the Board of Commissioners as a whole and the performance of each Member of the Board of Commissioners individually will be an integral part of the compensation scheme and the provision of incentives for Members of the Board of Commissioners.

The results of the performance evaluation of each Member of the Board of Commissioners individually is one of the basic considerations for Shareholders to dismiss and/or reappoint the relevant Member of the Board of Commissioners. The results of the

tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Prosedur Pelaksanaan Assesment Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS setiap tahunnya setelah melalui evaluasi menggunakan Key Performance Indicators (KPI) yang ditetapkan RUPS.

Kriteria Penilaian

1. Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris sebagai berikut:
2. Pencapaian kinerja beserta target-targetnya dan disetujui oleh RUPS/Menteri setiap tahun,
3. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komitekomite yang ada,
4. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perusahaan,
5. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu,
6. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan assessment atas kinerja Dewan Komisaris yaitu Pemegang Saham dalam RUPS.

performance evaluation are a means of assessing and increasing the effectiveness of the Board of Commissioners.

Procedure for Implementation of the Performance Assessment of the Board of Commissioners

The performance of the Board of Commissioners is reported to Shareholders through the GMS every year after going through an evaluation using the Key Performance Indicators (KPI) determined by the GMS.

Assessment Criteria

1. The criteria for evaluating the performance of the Board of Commissioners are as follows:
2. Achievement of performance along with its targets and approved by the GMS/Minister every year,
3. The level of attendance at the Board of Commissioners Meetings and meetings with existing committees,
4. Contribution to the Company's supervision process,
5. His involvement in certain assignments,
6. Compliance with applicable laws and regulations and Company policies.

The Party Conducting the Assessment

The party conducting the assessment on the performance of the Board of Commissioners is the Shareholders in the GMS.

KOMISARIS INDEPENDEN

Independent Commissioners

Komisaris Independen

Dalam komposisi Dewan Komisaris perlu ditempatkan Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki benturan kepentingan sehingga tidak berpotensi mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi Agar tujuan tersebut tercapai, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, hal ini tertuang pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Pasal 13 ayat 3 dan 4. Salah satu fungsi Komisaris Independen adalah agar pengambilan keputusan bersifat efektif, objektif dan independen karena Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dalam arti dapat menjalankan tugas tanpa adanya tekanan dan kepentingan dari pihak manapun.

Komposisi dan Dasar Hukum Penunjukan

Komposisi Komisaris Independen merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN yakni paling sedikit sebanyak 20%. Saat ini BBI hanya memiliki dua orang Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama. Satu di antaranya ditunjuk sebagai Komisaris Independen. Untuk Tahun 2020 ditetapkan Masrokhani sebagai Komisaris Independen Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 34/KOM/BBI/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Dengan demikian, ketentuan komposisi 20% tersebut telah terpenuhi.

Kriteria Penentuan

Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota

Independent Commissioner

In the composition of the Board of Commissioners, it is necessary to place an Independent Commissioner. Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who come from outside the company and do not have a conflict of interest so that they do not have the potential to interfere with their ability to carry out their duties independently and critically, both in relation to each other and the relationship with the Board of Directors. , this is stated in the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN, Article 13 paragraphs 3 and 4. One of the functions of the Independent Commissioner is to decision making is effective, objective and independent because the Board of Commissioners is required to carry out its duties and responsibilities independently in the sense that it can carry out its duties without pressure and interest from any party.

Composition and Legal Basis of Appointment

The composition of the Independent Commissioner refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN, which is at least 20%. Currently, BBI only has two members of the Board of Commissioners, including the President Commissioner. One of them was appointed as an Independent Commissioner. For the year 2020, Masrokhani is appointed as an Independent Commissioner. Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 34/KOM/BBI/X/2020 dated October 12, 2020. Thus, the 20% composition requirement has been fulfilled.

Determination Criteria

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with members of the Board of

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independen, persyaratan yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan;
- c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Anggota Dewan Komisaris lainnya atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
- e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke 3, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
- f. Dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional perusahaan akan bertindak secara independen terutama dalam hal proses pengambilan keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis diatas;
- g. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS;
- h. Jika Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya;
- i. Pernyataan Independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholder or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.

To be appointed as an Independent Commissioner, the existing requirements must meet the following criteria:

- a. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;
- b. Do not own shares either directly or indirectly in the company;
- c. Has no affiliation with the Director and/or other Members of the Board of Commissioners or the Company's Major Shareholders;
- d. Does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities;
- e. Do not have a blood family relationship up to the 3rd degree, either in a straight line or a side line or a relationship arising from marriage with other members of the Board of Commissioners or with members of the Board of Directors;
- f. In carrying out the activities of the operational supervision function, the company will act independently, especially in terms of the decision-making process, including but not limited to the matters listed above;
- g. An Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms of office may be reappointed for a subsequent period as long as the Independent Commissioner declares himself to be independent at the GMS;
- h. If an Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the Independent Commissioner concerned can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee;
- i. Declaration of Independence of Independent Commissioners must be disclosed in the Annual Report.

Pernyataan Independensi

Komisaris Independen berkomitmen untuk menjunjung tinggi independensi, objektivitas dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan menghindari adanya keputusan dan kebijakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau preferensi terhadap kepentingan salah satu pihak. Komisaris Independen turut mempertahankan reputasi Perseroan dengan menjalankan prinsip praktik GCG yang benar sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, yang tercermin dalam sikap, perbuatan dan segala kebijakan yang diambil, baik secara individual dan mufakat.

Declaration of Independence

The Independent Commissioner is committed to upholding independence, objectivity and fairness in carrying out his duties and responsibilities, by avoiding decisions and policies that have the potential to cause a conflict of interest or preference for the interests of one party. The Independent Commissioner also maintains the Company's reputation by carrying out the principles of proper GCG practice in accordance with applicable guidelines and regulations, which is reflected in the attitudes, actions and all policies taken, both individually and by consensus.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

DIREKSI

Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Direksi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi dan secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal. Masing-masing Direktur dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing Direktur tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai koordinator kegiatan Direksi.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Pengangkatan Direksi:

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Anggaran Dasar Perusahaan PT Boma Bisma Indra (Persero)

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Boma Bisma Indra (Persero) yang terakhir kali dimutakhirkan pada tahun 2020. Board manual Direksi antara

The Board of Directors is the Company's organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

The Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS.

The Board of Directors has the responsibility to carry out its main duties in good faith and full of responsibility. Each member of the Board of Directors is fully responsible personally and jointly and severally for the loss of the Company, if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties in accordance with the provisions of the legislation.

The Board of Directors has a collegial duty and responsibility. Each Director can act and make decisions in accordance with the division of duties and authorities. However, the implementation of duties by each Director remains a shared responsibility. The position of each member of the Board of Directors including the President Director is equal. The duties of the President Director as coordinator of the activities of the Board of Directors.

Legal Basis

Legal Basis for Appointment of Directors:

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);
3. Articles of Association of PT Boma Bisma Indra (Persero)

Directors' Guidelines and Work Rules

The guidelines and work procedures of the Board of Directors are regulated in the Board Manual of PT Boma Bisma Indra (Persero) which was last updated in 2020. The Board of Directors manual contains, among others,

lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Direksi menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Adapun isi dari pokok pedoman kerja Direksi yang diatur dalam Board Manual antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
- b. Hak dan Kewajiban Direksi
- c. Komposisi dan Pembagian Tugas antar Direksi
- d. Penetapan Kebijakan Perusahaan oleh Direksi
- e. Pelimpahan Tugas dan Kewenangan
- f. Kriteria Anggota Direksi
- g. Program Pengenalan
- h. Etika Jabatan
- i. Pengelolaan Keuangan Perusahaan
- j. Rapat Direksi
- k. Kinerja Direksi
- l. Benturan Kepentingan Direksi
- m. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris
- n. Sekretaris Perusahaan
- o. Sistem Pengendalian Internal.

Persyaratan Direksi

Terdapat 2 (dua) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Direksi. Persyaratan tersebut adalah Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.

a. Persyaratan Umum

Persyaratan umum merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Orang perseorangan;
2. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
3. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
4. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
5. Tidak pernah menjadi Direktur atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam

instructions for the work of the Board of Directors explaining the stages of activities structured, systematic, easy to understand and can be carried out consistently, can be a reference for the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's vision and mission.

The contents of the main work guidelines of the Board of Directors which are regulated in the Board Manual, among others, regulate the following matters:

- a. Duties, Authorities and Obligations of the Board of Directors
- b. Rights and Obligations of Directors
- c. Composition and Division of Duties between Directors
- d. Determination of Company Policy by the Board of Directors
- e. Delegation of Duties and Authorities
- f. Criteria for Members of the Board of Directors
- g. Introductory Program
- h. Job Ethics
- i. Company Financial Management
- j. Board of Directors Meeting
- k. Board of Directors Performance
- l. Directors' Conflict of Interest
- m. Working Relationship with the Board of Commissioners
- n. Company secretary
- o. Internal Control System.

Directors Requirements

There are 2 (two) types of requirements that must be met by a candidate for the Board of Directors. These requirements are General Requirements and Specific Requirements.

a. General requirements

General requirements are the basic requirements stipulated by the applicable laws and regulations, including:

1. Individuals;
2. Have good character, morals and integrity;
3. Able to carry out legal actions;
4. Never been declared bankrupt by the Court within 5 (five) years prior to the nomination;
5. Never been a Director or Member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination;
6. Never been convicted of committing an

- waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
6. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum dan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan untuk calon Direktur;
 7. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - b) Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 8. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan Direktur lain dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
 9. Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BBI mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi dari Indonesia. Komitmen yang sama juga dimiliki oleh Perseroan. Komitmen itu tak terpisahkan dengan implemementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang tujuannya antara lain meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemegang saham. Komitmen menutup peluang terjadinya korupsi berlaku bagi manajemen BBI dari lini terbawah hingga teratas.
 10. Memiliki integritas dan moral, bahwasannya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - a) Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang dalam pengurusan di tempat yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebelum pencalonan;
 - b) Cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati di tempat yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebelum pencalonan;
 - c) Perbuatan yang dapat dikategorikan unlawful act and a criminal offense that was detrimental to the state's finances within 5 (five) years prior to the nomination for a candidate for Director;
 7. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who during his tenure:
 - a) Never held an Annual GMS
 - b) Accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never provided accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and
 8. There must be no blood family relationship up to the third degree, either in a straight line or a side line or marital relationship (son-in-law or brother-in-law) with other Directors and/or Members of the Board of Commissioners;
 9. Must not hold concurrent positions in other positions that may cause a direct or indirect conflict of interest with the Company and or which is contrary to the provisions of the applicable laws and regulations. BBI supports the government's program to eradicate corruption from Indonesia. The Company has the same commitment. This commitment is inseparable from the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG), which aims, among other things, to increase customer and shareholder trust. The commitment to closing the opportunity for corruption applies to BBI management from the bottom to the top.
 10. Have integrity and morals, that the person concerned has never been involved in:
 - a) Engineering acts and deviant practices in the management at the place concerned previously worked before the nomination;
 - b) Default which can be categorized as not fulfilling the commitments that have been agreed at the place concerned previously worked before the nomination;
 - c) Actions that can be categorized as being able to provide personal benefits to prospective members of the Board of Directors, employees at the place concerned previously

dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai di tempat yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebelum pencalonan;

- d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
11. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan;
12. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi;
13. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif.

b. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan yang bergerak di jasa energi dan juga sebagai perusahaan terbuka. Disamping Anggota Direksi harus memiliki kompetensi teknis/keahlian terkait hal tersebut, yang bersangkutan juga harus:

1. Memiliki pengalaman menangani korporasi sebagai senior management dan dapat memberikan rekomendasi dan solusi yang diperlukan;
2. Memahami ketentuan-ketentuan terkait dengan perusahaan terbuka dan pasar modal.
3. Berani dan cepat (less bureaucracy) didalam pengambilan keputusan
4. Mempunyai rekam jejak yang bersih dari aspek integritas;
5. Memiliki leadership, sense of entrepreneurship dan pengalaman;
6. Networking yang memadai dan interpersonal skill;
7. Persyaratan khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang menjadi salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk diajukan kepada RUPS agar disahkan;
8. Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan terkait pemenuhan persyaratan tersebut dan disampaikan

worked before the nomination;

- d) Acts that can be categorized as a violation of the provisions relating to the principles of healthy company management.
11. Good character and have the ability to develop business for the advancement of the company;
12. Have competence, namely the ability and experience in fields that support the implementation of the duties and obligations of the Board of Directors;
13. Have a commitment to comply with the applicable laws and regulations;
14. Not an administrator of a political party and/or a candidate for a member of the legislature.

b. Special Requirements

Special requirements are requirements that are tailored to the needs and nature of the Company's business engaged in energy services and also as a public company. In addition to members of the Board of Directors must have technical competence/skills related to this matter, the person concerned must also:

1. Having experience dealing with corporations as senior management and able to provide recommendations and solutions needed;
2. Understand the provisions related to public companies and the capital market.
3. Courageous and fast (less bureaucracy) in decision making
4. Have a clean track record in terms of integrity;
5. Have leadership, sense of entrepreneurship and experience;
6. Adequate networking and interpersonal skills;
7. Special requirements are one of the substances of the nomination and selection system and procedures which are one of the substances of the nomination and selection systems and procedures developed by the Nomination and Remuneration Committee to be submitted to the GMS for approval;
8. Members of the Board of Directors are required to make a statement regarding the fulfillment of these requirements and submit it to the Company for research and

kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.

documentation.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Masa jabatannya berakhir.
2. Mengundurkan diri.
3. Tidak lagi memenuhi sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan persyaratan perundang-undangan.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
5. Meninggal dunia.

RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang diberhentikan atau yang lowong.

Komposisi Direksi

Hingga akhir tahun 2020, anggota Direksi PT BBI (Persero) berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi dan pemasaran dengan komposisi sebagai berikut:

Terms of Service

Based on Article 10 paragraph 11 of the Articles of Association, the term of office of members of the Board of Directors is set for 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office.

The term of office of members of the Board of Directors ends when:

1. His term of office ends.
2. Resign.
3. No longer meets as a member of the Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association and the statutory requirements.
4. Dismissed based on the decision of the GMS.
5. Died.

The GMS may appoint another person to fill the position of a member of the Board of Directors who is dismissed from his position or to fill a vacancy. The term of office of a person who is appointed to replace the dismissed member of the Board of Directors or to fill the vacancy is the remaining term of office of the dismissed or vacant member of the Board of Directors.

Composition of the Board of Directors

Until the end of 2020, there are 2 (two) members of the Board of Directors of PT BBI (Persero), consisting of the President Director, Operations and Marketing Director with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Masa Jabatan Tenure	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1. Yoyok Hadi Satriyono	Direktur Utama President Director	Jakarta, Indonesia	Agustus 2019 - sekarang August 2019 - now	Penetapan sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Boma Bisma Indra (Persero) No. SK - 168/MBU/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019 Appointment as President Director based on the Decree of the Minister of BUMN as the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Boma Bisma Indra (Persero) No. SK - 168/MBU/08/2019 dated 01 August 2019
2. M. Agus Budiyanto	Direktur Operasi & Pemasaran Director Operational	Surabaya, Indonesia	Februari 2018- sekarang February 2018-now	Penetapan sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Boma Bisma Indra (Persero) No. SK-75/MBU/04/2016 tanggal 12

& Marketing
Director

April 2016

Appointment as Director based on the Decree of the Minister of BUMN as the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Boma Bisma Indra (Persero) No. SK-75/MBU/04/2016 dated 12 April 2016

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Dasar Pengangkatan Direksi

Seluruh anggota Direksi BBI telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan lulus fit and proper test sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Tanggal Efektif Effective Date
1. Yoyok Hadi Satriyono	Direktur Utama President Director		
2. M. Agus Budiyanoto	Direktur Operasi & Pemasaran Director Operational & Marketing Director		

Independensi Direksi

Agar Direksi dapat bertindak sebaikbaiknya demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka perusahaan menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepemimpinan perusahaan;
- Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
- Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Hal ini dapat juga terlihat dari kepemilikan saham anggota Direksi di dalam Perusahaan atau rangkap jabatan anggota Direksi dalam

Fit and Proper Assessment and Basis for Appointment of the Board of Directors

All members of the Board of Directors of BBI have met the criteria and conditions required in the fit and proper test based on the Limited Liability Company Law, the Company's Articles of Association, regulations related to good corporate governance, as well as other relevant rules and regulations. All members of the Board of Directors have adequate integrity, competence and reputation. This is evidenced by obtaining approval to pass the fit and proper test as follows:

Board of Directors Independence

In order to the Board of Directors to act as well as possible for the benefit of the company as a whole, the independence of the Board of Directors is one of the important factors that must be maintained. To maintain independence, the company stipulates the following provisions:

- Apart from the Board of Directors, any other party is prohibited from doing or intervening in the management of the company;
- The Board of Directors must be able to make decisions objectively, without conflict of interest and free from any pressure from any part;
- The Board of Directors is prohibited from carrying out activities that can interfere with their independence in managing the company.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors acts independently and free from the interests of any party. This can also be seen from the share ownership of members of the Board of Directors in the Company or concurrent positions of members

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Perusahaan. Tabel berikut menunjukkan Independensi Direksi dalam Perusahaan:

of the Board of Directors in the Company. The following table shows the Independence of the Board of Directors in the Company:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Yoyok Hadi Satriyono	M. Agus Budiyanto
1. Bukan Pemegang Saham mayoritas atau pejabat pada institusi Pemegang Saham mayoritas atau terasosiasi langsung dengan Pemegang Saham mayoritas Not the majority shareholder or official in the institution of the majority shareholder or directly associated with the majority shareholder	√	√
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan atau afiliasinya Not serving as a Board of Directors in the Company or its affiliates	√	√
3. Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir Not working in the Company or its affiliates within the last 1 (one) year	√	√
4. Tidak mempunyai keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya Does not have a financial relationship, either directly or indirectly, with the Company or other companies that provide services and products to the Company and its affiliates	√	√
5. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Direksi bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkungan Perseroan Free from conflicts of interest and business activities or other relationships that may hinder or interfere with the ability of the Board of Directors concerned to act or think freely within the Company.	√	√

Kepemilikan Saham Direksi

Perseroan mewajibkan seluruh anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Rincian kepemilikan Saham Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Directors Share Ownership

The Company requires all members of the Board of Directors to disclose their share ownership, both in the Company and in other companies, domiciled at home and abroad in a report that must be updated annually. Details of the share ownership of the Board of Directors are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Shareholder		
		PT BBI	Entitas Anak dan Afiliasi PT BBI Subsidiary and Affiliate of PT BBI	Perusahaan Lain Other Company
1. Yoyok Hadi Satriyono	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil
2. M. Agus Budiyanto	Direktur Operasi & Pemasaran Operational & Marketing Director	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Hubungan Afiliasi Direksi

Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi bila di antara para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Board of Directors Affiliation

The Company's Articles of Association states that the GMS may dismiss members of the Board of Directors if among the members of the Board of Directors, members of the Board

memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Hubungan seperti yang dimaksud dapat dilihat sebagai berikut:

of Commissioners and Shareholders have family relationships up to the third degree, either vertically or horizontally, including relationships arising from marriage.

Such a relationship can be seen as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Yoyok Hadi Satriyono	Komisaris Utama President Director		√		√		√		√		√		√		√
M. Agus Budianto	Direktur Operasi & Pemasaran Operational & Marketing Director		√		√		√		√		√		√		√

Fungsi Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Functions of the Board of Directors

The Board of Directors is a corporate organ that is fully responsible for the management of the company for the purposes and objectives of the company and represents the company both inside and outside the court in accordance with the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.

Tugas dan Wewenng Masing-Masing Anggota Direksi

Direksi merupakan organ tata kelola yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi bertugas menetapkan arah tujuan Perseroan, menetapkan kebijakan serta upaya-upaya pencapaiannya.

Tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan No.001/Kpts.1000.1400/1.2020 tanggal 2 Januari 2020 yaitu sebagai berikut:

a. Direktur Utama

Tugas Pokok dan Uraian Tugas dijabarkan sebagai berikut:

1. Direktur Utama bertanggung jawab untuk keberhasilan kepemimpinannya dan

Duties and Authorities of Each Member of the Board of Directors

The Board of Directors is a governance organ that is responsible for the management of the Company for the interests and objectives of the Company. The Board of Directors is tasked with determining the direction of the Company's goals, determining policies and efforts to achieve them.

The duties and authorities of each member of the Board of Directors are regulated in Decree No.001/Kpts.1000.1400/1.2020 dated January 2, 2020, as follows:

a. President Director

The Main Tasks and Job Descriptions are described as follows:

1. The President Director is responsible for the success of his leadership and the

keberhasilan para manager organisasi Perusahaan berdasarkan petunjuk strategis yang ditetapkan oleh Komisaris PT BBI (Persero), AD dan ART PT BBI serta peraturan lainnya di lingkungan Kementerian BUMN.

2. Menentukan, merumuskan dan memutuskan sebuah kebijakan dalam Perusahaan.
3. Menyusun dan memutuskan strategi Bisnis untuk mengarahkan bisnis menjadi lebih maju.
4. Menjamin bahwa tugas-tugas proyek / order, operasional financial, dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran, jadwal dan syarat-syarat yang ditentukan sesuai kontrak (customer spec), peraturan perusahaan, dan aturan-aturan Pemegang negara yang berkaitan dengan kebijakan bisnis BUMN.
5. Membantu (Komisaris / Kuasa Saham) dalam mengkoordinasikan, menyusun arah, tujuan dan kebijakan kegiatan peran dan fungsi Direktur Operasi dan Pemasaran serta mengendalikan agar tiap fungsi yang ada di operasi dan pemasaran khususnya, dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan perusahaan yang konsisten dan sesuai misi dan visi perusahaan secara keseluruhan.
6. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan; pengelolaan, pengawasan maupun tinjau ulang pelaksanaan order dalam lingkup Direktorat Utama, agar dapat berjalan dengan baik dan semua persyaratan kontrak dapat dipenuhi
7. Bertindak sebagai wakil manajemen (Jajaran BOD) dalam segala segi project dan atau order dengan menggunakan semua wewenang yang diberikan kepadanya oleh Pemegang Saham, untuk melaksanakan tugasnya.
8. Menandatangani kontrak kerja bidang operasi perusahaan, Berita Acara dan dokumen lainnya, sebatas kewenangannya sesuai perundangan BUMN
9. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja Perusahaan dan mengevaluasi kesuksesan Perusahaan.

Wewenang Direktur Utama:

1. Menandatangani surat Cheque / BG, Berita Acara dan dokumen lainnya yang terkait dengan Bidang Operasional dan Pemasaran sebatas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan Direktur BUMN
2. Memberikan konsultasi kepada para

success of the Company's organizational managers based on the strategic directions set by the Commissioner of PT BBI (Persero), PT BBI's AD and ART and other regulations within the Ministry of SOEs.

2. Determine, formulate and decide a policy within the Company.
3. Develop and decide on a Business strategy to direct the business to be more advanced.
4. Ensure that project/order tasks, financial operations, can be completed in accordance with the budget, schedule and conditions specified in the contract (customer spec), company regulations, and state holder regulations relating to BUMN business policies.
5. Assist (Commissioner/Proxy of Shares) in coordinating, formulating directions, objectives and policies for the roles and functions of the Director of Operations and Marketing as well as controlling so that each function in operations and marketing in particular, can run according to the plans that have been set by the company that are consistent and appropriate overall mission and vision of the company.
6. Coordinate all activities; management, supervision and review of order implementation within the scope of the Main Directorate, so that it can run well and all contract requirements can be fulfilled
7. Act as a management representative (BOD) in all aspects of projects and or orders by using all the authority given to him by the Shareholders, to carry out their duties.
8. Signing a work contract in the field of company operations, Minutes and other documents, to the extent of their authority in accordance with BUMN legislation
9. Submit reports to shareholders on the Company's performance and evaluate the Company's success.

Authorities of the President Director:

1. Signing the Check / BG letter, Minutes and other documents related to the Operational and Marketing Sector to the extent of the authority regulated in the laws and regulations of the Director of SOEs
2. Provide consultation to Managers in

- Managersesuai dengan kepentingan perusahaan
3. Memberikan penilaian kinerja kepada manajerial dibawahnya
 4. Menetapkan biaya operasional dan pemasaran dalam RKAP tahun berjalan guna menjamin operasional dan pemasaran berjalan sesuai dengan target, visi dan misi perusahaan.
 5. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi Keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan.
 6. Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan dalam rapat-rapat BOD.

b. Direktur Operasi dan Pemasaran

Tugas Pokok dan Uraian tugasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memastikan sumber daya di pergunakan dan dirawat dengan SOP yang terbaik dan sesuai dengan visi, dan Misi Perusahaan
2. Memanfaatkan dan mengembangkan sistem informasi perusahaan dan memastikan fungsi komunikasi berkelanjutan di mutahirkan dan ditujukan pada standard tertinggi.
3. Membangun yang lebih baik dan penyebarluasan informasi Perusahaan sebagai (fungsi dukungan administratif sehingga berjalan secara efektif) dan membangun sumber daya infomasi perusahaan yang berkelanjutan sampai dengan tingkat pemegang saham
4. Membangun kinerja pemasaran perusahaan, baik ditingkat regional, nasional sampai dengan tingkat international, sehingga dapat mengembangkan fungsi pemasaran dan penjualan untuk survive dalam menjamin ketercapaian target-target pemasaran dan pejualan perusahaan
5. Membangun dan menjamin konektivitas bisnis perusahaan terbangun dengan baik, sesuai visi dan misi perusahaan bahwa keberhasilan bisnis perusahaan juga sangat dipengaruhi keberhasilan dalam membangun jaringan dan hubungan bisnis baik di dalam maupun diluar negeri.
6. Menandatangani kontrak kerja bidang operasi dan pemasaran, Berita Acara dan dokumen lainnya sebatas kewenangan sesuai perundangan BUMN

accordance with the interests of the company

3. Provide performance appraisals to the managerial below
4. Determine operational and marketing costs in the current year's RKAP to ensure that operations and marketing run in accordance with the company's targets, vision and mission.
5. Coordinate and control activities in the field of financial administration, staffing and secretarial activities, procurement activities and equipment.
6. Take decisions as delegated by the BOD or in certain situations deemed necessary, which are decided in BOD meetings.

b. Director of Operations and Marketing

The main tasks and job descriptions can be described as follows:

1. Ensure that resources are used and maintained with the best SOPs and in accordance with the vision and mission of the company
2. Utilize and develop the company's information system and ensure the continuous communication function is updated and aimed at the highest standards.
3. Building better and disseminating Company information as (administrative support function so that it runs effectively) and building sustainable corporate information resources up to shareholder level
4. Building the company's marketing performance, both at the regional, national and international levels, so as to develop marketing and sales functions to survive in ensuring the achievement of the company's marketing and sales targets.
5. Build and ensure that the company's business connectivity is well developed, according to the company's vision and mission that the company's business success is also greatly influenced by the success in building business networks and relationships both at home and abroad.
6. Signing a work contract in the field of operations and marketing, Minutes and other documents to the extent of the authority in accordance with BUMN

7. Membantu Direktur Utama dalam mengkoordinasikan, menyusun arah, tujuan dan kebijakan kegiatan peran dan fungsi Direktur Operasi dan Pemasaran serta mengendalikan agar tiap fungsi yang ada dioperasikan dan pemasaran khususnya, dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan perusahaan yang konsisten dan sesuai misi dan visi perusahaan.
8. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan; pengelolaan, pengawasan maupun tinjau ulang pelaksanaan order dalam lingkup Direktorat Operasi dan Pemasaran, agar dapat berjalan dengan baik dan semua persyaratan kontrak dapat dipenuhi.
9. Bertindak sebagai wakil manajemen Direktur Utama dalam segala segi project dan atau order dengan menggunakan semua wewenang yang diberikan kepadanya oleh Direktur Utama untuk melaksanakan tugasnya
10. Menjamin bahwa tugas-tugas proyek atau order dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran, jadwal dan syarat-syarat yang ditentukan sesuai kontrak (customer spect), peraturan perusahaan, dan aturan-aturan negara yang berkaitan dengan kebijakan bisnis BUMN.

Wewenang Direktur Operasi dan Pemasaran

1. Menandatangani surat Cheque / BG, PR, Berita Acara dan dokumen lainnya yang terkait dengan Bidang Operasional dan Pemasaran sebatas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan Direksi BUMN.
2. Memberikan konsultasi kepada (para Manager) sesuai dengan kepentingan perusahaan
3. Mengusulkan tenaga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan, untuk posisi strategis dibidang operasional dan pemasaran
4. Menetapkan job description kepada jabatan managerial dibawahnya
5. Memberikan penilaian kinerja kepada manajerial dibawahnya
6. Menetapkan biaya operasional dan pemasaran dalam RKAP tahun berjalan guna menjamin operasional dan pemasaran berjalan sesuai dengan target, visi dan misi perusahaan.

legislation

7. Assist the President Director in coordinating, formulating directions, objectives and policies for the roles and functions of the Director of Operations and Marketing as well as controlling so that each operating function and marketing in particular, can run according to the plans that have been set by the company that are consistent and in accordance with the mission and vision company.
8. Coordinate all activities; management, supervision and review of order implementation within the scope of the Operations and Marketing Directorate, so that it can run well and all contract requirements can be fulfilled.
9. Act as a representative of the management of the President Director in all aspects of projects and or orders by using all the authority given to him by the President Director to carry out his duties
10. Ensuring that project tasks or orders can be completed in accordance with the budget, schedule and conditions specified in the contract (customer spect), company regulations, and state regulations relating to BUMN business policies.

Authority of Director of Operations and Marketing

1. Signing Check / BG, PR, Minutes and other documents related to the Operational and Marketing Sector to the extent of the authority regulated in the laws and regulations of the Board of Directors of SOEs.
2. Provide consultation to (managers) in accordance with the interests of the company
3. Propose personnel who meet the required qualifications and competencies for strategic positions in the field of operations and marketing
4. Assign job descriptions to managerial positions below it
5. Provide performance appraisals to the managerial below
6. Determine operational and marketing costs in the current year's RKAP to ensure that operations and marketing run in accordance with the company's targets, vision and mission.

Hak dan Wewenang Direksi

1. Mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian serta dalam lingkup Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan atau keputusan RUPS
2. Mengikat perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perusahaan dengan sejumlah pembatasan.
3. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan perusahaan.
5. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan diluar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan perusahaan baik sendiri sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
6. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan bagi karyawan perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan kepegawaian perusahaan.
8. Memberi penghargaan dan sanksi (reward and punishment) karyawan perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan.
9. Memastikan sumber daya manusia perusahaan memiliki kompetensi dan kemampuan yang handal sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Melakukan aktivitas di luar perusahaan yang tidak memiliki benturan kepentingan dan atau secara langsung berhubungan dengan kepentingan perusahaan seperti kegiatan mengajar menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar serta tidak mengganggu tugas dan kewajiban sebagai Direksi dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.

Rights and Authorities of the Board of Directors

1. Representing the company inside and outside the court on all matters and all events as well as within the scope of the Company's Work Plan and Budget with the limitations as stipulated in the laws and regulations, articles of association and or the resolution of the GMS
2. Bind the company with other parties and other parties with the company with a number of restrictions.
3. Perform all actions and deeds both regarding management and ownership, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
4. Establish policies in the leadership and management of the company.
5. Regulate the delegation of powers of the Board of Directors to represent the company inside and outside the Court to a person or several Directors specifically appointed for that purpose or to one or several employees of the company either alone or jointly or to another person or entity.
6. Regulate the provisions regarding the company's staffing including the determination of salaries, pensions, old-age benefits and income for company employees based on applicable regulations.
7. Appoint and dismiss company employees based on applicable laws and regulations and company employment regulations.
8. Giving rewards and sanctions (reward and punishment) for company employees based on company staffing regulations.
9. Ensuring that the company's human resources have reliable competencies and capabilities in accordance with their field of work.
10. Doing activities outside the company that do not have a conflict of interest and or are directly related to the interests of the company such as teaching activities to become administrators of business associations and the like are allowed to use a reasonable time and do not interfere with the duties and obligations of the Board of Directors and with the knowledge of the President Director or other Directors.
11. Obtain leave in accordance with applicable regulations.
12. Use professional advice.
13. Receive incentives and bonuses if the company achieves a profit level as a reward for its work performance, the amount of

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

11. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Menggunakan saran profesional.
13. Menerima insentif dan tantiem apabila perusahaan mencapai tingkat keuntungan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS
14. Menerima gaji berikut tunjangan, sarana dan fasilitas perusahaan
15. serta santunan purna jabatan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan, asas kepatutan dan kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjabaran tentang sarana dan fasilitas perusahaan dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan RUPS.
16. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi perusahaan.

- which is determined by the GMS
14. Receive salary along with allowances, company facilities and facilities
 15. As well as post-employment benefits in accordance with the results of the determination of the GMS whose provision is adjusted to the company's financial condition, the principles of propriety and fairness and does not conflict with the applicable laws and regulations. The description of the company's facilities and facilities is further outlined in the GMS Resolution.
 16. Establish and adjust the company's organizational structure.

Mekanisme Pengangkatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan Direksi

- a. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- b. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya mengatur mengenai:
 1. Penjaringan atau nominasi calon Anggota Direksi;
 2. Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi anggota Direksi.
- c. Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

Pemberhentian Direksi

- a. RUPS dapat memberhentikan Anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
 1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
 2. Tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara yang disebabkan kelalaian atau kesalahan oleh anggota Direksi yang bersangkutan.

Mechanism of Appointment, Resignation and Dismissal of Directors

Appointment of Directors

- a. Members of the Board of Directors are elected and dismissed by the GMS through a transparent process.
- b. Guidelines for the appointment and dismissal of, among others, regulates:
 1. Selection or nomination of candidates for members of the Board of Directors;
 2. Assessment/testing of fit and proper test for members of the Board of Directors.
- c. Shareholders/GMS establish guidelines for the appointment and dismissal of the Board of Directors.

Dismissal of Directors

- a. The GMS may dismiss a Member of the Board of Directors at any time before his/her term of office ends by stating the reasons, including:
 1. Unable to carry out their duties properly as stipulated in the Articles of Association and/or GMS Resolutions.
 2. Not implementing the laws and regulations.
 3. Engaging in actions that are detrimental to the Company and/or the State due to negligence or error by the member of the Board of Directors concerned.

4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pemberhentian dimana dimaksud diatas berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Direktur yang diberhentikan tersebut tetap diminta pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun buku sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, sepanjang tindakan Direktur tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu atau karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat, Dewan Komisaris untuk sementara waktu menjalankan pengurusan perusahaan akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus Perseroan, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.
- c. Dalam hal perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS dengan lampainya kurun waktu tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Pengunduran Diri Anggota Direksi

- a. Dalam hal Anggota Direksi mengundurkan diri, suatu pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan oleh Direktur yang mengundurkan diri tersebut kepada perusahaan untuk perhatian Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- b. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi hasil

4. Is declared guilty by a court decision that has permanent legal force.

- b. The dismissal referred to above is effective as of the closing of the GMS, unless otherwise determined by the GMS. The dismissed Director is still held accountable from the beginning of the financial year until the effective date of his resignation, as long as the Director's actions are reflected in the Annual Report of the relevant financial year. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or for any reason there is no member of the Board of Directors serving, the Board of Commissioners will temporarily run the management of the company but only with the right to carry out management actions related to ongoing matters and activities or The GMS may appoint another party to temporarily manage the Company, with the same power and authority and no later than 30 (thirty) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy for the position of the Board of Directors.

- c. In the event that the company does not hold a GMS with the lapse of that period or the GMS cannot make a decision, the temporary dismissal will be canceled and the member of the Board of Directors concerned must carry out his duties again as appropriate.

Resignation of Members of the Board of Directors

- a. In the event that a member of the Board of Directors resigns, a written notification must be submitted by the resigning Director to the company for the attention of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The company is required to hold a GMS to decide on the resignation of a member of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter.
- b. The company is required to disclose information to the public and submit it to the Financial Services Authority no later than 2 (two) working days after receiving the request for resignation of the Board of Directors as a result of holding the GMS as referred to above.

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas.

- c. Dalam hal Anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah Anggota Direksi.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
- e. Direktur yang mengundurkan diri tetap diminta pertanggungjawabannya sejak pengangkatan-tanggal penetapan pengunduran diri, sepanjang tindakan Direktur tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan.

- c. In the event that a Member of the Board of Directors resigns resulting in the number of members of the Board of Directors being less than 2 (two) people, then the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new Member of the Board of Directors has been appointed so that it meets the minimum requirements for the number of Members of the Board of Directors.
- d. Before the resignation becomes effective, the member of the Board of Directors concerned remains responsible for the implementation of his duties and responsibilities.
- e. Directors who resign are still held accountable from the date of stipulation of resignation, as long as the Director's actions are reflected in the Annual Report of the financial year concerned.

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 Direksi telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Laporan Hasil Usaha BBI periode tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Operasi mencapai sebesar Rp 241.328 juta, bila dibandingkan dengan periode tahun 2019 sebesar Rp266.504 juta terdapat penurunan sebesar 9,45% atau Rp 25.176 juta
2. Realisasi Biaya Operasi sebesar Rp 300.264 juta, dibandingkan dengan realisasi periode tahun 2019 sebesar Rp319.961 juta terdapat penurunan sebesar 6% atau Rp 19.697 juta
3. Laba komprehensif tahun berjalan Rp 75.685 juta, dibanding dengan periode tahun 2019 rugi sebesar Rp 46.073 juta
4. Umur piutang saat ini 51 hari
5. Total Aset sebesar Rp 916.366 juta terdapat pertumbuhan sebesar Rp121.246 juta atau 15,25% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp 795.120 juta.
6. BBI telah merealisasikan penyaluran dana untuk Pengembangan Sosial Kemasyarakatan melalui PKBL dengan rincian sebagai berikut: a) melalui program kemitraan sebesar Rp15.000.000; b) program bina lingkungan sebesar Rp 0,-. PKBL dari alokasikan dari laba bersih tahun sebelumnya sebesar maksimal 2%.
7. Tingkat Kesehatan mencapai 32,00

Implementation of the Duties of the Board of Directors

In 2020 Throughout 2012, the Board of Directors has carried out its functions, duties and responsibilities. The BBI Operating Results Report for the 2020 period can be explained as follows:

1. Realization of Operating Income reached Rp 241,328 billion, when compared to the 2019 period of Rp 266.504 billion, there was a derivation of Rp 25.176 billion or 9.45%.
2. Realization of Operating Expenses amounted to Rp 300,264 billion, compared to the realization for the 2019 period of Rp 319.961 billion, there was a derivation of Rp 19.697 billion or 6%.
3. Comprehensive income was Rp.75.685 billion, compared to the period in 2019 loss Rp 46.073 billion.
4. The current age of receivables is 51 days
5. Total Assets Rp 916.366 billion, there was a growth of Rp 121.246 billion or 15.25% from the realization in 2019 of Rp 795.20 billion
6. BBI has realized the distribution of funds for Community Social Development through PKBL with the following details: a) through a partnership program of Rp. 15,000,000; b) community development program of Rp. 0,-. PKBL funds received from the allocation of the previous year's net profit of a maximum of 2%.
7. Health level reached 32.00 (Unhealthy-B)
8. KPI score reached 57.53% of the target of 100.0%.

(KURANG SEHAT-B).

8. Skor KPI mencapai 57.53% dari 100.0%.

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusannya, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi tersebut diperlukan persetujuan RUPS berdasar suara terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Program Pengenalan Direksi Baru

Ketentuan mengenai program pengenalan Direksi baru di PT Boma Bisma Indra (Persero) diatur oleh Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Program Pengenalan Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi perusahaan secara umum.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan berada pada Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan).
3. Program Pengenalan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di perusahaan.
 - b. Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasional, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
 - c. Keterangan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal di perusahaan.

Conflict of Interest Management

In the event of a conflict of interest. Members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that can harm the Company or reduce the Company's profits and are required to disclose conflicts of interest in each of their decisions, so that to carry out legal actions in the form of transactions containing conflicts of interest between the personal economic interests of the members of the Board of Directors, approval from the GMS is required based on the majority vote of the shareholders. have no conflict of interest.

Provisions Regarding the Introduction of a New Board of Directors

Program at PT Boma Bisma Indra (Persero) are regulated by the Minister of SOE Regulation No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and No.PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance.

Good Company (Good Corporate Governance) in BUMN. Introductory Program Provisions regarding the introduction program include the following:

1. For newly appointed members of the Board of Directors, an Introduction Program must be given regarding the general condition of the company.
2. The responsibility for conducting the introduction program rests with the Corporate Secretary (Corporate Secretary).
3. Introductory Program, including:
 - a. Implementation of GCG principles in the company.
 - b. An overview of the company related to the objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risks, internal control and other strategic issues.
 - c. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies in the company.
 - d. Information regarding the obligations, duties, responsibilities and rights of the Board of Directors and the Board of

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

- d. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan perusahaan serta masyarakat setempat.
 4. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang, ke fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.
 5. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Anggota Direksi baru.
- Commissioners;
 - e. Understanding related to ethical principles and norms that apply in the company environment and the local community.
 4. The introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to branch offices, to Company facilities, reviewing company documents or other programs deemed appropriate to the needs.
 5. This introduction program is carried out no later than 3 (three) months after the appointment of new members of the Board of Directors.

Peningkatan Kapabilitas Direksi

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis inti perusahaan, mengantisipasi masalah yang timbul dikemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan perusahaan.

Ketentuan-ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2. Rencana untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapabilitas dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi yang akan dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
3. Program Peningkatan Kapabilitas dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis;
 - b. mengikuti kursus, pelatihan atau program pendidikan yang sejenis;
 - c. menulis makalah, artikel atau karya tulis lain yang dipublikasikan, atau;
 - d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
4. Setiap Anggota Direksi yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas sebagaimana dalam poin 3.a. dan 3.b. diminta untuk menyajikan presentasi.
5. Kepada Anggota Direksi yang lainnya dalam

Board of Directors Capability Improvement

Capability improvement is considered important so that the Board of Directors can always update information about the latest developments of the company's core business, anticipating problems that arise in the future for the sustainability and progress of the company.

The provisions regarding the Capability Improvement Program for the Board of Directors are as follows:

1. The Capacity Building Program is implemented in order to increase the effectiveness of the work of the Board of Directors.
2. The plan to implement the Capability Improvement Program is included in the Work Plan and Budget of the Board of Directors which will be included in the Company's Work Plan and Budget
3. The Capacity Building Program can be carried out by:
 - a. attend seminars, workshops, or other similar activities;
 - b. attend courses, training or similar educational programs;
 - c. write a published paper, article or other written work, or;
 - d. be a speaker in the activities as referred to in letter a., become a teacher or become an instructor in the activities referred to in letter b.
4. Each member of the Board of Directors who participates in the Capability Improvement Program as referred to in point 3.a. and 3.b. asked to present a presentation.
5. To other members of the Board of Directors

rangka berbagi informasi dan pengetahuan (sharing knowledge).

6. Anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi.

Setiap tahunnya anggota Direksi mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai bentuk pembelajaran berkelanjutan. Sepanjang tahun 2020 pelatihan, seminar dan pendidikan yang diikuti Direksi yaitu sebagai berikut:

in order to share information and knowledge (sharing knowledge).

6. The member of the Board of Directors concerned is responsible for making a report on the implementation of the Capacity Building Program.

The report is submitted to the Board of Directors. Every year members of the Board of Directors participate in a competency development program as a form of continuous learning. Throughout 2020 the training, seminars and education attended by the Board of Directors are as follows:

No	Tanggal Date	Nama Anggota Dewan Komisaris Member's name board of Commissioners	Jabatan Position	Kegiatan Activity
1	4 November 2020 November 4, 2020	Yoyok Hadi Satriyono	Direktur Utama President Director	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN-Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN - The Ministry of SOEs in collaboration with the International Financial Corporation (IFC)
2	4 November 2020 November 4, 2020	M. Agus Budiyanto	Direktur Operasi dan Pemasaran Director of Operations and Marketing	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN-Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN - The Ministry of SOEs in collaboration with the International Financial Corporation (IFC) Webinar Optimalisasi Aset BUMN di Era New Normal – Forum BUMN Webinar on Optimizing BUMN Assets in the New Normal Era – Soe Forum

Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja di Bawah Direksi

BBI tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi. Namun demikian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh Organ struktural yang dipimpin oleh Para Manjer Biro dan General Manajer. Adapun masing-masing Unit Kerja tersebut mempertanggungjawabkan kinerjanya setiap kuartal kepada Direksi melalui kegiatan Manajemen Review.

Penilaian Kinerja Direksi

Berdasarkan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota

Performance Assessment of Committees and Work Units Under the Board of Directors.

BBI does not have a Committee under the Board of Directors. However, the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is supported by structural organs led by Bureau Managers and General Managers. Each of these Work Units is accountable for its performance every quarter to the Board of Directors through Management Review activities.

Board of Directors Performance Assessment

Based on Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is regulated that in the event that the Board of Directors

Direksi atau lebih maka tanggung jawab Direksi berlaku secara tanggung renteng

1. Kriteria evaluasi kinerja Direksi secara kolegal maupun individu berdasarkan usulan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk disetujui berdasarkan Key Performance Indicator (KPI antara lain meliputi):
 - a. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya,
 - b. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris,
 - c. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perusahaan,
 - d. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu,
 - e. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan,
 - f. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan,
 - g. Pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen.
2. Kinerja anggota Direksi dievaluasi secara berkala minimal setahun sekali berdasarkan kriteria evaluasi kinerja oleh Dewan Komisaris yang telah disetujui RUPS.
3. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Direksi sejak tanggal pengangkatannya.
4. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.
5. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

consists of 2 (two) or more members of the Board of Directors, the responsibilities of the Board of Directors apply jointly and severally.

1. Criteria for evaluating the performance of the Board of Directors collegially and individually based on the recommendation of the Board of Commissioners to the GMS for approval based on the Key Performance Indicators (KPI, among others include):
 - a. Preparation of KPIs at the beginning of the year and evaluation of their achievements,
 - b. The level of attendance at the Board of Directors Meetings and meetings with the Board of Commissioners,
 - c. Contribution to the Company's business activities,
 - d. His involvement in certain assignments,
 - e. Its commitment to advancing the interests of the Company,
 - f. Compliance with applicable laws and regulations as well as Company policies,
 - g. Achievement of the Company's targets as stated in the RKAP and Management Contracts.
2. The performance of the members of the Board of Directors is periodically evaluated at least once a year based on the performance evaluation criteria by the Board of Commissioners which have been approved by the GMS.
3. In general, the performance of the Board of Directors is determined based on the duties and obligations stated in the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. Formal evaluation criteria are communicated openly to Members of the Board of Directors from the date of their appointment.
4. The results of the evaluation of the performance of the Board of Directors as a whole and the performance of each Member of the Board of Directors individually are an integral part of the compensation and incentive scheme for Members of the Board of Directors.
5. The results of the evaluation performance of each Member Directors individually one of the basic considerations for Shareholders to dismiss and/ reappoint the relevant Member of the Board of Directors. The results of the performance evaluation are a means of assessing and increasing the effectiveness of the Board of Directors.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remuneration Policy of The Board of Commissioners
and Board Of Directors

Pengungkapan Prosedur, Indikator dan Dasar Penetapan Remunerasi

Prosedur dan indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian BUMN dan tidak berada pada kewenangan Perusahaan. Adapun dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.

Disclosure of Procedures, Indicators and Basic Remuneration Determination

Procedures and indicators of determining the remuneration of the Board of Commissioners and Directors are fully carried out by the Ministry of BUMN and are not on the authority of the company. The basis for the determination of the Remuneration of the Board of Commissioners and Directors refers to the Minister of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No.Per-01 / MBU / 05/2019 dated May 31, 2019 concerning the fourth Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04 / MBU / MBU 2014 concerning Guidelines for Determination of Income of Directors and Board of Commissioners.

Struktur dan Komponen Remunerasi

Struktur dan komponen remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020 terdiri dari gaji/ honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja.

1. Gaji Direksi

- Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Boma Bisma Indra (Persero) BUMN sebagaimana dalam surat No.S-14/WK-1.MBU.E/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yakni sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Gaji Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan, yaitu: Anggota Direksi lainnya: 85% dari gaji Direktur Utama
- Besarnya Gaji anggota Direksi BUMN ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Structure and Remuneration Components

The structure and components of the remuneration given to the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2020 consist of salary / honorarium, benefits, facilities, and tantiem / performance incentives.

1. Directors' salary

- The salary of the President Director was set by using internal guidelines set by the Minister of BUMN as the GMS of PT Boma Bisma Indra (Persero) BUMN as in the letter NO.S-14 / WK-1.MBU.E / 08/12020 dated August 4, 2020, which amounted to Rp75 .000.000 (seventy five million rupiahs).
- Other Directors' salaries are determined by the composition of position factors, namely: Other Directors: 85% of the Salary Managing Director
- The amount of salaries of members of the BUMN directors is determined by the GMS / Minister every year for one year from January of the year.
- In the case of the GMS / Minister did not

- | | |
|--|--|
| <p>d. Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji anggota Direksi BUMN untuk tahun tertentu, maka penetapan besarnya Gaji anggota Direksi menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.</p> | <p>determine the salary of members of the BUMN's board of directors for a certain year, the determination of the salary of members of the Board of Directors using the most ended amount and enacted by the GMS / Minister.</p> |
| <p>2. Honorarium Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama - Honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90% dari honorarium Komisaris Utama | <p>2. Honorarium Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> - The main commissioner honorarium is 45% of the salary of the President Director - Honorarium members of the Board of Commissioners are 90% of the Main Commissioner Honorarium |
| <p>3. Tunjangan</p> <p>Untuk Direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali gaji, tunjangan perumahan sebesar Rp25.000.000 per bulan, dan asuransi purna jabatan yaitu premi yang di tanggung oleh perusahaan sebesar 25 % dari gaji dalam 1 (satu) tahun. Kemudian, untuk Dewan Komisaris, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali Honorarium, tunjangan transportasi ditetapkan sebesar 20 % dari Honorarium perbulan, dan asuransi purna jabatan ditetapkan bahwa premi yang di tanggung oleh perusahaan sebesar 25 % dari gaji dalam 1 (satu) tahun.</p> | <p>3. Allowance</p> <p>For the Board of Directors, benefits that are accepted include a holiday allowance of 1 (one) salary, housing allowances amounting to Rp25,000,000 per month, and Purna insurance is a premium that is borne by the company by 25% of salary in 1 (one) year. Then, for the Board of Commissioners, the allowance received includes a holiday allowance of 1 (one) time of honorarium, transportation allowances are set at 20% of the monthly honorarium, and Purna insurance is stipulated that the premium under the company is 25% of the salary in 1 (one) year.</p> |
| <p>4. Fasilitas</p> <p>Fasilitas yang diterima oleh Direksi terdiri dari fasilitas kendaraan dengan pengaturan 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost), fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (at cost), Sedangkan yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost) dan fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (at cost).</p> | <p>4. Facilities</p> <p>Facilities received by the Board of Directors consist of vehicle facilities with settings 1 (one) unit along with the cost of maintenance and operational costs by taking into account the company's financial conditions, health facilities in the form of health insurance or treatment of medical expenses (at cost), legal assistance facilities as big as usage (at Cost), whereas received by the Board of Commissioners is a health facility in the form of health insurance or replacement of treatment costs (at cost) and legal assistance facilities as large as usage (at cost).</p> |
| <p>5. Tantiem/Insentif Kinerja.</p> <p>Ketentuan dalam pemberian tantiem ini, sebagaimana mengacu pada Peratayan Menteri. Komposisi besarnya Tantiem/IK bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama - Komisaris Utama: 45% dari Direktur | <p>5. Tantiem / Performance incentives.</p> <p>Provisions in giving Tantiem, as referred to the Ministerial Regulation. The composition of the magnitude of Tantiem / Ik for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners follows the following position factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Other Board of Directors Members: 85% of the Managing Director |

- Utama
- Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama

- Main Commissioner: 45% of the Managing Director
- Member of the Board of Commissioners: 90% of the main commissioner.

Namun untuk tahun 2020 Direksi dan Dewan Komisaris tidak diberikan tantiem/insentif kinerja atas Kinerja Tahun Buku 2019 sesuai dengan surat kementerian BUMN No.S-14/WK-1.MBU.E/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020.

But for 2020 directors and the Board of Commissioners were not given Tantiem / Performance incentives for the performance of the 2019 financial year in accordance with the Letter of the Ministry of BUMN No.S.S-14 / WK-1.MBU.E / 08/12020 dated August 4, 2020.



DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Secara khusus BBI tidak memiliki kebijakan dalam menentukan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dalam menentukan keberagaman komposisi tersebut merupakan hak Pemerintah selaku Pemegang Saham. Saat ini, komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BBI memiliki keberagaman bidang keahlian, pendidikan dan pengalaman terkait dengan kegiatan utama BBI, keuangan, ekonomi, dan tata kelola perusahaan.

Dari aspek seperti karier dan pengalaman kerja, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direktur memiliki Jalur pengembangan karier yang juga berbeda, selain itu dari segi usia, anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga memiliki rentang usia yang berbeda.

In particular, BBI does not have a policy in determining the diversity of the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The authority to determine the diversity of the composition is the right of the Government as the Shareholder. Currently, the composition of BBI's Board of Commissioners and Board of Directors consists of various fields of expertise, education and experience related to BBI's main activities, finance, economics, and corporate governance.

From the aspect of career and work experience, each member of the Board and the Board of Directors also has a different age range.

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Masro Khan	Komisaris Utama President Commissioner	54 Tahun	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> Magister Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada, tahun 2008 Master of Public Administration, Gadjah Mada University, 2008 Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fisip Universitas Diponegoro, tahun 1992 Bachelor of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University, 1992 	<ul style="list-style-type: none"> Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Komunikasi (2019 – 2020) Expert Staff of the Minister of Industry in the Field of Communication, (2019 – 2020) Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, Kementerian Sekretaris Negara (2018 – 2019) Assistant Deputy for State and Regional Institution Relations, Ministry of State Secretary (2018 - 2019) Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretaris Negara, Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Assistant Deputy for Public Relations Ministry of State Secretary, Chief of Information and Documentation Management Officer of the Ministry of State Secretary of the Republic of Indonesia (2015 - 2018) 	Komunikasi Publik Public Communication

					<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Sekretaris Negara RI (2015 – 2018) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Kementerian Sekretaris Negara RI (2011 – 2015) Head of Public Information Management, Ministry of State Secretary of the Republic of Indonesia (2011 - 2015) 	
Jumain Appe	Komisaris Commisioner	61 Tahun	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> Doktor/S3 Manajemen Bisnis, Universitas Padjajaran Bandung, tahun 2010 Doctor of Business Management, Padjajaran University Bandung, 2010 S2 Ekonomi Pembangunan, Universitas Darul Ulum Jombang, tahun 2002 Masters in Development Economics, Darul Ulum Jombang University, in 2002 S2 Digital Communication, Monash University Australia, tahun 1993 Masters in Digital Communication, Monash University Australia, in 1993 Sarjana Teknik Elektro Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 1985 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT INTI (Persero), (2006-2012) President Commissioner of PT INTI (Persero), (2006-2012) Sekretaris Utama BPPT, (2005-2014) Main Secretary of BPPT, (2005-2014) Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Pengawasan, Kementerian Riset dan Teknologi (2003-2005) Head of Planning, Finance and Supervision Bureau, Ministry of Research and Technology (2003-2005) Kepala Biro Perencanaan, KORPRI (1998-2001) Head of Planning Bureau, KORPRI (1998-2001) 	Manajemen Bisnis & Teknik Elektro Business Management & Electrical Engineering
Dewan Komisaris Board of Commisioners						
Yoyok Hadi Satriyono	Direktur Utama President Director	57 Tahun	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manjement, STIE IPWIJA, tahun 2002 Master of Management, STIE IPWIJA, 2002 Sarjana Ekonomi Manjemen, Universitas Diponegoro, tahun 1987 Bachelor of Management Economics, Diponegoro University, 1987 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Keuangan dan SDM, PT Barata Indonesia (Persero), (2014 – 2019) Direktur Keuangan dan SDM, PT Barata Indonesia (Persero), (2014 - 2019) Manager Keuangan & Human Capital Departemen Investasi Power PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk (2013 – 2014) Manager of Finance & Human Capital Power Investment Department PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk (2013 - 2014) Kepala Satuan Pengawan Internal PT WIKI Intrade (2012 – 2013) 	Akuntansi dan Manajemen Accounting and Management

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

					<p>Head of PT WIKA Intrade's Internal Control Unit (2012 - 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pjs Manager Pengembangan Usaha PT WIKA Intrade (2010-2011) <p>Acting Manager of Business Development at PT WIKA Intrade (2010-2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manager Biro Keuangan PT WIKA Intrade (2000-2012) <p>Manager of the Finance Bureau of PT WIKA Intrade (2000-2012)</p>	
M. Agus Budiyo	Direktur Operasi & Pemasaran Operasional & Marketing Director	57 Tahun	Laki-laki Male	<p>Sarjana Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, tahun 1986</p> <p>Bachelor of Naval Architecture and Shipbuilding Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya, 1986</p>	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager Divisi General Engineering PT PAL Indonesia (Persero), (2014 – 2015) General Manager of General Engineering Division of PT PAL Indonesia (Persero), (2014 - 2015) • General Manager Pemasaran dan Pengembangan Bisnis PT PAL Indonesia (Persero) (2012 – 2014) General Manager of Marketing and Business Development of PT PAL Indonesia (Persero) (2012 - 2014) • Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia (Persero) (2011 – 2012) Corporate Secretary of PT PAL Indonesia (Persero) (2011 - 2012) 	Teknik Perkapalan Marine Engineering

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and Board of directors Meeting

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal antara anggota Dewan Komisaris dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi dan Komite. Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada.

Rapat Dewan Komisaris diadakan untuk memahami situasi dan kondisi terkini di Lingkungan Perusahaan. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 24 kali, terdiri dari 12 kali rapat internal Dewan Komisaris dan 12 kali rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Sementara rapat Komite, baik rapat internal Komite maupun rapat bersama dengan mitra terkait dan pihak eksternal, telah dilaksanakan sebanyak 17 kali.

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris BBI melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 10 kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Meeting

Meetings of the Board of Commissioners are held at the domicile of the Company or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia. Meetings of the Board of Commissioners must be held regularly, at least once a month. Meetings of the Board of Commissioners consist of internal meetings between members of the Board of Commissioners and in these meetings the Board of Commissioners may invite the Directors and Committees. Every meeting of the Board of Commissioners, minutes of the meeting must be made containing the opinions that developed in the meeting, both supportive and non-supportive opinions or dissenting opinions, decisions/conclusions of the meeting, as well as reasons for the absence of members of the Board of Commissioners, if any.

The Board of Commissioners' meeting was held to understand the current situation and conditions in the Company's environment. During 2020, the Board of Commissioners held 24 meetings, consisting of 12 internal meetings of the Board of Commissioners and 12 joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Meanwhile, Committee meetings, both internal Committee meetings and joint meetings with related partners and external parties, have been held 17 times.

Frequency of Meetings and Attendance of the Board of Commissioners in Board of Commissioners Meetings

Throughout 2020, the BBI Board of Commissioners held 12 internal Board of Commissioners meetings. The agenda and level of attendance of the Board of Commissioners in the meeting are as follows:

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	27 Februari 2020 February 27, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1)Persiapan pembahasan untuk Rapat Gabungan tentang laporan manajemen atas kinerja PT BBI bulan Januari 2020; 2)Persiapan pembahasan agenda terkait tindaklanjut manajemen atas saran dan masukan Dekom pada Rapat Gabungan sebelumnya; 3)Pembahasan terkait pemberian tanggapan terkait kinerja perusahaan tahun 2019 serta persiapan dokumen pelaksanaan RUPS Audit tahun 2019; <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Dewan Komisaris b. Laporan Pengawasan Dekom c. Usulan Penggunaan Laba Bersih d. Usulan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris e. Usulan KAP untuk tahun Buku berikutnya 4)Penyusunan rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal 5)Pembahasan agenda lainnya yang akan disampaikan dan dibahas bersama Direksi dalam Rapat Gabungan, diantaranya; <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan sistem remunerasi pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan terukur b. Progress terkini pengusulan RJPP PT BBI (Persero) 6)Hal-hal yang berkembang dalam rapat <ol style="list-style-type: none"> 1)Preparation of discussions for the Joint Meeting on the management report on the performance of PT BBI in January 2020; 2)Preparation of agenda discussion related to management follow-up on the advice and input from the Board of Commissioners at the previous Joint Meeting; 3)Discussions related to providing responses related to the company's performance in 2019 as well as the preparation of documents for the 2019 Audit Meeting; <ol style="list-style-type: none"> a. Board of Commissioners' Response b. Board of Commissioners Supervision Report c. Proposed Use of Net Profit d. Proposed Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners e. KAP's proposal for the next financial year 4) Preparation of work plan for the appointment of prospective auditors and budget for external audit fees 5) Discussion of other agendas that will be submitted and discussed with the Board of Directors in the Joint Meeting, including; <ol style="list-style-type: none"> a. Employee remuneration system policy based on objective and measurable performance appraisal b. The latest progress of PT BBI (Persero)'s RJPP proposal 6) Things that developed in the meeting
2	26 Maret 2020 March 26, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1)Persiapan pembahasan untuk Rapat Gabungan tentang laporan Manajemen atas kinerja PT Boma Bisma Indra (Persero) bulan Februari 2020 2)Pembahasan terkait pemberian tanggapan terkait kinerja perusahaan tahun 2019 serta persiapan dokumen pelaksanaan RUPS Audit tahun 2019; <ol style="list-style-type: none"> Tanggapan Dewan Komisaris a. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris b. Usulan Penggunaan Laba Bersih c. Usulan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris d. Usulan KAP untuk tahun buku berikutnya 3)Hal-hal yang berkembang dalam rapat <ol style="list-style-type: none"> 1)Preparation of discussions for the Joint Meeting regarding the Management report on the performance of PT Boma Bisma Indra (Persero) in February 2020 2)Discussion regarding the provision of responses related to the company's performance in 2019 as well as the preparation of documents for the 2019 Audit Meeting; <ol style="list-style-type: none"> Board of Commissioners' Response a. Board of Commissioners Supervisory Report b. Proposed Use of Net Profit c. Proposed Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners d. KAP's proposal for the next financial year 3) Things that developed in the meeting
3	21 April 2020 April 21, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1)Persiapan pembahasan untuk Rapat Gabungan tentang laporan Manajemen atas Kinerja PT Boma Bisma Indra (Persero) Triwulan I tahun 2020 2)Pembahasan pembentukan Komite Nomisasi dan remunerasi dalam rangka pelaksanaan Talent & Succession Management PT Boma Bisma Indra (Persero) 3)Hal-hal yang berkembang dalam rapat <ol style="list-style-type: none"> 1)Preparation of discussions for the Joint Meeting on the Management report on the Performance of PT Boma Bisma Indra (Persero) in the first quarter of 2020 2)Discussion on the formation of the Nomination and Remuneration Committee in the context of implementing Talent & Succession Management PT Boma Bisma Indra (Persero) 3)Things that developed in the meeting
4	29 Mei 2020 May 29,	<ol style="list-style-type: none"> 1)Persiapan pembahasan untuk Rapat Gabungan tentang laporan Manajemen atas kinerja PT Boma Bisma Indra (Persero) bulan April tahun 2020

2020		2) Pembahasan draft tanggapan atas laporan kinerja Triwulanan I tahun 2020 PT Boma Bisma Indra (Persero) 3) Pengawasan atas Implementasi Rencana dan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan 4) Hal-hal yang berkembang dalam rapat 1) Preparation of discussion for the Joint Meeting regarding the Management report on the performance of PT Boma Bisma Indra (Persero) in April 2020 2) Discussion on the draft response to the First Quarter 2020 performance report of PT Boma Bisma Indra (Persero) 3) Supervision of the Implementation of the Company's Risk Management Plans and Policies 4) Things that developed in the meeting
5	29 Juni 2020 June 29, 2020	1) Persiapan pembahasan untuk Rapat Gabungan tentang laporan Manajemen atas kinerja PT Boma Bisma Indra (Persero) bulan Mei tahun 2020 2) Pembahasan draft kepada RUPS terkait dengan perumusan Shareholder Aspiration Letter untuk penyusunan RKAP tahun 2021 3) Pengawasan atas Implementasi Kepatuhan Direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga. 4) Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal 5) Hal-hal yang berkembang dalam rapat 1) Preparation of discussions for the Joint Meeting regarding the Management report on the performance of PT Boma Bisma Indra (Persero) in May 2020 2) Discussion of the draft to the GMS related to the formulation of the Shareholder Aspiration Letter for the preparation of the 2021 RKAP 3) Supervision of the implementation of the Board of Directors' compliance with laws and regulations and agreements with third parties. 4) Supervision of the effectiveness of the external audit and internal audit 5) Things that developed in the meeting
6	29 Juli 2020 July 29, 2020	1) Monitoring Keuangan Bulanan – Juni 2020 2) Strategi & tindak lanjut manajemen atas Kinerja Keuangan 3) Pengenalan BBI kepada Dewan komisaris baru 4) Agenda lainnya 1) Monthly Financial Monitoring – June 2020 2) Strategy & management follow-up on Financial Performance 3) Introduction of BBI to the new board of commissioners 4) Other agenda
7	29 September 2020 September 29, 2020	1) Persiapan pembahasan untuk Rapat Gabungan tentang laporan Manajemen atas kinerja PT BBI (Persero) bulan Agustus tahun 2020 2) Persiapan arahan Dewan Komisaris terkait teknologi informasi. 3) Persiapan hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada perusahaan diantaranya : a. Konfirmasi status Draft RJPP sebelum diterbitkan Surat Wamen II nomor : S-57/Sk2.MBU09/2020 tanggal 22 September 2020. b. Penjelasan persetujuan penetapan Revisi KPI tahun 2020 PT BBI (Persero) 4) Evaluasi Realisasi keikutsertaan Dewan Komisaris dalam woarkshop / lokakarya / seminar. 5) Hal-hal yang berkembang dalam rapat. 1) Preparation of discussion for the Joint Meeting regarding the Management report on the performance of PT BBI (Persero) in August 2020 2) Preparation of direction from the Board of Commissioners regarding information technology. 3) Preparation of things that need to be confirmed to the company including: a. Confirmation of the status of the Draft RJPP before the issuance of Wamen II Letter number: S-57/Sk2.MBU09/2020 on September 22, 2020. b. Explanation of approval for the determination of the 2020 KPI revision of PT BBI (Persero) 4) Evaluation of the actual participation of the Board of Commissioners in workshops / workshops / seminars. 5) Others
8	29 Oktober 2020 October 29, 2020	1) Persiapan pembahasan untuk Rapat Gabungan tentang laporan manajemen atas kinerja PT BBI (Persero) Triwulan III tahun 2020 2) Persiapan pembahasan progres penyusunan RJPP PT BBI (Persero) tahun 2020 – 2024 sesuai surat Wamen II Nomor : S-57/Wk2.MBU/09/2020 tanggal 22 September 2020 3) Persiapan pembahasan progress penyusunan RKAP tahun 2021 4) Persiapan tanggapan Dewan Komisaris mengenai kinerja PT BBI (Persero) bulan Triwulan III tahun 2020 5) Laporan berkala kegiatan Komite Komisaris. 6) Hal-hal yang berkembang dalam rapat. 1) Preparation of discussions for the Joint Meeting regarding the management report on the performance of PT BBI (Persero) in the third quarter of 2020 2) Preparation of discussions on the progress of the preparation of the RJPP PT BBI (Persero) for 2020 – 2024 according to the letter of Deputy Minister II Number: S-57/Wk2.MBU/09/2020 dated 22 September 2020 3) Preparation for discussing the progress of the preparation of the 2021 RKAP 4) Preparation of the Board of Commissioners' response regarding the performance of PT BBI (Persero) in the third quarter of 2020 5) Periodic reports on the activities of the Committee of Commissioners.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

		6)Others
9	30 November 2020 November 30, 2020	1)Persiapan pembahasan untuk Rapat Gabungan tentang laporan Manajemen atas kinerja PT BBI (Persero) bulan Oktober 2020. 2)Persiapan pembahasan progress penyusunan RKAP tahun 2021. 3)Finalisasi Draft usulan pergantian Kantor Akuntan Publik untuk General Audit Laporan keuangan tahun buku 2020 PT BBI (Persero). 4)Finalisasi draft tanggapan Dewan Komisaris mengenai kinerja PT BBI (Persero) Triwulan III tahun 2020. 5)Pembahasan penilaian self assessment kinerja Komisaris tahun 2020 6)Pembahasan penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris tahun 2020 7)Hal-hal yang berkembang dalam rapat. 1)Preparation of discussions for the Joint Meeting regarding the Management report on the performance of PT BBI (Persero) in October 2020. 2)Preparation of discussions on the progress of the preparation of the 2021 RKAP. 3)Finalize the draft of the proposed replacement of the Public Accounting Firm for the General Audit of PT BBI (Persero)'s 2020 financial statements for the financial year. 4)Finalization of the draft response from the Board of Commissioners regarding the performance of PT BBI (Persero) in the third quarter of 2020. 5)Discussion on the self-assessment of the Board of Commissioners' performance in 2020 6)Discussion on the performance appraisal of the Committee of the Board of Commissioners in 2020 7)Others
10	30 Desember 2020 December 30, 2020	1)Persiapan pembahasan untuk Rapat Gabungan tentang laporan manajemen atas kinerja PT BBI (Persero) bulan Nopember 2020 2)Persiapan pembahasan progress pelaksanaan proyek Bulog. 3)Efektivitas pelaksanaan Audit Ekdsternal dan Audit Internal. 4)Pembahasan lanjutan penilaian self assessment kinerja Komisaris tahun 2020. 5)Pembahasan lanjutan penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris tahun 2020 6)Hal-hal yang berkembang dalam rapat. 1)Preparation of discussions for the Joint Meeting regarding the management report on the performance of PT BBI (Persero) in November 2020 2)Preparation of discussions on the progress of the Bulog project implementation. 3)The effectiveness of the implementation of External Audit and Internal Audit. 4)Further discussion on the self-assessment of the Board of Commissioners' performance in 2020. 5)Further discussion on the performance appraisal of the Committee of the Board of Commissioners in 2020 6)Others

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Attendance				
		Arman Hakim Nasution	Masrokan	Jumain Appe	Tri Budi Pramono	Aang Kunaifi
1	27 Februari 2020 February 27, 2020	√		√	√	√
2	26 Maret 2020 March 26, 2020	√		√	√	√
3	21 April 2020 April 21, 2020	√		√	√	√
4	29 Mei 2020 May 29, 2020	√		√	√	√
5	29 Juni 2020 June 29, 2020	√		√	√	√
6	29 Juli 2020 July 29, 2020	√		√	√	√
7	29 September 2020 September 29, 2020	√		√	√	√
6		√		√	√	√
Jumlah Rapat Total Meetings				6		
Jumlah Kehadiran Total Attendance				6		
% Kehadiran % Attendance				100%		

Frekuensi Rapat dan tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Dengan Mengundang Direksi

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris BBI melaksanakan rapat dengan mengundang Direksi sebanyak 12 kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance of the Board of Commissioners in Board of Commissioners Meetings By Inviting the Board of Directors

Throughout 2020, BBI's Board of Commissioners held meetings by inviting the Board of Directors 12 times. The agenda and level of attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the meeting are as follows:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	27 Januari 2020 January 27, 2020	1)Tanggapan atas saran Dekom dan Laporan Manajemen 2019 2)Progress kerjasama PT BBI dan Doosan 3)Progress Program Klaster Industri Manufaktur 4)EBITDA, Operasional Cash Flow, dan Debt to EBITDA 5)Hal-hal yang berkembang dalam Rapat 1) Response to Board of Commissioners' suggestions and 2019 Management Report 2) Progress of cooperation between PT BBI and Doosan 3) Manufacturing Industry Cluster Program Progress 4) EBITDA, Operational Cash Flow, and Debt to EBITDA 5) Things that developed in the Meeting
2	27 Februari 2020 February 27, 2020	1)Tindak lanjut manajemen atas saran dan masukan Dewan Komisaris pada rapat Gabungan sebelumnya, diantaranya: a.Quick win 3 indikiator keuangan dan timeline-nya untuk 3 bulan kedepan b.Order dan realisasi penjualan serta risiko bisnis di tahun 2020 c. Progress milestone kebijakan akuntansi dan laporan keuangan dalam penerapan PSAK 72 (belum dibahas secara optimal pada Rapat Gabungan sebelumnya) d. Laporan hasil pemeriksaan SPI dan Monitoring tindak lanjut aras laporan hasil pemeriksaan SPI, KAP dan BPK RI (belum dibahas secara optimal pada Rapat Gabungan sebelumnya) e. Dan lain-lain 2)Pembahasan agenda rutin: a. Pembahasan laporan manajemen atas kinerja PT BBI (Persero) bulan Januari 2020 b. Pembahasan kinerja dan strategis perusahaan berdasarkan 3 kriteria (EBITDA, Operation Cash Flow dan Debt to EBITDA) yang menjadi indicator strategis BUMN klaster manufaktur c. Progress hasil kesepakatan kerjasama antara BBI-Doosan Infracor; Progres Order/Penjualan d. Progress program sinergitas PT BBI (Persero) dengan PT Barata Indonesia (Persero)/Klaster Manufaktur 3)Pembahasan agenda lainnya: a. Analisa rencana usulan penggunaan laba bersih perusahaan tahun 2019; b. Analisa rencana usulan penunjukan KAP untuk Tahun Buku 2020; c. Analisa rencana usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2020. d. Kebijakan sistem remunerasi pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan terukur; e. Progress terkini pengusulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Boma Bisma Indra (Persero) 4)Hal-hal yang berkembang dalam rapat. 1)Management follow-up on the advice and input of the Board of Commissioners at the previous Joint Meeting, including: a.Quick win 3 financial indicators and timeline for the next 3 months b.Sales orders and realization and business risks in 2020 c. Milestone progress of accounting policies and financial statements in the application of PSAK 72 (not optimally discussed at the previous Joint Meeting) d. Report on SPI inspection results and follow-up monitoring of reports on SPI, KAP and BPK RI inspection results (not yet discussed optimally at the previous Joint Meeting) e. And others 2) Discussion of the routine agenda: a. Discussion of the management report on the performance of PT BBI (Persero) in January 2020 b. Discussion of the company's performance and strategy based on 3 criteria (EBITDA, Operation Cash Flow and Debt to EBITDA) which are strategic indicators for the manufacturing cluster BUMN c. Progress of the cooperation agreement between BBI-Doosan Infracor; Order/Sales Progress d. Progress of the synergy program between PT BBI (Persero) and PT Barata Indonesia (Persero)/Manufacturing Cluster 3) Discussion of other agendas: a. Analysis of the proposed use of the company's net profit in 2019; b. Analysis of the proposed KAP appointment plan for the 2020 Fiscal Year; c. Analysis of the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Commissioners in

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

		<p>2020.</p> <p>d. Employee remuneration system policies based on objective and measurable performance appraisals;</p> <p>e. The latest progress of the proposal for the Company's Long Term Plan (RJPP) for PT Boma Bisma Indra (Persero)</p> <p>4) Things that developed in the meeting.</p>
3	<p>26 Maret 2020</p> <p>March 26, 2020</p>	<p>1) Pembahasan Laporan Manajemen atas kinerja PT Boma Bisma Indra (Persero) bulan Februari 2020</p> <p>2) Prospek Bisnis (Order Masuk, Pemasaran dan Produksi) selama periode 2 bulan kedepan dan hubungan dengan 3 kriteria (EBITDA, Operation Cash Flow dan Debt to EBITDA) yang menjadi indicator strategis BUMN klaster manufaktur</p> <p>3) Kesiapan operasional perusahaan dalam menghadapi bulan Ramadhan 1441 Hijriah</p> <p>4) Mitigasi Risiko yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghadapi Pandemi Covid 19 (jangka waktu sampai dengan Mei 2020)</p> <p>5) Progres kerjasama antara PT BBI-Doosan Infracor dan Program Sinergitas Klaster Manufaktur</p> <p>6) Pembahasan agenda lainnya :</p> <p>a. Analisa rencana usulan penggunaan laba bersih perusahaan tahun 2019</p> <p>b. Analisa rencana usulan penunjukan KAP untuk tahun buku 2020</p> <p>c. Analisa rencana usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2020 dan</p> <p>d. Kebijakan sistem remunerasi pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan terukur</p> <p>7) Hal-hal yang berkembang dalam rapat</p> <p>1) Management Report discussion on the performance of PT Boma Bisma Indra (Persero) in February 2020</p> <p>2) Business Prospects (Incoming Orders, Marketing and Production) for the next 2 months and the relationship with 3 criteria (EBITDA, Operation Cash Flow and Debt to EBITDA) which are strategic indicators of BUMN manufacturing clusters</p> <p>3) The company's operational readiness in facing the month of Ramadan 1441 Hijri</p> <p>4) Risk Mitigation carried out by the company in the context of dealing with the Covid 19 Pandemic (term until May 2020)</p> <p>5) The progress of cooperation between PT BBI-Doosan Infracor and the Manufacturing Cluster Synergy Program</p> <p>6) Discussion of other agendas:</p> <p>a. Analysis of the proposed use of the company's net profit in 2019</p> <p>b. Analysis of the proposed KAP appointment plan for the 2020 financial year</p> <p>c. Analysis of the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2020 and</p> <p>d. Employee remuneration system policy based on objective and measurable performance appraisal</p> <p>7) Things that developed in the meeting</p>
4	<p>21 April 2020</p> <p>April 21, 2020</p>	<p>1) Pembahasan laporan Manajemen atas kinerja PT Boma Bisma Indra (Persero) Triwulan I tahun 2020</p> <p>2) Revisi RKAP sehubungan dengan wabah pandemic virus corona (COVID-19), termasuk penerapan cost cutting yang dilakukan</p> <p>3) Progress pembentukan Talent Commite untuk BOD-1 dalam rangka pelaksanaan Talent & Succession Management PT Boma Bisma Indra (Persero)</p> <p>4) Pembahasan agenda lainnya :</p> <p>a. Prospek Bisnis (Order Masuk, Pemasaran, dan Produksi) selama periode 2 bulan kedepan dan hubungan dengan 3 kriteria (EBITDA, Operation Cash Flow dan Debt to EBITDA) yang menjadi indicator strategis BUMN klaster manufaktur</p> <p>b. Progress kerjasama antara BBI-Doosan Infracor dan Program Sinergitas Klaster Manufaktur</p> <p>c. Penerapan GCG perusahaan</p> <p>5) Hal-hal yang berkembang dalam rapat</p> <p>1) Management Report discussion on the performance of PT Boma Bisma Indra (Persero) in February 2020</p> <p>2) Business Prospects (Incoming Orders, Marketing and Production) for the next 2 months and the relationship with 3 criteria (EBITDA, Operation Cash Flow and Debt to EBITDA) which are strategic indicators of BUMN manufacturing clusters</p> <p>3) The company's operational readiness in facing the month of Ramadan 1441 Hijri</p> <p>4) Risk Mitigation carried out by the company in the context of dealing with the Covid 19 Pandemic (term until May 2020)</p> <p>5) The progress of cooperation between PT BBI-Doosan Infracor and the Manufacturing Cluster Synergy Program</p> <p>6) Discussion of other agendas:</p> <p>a. Analysis of the proposed use of the company's net profit in 2019</p> <p>b. Analysis of the proposed KAP appointment plan for the 2020 financial year</p> <p>c. Analysis of the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2020 and</p> <p>d. Employee remuneration system policy based on objective and measurable performance appraisal</p> <p>7) Things that developed in the meeting</p>
5	<p>29 Mei 2020</p> <p>May 29, 2020</p>	<p>1) Pembahasan strategis dan tindak lanjut manajemen atas catatan Wakil Menteri BUMN terhadap laporan Triwulan I tahun 2020 PT Boma Bisma Indra (Persero), diantaranya:</p> <p>a. Pengendalian realisasi beban administrasi dan umum terhadap target RKAP yang telah ditetapkan</p> <p>b. Pengendalian piutang usaha dan strategi penagihan piutang usaha</p> <p>c. Pengendalian hutang perusahaan dengan tidak menambah hutang kembali</p> <p>d. Pengendalian rasio hutang bunga to EBITDA dengan target lebih kecil dari 5 kali</p> <p>e. Strategis pencapaian EBITDA Margin diatas 10%</p> <p>2) Pembahasan Laporan Manajemen atas kinerja bulan April tahun 2020</p> <p>3) Proyeksi penjualan PT Boma Bisma Indra (Persero) bersama Klaster Manufaktur bulan Juni s.d Desember 2020</p> <p>4) Proyeksi cost cutting bulan Juni s.d Desember 2020</p>

		<p>5) Pembahasan SDM Career Planning PT Boma Bisma Indra (Persero)</p> <p>6) Pembahasan agenda lainnya :</p> <p>a. Prospek Bisnis (Order Masuk, Pemasaran dan produksi) selama periode 2 bulan kedepan dan hubungan dengan 3 kriteria (EBITDA, Operation Cash Flow dan Debt to EBITDA) yang menjadi indicator strategis BUMN klaster manufaktur</p> <p>b. Progress kerjasama antara BBI-Doosan Infracor dan Program Sinergitas Klaster Manufaktur</p> <p>c. Pembahasan Rencana masukan / tanggapan kepada RUPS terkait dengan perumusan Shareholder Aspiration Letter untuk penyusunan RKAP tahun 2021</p> <p>d. Pelaksanaan manajemen risiko perusahaan</p> <p>7) Hal-hal yang berkembang dalam rapat</p> <p>1) Strategic discussion and management follow-up on the notes of the Deputy Minister of SOEs on the First Quarter 2020 report of PT Boma Bisma Indra (Persero), including:</p> <p>a. Controlling the realization of administrative and general expenses against the predetermined RKAP targets</p> <p>b. Accounts receivable control and accounts receivable collection strategy</p> <p>c. Control the company's debt by not adding debt back</p> <p>d. Controlling the ratio of interest-bearing debt to EBITDA with a target of less than 5 times</p> <p>e. Strategic achievement of EBITDA Margin above 10%</p> <p>2) Management Report discussion on April 2020 performance</p> <p>3) Sales projections of PT Boma Bisma Indra (Persero) with the Manufacturing Cluster from June to December 2020</p> <p>4) Projected cost cutting for June to December 2020</p> <p>5) Discussion of HR Career Planning of PT Boma Bisma Indra (Persero)</p> <p>6) Discussion of other agendas:</p> <p>a. Business Prospects (Incoming Orders, Marketing and Production) for the next 2 month period and the relationship with 3 criteria (EBITDA, Operation Cash Flow and Debt to EBITDA) which are strategic indicators of SOEs in the manufacturing cluster</p> <p>b. Progress of collaboration between BBI-Doosan Infracor and the Manufacturing Cluster Synergy Program</p> <p>c. Discussion of the proposed input / response to the GMS related to the formulation of the Shareholder Aspiration Letter for the preparation of the 2021 RKAP</p> <p>d. Implementation of enterprise risk management</p> <p>7) Things that developed in the meeting</p>	<p>Pendahuluan Preliminary</p> <p>Kilas Kinerja 2020 2020 Performance Highlights</p> <p>Laporan Manajemen Management Reports</p> <p>Profil Perusahaan Company Profile</p>
6	<p>29 Juni 2020</p> <p>June 29, 2020</p>	<p>1) Pembahasan Laporan Manajemen atas kinerja bulan Mei tahun 2020</p> <p>2) Progress pelaksanaan cost cutting bulan Juni 2020</p> <p>3) Pembahasan SDM Career Planning PT Boma Bisma Indra (Persero)</p> <p>4) Pembahasan agenda lainnya:</p> <p>a. Prospek Bisnis (Order Masuk, Pemasaran dan produksi) selama periode 2 bulan kedepan dan hubungan dengan 3 kriteria (EBITDA, Operation Cash Flow dan Debt to EBITDA) yang menjadi indicator strategis BUMN klaster manufaktur</p> <p>b. Progress kerjasama antan BBI-Doosan Infracor dan program sinergitas klaster manufaktur</p> <p>c. Pembahasan rencana masukan / tanggapan kepada RUPS terkait dengan perumusan Shareholder Aspiration Letter untuk penyusunan RKAP tahun 2021</p> <p>d. Pelaksanaan manajemen risiko perusahaan</p> <p>5) Hal-hal yang berkembang dalam rapat</p> <p>1) Management Report discussion on May 2020 performance</p> <p>2) Progress of cost cutting implementation in June 2020</p> <p>3) Discussion of HR Career Planning of PT Boma Bisma Indra (Persero)</p> <p>4) Discussion of other agendas:</p> <p>a. Business Prospects (Incoming Orders, Marketing and Production) for the next 2 month period and the relationship with 3 criteria (EBITDA, Operation Cash Flow and Debt to EBITDA) which are strategic indicators of BUMN manufacturing clusters</p> <p>b. Progress of the collaboration between BBI-Doosan Infracor and the manufacturing cluster synergy program</p> <p>c. Discussion on input/response plans to the GMS related to the formulation of the Shareholder Aspiration Letter for the preparation of the 2021 RKAP</p> <p>d. Implementation of enterprise risk management</p> <p>5) Things that developed in the meeting</p>	<p>Sumber Daya Manusia Human resources</p> <p>Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis</p>
7	<p>29 Juli 2020</p> <p>July 29, 2020</p>	<p>1) Monitoring Keuangan Bulanan – Juni 2020</p> <p>2) Strategi & tindak lanjut manajemen atas Kinerja Keuangan</p> <p>3) Pengenalan BBI kepada Dewan komisaris baru</p> <p>4) Hal-hal yang berkembang dalam rapat</p> <p>1) Monthly Financial Monitoring – June 2020</p> <p>2) Strategy & management follow-up on Financial Performance</p> <p>3) Introduction of BBI to the new board of commissioners</p> <p>4) Things that developed in the meeting</p>	<p>Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance</p>
8	<p>28 Agustus 2020</p> <p>August 29, 2020</p>	<p>1) Strategi & Tindak Lanjut Manajemen atas catatan Wamen BUMN pada Meeting 26 Agt 2020</p> <p>2) Laporan Manajemen atas Kinerja Juli tahun 2020</p> <p>3) Monitoring tindak lanjut hasil temuan Auditor</p> <p>4) Progress kerja sama BBI-Doosan</p> <p>5) Hal-hal yang berkembang dalam Rapat</p> <p>1) Management Strategy & Follow-up on the notes of the Deputy Minister of BUMN at the Meeting 26 Aug 2020</p> <p>2) Management Report on July 2020 Performance</p>	<p>Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility</p>

		3)Monitoring follow-up on Auditor's findings 4)Other Agenda 5)Things that developed in the Meeting
9	29 September 2020, September 29, 2020	1)Pembahasan Laporan Manajemen atas kinerja bulan Agustus Tahun 2020 PT BBI (Persero) 2)Status draft RJPP sebelum diterbitkannya surat Wamen I Nomor : S-57/Wk2.MBU/09/2020 tanggal 22 September 2020 3)Penjelasan persetujuan penetapan revisi KPI tahun 2020 PT BBI (Persero) 4)Pemaparan penerapan system teknologi informasi (TI) PT BBI (Persero) Pembahasan agenda lainnya : a. Prospek Bisnis selama periode 2 bulan kedepan dan hubungan dengan 3 kriteria (EBITDA, Operation Cash Flow dan Debt to EBITDA0 yang menjadi indikat strategis BUMN klaster manufaktur b. Progress kerjasama antara BBI-Doosan Infracor dan program sinergitas klaster manufaktur. 5)Hal-hal yang berkembang dalam rapat. 1)Discussion of the Management Report on the August 2020 performance of PT BBI (Persero) 2)Status of the draft RJPP prior to the issuance of the letter of Deputy Minister I Number: S-57/Wk2.MBU/09/2020 dated 22 September 2020 3)Explanation of approval for the 2020 KPI revision of PT BBI (Persero) 4)Exposure to the implementation of the information technology (IT) system of PT BBI (Persero) Other agenda discussions: a. Business Prospects for the next 2 month period and the relationship with 3 criteria (EBITDA, Operation Cash Flow and Debt to EBITDA0 which are strategic indicators of BUMN manufacturing cluster b. The progress of the collaboration between BBI-Doosan Infracor and the manufacturing cluster synergy program. 5)Things that developed in the meeting.
10	27 Oktober 2020 October 27, 2020	1)Laporan Manajemen Atas Kinerja September tahun 2020 2)Pemaparan Surat Menteri BUMN Nomor : S-765/MBU/09/2020 hal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT BBI, serta status pembinaan PT BBI di KBUMN 3)Progres Penyusunan RJPP 2020-2024 sesuai Surat Wamen II Nomor: S-57/Wk2.MBU/09/2020 4)Proses Penyusunan RKAP Tahun 2021 5)Prospek Bisnis Selama Periode 2 bulan kedepan 6)Progres Kerjasama antara BBI-Doosan Infracore dan Program Sinergitas Klaster Manufaktur 1) Management Report on September 2020 Performance 2) Presentation of SOE Minister's Letter Number: S-765/MBU/09/2020 regarding Changes in Types of Shares and Changes in the Articles of Association of PT BBI, as well as the status of PT BBI's development at KBUMN 3) The progress of the preparation of the 2020-2024 RJPP according to the Letter of the Deputy Minister II Number: S-57/Wk2.MBU/09/2020 4) Process for Compiling RKAP 2021 5) Business Prospects for the next 2 month period 6) Progress of Cooperation between BBI-Doosan Infracore and the Manufactory Cluster Synergy Program
11	30 November 2020, November 30, 2020	1)Tindak lanjut manajemen atas permintaan Dewan Komisaris pada ragab sebelumnya terkait : a. Penyiaapan RKAP tahun 2021 PT BBI (Persero) b. Kesesuaian RKAP tahun 2021 PT BBI (Persero) dengan Aspirasi Pemegang Saham Pemilik Modal untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2021 (Surat Menteri BUMN Nomor: S-949/MBU/10/2020) 2)Pembahasan Laporan Manajemen atas kinerja PT BBI (Persero) bulan Oktober 2020. 3)Penjelasan penunjukkan KAP RSM-AAJ yang akan melakukan audit PT BBI (Persero) untuk tahun buku 2020 dan skema selisih bayar dalam biayanya. 4)Pembahasan agenda lainnya : a. Prospek bisnis selama periode 2 bulan kedepan dan hubungan dengan 3 kriteria (EBITDA, Operation Cash Flow dan Debt to EBITDA) yang menjadi indicator strategis BUMN klaster manufaktur. b. Progress kerjasama antara BBI-Doosan Infracor dan Program sinergitas klaster manufaktur. 5)Hal-hal yang berkembang dalam rapat. 6)Management follow-up at the request of the Board of Commissioners in the previous body regarding: a. Preparation of RKAP 2021 PT BBI (Persero) b. Compatibility of PT BBI's 2021 RKAP (Persero) with the Aspirations of Shareholders of Capital Owners for the preparation of the Company's 2021 Work Plan and Budget (Letter of the Minister of BUMN Number: S-949/MBU/10/2020) 2)Discussion of the Management Report on the performance of PT BBI (Persero) in October 2020. 3)An explanation of the appointment of the RSM-AAJ KAP to audit PT BBI (Persero) for the 2020 financial year and the difference in payment scheme in the fees. 4)Discussion of other agendas: a. Business prospects for the next 2 months and the relationship with 3 criteria (EBITDA, Operation Cash Flow and Debt to EBITDA) which are strategic indicators of SOEs in the manufacturing cluster. b. The progress of the collaboration between BBI-Doosan Infracor and the manufacturing cluster synergy program. 5)Others.
12	30 Desember 2020 December	1)Tindak lanjut manajemen atas permintaan Dewan Komisaris pada ragab sebelumnya terkait : a. Progres penetapan KAP RSM-AAJ yang akan melakukan audit PT BBI (Persero) untuk tahun buku 2020 b. Program penyampaian dokumen RKAP tahun buku 2021. 2)Pembahasan laporan manajemen atas kinerja PT BBI (Persero) bulan Nopember 2020.

30, 2020	<p>3)Progress pelaksanaan Proyek Bulog.</p> <p>4)Pembahasan agenda lainnya :</p> <p>a. Prospek bisnis selama periode 2 bulan kedepan dan hunungan dengan 3 kriteria (EBITDA, Operation Cash Flow dan Debt to EBITDA) yang menjadi indicator strategis BUMN klaster manufaktur.</p> <p>b.Progress kerjasama antara BBI-Doosan Infracor dan program sinergitas klaster manufaktur.</p> <p>5)Hal-hal yang berkembang dalam rapat.</p> <p>1) Management follow-up at the request of the Board of Commissioners in the previous body regarding:</p> <p>a.The progress of the determination of the RSM-AAJ KAP to audit PT BBI (Persero) for the 2020 financial year</p> <p>b.Program for submitting RKAP documents for the 2021 financial year.</p> <p>2) Discussion of the management report on the performance of PT BBI (Persero) in November 2020.</p> <p>3) Progress of the Bulog Project implementation.</p> <p>4) Discussion of other agendas:</p> <p>a.Business prospects for the next 2 months and in accordance with 3 criteria (EBITDA, Operation Cash Flow and Debt to EBITDA) which are strategic indicators of BUMN manufacturing clusters.</p> <p>b.The progress of the collaboration between BBI-Doosan Infracor and the manufacturing cluster synergy program.</p> <p>5) Others</p>
----------	---

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Attendance								
		Arman Hakim Nasution	Masrokan	Jumain Appe	Yoyok Hadi Satriyono	M.Agus Budiyo	Tri Budi Pramono	Agus Hasanudin	Arie Safitri	Aang Kunaifi
1	27 Januari 2020 January 27, 2020	√		√	√	√	√	√		√
2	27 Februari 2020 February 27, 2020	√		√	√	√	√	√		√
4	26 Maret 2020 March 26, 2020	√		√	√	√	√	√		√
5	21 April 2020 April 21, 2020	√		√	√	√	√	√		√
7	29 Mei 2020 May 29, 2020	√		√	√	√	√	√		√
8	29 Juni 2020 June 29, 2020	√		√	√	√	√	√		√
9	29 Juli 2020 July 29, 2020	-	√	√	√	√	-	√		-
10	28 Agustus 2020 August 29, 2020	-	√	√	√	√	√	-	√	-
11	27 Oktober 2020 October 27, 2020	-	√	√	√	√	√	-	√	-
Jumlah Rapat Total Meetings		8	3	11	11	11	11	11	2	8
Jumlah Kehadiran Total Attendance		8	3	11	11	11	10	11	2	8
% Kehadiran % Attendance		100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Rapat Direksi

Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap minggu, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris.

Risalah rapat Direksi harus dibuat untuk setiap rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi apabila ada.

Board of Directors Meeting

Meetings of the Board of Directors are held at the Company's domicile or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia.

Meetings of the Board of Directors must be held periodically, at least once a week, and at the meeting the Board of Directors may invite the Board of Commissioners.

Minutes of the Board of Directors meeting must be prepared for each Board of Directors meeting which contains everything discussed and decided at the meeting, including but not limited to the opinions that developed in the meeting, both supportive and non-supportive opinions or dissenting opinions, as well as reasons. absences of members of the Board of Directors if any.

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2020, Direksi BBI melaksanakan Rapat Direksi sebanyak 7 kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance of the Board of Directors in Board of Directors Meeting

Throughout 2020, the Board of Directors of BBI held 7 Board of Directors Meetings. The agenda and level of attendance of the Board of Directors in the meeting are as follows:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	5 Februari 2020 February 5, 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan RAKER 2020 b. Entry Meeting GCG c. Hasil Audit KP
2	3 Maret 2020 March 3, 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan RAKER 2020 b. GCG Entry Meeting c. KP Audit Results
3	4 April 2020 April 4, 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Program Quick & Win s/d Maret 2020 b. Pembahasan Hutang PPA c. Pembahasan Kluster Industri Manufaktur
4	27 Mei 2020 May 27, 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Quick & Win Program Discussion until March 2020 b. PPA Debt Discussion c. Manufacturing Industry Cluster Discussion
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Pandemi Covid-19 b. Revisi RKAP '20 akibat Covid c. Laporan LHKPN – KPK d. Review Monitoring Kebijakan Perusahaan Terkait GCG
		<ul style="list-style-type: none"> a. Discussion of the Covid-19 Pandemic b. Revised RKAP '20 due to Covid c. LHKPN Report – KPK d. Review Monitoring Company Policy Related to GCG
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Hasil Pertemuan Menteri BUMN dengan Semua Dirut dan Komut BUMN b. Revisi RKAP 2020 Akibat Covid

		a. Discussion on the results of the SOE Minister's Meeting with all BUMN Directors and Committees
		b. Revised RKAP 2020 Due to Covid
5	17 Juni 2020 June 17, 2020	a. Pembahasan Cost Cutting Program b. Optimalisasi Aset Mansyur
		a. Discussion of Cost Cutting Program b. Mansyur Asset Optimization
6	9 Juli 2020 July 9, 2020	a. Pembahasan Rakor Manajemen b. Laporan Keuangan BBI Bulan Juni 2020 c. Prospek Order dalam Waktu Dekat d. Rencana Rotasi Pejabat Eselon I Berdasarkan Hasil Fit and Proper Test
		a. Management Coordination Meeting b. BBI Financial Report June 2020 c. Prospect of Orders in the Next Year d. Echelon I Official Rotation Plan Based on Fit and Proper Test Results
7	20 Juli 2020 July 9, 2020	a. Rencana Paket MRMP Perum Bulog b. Prospek Order Crane Pelido 4 c. Pembahasan Potensial Cash In
		a. Bulog's MRMP Package Plan b. Pelido 4 Crane Prospect c. Discussion of Potential Cash In

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Attendance			
		Yoyok Hadi Satriyono	M. Agus Budiyo	Agus Hasanudin	Arie Safitri
1	5 Februari	√	√	√	
2	3 Maret	√	√	√	
3	4 April	√	√	√	
4	27 Mei	√	√	√	
5	17 Juni	√	√	√	
6	9 Juli	√	√	√	
7	20 Juli	√	√	√	
Jumlah Rapat Total Meetings			7		
Jumlah Kehadiran Total Attendance			7		
% Kehadiran % Attendance			100%		

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Supporting Bodies

Agar pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dapat berjalan dengan efektif, Dewan Komisaris telah membentuk Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan didukung oleh fungsi Sekretaris Dewan Komisaris.

In order to carry out the functions, duties and responsibilities of the Board of Commissioners effectively, the Board of Commissioners has established a Committee under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee and is supported by the function of the Secretary of the Board of Commissioners.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Secretary to the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaraan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris, khususnya di bidang administrasi. Tahun 2020, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Tri Budi Pramono yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra, No. 23/Kom/BBI/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Boma Bisma Indra (Persero)

The Secretary of the Board of Commissioners is a supporting organ of the Board of Commissioners whose function is to improve the effectiveness and smooth implementation of the duties of the Board of Commissioners, particularly in the field of administration. In 2020, the Secretary to the Board of Commissioners is held by Tri Budi Pramono who was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Boma Bisma Indra, No. 23/Kom/BBI/V/2019 dated 27 May 2019 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of the Company PT Boma Bisma Indra (Persero).

Profil Sekretaris Dewan Komisaris



Tri Budi Pramono

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of
Commissioners

Usia <i>Age</i>	31 tahun	<i>31 years old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	<i>Indonesian</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta	<i>Jakarta</i>
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, tahun 2012	• <i>Bachelor</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Employment History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Data BUMN Kedeputan IBIS (2018) • Staf Dewan Komisaris PT PINDAD (2017) • Analisis Data BUMN Kedeputan JKJSK (2015) • Analisis Data BUMN Kedeputan RPU (2015) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Business</i> • <i>Representative</i> • <i>Head</i> • <i>Head</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham	•
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra, Nomor 23/Kom/BBI/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Boma Bisma Indra (Persero)	<i>Serves as the Head of Internal Supervisory Unit based on the Decree of the Board of Directors No. 006 / Skept.1000.1400 / 01.2020</i>

Profile of Secretary to The Board of Commissioners

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan

Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

1. The duties of the Secretary to the Board of Commissioners are as follows:
2. Prepare meetings, including briefing sheets

- rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menetapkan prinsip-prinsip GCG.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
9. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
10. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
11. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komsaris Tahun 2020

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan Dewan Komisaris, dan kegiatan Komite Dewan Komisaris, maka Kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Kegiatan Rutin dan Kegiatan Non Rutin.

Kegiatan Rutin Sekretariat Dewan Komisaris meliputi:

1. Kegiatan Rapat Internal Sekretariat Dewan Komisaris;
2. Kegiatan penyiapan dan dukungan Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris.

for the Board of Commissioners.

3. Prepare the minutes of the Board of Commissioners' meeting in accordance with the Articles of Association.
4. Administering the documents of the Board of Commissioners, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents.
5. Prepare a draft work plan and budget for the Board of Commissioners.
6. Prepare draft reports for the Board of Commissioners.
7. Carry out other duties of the Board of Commissioners.
8. Ensuring that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and establishes the principles of GCG.
9. Provide information needed by the Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested.
10. Coordinate members of the Committee, if necessary in order to expedite the duties of the Board of Commissioners.
11. As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.
12. Ensuring that documents for the implementation of activities within the Board of Commissioners are properly stored in the Company.

Implementation of the Duties of the Secretary of the Board of Commissioners in 2020

In accordance with its duties and functions to provide support in various activities of the Board of Commissioners, and the activities of the Committees of the Board of Commissioners, the Secretariat Activities of the Board of Commissioners are generally divided into 2 (two) namely, Routine Activities and Non-Routine Activities.

The routine activities of the Secretariat of the Board of Commissioners include:

1. Activities of the Board of Commissioners' Secretariat Internal Meetings;
2. Preparation and support activities for the activities of the Board of Commissioners and the Committees of the Board of Commissioners.

No	Program Kerja Work Program	Target Penyelesaian Completion Target
1	Penyiapan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris Preparation of Board of Commissioners Internal Meeting Minutes	Risalah Rapat Internal disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Rapat. Internal Meeting Minutes to be submitted to the Board of

		Commissioners no later than 5 (five) working days after the date of the Meeting.
2	Penyiapan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Preparation of Board of Commissioners Including the Board of Directors Meeting Minutes	Risalah Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Rapat. Board of Commissioners Including the Board of Directors Meeting Minutes to be submitted to the Board of Commissioners no later than 5 (five) working days after the date of the Meeting
3	<p>Penyiapan seluruh Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris; - Penyiapan dukungan kegiatan Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris; - Penyiapan dukungan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris; - Penyiapan Konsep Dokumen Persuratan untuk kebutuhan Dewan Komisaris dan/atau organ pendukung Dewan Komisaris; - Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dewan Komisaris - dan lain-lain. <p>Preparation of Board of Commissioners Meetings and material:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparation of support for Board of Commissioners and Board of Commissioners Committees Official Travel activities; - Preparation of support for Board of Commissioners and Board of Commissioners Committees Education and Training activities - Preparation of Draft Correspondence Documents for Board of Commissioners and / or the Board of Commissioners supporting bodies; - Administration of Board of Commissioners Incoming and Outgoing Letters; - and others. 	

Kegiatan Non Rutin Sekretaris Dewan Komisaris meliputi:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta kegiatan lainnya yang diberikan sesuai arahan dan kebutuhan Dewan Komisaris.
2. Penyusunan Konsep Standard Operating Procedures (SOP) atas kegiatan yang dilakukan di lingkungan Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya.

Non-routine activities of the Secretary of the Board of Commissioners include:

1. Education and training activities as well as other activities provided according to the direction and needs of the Board of Commissioners.
2. Formulation of the concept of Standard Operating Procedures (SOP) for activities carried out within the Board of Commissioners and its Supporting Organs.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris, Perseroan mengikutsertakan Sekretaris Dewan Komisaris pada program pengembangan kompetensi baik yang dilakukan oleh internal Perseroan maupun

Competency Development of the Secretary of the Board of Commissioners

To support the implementation of the duties of the Secretary to the Board of Commissioners, the Company includes the Secretary to the Board of Commissioners in competency development programs carried out by the

oleh pihak ketiga.

Company internally and by third parties.

Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The competency development programs participated by the Secretary of the Board of Commissioners in 2020 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/ Seminar Name of Training/ Workshop/ Conference / Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
Tri Budi Pramono	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners	-	-	-

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (oversight) atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal dan Auditor Eksternal adalah: Dewan Komisaris memberikan tugas kepada Komite Audit sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Dewan Komisaris dapat memberikan tugas khusus kepada Komite Audit. Komite Audit melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Auditor Internal. Komite Audit melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Auditor Eksternal.

Dasar Pembentukan Komite Audit

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit pada BUMN;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN;
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki pedoman kerja yang disahkan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra (Persero) No. 41.1/Kom/BBI/XI/2016 tentang Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter) PT Boma Bisma Indra (Persero) tanggal 1 November 2016. Adapun isi Piagam Komite Audit antara

The Audit Committee was formed by and is responsible to the Board of Commissioners with the aim of assisting the Board of Commissioners in order to support the effectiveness of the implementation of duties and supervisory functions (oversight) on matters related to financial reports, internal control systems, implementation of internal and external audit functions, implementation of governance management and compliance with applicable laws and regulations.

Working relations with the Board of Commissioners, Directors, Internal Auditors and External Auditors are: The Board of Commissioners assigns tasks to the Audit Committee in accordance with their duties, responsibilities and authorities. The Board of Commissioners may assign special tasks to the Audit Committee. The Audit Committee performs a supervisory function on the implementation of the Internal Auditor's duties. The Audit Committee performs a supervisory function on the implementation of the duties of the External Auditor.

Basis for Establishing the Audit Committee

1. Law Number 19 of 2003 concerning BUMN;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2006 concerning Audit Committee in BUMN;
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners

Audit Committee Charter

In carrying out its duties, the Audit Committee has a work guideline that is ratified in a Copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Boma Bisma Indra (Persero) No. 41.1/Kom/BBI/XI/2016 concerning the Audit Committee Charter of PT Boma Bisma Indra (Persero) dated November 1, 2016. The contents of the Audit Committee Charter include: Definition, Background and

lain: Defnisi, Latar Belakang dan Dasar Hukum Pembentukan Serta Tujuan Komite, Organisasi, Masa Jabatan dan Syarat-syarat Keanggotaan, Hak, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Rapat-rapat, Mekanisme Kerja, Pelaporan dan Anggaran.

Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter) yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada pengguna laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Selain tugas dan tanggung jawab diatas, Dewan Komisaris dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa:

1. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Kerja Jangka Panjang, RKAP, laporan manajemen dan informasi lainnya
2. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan

Legal Basis for the Establishment and Objectives of the Committee, Organization, Term of Office and Membership Requirements, Rights, Duties, Authorities and Responsibilities, Meetings, Work Mechanisms, Reporting and Budget.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Audit Committee as stated in the Audit Committee Charter (Committee Audit Charter) are as follows:

1. Reviewing the financial information that the company will issued to users of financial statements, projections, and other reports related to company financial information
2. Reviewing obedience to legislation related to company activities
3. Providing independent opinions in the event of differences of opinion between management and accountants for the services provided
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of accountants based on independence, assignment scope, and fees
5. Review the examination of the examination by internal auditors and oversee the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors
6. Reviewing the activity of the implementation of risk management carried out by the Board of Directors, if the company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners
7. Reviewing complaints related to the Accounting and Financial Reporting Process
8. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners related to the potential collision interest of the company
9. Maintain the confidentiality of the company's documents, data and information.

In addition to the duties and responsibilities above, the Board of Commissioners can also provide other assignments to the Audit Committee in the form of:

1. Review information about the company, as well as long-term work plans, rkcap, management reports and other information
2. Reviewing the complaints relating to the company

3. Lain-lain yang berkaitan dengan tugas Komite Audit.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang antara lain:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, SPI dan unit yang menangani pengembangan manajemen risiko dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan dan atau ditugaskan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris maupun Keputusan Dewan Komisaris.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Syarat-syarat keanggotaan Komite Audit yaitu:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa nonassurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan

3. Others relating to the Audit Committee assignments.

The authority of the Audit Committee

The Audit Committee has the authority, among others:

Accessing documents, data and information about employees, funds, assets and company resources needed.

Communicate directly with employees, including directors, SPI and units that handle the development of risk management and external auditors / public accountants related to the assignment and responsibility of the Audit Committee.

Involve independent parties outside the Audit Committee members needed to assist the implementation of their duties (if needed) with the written consent of the Board of Commissioners.

Do other authorities given and or be assigned by the Board of Commissioners stipulated through the mechanism of the Board of Commissioners 'Meeting and the Board of Commissioners' Decree.

Audit Committee Membership Requirements

Membership Terms of the Audit Committee, namely:

1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and is able to communicate well;
2. Must understand financial statements, business companies, especially those related to service services or business activities, the audit process, risk management, and legislation in the capital market and other related legislation;
3. Must comply with the Code of Ethics the Audit Committee set by the Company;
4. Willing to improve competence continuously through education and training;
5. Must have at least one member of the educational background and expertise in the field of accounting and / or finance;
6. Not a person in the Public Accountant Office, Legal Consultant Office, the Office of Public Appraisal Services or other parties that provide Assurance services, nonassurance services, appraisal services and / or other consultation services to the company concerned within 6 (six) months;
7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or

- terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
 8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
 9. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan tersebut; dan Kualifikasi
 10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yang ditetapkan dan diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. Pihak dari luar Perseroan yang diangkat adalah pihak luar/independen yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan atau keuangan serta memiliki pemahaman yang baik tentang Corporate Governance dan atau bisnis Perseroan dan anak perusahaan.

- supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for the Independent Commissioner;
8. Does not own shares directly or indirectly in the Company;
 9. Has no affiliation with members of the Board of Directors, or the Major Shareholders of the Company; and Qualification
 10. Has no business relationship, either directly or indirectly related.

Structure, Membership and Expertise of the Audit Committee

The Audit Committee consists of at least 2 (two) members who are Independent Commissioners and parties from outside the Company. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner who is appointed and appointed based on the Decision of the Board of Commissioners. Parties from outside the Company who are appointed are external/independent parties who have expertise and experience in accounting and or finance and have a good understanding of Corporate Governance and or the business of the Company and its subsidiaries.

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Masrokan	Ketua merangkap Anggota Chairman concurrently Member	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komunikasi Publik Public Communication	2020
Aang Kunaifi	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Tenaga Ahli Bidang Akuntansi dan Keuangan Technical Expert in Accounting and Finance	2019

Profil Komite Audit

Profile of The Audit Committee



Aang Kunaifi
Komite Audit
Audite Committee

Usia Age	34 tahun 34 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Surabaya Surabaya
Riwayat Pendidikan Education History	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Akuntansi, Univ. Brawijaya Malang, Indonesia, tahun 2012 • Sarjana Akuntansi, Univ. Brawijaya Malang, Indonesia, tahun 2009
Riwayat Pekerjaan Employment History	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit PT Boma Bisma Indra (Persero), tahun 2016-sekarang • Dosen Jurusan Manajemen Bisnis FTI ITS Surabaya
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 37/Kom/BBI/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 42/Kom/BBI/IX/2019 tanggal 27 September 2019

Informasi Rangkap Jabatan

Seluruh Anggota Komite Audit yang tidak menjabat sebagai Komisaris saat ini tidak memiliki rangkap jabatan eksternal di luar Boma Bisma Indra yang mengandung konflik kepentingan. Informasi lengkap mengenai rangkap jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut:

Concurrent Position Information

All members of the Audit Committee who are not currently serving as Commissioners do not have concurrent external positions outside of Boma Bisma Indra that contain conflicts of interest. Complete information regarding the concurrent positions of members of the Audit Committee from members of the Board of Commissioners can be seen in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Informasi Rangkap Jabatan Dual Position information		
		BBI	Entitas Anak Child entity	Keahlian Other entities
Masrokan	Ketua merangkap Anggota Chairman concurrently Member	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak ada There is not any	Tidak ada There is not any
Aang Kunaifi	Anggota Member	Tidak ada There is not any	Tidak ada There is not any	Tidak ada There is not any

Independensi Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Audit berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan bersikap objektif, profesional dan independen. Komite Audit tidak boleh

Independence of the Audit Committee

In carrying out their duties and responsibilities, all members of the Audit Committee are committed to upholding the principles of good corporate governance practice by being objective, professional and independent. The Audit Committee must not make decisions under pressure and intervention from any party

mengambil keputusan di bawah tekanan dan intervensi dari pihak mana pun serta berkomitmen untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Oleh sebab itu, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan dan hubungan bisnis dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Independensi Komite Audit Boma Bisma Indra Tahun 2020 sbb:

and is committed to avoiding conflicts of interest. Therefore, all members of the Audit Committee do not have any affiliation in terms of family and business relations with members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors. The independence of the Boma Bisma Indra Audit Committee in 2020 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Kekeluargaan, Ekonomi atau Kepengurusan Family Relations, Economics or Management		
		Dengan Pemegang Saham dan Pengendali With Shareholders and Controlling	Dengan Dewan Komisaris With the Board of Commissioners	Dengan Direksi With Directors
Masrokan	Ketua merangkap Anggota Chairman concurrently Member	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak ada There is not any	Tidak ada There is not any
Aang Kunaifi	Anggota Member	Tidak ada There is not any	Tidak ada There is not any	Tidak ada There is not any

Rapat Komite Audit

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- Agenda rapat berdasarkan usulan dari anggota Komite Audit atau sesuai dengan usulan dari pihak lain di Perusahaan.
- Mekanisme pengambilan keputusan:
 - Rapat dipimpin oleh ketua Komite Audit atau jika berhalangan hadir dapat digantikan oleh anggota lainnya yang ditunjuk.
 - Untuk mengambil keputusan, rapat Komite Audit harus memenuhi kuorum, yaitu paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota Komite Audit.
 - Ketua maupun anggota Komite Audit diberi hak menyampaikan pendapat dan hak suara yang sama.
 - Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir. Apabila keputusan tidak dapat diambil melalui voting, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit.
- Notulen rapat:
 - Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota

Audit Committee Meeting

- The Audit Committee holds regular meetings at least once in 1 (one) month.
- The meeting agenda is based on proposals from members of the Audit Committee or in accordance with proposals from other parties in the Company.
- Decision-making mechanism:
 - The meeting is chaired by the chairman of the Audit Committee or if unable to attend, it can be replaced by another appointed member.
 - To make decisions, the Audit Committee meeting must meet a quorum, which is at least 2/3 of all members of the Audit Committee.
 - The chairman and members of the Audit Committee are given the right to express the same opinion and voting rights.
 - Audit Committee meeting decisions are taken based on deliberation for consensus.
 - The decision of the Audit Committee meeting is considered valid if it is approved by more than (one half) of the number of members present. If the decision cannot be taken by voting, the decision is determined by the Chairman of the Audit Committee.
- Minutes of meeting
 - Every meeting of the Audit Committee is stated in the minutes of the meeting, including if there are dissenting opinions, which are signed by all members of the Audit Committee who are present and

- Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 2) Notulen rapat ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota Komite Audit yang hadir sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat.

submitted to the Board of Commissioners.

- 2) Minutes of the meeting are signed by the chairman and all members of the Audit Committee present as valid evidence of the decisions taken at the meeting.

Uraian Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Pada tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan serangkaian kegiatan yaitu:

- a. Pengawasan pelaporan keuangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan reviu atas informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan
 - 1) Laporan manajemen triwulanan (I; II; III). (9 Telaah)
 - 2) Telaah Laporan Manajemen 2019
 - 3) Telaah Laporan Manajemen TW I
 - 4) Telaah Kinerja Keuangan bulan April
 - 5) Telaah Kinerja Keuangan bulan Mei
 - 6) Telaah Kinerja Keuangan bulan Juni
 - 7) Telaah skema pembiayaan invoice financing
 - 8) Telaah kebijakan anti penyuapan
 - 9) Telaah kinerja keuangan bulan september 2020
 - 10) Telaah kebijakan Direksi tahun 2020
- b. Pengawasan proses audit. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai efektifitas audit internal dan eksternal serta menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit internal dan eksternal
 - Rapat Koordinasi pelaksanaan tugas SPI (1 Kali Rapat)
 - Rapat evaluasi hasil audit eksternal (11 Maret 2020)
 - Diskusi dengan auditor KAP tahun 2020 serta evaluasi hasil pelaksanaan audit 2019 (1 Kali Rapat)
 - Kick-off meeting KAP RSM-AAJ untuk audit tahun 2020 (26 Nop 2020)
- c. Pengawasan pengendalian internal dan manajemen risiko. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya. serta Pengawasan pelaksanaan sistem Manajemen Risiko.
 - Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal (1 kali rapat)
 - Rapat pembahasan Sistem Pengendalian Anti Penyuapan (24

Description of the Implementation of the Audit Committee Activities in 2020

In 2020, the Audit Committee has carried out a series of activities, namely:

- a. Financial reporting supervision. This activity is intended to review the information issued by the company:
 - 1) Quarterly management report (I; II; III). (9 Review)
 - 2) Review the 2019 Management Report
 - 3) Review TW I . Management Report
 - 4) Review of April's Financial Performance
 - 5) Review of May's Financial Performance
 - 6) Review of June's Financial Performance
 - 7) Review the invoice financing scheme
 - 8) Review the anti-bribery policy
 - 9) Review the financial performance of September 2020
 - 10) Review the Board of Directors policy for 2020
- b. Supervision of the audit process. This activity is carried out to assess the effectiveness of internal and external audits as well as assess the implementation of activities and the results of internal and external audits
 - Coordination Meeting on the implementation of SPI duties (1 time meeting)
 - External audit results evaluation meeting (11 March 2020)
 - Discussion with KAP auditors in 2020 and evaluation of 2019 audit results (1 Meeting)
 - Kick-off meeting of KAP RSM-AAJ for 2020 audit (26 Nov 2020)
- c. Monitoring of internal control and risk management. This activity is intended to assess the effectiveness of the management control system and provide recommendations for improving the management control system and its implementation. and Supervision of the implementation of the Risk Management system.
 - Coordination of the implementation of the internal control system (1 meeting) - Anti-Bribery Control

- Agustus 2020)
- Telaah pelaksanaan manajemen risiko (Tidak Terlaksana)
- d. Pengawasan implementasi Good Corporate Governance (GCG). Kegiatan ini dimaksudkan untuk Efektivitas pelaksanaan kebijakan GCG dan Self-assessment kinerja Komite Audit
- Koordinasi implementasi kebijakan GCG (2 Kali secara daring)
 - Rapat pembahasan AOI (24 Agustus 2020)
 - Workshop penerapan GCG (4 Nop 2020)
 - Self asesmen Komite Audit

- System discussion meeting (24 August 2020)
- Review the implementation of risk management (Not Implemented)
- d. Supervision of the implementation of Good Corporate Governance (GCG). This activity is intended for the effectiveness of implementing GCG policies and self-assessment of the performance of the Audit Committee
- Coordination of GCG policy implementation (2 times online) - AOI discussion meeting (24 August 2020) - GCG implementation workshop (4 Nov 2020)
 - Self-assessment of the Audit Committee

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite Audit, Perseroan mengikutsertakan Komite Audit pada program pengembangan kompetensi baik yang dilakukan oleh internal Perseroan maupun oleh pihak ketiga.

Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Audit tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Audit Committee Competency Development

To support the implementation of the duties of the Audit Committee, the Company includes the Audit Committee in competency development programs carried out by the Company internally and by third parties.

The competency development programs participated by the Audit Committee in 2020 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan / Workshop / Konferensi / Seminar Name of Training / Workshop / Conference / Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
Masrokan	Ketua merangkap Anggota Komite Audit Chairman concurrently Member of the Audit Committee	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) The Ministry of SOEs in collaboration with the International Financial Corporation (IFC)	4 November 2020 – PT BBI Surabaya November 4, 2020 – PT BBI Surabaya
Aang Kunaifi	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) The Ministry of SOEs in collaboration with the International Financial Corporation (IFC)	4 November 2020 – PT BBI Surabaya November 4, 2020 – PT BBI Surabaya

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-117/MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Perseroan wajib menunjuk dan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direksi. Secara garis besar, Sekretaris Perusahaan dibentuk untuk menjalankan fungsi sebagai fasilitator Perseroan dan Direksi dengan pihak eksternal yang mencakup hubungan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.KEP-117/MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, the Company is required to appoint and appoint a Corporate Secretary who is responsible to the Board of Directors. Broadly speaking, the Corporate Secretary was formed to carry out the function as a facilitator of the Company and the Board of Directors with external parties which includes relationships with all stakeholders, including the community.

Sekretaris Perusahaan merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra Perseroan dan pemenuhan tanggung jawab oleh Perseroan.

The Corporate Secretary is the liaison party that bridges the interests between the Company and external parties, especially in maintaining public perception of the Company's image and fulfilling the Company's responsibilities.

Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup tugas-tugas kesekretariatan Perseroan, dan masyarakat, legal dan penegakan kepatuhan terhadap ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan publik, Sekretaris Perusahaan turut menjaga citra Perusahaan dan mewakili Direksi dalam setiap kegiatan komunikasi eksternal, khususnya dengan pihak regulator, investor dan para pemangku kepentingan lainnya.

The function of the Corporate Secretary includes secretarial duties of the Company, and the public, legal and enforcement of compliance with the provisions of Good Corporate Governance. Through various activities related to the public, the Corporate Secretary helps maintain the Company's image and represents the Board of Directors in all external communication activities, especially with regulators, investors and other stakeholders.

Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan dalam Organisasi

Structure and Position of the Corporate Secretary in the Organization



Profil Sekretaris Perusahaan



Arie Safitri
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Corporate Secretary Profile

Usia <i>Age</i>	36 tahun	<i>36 years old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	<i>Indonesian</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Surabaya	<i>Sidoarjo</i>
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tahun 2007 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bachelor of Law, Wijaya Kusuma University Surabaya, 2007</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Employment History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Bidang Hukum (2015 - 2020) • Staf Biro Hukum (2013 - 2015) • Sekretaris Direksi (2011 - 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Legal Manager (2015 - 2020)</i> • <i>Legal Bureau staff (2013 - 2015)</i> • <i>Secretary of the Board of Directors</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham	<i>Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Shareholders</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 036/Skept.1000.1400/08.2020	<i>Serves as the Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors No. 036 / Skept.1000.1400 / 08.2020</i>

Tugas dan Tanggungjawab

Adapun tugas pokok dari Sekretaris Perusahaan, diuraikan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan total aktifitas Sekretariat Perusahaan dan mengkoordinasikan tugas-tugas antar fungsi di Sekretariat Perusahaan serta antar Divisi atau yang selevel.
2. Melakukan monitoring terhadap kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Mengkoordinir semua kegiatan penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi data dalam mendukung kegiatan perusahaan.
4. Mewakili Direksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan korporasi jika Direksi berhalangan hadir.
5. Mengelola dan memantau pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (Stakeholder).
6. Menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dalam hubungan kerja yang baik untuk mengembangkan citra positif korporasi dengan pihak eksternal dan internal.
7. Melakukan koordinasi internal dan

Duties and responsibilities

The main duties of the Corporate Secretary are described as follows:

1. Organizing the total activities of the Corporate Secretariat and coordinating tasks between functions in the Corporate Secretariat and between Divisions or the same level.
2. Monitoring corporate secretarial activities and protocols related to the Board of Directors and the Board of Commissioners.
3. Coordinate all activities for the provision, operation and maintenance of information technology and data communication equipment in support of company activities.
4. Representing the Board of Directors in activities related to corporate activities if the Board of Directors is unable to attend.
5. Manage and monitor the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) as an effort to provide guidance with stakeholders (Stakeholders).
6. Establish communication and coordination in a good working relationship to develop a positive corporate image with external and internal parties.
7. Conduct internal coordination and prepare data related to the holding of the GMS, as well as corporate actions and public expose activities.
8. Provide services to stakeholders for any required information related to the

menyiapkan data-data terkait penyelenggaraan RUPS, serta corporate action dan kegiatan public expose.

8. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (Stakeholder) atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan korporasi.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain dari pimpinan.

Dan seorang Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab pada hal – hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi dan memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian data dan informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan kegiatan hubungan masyarakat, aspek legal maupun aspek kesekretariatan perusahaan termasuk dengan sosialisasinya agar efektif, terpadu dan menyeluruh.
3. Memantau kepatuhan peraturan-peraturan perusahaan dan proyek dalam mengatur hak dan kewajiban perusahaan maupun karyawan serta kebijakan yang menyangkut Hubungan Kemasyarakatan, ICT, aspek legal maupun kesekretariatan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan aksi korporasi.
4. Tersusunnya program kerja, rencana kerja, anggaran dan laporan kegiatan (RKAP) ICT, hubungan masyarakat, aspek legal maupun kesekretariatan.
5. Mendukung penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

corporation.

9. Carry out other tasks from the leadership.

And a Corporate Secretary is responsible for the following matters:

1. Coordinate and monitor activities related to receiving and submitting corporate data and information as well as conducting meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Responsible for the management and development of public relations activities, legal aspects and aspects of the company's secretariat including the socialization to be effective, integrated and comprehensive.
3. Monitor compliance with company and project regulations in regulating the rights and obligations of companies and employees as well as policies regarding Public Relations, ICT, legal and secretarial aspects so that they run in accordance with applicable laws and regulations relating to corporate actions.
4. Compilation of work programs, work plans, budgets and activity reports (RKAP) for ICT, public relations, legal and secretarial aspects.
5. Support the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

Kegiatan Sekretaris Perusahaan di Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan sejumlah kegiatan meliputi:

Corporate Secretary Activities in 2020

Throughout 2020, the Corporate Secretary has carried out a number of activities including:

No.	Kegiatan Description	Realisasi Realization
1.	Penyelenggaraan RUPS/RUPSLB Organize GSM/EGSM	2 kali 2 times
2.	Penyelenggaraan Rapat BOD & BOC Organize BOD & BOC Meetings	10 kali 10 times
3.	Penyelenggaraan Rapat Direksi Organizing Board of Directors Meeting	7 kali 7 times
4.	Penyelenggaraan Rapat Kerja (Raker) Organizing Work Meetings	1 kali 1 times
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perusahaan Organizing Company Coordination Meeting	7 kali 7 times

6.	Memastikan pemenuhan aspek kepatuhan (compliance) Perseroan terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator Ensuring compliance with the Company's compliance aspects with reporting obligations to regulators	7 kali 7 times
7.	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Managing Information Transparency	Harian Daily
8.	Pengelolaan Branding Korporasi Managing Corporate Branding	Harian Daily
9.	Pengelolaan Website dan Media Sosial Managing Website and Social Media	Harian Daily
10.	Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Monitoring and Evaluating Compliance with applicable Laws and Regulations	Harian Daily
11.	Melaksanakan kegiatan CSR Conducted CSR activities	Harian Daily
12.	Menjalankan dan meningkatkan kualitas program manajemen asset Managed and improved the asset management program quality	Harian Daily

Pendidikan dan/atau Sekretaris Perusahaan Pelatihan Corporate Secretary Education and/or Training

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan BBI telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Throughout 2020, the Corporate Secretary of BBI has participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan / Workshop / Konferensi / Seminar Name of Training / Workshop / Conference / Seminar	Lembaga Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
Arie Safitri	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pelatihan Antikorupsi Dasar Basic Anti-Corruption Training	Pusat Edukasi Antikorupsi Anti-Corruption Education Center	6-9 Juli 2020 – PT BBI Surabaya 6-9 July 2020 – PT BBI Surabaya
		Employee Engagement Through Coaching Employee Engagement Through Coaching	Forum Human Capital Indonesia Indonesian Human Capital Forum	13 Agustus 2020 – PT BBI Surabaya August 13, 2020 – PT BBI Surabaya
		Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) The Ministry of SOEs in collaboration with the International Financial Corporation (IFC)	4 November 2020 – PT BBI Surabaya November 4, 2020 – PT BBI Surabaya
		Business Judgement Rule Vs Tindak Pidana Korupsi Business Judgment Rule vs Corruption Crime	Visi Integritas Integrity Vision	20 November 2020 – PT BBI Surabaya November 20, 2020 – PT BBI Surabaya

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Internal Control Unit

Satuan Pengawasan Intern adalah organ pendukung di bawah Direktur Utama yang melakukan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif yang bertujuan untuk membantu Manajemen dalam mengelola perusahaan dan menyusun suatu pendekatan yang sistematis serta teratur dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan risiko, pengendalian serta proses penerapan tata kelola perusahaan.

Dasar Hukum

Untuk melakukan pengawasan intern sesuai dengan peraturan perundang – undangan maka dibentuklah Unit Kerja Satuan Pengawasan Intern. Pembentukan dan keberadaan SPI mengacu kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

Piagam Audit Internal

Piagam Pengawasan Internal/Audit Internal telah ditandatangani pada tanggal 1 November 2016 dengan Surat No. 41.1/Kom/BBI/XI/2016 yang ditandatangani oleh Komisaris PT BBI, yang disusun berdasarkan Standar Profesi Audit Internal dan Kerangka Kerja Implementasi (KKI) Asseement Good Corporate Governance PT BBI (Persero).

Piagam tersebut berisikan aturan mengenai pedoman kerja bagi Satuan Pengawasan Intern Perusahaan yang disepakati oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala SPI. Penjabaran mengenai fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab SPI disusun sebagai acuan kerja SPI selain juga dapat mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas SPI.

The Internal Control Unit is a supporting organ under the President Director that carries out independent and objective assurance and consultation activities aimed at assisting the Management in managing the company and developing a systematic and orderly approach in carrying out the task of monitoring and evaluating risk management, control and the process of implementing corporate governance.

Legal Basis

In order to carry out internal control in accordance with the laws and regulations, an Internal Audit Unit is formed. The establishment and existence of SPI refers to:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning BUMN.
2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2005 concerning Establishment of Management, Supervision and Dissolution of BUMN.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance in SOEs.

Internal Audit Charter

The Internal Supervision/Internal Audit Charter was signed on November 1, 2016 with Letter No. 41.1/Kom/BBI/XI/2016 signed by the Commissioner of PT BBI, which was prepared based on the Internal Audit Professional Standards and Implementation Framework (KKI) for the Good Corporate Governance Assessment of PT BBI (Persero).

The charter contains rules regarding work guidelines for the Company's Internal Audit Unit which are agreed upon by the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Head of SPI. The description of the functions, duties, authorities and responsibilities of the SPI is prepared as a reference for the work of the SPI as well as being able to measure and assess the level of success of the implementation of the duties of the SPI.

Piagam Pengawasan Internal berisikan antara lain:

BAB I : Ketentuan Umum, Pengertian, Maksud & Tujuan

BAB II : Organisasi Struktur, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Hubungan Kerja dengan Dewan Komsaris, Direksi, Auditor Internal dan External, Persyaratan Keanggotaan Komite Audit, Rapat, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja, Orientasi bagi Anggota Komite Audit Baru, Kode Etik

BAB III : Standard Operasi dan Prosedur Kerja, Komite Audit Pengawasan Terhadap Pelaporan Keuangan, Pengawasan Terhadap Proses Audit Internal dan Eksternal, Pengawasan terhadap Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko, Pengawasan terhadap Implementasi GCG

The Internal Supervision Charter contains, among others:

CHAPTER I: General Provisions Definition, Purpose & Purpose

CHAPTER II: Organization Structure, Duties, Authorities and Responsibilities Working Relations with the Board of Commissioners, Directors, Internal and External Auditors Audit Committee Membership Requirements Meeting, Reporting and Performance Evaluation Orientation for New Audit Committee Members Code of Ethics

CHAPTER III : Standard Operations and Work Procedures of the Audit Committee, Supervision of Financial Reporting, Supervision of Internal and External Audit Process, Supervision of Internal Control and Risk Management, Supervision of GCG Implementation.

Komposisi Keanggotaan SPI

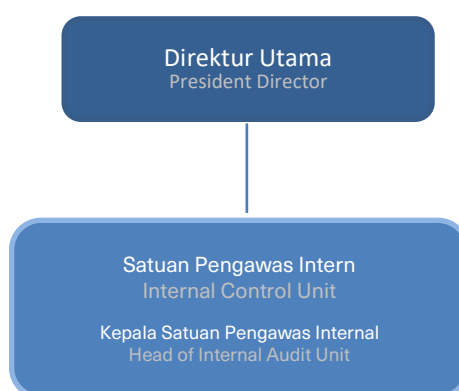
Jumlah auditor di Satuan Pengawasan Internal Perusahaan tahun 2020 adalah sebanyak 3 (tiga) pemeriksa/auditor, yang terdiri dari 1 (satu) orang menjabat sebagai kepala SPI dan 2 (dua) orang lainnya adalah sebagai staf.

SPI Membership Composition

The number of auditors in the Company's Internal Audit Unit in 2020 is 3 (three) examiners/auditors, consisting of 1 (one) person serving as head of SPI and 2 (two) other people as staff.

Struktur Organisasi SPI

SPI Organizational Structure



Kedudukan Satuan Pengawas Interen dalam Struktur Organisasi

Organisasi SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern, yang kedudukannya dalam organisasi perusahaan setingkat dengan “General Manager”, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung berjalannya fungsi pengawasan Perusahaan dibantu oleh Pemeriksa Intern yang terdiri dari Kepala Pemeriksa dan Pemeriksa sebagai berikut:

1. Kepala Pemeriksa, dalam organisasi dikelompokkan setingkat Manajer Biro Korporasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala SPI.
2. Pemeriksa adalah jabatan keahlian yang mengacu kepada penjenjangan keahlian yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., sesuai dengan Dokumen Prosedur Sertifikasi Keahlian Internal Pegawai No. WIKA-HCE-PM-07.03, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dan atau pejabat yang berwenang, dan bertanggung jawab kepada Kepala SPI.

Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur Utama harus ditempatkan dalam struktur organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya, dan dalam mengungkapkan pandangan dan pemikiran terkait dengan pelaksanaan pengawasan kepada Manajemen dilakukan secara bebas dan tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan oleh Manajemen maupun pihak lainnya dalam organisasi perusahaan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI)

Sesuai dengan Piagam Internal Audit PT Boma Bisma Indra (Persero), Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

The Position of the Internal Oversight Unit in the Organizational Structure

The SPI organization is led by a Head of the Internal Audit Unit, whose position in the company organization is at the level of the “General Manager”, and reports directly to the President Director. To support the running of the supervisory function, the Company is assisted by an Internal Auditor consisting of the Chief Examiner and Examiner as follows:

1. Head of Examiner, in the organization grouped at the level of Corporate Bureau Manager who is appointed and dismissed by the Board of Directors, and is directly responsible to the Head of SPI.
2. Examiner is a position of expertise that refers to the applicable skill level at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., in accordance with the Employee Internal Expertise Certification Procedure Document No. WIKA-HCE-PM-07.03, who is appointed and dismissed by the Board of Directors and or the authorized official, and is responsible to the Head of SPI.

The position of SPI as an organ that assists the President Director must be placed in an organizational structure that is equivalent to its roles and responsibilities, and expressing views and thoughts related to the implementation of supervision to the Management is carried out freely and cannot be influenced or pressured by the Management or other parties within the company organization.

The Party that Appoints and Dismisses the Head of the Internal Audit Unit (SPI)

In accordance with the Internal Audit Charter of PT Boma Bisma Indra (Persero), the Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Profile Kepala Satuan Pengawas Intern

Profile of the Head of Internal Audit



A.S. Ananta
Kepala Satuan Pengawas Interen
Head of Internal Supervisory Unit

Usia Age	54 tahun	54 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Surabaya	Surabaya
Riwayat Pendidikan Education History	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, tahun 1992 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Mechanical Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya, 1992
Riwayat Pekerjaan Employment History	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Pengembangan Usaha & Restrukturisasi (2018 - 2019) Manajer Manajemen Representatif (2016 - 2018) Kepala Departemen Produksi Divisi Manajemen Proyek & Jasa (2013 - 2016) Kepala Dinas Quality Control Proyek (2009 - 2013) Kepala Dinas Quality Control Engineering (2004 - 2006) 	<ul style="list-style-type: none"> Business Development & Restructuring Manager (2018 - 2019) Representative Management Manager (2016 - 2018) Head of Production Department, Project Management & Services Division (2013 - 2016) Head of the Project Quality Control Service (2009 - 2013) Head of Quality Control Engineering Service (2004 - 2006)
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Interen berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/Skept.1000.1400/01.2020	Serves as the Head of Internal Supervisory Unit based on the Decree of the Board of Directors No. 006 / Skept.1000.1400 / 01.2020

Sertifikat Profesi Auditor

SPI telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai SPI, melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan antara lain melalui program sertifikasi di bidang internal audit/kepatuhan, keikutsertaan dalam seminar maupun pelatihan rutin internal. Berikut data sertifikasi yang telah diperoleh pegawai SPI sampai dengan posisi tahun 2020:

Auditor Profession Certificate

SPI is committed to continuously improving the competence and knowledge of SPI employees, through continuous education and training, including through certification programs in the field of internal audit/compliance, participation in seminars and routine internal training. The following is the certification data that has been obtained by SPI employees up to the position in 2020:

Nama Name	Tanggal Date	Sertifikasi Certification	Lembaga Penyelenggara Organizer
Nadia Ayu Wijayanti	11 April – 13 Juni 2016 11 April – 13 June 2016	Internal Audit dan Fraud Audit Internal Audit and Fraud Audit	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Institute of Accountants
Wahyu Andrianto	11 April – 13 Juni 2016 11 April – 13 June 2016	Internal Audit dan Fraud Audit Internal Audit and Fraud Audit	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Institute of Accountants

Tujuan Audit

Untuk menjaga ketaatan terhadap sistem dan prosedur yang berlaku, menjaga keamanan aset perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi setiap unit kerja sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya.

Lingkup Audit

Lingkup kerja SPI mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas tata kelola Perusahaan, proses pengelolaan risiko, system dan struktur pengendalian internal, mutu kerja dan penugasan lainnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan, yaitu;

1. Melaksanakan audit kinerja dan audit khusus yang meliputi audit operasional, keuangan dan akuntansi, SDM, umum, dan sistem informasi.
2. Melaksanakan penugasan pencarian fakta dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai.
3. Memberikan konsultasi kepada unit kerja dalam melaksanakan fungsi pengendalian internal.
4. Membantu auditor eksternal dalam melaksanakan audit di perusahaan serta memonitor tindak lanjut hasil auditnya.
5. Menilai dan memberikan rekomendasi atas kinerja auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Perusahaan.
6. Mengkaji dan memeriksa kegiatan tertentu yang diminta oleh Direksi dan Dewan Komisaris (Komite Audit)
7. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan terhadap sistem, kebijakan, rencana dan prosedur yang berlaku.

Tugas, dan Tanggung Jawab SPI

Tugas, dan tanggung jawab Fungsi Internal Audit (SPI) sebagaimana yang dituangkan dalam Piagam Audit Internal sebagai berikut:

- a. Tugas - tugas SPI antara lain sebagai berikut:
 - 1) Menyusun dan melaksanakan Internal Audit Charter.
 - 2) Membuat dan menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
 - 3) Melakukan pemeriksaan operasional dan keuangan.
 - 4) Membuat dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 - 5) Sebagai pendamping (Counter-Part)

Audit Purpose

To maintain compliance with applicable systems and procedures, maintain the security of company assets, check the accuracy and correctness of accounting data for each work unit in accordance with applicable accounting policies, as well as improve efficiency and cost effectiveness.

Scope of Audit

The scope of work of SPI includes examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of corporate governance, risk management processes, internal control systems and structures, quality of work and other assignments in achieving the goals and objectives of the Company that have been set, namely;

1. Carry out performance audits and special audits that include operational, financial and accounting audits, HR, general, and information systems.
2. Carry out fact-finding assignments and examinations of alleged violations of employee discipline.
3. Provide consultation to work units in carrying out internal control functions.
4. Assisting external auditors in carrying out audits in the company and monitoring the follow-up on audit results.
5. Assess and provide recommendations on the performance of the Public Accounting Firm (KAP) auditors who audit the Company.
6. Review and examine certain activities requested by the Board of Directors and the Board of Commissioners (Audit Committee)
7. Provide recommendations/suggestions for improvement of the applicable systems, policies, plans and procedures.

Tasks, and SPI Responsibilities

Tasks, and responsibilities of the Internal Audit Function (SPI) as described in the Internal Audit Charter as follows:

- a. SPI tasks include the following:
 - 1) Compile and carry out the internal audit charter.
 - 2) Create and compile an annual inspection work program (PKPT).
 - 3) Conduct operational and financial checks.
 - 4) Make and publish outcome reports (LHP)
 - 5) As a partner (counter-part) external auditor

- pihak Auditor Eksternal
- 6) Memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut LHP (internal dan eksternal)
 - 7) Memberikan saran - saran perbaikan sistem dan prosedur.
 - 8) Membantu manajemen dalam menilai resiko - resiko yang dihadapi perusahaan.
 - 9) Melakukan berbagai upaya untuk menemukan inovasi baru dalam bidang Satuan Pengawasan Internal
- b. Tanggung Jawab Fungsi SPI antara lain sebagai berikut:
- 1) Tanggung jawab SPI adalah memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa yang dilakukan sesuai dengan stand art audit dan standart perilaku profesional yang dituntut oleh kode etik sebagai fungsi pemeriksa operasional dan keuangan perusahaan.
 - 2) Tanggung jawab ini juga meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Komite Audit dan Auditor Eksternal sehingga tujuan audit semua pihak tercapai.
 - 3) SPI tidak dibenarkan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan operasional dari unit kerja yang diperiksa.
 - 4) Pelaksanaan audit harus mengacu kepada standar audit dan auditor wajib mematuhi kode etik.
- 6) Monitor and evaluate LHP follow-up (internal and external)
 - 7) Provide suggestions for system repair and procedures.
 - 8) Assist management in assessing the risks faced by the company.
 - 9) Make various efforts to find new innovations in the field of internal supervision units
- b. The responsibility of the SPI function includes the following:
- 1) SPI responsibility is to provide analysis, assessment, recommendations, consultation and information about the activity that is examined carried out in accordance with the stand audit stand and stan
 - 2) dard of professional behavior demanded by the code of ethics as the operational and financial auditor function.
 - 3) This responsibility also includes the coordination of the implementation of the audit carried out by the Audit Committee and external auditors so that the objectives of the audit of all parties are achieved.
 - 4) SPI is not justified involved in the implementation of operational activities from the work unit examined.
 - 5) The audit implementation must refer to the audit standard and the auditor must comply with the code of ethics.

Wewenang SPI

Wewenang Komite Audit meliputi, antara lain:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

SPI Authority

The authority of the Audit Committee includes, among others:

- a. Access Company documents, data and information about employees, funds, assets, and necessary company resources;
- b. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
- c. Involve independent parties other than members of the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if needed); and
- d. Perform other authorities given by the Board of Commissioners.

Kode Etik Auditor

Dalam menjalankan tugasnya anggota Komite Audit wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik, antara lain mengenai:

- Berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota, kode etik profesi Komite Audit, maupun kode etik Perusahaan.
- Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan yang diperoleh saat menjabat anggota Komite Audit.
-
- Anggota Komite Audit dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi.

Uraian Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal Pada Tahun Buku 2020

Berdasarkan data audit satuan pengawasan internal, pada tahun 2020 fungsi SPI :

- Menerbitkan 2 (dua) laporan hasil pemeriksaan (LHP)
- Menindaklanjuti 12 (dua belas) temuan laporan hasil pemeriksaan SPI
- Menindaklanjuti 4 (empat) temuan dari laporan auditor independent atas audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern tahun 2019
- Menindaklanjuti 1 (satu) temuan dari laporan hasil pemantauan kerugian Negara pada PT Boma Bisma Indra oleh BPK RI
- Telah melakukan tinjauan ulang / revisi pedoman kerja satuan pengawas internal (Internal Audit Charter) yang disahkan melalui Keputusan Direksi No. 080/Kpts.1000/1200/12.2020 serta diatur terperinci pada pedoman No 031/Ped.1000/1200/12.2020 dan telah dilakukan tinjauan ulangi revied update terhadap Standart Operasional Prosedur (SOP) SPI sebagai berikut:
 - Prosedur penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) No. dokumen QP-1200001 ditetapkan tanggal 26 Oktober 2020
 - Prosedur pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dokumen QP-122-002 ditetapkan tanggal 26 Oktober 2020
 - Prosedur pemeriksaan berdasarkan

Auditor Code of Ethics

In carrying out their duties, members of the Audit Committee must carry out their duties in accordance with the Code of Ethics, including regarding:

- Adhering to the professional code of ethics, both related to the expertise of each member, the Audit Committee's professional code of ethics, and the Company's code of ethics.
- Members of the Audit Committee are required to maintain the confidentiality of Company documents, data and information obtained while serving as members of the Audit Committee.
- Members of the Audit Committee are prohibited from misusing important information related to the Company for personal gain.

Description of the Implementation of the Activities of the Internal Audit Unit in the Financial Year 2020

Based on the audit data of the internal control unit, in 2020 the function of SPI:

- Issuing 2 (two) inspection reports (LHP)
- Following up on 12 (twelve) findings of the SPI inspection report
- Following up on 4 (four) findings from the independent auditor's report on the audit of compliance with laws and regulations and internal control in 2019
- Following up on 1 (one) finding from the report on the results of monitoring state losses at PT Boma Bisma Indra by BPK RI
- Has reviewed / revised the work guidelines of the internal audit unit (Internal Audit Charter) which was ratified through the Decree of the Board of Directors No. 080/Kpts.1000/1200/12.2020 and is regulated in detail in the guideline No. 031/Ped.1000/1200/12.2020 and a review has been carried out on the revied update of the SPI Standard Operating Procedure (SOP) as follows:
 - Procedure for the preparation of the Annual Audit Work Program (PKPT) No. document QP-1200001 set for October 26, 2020
 - Examination procedures based on the Annual Examination Work Program (PKPT) document QP-122-002 set on 26 October 2020
 - Inspection procedure based on the President Director's letter of assignment no. document QP-120-003 set for

surat tugas Direktur Utama No. dokumen QP-1200-003 ditetapkan tanggal 26 Oktober 2020

- Prosedur pelaksanaan tugas diluar PKPT (Tugas pendampingan KAP/BPKP/BPK) No. dokumen QP-1200-004 Tanggal 26 Oktober 2020
 - Prosedur monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan SPI, BPKP/BPK, KAP No. QP-1200-005 Tanggal 26 Oktober 2020
- f. Melakukan rapat evaluasi SPI sebanyak 12 kali
- g. SPI juga telah melakukan identifikasi risiko terhadap kinerja SPI
- h. SPI juga telah mengikuti beberapa pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal sebanyak 12 pelatihan

October 26, 2020

- Procedure for carrying out duties outside of PKPT (Assisting KAP/BPKP/BPK) No. document QP-1200-004 October 26, 2020
 - Follow-up monitoring procedures on the results of inspections of SPI, BPKP/BPK, KAP No. QP-1200-005 October 26, 2020
- f. Conducted 12 SPI evaluation meetings
- g. SPI has also identified risks to SPI performance
- h. SPI has also attended several trainings both internally and externally as many as 12 trainings



AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) demi mendapatkan kredibilitas penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan KAP ditetapkan melalui RUPS untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perseroan.

Proses Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan general audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Boma Bisma Indra (Persero) dan Entitas Anak, Laporan Keuangan atas Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT BBI (Persero) untuk tahun buku 2020 berdasarkan arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan tanggal 30 Juni 2019.

Sesuai dengan arahan Pemegang Saham Mayoritas sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN selaku pemegang saham PT BBI (Persero) kepada PT PPA (Persero) No. SKK-44/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020. Selanjutnya Surat dari PT PPA (Persero) No. S-4464/PPA/DU/1020, tanggal 23 Oktober tahun 2020 perihal Penunjukan KAP – Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020 yang ditunjuk adalah KAP RSM-AAJ.

Tugas Pokok Audit Eksternal

Tugas pokok eksternal Auditor KAP RSM-AAJ, yaitu melakukan audit terhadap PT Boma Bisma Indra (Persero) meliputi:

1. Perusahaan Induk Melaksanakan pemeriksaan/ audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK yang terdiri dari:

The independent supervisory function of the Company's financial aspects is carried out by carrying out an External Audit examination conducted by the Public Accounting Firm (KAP) in order to obtain the credibility of an accountable assessment. The determination of KAP is determined through the GMS to examine the Company's financial statements for the 2019 financial year. To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed external auditor may not have a conflict of interest with any level of the Company's officials.

Public Accountant Appointment Process

Appointment of a Public Accounting Firm that will conduct a general audit of the Consolidated Financial Statements of PT Boma Bisma Indra (Persero) and its Subsidiaries, Financial Statements on the Management of Funds for the Partnership and Community Development Program of PT BBI (Persero) for the 2020 financial year based on the direction of the General Meeting of Shareholders (GMS) which was held on June 30, 2019.

In accordance with the direction of the Majority Shareholder as stated in the Special Power of Attorney of the Minister of BUMN as the shareholder of PT BBI (Persero) to PT PPA (Persero) No. SKK-44/MBU/09/2020 dated September 30, 2020. Furthermore, Letter from PT PPA (Persero) No. S-4464/PPA/DU/1020, dated October 23, 2020 regarding the Appointment of KAP – Auditing the Financial Statements of the Company for the Financial Year 2020 appointed KAP RSM-AAJ.

Main Duties of External Audit

The main duties of the external auditor of KAP RSM-AAJ, namely conducting an audit of PT Boma Bisma Indra (Persero) include:

1. Parent Company Conducts audits/audits based on the Professional Standards of Public Accountants (SPAP) applicable in Indonesia and the State Financial Audit Standards (SPKN) set by the BPK consisting of:

- a. Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Auditor eksternal memberi pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (PSAK), dan meliputi Laporan Keuangan Perusahaan Induk, PKBL dan Konsolidasi PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak Perusahaan
 - a. Melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan PT Bromo Stell Indonesia (PT BOSTO), untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia.
 - b. Melakukan evaluasi Kinerja PT Bromo Stell Indonesia, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan SK Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002

- a. General audit of the Annual Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2020. The external auditor provides an opinion regarding the fairness of the presentation of the financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (PSAK), and includes the Financial Statements of the Parent Company, PKBL and the Consolidated PT Boma Bisma Indra (Persero) for the year ended December 31, 2020.
2. Subsidiaries
 - a. Carry out a General Audit of the Annual Financial Statements of PT Bromo Stell Indonesia (PT BOSTO), for the year ended December 31, 2020 based on the Professional Standards of Public Accountants (SPAP) applicable in Indonesia.
 - b. Evaluating the performance of PT Bromo Stell Indonesia, for the year ended December 31, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs No.KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002.

Akuntan Publik yang ditunjuk BBI tahun 2016-2020

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris. Informasi daftar nama Kantor Akuntan Publik beserta opini yang diberikan atas laporan keuangan Boma Bisma Indra selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Public Accountant appointed by BBI 2016-2020

In carrying out the audit of financial statements, the Company appoints a Public Accounting Firm (KAP) which is decided through the GMS based on the recommendation of the Board of Commissioners. Information on the list of names of Public Accounting Firms along with the opinions given on the financial statements of Boma Bisma Indra for the last 5 (five) years are as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Responsible Partner of The Firm	Opini Opinion
2020	RSM Indonesia	Rudi Hartanto Purba	Wajar dalam hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Fair in material terms, in accordance with financial accounting standards in Indonesia
2019	Thoufan dan Rosyid	Rosyid Arifin, CPA	Wajar dalam hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Fair in material terms, in accordance with financial accounting standards in Indonesia
2018	Thoufan dan Rosyid	Rosyid Arifin, CPA	Wajar dalam hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Fair in material terms, in accordance with financial accounting standards in Indonesia

2017	Thoufan dan Rosyid	Rosyid Arifin, CPA	Wajar dalam hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Fair in material terms, in accordance with financial accounting standards in Indonesia
2016	Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan	Drs. Widartoyo, Ak, MM, Msi, CPA	Wajar dalam hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Fair in material terms, in accordance with financial accounting standards in Indonesia

Biaya audit Laporan Keuangan tahun buku 2020 sebesar Rp 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), biaya tersebut termasuk biaya audit laporan keuangan dan PKBL PT Bromo Steel Indonesia (entitas anak). Dalam hubungan kerja ini, tidak ada hubungan afiliasi antara auditor dan Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham Perusahaan.

The cost of auditing the Financial Statements for the financial year 2020 is Rp. 168,000,000 (one hundred and sixty eight million rupiah), this fee includes the cost of auditing the financial statements and the PKBL of PT Bromo Steel Indonesia (a subsidiary). In this working relationship, there is no affiliation relationship between the auditor and the Board of Directors / Board of Commissioners / Shareholders of the Company.

Selain melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk tahun buku 31 Desember 2020, KAP RSM Indonesia, juga memberikan jasa penugasan lain dan termasuk dalam biaya audit, yakni:

1. Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Boma Bisma Indra (Persero) Tahun Buku 2020.
2. Audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan pengendalian internal (PSA 62) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.
3. Prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.
4. Menerbitkan Management Letter atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Boma Bisma Indra (Persero) dan Anak Perusahaan termasuk Management Letter terhadap Anak Perusahaan, PKBL Boma Bisma Indra untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, yang menekankan pada efektivitas pengendalian internal.
5. Prosedur yang disepakati atas Laporan Capaian Kontrak Manajemen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

In addition to carrying out a general audit of the Consolidated Financial Statements of PT Boma Bisma Indra (Persero) for the financial year 31 December 2020, KAP RSM Indonesia also provides other assignment services and is included in the audit fee, namely:

1. General audit of the Consolidated Financial Statements of PT Boma Bisma Indra (Persero) for Fiscal Year 2020.
2. Audit of compliance with applicable laws and regulations and internal control (PSA 62) for the year ended 31 December 2020.
3. The agreed procedure for the Performance Evaluation Report of PT Boma Bisma Indra (Persero) for the year ending 31 December 2020.
4. Issuing a Management Letter on the Consolidated Financial Statements of PT Boma Bisma Indra (Persero) and its Subsidiaries, including a Management Letter to the Subsidiary, PKBL Boma Bisma Indra for the financial year ending 31 December 2020, which emphasizes the effectiveness of internal control.
5. The agreed procedure for the Management Contract Achievement Report for the year ended December 31, 2020.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Manajemen

BBI menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnisnya. Risiko-risiko tersebut melekat pada semua aktifitas dan pengambilan keputusan serta dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi kestabilan Perusahaan. BBI membutuhkan sistem manajemen risiko yang mampu mengelola segala bentuk ketidakpastian menjadi fokus Perseroan. Manajemen Risiko menjadi semakin penting keberadaannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh Perusahaan demi memastikan roda bisnis perusahaan terus berputar. Manajemen Risiko adalah suatu budaya, dimana proses-proses dan struktur diarahkan untuk mengelola manajemen yang tepat guna, terhadap peluang yang potensial dan dampak yang merugikan.

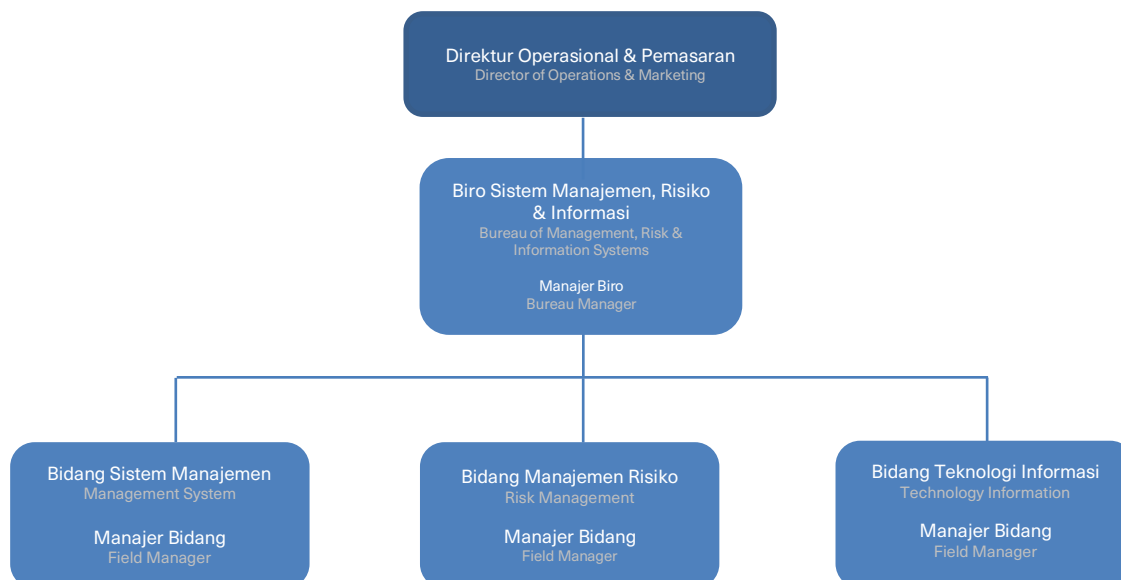
Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola perusahaan yang baik (GCG), dalam pelaksanaan program Manajemen Risiko terhitung sejak 2 Januari 2020, Bidang Manajemen Risiko yang berada di bawah Biro Sistem Manajemen Risiko dan Informasi (SMRI) dibawah Direktur Operasional dan Pemasaran berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 001/Kpts.1000.1400/1.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Perubahan Pokok-Pokok Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi dibawahnya. Fungsi utama Bidang Manajemen Risiko dalam penerapan, pengembangan dan asesmen sistem manajemen risiko di tingkat Perusahaan yang terintegrasi dari semua fungsi manajemen berdasarkan Visi/Misi BBI dan pengendalian implementasi sistem manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian produktivitas Perusahaan.

BBI realizes that risk has become an integral part of every business process. These risks are inherent in all activities and decision making and the impact of these risks can significantly affect the stability of the Company. BBI requires a risk management system capable of managing all forms of uncertainty to be the focus of the Company. Risk Management is becoming increasingly important as a basis for decision making by the Company in order to ensure that the company's business wheels continue to spin. Risk Management is a culture, where the processes and structures are directed to manage an effective management, against potential opportunities and adverse impacts.

Organizational Structure of Risk Management

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG), in the implementation of the Risk Management program as of January 2, 2020, the Risk Management Division is under the Risk Management and Information System Bureau (SMRI) under the Director of Operations and Marketing based on the Decree of the Board of Directors Number: 001 / Kpts.1000.1400 / 1.2020, dated January 2, 2020 concerning Changes in the Principals of Organizational Structure and Organizational Functions below. The main function of the Risk Management Sector is in the implementation, development and assessment of a risk management system at the Company level which is integrated from all management functions based on the Vision/Mission of BBI and controlling the implementation of the risk management system in order to support the achievement of the Company's productivity.



Fungsi Manajemen Risiko pada Biro Sistem Manajemen Risiko dan Informasi

Pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan sistem manajemen risiko perusahaan serta pemantauan tindak lanjut risiko secara berkala.

Tugas Pokok Manajemen Risiko pada Biro Sistem Manajemen Risiko dan Informasi:

1. Pengelolaan risiko dan Informasi yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas order / proyek serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
2. Melakukan review dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.
3. Melakukan pengawasan atas kegiatan Risk Management dalam memantau pelaksanaan mitigasi resiko oleh unit-unit kerja terkait.

Bagian Manajemen Risiko, Biro Sistem Manajemen Risiko dan Informasi berada di bawah koordinasi Direktorat Operasional dan Pemasaran. Dengan demikian pengelolaan risiko dapat menjadi strategic tools dalam pengambilan keputusan pada proses manajemen.

Risk Management Function in the Bureau of Risk Management and Information Systems

Management, implementation, evaluation, and development of the company's risk management system as well as periodic risk follow-up monitoring.

Main Tasks of Risk Management at the Bureau of Risk Management and Information Systems:

1. Risk management and information which includes identification, evaluation and control of risks that may threaten business continuity or order/project activities as well as implementing GCG principles.
2. Review and provide recommendations on the effectiveness of the Company's risk management implementation.
3. Supervise Risk Management activities in monitoring the implementation of risk mitigation by related work units.

The Risk Management Division, the Risk Management System and Information Bureau is under the coordination of the Directorate of Operations and Marketing. Thus risk management can be a strategic tool in decision making in the management process.

Profil Manajer Biro Sistem Manajemen, Risiko dan Informasi



Moch Subekti

Manajer Biro Sistem Manajemen, Risiko, dan Informasi
Management, Risk, and Information System Bureau Manager

Manager Profile of Management, Risk and Information System

Usia <i>Age</i>	54 tahun <i>54 years old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Surabaya <i>Surabaya</i>
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, tahun 1990 • Bachelor of Mechanical Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya, 1986
Riwayat Pekerjaan <i>Employment History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Biro Quality, Safety, Health and Environment (QSHE), (2020) • General Manager Divisi Manajemen Proyek dan Jasa (2018 – 2020) • General Manager Divisi Operasional (2016 – 2020) • Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Jasa (2012-2016) • Kepala Divisi Produksi EPC (2009-2012) • Kepala Divisi Engineering (2004-2009) • Manager Engineering (1997 - 2004) • Manager of the Bureau of Quality, Safety, Health and Environment (QHSE), (2020) • General Manager of the Project Management and Services Division (2018 - 2020) • General Manager Operations Division (2016 - 2020) • Head of Project Management and Services Division (2012-2016) • Head of the EPC Production Division (2009-2012) • Head of Engineering Division (2004-2009) • Engineering Manager (1997-2004)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	<p>Menjabat sebagai Manajer Biro Sistem Manajemen, Risiko, dan Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 043/Skept.1000.1400/08.2020</p> <p><i>Served as Manager of the Management, Risk, and Information System Bureau based on the Decree of the Board of Directors No. 043 / Skept.1000.1400 / 08.2020</i></p>

Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko

Kebijakan dan Komitmen tersebut memuat pernyataan bahwa Manajemen Risiko Perusahaan adalah bagian dari proses bisnis, pengambilan keputusan dan pembentukan budaya setiap pegawai. Selain itu, Kebijakan dan Komitmen juga menerangkan strategi penerapan manajemen risiko, struktur organisasi manajemen risiko, lingkungan pengendalian, proses manajemen risiko, pengelolaan kinerja manajemen risiko dan sistem pelaporannya. BBI juga telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan Nomor: RM-1100-001, yang ditandatangani Direktur Utama pada tanggal 16 Desember 2016, dan perubahannya Nomor: RM-2100-001, telah ditandatangani Direktur Utama pada tanggal 01 September 2020 berisi hal-hal, sebagai berikut:

1. Pendahuluan:
 - a. Latar Belakang
 - b. Ruang Lingkup
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Dasar Pelaksanaan Penyusunan
 - e. Istilah dan Definisi

Risk Management Policy and Guidelines

The Policy and Commitment contains a statement that the Company's Risk Management is part of the business process, decision making and the formation of culture for each employee. In addition, the Policy and Commitment also explains the risk management implementation strategy, risk management organizational structure, control environment, risk management process, risk management performance management and reporting system. BBI also has a Corporate Risk Management Guideline Number: RM-1100-001, which was signed by the President Director on 16 December 2016, and its amendment Number: RM-2100-001, signed by the President Director on 01 September 2020, contains the following: as follows:

1. Introduction:
 - a. Background
 - b. Scope
 - c. Purpose and objectives
 - d. Basic Implementation of Preparation
 - e. Terms and Definitions

2. Prinsip dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko
 3. Proses Manajemen Risiko:
 - a. Proses Manajemen Risiko
 - b. Komunikasi dan konsultasi
 - c. Menentukan konteks
 - d. Assessment Risiko
 - e. Identifikasi Risiko
 - f. Analisis Risiko
 - g. Evaluasi Risiko
 - h. Mitigasi/Perlakuan Risiko
 - i. Pemantauan dan Pengkajian (Monitoring dan Review)
 - j. Dokumentasi dan Pelaporan Manajemen Risiko
 - k. Risk Based Audit
 - l. Penyiapan kompetensi Instansi
 4. Penutup
2. Risk Management Principles and Framework
 3. Risk Management Process:
 - a. Risk Management Process
 - b. Communication and consulting
 - c. Define context
 - d. Risk Assessment
 - e. Risk Identification
 - f. Risk Analysis
 - g. Risk Evaluation
 - h. Mitigation/Risk Treatment
 - i. Monitoring and Assessment (Monitoring and Review)
 - j. Risk Management Documentation and Reporting
 - k. Risk Based Audit
 - l. Agency competency preparation
 4. Cover

Roadmap Manajemen Risiko Perseroan

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan PT BBI (Persero) dilakukan berdasarkan SNI ISO31000: 2011 dengan mengacu kepada RJPP PT BBI 2019-2024.

Berikut adalah Road Map Manajemen Risiko 2019-2023:

Company Risk Management Roadmap

Implementation of Risk Management within PT BBI (Persero) is carried out based on SNI ISO31000: 2011 with reference to PT BBI's RJPP 2019-2024.

The following is the 2019-2023 Risk Management Road Map:

Tahun Year	Tema Theme	Uraian	Description
TW 4 2020	Integrasi Manual Sistem Manajemen Risiko Risk Management System Manual Integration	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi Manual Sistem Manajemen Risiko dengan ISO 31000:2009, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016; Perbaikan Prosedur Manajemen Risiko Penunjukan Chief Risk Officer 	<ul style="list-style-type: none"> Integration of the Risk Management System Manual with ISO 31000:2009, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016; Improvement of Risk Management Procedures for Appointment of Chief Risk Officer
2021	Implementasi Manajemen Risiko & Tinjauan Manajemen Risiko Risk Management Implementation & Risk Management Review	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman Manajemen Risiko melalui Bimbingan Teknis/ Awareness/ Sosialisasi Manajemen Risiko; Prosedur Manajemen Risiko; Penerapan Manajemen Risiko; Pemantauan Manajemen Risiko; Risiko Perusahaan dipengaruhi factor internal dan eksternal. 	<ul style="list-style-type: none"> Understanding of Risk Management through Technical Guidance/ Awareness/ Risk Management Socialization; Prosedur Manajemen Risiko; Penerapan Manajemen Risiko; Pemantauan Manajemen Risiko; Risiko Perusahaan dipengaruhi factor internal dan eksternal.
2022	Persiapan Manajemen Risiko Berbasis Web Web-Based Risk Management Preparation	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Manajemen Risiko Berbasis Web 	<ul style="list-style-type: none"> Web-Based Risk Management Network
2023- 2024	Implementasi Manajemen Risiko Berbasis Web	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Executive Summary secara otomatis oleh system; Key Risk Indikator di Dashboard Pembuatan Dashboard Manajemen Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> Executive Summary report automatically by the system; Key Risk Indicator in Dashboard Creation of Risk Management Dashboard

Kategori Risiko

Risiko dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) kelompok, sebagai berikut:

1. Risiko Keuangan, Risiko yang dihadapi Perusahaan dalam bentuk fluktuasi target-target finansial dalam rangka menjalankan proses bisnisnya termasuk volatilitas kondisi ekonomi dan keuangan eksternal. Ukuran keuangan dapat berupa arus kas, laba Perusahaan, dan pertumbuhan penjualan.
2. Risiko Keselamatan dan Kesehatan, Risiko yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
3. Risiko Lingkungan, Risiko yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan untuk menjamin dan melindungi Lingkungan Kerja, Perusahaan dan masyarakat dari Pencemaran Lingkungan.
4. Risiko Operasional, Risiko yang timbul akibat kegagalan menjalankan suatu sistem, proses, SDM, teknologi, atau faktor lainnya.
5. Risiko Usaha, Risiko yang timbul akibat menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar sehingga dapat menimbulkan kerugian perusahaan.
6. Risiko Reputasi, Risiko yang timbul antara lain dari publikasi kegiatan perusahaan ataupun akibat adanya persepsi umum akibat perubahan lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi brand perusahaan.
7. Risiko Keluhan Pelanggan, Risiko yang timbul akibat adanya kegagalan produk, sistem, proses, SDM, teknologi atau faktor lainnya.
8. Risiko Produksi, Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya peralatan atau mesin yang mempengaruhi proses produksi dan menyebabkan terganggunya operasional.
9. Risiko Penyuapan, Risiko yang timbul dari adanya tindakan pemberian uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan yang diberikan oleh pemberi suap atas dasar kepentingan/minat dari pemberi suap.
10. Risiko Hukum, Risiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari kelemahan masalah hukum, ketidakpastian hukum atau peraturan perundang-undangan yang mendukung,

Risk Category

Risks are grouped into 10 (ten) groups, as follows:

1. Financial Risk, The risk faced by the Company in the form of fluctuations in financial targets in order to carry out its business processes including the volatility of external economic and financial conditions. Financial measures can be in the form of cash flow, company profits, and sales growth.
2. Safety and Health Risks, Risks arising from the company's operational activities to ensure and protect the safety and health of workers through efforts to prevent work accidents and occupational diseases.
3. Environmental Risk, Risk arising from the company's operational activities to ensure and protect the Work Environment, the Company and the community from Environmental Pollution.
4. Operational Risk, Risk arising from failure to run a system, process, human resources, technology, or other factors.
5. Business Risk, Risk arising from a decrease in the value of an investment due to movements in market factors so that it can cause company losses.
6. Reputational Risk, Risk that arises, among others, from the publication of company activities or due to general perceptions due to changes in the business environment that can affect the company's brand.
7. Risk of Customer Complaints, Risks arising from the failure of products, systems, processes, human resources, technology or other factors.
8. Production Risk, Risk arising from insufficient and/or non-functioning equipment or machinery that affects the production process and causes operational disruption.
9. Bribery Risk, Risk arising from the act of giving money, goods or other forms of retaliation given by the bribe giver on the basis of the interest/interest of the bribe giver.
10. Legal Risk, Risk arising from the company's inability to manage legal issues that can cause company losses. Legal risk can be sourced from, among others, the weakness of legal issues, legal uncertainty or supporting laws and regulations, negligence in applying the law, the absence of the underlying laws and regulations or weaknesses in agreements or engagements with third parties, such as

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

kelalaian penerapan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perjanjian atau perikatan dengan pihak ketiga, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar Negara.

non-fulfillment of the conditions for a valid contract, claims legal and/or juridical aspects weaknesses, obstacles in the litigation process for the settlement of claims, as well as jurisdictional issues between countries.

Prioritas Risiko dan Penanganannya

Periode 2020 dan sebelumnya belum dilakukan pemetaan risiko perusahaan, hanya risiko operasional berdasarkan laporan perfungsi saja.

Risk Priority and Handling

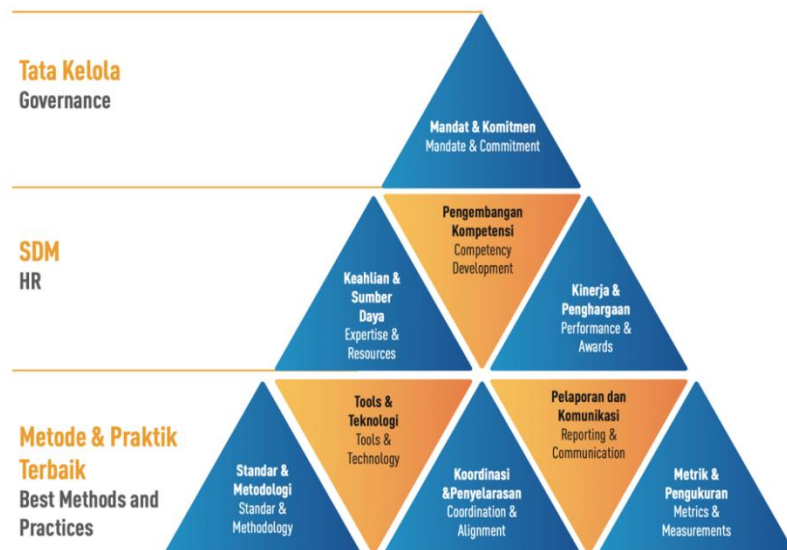
For the 2020 period and before, no company risk mapping has been carried out, only operational risk based on function reports.

Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan

Sebagai upaya memastikan keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan, BBI secara berkala melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko. Di setiap unit kerja dan/atau perusahaan sebagai gabungan/konsolidasi secara berkala untuk perbaikan berkesinambungan terhadap penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (MRP). Dari hasil evaluasi diharapkan dapat diperoleh bahan oleh manajemen BBI dalam menyusun strategi dan program-program pengembangan manajemen risiko Perseroan di masa mendatang.

Evaluation of the Effectiveness of the Company's Risk Management Implementation

In an effort to ensure the sustainability of the company's risk management implementation, BBI periodically evaluates the implementation of risk management. In each work unit and/or company as a joint/consolidation periodically for continuous improvement of the implementation of Corporate Risk Management (MRP). From the evaluation results, it is hoped that BBI management can obtain material in formulating strategies and programs for developing the Company's risk management in the future.



Gambar : Elemen evaluasi penerapan manajemen risiko perusahaan PT Boma Bisma Indra (Persero)

Image : Evaluation elements in PT Boma Bisma Indra (Persero) risk management

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

PT Boma Bisma Indra (Persero) mengatur tata cara dan perilaku insan BBI melalui Code of Conduct dan pengendalian operasi proses bisnis sesuai dengan sistem tata kerja yang berlaku di masing-masing fungsi.

Insan BBI berkomitmen melaksanakan kegiatan operasi secara aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar tinggi terhadap aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan. Insan BBI juga dituntut menjalankan kegiatan usaha secara berintegritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan, dan berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

Dalam pengendalian aktivitas keuangan, BBI menetapkan kebijakan mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan serta pelaksanaan evaluasinya. Penerapan kebijakan ini mengarahkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan efektivitas pengendalian internal baik tingkat entitas maupun transaksional.

Sistem pengendalian internal Boma Bisma Indra terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko (risk assessment), aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi (information and communication) dan aktifitas pengawasan (monitoring activities). Terkait dengan pengendalian internal, pengelolaan aspek manajemen risiko dilaksanakan merujuk pada ISO 31000:2009 Risk Management-Principles and Guidelines. Dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan agar BBI mampu menentukan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan, memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, mengutamakan kepercayaan pelaporan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Tanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan ada pada Satuan Pengawasan Internal, meskipun dapat meminta pihak eksternal untuk melakukannya.

PT Boma Bisma Indra (Persero) regulates the procedures and behavior of BBI personnel through the Code of Conduct and control of business process operations in accordance with the work system applicable in each function.

BBI personnel are committed to carrying out operations in a safe, comfortable, and environmentally friendly manner by applying high standards to aspects of occupational health, safety, security, and protection. BBI personnel are also required to carry out business activities with integrity and professionalism, avoid conflicts of interest, do not tolerate bribery, uphold trust, and adhere to the principles of good corporate governance.

In controlling financial activities, BBI establishes policies regarding internal control over financial reporting and the implementation of its evaluation. The implementation of this policy directs, implements, evaluates and reports on the effectiveness of internal control at both the entity and transactional levels.

Boma Bisma Indra's internal control system consists of 5 (five) components, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring activities.). Regarding internal control, the management of risk management aspects is carried out in accordance with ISO 31000:2009 Risk Management-Principles and Guidelines. With the existence of an internal control system, it is hoped that BBI will be able to determine targets in accordance with the Company's vision and mission, ensure the effectiveness and efficiency of resource use, prioritize reporting trust and comply with applicable laws and regulations.

The responsibility for carrying out an evaluation of the adequacy of the Company's Internal Control System rests with the Internal Control Unit, although it may request external parties to do so.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

Dalam melakukan evaluasi untuk menguji efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan, Perusahaan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Informasi ataupun data yang dikelola dan dilaporkan memenuhi kriteria accurate, reliable, timely, consistent dan usefull.
2. Memastikan bahwa semua elemen pada Perusahaan taat terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan bahwa pengamanan dan pemanfaatan aset Perusahaan berjalan sebagaimana mestinya, penggunaan sumber daya dijalankan secara efektif dan efisien serta pencapaian target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Melakukan audit, evaluasi dan konsultasi tentang kemampuan, efektifitas, ketaatasaan dan kualitas pelaksanaan tugas Manajemen operasional antara lain meliputi Pengelolaan risiko, pengadaan, pembelian dan lain sebagainya.
5. Melakukan audit, evaluasi dan konsultasi tentang kemampuan, efektifitas, ketaatasaan dan kualitas tugas manajemen operasi pada anak Perusahaan atas perintah Direktur utama Perusahaan selaku Kuasa Pemegang Saham Anak Perusahaan dan Seizin Komisaris Anak Perusahaan terkait.
6. Memastikan bahwa semua proses bisnis dalam Perusahaan memenuhi aspek akuntabilitas.
7. Monitor kepatuhan terhadap kebijakan pendukung penerapan GCG (soft structure GCG) Perusahaan.
8. Memonitor kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku bagi Perusahaan.
9. Memastikan bahwa risiko-risiko yang dikelola Perusahaan sudah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, ditangani, dimonitor dan dikomunikasikan.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal menjadi salah satu dasar evaluasi Manajemen terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan manajemen dapat secara lebih efektif dalam menjalankan kegiatan operasional.

In conducting an evaluation to test the effectiveness of the implemented Internal Control System, the Company takes the following steps:

1. Ensure that the information or data that is managed and reported meets the criteria of accurate, reliable, timely, consistent and usefull.
2. Ensure that all elements of the Company comply with applicable policies, procedures, regulations and laws.
3. Ensuring that the safeguarding and utilization of the Company's assets are running properly, the use of resources is carried out effectively and efficiently and the achievement of targets is in accordance with the predetermined plan.
4. Conducting audits, evaluations and consultations on the capability, effectiveness, compliance and quality of the implementation of the tasks of Operational management, including risk management, procurement, purchasing and so on.
5. Conducting audits, evaluations and consultations regarding the capability, effectiveness, compliance and quality of operations management duties in subsidiaries on the orders of the Company's President Director as the Proxy of Shareholders of the Subsidiaries and with the permission of the Commissioners of the related Subsidiaries.
6. Ensure that all business processes within the Company meet the accountability aspect.
7. Monitor compliance with policies supporting the implementation of GCG (soft structure GCG) of the Company.
8. Monitor compliance with laws and regulations and other regulations that apply to the Company.
9. Ensure that the risks managed by the Company have been identified, analyzed, evaluated, handled, monitored and communicated.

The results of the evaluation of the implementation of the Internal Control System become one of the basis for Management's evaluation of the effectiveness of the Internal Control System to determine improvements and refinements to systems or policies that enable management to be more effective in carrying out operational activities.

Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Internal tersebut disampaikan secara tertulis dalam Laporan Hasil Audit kepada Direktur utama. Hasil evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan secara komprehensif menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal masih belum optimal selanjutnya Direktur utama memberikan arahan tindak lanjut, sehingga kelemahan pengendalian internal dapat segera diperbaiki dan risiko pencapaian tujuan proses bisnis dapat segera termitigasi.

The results of the evaluation of the Internal Control System are submitted in writing in the Audit Results Report to the President Director. The results of a comprehensive evaluation of the effectiveness of the Company's Internal Control System indicate that the Internal Control System is still not optimal. Furthermore, the President Director provides follow-up directions, so that internal control weaknesses can be immediately corrected and the risk of achieving business process objectives can be immediately mitigated.



PERMASALAHAN HUKUM / LITIGASI

PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Legal issues encountered by the Company and Subsidiaries

Sepanjang tahun 2020, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Throughout 2020, the number of civil and criminal law issues that have been completed (have permanent legal force) and are still in the process of being resolved are presented in the following table:

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum Legal Legal Cases	Jumlah Total			
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Pajak Tax	Arbitrase Arbitrase
Klaim Pembayaran Payment Claim	-	-	-	-
Anti Klaim Anti Claim	1	-	-	-
Lahan/Tanah Land	-	-	-	-
Pembatalan Putusan Arbitrase Cancellation of Arbitration Award	-	-	-	-
K3 OHS	-	-	-	-
Tarif Bia Masuk Import Duty Tariff	-	-	-	-

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Table of Important Cases Facing the Company

No	Pokok Perkara dan Perkembangan Terakhir Case Subject and Latest Development	Status Penyelesaian Legal Cases	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan Impact on Company's Co	Pajak Tax	Arbitrase Arbitrase
1	Permohonan Banding atas Surat Ketetapan Keberatan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak terkait dengan Bea Masuk yang dibebankan kepada WIKA dalam rangka impor barang dengan penggunaan fasilitas AIFTA di Peradilan Pajak. Application for Appeal on the Decision Letter of Objection issued by the Director General of Taxes related to the Import Duties imposed on WIKA in the context of importing goods using the AIFTA facility at the Tax Court.	Open. Masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Still in the process of cassation at the Supreme Court	Tidak berpengaruh kepada Keuangan Perusahaan. Does not affect the Company's Finances.	-	Rp 23.561.390.882

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris yang Sedang Menjabat

Selama Tahun 2020, tidak ada permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Permasalahan Hukum Entitas Anak / PT Bromo Steel Indonesia

Selama Tahun 2020, tidak ada permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang sedang dihadapi Anak Perusahaan

Legal Problems Being Faced by the Board of Directors and the Board of Commissioners Who Are Currently Serving

During 2020, there were no legal issues, both civil and criminal, being faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Legal Issues for Subsidiary / PT Bromo Steel Indonesia

During 2020, there were no legal issues, both civil and criminal, being faced by the Subsidiaries

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Company data and information access

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BBI telah menyediakan informasi kepada stakeholders yang memungkinkan stakeholders menggunakan haknya. Penyebaran informasi Perseroan antara lain dilakukan melalui media sebagai berikut: media elektronik, email, siaran pers, media social dan datang langsung ke Kantor Pusat.

Media Elektronik

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Information & Communication Technology/ICT) yang andal sangatlah dibutuhkan untuk mendukung penyampaian informasi kepada publik baik internal maupun eksternal, selain sebagai pendukung kegiatan komunikasi BBI ke seluruh dunia.

Perbaikan di segala bidang dengan basis Teknologi Informasi (TI) menjadi penting dalam beberapa tahun terakhir sebab akses database elektronik menjadi salah satu alternatif yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi. Karenanya pemanfaatan TI berbasis digital menjadi tuntutan mutlak dalam pengembangan media komunikasi BBI saat ini dan di masa mendatang.

Seiring dengan meningkatnya peran BBI menjadi Perusahaan kelas dunia, penggunaan media elektronik sangatlah dibutuhkan untuk mendukung penyampaian informasi kepada publik baik internal maupun eksternal. Media elektronik BBI dapat diakses melalui:

Website : www.ptbbi.co.id

E-mail : corporate@ptbbi.co.id

Based on Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, BBI has provided information to stakeholders that allows stakeholders to exercise their rights. Information dissemination of the Company is carried out, among others, through the following media: electronic media, email, press releases, social media and coming directly to the Head Office.

Electronic Media

The use of reliable information and communication technology (ICT) is needed to support the delivery of information to the public, both internally and externally, in addition to supporting BBI's communication activities throughout the world.

Improvements in all fields based on Information Technology (IT) have become important in recent years because electronic database access has become one of the important alternatives in meeting the public's need for information. Therefore, the use of digital-based IT is an absolute demand in the development of BBI communication media today and in the future.

Along with the increasing role of BBI to become a world-class company, the use of electronic media is needed to support the delivery of information to the public, both internally and externally. BBI electronic media can be accessed through:

Website : www.ptbbi.co.id

E-mail : corporate@ptbbi.co.id

Siaran Pers

Pers Release

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
1	22 Februari 2020 February 22, 2020	Rapat Kerja RKAP PT BBI 2020: "Sinergi Harmoni & Profesional" PT BBI RKAP Work Meeting 2020: "Harmony & Professional Synergy"
2	17 Maret 2020 March 17, 2020	Sosialisasi Penyebaran dan Pencegahan Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan PT BBI Dissemination of the Spread and Prevention of Corona Virus (Covid-19) in PT BBI

3	18 Maret 2020 March 18, 2020	Exit Meeting Assessment GCG 2019 oleh BPKP Jawa Timur Exit Meeting Assessment GCG 2019 by BPKP East Java
4	01 Juli 2020 July 01, 2020	BBI Berhasil Selesaikan Order Pengadaan Tower JTB Pertamina EP Cepu BBI Successfully Completed JTB Pertamina EP Cepu Tower Procurement Order
5	29 Juli 2020 July 29, 2020	Pisah Sambut Komisaris Utama PT BBI Farewell to the President Commissioner of PT BBI
6	14 Agustus 2020 August 14, 2020	Pengangkatan dan Penempatan Pejabat BOD-1 PT BBI Appointment and Placement BOD-1 Officers of PT BBI
7	31 Agustus 2020 August 31, 2020	Puncak HUT Ke-49, BBI Gelar Webinar Dengan Tema Maturity Of Millenial for Corporation Peak of the 49 th Anniversarry, BBI Holds a Webinar Theme Maturity of of Millenial Corporation
8	02 September 2020 September 02, 2020	Closing Meeting Audit Internal (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015) Closing Meeting Audit Internat ((ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)
9	10 September 2020 September 10, 2020	BBI Santuni Anak Yatim, Panti Asuhan, dan Berikan Bantuan Pendidikan BBI Supports Orphans, Orphanages, and Provides Educational Assistance
10	29 September 2020 September 29, 2020	BBI Perketat Penerapan Protokol Kesehatan di Lingkungan Kerja BBI Tightens the Implementation if Health Protocols in the Work Environment
11	30 September 2020 September 30, 2020	BBI Dukung Pemerintah: Gerakan Wajib Masker BBI Supports Government: Mandatory Mask Movement
12	05 November 2020 November 05, 2020	Diskusi dan Survey Industri BATAN dan BPPT ke PT BBI Survey and Discussion BATAN Industry and BPPT to PT BBI
13	25 November 2020 January 28, 2020	Closing Pengiriman Produk PV Clad Proyek JTB Closing JTB Project PV Clad Product Delivery
14	18 Desember 2020 December 18, 2020	BBI Raih Sertifikat ISO 37001:2016 BBI Receives ISO 37000:2016 Certificate
15	30 Desember 2020 December 30, 2020	Closing Meeting Audit Surveillance ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 oleh TUV Rheinland Closing Meeting Audit Surveillance ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 by TUV Rheinland

Media Sosial

Seiring berkembangnya zaman, media sosial menjadi salah satu sarana yang paling efektif untuk menunjukkan eksistensi Perusahaan. Untuk memenuhi hal tersebut, BBI mengelola beberapa social media sebagai berikut :

Twitter : @bbi_persero
Facebook : PT Boma Bisma Indra (Persero)
Instagram : bbi.persero
Youtube : Corporate PT BBI
E-mail : humas@ptbbi.co.id

Social Media

Along with the times, social media has become one of the most effective means to show the existence of the Company. To fulfill this, BBI manages several social media as follows:

Twitter : @bbi_persero
Facebook : PT Boma Bisma Indra (Persero)
Instagram : bbi.persero
Youtube : Corporate PT BBI
E-mail : humas@ptbbi.co.id

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

KODE ETIK PERUSAHAAN

Internal Control System

Sebagai acuan dan panduan dalam menerapkan Kode Etik, BBI telah menerbitkan SK Direksi Nomor: 047/Kpts.1000/1100/07.2020 tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 26 Desember 2016 dan diperbaharui Kembali pada tanggal 29 Juli 2020. Selain itu juga ditandatangani Komitmen Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pelaksanaan Pedoman "Code of Conduct"

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku mengatur tata cara Perusahaan didalam menjalankan perusahaan yang baik secara optimal dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan penerapan dan tindakan yang telah ada dalam pedoman tersebut yang bisa di-unduh melalui website : www.ptbbi.co.id.

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku

Pedoman ini berisi 5 bagian dengan rincian pada setiap bagian, yaitu:

1. Pendahuluan, memuat:
 - a) Latar Belakang
 - b) Maksud, Tujuan dan Manfaat
 - c) Ruang Lingkup
 - d) Istilah dan Definisi
 - e) Referensi
2. Visi, Misi, Tata Nilai Perusahaan dan Prinsip-Prinsip GCG, memuat:
 - a) Visi dan Misi Perusahaan
 - b) Tata Nilai Perusahaan
 - c) Prinsip-prinsip GCG
3. Standar Etika Usaha, memuat:
 - a) Etika Perseroan dengan Pekerja
 - b) Etika Perseroan dengan Pelanggan
 - c) Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa
 - d) Etika Perseroan dengan Kreditur
 - e) Etika Perseroan dengan Pemerintah
 - f) Etika Perseroan dengan Masyarakat
 - g) Etika Perseroan dengan Pemegang Saham
 - h) Etika Perseroan dengan Pemasok
 - i) Etika Perseroan dengan Anak Perusahaan
 - j) Etika Perseroan dengan Media Massa
 - k) Integritas Laporan Keuangan

As a reference and guide in implementing the Code of Ethics, BBI has issued a Decree of the Board of Directors Number: 047/Kpts.1000/1100/07.2020 concerning Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct which was signed by the President Director on December 26, 2016 and renewed again on July 29 2020. In addition, the Joint Commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Implementation of the Code of Conduct was also signed.

The Code of Business Ethics and Code of Conduct regulates the Company's procedures in running a good company optimally in achieving company goals in accordance with the implementation and actions contained in these guidelines which can be downloaded through the website: www.ptbbi.co.id.

Code of Business Ethics and Code of Conduct

This manual contains 5 sections with details on each section, namely:

1. Introduction, contains:
 - a) Background
 - b) Purpose, Purpose and Benefits
 - c) Scope
 - d) Terms and Definitions
 - e) Reference
2. Vision, Mission, Corporate Values and GCG Principles, containing:
 - a) Company Vision and Mission
 - b) Corporate Values
 - c) GCG principles
3. Standards of Business Ethics, containing:
 - a) Company Ethics with Employees
 - b) Company Ethics with Customers
 - c) Company Ethics with Goods and Service Providers
 - d) Company Ethics with Creditors
 - e) Company Ethics with the Government
 - f) Company Ethics with Society
 - g) Company Ethics with Shareholders
 - h) Company Ethics with Suppliers
 - i) Company Ethics with Subsidiaries
 - j) Company Ethics with Mass Media
 - k) Integrity of Financial Statements

4. Pedoman Tata Perilaku, memuat:
 - a) Komitmen Individu.
 - b) Etika Kerja Sesama Insan Perseroan
 - c) Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan
 - d) Benturan Kepentingan dan Penyalagunaan Jabatan (Insider Trading)
 - e) Hadiah/Cinder Mata/Gratifikasi dan Entertainment.
 - f) Aset/ Harta Perseroan
 - g) Data dan Pelaporan
 - h) Kerahasiaan data dan Informasi
 - i) Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan
 - j) Penghargaan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - k) Perjalanan Dinas
 - l) Penyelenggaraan Jamuan Bisnis.
 - m) Praktik Suap, Korupsi dan Kecurangan
 - n) Perjudian, Perbuatan Asusila, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) serta Minuman Beralkohol (Minol)
 - o) Aktifitas Politik
5. Penerapan dan Penegakan
 - a) Organisasi
 - b) Penegakan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct)
 - c) Sosialisasi, Internalisasi dan Penerapan
 - d) Saluran Pengaduan Masalah/ Whistle Blowing System
 - e) Monitoring, Evaluasi dan Pemutakhiran

Tujuan penerapan Code of Conduct adalah:

- a) Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan visi dan misi Perusahaan secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha;
- b) Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Perseroan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan;
- c) Sebagai pedoman untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan;
- d) Menjabarkan tata nilai dan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan PT Boma Bisma Indra dalam melaksanakan tugas;
- e) Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Perseroan dan Insan Perseroan atau Stakeholders

4. Code of Conduct, contains:
 - a) Individual Commitment.
 - b) Work Ethics of the Company's Individuals
 - c) Compliance with Laws and Regulations
 - d) Conflict of Interest and Abuse of Position (Insider Trading)
 - e) Gifts/Souvenirs/Gratuities and Entertainment.
 - f) Company Assets/ Assets
 - g) Data and Reporting
 - h) Confidentiality of data and information
 - i) Occupational Safety, Health and Safety and Environmental Management
 - j) Respect for Intellectual Property Rights
 - k) Business Travel
 - l) Organizing Business Entertainment.
 - m) Bribery, Corruption and Fraud Practices
 - n) Gambling, Immoral Acts, Abuse of Narcotics and Illegal Drugs (Drugs) and Alcoholic Drinks (Minol)
 - o) Political Activities
5. Implementation and Enforcement
 - a) Organization
 - b) Enforcement of Business Ethics and Code of Conduct
 - c) Socialization, Internalization and Implementation
 - d) Whistle Blowing System
 - e) Monitoring, Evaluation and Updating

The objectives of implementing the Code of Conduct are:

- a) As a shared commitment to realize the implementation of the Company's vision and mission in a professional and ethical manner in conducting business;
- b) As a behavioral guide for all Company Personnel that must be obeyed in carrying out all company activities;
- c) As a guideline to avoid conflicts of interest in carrying out all company activities;
- d) Elaborating the values and principles of GCG as an ethical foundation that must be followed by PT Boma Bisma Indra personnel in carrying out their duties;
- e) Develop harmonious, synergistic and mutually beneficial relationships between the Company and the Company's Personnel or other Stakeholders, based on sound corporate principles and ethics to strive to become a highly competitive company.

lainnya, berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etika berusaha untuk menjadi perusahaan berdaya saing tinggi.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik Perusahaan

Kode Perilaku Boma Bisma bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh anggota organisasi dari setiap tingkatan jabatan di PT Boma Bisma Indra (Persero). Pedoman ini dijadikan panduan bagi insan BBI untuk selalu berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Perusahaan berdasarkan nilai dan prinsip GCG.

- a) Setiap Insan BBI wajib mengikuti sosialisasi etika usaha dan tata perilaku, baik sosialisasi melalui tatap muka/morning call, ataupun melalui media elektronik seperti: email, website BBI.
- b) Setiap Insan SBBI wajib membaca, memahami dan menerapkan etika usaha dan tata perilaku dalam semua aktivitas Perusahaan.
- c) Setiap Insan BBI wajib menandatangani Pernyataan Insan BBI, dan wajib memperbarui kembali setiap tahunnya.
- d) Setiap Insan BBI dapat memberi masukan untuk penyempurnaan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku kepada Chief Compliance Officer.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Code of Conduct

Sosialisasi dan penyebarluasan Kode Perilaku dilakukan ke seluruh insan Boma Bisma Indra melalui website BBI dan portal internal BBI <http://sid.ptbbi.co.id>

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

1. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang dikenakan kepada Insan BBI yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur secara tersendiri dalam Peraturan Disiplin Pegawai dan peraturan-peraturan lainnya yang diatur oleh Perusahaan.
2. Insan BBI yang melakukan penyimpangan etika usaha dan tata perilaku memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian

Compliance with Company Code of Conduct

The Boma Bisma Code of Conduct is binding and applies to all organizational members from every level of position at PT Boma Bisma Indra (Persero). This guideline is used as a guide for BBI personnel to always behave in accordance with the standards set by the Company based on the values and principles of GCG.

- a) Every BBI Personnel is required to participate in the socialization of business ethics and code of conduct, both socialization through face-to-face/morning calls, or through electronic media such as: email, BBI website.
- b) Every SBBI Personnel is required to read, understand and apply business ethics and code of conduct in all Company activities.
- c) Every BBI Personnel is required to sign the BBI Personnel Statement, and must renew it annually.
- d) Every BBI Personnel can provide input for the improvement of the Code of Business Ethics and Code of Conduct to the Chief Compliance Officer.

Dissemination and Dissemination of the Code of Conduct

Socialization and dissemination of the Code of Conduct are carried out to all Boma Bisma Indra personnel through the BBI website and BBI internal portal <http://sid.ptbbi.co.id>

Sanctions for Violation of the Company's Code of Ethics

1. The Board of Directors decides that the provision of coaching actions, disciplinary sanctions and or corrective and preventive actions imposed on BBI Personnel who commit violations will be given in accordance with the provisions stipulated separately in the Employee Discipline Regulations and other regulations regulated by the Company.
2. BBI personnel who deviate from business ethics and code of conduct have the right to have their explanation heard in front of their immediate superior before any

tindakan pembinaan atau hukuman disiplin dikenakan.

coaching action or disciplinary punishment is imposed.

Jumlah Pelanggaran Kode

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai BBL.

Number of Code Violations

Throughout 2020, there were no cases of violations of the code of ethics by BBL employees.



KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Anti Corruption Policy and gratification Control

Dengan memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh Insan BBI senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang fair, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perseroan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

BBI menyadari berbagai kegiatan berisiko pada timbulnya gratifikasi dan penyuapan. Untuk itu, BBI memiliki Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (Entertainment) No. 048/Kpts.1000/1100/08.2020 dan Kebijakan Manajemen Sistem Anti Penyuapan No. 045/Kpts.1000/1100/07.2020 yang mengatur seluruh insan BBI agar terhindar dari insiden gratifikasi dan penyuapan. Pedoman ini dibuat untuk mengatur Pengendalian Gratifikasi antar Insan BBI dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha Perusahaan. Pedoman ini berlaku untuk:

1. Seluruh Insan BBI;
2. Stakeholders/Pemangku Kepentingan
3. Anak Perusahaan.

Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh insan Perusahaan dan Anak

By paying attention to the anti-corruption policy as written in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the Board of Commissioners, Board of Directors, and all BBI personnel always uphold fair competition. , the value of sportsmanship and professionalism, as well as the principles of GCG. The Company is also committed to creating a healthy business climate, avoiding actions, behaviors or actions that can cause conflicts of interest, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and always prioritizing the interests of the Company above personal, family, group or group interests.

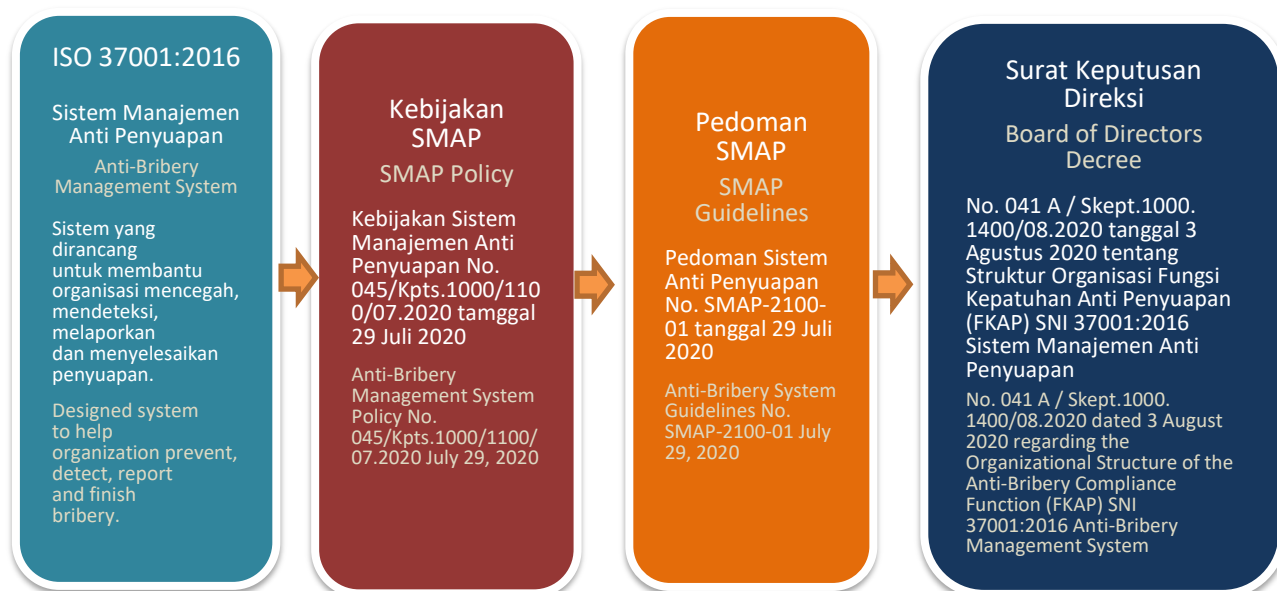
BBI is aware of various activities that risk the emergence of gratification and bribery. To that end, BBI has Guidelines for Gratification, Rejection, Acceptance, Giving Gifts/Souvenirs and Entertainment (Entertainment) No. 048/Kpts.1000/1100/08.2020 and Anti-Bribery System Management Policy No. 045/Kpts.1000/1100/07.2020 which regulates all BBI personnel to avoid incidents of gratification and bribery. This guideline was created to regulate Gratification Control between BBI Personnel and related parties in the Company's business activities. These guidelines apply to:

1. All BBI Personnel;
2. Stakeholders/Stakeholders
3. Subsidiaries.

This policy has been socialized to all employees of the Company and its Subsidiaries

Berikut Merupakan Dasar Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BBI

The following is the basis for the application of the Anti-Bribery Management System at BBI



Pengendalian Gratifikasi

BBI membedakan gratifikasi menjadi 2 (dua) kategori menjadi:

1. Gratifikasi yang dianggap Suap yang berhubungan dengan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban insan BBI dan wajib ditolak dan melaporkannya kepada atasan langsung dan mengisi formulir gratifikasi untuk disampaikan kepada SPI. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan citra Perseroan.
2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak berhubungan dan tidak berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berupa benda promosi atau cinderamata, dengan ketentuan:
 - Mencantumkan logo atau nama perusahaan;
 - Batasan nilai perkiraan tidak melebihi Rp 1.000.000 (dua juta Rupiah);
 - Tidak berbentuk uang tunai/setara uang tunai atau voucher.
 - b. Berupa hiburan bisnis/kegiatan olahraga yang diterima dengan tujuan Perusahaan yang resmi, misalnya untuk menjalin hubungan baik dengan relasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dilakukan dengan dasar tujuan bisnis

Gratuity Control

BBI distinguishes gratuities into 2 (two) categories as follows:

1. Gratifications that are considered bribes are related to and contrary to the duties and obligations of BBI personnel and must be rejected and reported to their direct supervisor and filled out the gratification form to be submitted to SPI. This aims to maintain the integrity and image of the Company.
2. Gratuities that are not considered bribes that are not related and do not conflict with their duties and obligations, with the following provisions:
 - e. In the form of promotional items or souvenirs, provided that:
 - Include the logo or company name;
 - Estimated value limit does not exceed IDR 1,000,000 (two million Rupiah);
 - Not in the form of cash/cash equivalent or vouchers.
 - f. In the form of business entertainment/sports activities accepted for official Company purposes, for example

yang resmi dari perusahaan seperti jamuan makan, kegiatan olahraga dan seni;

- Diadakan ditempat yang layak/pantas;
 - Tidak berbentuk uang tunai/setara uang tunai atau voucher,
- c. Berupa barang/uang/setara uang dengan ketentuan sebagai berikut:
- Diperoleh dari doorprize/hadiah langsung/undian, yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis dengan biaya sendiri tidak terkait kedinasan;
 - Dalam hal Insan BBI menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan anak, kelahiran atau yang terkait dengan musibah yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - Honorarium atau uang transport rapat sehubungan dengan kehadiran sebagai peserta atau narasumber, atas hasil pemikiran, masukan, keahlian yang telah diberikan;
 - Diperoleh atas kompensasi atas penugasan tambahan sebagai anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
 - Diperoleh dari hasil usaha sebagai anggota koperasi dan atau kompensasi sebagai pengurus koperasi;
 - Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi, tidak melanggar benturan kepentingan dan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Pedoman pengendalian gratifikasi BBI menjelaskan mengenai kebijakan Perseroan akan penyebaran informasi untuk menjamin seluruh insan BBI dan Pemangku Kepentingan yang terkait dapat memahami dan melaksanakan isi dari pedoman tersebut dengan cara:

1. Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa dan atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa, serta pada surat-surat yang disampaikan kepada Stakeholders atau pihak ketiga lainnya;
2. Menugaskan kepada seluruh Unit Kerja dan

to establish good relations with relations with the following conditions:

- Conducted on the basis of the company's official business objectives such as banquets, sports and arts activities;
 - Held in a proper place/appropriate;
 - Not in the form of cash/cash equivalent or vouchers,
- g. In the form of goods/money/money equivalent with the following conditions:
- Obtained from door prizes / direct prizes / sweepstakes, which are generally accepted and not related to work;
 - Obtained due to academic or non-academic achievements at their own expense not related to service;
 - In the event that BBI Personnel organizes a wedding, child circumcision, birth or related to an accident obtained from a party who does not have a conflict of interest;
 - Honorarium or meeting transport fees in connection with attendance as a participant or resource person, for the ideas, inputs, expertise that have been given;
 - Received compensation for additional assignments as a member of the Board of Commissioners of a Subsidiary;
 - Obtained from the results of operations as a member of the cooperative and or compensation as the management of the cooperative;
 - Obtained from compensation for non-service professions that are not related to the main duties and functions, do not violate conflicts of interest and the Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct and with written permission from the direct supervisor.

Gratification Policy Socialization

The BBI gratification control guideline explains the Company's policy on disseminating information to ensure that all BBI personnel and related Stakeholders can understand and implement the contents of the guidelines by:

1. Include provisions on prohibition of receiving, giving gratuities (gifts/facilities)

Anak Perusahaan BBI untuk mensosialisasikan pengendalian Gratifikasi secara berkelanjutan kepada seluruh Insan BBI dan Pemangku Kepentingan yang berhubungan dengan Insan BBI.

Laporan Pengelolaan Gratifikasi Tahun 2020

Tahun 2020, tidak terdapat pelaporan terkait penerimaan dan pemberian Gratifikasi yang berhubungan dengan insan BBI.

on every announcement in the process of procurement of goods and services and or on contracts for the procurement of goods and services, as well as on letters submitted to stakeholders or other third parties;

2. Assign all BBI Work Units and Subsidiaries to disseminate continuous Gratification control to all BBI Personnel and Stakeholders related to BBI Personnel.

Gratification Management Report 2020

In 2020, there are no reports regarding the acceptance and granting of Gratifications related to BBI personnel.



KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Obligation of State Administrator Wealth Report (LHKPN)

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berkaitan dengan itu Peraturan diatas, mengamanatkan pula bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

Dasar Hukum

Seiring berkembangnya zaman, media 335ocial menjadi salah satu sarana yang paling efektif untuk menunjukkan eksistensi Perusahaan. Untuk memenuhi hal tersebut, BBI mengelola beberapa social media sebagai berikut :

Dasar hukum penyampaian LHKPN terdiri dari:

1. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
2. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. PER. KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan PN
4. SE. Pim. KPK Nomor 08/01/10/2016 tentang Pendukung Teknis Penyampaian LHKPN pada masa Peralihan

BBI mematuhi ketentuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan UndangUndang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terkait hal tersebut, melalui Surat Keputusan Direksi No.

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, it is stated that the KPK has the authority to carry out preventive steps or efforts, among others by registering and examining the State Administrators Wealth Report (LHKPN). In this regard, the above regulation also stipulates that every organizer is obliged to report and announce his assets before and after taking office and is willing to have his wealth checked before and after taking office.

Legal Basis

Along with the times, social media has become one of the most effective means to show the existence of the Company. To fulfill this, BBI manages several social media as follows:

The legal basis for submitting LHKPN consists of:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from KKN
2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission
3. PER. KPK Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of PN . Assets
4. SE. Pim. KPK Number 08/01/10/2016 concerning Technical Support for Submission of LHKPN during the Transition.

BBI complies with the provisions of the State Administrators Wealth Report (LHKPN) in accordance with Law No. 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism. Related to this, through the Decree of the Board of Directors No.

017/Kpts.1000/1100/03.2020 tanggal 23 Maret 2020, Direktur Utama PT BBI (Persero) kemudian menetapkan wajib lapor LHKPN bagi:

1. Dewan Komisaris BBI dan Anak Perusahaan
2. Direksi BBI dan Anak Perusahaan
3. Sekretaris Perusahaan dan Anak Perusahaan
4. Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI)
5. GM/ Manager Biro

Mekanisme Pelaporan LHKPN

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat Perseroan dilakukan dengan mengacu pada UU Nomor 28 tahun 1999 di mana penyelenggara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Pada tahun 2020, Wajib Lapor di lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) dan Anak Perusahaan yang telah memenuhi kewajiban LHKPN adalah sebanyak 13 orang dari keseluruhan Wajib Lapor sejumlah 18 orang (tingkat kepatuhan LHKPN sebesar 72%).

017/Kpts.1000/1100/03.2020 dated March 23, 2020, President Director of PT BBI (Persero) then stipulates the obligation to report LHKPN for:

1. Board of Commissioners of BBI and its Subsidiaries
2. Directors of BBI and Subsidiaries
3. Corporate Secretary and Subsidiaries
4. Head of Internal Control Unit (SPI)
5. GM/Bureau Manager

LHKPN Reporting Mechanism

The mechanism for reporting the assets of the Company's officials is carried out by referring to Law Number 28 of 1999 where the organizer is obliged to:

1. Willing to have their wealth checked before, during and after serving;
2. Reporting and announcing his wealth before and after taking office.

In 2020, PT Boma Bisma Indra (Persero) and its Subsidiaries that have fulfilled their LHKPN obligations are obliged to report, out of a total of 18 people who are required to report (LHKPN compliance rate is 72%).

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

Transparency Of Bad Governance Practices

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak pernah mendapatkan adanya laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

Report on Company Activities Polluting the Environment

Until the end of 2020, the Company has never received any reports on the Company's activities that pollute the environment.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

BBI merupakan perusahaan yang taat terhadap peraturan penundang-undangan, termasuk dalam hal perpajakan. Setiap tahun BBI memenuhi kewajiban pembayaran dan juga pelaporan pajak, baik pajak penghasilan, pajak badan maupun pajak-pajak lainnya.

Disclosure of Fulfillment of Tax Obligations

BBI is a company that complies with statutory regulations, including in terms of taxation. Every year BBI fulfills its obligation to pay and report taxes, both income tax, corporate tax and other taxes.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Berbagai informasi, analisa dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP RSM-AAJ dan berakhir 31 Desember 2019 yang diaudit oleh KAP Thoufan dan Rosyid. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.

Inconsistency in the Presentation of Annual Reports and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

Various information, analysis and discussion of performance in this annual report refers to the Company's Financial Statements for the years ending December 31, 2020 which have been audited by KAP RSM-AAJ and ending December 31, 2019 audited by KAP Thoufan and Rosyid. The Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants.

Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat kasus hubungan industrial yang berkaitan dengan pegawai BBI.

Cases Related to Labor and Employees

Throughout 2020, there were no industrial relations cases related to BBI employees.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Sebagaimana yang tercantum dalam PSAK No.5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan untuk kepentingan manajemen, Perusahaan telah menyajikannya menurut pengelompokan (segmen) jenis usaha.

Disclosure of Operating Segments in Financial Statements

As stated in PSAK No. 5 (2015 Adjustment) regarding Operational Segments and for the benefit of management, the Company has presented them according to the type of business grouping (segment).

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan BBI baik yang disampaikan kepada pemegang saham, investor, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perseroan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.

Compatibility of Annual Report Books and Digital Annual Reports

The BBI Annual Report, whether submitted to shareholders, investors, stakeholders, or uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company.

KEBIJAKAN PARTISIPASI DALAM POLITIK

Participation Policy in Politics

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), BBI menerapkan kebijakan terkait kontribusi politik, dan keterlibatan politik oleh karyawan Perusahaan. Pada praktiknya, BBI berkomitmen untuk bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apapun.

Komitmen tersebut tercantum dalam *Code of Conduct* BBI diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak menjadi pengurus partai politik sertatidak menggunakan fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik;
2. Tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada partai politik di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung seperti kampanye politik dan membawa, memperlihatkan, memasang serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik dilingkungan Perseroan.

In order to comply with the principles of good corporate governance (GCG), BBI implements policies related to political contributions and political involvement by the Company's employees. In practice, BBI is committed to being neutral by not participating directly or indirectly in party political activities and not making donations or contributions in any form.

This commitment is stated in the BBI Code of Conduct, including the following:

1. Not being an administrator of a political party and not using the Company's facilities for the benefit of a political party;
2. Not to give donations in any form to political parties outside the provisions of the applicable laws and regulations.
3. Not carrying out practical political activities, either directly or indirectly, such as political campaigns and carrying, displaying, installing and distributing symbols, images and ornaments of political parties within the Company.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Violation Reporting System

Saluran Pengaduan Pelanggaran

Whistle Blowing System (WBS) merupakan suatu sistem yang memberikan sarana kepada para pemangku kepentingan untuk membuat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan.

WBS BBI dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat melalui berbagai saluran pengaduan, yaitu melalui:

- Kotak pengaduan WBS yang ada di kantor pusat dan Pasuruan
- Website Perusahaan : www.ptbbi.co.id

Sistem Perlindungan Pelapor

Perusahaan memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, materi yang dilaporkan, dan perlindungan terhadap gangguan/ancaman fisik bagi pelapor serta perlindungan untuk tidak mendapatkan tindakan diskriminasi kepersonaliaan seperti hambatan dalam pembinaan karir, mutasi atau demosi. Perlindungan tersebut dicantumkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan juga diatur dalam Pedoman WBS No. 020/Ped.1000/1100/09.2020 tanggal 14 September 2020.

Pengelola WBS

Sistem pelaporan pelanggaran BBI dikelola oleh tim pengelola pelaporan pelanggaran yang independen dari operasional perusahaan sehari-hari yang bertanggung jawab kepada Direksi dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI)
- Wakil : Manager Biro SDM
- Sekretaris : Manager Biro Hukum
- Anggota : - Manager Biro SMRI
- Manager Biro QSHE
- Dok. Kontrol : Staf Bidang Hukum

Violation Report Complaint Line

The Whistle Blowing System (WBS) is a system that provides a means for stakeholders to make complaints regarding alleged violations that occurred in the Company.

BBI WBS can be accessed by all stakeholders including the public through various complaint channels, namely through:

- WBS complaint box at the head office and Pasuruan
- Company website : www.ptbbi.co.id

Whistleblower Protection System

The company provides protection for the confidentiality of the reporter's identity, the material being reported, and protection against physical disturbance/threats for the reporter as well as protection against personal discrimination such as obstacles in career development, transfer or demotion. This protection is stated in the provisions of the Collective Labor Agreement (PKB) and is also regulated in the WBS Guidelines No. 020/Ped.1000/1100/09.2020 September 14, 2020.

WBS Manager

The BBI violation reporting system is managed by a violation reporting management team that is independent of the company's day-to-day operations who are responsible to the Board of Directors with the following membership structure:

- Chairman : Head of Internal Control Unit (SPI)
- Deputy: HR Bureau Manager
- Secretary : Legal Bureau Manager
- Members : - SMRI Bureau Manager
- QSHE Bureau Manager Dock.
- Control : Legal Staff

Mekanisme Penanganan dan Penindaklanjutan Laporan WBS

Pengelolaan WBS dilakukan dengan prinsip rahasia, anonim dan independen. Setiap pengaduan yang masuk diterima oleh Tim WBS yang akan menganalisis dan meminta keterangan lebih detail kepada pelapor. Setelah laporan diterima dari tim WBS akan melakukan penelaahan awal untuk meyakini jika laporan WBS tersebut benar dan layak untuk diinvestigasi. Selanjutnya Tim Investigasi dan Tim Pengelola Pelanggaran menyampaikan kepada Direksi agar dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Mekanisme penanganan laporan WBS dilakukan berdasarkan Pedoman Whistleblowing System WBS No. 020/Ped.1000/1100/09.2020 tanggal 14 September 2020.

Jumlah Laporan WBS

Selama tahun 2020, tidak terdapat laporan terkait WBS dan jumlah pelaporan adalah Nihil.

WBS Report Handling and Follow Up Mechanism

The management of the WBS is carried out with the principle of confidentiality, anonymity and independence. Each incoming complaint is received by the WBS Team who will analyze and request more detailed information from the complainant. After the report is received from the WBS team, it will conduct an initial review to ensure that the WBS report is true and worthy of investigation. Furthermore, the Investigation Team and the Violation Management Team convey to the Board of Directors so that they can follow up on the complaint, in accordance with the provisions in force in the Company. The mechanism for handling WBS reports is based on the WBS Whistleblowing System Guidelines No. 020/Ped.1000/1100/09.2020 September 14, 2020.

Number of WBS Reports

During 2020, there were no reports related to WBS and the number of reports was Nil.

Pendahuluan
Preliminary

Kilas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility





CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

07

**TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN**

Corporate Social Responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

Latar Belakang Pelaksanaan

PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai suatu entitas bisnis diwajibkan untuk mematuhi asas – asas tata kelola perusahaan yang baik di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan diwajibkan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan atau yang sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR) secara umum diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 yaitu “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Sebagai entitas bisnis yang beretika dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, BBI berupaya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik yang bersinggungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan aktivitas Perseroan di berbagai lokasi operasinya. BBI menyadari bahwa keberlangsungan usahanya tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi (profit) saja, tapi juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan kinerja karyawan, pemenuhan kebutuhan pelanggan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (people) dan pada tingkat yang lebih luas adalah peningkatan terhadap keberlanjutan lingkungan (planet). Oleh karena itu, BBI berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat sekitar dan juga mengajak karyawan untuk dapat secara aktif bersama-sama menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

Selain itu, BBI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kewajiban juga melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pemenuhan tanggung

Implementation Background

PT Boma Bisma Indra (Persero) as a business entity is required to comply with the principles of good corporate governance in carrying out its business activities. Based on the Law, the Company is required to carry out corporate social and environmental responsibility activities or what is often called Corporate Social Responsibility (CSR) which is generally regulated in the Limited Liability Company Law, namely Law no. 40 of 2007 which is referred to in Article 1 number 3, namely "Social and Environmental Responsibility is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general".

As a business entity with ethics and compliance with applicable laws and regulations, BBI strives to fulfill its responsibilities as a company to all stakeholders, either directly or indirectly related to the Company's activities in its various operating locations. BBI realizes that its business continuity is not only based on economic aspects (profit), but also has a very close relationship with employee performance, meeting customer needs and improving community welfare (people) and at a broader level is improving environmental sustainability (planet). . Therefore, BBI is committed to carrying out various Corporate Social Responsibility (CSR) activities aimed at providing sustainable benefits for the surrounding community and also inviting employees to be able to actively create added value for the welfare of the community and the environment.

In addition, BBI is a State-Owned Enterprise (BUMN) which has the obligation to also implement the Partnership and Community Development Program (PKBL). The fulfillment

jawab tersebut dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dan program sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. BBI telah mengaplikasi program PKBL secara terprogram dan secara khusus menjadikan satu aktifitas Bina Lingkungan dengan program CSR. Perusahaan menetapkan program CSR dan memasukan rencana pelaksanaannya sebagai salah satu unsur Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dimintakan persetujuan kepada Pemegang Saham. Pemantapan program CSR dalam RKAP menunjukkan niat baik Perusahaan dalam ikut membangun lingkungan sekitar di berbagai sektor sebagai bentuk partisipasi Perusahaan dalam pembangunan daerah pada khususnya. Program CSR ini ditujukan bagi masyarakat / instansi / lembaga memiliki ikatan dengan Perusahaan melalui mekanisme pengajuan rencana kerja (proposal) dan evaluasi sesuai kriteria tertentu yang ditentukan oleh Perusahaan.

Landasan Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Aktifitas CSR BBI mengacu kepada beberapa ketentuan yang berlaku, diantaranya:

1. UU No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.

of these responsibilities is carried out in various activities and programs as part of the implementation of Good Corporate Governance. BBI has applied the PKBL program programmatically and specifically made it a Community Development activity with the CSR program. The company establishes a CSR program and includes its implementation plan as one of the elements of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for which approval is requested from the Shareholders. The strengthening of the CSR program in the RKAP shows the Company's good intentions in participating in building the surrounding environment in various sectors as a form of the Company's participation in regional development in particular. This CSR program is intended for communities / agencies / institutions that have ties to the Company through the mechanism for submitting work plans (proposals) and evaluating according to certain criteria determined by the Company.

Foundation for the Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility

BBI's CSR activities refer to several applicable provisions, including:

1. Law no. 19 of 2003, concerning State-Owned Enterprises.
2. Law no. 40 of 2007 concerning the obligation to carry out Social and Environmental Responsibility.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-03/MBU/12/2016 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/07/2017 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
6. Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.
7. ISO 14001:2015 on Environmental Management Systems.

Pendahuluan
Preliminary

Klasifikasi Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Analisis dan Pembahasan
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility in The Social Sector

Komitmen Perseroan dalam melaksanakan Tanggungjawab Sosial Kemasyarakatan diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu CSR terprogram dan CSR tidak terprogram:

CSR terprogram adalah kegiatan CSR yang disusun/dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun Perusahaan. CSR tidak terprogram adalah kegiatan CSR yang dilaksanakan berdasarkan proposal yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan program kerja dan kriteria dari adanya kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam.

The Company's commitment to implementing Social Responsibility is manifested in various activities which are categorized into 2 (two) groups, namely programmed CSR and non-programmed CSR:

Programmed CSR is a CSR activity that is prepared/implemented based on a work plan that has been prepared by the Company. Non-programmed CSR is a CSR activity that is carried out based on proposals submitted by third parties that are not in accordance with the work program and the criteria for unpredictable events such as natural disasters.

Secara garis besar, Program kerja CSR dibagi dalam 6 bidang:

1. Sosial/Kemanusiaan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Keagamaan
5. Lingkungan
6. Bencana Alam

Broadly speaking, the CSR work program is divided into 6 areas:

1. Social/Humanity
2. Education
3. Health
4. Religion
5. Environment
6. Natural Disaster

Anggaran dan Realisasi Program CSR Sosial Kemasyarakatan

Serapan dana CSR Sosial Kemasyarakatan di tahun 2020 sebesar Rp 268.334.620 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Budget and Realization of Community Social CSR Program

The absorption of Community Social CSR funds in 2020 is IDR 268,334,620 (two hundred sixty eight million three hundred thirty four thousand six hundred and twenty rupiah).



Adapun pembagian dana tersebut dikelompokkan sebagai berikut: *The distribution of these funds is grouped as follows:*

Program Programs	Anggaran (Rp) Budget (Rp)	Realisasi Biaya (Rp) Cost Realization (Rp)	Persentase Percentage
Kemanusiaan / Sosial Humanity / Social	60.000.000	7.200.000	12%
Pengembangan Pendidikan Educational Development	60.000.000	9.870.000	16%
Perbaikan Kesehatan Health Improvement	60.000.000	213.534.620	356%
Keagamaan Religious	60.000.000	37.730.000	63%
Lingkungan Environment	90.000.000	-	0%
Bantuan Bencana Alam Natural Disaster Relief	120.000.000	-	0%
Total	450.000.000	268.334.620	60%

Pengukuran keberhasilan program CSR BBI masih cukup sederhana yaitu melalui besaran serapan dana CSR yang dianggarkan Perusahaan pada setiap tahun berjalan.

The measurement of the success of BBI's CSR program is still quite simple, namely through the absorption of CSR funds budgeted by the Company each year.

Adapun penentuan ukuran penyerapan dana tersebut dikelompokkan sebagai berikut :

The determination of the size of the absorption of these funds is grouped as follows:

No.	Besarnya Serapan Dana Tahun Berjalan Current Year Funds Absorption	Ukuran SCR CSR Asesment
1.	Serapan Dana > 95% Fund Absorption > 95%	Baik Sekali Very Good
2.	95% ≤ Serapan Dana ≤ 85% 95% ≤ Absorption of Funds ≤ 85%	Baik Good
3.	Serapan Dana < 85% <85% Fund Absorption	Cukup Satisfactory

Untuk tahun 2020 dana CSR yang terserap adalah sebesar 60 % atau Rp 268.334.620,00 terhadap anggaran Rp 450.000.000,00 dan masuk ke dalam kategori "Cukup".

For 2020, the absorbed CSR funds are 60% or Rp. 268,334,620.00 against a budget of Rp. 450,000,000.00 and fall into the "Enough" category.

1. Program Kemanusiaan / Sosial

Realisasi Program CSR Boma Bisma Indra pada tahun 2020 dalam Bidang Kemanusiaan / Sosial adalah sebagai berikut:

- Partisipasi Sponsorship Diesnatalis ke-60 Universitas Diponegoro Semarang
- Partisipasi Acara Bhakti Sosial dan silaturahmi Akbar (PPAL) Rayon Semampir
- Partisipasi Baksos Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya Jawa Timur
- Partisipasi HUT Koramil Pabean

1. Humanitarian/Social Programs

The realization of the Boma Bisma Indra CSR Program in 2020 in the Humanitarian / Social Sector is as follows:

- Diponegoro University Semarang's 60th Anniversary Sponsorship Participation
- Participation in the Social Service Event and Grand Gathering (PPAL) of Semampir District
- Social Services for Children with Special Needs Participation in Surabaya, East Java

- Cantikan
- e. Partisipasi Baksos Anti Narkoba
- f. Pemberian santunan beasiswa kepada Anak Yatim bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar juga sebagai bentuk kontribusi BBI untuk mencerdaskan bangsa. Bantuan diberikan kepada Anak Yatim Eks Karyawan BBI, Panti Asuhan Al Ikhlas Bulak Banteng, dan Panti Asuhan Al Wafi Ampel. Pemberian santunan ini merupakan bentuk syukur BBI terhadap bisnis yang masih berjalan lancar juga sebagai wujud "Harmonis", yaitu saling peduli.

- d. Participation in the Anniversary of the Cantikan Customs Koramil
- e. Anti-Drug Social Service Participation
- f. The provision of scholarships for orphans aims to contribute to the development of the environment and surrounding communities as well as a form of BBI's contribution to the intellectual development of the nation. Assistance was given to orphans of former BBI employees, Al Ikhlas Bulak Banteng Orphanage, and Al Wafi Ampel Orphanage. The provision of this compensation is a form of BBI's gratitude for the business that is still running smoothly as well as a form of "Harmony", namely caring for each other.



“ Salah satu wujud kepedulian PT BBI dalam pembangunan Bangsa melalui pemberian bantuan dana sosial untuk Anak Yatim Piatu di Panti Asuhan.

One of the manifestations of PT BBI's concern for the development of the Nation is through the provision of social fund assistance for Orphans at the Orphanage.

.....

2. Program Pengembangan Pendidikan

Menyadari tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan terbaik, melalui dana CSR BBI memiliki program di bidang pendidikan untuk membantu anak didik lebih meningkatkan belajarnya demi mencapai masa depan yang lebih cerah. Program Bidang Pendidikan yang dilaksanakan diantaranya:

a. Program vokasi / Praktek Industri

Melalui kerjasama dengan beberapa Universitas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur, dimana perusahaan memfasilitasi alat bantu pendidikan, sarana dan prasana bagi para siswa dan mahasiswa yang melaksanakan magang/praktik Industri di Boma Bisma Indra. Berikut Vokasi PKS - SMK dan PTN-PTS yang sudah MOU dengan PT BBI yaitu:

- 14 PKS PMMB dengan PTN-PTS: Polmanceper, UGM, Polinema, UNISMA, UM, UMM, ITS, AksiRembang, Poliwangi, Univ 17 Agustus Untag, UNEIR, dan PPNS Surabaya,
- 9 PKS SMK yaitu SMKN1 Purwosari, SMKN1 Grati SMKN1 Bangil, SMKN1 Pasuruan, SMKN 1 Singosari, SMKN5 SBY, SMKN2 Sby, SMKN 7 Sby, dan SMKN2 Pasuruan.

Tujuan perjanjian kerja sama dengan SMK dan PTN/PTS adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan sekolah menengah Kejuruan atau Perguruan tinggi berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (link and match) dengan indstri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri manufactur antara lain:

- Melakukan siswa/ mahasiswa magang dengan waktu bervariasi 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 8 bulan
- Sinkronisasi kurikulum
- Guru tamu dari Industri
- Kelas Industri
- UKK (Uji Kompetensi Keahlian)
- Guru Magang
- Kunjungan Industri
- Kesempatan rekrut karyawan sesuai SOP Perusahaan

2. Educational Development Program

Realizing that not everyone has the same opportunity to achieve the best education, through CSR funds BBI has a program in the field of education to help students further improve their learning in order to achieve a brighter future. The Education Sector Programs implemented include.

a. Vocational Program / Industrial Practice

Through collaboration with several Universities and Vocational High Schools (SMK) in East Java, where the company facilitates educational aids, facilities and infrastructure for students and students who carry out internships/industrial practices at Boma Bisma Indra. The following are the PKS Vocational Schools and PTN-PTS that have an MOU with PT BBI, namely:

- PMMB PKS with PTN-PTS: Polmanceper, UGM, Polinema, UNISMA, UM, UMM, ITS, AksiRembang, Poliwangi, Univ 17 August Untag, UNEIR, and PPNS Surabaya,
- 9 PKS SMKs namely SMKN1 Purwosari, SMKN1 Grati, SMKN1 Bangil, SMKN1 Pasuruan, SMKN 1 Singosari, SMKN5 SBY, SMKN2 SBY, SMKN 7 SBY, and SMKN2 Pasuruan.

The purpose of the cooperation agreement with SMK and PTN/PTS is to realize and develop competency-based Vocational High Schools or Universities that are appropriate and in line (link and match) with the industry, in order to produce competent graduates in accordance with the needs of the manufacturing industry, including:

- Conducting student/student internships with varying times of 2 months, 3 months, 6 months and 8 months
- Curriculum synchronization
- Guest teacher from Industry
- Industrial Grade
- UKK (Expertise Competency Test)
- Intern Teacher
- Industrial Visit
- Opportunity to recruit employees according to Company SOP

b. Program Magang Siswa dan Mahasiswa

Magang atau Prakerin (praktek kerja Industri) terdiri dari 3 {tiga} jenis yaitu magang reguler, magang FHCI dan magang profesional. Magang reguler adalah magang sebagai persyaratan mata kuliah. Magang FHCI adalah Magang yang pelaksanaannya bekerjasama dengan FHCI (Forum Human Capital Indonesia) dan mendapatkan sertifikat magang Industri dan FHCI. Magang Profesional adalah peserta magang merupakan lulusan sarjana atau masih berstatus mahasiswa tingkat akhir yang sudah mampu mengimplementasikan ilmunya secara profesional.

Prakerin magang adalah merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang wajib diikuti siswa/mahasiswa sebagai persyaratan untuk kelulusan yang dilaksanakan di dunia industri untuk meningkatkan mutu dan kompetensi siswa/mahasiswa sesuai bidangnya (kompetensinya) dan juga menambah bekal masa mendatang guna memasuki di Era Dunia Kerja.

Adapun dasar pelaksanaan magang telah diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya pasal 21-30. Dan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi no per 22/Men/IX/2009 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri.

Manfaat magang bagi siswa dan mahasiswa adalah :

- Memberi kesempatan untuk mengaplikasikan semua ilmu yang didapat untuk diaplikasikan di dunia Industri
- Mendapat pengalaman dan wawasan bekerja di Industri
- Setelah lulus siap kerja sesuai kemampuannya

Manfaat bagi Industri adalah :

- Mendapat ide-ide baru/sharing ilmu (continue improvement)
- Menghemat pengeluaran perusahaan
- Mendapat masa percobaan gratis
- Meningkatkan Citra Perusahaan
- Meningkatkan produktivitas
- Mendapat sudut pandang dari luar
- Sebagai stock calon karyawan

b. Student and Student Internship Program

Internships or Prakerin (Industrial work practices) consist of 3 {three} types, namely regular internships, FHCI internships and professional internships. Regular internships are internships as a course requirement. FHCI Internship is an Internship whose implementation is in collaboration with FHCI (Indonesian Human Capital Forum) and obtains an Industrial and FHCI internship certificate. Professional Internships are apprentices who are undergraduate graduates or are still final year students who are able to implement their knowledge professionally.

Internship prakerin is an educational, training and learning activity that must be followed by students/students as a requirement for graduation which is carried out in the industrial world to improve the quality and competence of students/students according to their fields (competencies) and also add future provisions to enter the Era of the World of Work .

The basis for implementing the internship has been regulated in Law no. 13 of 2003 concerning manpower, especially articles 21-30. And the regulation of the minister of manpower and transmigration no. per 22/Men/IX/2009 concerning the implementation of apprenticeships in the country.

The benefits of internships for students and students are:

- Provide opportunities to apply all the knowledge gained to be applied in the industrial world
- Gaining experience and insight working in the Industry
- After graduation, they are ready to work according to their abilities

Benefits for Industry are:

- Get new ideas/sharing knowledge (continuous improvement)
- Save on company expenses
- Get a free trial period
- Improve Company Image
- Increase productivity
- Get an outside point of view
- As stock for prospective employees

c. Kunjungan Industri

Kunjungan Industri merupakan salah satu jenis kegiatan pembelajaran diluar lingkungan sekolah/ perguruan tinggi /instansi untuk menambah wawasan siswa/ mahasiswa/ guru/ dosen/ pimpinan instansi untuk melihat langsung proses produksi di industri tersebut.

c. Industrial Visit

Industrial type is one type of learning activity outside the school/college/agencies environment to add insight to students/teacher/ lecturers/ agency leaders to see firsthand the production process the industry.

d. Penelitian tugas akhir, studi kasus, survey, simulasi, dan lainnya.

d. Final project research, case studies, surveys, simulations, and others.



3. Program Perbaikan Kesehatan

Realisasi CSR PT Boma Bisma Indra (Persero) dalam Program Perbaikan Kesehatan lebih banyak didominasi dengan aktifitas pencegahan penyebaran dan memutus rantai penyebaran Covid-19 serta penanganan Karyawan dan keluarga yang terpapar Covid-19. Aktifitas tersebut diantaranya:

- Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan pengadaan Thermal gun, wastafel, cember, sabun, desinfektan, masker dan lain-lain
- Pemberian Vitamin dan peningkatan gizi karyawan dalam rangka peningkatan imun.
- Fogging area kantor
- Biaya Rapi test dan Swab test
- Penangan Karyawan dan keluarga yang terpapar Covid-19
- Pemberian bantuan untuk Posko Covid-19 BUMN di daerah Lamongan
- Langkah Strategis Perusahaan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) dibahas tersendiri dalam Sub-Judul "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19".

3. Health Improvement Program

The realization of PT Boma Bisma Indra (Persero)'s CSR in the Health Improvement Program is dominated by activities to prevent the spread and break the chain of the spread of Covid-19 as well as handling employees and families exposed to Covid-19. These activities include:

- Prevention of the spread of Covid-19 by procuring Thermal guns, sinks, buckets, soap, disinfectants, masks and others
- Providing vitamins and improving employee nutrition in order to increase immunity.
- Fogging office area
- Rapid test and Swab test fees
- Handling Employees and their families exposed to Covid-19
- Providing assistance for the BUMN Covid-19 Command Post in the Lamongan area
- The Company's Strategic Steps in preventing and handling Covid-19 in PT Boma Bisma Indra (Persero) are discussed separately in the Sub-Title "Corporate Social Responsibility in the Prevention and Handling of Covid-19".



Realisasi **CSR BBI** dalam Program Perbaikan Kesehatan 2020 didominasi untuk pencegahan penyebaran COVID-19

The realization of BBI's CSR in the 2020 Health Improvement Program is dominated by the prevention of the spread of COVID-19

4. Program Keagamaan

Siraman Rohani dilaksanakan setiap Hari Jumat dan setiap dua minggu sekali dihari Rabu. Perusahaan menginginkan penguatan keimanan karyawan dalam menjaga diri untuk selalu bekerja dengan niatan ibadah. Karyawan dapat merasakan siraman rohani dan kedalaman keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu pemberian santunan kepada anak Yatim yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadhan merupakan kegiatan rutin sebagai wujud kepedulian Karyawan BBI terhadap warga sekitar.

5. Program Lingkungan

Kontribusi terhadap lingkungan merupakan suatu bentuk kepedulian lingkungan melalui program CSR bidang lingkungan yang dibahas lebih luas pada pokok bahasan tersendiri dalam Bab ini yaitu "TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP".

6. Program Bantuan Bencana Alam

Bentuk komitmen dan kepedulian Perusahaan kepada sesama umat manusia dalam bingkai persatuan untuk saling meringankan beban atas musibah yang dialami saudara kita sebangsa dan setanah air. Selama tahun 2020 tidak ada realisasi penyaluran dana bantuan bencana alam, pembiayaan masih dikonsentrasikan untuk menjalankan operasional Perusahaan.

4. Religious Programs

Spiritual Siraman is held every Friday and every two weeks on Wednesday. The company wants to strengthen the faith of employees in maintaining themselves to always work with the intention of worship. Employees can feel the spiritual shower and depth of faith and devotion to God Almighty. In addition, the provision of compensation to Yatim children which is carried out every year in the month of Ramadan is a routine activity as a form of concern for BBI employees for the surrounding community.

5. Environmental Program

Contribution to the environment is a form of environmental concern through the CSR program in the environmental field which is discussed more broadly on a separate subject in this chapter, namely "SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO THE ENVIRONMENT".

6. Natural Disaster Relief Program

A form of the Company's commitment and concern for fellow human beings in the framework of unity to ease the burden on each other for the calamities experienced by our countrymen and countrymen. During 2020 there was no realization of the distribution of natural disaster relief funds, financing is still concentrated on running the Company's operations.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DIBIDANG PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Corporate Social Responsibility Related To Fair Operations

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat, PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara, turut berperan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Negara BUMN PER-02/MBU/7/2017, tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sebagai BUMN Pembina, BBI telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sejak tahun 1996 sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap usaha kecil menengah dan kondisi sosial dengan memanfaatkan sebagian laba bersihnya untuk dikelola Tim PKBL.

Pelaksanaan Program PKBL Perseroan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan dalam RKAP 2020. Sepanjang tahun 2020, BBI telah merealisasikan penyaluran dana untuk Pengembangan Sosial Kemasyarakatan melalui PKBL dengan rincian sebagai berikut:

1. Melalui Program Kemitraan sebesar Rp15.000.000,-
 2. Program Bina Lingkungan sebesar Rp 0,-
- Penerimaan dana PKBL didapat dari alokasikan dari laba bersih tahun sebelumnya sebesar maksimal 2%.

1. Program Kemitraan (PK)

Program Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan atau membantu pengembangan usaha Mikro dan Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba Perusahaan. Salah satu wujud pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan adalah pemberian Pinjaman Lunak yang terdiri dari Modal Usaha dan Investasi dalam rangka meningkatkan perkembangan usaha mitra

As an effort to encourage people's economic growth and community empowerment, PT Boma Bisma Indra (Persero) as a State-Owned Enterprise, plays a role through the Partnership and Community Development Program (PKBL), as mandated in the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises PER-02/MBU/7/2017, dated July 5, 2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises. As a State Owned Enterprise, BBI has implemented the Partnership and Community Development Program since 1996 as a form of the company's concern for small and medium enterprises and social conditions by utilizing a portion of its net profit to be managed by the PKBL Team.

The implementation of the Company's PKBL Program refers to the planning set out in the 2020 RKAP. Throughout 2020, BBI has realized the distribution of funds for Community Social Development through PKBL with the following details:

1. Through the Partnership Program of Rp. 15,000,000,-
2. Community Development Program of IDR 0,-

PKBL funds received from the allocation of the previous year's net profit of a maximum of 2%.

1. Partnership Program (PK)

The Partnership Program is intended to improve capabilities or assist the development of Micro and Small businesses to become strong and independent through the use of funds from a portion of the Company's profits. One form of implementation of the Partnership Program activities is the provision of Soft Loans consisting of Business Capital and Investment in order to improve the business

binaan Perseroan.

Sasaran utama dari program ini adalah para pengusaha mikro atau UMKM yang dapat dikatakan dalam status non-bankable atau belum mendapatkan akses pinjaman modal dari bank. Program ini merupakan bagian dari peran BUMN membantu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM melalui pemanfaatan laba yang diraih BUMN.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 PT Boma Bisma Indra (Persero) telah memiliki 18 (delapan belas) Mitra Binaan yang tersebar di wilayah Jawa Timur dengan Realisasi penyaluran pinjaman kepada mitra binaan sebesar Rp 15.000.000.

Bidang usaha Mitra Binaan BBI antara lain Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Usaha lain.

Kinerja PKBL BBI tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Efektifitas penyaluran dana sebesar 86,30%
- Kolektibilitas pinjaman sebesar 51,67%

2. Bina Lingkungan (BL)

Program Bina Lingkungan ditujukan untuk memberikan bantuan kepada Masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan. Cakupan kegiatan Program Bina Lingkungan meliputi pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana ibadah sarana umum, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pelestarian alam serta bantuan pengembangan prasarana.

Realisasi penggunaan dana untuk Bina Lingkungan sepanjang tahun 2020, namun difokuskan dalam program CSR Sosial Kemasyarakatan yang pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 268.334.620,-

development of the Company's fostered partners.

The main target of this program is micro-entrepreneurs or MSMEs who can be said to be in non-bankable status or have not yet obtained access to capital loans from banks. This program is part of the role of SOEs to help improve the economic capacity of the community, especially MSME actors through the use of profits earned by SOEs.

As of the fourth quarter of 2020, PT Boma Bisma Indra (Persero) has 18 (eighteen) Foster Partners spread across the East Java region with the realization of loan disbursement to foster partners of Rp. 15,000,000.

The business fields of BBI's Fostered Partners include the Industry, Trade, Services and other Business Sector.

BBI PKBL performance in 2020 is as follows:

- Effectiveness of disbursement of funds by 86.30%
- Loan collectibility of 51.67%

2. Community Development (BL)

The Community Development Program is intended to provide assistance to the community around the Company's operational areas. The scope of the Community Development Program includes the provision of education and training assistance, assistance for public facilities for worship, assistance for health improvement, assistance for nature conservation and assistance for infrastructure development.

Realization of the use of funds for Community Development throughout 2020, but focused on the Social and Community CSR program which in 2020 was realized in the amount of Rp 268,334,620,-

Pendahuluan
Preliminary

Klasifikasi Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Management
Management Discussion and
Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN **TERKAIT OPERASI YANG ADIL**

Corporate Social Responsibility Related To Fair Operations

Perseroan berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi pelaksanaan prinsip operasi yang adil dalam aktivitas operasi Perseroan sehari-hari. Komitmen tersebut salah satunya dituangkan dalam upaya Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap aktivitas Perseroan.

Prinsip operasi yang adil memiliki korelasi yang sangat erat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu, Perseroan juga telah memiliki beberapa kebijakan internal untuk mendukung terlaksananya penerapan prinsip operasi yang adil.

Saat ini, Perseroan telah memiliki kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung terlaksananya tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil, antara lain:

1. Kode Etik Perusahaan
2. Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi
3. Kebijakan Persaingan Usaha yang Sehat (terdapat dalam Kode Etik Perusahaan)
4. Kebijakan terkait Lobi dan Aktivitas Politik (terdapat dalam Kode Etik Perusahaan)
5. Kebijakan terkait Penghargaan

Perseroan meyakini, terlaksananya tanggung jawab sosial di bidang operasi yang adil sangat bergantung pada tingkah laku dan tindakan seluruh karyawan Perseroan. Karena itu, Perseroan telah memiliki kebijakan yang mengatur sikap dan perilaku yang harus dilakukan oleh seluruh karyawan tanpa terkecuali, yaitu Kode Etik Perusahaan.

Kode Etik Perusahaan merupakan langkah antisipatif yang dilakukan untuk mencegah Insan Perseroan melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip operasi yang adil. Pembahasan lebih detail terkait Kode Etik Perusahaan terdapat pada bagian Tata Kelola Perusahaan pada laporan ini.

Target dan Rencana Kegiatan

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Kode Etik Perusahaan merupakan target yang selalu ditetapkan

The Company is committed to always upholding the implementation of fair operating principles in the Company's daily operating activities. One of these commitments is stated in the Company's efforts to continuously improve the quality of the implementation of Good Corporate Governance principles in every activity of the Company.

The principle of fair operation has a very close correlation with the principle of good corporate governance. To that end, the Company also has several internal policies to support the implementation of fair operating principles.

Currently, the Company has policies that can support the implementation of social responsibility related to fair operations, including:

1. Company Code of Conduct
2. Anti-Corruption and Gratification Policy
3. Fair Business Competition Policy (found in the Company's Code of Ethics)
4. Policies regarding Lobbying and Political Activities (found in the Company's Code of Conduct)
5. Policy regarding Awards.

The Company believes that the implementation of social responsibility in the field of fair operation is very dependent on the behavior and actions of all employees of the Company. Therefore, the Company has a policy that regulates attitudes and behavior that must be carried out by all employees without exception, namely the Company's Code of Ethics.

The Company's Code of Ethics is an anticipatory step taken to prevent the Company's personnel from carrying out practices that are contrary to the principles of fair operation. A more detailed discussion of the Company's Code of Ethics can be found in the Corporate Governance section of this report.

Target and Action Plan

The implementation of the principles of Good Corporate Governance and the Company's Code of Ethics is a target that is always set by

Perseroan setiap tahun. Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG dan terus menerus melakukan sosialisasi terhadap Kode Etik Perusahaan agar selalu menjadi perhatian utama bagi seluruh karyawan. Disamping itu, Perseroan juga akan mengambil tindakan tegas untuk setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dengan memberikan sanksi sesuai kebijakan Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Upaya Mempromosikan Rantai Nilai Operasi yang Adil

Agar kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksananya prinsip operasi yang adil dapat dilaksanakan dengan baik, Perseroan melakukan kegiatan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut dalam rangka memberikan pemahaman terkait dengan kode etik dan kebijakan GCG.

Kegiatan dan Capaian Kegiatan

1. Anti Korupsi

BBI mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi dari Indonesia. Komitmen yang sama juga dimiliki oleh Perseroan. Komitmen itu tak terpisahkan dengan implemmentasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang tujuannya antara lain meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemegang saham. Komitmen menutup peluang terjadinya korupsi berlaku bagi manajemen BBI dari lini terbawah hingga teratas.

BBI siap berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai mana arahan Kementerian BUMN melalui Surat Edaran No.S-35/MBU/02/2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi, dengan menerapkan SMAP ISO 37001:20016. Pada tanggal 8 Desember 2020, BBI telah menerima sertifikat dari PT Sucofindo selaku Auditor Audit SMAP ISO 37001:2016. Dengan berhasilnya BBI memperoleh sertifikat ISO 37001:2016 adalah bukti komitmen BBI dalam upaya menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG). BBI juga telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) sebagai salah satu

the Company every year. The Company continues to strive to improve the quality of GCG implementation and continuously disseminates the Company's Code of Ethics so that it is always the main concern for all employees. In addition, the Company will also take firm action for any violation of the Company's Code of Ethics by providing sanctions in accordance with the Company's policies and applicable regulations.

Efforts to Promote Fair Operation Value Chain

In order for policies that are clouded by the implementation of fair operating principles, the Company conducts socialization activities on these policies in order to provide an understanding related to the code of ethics and GCG policies.

Activities and Outcomes

1. Anti-Corruption

BBI supports the government's program to eradicate corruption from Indonesia. The Company also has the same commitment. This commitment is inseparable from the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG), which aims, among other things, to increase customer and shareholder trust. The commitment to closing the opportunity for corruption applies to BBI management from the bottom to the top.

BBI is ready to commit to implementing the Anti-Bribery Management System (SMAP) as directed by the Ministry of SOEs through Circular No.S-35/MBU/02/2020, dated January 10, 2020 regarding the Implementation of the Anti-Bribery Management System in SOEs as the Implementation of Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention, by implementing the ISO 37001:20016 SMAP. On December 8, 2020, BBI has received a certificate from PT Sucofindo as the ISO 37001:2016 SMAP Audit Auditor. The success of BBI in obtaining the ISO 37001:2016 certificate is proof of BBI's commitment to upholding the principles of accountability and transparency in accordance with Good Corporate Governance (GCG). BBI also has a

cara untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Perseroan. Dengan komitmen tersebut, sepanjang 2020 tidak ada insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil atas insiden tersebut.

2. Persaingan Sehat

Perseroan mentaati Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perseroan berkomitmen penuh untuk melakukan persaingan usaha secara sehat dengan menerapkan strategi bersaing yang fokus pada kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan Perseroan. Dalam melaksanakan bisnis, BBI senantiasa siap bersaing secara sehat.

3. Penghargaan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual

BBI menghargai dan melindungi Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual. Salah satu wujud nyata dari bentuk penghargaan tersebut adalah dengan menggunakan piranti lunak yang berlisensi resmi

4. Lobi dan Aktivitas Politik

BBI dengan tegas melarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan politik praktis maupun lobi-lobi politik, baik yang dilakukan perusahaan maupun Insan BBI.

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Operasi yang Adil

Terkait adanya pelanggaran terhadap prinsip operasi yang adil yang dilakukan oleh Perseroan maupun oleh karyawan Perseroan, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan pelaporan dengan menggunakan saluran whistleblowing system yang dikelola Perseroan. Setiap laporan yang masuk akan terlebih dahulu dilakukan verifikasi untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan Perseroan.

whistleblowing system as a way to prevent corruption within the Company. With this commitment, throughout 2020 there were no proven incidents of corruption and action was taken on these incidents.

2. Healthy Competition

The Company complies with Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Company is fully committed to conducting fair business competition by implementing a competitive strategy that focuses on customer satisfaction with the Company's products and services. In conducting business, BBI is always ready to compete in a healthy manner.

3. Copyright and Intellectual Property Awards

BBI respects and protects Copyright and Intellectual Property. One of the tangible manifestations of this form of award is to use officially licensed software

4. Lobbying and Political Activity

BBI strictly prohibits all forms of activities related to practical political activities and political lobbies, whether carried out by the company or by BBI personnel.

Fair Operations Violation Complaints Procedures and Mechanisms

Regarding the violation of the fair operating principles carried out by the Company and by the Company's employees, all stakeholders can report using the whistleblowing system channel managed by the Company. Each incoming report will first be verified and then followed up in accordance with the authority of the Company.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social Responsibility Related to Human Right

PT Boma Bisma Indra (Persero) menjunjung tinggi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi seluruh Insan BBI dan memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah.

BBI juga memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen BBI dengan Serikat Pekerja PT BBI yang merupakan serikat pekerja satu-satunya. Perseroan melakukan pengesahan maupun penyempurnaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2020-2021, yang antara lain mengatur tentang:

1. Pengakuan Perusahaan terhadap Serikat Pekerja
2. Hubungan Kerja
3. Pedoman Tata Tertib Kerja
4. Remunerasi dan Kesejahteraan
5. Keselamatan Kesehatan kerja dan Lingkungan Hidup
6. Pembinaan dan Pengembangan Karyawan
7. Pemutusan Hubungan Kerja

Sebagai perusahaan BUMN, BBI senantiasa berupaya memenuhi HAM dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku secara universal dan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta ketentuan internal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menjamin terpenuhinya hak dasar tersebut bagi seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya. Pemenuhan HAM di BBI ditujukan untuk membangun citra Perusahaan dan menjadi daya tarik bagi customer, investor, mitra kerja dan calon karyawan.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Lingkup tanggung jawab sosial Perseroan terkait dengan HAM di BBI antara lain meliputi:

1. Isu HAM terkait Ketenagakerjaan
 - a. Kebebasan berserikat

PT Boma Bisma Indra (Persero) upholds the protection of human rights for all BBI personnel and is fully committed to upholding human rights. The scope of social responsibility related to human rights includes preventing acts of discrimination, freedom of association, working time arrangements, permits due to emergency conditions, and opportunities to practice worship.

BBI also has a Collective Labor Agreement (PKB) between BBI Management and the PT BBI Workers Union, which is the only trade union. The Company ratified and perfected the 2020-2021 Collective Labor Agreement (PKB), which, among other things, regulates:

1. Company Recognition of Trade Unions
2. Working Relations
3. Work Code of Conduct
4. Remuneration and Welfare
5. Occupational Health and Environmental Safety
6. Employee Coaching and Development
7. Termination of Employment

As a state-owned company, BBI always strives to fulfill human rights by referring to universally applicable provisions and laws and regulations in Indonesia as well as the Company's internal regulations. In addition, the Company also guarantees the fulfillment of these basic rights for all employees and other related parties. The fulfillment of human rights at BBI is intended to build the Company's image and become an attraction for customers, investors, business partners and prospective employees.

Scope of Social Responsibility in the Field of Human Rights

The scope of the Company's social responsibility related to human rights at BBI includes, among others:

1. Human Rights Issues related to Manpower

- b. Waktu Kerja
- c. Tenaga kerja di bawah umur
- d. Hak Cuti
- e. Ijin Penting
- 2. Isu HAM terkait Masyarakat
 - a. Menghormati hak asasi masyarakat terdampak operasi

- a. Freedom of association
- b. Working time
- c. Underage labor
- d. Leave entitlement
- e. Important Permission
- 2. Human Rights Issues related to Society
 - a. Respect the human rights of the people affected by the operation.

Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

BBI menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Program kerja tersebut ditujukan untuk menjamin proses kerja telah memperhatikan juga implementasi HAM antara lain pengalokasian biaya untuk kegiatan-kegiatan karyawan. Penegakan HAM juga ditunjukkan dengan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja serta mengadakan pertemuan antara Serikat Pekerja dengan jajaran manajemen BBI untuk membahas hal-hal yang menjadi kebutuhan karyawan sehingga program kerja yang dimuat dalam RKAP dapat terealisasi dengan memperhatikan hasil kesepakatan Serikat Pekerja dengan manajemen.

Social Responsibility Activity Plan for Human Rights

BBI prepares activity plans as outlined in the work program contained in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). The work program is intended to ensure that the work process has also taken into account the implementation of human rights, including the allocation of costs for employee activities. The enforcement of human rights is also demonstrated by the freedom for employees to form labor unions and hold meetings between the labor unions and the management of BBI to discuss matters that become the needs of employees so that the work program contained in the RKAP can be realized by taking into account the results of the agreement between the union and management.

Pelaksanaan Kegiatan

Perseroan telah merumuskan sejumlah kegiatan dan anggaran yang berkaitan dengan aspek HAM. Perseroan berkomitmen untuk dapat memenuhi berbagai ketentuan terkait HAM, baik yang berlaku bagi karyawan maupun masyarakat. Pemenuhan ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

BBI menjamin hak karyawan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Perseroan juga mendukung kegiatan pegawai dalam berserikat dengan membentuk organisasi Serikat Pekerja (SP).

Keberadaan serikat pekerja sangat berarti bagi Perseroan antara lain untuk menjembatani dalam hal terjadi permasalahan antara karyawan dengan manajemen, termasuk untuk memfasilitasi karyawan dalam mengemukakan usulan kepada manajemen dan manajemen Perseroan dapat memberikan umpan balik yang tepat kepada karyawan.

Activity Implementation

The Company has formulated a number of activities and budgets related to human rights aspects. The Company is committed to being able to fulfill various provisions related to human rights, both those that apply to employees and the community. The fulfillment of these provisions can be explained as follows:

1. Freedom of Association and Assembly

BBI guarantees the rights of employees to associate, assemble, and express opinions. The Company also supports employees' activities in association by forming a Workers Union (SP) organization.

The existence of a labor union is very meaningful for the Company, among others, to bridge in the event of problems between employees and management, including to facilitate employees in submitting proposals to management and the Company's management can provide appropriate feedback to employees.

Dengan terciptanya hubungan baik antara karyawan dan manajemen diharapkan masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi terbaik untuk kepentingan bersama Perseroan.

Di lingkungan BBI, saat ini terdapat Serikat Pekerja PT BBI berdiri sejak 13 Juli 2001 dan telah terdaftar di Kantor Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dengan nomor 250/1141/436.6.12/III/2014 tanggal 12 Maret 2014.

2. Waktu Kerja

BBI menerapkan peraturan waktu kerja sesuai pasal 77 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Hal tersebut juga telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yaitu pada Bab IV Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, pasal 19 tentang "Waktu Kerja".

Waktu Kerja Karyawan BBI adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi Surabaya dan Jakarta :
 - Senin - Kamis : Pk 08.00 – 17.00 WIB
 - Istirahat : Pk 11.30 – 12.30 WIB
 - Jum'at : Pk 08.00 – 17.00 WIB
 - Istirahat : Pk 11.30 – 12.45 WIB
- b. Lokasi Pasuruan :
 - Senin - Kamis : Pk 07.00 – 16.00 WIB
 - Istirahat : Pk 11.30 – 12.30 WIB
 - Jum'at : Pk 07.00 – 16.15 WIB
 - Istirahat : Pk 11.15 – 12.30 WIB
- c. Lokasi Proyek :
 Waktu kerja di proyek/lapangan ditetapkan 6 (enam) hari kerja seminggu dan jam kerjanya disesuaikan dengan jam kerja di daerah lingkungan setempat yang jumlahnya tidak akan lebih dari 40 (empat puluh) jam seminggu.

Hari istirahat mingguan bagi karyawan yang lokasi kerjanya di kantor-kantor Jakarta, Surabaya dan Pasuruan ialah hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan untuk karyawan yang bekerja di Proyek/Lapangan adalah hari Minggu.

3. Tenaga Kerja di Bawah Umur

BBI memastikan bahwa tidak terdapat pekerja di bawah umur yang bekerja di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero). Hal ini dituangkan dalam persyaratan penerimaan pegawai PT BBI yang mensyaratkan calon pekerja minimal harus

With the creation of good relations between employees and management, it is hoped that each party can make the best contribution to the common interest of the Company.

In the BBI environment, there is currently a PT BBI Workers Union, which was established on July 13, 2001 and has been registered with the East Java Provincial Manpower Office with number 250/1141/436.6.12/III/2014 dated March 12, 2014.

2. Working Time

BBI applies working time regulations in accordance with Article 77 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which is 40 hours in 1 week. This has also been regulated in the Collective Labor Agreement (PKB), namely in Chapter IV Working Time and Rest Time, Article 19 concerning "Working Time".

The working hours of BBI employees are as follows:

- a. Surabaya and Jakarta:
 - Monday - Thursday: 08.00 - 17.00 WIB
 - Break: 11.30 – 12.30 WIB
 - Friday: 08.00 - 17.00 WIB
 - Break: 11.30 – 12.45 WIB
- b. Pasuruan:
 - Monday - Thursday: 07.00 - 16.00 WIB
 - Break: 11.30 – 12.30 WIB
 - Friday: 07.00 – 16.15 WIB
 - Break: 11.15 – 12.30 WIB
- c. Project location :
 The working time in the project/field is set at 6 (six) working days a week and the working hours are adjusted to the working hours in the local environment which will not exceed 40 (forty) hours a week.

Weekly rest days for employees whose work locations are in Jakarta, Surabaya and Pasuruan offices are Saturday and Sunday. Meanwhile, for employees who work in the Project/Field, it is Sunday.

3. Underage Labor

BBI ensures that there are no underage workers working within PT Boma Bisma Indra (Persero). This is stated in the PT BBI recruitment requirements which require that prospective workers must be at least 18 years old or have completed high school

berusia 18 tahun atau telah menamatkan pendidikan jenjang SMU atau sederajat. Aturan yang sama juga diterapkan di seluruh Entitas Anak Perseroan.

4. Hak Cuti

Karyawan/Karyawati BBI diberi hak cuti dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan. Jenis-jenis hak cuti yang diberikan Karyawan / Karyawati BBI adalah sebagai berikut:

- Cuti Tahunan
- Cuti Besar
- Cuti Haid, Melahirkan dan Keguguran
- Cuti Sakit
- Cuti Diluar Tanggungan

5. Ijin Penting

Perusahaan akan memberikan dispensasi kepada Karyawan dengan tetap mendapatkan gaji dalam hal :

- Karyawan yang bersangkutan menikah
- Anggota Keluarga serumah meninggal dunia
- Membaptiskan anak yang sah
- Suami/ Istri/ anak/ orang tua/ mertua/ menantu/ saudara kandung meninggal dunia
- Istri karyawan melahirkan/keguguran
- Mengkhitan atau menikahkan anak.

Selain itu, Karyawan/Karyawati BBI diberi hak untuk Ijin meninggalkan tempat kerja dalam jam kerja untuk kepentingan dinas dan kepentingan pribadi yang sangat mendesak misalnya karyawan sakit saat jam kerja, dan keluarga sakit keras atau kecelakaan.

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran HAM

Tatkala terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Perseroan, karyawan maupun masyarakat umum dapat melakukan pelaporan dengan menggunakan mekanisme WBS. Perseroan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk sesuai dengan kapasitasnya.

Dampak Kegiatan dan Pencapaian

Hingga akhir tahun 2020, tidak terdapat laporan, baik dari karyawan maupun masyarakat terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh BBI.

education or its equivalent. The same rules are also applied in all of the Company's Subsidiaries.

4. Leave entitlements

BBI employees are entitled to leave with the terms and conditions set out in the Company's policy. The types of leave rights granted by BBI employees are as follows:

- Annual leave
- Big Leave
- Menstrual Leave, Maternity and Miscarriage
- Sick leave
- Leave Out of Accounts

5. Important Permissions

The company will provide dispensation to employees while still getting a salary in the event that:

- The employee in question is married
- Household family member dies
- Baptizing legitimate children
- Husband /wife /child /parent /in-law /daughter-in-law / sibling dies
- Employee's wife gave birth/miscarriage
- Circumcise or marry off children.

In addition, BBI employees are given the right to leave the workplace during working hours for urgent official and personal interests, such as employees who are sick during working hours, and their families are seriously ill or in an accident.

Procedures and Mechanisms for Complaining Human Rights

Violations When there are human rights violations committed by the Company, employees and the general public can report using the WBS mechanism. The Company will follow up on each incoming report according to its capacity.

Impact of Activities and Achievements

Until the end of 2020, there were no reports, either from employees or the public regarding human rights violations committed by BBI.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Social Responsibility Related to The Environment

BBI sebagai Badan Usaha Milik Negara, dalam setiap operasinya selalu berdasarkan pada persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BBI terus berusaha melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Berkomitmen untuk mengurangi jejak lingkungan dengan menerapkan Operasional yang lebih ramah terhadap lingkungan. Selain itu, juga memiliki komitmen untuk menyelaraskan antara kegiatan operasional dengan kelestarian lingkungan. Perseroan menyadari, sekecil apapun dampak dari kegiatan usaha dapat mengubah bentang alam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Target dan Rencana Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup

Dalam menjalankan aktivitas operasinya, BBI senantiasa menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama. Untuk itu, BBI telah menetapkan sejumlah target agar aktivitas operasional tidak memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan hidup, antara lain:

1. Meminimalkan pencemaran lingkungan dan dampak terhadap lingkungan lainnya akibat proses Industri dan konstruksi
2. Efisiensi pada seluruh kegiatan operasional yang menggunakan energy dan sumberdaya alam seperti air, listrik dan bahan bakar.
3. Mengelola limbah cair dan padat dengan menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*)

Kegiatan dan Capaian

Fokus pelaksanaan program tanggung jawab terkait kelestarian lingkungan hidup di BBI terbagi menjadi 4 (empat) bidang utama, yaitu Pengelolaan Lingkungan, pemantauan lingkungan, Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, serta Kegiatan Konservasi lingkungan.

BBI as a State-Owned Enterprise, in each of its operations is always based on the requirements and applicable laws and regulations. BBI continues to strive for environmental management and monitoring. Committed to reducing environmental footprint by implementing more environmentally friendly Operations. In addition, it also has a commitment to harmonize operational activities with environmental sustainability. The Company realizes that the slightest impact of business activities can change the landscape, either directly or indirectly.

Targets and Action Plans in the Environmental Sector

In carrying out its operational activities, BBI always makes the environment a major consideration. For this reason, BBI has set a number of targets so that operational activities do not have an impact negative to the environment, including:

1. Minimize environmental pollution and other environmental impacts due to industrial and construction processes
2. Efficiency in all operational activities that use energy and natural resources such as water, electricity and fuel.
3. Managing liquid and solid waste by applying the 3R principle (*reduce, reuse, recycle*)

Activities and Achievements

The focus of the implementation of responsibility programs related to environmental sustainability at BBI is divided into 4 (four) main areas, namely Environmental Management, environmental monitoring, Waste Reduction and Utilization, and Environmental Conservation Activities.

Pengelolaan Lingkungan

1. Pengelolaan Pencemaran Udara

Tujuan pengelolaan pencemaran udara adalah untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas udara akibat adanya proses produksi di BBI Pasuruan. Pengelolaan limbah udara dilakukan dengan memasang cerobong pada proses yang berdampak pada penurunan kualitas udara yaitu pada proses:

a. Pembuatan Cetakan

Pengendalian limbah udara pada proses ini dilakukan dengan memasang cerobong udara yang dilengkapi filter (Dust Collector). Filter pada cerobong ini dilakukan penggantian secara berkala sesuai kondisi filter.

b. Pengecoran Kupola dan Induksi (Foundry)

Pengendalian limbah udara pada proses ini dilakukan dengan memasang cerobong udara dilengkapi dengan wet scrubber.

2. Pengelolaan Limbah Cair

Pada proses kegiatannya, BBI menghasilkan limbah cair domestik yang merupakan sisa dari aktivitas MCK karyawan. Saluran air limbah domestik tsb selalu dilakukan pembersihan secara periodik. Demikian pula untuk septik tank dilakukan pengurasan sesuai kapasitasnya. Sedangkan dalam proses produksi tidak menghasilkan limbah cair karena proses kering.

3. Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan di tahun 2019 antara lain:

- Penyediaan tempat sampah B3 di masing-masing unit penghasil
- Pemilahan limbah B3 di masing-masing unit penghasil
- Penyimpanan sementara limbah B3 di TPS limbah B3
- Melakukan pengelolaan lanjutan limbah B3 melalui pihak ketiga berizin KLHK dan Dirjen Perhubungan Darat

Total biaya yang dikeluarkan untuk Pengelolaan lingkungan sebesar Rp 60 juta selama tahun 2020.

Pemantauan Lingkungan

Pemantauan lingkungan yang dilakukan BBI berdasarkan parameter yang telah ditetapkan dalam Peraturan sbb: untuk pemantauan

Management of the environment

1. Air Pollution Management

The purpose of air pollution management is to prevent a decrease in air quality due to the production process at BBI Pasuruan. Air waste management is carried out by installing chimneys in processes that have an impact on decreasing air quality, namely in the process:

a. Mold Making

Air waste control in this process is carried out by installing an air chimney equipped with a filter (Dust Collector). The filter in this chimney is replaced periodically according to the condition of the filter.

b. Cupola and Induction Casting (Foundry)

Air waste control in this process is carried out by installing an air chimney equipped with a wet scrubber.

2. Liquid Waste Management

In the process of its activities, BBI produces domestic liquid waste which is the rest of the employees' toilet activities. The domestic waste water channel is always cleaned periodically. Likewise for the septic tank, draining is carried out according to its capacity. While in the production process does not produce liquid waste because of the dry process.

3. Hazardous Waste

Management B3 waste management that has been carried out in 2019 includes:

- Provision of hazardous waste bins in each producing unit
- B3 waste segregation in each generating unit
- Temporary storage of B3 waste at B3 waste TPS
- Carry out further management of B3 waste through a third party licensed by the Ministry of Environment and Forestry and the Director General of Land Transportation.

The total cost incurred for environmental management is Rp 60 millions during 2020.

Environmental Monitoring

Environmental monitoring carried out by BBI is based on the parameters set out in the following Regulations: for monitoring the quality of

kualitas emisi cerobong berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 10 tahun 2009, udara ambien berdasarkan PPRI Nomor: 41 tahun 1999, kebisingan ambien berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 48 tahun 1996 dan pemantauan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 101 tahun 2012.

1. Pemantauan Pencemaran Udara

- Pengujian Emisi Cerobong**
Pengujian Emisi Cerobong dilakukan pada 3 (tiga) cerobong sumber emisi PT BBI Divisi MPI, pada tanggal 20 Desember 2019 oleh PT Unilab Perdana Surabaya yang telah memiliki Akreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan sebagai laboratorium yang mendapat penunjukan dari Gubernur Jawa Timur.
- Pengujian Udara Ambien**
Pengujian dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019 yang dilakukan oleh PT Unilab Perdana Surabaya sebanyak 2 (dua) titik, masing-masing 1 titik di luar dan di dalam Perusahaan yaitu:
 - Utara pabrik
 - Selatan pabrik

2. Pemantauan Pencemaran Air

Proses produksi yang dilakukan PT BBI merupakan proses produksi kering dan tidak menghasilkan limbah cair.

3. Pemantauan Limbah B3

Pemantauan Limbah B3 dilakukan dengan memantau sumber kegiatan yang menghasilkan limbah B3, dan di dalam TPS LB3. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat limbah yang dihasilkan dan apakah diperlukan pengelolaan limbah lebih lanjut dan juga memastikan tidak ada limbah B3 yang tercecer sehingga tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan.

Total biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan lingkungan sebesar Rp 60 juta selama tahun 2020

Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah

Untuk mengurangi sampah dan limbah, BBI menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Salah satu upaya yang diterapkan Perseroan adalah mengurangi pemakaian kertas dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi. Dalam kondisi tertentu apabila harus menggunakan kertas, penghematan dilakukan antara lain dengan melakukan pengecekan secara teliti sebelum mencetak

chimney emissions based on East Java Governor Regulation Number: 10 of 2009, ambient air based on PPRI Number: 41 of 1999, ambient noise based on the Decree of the Minister of the Environment Number: 48 1996 and monitoring of B3 waste based on Government Regulation Number: 101 of 2012.

1. Air Pollution Monitoring

- Chimney Emission Test**
Chimney Emission Testing was carried out on 3 (three) chimneys of PT BBI's emission sources, MPI Division, on December 20, 2019 by PT Unilab Perdana Surabaya which already has KAN Accreditation (National Accreditation Committee) and as a laboratory appointed by the Governor of East Java.
- Ambient Air Test**
Tests were carried out on December 20, 2019 by PT Unilab Perdana Surabaya as many as 2 (two) points, 1 point each outside and inside the Company, namely:
 - North of the factory
 - South of the factory

2. Water Pollution Monitoring

The production process carried out by PT BBI is a dry production process and does not produce liquid waste.

3. Hazardous Waste Monitoring

Monitoring of B3 Waste is carried out by monitoring the source of activities that generate B3 waste, and in the LB3 TPS. The purpose of this monitoring is to find out whether there is waste generated and whether further waste management is needed and also to ensure that no B3 waste is scattered so that it does not cause pollution to the environment.

The total cost for environmental monitoring is Rp 60 millions during 2020

Waste Reduction and Utilization

To reduce waste and waste, BBI applies the 3R principle (Reduce, Reuse and Recycle). One of the efforts implemented by the Company is to reduce paper usage by utilizing information and communication systems. Under certain conditions if you have to use paper, savings are made, among others, by checking carefully before printing the manuscript so that there are no writing errors that require reprinting. As for

naskah sehingga tidak ada kesalahan tulis yang mengharuskan mencetak ulang. Adapun pencetakan naskah yang masih berupa draft, pencetakan akan dilakukan dengan bolak-balik atau memanfaatkan kertas bekas yang salah satu halamannya masih bersih. Sementara itu, limbah atau sampah kertas yang sudah tidak terpakai diserahkan semua akan dihancurkan terlebih dulu dengan mesin penghancur sebelum diserahkan ke pihak ketiga untuk didaur ulang.

Kegiatan Konservasi Lingkungan

BBI menyadari kelestarian alam merupakan hal mutlak yang harus dijaga. Secara spesifik, sebelum sebuah proyek dimulai, BBI melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen lingkungan yang diperlukan apakah berupa:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
2. Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
3. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)

Kegiatan konservasi lingkungan yang dilaksanakan BBI di Tahun 2020 adalah pada Proyek Pembangunan Workshop Machining Center PT Barata Indonesia. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 250 juta untuk penghijauan di sekitar lokasi Workshop Machining Center.

Mekanisme Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup

Tatkala terdapat pelanggaran yang terkait lingkungan hidup yang dilakukan oleh BBI, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Sekretariat Perusahaan menerima setiap pengaduan ataupun pelaporan terkait dengan kegiatan CSR Perseroan, melalui media pelaporan berupa e-mail di alamat humas@ptbbi.co.id.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Hingga akhir tahun 2020, BBI telah memiliki sertifikasi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, sertifikasi tersebut diberikan oleh TUV Rheinland dan berlaku sejak 1 Februari 2020 hingga 27 Januari 2023.

the printing of manuscripts that are still in the form of drafts, the printing will be done back and forth or using used paper with one of the pages still clean. Meanwhile, all unused waste or paper waste will be crushed first with a shredder before being handed over to a third party for recycling.

Environmental Conservation Activities

BBI realizes that the preservation of nature is an absolute thing that must be maintained. Specifically, before starting a project, BBI thoroughly checks the completeness of the required environmental documents in the form of:

1. Environmental Impact Analysis (AMDAL)
2. Environmental Management and Monitoring Efforts (UKL-UPL)
3. Environmental Management and Monitoring Plan (RKL-RPL)

Document The environmental conservation activity carried out by BBI in 2020 is at the PT Barata Indonesia Machining Center Workshop Development Project. The total cost spent is IDR 250 million for reforestation around the Machining Center Workshop location.

Environmental Complaints Mechanism

When there are environmental-related violations committed by BBI, the public can submit reports to the Corporate Secretariat to receive any complaints or reports related to the Company's CSR activities, through the reporting media in the form of e-mail at the address humas@ptbbi.co.id.

Environmental Certification

Until the end of 2020, BBI has obtained ISO 14001:2015 certification on Environmental Management System, the certification was granted by TUV Rheinland and is valid from 1 February 2020 to 27 January 2023.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGA KERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility Related to Employment, Health And Work Safety

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama bagi BBI. Karena itu, Perseroan selalu berupaya untuk memenuhi hak-hak karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain aspek ketenagakerjaan, Perseroan juga memprioritaskan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi karyawan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Aturan-aturan tersebut menjadi landasan bagi Perseroan dalam menjalin hubungan industrial dengan karyawan. Disamping itu, Perseroan juga telah memiliki kebijakan dan aturan internal yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan dan K3, antara lain:

1. Kebijakan Safety, Health, Environment PT Boma Bisma Indra (Persero), tanggal 17 Maret 2020.
2. Pedoman K3LH dan 5R yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bab IX Pasal 52 tentang K3LH dan 5R.
3. *Integration Management System Manual*: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 SP-1520-01-02 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
4. SP-1520-01-02 Pengendalian Resiko
5. SP-1520-01-03 Program Manajemen K3 (PMK3)
6. SP-1520-02-02 Evaluasi Kepatuhan Peraturan Perundangan K3 dan Persyaratan Lainnya
7. SP-1520-05-02 Program Pelaksanaan Drill Tanggap Darurat
8. SP-1520-06-02 Jadwal Pemantauan dan Pengukuran K3
9. SP-1520-06-03 Laporan Statistik Kinerja K3
10. EP-2601-04-01 Dokumen UKL-UPL (Usaha Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan)

Human Resources is the main asset for BBI. Therefore, the Company always strives to fulfill the rights of employees in accordance with the applicable laws and regulations, in this case the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. In addition to the labor aspect, the Company also prioritizes Occupational Health and Safety (K3) for employees as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 of 2012 concerning Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems. These rules are the basis for the Company in establishing industrial relations with employees. In addition, the Company also has internal policies and regulations related to employment and OHS aspects, including:

1. PT Boma Bisma Indra (Persero) Safety, Health, Environment Policy, dated March 17, 2020.
2. The K3LH and 5R guidelines contained in the Collective Labor Agreement (PKB) Chapter IX Article 52 concerning K3LH and 5R.SP-1520-01-01 Hazard Identification and Risk Assessment
3. *Integration Management System Manual*: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 SP-1520-01-02 Hazard Identification and Risk Assessment
4. SP-1520-01-02 Risk Control
5. SP-1520-01-03 K3 Management Program (PMK3)
6. SP-1520-02-02 Evaluation of Compliance with OSH Regulations and Other Requirements
7. SP-1520-05-02 Emergency Response Drill Implementation Program
8. SP-1520-06-02 OHS Monitoring and Measurement Schedule
9. SP-1520-06-03 OHS Performance Statistics Report
10. EP-2601-04-01 UKL-UPL (Environmental Monitoring and Measurement Efforts) Document

Target dan Rencana Kegiatan

No.	Kegiatan Description	Target 2020 2020 Target	Realisasi Realization
1.	Pemenuhan dan Update Kebijakan Mutu dan Pengamanan, dan SHE Compliance and Update of Quality and Security Policy, and SHE	Min. 1 kali per tahun Min. once a year	100% 100%
2.	Pemantauan QSHE : QSHE Inspection QSHE Meeting QSHE Morning Talk Sosialisasi dan Awareness Audit Internal Monitoring QSHE : QSHE Patrol QSHE Meeting QSHE Morning Talk Socializing dan Awareness Customer Satisfaction Audit Internal	 52 kali per tahun 12 kali per tahun 24 kali per tahun 6 kali per tahun 2 kali per tahun 25 times a year 24 times a year 24 times a year 6 times a year 1 times a year 2 times a year	 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3	Campaign: Safety and Health Campaign Enviro Campaign Safety and Health Campaign Enviro Campaign	 1 kali per tahun 4 kali per tahun 1 time a year 4 times a year	 100% 100% 100% 100%

Pelaksanaan Kegiatan

1. Ketenagakerjaan

- Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender dalam Kesempatan Kerja dan Pengembangan Kompetensi BBI memberikan hak yang sama kepada setiap orang untuk mengikuti proses rekrutmen yang dijalankan Perseroan selama memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, tanpa membedakan gender, suku, rasa dan agama. Tahun 2020, BBI tercatat memiliki 344 karyawan, yang terdiri dari 38 karyawan wanita dan 306 karyawan pria. Walau jumlah karyawan pria jauh lebih banyak dibandingkan karyawan wanita, namun bukan berarti Perseroan mengutamakan gender tertentu. Hal tersebut lebih dikarenakan karakteristik industri yang dijalankan BBI lebih sesuai dengan karyawan pria.

- Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan

BBI memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan, sesuai

Activity Implementation

1. Employment

- Gender equality

Gender Equality in Employment Opportunities and Competency Development BBI gives equal rights to everyone to participate in the recruitment process carried out by the Company as long as it fulfills the specified administrative requirements, regardless of gender, ethnicity, taste and religion. In 2020, BBI was recorded to have 344 employees, consisting of 38 female employees and 306 male employees. Although the number of male employees is much higher than female employees, it does not mean that the Company prioritizes certain genders. This is more because the characteristics of the industry run by BBI are more in line with male employees.

- Equality in Education and Training Programs

BBI provides equal opportunities for every employee to participate in education and training programs, according to their level of

dengan level jabatannya dan kebutuhan Perseroan. Pada tahun 2020 BBI menyelenggarakan 73 program pelatihan diikuti oleh 608 karyawan.

- Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

BBI memahami bahwa kompensasi dan benefit yang diberikan kepada karyawan berpengaruh terhadap produktivitas kinerja serta tingkat perputaran karyawan. Oleh karenanya, Perseroan memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan karyawan dengan harapan terjalin hubungan saling membutuhkan sehingga terjadi keterikatan antara karyawan dan Perseroan yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.

Dalam memberikan remunerasi kepada setiap karyawan, BBI menerapkan prinsip kesetaraan yaitu tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan jenjang jabatan, masa kerja, dan hasil penilaian kinerja individu. Perseroan telah menentukan standar remunerasi dan memastikan system remunerasi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tingkat Upah. Minimum Provinsi (UMP) yang ditentukan Pemerintah berdasarkan wilayah kerja masing-masing area.

Selain memberikan Remunerasi yang layak Perseroan juga memperhatikan kesejahteraan dengan beberapa fasilitas diantaranya : Program pensiun/pesangon, Cuti, Asuransi kesehatan dan Asuransi Kecelakaan dan cacat tetap melalui BPJS, dan Kendaraan Dinas untuk pejabat tertentu.

- Tenaga Kerja Lokal

Hingga akhir tahun 2020, BBI belum memiliki kebijakan spesifik terkait perekrutan tenaga kerja lokal. Namun pada praktiknya, hampir di semua proyek yang dikerjakan, BBI menggunakan tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam penyelesaian proyek.

2. Kesehatan

Pemberian fasilitas kesehatan :

- Memberlakukan wajib medical checkup (MCU) bagi pekerja dengan prioritas risiko tinggi, dilaksanakan periode tertentu.
- Mengikutsertakan seluruh pegawai dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

position and the needs of the Company. In 2020 BBI held 73 training programs attended by 608 employees.

- Employee Remuneration and Welfare

BBI understands that compensation and benefits provided to employees affect productivity, performance and employee turnover. Therefore, the Company pays attention to the welfare of employees by trying to facilitate the needs of employees in the hope that a mutual need will be established so that there is an attachment between employees and the Company that synergizes with each other to achieve the same goal.

In providing remuneration to each employee, BBI applies the principle of equality, which does not differentiate based on gender, but based on level of position, tenure, and results of individual performance appraisals. The Company has determined the remuneration standard and ensured that the remuneration system implemented is in accordance with the applicable laws and regulations, such as the level of Wages. Provincial Minimum (UMP) determined by the Government based on the working area of each area.

In addition to providing proper remuneration, the Company also pays attention to welfare with several facilities including: pension/severance pay, leave, health insurance and accident and permanent disability insurance through BPJS, and official vehicles for certain officials.

- Local Workforce

Until the end of 2020, BBI does not yet have a specific policy regarding the recruitment of local workers. But in practice, in almost all the projects it works on, BBI uses local workers to participate in project completion.

2. Health

Provision of health facilities:

- Implement mandatory medical check-up (MCU) for workers with high-risk priority which is carried out for a certain period.
- Involving all employees in the Employment Social Security Program (BPJS manpower).
- Allocating employee health costs for

(BPJS ketenagakerjaan).

- Mengalokasikan biaya kesehatan pegawai untuk pencegahan penanganan penyebaran Covid-19.

prevention and handling of the spread of Covid-19.

3. Keselamatan Kerja

- Mengikutsertakan seluruh pegawai dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan), yang terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
- Memerhatikan praktik K3 di lapangan
- Mengimplementasikan K3 tidak hanya berlaku bagi pekerja internal BBI, namun juga diberlakukan secara tegas pada mitra kontrak dan sub kontraktor, bahkan kepada tamu yang meninjau pabrik / proyek.
- Melakukan Safety induction pada saat sebelum pekerjaan dimulai, dan sebelum peninjauan pabrik / proyek..
- Menyediakan pakta integritas yang wajib dipatuhi dan ditandatangani oleh seluruh mitra maupun sub kontraktor.
- Memastikan keselamatan kerja tiap pegawai dilakukan melalui QSHE Patrol
- Melakukan komunikasi dan partisipasi dalam rangka penerapan K3 yang terdiri dari SHE Induction, SHE Morning Talk, Toolbox Meeting, SHE Meeting, Safety Alert, SHE Audit.

3. Work Safety

- Involving all employees in the Employment Health Social Security Program (BPJS labor), which consists of Old Age Security (JHT), Pension Security (JP), Work Accident Insurance (JKK), and Death Security (JKM).
- Observing the practice of K3 in the field
- Implementing OHS does not only apply to BBI's internal workers, but also applies strictly to contract partners and sub-contractors, even to guests who review factories/projects.
- Conducting safety induction before work starts, and before factory/project review.
- Provide an integrity pact that must be complied with and signed by all partners and sub-contractors.
- Ensuring the safety of each employee is carried out through the QSHE Patrol
- Communicating and participating in the implementation of K3 which consists of SHE Induction, SHE Morning Talk, Toolbox Meeting, SHE Meeting, Safety Alert, SHE Audit.

Kegiatan Description	Target 2020 2020 Target
SHE Induction	<p>SHE induction dilakukan untuk mengkomunikasikan potensi bahaya yang ada di proyek dan apa yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat. Ditujukan pada seluruh pekerja dan tamu yang memasuki area proyek/kantor BBI. Materi yang disampaikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Sistem Manajemen SHE - Sasaran K3L - Aturan-aturan K3L - Prosedur Penanganan Keadaan Darurat - Program-program K3L dan Pengamanan Bahaya-bahaya yang mungkin terjadi serta pengendalian risikonya <p>SHE induction is carried out to communicate potential hazards in the project and what to do in the event of an emergency. Aimed at all workers and guests entering the project area/BBI office. The material presented includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHE Management System Policy - K3L targets - K3L rules - Emergency Handling Procedure - K3L and Safeguard Programs Hazards that may occur and their risk control
SHE Morning Talk	<p>Dilaksanakan setiap pekan pertama dan keempat dengan melibatkan seluruh pekerja</p> <p>Held every first and fourth week by involving all workers</p>
SHE Meeting	<p>Pelaksanaan SHE Meeting:</p> <p>1 bulan sekali melibatkan penanggung jawab produksi, anggota P2K3 membahas program-program, hasil inspeksi, Pelanggaran dan rencana tindak lanjutnya, Notulen terdokumentasi dan didistribusikan kepada fungsi terkait</p>

	Implementation of SHE Meeting: Once a month involving the person in charge of production, P2K3 members discuss programs, inspection results, Violations and follow-up plans, Minutes are documented and distributed to related functions
Toolbox Meeting	Dilaksanakan setiap hari kerja untuk setiap kelompok sesuai bagian masing-masing Held every working day for each group according to their respective sections
Safety Alert	Berisi penjelasan kejadian analisis penyebab. tindak lanjut dari kejadian/kecelakaan yang terjadi Contains an explanation of the cause analysis events. follow-up of events/accidents that occur

Sistem Manajemen Safety, Health and Environment (SHE) BBI dibentuk berdasarkan standar ISO 14001: 2015, SMK3 sesuai PP No. 50 Tahun 2012, OHSAS 18001:2007. BBI juga terus meningkatkan kepatuhan pelaksanaan K3 demi tercapainya kecelakaan nihil (zero accident).

Sertifikasi di Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sampai dengan Desember 2020, Perseroan telah memperoleh beberapa sertifikasi terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja antara lain sebagai berikut.

1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang berlaku sampai dengan 27 Januari 2023;
2. Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 yang berlaku sampai dengan 27 Januari 2023;
3. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, yang berlaku sampai dengan 27 Januari 2023

The BBI Safety, Health and Environment (SHE) Management System was established based on the ISO 14001:2015 standard, SMK3 in accordance with PP. 50 of 2012, OHSAS 18001:2007. BBI also continues to improve compliance with the implementation of K3 in order to achieve zero accidents.

Certification in Occupational Health and Safety

As of December 2020, the Company has obtained several certifications related to occupational health and safety, including the following.

1. Quality Management System ISO 9001:2015 which is valid until January 27, 2023;
2. ISO 45001:2018 OHS Management System which is valid until 27 January 2023;
3. Environmental Management System ISO 14001:2015, valid until January 27, 2023

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Related to Consumers

Pelanggan menjadi aset penting bagi PT Boma Bisma Indra (Persero). Tanpa adanya pelanggan, bisnis pun tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Manajemen BBI berupaya untuk meningkatkan komitmen dalam rangka menjaga kepuasan konsumen secara berkelanjutan.

Customers are an important asset for PT Boma Bisma Indra (Persero). Without customers, business will not run well. Therefore, BBI Management strives to increase commitment in order to maintain customer satisfaction on an ongoing basis.

Untuk menunjang komitmen tersebut, BBI telah memiliki sejumlah kebijakan, antara lain:

1. Kebijakan Sistem Manajemen Mutu, K3 & Lingkungan PT BBI (Persero), tanggal 17 Maret 2020.
2. Pedoman Sistem Manajemen Integrasi Mutu & K3L sesuai ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
3. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan tanggal 29 Juli 2020
4. Kebijakan Sistem Manajemen Risiko PT BBI (Persero), tanggal 1 September 2020.
5. Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi tanggal 1 Desember 2020

To support this commitment, BBI already has a number of policies, including:

1. PT BBI (Persero) Quality, K3 & Environmental Management System Policy, dated March 17, 2020.
2. Quality & HSE Integration Management System Guidelines according to ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
3. Anti-Bribery Management System Policy dated 29 July 2020
4. PT BBI (Persero) Risk Management System Policy, dated September 1, 2020.
5. Information Technology Governance Policy dated December 1, 2020.

Target Kegiatan

Audit Internal Sistem

Kegiatan audit internal terhadap sistem manajemen dilakukan dengan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun sekali sesuai dengan prosedur Audit Internal QP-2110-02. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen, pengendalian dan tata kelola.

Audit surveillance dari Eksternal terhadap sistem manajemen Mutu & K3L sesuai ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Kegiatan audit surveillance dari eksternal dilakukan setahun sekali oleh badan sertifikasi eksternal. Kegiatan ini dilakukan untuk pengawasan penerapan dari sistem manajemen Mutu & K3L di Perusahaan terhadap standard ISO 9001, 14001 & 45001 selama kurun waktu 1 tahun.

Activity Target

System Internal Audit

Internal audit activities on the management system are carried out at least 2 (two) times in 1 year in accordance with the Internal Audit procedure QP-2110-02. This activity is carried out to help the organization achieve its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of management, control and governance processes.

External surveillance audit of Quality & HSE management system according to ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

External surveillance audit activities are carried out once a year by an external certification body. This activity is carried out to supervise the implementation of the Quality & HSE management system in the Company against ISO 9001, 14001 & 45001 standards for a period of 1 year.

Peninjauan Manajemen

Kegiatan tinjauan manajemen dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam setahun kegiatan ini dilakukan untuk memantau pencapaian kinerja Perusahaan.

Pelaksanaan Kegiatan

Demi menjaga relasi terhadap pelanggan, beberapa langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menjual produk kepada pelanggan dengan standar dan mutu tinggi sesuai dengan yang persyaratan dari pelanggan.
2. Membuka layanan pelanggan seperti keluhan, kritik, dan saran serta menindaklanjutinya. Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan (QP-2200-03) yang tersedia di Website BBI. Tindak lanjut dilakukan tanpa melakukan diskriminasi terhadap pelanggan.
3. Promosi produk dan program perusahaan secara sehat dan berkesinambungan. Promosi juga berlandaskan prinsip adil, jujur, tak menyesatkan, dan dapat diterima oleh yang berlaku di masyarakat.
4. Setiap insan perusahaan bertindak sebagai pemasar, yang mana memasarkan produk dan jasa dari perusahaan.

Agar relasi dan bentuk tanggung jawab dapat berjalan dengan baik dengan pelanggan dan meningkatkan mutu produk, BBI selalu melakukan komitmen dengan mendengarkan, mengamati, dan berinteraksi yang berfokus pada keinginan pelanggan. Implementasi dari hal tersebut dilakukan melalui:

1. **Memastikan kualitas dan kondisi produk melalui uji kualitas yang terbaik sebelum dipasarkan**
Pengecekan dan uji kualitas produk dilakukan guna meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Dalam hal ini tidak hanya sekedar pada pelanggan saja, tetapi juga kepada perusahaan lainnya yang terlibat dalam kerjasama, diantaranya dengan pemanfaatan teknologi dan proses produksi yang sesuai standar. Dengan menjaga mutu produk, berarti juga menjaga kepercayaan pelanggan.
2. **Kegiatan Penanganan Keluhan Pelanggan**
Kegiatan penanganan keluhan pelanggan diatur di Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan no. QP-2200-03 dan jika ada ketidaksesuaian produk diatur di Prosedur penanganan ketidaksesuaian (Non

Management Review

Management review activities are carried out at least 1 (one) time a year. This activity is carried out to monitor the achievement of the Company's performance.

Activity Implementation

In order to maintain relationships with customers, several steps are taken as follows:

1. Selling products to customers with high standards and quality in accordance with customer requirements.
2. Opening customer service such as complaints, criticisms, and suggestions and following up on them. Customer Complaint Handling Procedure (QP-2200-03) available on the BBI Website. Follow-up is done without discriminating against customers.
3. Promotion of company products and programs in a healthy and sustainable manner. Promotion is also based on the principles of being fair, honest, not misleading, and acceptable to those in the community.
4. Every employee of the company acts as a marketer, which markets the company's products and services.

In order for relationships and forms of responsibility to work well with customers and improve product quality, BBI is always committed to listening, observing, and interacting that focuses on customer desires. Implementation of this is done through:

1. **Ensure the quality and condition of the product through the best quality test before being marketed.**
Product quality checks and tests are carried out to increase customer trust. In this case, not only to customers, but also to other companies involved in cooperation, including by using technology and production processes that meet standards. By maintaining product quality, it also means maintaining customer trust.
2. **Customer Complaint Handling**
Activities Customer complaint handling activities are regulated in Customer Complaint Handling Procedure no. QP-2200-03 and if there is a product non-conformity set out in the Non-Conformity

Conformity) QP-1510-03. Prosedur ini mengatur tata cara pengendalian proses yang menyimpang dari ketentuan dan mengatur tata cara pelaksanaan dalam rangka efektifitas sistem manajemen Mutu & K3L di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero). BBI juga menyediakan saluran pengaduan secara online 24 jam, melalui Website: <http://www.ptbbi.co.id/contact>

Procedure (Non Conformity) QP-1510-03. This procedure regulates process control procedures that deviate from the provisions and regulates implementation procedures in the context of the effectiveness of the Quality & K3L management system within PT Boma Bisma Indra (Persero). BBI also provides a 24-hour online complaint channel, via the Website: <http://www.ptbbi.co.id/contact>

3. Pengenalan Sistem Manajemen Mutu & K3L BBI

Sistem Manajemen Mutu PT Boma Bisma Indar (Persero), didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 yang terdiri dari :

- Prosedur, Pedoman, Instruksi Kerja, Surat Keputusan Direksi dan/atau Ka. Komrah dan Kebijakan Perusahaan.
- Penanggung jawab yang ditunjuk (Tim Pengembangan Sistem Manajemen).
- Dokumen referensi atau standar resmi.

4. Kunjungan Rutin kepada Pelanggan

Selain menjaga kualitas dan mutu & K3L, perusahaan pun juga melakukan kunjungan kepada pelanggan. Hal ini dilakukan guna meminta masukan, pendapat, kritik, maupun saran yang berkaitan dengan perbaikan pelayanan di masa mendatang. Adanya masukan tersebut menjadi aset penting untuk menjadi lebih baik dalam segi pelayanan.

3. Introduction to BBI's Quality Management & K3L

System The Quality Management System of PT Boma Bisma Indar (Persero), is based on the provisions stipulated in the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 standards which consist of:

- Procedures, Guidelines, Work Instructions, Decision Letters from the Board of Directors and/or Head of Office. Komrah and Company Policy.
- Appointed person in charge (Management System Development Team).
- Reference document or official standard.

4. Regular Visits to Customers

In addition to maintaining quality and quality & K3L, the company also makes visits to customers. This is done to ask for input, opinions, criticism, and suggestions related to service improvement in the future. The existence of these inputs is an important asset to be better in terms of service.

Evaluasi dan Catatan bagi Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pelanggan

Secara umum, mayoritas pelanggan dari PT Boma Bisma Indra (Persero) merasa puas dengan pelayanan yang ada. Namun beberapa pelayanan kepada pelanggan perlu menjadi catatan dan evaluasi. Dengan harapan memberikan pelayanan terbaik di masa mendatang. Dari paparan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi catatan dan masukan di antaranya adalah:

- Masalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pengunduran waktu penyelesaian pekerjaan.
- Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan Kembali

Evaluation and Records for the Company's Responsibility to Customers

In general, the majority of customers from PT Boma Bisma Indra (Persero) are satisfied with the existing services. However, some services to customers need to be noted and evaluated. With the hope of providing the best service in the future. From the explanation above, there are at least a few things to note and input, including:

- The problem of late completion of work and delays in the completion of work.
- Repair and maintenance of facilities, facilities and infrastructure need to be improved again to provide a sense of comfort to customers. Especially for matters

untuk memberikan rasa nyaman kepada para pelanggan. Khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi dan operasional perusahaan.

Segala masukan, kritik, dan saran dari para pelanggan di atas merupakan aset penting bagi perusahaan. Masukan, kritik, dan saran tersebut juga bermanfaat dalam rangka evaluasi dan pengambilan kebijakan di masa mendatang yang memperhatikan pada kenyamanan dan sinergitas guna menjaga hubungan harmonis terhadap para pelanggan.

Sertifikasi Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Sampai dengan Desember 2020, Perseroan telah memperoleh beberapa sertifikasi terkait dengan Konsumen antara lain sebagai berikut.

1. Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2015
2. Sistem Manajemen K3 sesuai ISO 45001:2018
3. Sistem Manajemen Lingkungan sesuai ISO 14001:2015
4. ASME U, U2, S & R

relating to the production process and company operations.

All inputs, criticisms, and suggestions from customers above are important assets for the company. These inputs, criticisms, and suggestions are also useful in the context of evaluating and making future policies that pay attention to convenience and synergy in order to maintain harmonious relationships with customers.

Certification Regarding Responsibility to Consumers

As of December 2020, the Company has obtained several certifications related to Consumers, including the following.

1. Quality Management System according to SNI ISO 9001:2015
2. OHS Management System according to ISO 45001:2018
3. Environmental Management System according to ISO 14001:2015
4. ASME U, U2, S & R

Pendahuluan
Preliminary

Klas Kinerja 2020
2020 Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human resources

Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK

Corporate Social Responsibility Related to suppliers

Perseroan berkomitmen proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara profesional dan transparan. Komitmen untuk terciptanya proses pengadaan barang dan jasa yang profesional dan transparan tersebut tertuang dalam prosedur No. QP-2300-01 tentang Prosedur Pengadaan Barang dan QP-2300-02 Prosedur Pengadaan Jasa tanggal 4 September 2020.

The Company is committed to the process of procuring goods and services in a professional and transparent manner. The commitment to create a professional and transparent procurement process for goods and services is stated in procedure no. QP-2300-01 regarding Procedures for Procurement of Goods and QP-2300-02 Procedures for Procurement of Services dated September 4, 2020.

Target Kegiatan

Tujuan dan target dari penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa BBI adalah sebagai berikut:

1. Menjamin terselenggaranya pelaksanaan proses perolehan kontrak pengadaan barang dan jasa sehingga memenuhi asas optimalisasi, efisiensi (murah), efektif (tepat sasaran) dan memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan/Good Corporate Governance (GCG) yang baik serta menghasilkan barang dan jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.
2. Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik.

Activity Target

The objectives and targets of implementing BBI's goods and services procurement procedures are as follows:

1. Ensuring the implementation of the procurement process for the procurement of goods and services so that it meets the principles of optimization, efficiency (cheap), effective (right on target) and meets the principles of Good Corporate Governance (GCG) as well as produces goods and services that are good right quality, quantity, time, cost, location and provider.
2. Realizing procurement that produces value for money in a flexible and innovative way but remains competitive, transparent, accountable based on good procurement ethics.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero). sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Adanya proses kualifikasi dan evaluasi kinerja vendor serta pembinaan
3. Peningkatan penggunaan Produksi barang/jasa dalam negeri (TKDN) yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing.
4. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan

Activity Implementation

1. Carry out the process of procurement of goods and services within PT Boma Bisma Indra (Persero). in accordance with applicable procedures.
2. There is a process of qualification and evaluation of vendor performance as well as coaching
3. Increasing the use of domestic production of goods/services (TKDN) with the aim of expanding job opportunities and the domestic industrial base in order to increase economic resilience and competitiveness.
4. Simplification of provisions and procedures

- keputusan dalam pengadaan barang/jasa.
5. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing unit kerja/biro sebagai proses transparansi kegiatan pengadaan.
 6. Menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

to speed up the process of taking.

5. Public announcement of plans and implementation of procurement of goods/services in each work unit/bureau as a process of transparency of procurement activities.
6. Maintain the confidentiality of the documents for the procurement of goods/services which by their nature must be kept confidential to prevent irregularities in the procurement of goods/services.

Dampak Kegiatan CSR terhadap Pemasok

1. Efektivitas proses pengadaan dapat tercapai, spesifikasi dan kebutuhan barang dan jasa untuk operasi tepat guna.
2. Efisiensi pengadaan dapat tercapai. Harga yang dikontrak merupakan harga terbaik. Dengan spesifikasi sesuai kebutuhan.
3. Kepatuhan proses kegiatan pengadaan yang sesuai prosedur dan peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sanggah dan rework yang berdampak besar di lokasi pekerjaan/proyek.
4. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di sekitar lokasi proyek.
5. Pelaksanaan pengadaan tidak diskriminatif/adil sehingga memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Impact of CSR Activities on Suppliers

1. The effectiveness of the procurement process can be achieved, the specifications and requirements of goods and services for proper operation.
2. Procurement efficiency can be achieved. The contracted price is the best price. With specifications as needed.
3. Compliance with the process of procurement activities in accordance with existing procedures and regulations. This can be seen from the absence of objections and reworks which have a major impact on the work/project location.
4. The procurement of goods/services can be carried out by providers of goods/services that meet certain requirements/criteria based on provisions and procedures including Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Small and Medium Industries (IKM) around the project site.
5. The implementation of procurement is not discriminatory/fair so that it provides equal treatment for all potential providers and does not lead to providing benefits to certain parties.





08

LAPORAN KEUANGAN AUDIT 2020

Audited Financial Report

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

***PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY***

*Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019*

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2020 and 2019</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes In Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to The Consolidated Financial Statements</i>



PT Boma Bisma Indra (Persero)

KANTOR PUSAT Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph. +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686 | corporate@ptbbi.co.id | www.ptbbi.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANGTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

- | | | |
|--------------------------|--|--------------------|
| 1. Nama : | Yoyok Hadi Satriyono | Name 1. |
| Alamat Kantor : | Jl KHM Mansyur No 229 Surabaya | Office Address |
| Alamat Domisili sesuai : | Prima Lingkar Asri B3 No. 8 | Domicile as stated |
| KTP atau Identitas : | Jakarta | in ID Card |
| Nomor Telepon : | 081-282-474-626 | Phone Number |
| Jabatan : | Direktur Utama / President Director | Position |
| 2. Nama : | Moch Agus Budiyo | Name 2. |
| Alamat Kantor : | Jl KHM Mansyur No 229 Surabaya | Office Address |
| Alamat Domisili sesuai : | Taman Pinang Indah D2 / 28 | Domicile as stated |
| KTP atau Identitas : | Sidoarjo | in ID Card |
| Nomor Telepon : | 081-552-940-07 | Phone Number |
| Jabatan : | Direktur Operasional dan Pemasaran /
Director of Operations and Marketing | Position |

Menyatakan bahwa:

State that:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Boma Bisma Indra (Persero) dan Entitas Anak (Grup).
- Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup.

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Boma Bisma Indra (Persero) and Subsidiary (Group).
- The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- All information contained in the consolidated financial statements of the Group are complete and correct.
 - The consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect information or material facts and nor do they omit material information or facts.
- We are responsible for the Group's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration which has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors
Surabaya, 29 Desember 2021 / December 29, 2021



Yoyok Hadi Satriyono

Direktur Utama /
President Director

Moch Agus Budiyo

Direktur Operasional dan Pemasaran /
Director of Operation and Marketing

Balance Business Innovation

DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAAN & SERVICES | Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686
DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI | Jl. Imam Bonjol 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptbbipas.com
KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12820 | Ph +62.21.50209066



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/ Number: 00048/3.0310/AU.1/04/0500-1/1/XII/2021

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

RSM Indonesia
SOHO SKYLOFT
Unit 1888-1898
Ciputra World Surabaya
Jl. Mayjen Sungkono No. 89
Surabaya - 60224
T +62 31 9953 3999, +62 31 9953 3333
F +62 31 9953 2121

www.rsm.id

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Boma Bisma Indra (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Boma Bisma Indra (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Boma Bisma Indra (Persero) and its subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Boma Bisma Indra (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Laporan keuangan konsolidasian terlampir disusun dengan asumsi Perusahaan akan terus beroperasi secara berkelanjutan. Kami membawa perhatian Saudara pada Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian, bahwa pada tahun 2020, Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp73.458.456.772 dan akumulasi defisit pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp684.145.308.831 atau (201%) dari modal disetor. Disamping itu, rasio likuiditas Perusahaan sebesar 60%, dimana jumlah aset lancar Perusahaan sebesar Rp366.123.737.812 tidak cukup untuk menutupi kewajiban lancar Perusahaan sebesar Rp613.619.035.720. Kondisi ini bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 36, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana Manajemen untuk tindakan dimasa depan dalam menghadapi kondisi di atas telah dijelaskan dalam Catatan 36. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dilakukan atas ketidakpastian tersebut di atas. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Boma Bisma Indra (Persero) and its subsidiary as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

The accompanying consolidated financial statements have been prepared assuming that the Company will continue to operate as a going concern. We bring your attention to Note 36 to the consolidated financial statements, in year 2020, The Company experienced a loss amounted to Rp73,458,456,772 and accumulated deficit as of December 31, 2020 amounted to Rp684,145,308,831 or (201%) of the paid-in capital. In addition, the Group's liquidity ratio is 60%, where the Company's total current assets amounted to Rp366,123,737,812 are not sufficient to cover the Company's current liabilities amounted to Rp613,619,035,720. These conditions along with other matters as described in Note 36, indicate the presence of a material uncertainty that may cause significant doubt on the Company's ability to maintain its going concern. Management's plans in regard to these matters are also described in Note 36 to the financial statements. The consolidated financial statements do not include any adjustments that might result from the outcome of this uncertainty. Our opinion is not modified in this regards.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Hal lain

Laporan keuangan konsolidasian PT Boma Bisma Indra (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tertanggal 7 Desember 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2019.

Other matter

The consolidated financial statements of PT Boma Bisma Indra (Persero) and its subsidiary as of and for the year then ended December 31, 2019 were audited by other independent auditor whose report dated December 7, 2021 expressed an unmodified opinion with the emphasis of matters paragraph regarding restatement of the 2019 consolidated financial statements.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Endang Pramuwati

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0500/
Public Accountant License Number: AP.0500

Surabaya, 29 Desember 2021/ December 29, 2021



**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	2020 Rp	2019 *) Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3	41,892,570,344	15,166,334,047	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha				Accounts Receivable
Pihak Berelasi	4, 6	13,931,041,539	35,070,373,368	Related Parties
Pihak Ketiga	4	19,587,898,973	83,299,410,026	Third Parties
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja				Gross Amount Due from Customers
Pihak Berelasi	5, 6	68,110,297,939	63,209,934,745	Related Parties
Pihak Ketiga	6	10,631,620,849	9,822,283,601	Third Parties
Piutang Lain-lain		52,852,438	52,852,438	Other Receivables
Persediaan	7	112,387,375,264	61,940,793,131	Inventories
Pajak Dibayar di Muka	25a	42,313,811,349	69,539,442,397	Prepaid Taxes
Uang Muka	8	57,216,269,117	59,213,581,796	Advance
Jumlah Aset Lancar		366,123,737,812	397,315,005,549	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	9	2,255,530,526	2,337,082,235	Restricted Cash
Properti Investasi	10	65,522,506,669	48,678,500,000	Investment Properties
Aset Tetap	11	457,284,282,300	326,041,100,800	Fixed Assets
Aset Hak-Guna	12	1,429,829,504	--	Right-of-Use Assets
Aset Takberwujud	13	--	653,522,003	Intangible Assets
Aset Pajak Tangguhan	25d	14,952,506,818	11,269,637,675	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	14	8,798,064,384	8,824,707,410	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		550,242,720,201	397,804,550,123	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		916,366,458,013	795,119,555,672	TOTAL ASSETS

*) Reklasifikasi (Catatan 41)

*) As Reclassified (Note 41)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	2020 Rp	2019 *) Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha				Accounts Payable
Pihak Berelasi	6, 15	28,059,036,907	23,168,971,947	Related Parties
Pihak Ketiga	15	96,791,563,784	106,407,245,864	Third Parties
Utang Bank				Bank Loans
Pihak Berelasi	6, 16	84,139,893,303	68,725,814,377	Related Parties
Pihak Ketiga	16	4,358,400,000	7,100,000,000	Third Parties
Uang Muka Penjualan				Deposits on Sales
Pihak Berelasi	6, 17	111,351,277,532	59,547,033,855	Related Parties
Pihak Ketiga	17	27,121,995,128	24,134,242,397	Third Parties
Utang Pajak	25b	73,538,409,659	81,309,400,813	Tax Payable
Beban Akrua	18	133,192,713,677	100,165,191,643	Accrued Expenses
Utang Lain-lain				Other Accounts Payable
Pihak Berelasi	6, 19	13,080,012,440	10,793,783,923	Related Parties
Pihak Ketiga	19	25,766,125,272	30,242,949,809	Third Parties
Bagian Jangka Pendek dari				Current Portion of
Pendapatan Diterima di Muka	20	2,962,142,208	2,962,142,208	Unearned Revenue
Utang Dana Kreditur Lainnya	6, 21	5,132,702,576	550,000,000	Other Creditors Debts
Utang Bank	22	808,309,521	706,765,401	Bank Loans
Liabilitas Sewa	23	987,990,120	--	Lease Liability
Utang Pembiayaan	24	416,440,852	231,925,820	Finance Liability
Liabilitas Imbalan Kerja	26	5,912,022,741	4,743,456,982	Employee Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		613,619,035,720	520,788,925,039	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Pendapatan Diterima di Muka	20	46,653,739,888	49,615,882,096	Unearned Revenue
Utang Dana Kreditur Lainnya	6, 21	96,571,349,098	101,504,051,674	Other Creditors Debts
Utang Bank	22	2,769,648,931	3,577,958,452	Long-Term Bank Loans
Liabilitas Sewa	23	721,407,511	--	Lease Liability
Utang Pembiayaan	24	54,577,366	279,806,025	Finance Liability
Liabilitas Imbalan Kerja	26	31,116,273,478	31,665,641,759	Employee Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		177,886,996,272	186,643,340,006	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		791,506,031,992	707,432,265,045	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Dasar 1.300.000 Saham -				Authorized Capital 1,300,000 Shares -
Nilai Nominal Rp1.000 per Saham				Nominal Value of Rp1,000 per Share
Saham yang belum Ditempatkan				The Shares that have not been Issued
dan Disetor 959.084 Saham	27	340,916,000,000	340,916,000,000	and Paid up are 959,084 Shares
Cadangan Likuidasi	27	32,743,977	32,743,977	Liquidation Reserves
Modal Hibah	27	22,808,429,113	22,808,429,113	Grant Capital
Penghasilan Komprehensif Lain		445,295,420,488	296,155,791,657	Other Comprehensive Income
Defisit		(684,145,308,831)	(572,176,080,931)	Deficit
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan				Total Equity Attributable to
Kepada Pemilik Entitas Induk		124,907,284,747	87,736,883,816	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	28	(46,858,726)	(49,593,189)	Non Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		124,860,426,021	87,687,290,627	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		916,366,458,013	795,119,555,672	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Reklasifikasi (Catatan 41)

*) As Reclassified (Note 41)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	2020 Rp	2019 *) Rp	
Penjualan	29	241,328,077,160	266,504,373,741	Revenue
Beban Pokok Penjualan	30	(226,874,728,922)	(283,334,713,201)	Cost of Goods Sale
LABA (RUGI) BRUTO		14,453,348,238	(16,830,339,460)	GROSS PROFIT (LOSS)
Beban Penjualan	31	(3,818,738,148)	(5,173,631,459)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	32	(69,569,055,615)	(31,452,045,694)	General and Administrative Expenses
RUGI USAHA		(58,934,445,525)	(53,456,016,613)	OPERATING LOSS
Beban Keuangan	33	(10,993,923,866)	(5,740,068,887)	Financial Cost
Pendapatan Lain-lain - Bersih	34	4,112,270,491	11,105,901,240	Others Income (Expense) - Net
RUGI SEBELUM PAJAK		(65,816,098,900)	(48,090,184,260)	LOSS BEFORE TAX
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	25c	(7,642,357,872)	4,989,941,735	Income Tax Benefit (Expenses)
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN		(73,458,456,772)	(43,100,242,525)	LOSS FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos - Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Items That Will Not Be Reclassified To Profit or Loss
Kerugian Aktuarial atas Program Imbal Kerja Pasti	26	(1,665,440,437)	(3,964,031,142)	Actuarial Loss of Defined Benefit Plan
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Terkait		(979,876,748)	991,007,788	Related Income Taxes Benefit (Expenses)
Surplus Revaluasi Aset Tetap Tanah dan Properti Investasi	10, 11	151,788,175,861	--	Surplus Revaluation of Land Fixed Asset and Investment Properties
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		149,142,858,676	(2,973,023,354)	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN / RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		75,684,401,904	(46,073,265,879)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan pada:				Profit for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		(73,458,377,067)	(43,119,677,785)	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali		(79,705)	19,435,260	Non-Controlling Interest
Jumlah		(73,458,456,772)	(43,100,242,525)	Total
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan pada:				Comprehensive Income (Loss) Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		75,681,251,764	(46,091,196,938)	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali		3,150,140	17,931,059	Non-Controlling Interest
Jumlah		75,684,401,904	(46,073,265,879)	Total

*) Reklasifikasi (Catatan 41)

*) As Reclassified (Note 41)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Distribusikan pada Pemilik Entitas Induk / Attributable to Owners of the Parent Entity										
Catatan/ Note	Modal Saham/ Share Capital Rp	Cadangan Likuidasi/ Liquidation Reserves Rp	Modal Hibah/ Grant Capital Rp	Kerugian Aktuarial atas Program Imbalan Kerja Pasti/ Actuarial Loss of Defined Benefit Plan Rp	Surplus Revaluasi Aset Tetap dan Properti Investasi/ Surplus of Revaluation Fixed Assets and Investment Properties Rp	Jumlah/ Total Rp	Akumulasi Rugi/ Accumulated Loss Rp	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest Rp	Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp	
Saldo Per 31 Desember 2018	340,916,000,000	32,743,977	22,808,429,113	(16,715,095,832)	315,842,406,642	299,127,310,810	(529,056,403,146)	(67,524,248)	133,760,556,506	Balance as of December 31, 2018
Rugi Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	--	(43,119,677,785)	19,435,260	(43,100,242,525)	Loss for the Year
Pendapatan Komprehensif Lain	--	--	--	(2,971,519,153)	--	(2,971,519,153)	--	(1,504,201)	(2,973,023,354)	Comprehensive Income for the Year
Saldo Per 31 Desember 2019	340,916,000,000	32,743,977	22,808,429,113	(19,686,614,985)	315,842,406,642	296,155,791,657	(572,176,080,931)	(49,593,189)	87,687,290,627	Balance as of December 31, 2019
Penyesuaian Sehubungan										Adjustment in Relation to
Penerapan PSAK 71	2c	--	--	--	--	--	(35,675,077,319)	(106,796)	(35,675,184,115)	Implementation of PSAK 71
Penerapan PSAK 72	2c	--	--	--	--	--	(2,873,013,514)	(308,881)	(2,873,322,395)	Implementation of PSAK 72
Penerapan PSAK 73	2c	--	--	--	--	--	37,240,000	--	37,240,000	Implementation of PSAK 73
Saldo 1 Januari 2020 Setelah Dampak Penerapan PSAK	340,916,000,000	32,743,977	22,808,429,113	(19,686,614,985)	315,842,406,642	296,155,791,657	(610,686,931,764)	(50,008,866)	49,176,024,117	Balance as of January 1, 2020 After Impact of Implementation of PSAK
Rugi Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	--	(73,458,377,067)	(79,705)	(73,458,456,772)	Loss for the Year
Kerugian Aktuarial atas Imbalan Kerja	26	--	--	(2,645,414,028)	--	(2,645,414,028)	--	96,843	(2,645,317,185)	Actuarial Loss of Defined Benefit Plan
Surplus Revaluasi Aset Tetap dan Properti Investasi	10, 11	--	--	--	151,785,042,859	151,785,042,859	--	3,133,002	151,788,175,861	Surplus of Fixed Assets and Investment Properties Revaluation
Saldo Per 31 Desember 2020	340,916,000,000	32,743,977	22,808,429,113	(22,332,029,013)	467,627,449,501	445,295,420,488	(684,145,308,831)	(46,858,726)	124,860,426,021	Balance as of December 31, 2020

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	2020 Rp	2019 Rp	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari Pelanggan		320,615,414,984	343,458,496,551	Cash Receipts from Customers
Pembayaran kepada Pihak Ketiga		(288,845,958,969)	(355,302,405,836)	Payment to Third Parties
Pembayaran Denda Klaim	34, 42	(2,103,657,163)	--	Penalty Claim Payment
Pembayaran Bunga		(8,528,569,943)	(8,406,168,352)	Interest Payment
Pembayaran Pajak		(6,299,517,510)	(5,753,362,912)	Tax Payment
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)				Net Cash Provided by (Used In)
Aktivitas Operasi		14,837,711,399	(26,003,440,549)	Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
KEGIATAN INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Pembelian Aset Tetap		(36,475,000)	(386,528,384)	Purchase of Fixed Assets
Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(36,475,000)	(386,528,374)	Net Cash Used In Investing Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
KEGIATAN PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Utang Bank	42	49,572,428,892	75,657,736,415	Receipt of Bank Loans
Pembayaran Utang Bank	42	(37,606,715,367)	(47,271,660,269)	Payment to Bank Loans
Penerimaan Utang Pembiayaan	42	2,500,000,000	612,266,669	Receive of Financing Debt
Pembayaran Utang Pembiayaan	42	(2,540,713,627)	(100,554,824)	Payment to Financing Debt
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		11,924,999,898	28,897,787,991	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH				NET INCREASE IN CASH
KAS DAN SETARA KAS		26,726,236,297	2,507,819,068	AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS				CASH AND CASH EQUIVALENTS
PADA AWAL TAHUN		15,166,334,047	12,658,514,979	AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS				CASH AND CASH EQUIVALENTS
PADA AKHIR TAHUN		41,892,570,344	15,166,334,047	AT END OF THE YEAR
Kas dan Setara Kas terdiri dari:				Cash and Cash Equivalents are as follows:
Kas	3	344,882,430	747,809,999	Cash
Bank	3	39,642,059,314	14,389,524,048	Bank
Deposito	3	1,905,628,600	29,000,000	Time Deposits
Jumlah		41,892,570,344	15,166,334,047	Total

Lihat Catatan 42 atas Laporan Keuangan untuk Pengungkapan
Informasi Tambahan Arus Kas

See Note 42 to the Financial Statements for the
Supplemental Disclosures of Cash Flow Information

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum

1. General

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Boma Bisma Indra (Persero) didirikan pada tahun 1971 dan berkantor pusat di Jalan Ngagel 155-157 Surabaya, merupakan *merger* dari 3 Perusahaan Negara (PN), yaitu: PN. Boma, PN. Bisma dan PN. Indra. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1989, PT Boma Bisma Indra (Persero) ditetapkan sebagai salah satu industri strategis di bawah pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), yang mendapat misi tambahan untuk berperan sebagai wahana transformasi industri melalui tahapan alih teknologi yang telah menjadi kebijakan nasional. Kemudian pada tahun 1998 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 35/1998 dan Instruksi Presiden No. 15/1998 tentang Pembentukan Perusahaan PT Pakarya Industri (Persero), sehingga PT Boma Bisma Indra (Persero) mulai tahun 1998 berubah status menjadi anak perusahaan PT Pakarya Industri (Persero).

Pada tahun 1999, terbit Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. C-18.884 HT 01.04 tahun 1999 tanggal 17 November 1999 mengenai pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar PT Pakarya Industri (Persero), secara resmi telah berubah menjadi PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) atau PT BPIS (Persero).

Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Boma Bisma Indra (Persero) dan pembubaran PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero), yang menetapkan Negara Republik Indonesia mengambil alih seluruh penyertaan modal PT BPIS pada PT Boma Bisma Indra (Persero) sehingga saham yang diambil alih menjadi kekayaan negara, yang dikelola oleh Menteri Keuangan, serta menghapus Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1998.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 41 tanggal 22 Oktober 2020 oleh Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH., Notaris di Surabaya mengenai perubahan jenis saham. Perubahan tersebut telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak

a. Establishment and General Information

PT Boma Bisma Indra (Persero) was established in 1971 and headquartered at Jalan Ngagel 155-157 Surabaya, is a merger of 3 State Companies (PN), namely: PN. Boma, PN. Bisma and PN. Indra. Based on Presidential Decree No. 44 of 1989, PT Boma Bisma Indra (Persero) was designated as one of the strategic industries under the management, guidance and supervision of the Strategic Industry Management Agency (BPIS), which received an additional mission to play a role as a vehicle for industrial transformation through the stage of technology transfer which has become a national policy. Then in 1998 the Government established Government Regulation No. 35/1998 and Presidential Instruction No. 15/1998 concerning the Formation of Companies PT Pakarya Industri (Persero), so that PT Boma Bisma Indra (Persero) since 1998 changed its status to become a subsidiary of PT Pakarya Industri (Persero).

In 1999, the Decree of the Minister of Law and Legislation of the Republic of Indonesia was issued No. C-18.884 HT 01.04 of 1999 dated November 17, 1999 regarding the ratification of the amendments to the Articles of Association of PT Pakarya Industri (Persero), officially changed to PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) or PT BPIS (Persero).

Furthermore, with the issuance of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 52 of 2002 dated September 23, 2002 concerning the Inclusion of State Capital of the Republic of Indonesia into the share capital of PT Boma Bisma Indra (Persero) and the dissolution of PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero), which stipulates the Republic of Indonesia to take over all capital participation PT BPIS at PT Boma Bisma Indra (Persero) so that the shares taken over become state assets, which are managed by the Minister of Finance, as well as removing Government Regulation No. 35 of 1998.

The Company's Articles of Association have been amended for several times, the latest amendment under Deed No. 41 dated October 22, 2020 of Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH., Notary in Surabaya, regarding the changes in the types of share. Such amendment was received acknowledged by the

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Asasi Manusia melalui surat keputusan No.
AHU-AH.01.03-0401105 tanggal 23 Oktober
2020.

b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang industri konversi energi, industri permesinan, sarana dan prasarana industri dan agro industri, jasa dan perdagangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Pembuatan Motor Diesel;
- Pembuatan Desain dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Baja;
- Jasa Perakitan;
- Jasa Kerekayasaan;
- Jasa Manajemen dan Konsultasi;
- Jasa Pemeliharaan dan Reparasi;
- Jasa Pengukuran dan Kalibrasi;
- Perdagangan Barang dan Jasa Hasil Produk Sendiri maupun Pihak Lain.

Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan memiliki 3 (tiga) Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Peralatan Industri (Divisi PI)
Mengelola semua kegiatan operasi yang mencakup permesinan dan pengerjaan di pabrik untuk menghasilkan produk. Kegiatan usaha ini adalah Pabrikasi *Steel Structure, Heat Exchanger, Pressure Vessel, Condensor, Shop Fabrication Tank, Hydro Mechanical* dan *Equipment Handling*. Di samping itu, kegiatan usaha yang dilakukan meliputi aktivitas Jasa *Casting* di bidang pemeliharaan untuk peralatan pabrik gula dimana PT Boma Bisma Indra (Persero) sampai saat ini menjadi rekanan tetap pabrik gula di seluruh Indonesia.
2. Divisi Manajemen Proyek (Divisi MP)
Mengelola kegiatan proyek dan operasi lapangan. Kegiatan usaha ini adalah menangani proyek sesuai scope pekerjaan dari customer yang dapat disebut pula sebagai *EPC (Equipment Procurement Construction)* dalam bidang Energi seperti:

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Ministry of Law and Human Rights in its Decision
Letter No. AHU-AH.01.03-0401105 dated
October 23, 2020.

b. The Purpose and Objective

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the purpose and objective of establishment of the Company is to carry out business in the energy conversion industry, machinery industry, industrial and agro-industrial facilities and infrastructure, services and trade as well as optimizing the use of resources of the Company to produce high quality goods and/or services and strong competitiveness to gain profit.

In order to achieve the above objectives and purposes, the Company may engaged in following business activities:

- Manufacture of Diesel Motor;
- Design and Implementation of Steel Construction Works;
- Assembly Services;
- Engineering Services;
- Management and Consulting Services;
- Maintenance and Repair Services;
- Measurement and Calibration Services;
- Trade in Goods and Services of Own Products and Other Parties.

In providing its services, the Company has 3 (three) division are as follows:

1. Industrial Equipment Division (PI Division)
Managing all operational activities that include machining and working in the factory to produce products. This business activity is Manufacturing *Steel Structure, Heat Exchanger, Pressure Vessel, Condensor, Shop Fabrication Tank, Hydro Mechanical* and *Equipment Handling*. In addition, the business activities carried out include *Casting Services* activities in the maintenance sector for sugar factory equipment where PT Boma Bisma Indra (Persero) has been a permanent partner in sugar factories throughout Indonesia until now.
2. Project Management Division (MP Division)
Manage project activities and field operations. This business activity is to handle projects according to the scope of work of customers which can also be referred to as *EPC (Equipment Procurement Construction)* in the energy sector such as:

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Power Plant, Minyak dan Gas serta Peralatan Industri seperti Cement Mill, Pabrik Kertas, Pabrik Gula, Pertambangan Public Infrastructure seperti Jembatan dan Tower. Juga dalam bidang Bisnis Agro yang berbasis teknologi seperti Pabrik CPO (Cruded Palm Oil), Incenerator, juga termasuk pekerjaan Machining.

3. Divisi Diesel

Kegiatan usaha ini adalah menangani proyek sesuai scope pekerjaan dari pelanggan yang terdiri dari *Bare Engine, Diesel Pembangkit, Diesel Marine dan Gas Engine serta Spare Part.*

c. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020
Komisaris Utama	Masrokan
Komisaris	Jumain Appe
Direktur Utama	Yoyok Hadi Satriyono
Direktur Operasional dan Pemasaran	M. Agus Budiyanto

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara atas Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Boma Bisma Indra (Persero) No. 34 tanggal 22 Juli 2020, Para Pemegang Saham memutuskan:

- Memberhentikan dengan hormat Saudara Arman Hakim Nasution sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan PT Boma Bisma Indra.
- Mengangkat Saudara Masrokan sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan PT Boma Bisma Indra.
- Bagi anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
- Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan PT Boma Bisma Indra dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan ini dalam bentuk autentik di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Power Plants, Oil and Gas and Industrial Equipment such as Cement Mill, Paper Mill, Sugar Factory, Mining Public Infrastructure such as Bridge and Tower. Also in the technology-based Agro Business field such as CPO (Cruded Palm Oil) Mills, Incenerator, also includes Machining jobs.

3. Diesel Division

This business activity is to handle projects according to the scope of work of customers that consist of Bare Engine, Diesel Generator, Diesel Marine and Gas Engine and Spare Part

c. Board of Commissioners and Directors

The Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company on December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2019
Arman Hakim N	President Commissioner
Jumain Appe	Commissioner
Yoyok Hadi Satriyono	President Director
M. Agus Budiyanto	Director of Operations and Marketing

Based on the Deed of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises according to Annual General Meeting of PT Boma Bisma Indra (Persero) No. 34 dated July 22 2020, the Shareholders decided:

- To honorably dismiss Mr. Arman Hakim Nasution as President Commissioner of the Company PT Boma Bisma Indra.
- Appointed Mr. Masrokan as President Commissioner of the Company PT Boma Bisma Indra.
- For Board of Commissioners members who are appointed as referred to in the second Dictum who are still holding another positions which are prohibited by statutory regulations from serving concurrently with the position of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, thus who is concerned must resign or being laid-off from that position.
- To authorize the Board of Directors of the Company PT Boma Bisma Indra with the substitution rights to declare this decision in an authentic form in the presence of Notary or authorized official.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Kompensasi imbalan kerja jangka pendek yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.844.088.039 dan Rp3.126.032.163.

PT Boma Bisma Indra (Persero) berkedudukan di Jl. KHM Mansyur 229, Surabaya.

Jumlah karyawan Perusahaan dan Entitas anak ("Grup") pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 427 orang dan 447 orang (tidak diaudit).

d. Entitas Anak

Berikut ini adalah rincian entitas anak yang dikonsolidasi:

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business
Penyertaan Langsung/ Direct Investments		
PT Bromo Steel Indonesia	Pasuruan	Jasa Pelaksana Konstruksi/ Construction Services

PT Bromo Steel Indonesia

PT Bromo Steel Indonesia semula bernama PT Boma Stork yang berdiri sejak tahun 1865 dengan nama "De Bromo NV" yang tujuan utamanya adalah untuk memproduksi pabrik-pabrik gula. Pada tahun 1958, "De Bromo NV" dinasionalkan atau diambil alih Pemerintah Republik Indonesia dan menjadi Perusahaan Negara dengan nama PN Boma.

Pada tahun 1971, PN Boma, PN Bisma dan PN Indra bergabung menjadi satu dan menjadi perusahaan dengan nama PT Boma Bisma Indra (BBI). PT BBI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam Dasar Departemen Perindustrian. Pada tahun 1974, unit Boma melepaskan diri dari manajemen PT Boma Bisma Indra, untuk kemudian bekerjasama dengan Stork-Werkspoor Sugar BV. Hangelo Netherland, PT Masayu dan PT Bina Usaha Indonesia, sehingga namanya menjadi PT Boma Stork dengan akta notaris No. 47 tertanggal 10 April 1974.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Key management personnels are the Company's Boards of Commissioners and Directors. Short-term compensation paid to the key management personnel of the Company for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp2,844,088,039 and Rp3,126,032,163, respectively.

PT Boma Bisma Indra (Persero) is domiciled at Jl. KHM Mansyur 229, Surabaya.

The number of Company and Subsidiary's ("Group") employees on December 31, 2020 and 2019 is 427 employees and 447 employees, respectively (unaudited).

d. Subsidiary

The following is the details of consolidated subsidiary:

Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
2020	2019	2020	2019
%	%	Rp	Rp

99.99	99.40	75,492,623,821	49,178,559,717
-------	-------	----------------	----------------

PT Bromo Steel Indonesia

PT Bromo Steel Indonesia was originally named PT Boma Stork which was established in 1865 under the name "De Bromo NV" whose main purpose is to produce sugar factories. In 1958, "De Bromo NV" was nationalized or taken over by the Government of the Republic of Indonesia and became a state company under the name PN Boma.

In 1971, PN Boma, PN Bisma and PN Indra merged into one and became a company under the name PT Boma Bisma Indra (BBI). PT BBI is a State-Owned Enterprise (BUMN) under the supervision of the Directorate General of Basic Metal Industry, Ministry of Industry. In 1974, the Boma unit broke away from the management of PT Boma Bisma Indra, to then collaborate with Stork-Werkspoor Sugar BV. Hangelo Netherland, PT Masayu and PT Bina Usaha Indonesia, so that the name became PT Boma Stork with notarial deed No. 47 dated April 10, 1974.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Sejak tanggal 1 November 1989 sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Boma Stork, semua saham PT Boma Stork dibeli seluruhnya 100% oleh PT Boma Bisma Indra, yang namanya PT Boma Stork menjadi anak perusahaan PT Boma Bisma Indra serta mempunyai manajemen sendiri. Kemudian PT Boma Stork menjadi PT Bromo Steel Indonesia sesuai SK Menteri Kehakiman RI No. C2-6175.HT.04-TH'97 tertanggal 17 Juli 1997 yang pada saat itu masih bergerak di bidang perusahaan *General Contractor, Industrial Engineering and Manufacturing, Pressure Vessel, Steam Boiler*, pabrik gula, pabrik minyak kelapa sawit, kopi, teh, coklat, karet dan lain-lain.

Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bromo Steel No. 54 tanggal 29 September 2020 dari Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Notaris di Surabaya. Perubahan tersebut mencakup persetujuan peningkatan Modal Dasar PT Bromo Steel Indonesia yang semula Rp259.375.000 yang terdiri dari 1.000 saham menjadi sebesar Rp51.875.000.000 yang terdiri dari 200.000 lembar saham. Perubahan Anggaran Dasar telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0067018.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 September 2020.

PT Bromo Steel Indonesia berkedudukan di Jl. Laks. RE. Martadinata 18-20, Pasuruan - 67113.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Since November 1, 1989 in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders of PT Boma Stork, all shares of PT Boma Stork were purchased 100% by PT Boma Bisma Indra, whose name PT Boma Stork became a subsidiary of PT Boma Bisma Indra and has its own management. Then PT Boma Stork became PT Bromo Steel Indonesia in accordance with the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-6175.HT.04-TH'97 dated July 17, 1997 which at that time was still engaged in *General Contractor, Industrial Engineering and Manufacturing, Pressure Vessel, Steam Boiler*, sugar factories, palm oil factories, coffee, tea, chocolate, rubber and others.

The Articles of Association have been amended several times, the latest being the Deed No. 54 dated September 29, 2020 from Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Notary in Surabaya. The amendment includes an approval to increase the Authorized Capital of PT Bromo Steel Indonesia from Rp259,375,000 consisting of 1,000 shares to Rp51,875,000,000 consisting of 200,000 shares. Amendments to the Articles of Association have received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0067018.AH.01.02.TAHUN 2020 dated September 29, 2020.

PT Bromo Steel Indonesia is domiciled at Jl. Laks. RE. Martadinata 18-20, Pasuruan - 67113.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

2. Significant Accounting Policies

The following are the accounting policies adopted in preparing the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK - IAI).

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan
Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

**c. Pernyataan dan Interpretasi Standar
Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku
Efektif pada Tahun Berjalan**

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada/atau setelah 1 Januari 2020 yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";

**b. The Basis of Measurement and Preparation of
Financial Statements**

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

**c. New and Revised Statements and
Interpretation of Financial Accounting
Standards Effective in the Current Year**

The following are revision, amendments and adjustments Financial Accounting Standards (SAK) and interpretation of standard effectively applied for the year starting on/or after January 1, 2020, are as follows:

- PSAK 71: "Financial Instruments";
- PSAK 72: "Revenue from Contracts with Customers";
- PSAK 73: "Lease";
- PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract";
- Amendment of PSAK 15: "Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures";
- PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation";
- ISAK 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements";

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- ISAK 36: "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

- PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";
- PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- PSAK 102 (Revised 2019): "Accounting for Murabahah";
- ISAK 101: "Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership";
- ISAK 102: "Impairment on Murabahah Receivable";
- ISAK 36: "Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases";
- PPSAK 13: "Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting";
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform.

Except for the changes described below, the implementation of these standards does not result in substantial changes to the Group's accounting policies and has no material impact on the consolidated financial statements in the current period or the previous year.

PSAK 71: Financial Instruments

PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

In accordance with the transitional requirements on PSAK 71, the Group chose to apply retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Grup menerapkan model baru kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha dengan menggunakan pendekatan kolektif kepada pihak relasi dan pihak ketiga. Hal tersebut menyebabkan kenaikan provisi atas penurunan nilai piutang usaha yang diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

The Group applies a new model of expected credit losses for accounts receivable using collective approach to related parties and third parties. This increased the provision for impairment of accounts receivable which were recognised as an adjustment to the retained earnings as of January 1, 2020 is as follows:

1 Januari 2020/ January 1, 2020			
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menurut/ Allowance for Impairment Losses per PSAK 55 Rp	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menurut/ Allowance for Impairment Losses per PSAK 71 Rp	Penyesuaian Saldo Laba/ Adjustment to Retained Earnings Rp
Piutang Usaha	(99,793,747)	(42,971,619,292)	(42,871,825,545)
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja	--	(4,695,086,608)	(4,695,086,608)
Dampak Pajak Terkait	--	11,891,728,038	11,891,728,038
Jumlah	(99,793,747)	(35,774,977,862)	(35,675,184,115)

PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

PSAK 72: "Revenue from Contracts with Customers"

PSAK 72 replaces PSAK 23: "Revenue" and introduces 5 (five)-step model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

Grup menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

The Group applies PSAK 72 retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, berikut adalah dampak penyesuaian awal terhadap saldo 1 Januari 2020:

Based on the review that the Group has conducted on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages in PSAK 72, the following is the impact of the adjustment from initial implementation on balances on January 1, 2020:

1 Januari 2020/ January 1, 2020			
	Berdasarkan/ Based on PSAK 23 Rp	Berdasarkan/ Based on PSAK 72 Rp	Penyesuaian Saldo Laba/ Adjustment to Retained Earnings Rp
Penjualan	--	(11,338,322,395)	(11,338,322,395)
Harga Pokok Penjualan	--	8,465,000,000	8,465,000,000
Jumlah	--	(2,873,322,395)	(2,873,322,395)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa yang aset dasarnya bernilai rendah.

Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diperkenankan oleh standar:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- akuntansi sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa alternatif kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
- untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Dampak penerapan awal PSAK 73 terhadap saldo awal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

PSAK 73: Leases

PSAK 73 replaces PSAK 30: "Leases" which requires the Group as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases where the underlying assets are low value.

The Group has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments which are discounted using the Group's incremental loan interest rate as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liabilities adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in connection with a lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019.

In applying PSAK 73 for the first time, the Group has used the following practical expedients permitted by the standard:

- apply a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
- the accounting for operating leases with a remaining lease term of less than 12 months from January 1, 2020 as short-term lease;
- exclusive initial direct costs for the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application;
- hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease;
- not to separate non-lease components from lease components on lease by class of underlying assets; and
- rely on the assessment of whether leases are onerous based on PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" immediately before the date of initial application as an alternative to perform an impairment review.

The impact of the initial implementation of PSAK 73 on the beginning balance on January 1, 2020, is as follows:

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	1 Januari 2020/ January 1, 2020			
	Berdasarkan/ <i>Based on</i> PSAK 30 Rp	Berdasarkan/ <i>Based on</i> PSAK 73 Rp	Penyesuaian Saldo Laba/ <i>Adjustment to</i> Retained Earnings Rp	
Sewa	--	37,240,000	37,240,000	Lease
Jumlah	--	37,240,000	37,240,000	Total

d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial di mana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan entitas anak yang secara langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal di mana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh, untuk mencerminkan Posisi Keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan *non* pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan *non* pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan *non* pengendali di ekuitas dalam

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and subsidiary as described in Note 1d.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e. the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the *investee*).

The existence and effect of potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements include the results of operations, cash flows, assets and liabilities of the Company and its subsidiary directly controlled by the Company. Subsidiary are consolidated from the effective date of the acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until the end date of control.

A parent prepares consolidated financial statements using the same accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation, to reflect the Financial Position as a single business entity.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

laporan posisi keuangan konsolidasian,
terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas
induk pada entitas anak yang tidak
mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah
transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan
pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh
kepentingan *non* pengendali berubah, Grup
menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan
pengendali dan kepentingan *non*-pengendali
untuk mencerminkan perubahan kepemilikan
relatifnya dalam entitas anak.

Selisih antara jumlah di mana kepentingan
non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari
jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui
langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada
pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka
Grup:

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan *non*-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan *non* pengendali);
- c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners).

When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiary.

Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- a) *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b) *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c) *Recognizes the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- d) *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- e) *Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- f) *Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

e. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of primary economic environment in

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp14.105 dan Rp13.901 per 1 USD.

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

f. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - ii) memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 - iii) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and all of the subsidiary is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions.

At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e. middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp14,105 and Rp13,901 each 1 USD, respectively.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items and the translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

f. Transactions with Related Parties

Related parties are a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i) has control or joint control over the reporting entity;
 - ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i) The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii) Both entities are joint ventures of the same third party.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

- iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii) Entitas atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

g. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan dan menerbitkan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

- iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

- v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

- vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

- vii) A person identified in (a) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

- viii) The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

g. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability are not measured at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan untuk diperdagangkan atau yang ada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
- a. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang ada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - b. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
 - c. Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Accounting treatment before January 1, 2020

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) *Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- (ii) *Loans and Receivables*
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market other than:
- a. *Those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
 - b. *Those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
 - c. *Those for which the holder may recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.*

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or that are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value in recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets in derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Accounting treatment since January 1, 2020

At initial recognition, financial assets are classified in the three categories as follows: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
 - Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

- (ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")
Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

- (i) *Financial Assets Measured at Amortized Costs*
A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:
- The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
 - Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified as financial assets to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

- (ii) *Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")*
The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:
- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset; and*
 - the contractual terms of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, di mana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

- (iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI.

Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengakuan Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

- (iii) *Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")*
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. Gains or losses arising from changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Company may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI.

This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Accounting treatment before January 1, 2020

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (i) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (ii) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (iii) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the value are recognized in profit or loss.

- (ii) Other Financial Liabilities

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Accounting treatment since January 1, 2020

The Group shall classify all financial liabilities so that after initial recognition financial liabilities are measured at amortized cost, except:

- (i) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- (ii) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
- (iii) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

- a. Jumlah penyisihan kerugian dan
- b. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- (iv) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang tak terbatalakan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (i) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- (ii) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

- a. the amount of the loss allowance
- b. the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.
- (iv) Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (i) it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as 'an accounting mismatch') that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or
- (ii) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognized a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumed a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfer nor retains substantially all risks and rewards of ownership of the financial asset and has

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut. Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari
2020**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objek bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi sebagai pengakuan awal aset tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset.

If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continued to recognize the financial asset. The Group remove a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

***Impairment of Financial Assets
Accounting treatment before January 1, 2020***

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a Group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini dikurangi penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

For investment in equity instrument a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized.

The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Accounting Treatment since January 1, 2020

Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized cost.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition.

However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 month expected credit loss (stage 1) is recognized.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. nilai waktu uang; dan
- iii. informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. an unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. time value of money; and*
- iii. reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.*

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Company may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari nilai wajar melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or Group of financial assets of financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset of financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

Accounting Treatment before January 1, 2020

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing in the near. The Group shall not reclassify any financial instrument

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau keuangan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali setelah seluruh jumlah pokok diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan jika dan hanya jika, terjadi perubahan model bisnis.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Group intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investment, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Accounting Treatment since January 1, 2020

The Group can reclassify all its financial assets if and only if, a change in the business model.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through profit or loss, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan penyelesaian liabilitasnya secara simultan.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through other comprehensive income, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through profit or loss into fair value through other comprehensive income, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into fair value through profit or loss, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to sell off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengukuran dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikan input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset secara langsung menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

i. Tagihan Bruto dari Pemberi Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang yang berasal dari pekerjaan konstruksi yang dilakukan namun

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities either directly or indirectly (Level 2);*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

i. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents the receivable originated from construction work carried out but the work being carried out

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, di mana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (progres) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan. Selain itu, dalam tagihan bruto terdapat pekerjaan yang sudah dikerjakan tetapi belum dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan.

j. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang yang ditahan oleh pemberi kerja, yang akan dibayar setelah masa pemeliharaan berakhir. Piutang retensi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai.

k. Persediaan

Persediaan meliputi persediaan bahan baku dan bahan pembantu. Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah dan ditentukan dengan metode rata-rata (*averages method*). Pada tanggal neraca, nilai sisa persediaan ditetapkan berdasar hasil *stock opname*. Selisih wajar antara hasil *stock opname* persediaan dan administrasi dibuku sebagai beban/ pendapatan lain-lain.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan beban penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.

Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

is still in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billing.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statements of financial position date. In addition, the gross bill contains work that has not been stated in the minutes of completion of the work.

j. Retention Receivables

Retention receivables are receivables held by the customer, which will be paid after the maintenance period ends. Retention receivables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost less any accumulated impairment loss.

k. Inventories

Inventories include supplies of raw materials and supporting materials. Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower and determined using the averages method. At balance sheet date, the value of the remaining inventory is determined based on the results of stock taking. The fair difference between the results of inventory stock taking and administration is recorded as other expense/income.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and selling expenses.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs.

The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

I. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dan akumulasi kerugian penurunan nilai aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa selama masa manfaat aset tetap tersebut. Taksiran masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Bangunan	10 - 40
Kendaraan	3
Perabotan dan Peralatan Kantor	3 - 5
Mesin dan Peralatan	6 - 25

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan dalam jangka waktu 5 tahunan untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam bagian surplus revaluasi, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

I. Fixed Assets

Fixed assets is initially recognized at cost, which consists of the cost and additional costs that are directly attributable to bring the assets to the desired condition and location for the assets to be ready for use.

After initial recognition, fixed assets except land is stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses on property, plant and equipment.

Fixed assets, except land are depreciated using the straight line method with no residual value over their useful lives. The estimated useful lives of fixed assets are as follows:

	Penyusutan/ Depreciation (%)	
	2.50 - 10.00	Buildings
	33.30	Vehicles
	20.00 - 33.30	Furniture and Office Equipments
	4.00 - 16.67	Machinery and Equipments

Land is stated at revaluated amount, being the fair value at the date of revaluations, less subsequent accumulated impairment loss.

Revaluations are conducted regularly within a period of 5 years to ensure that the carrying amounts does not differ materially from that which would be determined using fair value at the reporting date.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such land is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus, except to the extent that it reserves a revaluation decrease on the same asset which was previously recognized in profit or loss and other comprehensive income, in this case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged.

A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such lands is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the properties revaluation reserve relating to a previous revaluation of such lands.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika, dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pengeluaran yang memenuhi kriteria aset tetap dengan nilai minimum Rp1.000.000 dikapitalisasi sebagai aset tetap. Sedangkan pengeluaran untuk aset termaksud yang nilainya kurang dari Rp1.000.000 dibebankan sebagai biaya dan dilaporkan pada laporan laba rugi pada periode terjadinya transaksi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan netto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

m. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai oleh grup untuk disewakan atau untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung untuk perolehan properti investasi.

Selanjutnya properti investasi diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan kecuali tanah yang tidak disusutkan.

Tanah, bangunan, dan prasarana yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif akan direvaluasi secara tahunan sedangkan aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan akan

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Maintenance and repair expenses are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred in order to add, replace or repair fixed assets are recorded as the cost of the asset if, and only if, it is probable that the future economic benefits associated with the asset will flow to the entity and the cost of the asset is measured reliably.

Expenditures that meet the criteria for fixed assets with a minimum value of Rp1,000,000 are capitalized as fixed assets. Meanwhile, expenditures for the said assets whose value is less than Rp1,000,000 are charged as expenses and reported in the income statement in the period in which the transaction occurs.

The carrying amount of a fixed asset is derecognized when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount) is included in profit or loss when the derecognition is made.

m. Investment Properties

Investment property is property (land or part of a building or both) held by the group for rent or for profit from capital appreciation or both, and not for use in the production or supply of goods or services for administrative purposes or for sale in normal business activities.

Investment properties are stated at cost including directly attributable expenses for the acquisition of investment properties.

Furthermore, investment properties are measured at cost less accumulated depreciation, except for land which is not depreciated.

Land, buildings and infrastructure that experience significant and volatile changes in fair value will be revalued on an annual basis, while assets that do not experience significant changes in fair value will be revalued

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

direvaluasi setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan revaluasi aktiva tetap.

n. Aset Takberwujud

Aset Takberwujud berupa lisensi diamortisasi selama 10 tahun atau 10% setiap tahun sesuai dengan masa manfaat.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset *non-keuangan* untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai.

Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi terpulihkan kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset *non-keuangan* (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 2g.

**p. Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan Final**

Pendapatan sewa dan pendapatan konstruksi dikenakan pajak penghasilan final serta pendapatan lainnya yang telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan. Pajak final yang berkaitan dengan usaha utama Perusahaan dibebankan dalam akun beban (manfaat) pajak penghasilan.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

every 5 (five) years in accordance with the revaluation of fixed assets.

n. Intangible Asset

Intangible Assets in the form of a license are amortized over 10 years or 10% annually according to their useful lives.

o. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss.

If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 2g.

**p. Income Tax
Final Income Tax**

Rental revenue and construction revenue subject to final tax and other revenue subject to final income tax, the difference in the carrying value of assets and liabilities related to final income tax and their tax bases are not recognized as deferred tax assets and liabilities. Final tax relating to the Company's main business is charged to the account expense (benefit).

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Pajak Penghasilan Non-Final

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset.

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Non-Final Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.

Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset.

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan.

Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa entitas kena pajak yang berbeda yang depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period.

The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

q. Program Imbalan Kerja

1. Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar. Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.

2. Imbalan Pasca-Kerja

Imbalan pasca-kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Biaya jasa kini, setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban Kebijakan Berlaku Sebelum 1 Januari 2020
Pendapatan dan Beban Kontrak

Pendapatan kontrak konstruksi diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian yang diukur dari tahap penyelesaian kontrak pada tanggal pelaporan oleh *engineer* dan disetujui oleh pemilik proyek. Pada tanggal pelaporan, selisih lebih estimasi pendapatan di atas tagihan kemajuan kontrak disajikan sebagai aset lancar, sedangkan selisih lebih tagihan kemajuan kontrak di atas estimasi pendapatan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and*
- b) intends either to settle on a net basis or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

q. Employee Benefits Plan

1. Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when the employee has rendered service, at the undiscounted amount of the short-term employee benefits that are expected to be paid. Short-term employee benefits include wages, salaries, bonuses and incentives.

2. Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as pension, separation pay and long service pay are calculated based on the Manpower Act No.13/2003 ("Law 13/2003").

The Company recognizes the amount of the net defined benefit obligation at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which is calculated by an independent actuary using the Projected Unit Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the benefits.

Current service cost, any past service cost and gain or loss on settlement, and net interest on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

r. Revenues and Expenses Recognition Policy Applicable Before January 1, 2020
Revenue and Expenses Contract

Construction contract revenue is recognized by using the percentage completion method measured from the stage of contract completion at the reporting date by the engineer and approved by the project owner. At the reporting date, the excess of estimated revenue over claims for progress on contracts is presented as current assets, while the excess on claims for progress on contracts over estimated revenue is presented as current liabilities.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Bila hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak diakui hanya sebesar biaya kontrak yang terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat dipulihkan. Biaya kontrak diakui sebagai beban dalam periode terjadinya.

Bila besar kemungkinan bahwa jumlah biaya kontrak konstruksi melebihi jumlah pendapatan kontrak, maka taksiran kerugian segera diakui sebagai beban. Biaya kontrak meliputi seluruh biaya material, tenaga kerja dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan kontrak.

Pendapatan Barang dan Jasa

Pendapatan diakui berdasarkan metode tahap penyerahan barang kepada pembeli yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Kebijakan Berlaku Mulai Tanggal 1 Januari 2020

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui pendekatan lima langkah berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
 - 2) Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - 3) Kontrak memiliki substansi komersial;
 - 4) Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

If the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognized only at contract costs incurred to the extent that these costs are estimated to be recoverable. Contract costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

If it is probable that the total costs of the construction contracts exceed total contract revenue, the estimated loss is recognized as an expense immediately. Contract costs include all material, labor and indirect costs related to the contract.

Revenue of Services

Revenue is recognized based on the stage of delivery of the goods to the buyer method to which accompanied by a Minutes of Handover of Goods and/or Services (BAST) which has been signed by both parties.

Expenses are recognized when incurred.

Policy Applicable from January 1, 2020

Revenue from contracts with customers

In determining revenue recognition, the Company performs analysis transaction through the following five steps of assessment:

- *Identify contract(s) with a customer with certain criteria as follows:*
 - 1) *The contract has been agreed by the parties involved in the contract;*
 - 2) *The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*
 - 3) *The contract has commercial substance;*
 - 4) *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred.*
- *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
- *Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to*

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

diserahkannya barang atau jasa yang
dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan
estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang
akan dibayarkan selama periode kontrak.

- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban kinerja dipenuhi pada suatu titik waktu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari waktu ke waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh kinerja Perusahaan sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Kinerja Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Kinerja Perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Kriteria berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pengakuan Konstruksi dan Beban Konstruksi

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu yang dicatat dengan menggunakan metode

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.

- Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
- Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- The Customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Company's performance as the Company performs;
- The Company's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and
- The Company's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.

The following criteria must also be met before revenue is recognized:

Construction Revenues and Construction Costs

Revenues related to construction contracts are recognized over time which accounted for using the percentage of completion method. Under this

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan handal.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

Biaya kontrak diakui sebagai beban pada periode saat terjadinya. Biaya kontrak meliputi semua bahan langsung, tenaga kerja, subkontraktor dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak. Beban yang terjadi pada proyek yang sedang berjalan yang belum diterima oleh pelanggan atau berhubungan dengan aktivitas masa depan dari proyek dicatat sebagai Pekerjaan Dalam Pelaksanaan.

Perkiraan jumlah biaya kontrak terdiri dari biaya aktual dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan kontrak sesuai dengan persentase penyelesaian kontrak terkait.

Penjualan Barang dan Jasa

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognized as a current provision in the financial statements. The loss is recognized for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Contract costs are recognized as expenses in the period in which they were incurred. Cost of contracts includes all direct materials, labor, subcontractor and those indirect cost related to contract performance. Expense incurred on relating to on-going projects which have not been accepted by the customer or relates to future activity of the projects are recorded as "Work in Progress".

Estimated amount of contract value consists of actual cost and estimated expense to which will be dismantled in relation to contract execution based on the related percentage of completion.

Sales of goods and services

Revenue from the sale of goods is recognized when the control of good has been transferred to the customer. Revenue from the rendering of service is recognized when the customer has received and consumed benefit from the services.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

s. Sewa

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Pada tanggal insepisi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu,

s. Lease

Accounting treatment before January 1, 2020

The determination of whether a lease agreement or agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and benefits incidental to assets ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and benefits incidental to assets ownership.

At the commencement of the lease term, Group recognizes finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset.

The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the fixed assets that are owned.

Under an operating lease, Group recognizes the lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Accounting treatment since January 1, 2020

At inception of a contract, the Group shall assess whether the contract is, or contains a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Group shall assess whether,

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

- a. hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian; dan
- b. hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, yaitu hanya jika:
 - (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
 - (ii) keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
 - Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan sewa hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari awal masa sewa hingga akhir umur manfaat aset pendasar.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

throughout the period of use, the Group has both of the following:

- a. the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset; and*
- b. the right to direct the use of the identified asset, only if either:*
 - (i) the Group has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use; or*
 - (ii) the relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
 - the Group has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions; or*
 - the Group designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.*

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date.

The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada awal sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa. Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Setelah awal masa sewa, setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi.

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran terkait dengan sewa ini sebagai beban pada laporan laba rugi.

t. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Signifikan oleh Manajemen

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that has not been paid at the commencement date. Lease payments included in the measurement of the lease liability from fixed payments, including insubstance fixed payments less any lease incentive receivable. The Grup uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

After the commencement date, each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate over outstanding liabilities balance. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss.

The Grup has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less, and leases with low value asset. The Grup recognizes the payments associated with these leases as an expense on income statement.

t. Use of Estimates and Significant Accounting Considerations by Management

The preparation of the Grup' consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimation could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

i. Critical Accounting Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Grup based its assumptions and estimation on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait
pada saat terjadinya.

Provisi atas Kerugian Kredit Ekspektasian
Piutang

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang seperti tipe pelanggan.

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi dan perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Nilai tercatat piutang pada 31 Desember 2020 diungkapkan dalam Catatan 4.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset, namun terdapat

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Provision for Expected Credit Losses ("ECLs")
of Accounts Receivable

The Group uses a provision matrix to calculate expected credit losses for accounts receivable. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics such as customer type.

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and expected credit losses is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

The carrying amount of receivables as of December 31, 2020 are disclosed in Note 4.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful lives of each of the Group's fixed assets are determined based on the usefulness of the assets. This estimate is determined based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The useful life of each asset is reviewed periodically and adjusted if the forecast differs from previous estimates due to wear and tear, technical and commercial obsolescence, legal or other limitations on the use of

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

kemungkinan bahwa hasil operasi di masa datang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 11.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

the asset, however it is possible that future operating results could be significantly affected by changes in the amounts and costs recording periods incurred due to changes in the factors mentioned above.

Changes in the useful lives of the fixed assets can affect the amount of depreciation expense recognized and decrease the carrying value of the asset.

The carrying amount of fixed assets is disclosed in Note 11.

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the identified asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to use an extension option, or not using a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai tercatat liabilitas sewa pada 31 Desember 2020 diungkapkan dalam Catatan 24.

Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").

Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun di mana penentuan pajak tersebut dibuat.

Penghasilan yang diperoleh Perusahaan dalam Grup kadang-kadang dapat dikenakan pajak final dan non-final. Penentuan penghasilan yang dikenakan pajak final dan non-final dan juga biaya pengurang pajak sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak non-final memerlukan pertimbangan dan estimasi.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, penyisihan modal dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, di mana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

The carrying amount of lease liabilities as of December 31, 2020 are disclosed in Note 24.

Income Taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxes ("DGT").

As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax position taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the final outcome. Where the final outcome of these matters are different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax reserve in the year in which this determination is made.

The revenue of the Companies within the Group is sometimes also subject to both final and non-final income tax. Determination of the amount of revenue subject to final and non final tax as well as expenses relating to revenue from the non-final income tax requires judgments and estimation.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses, capital allowances and other temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which depends on the sufficiency of the future taxable profits formation. Assumptions of taxable profit formation are heavily affected by Management's estimates and assumptions regarding the expected production levels, sales volume, commodity prices and others, which are subject to risk and uncertainty, hence there is a possibility that changes in estimations and assumptions will alter the projected future taxable profits.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah pensiun yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/ (pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Post-Employment Benefits Liabilities

The present value of the pension obligation depends on several pensions determined by the actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/ (income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining active periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation. In determining the appropriate discount rate, the Group uses the interest rates of high quality corporate bonds (or Government bonds, with consideration there is no active market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions, as disclosed in Note 26.

u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi keuangan Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian), jika ada, dicatat di

u. Events After The Reporting Period

Events after reporting period that provide additional information about the Group's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah
periode pelaporan yang merupakan peristiwa
non-penyesuaian diungkapkan di dalam
catatan atas laporan keuangan.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Events after the reporting period
that are non-adjusting events are disclosed in the
notes to financial statements.

3. Kas dan Setara Kas

3. Cash and Cash Equivalents

	2020 Rp	2019 Rp
Kas/ <i>Cash on Hand</i>	344,882,430	747,809,999
Kas di Bank/ <i>Cash in Banks</i>		
Pihak Berelasi (Catatan 6)/ <i>Related Parties (Note 6)</i>		
Rupiah:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	28,930,502,520	1,971,252,619
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7,191,175,789	6,173,396,029
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,291,826,614	1,164,332,976
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	158,997,524	190,523,267
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	14,919,270	13,175,358
Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollars</i> :		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	302,524,429	1,224,849,777
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18,402,235	21,055,288
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	37,908,348,381	10,758,585,314
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
Rupiah:		
PT Bank Bukopin Tbk	1,300,381,285	3,484,112,599
PT Bank Central Asia Tbk	359,893,185	107,862,366
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	57,517,479	29,175,519
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah Tbk	3,921,663	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2,319,313	--
Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollars</i> :		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	9,678,008	9,788,250
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	1,733,710,933	3,630,938,734
Deposito/ <i>Time Deposits</i>		
Pihak Berelasi (Catatan 6)/ <i>Related Parties (Note 6)</i>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,900,628,600	24,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,000,000	5,000,000
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	1,905,628,600	29,000,000
Jumlah/ <i>Total</i>	41,892,570,344	15,166,334,047
Tingkat Bunga Kontraktual Deposito per Tahun/ <i>Contractual Interest Rates on Time Deposit per Annum</i>		
Rupiah	4.75% - 5.25%	4.75% - 5.25%

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

4. Piutang Usaha

4. Accounts Receivable

	2020 Rp	2019 Rp
a. Berdasarkan Pelanggan/ By Customers		
Pihak Berelasi (Catatan 6)/ <i>Related Parties (Note 6)</i>	30,617,197,224	35,070,373,368
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ <i>Allowance for Impairment Losses</i>	(16,686,155,685)	--
Sub Jumlah - Pihak Berelasi/ <i>Sub Total - Related Parties</i>	13,931,041,539	35,070,373,368
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
PT Kapuasindo Palm Industry (Catatan 38 dan 40b/ <i>Note 38 and 40b</i>)	21,590,788,099	21,590,788,099
PT Berkah Mekatek Jaya d/h PT Smartech Asia	13,606,693,562	458,323,659
Sofinter Group	5,653,115,734	5,653,115,734
PT Mitsubishi Corporation	4,833,400,000	9,763,600,000
PT Bima Agri Sawit	4,665,289,690	4,665,289,690
PT Conductor Jasa Suryapersada	2,932,510,236	114,385,249
KSO Adhi-Rekind	1,656,981,034	13,180,874,054
PT Wartsila Indonesia	1,566,954,474	282,408,240
KSO Wika-Wika Rekons	1,518,727,681	5,690,765,920
PT Bima Palma Nugraha	1,488,624,518	1,488,624,518
PT Trisula Abadi	1,112,958,168	1,112,958,168
PT Eka Dura	548,322,743	548,322,743
PT Tripatra Engineering	530,371,847	530,371,847
PT Widya Sapta Kontraktor	437,638,003	697,240,051
Lain-lain (Dibawah Rp300 Juta)/ <i>Others (Below Rp300 Million)</i>	4,579,071,324	17,622,135,801
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ <i>Sub Total - Third Parties</i>	66,721,447,113	83,399,203,773
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ <i>Allowance for Impairment Losses</i>	(47,133,548,140)	(99,793,747)
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ <i>Sub Total - Third Parties</i>	19,587,898,973	83,299,410,026
Jumlah/ Total	33,518,940,512	118,369,783,394
b. Berdasarkan Divisi/ By Division		
Divisi Mesin Peralatan Industri/ <i>Industrial Equipment and Machinery Division</i>	23,060,269,200	27,968,548,487
Divisi Manajemen Proyek dan Jasa/ <i>Project Management and Services Division</i>	54,567,712,997	65,341,638,456
Divisi Diesel/ <i>Diesel Division</i>	3,030,006,757	--
Divisi Fabrikasi, Manufaktur dan Konstruksi Baja/ <i>Steel Fabrication, Manufacturing and Construction Division</i>	16,680,655,383	25,159,390,198
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	97,338,644,337	118,469,577,141
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ <i>Allowance for Impairment Losses</i>	(63,819,703,825)	(99,793,747)
Jumlah/ Total	33,518,940,512	118,369,783,394
c. Berdasarkan Umur (Hari)/ By Age (Days)		
Belum Jatuh Tempo/ <i>Not Yet Due</i>	12,397,223,090	4,212,645,760
Sudah Jatuh Tempo/ <i>Past Due</i>		
1 - 30 Hari/ <i>Days</i>	4,145,561,915	32,188,028,739
31 - 60 Hari/ <i>Days</i>	3,732,180,603	3,581,704,604
61 - 90 Hari/ <i>Days</i>	1,596,729,409	8,887,139,338
91 - 120 Hari/ <i>Days</i>	1,071,627,008	2,261,716,184
121 - 180 Hari/ <i>Days</i>	2,011,540,639	6,692,081,035
181 - 360 Hari/ <i>Days</i>	17,108,538,577	17,360,696,171
> 360 Hari/ <i>Days</i>	55,275,243,096	43,285,565,309
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	97,338,644,337	118,469,577,141
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ <i>Allowance for Impairment Losses</i>	(63,819,703,825)	(99,793,747)
Jumlah/ Total	33,518,940,512	118,369,783,394

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Penyisihan Piutang Usaha

Allowance for Doubtful Accounts

	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
	Pihak Berelasi/ Related Parties	Pihak Ketiga/ Third Parties	Jumlah/ Total	
Saldo Awal	--	99,793,747	99,793,747	Beginning Balance
Dampak Penerapan PSAK 71	6,010,181,113	36,861,644,433	42,871,825,546	Impact on Implementation of PSAK 71
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Tahun Berjalan	10,675,974,572	10,172,109,960	20,848,084,532	Allowance for Impairment Losses of Receivables on Current Year
Jumlah	16,686,155,685	47,133,548,140	63,819,703,825	Total
	31 Desember 2019/ December 31, 2019			
	Pihak Berelasi/ Related Parties	Pihak Ketiga/ Third Parties	Jumlah/ Total	
Saldo Awal	--	99,793,747	99,793,747	Beginning Balance
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Tahun Berjalan	--	--	--	Allowance for Impairment Losses of Receivables on Current Year
Jumlah	--	99,793,747	99,793,747	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses of accounts receivable are adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

5. Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja

5. Gross Amount Due from Customers

	2020 Rp	2019 Rp	
a. Berdasarkan Pelanggan			a. By Customers
Pihak Berelasi (Catatan 6)	70,993,998,661	63,209,934,745	Related Parties (Note 6)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			Allowance for Impairment Losses
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja	(2,883,700,722)	--	Gross Amount from Due Customers
Sub Jumlah - Pihak Berelasi	68,110,297,939	63,209,934,745	Sub Total - Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Wira Karsa Konstruksi	9,151,596,040	--	PT Wira Karsa Konstruksi
PT Mitsubishi Corporation	1,580,013,750	2,639,013,750	PT Mitsubishi Corporation
General Electric	921,747,470	921,747,470	General Electric
PT Pall Filtration Indonesia	818,791,542	3,733,528,469	PT Pall Filtration Indonesia
Lain-lain (Dibawah Rp300 Juta)	354,919,961	2,527,993,912	Others (Below Rp300 Million)
Sub Jumlah	12,827,068,763	9,822,283,601	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			Allowance for Impairment Losses
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja	(2,195,447,914)	--	Gross Amount from Due Customers
Sub Jumlah - Pihak Ketiga	10,631,620,849	9,822,283,601	Sub Total - Third Parties
Jumlah/ Total	78,741,918,788	73,032,218,346	Sub Total - Related Parties

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
b. Berdasarkan Divisi			b. By Division
Divisi Mesin dan Peralatan Industri	11,461,544,003	11,743,009,526	Industrial Equipment and Machinery Division
Divisi Manajemen Proyek dan Jasa	63,115,274,385	61,196,555,824	Project Management and Services Division
Divisi Diesel	92,652,996	92,652,996	Diesel Division
Divisi Fabrikasi, Manufaktur dan Konstruksi Baja	9,151,596,040	--	Steel Fabrication, Manufacturing and Construction Division
Sub Jumlah	83,821,067,424	73,032,218,346	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja	(5,079,148,636)	--	Allowance for Impairment Losses of Gross Amount Due from Customers
Jumlah	78,741,918,788	73,032,218,346	Total

Penyisihan Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja Allowance for Impairment Losses of Gross Amount Due from Customers

	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
	Pihak Berelasi/ Related Parties	Pihak Ketiga/ Third Parties	Jumlah/ Total	
Saldo Awal	--	--	--	Beginning Balance
Dampak Penerapan PSAK 71	1,359,615,321	3,335,471,287	4,695,086,608	Impact on Implementation of PSAK 71
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Tagihan Bruto Tahun Berjalan	1,524,085,401	--	1,524,085,401	Allowance for Impairment Losses of Gross Amount Due from Customers on Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	--	(1,140,023,373)	(1,140,023,373)	Current Year Recovery
Jumlah	2,883,700,722	2,195,447,914	5,079,148,636	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto dari pemberi kerja cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses of gross amount due from customers are adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

6. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi normal. Transaksi ini termasuk pembayaran oleh Grup atas beban-beban pihak-pihak berelasi atau sebaliknya. Saldo transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

a. Sifat Hubungan dan Transaksi

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties
Pemerintah Republik Indonesia/ Government of Republic of Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

6. Balance and Transaction with Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with the related parties conducted by normal terms and conditions. These transactions include payments made by the Group over expenses of related parties or vice versa. Balance of related parties accounts as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

a. Nature of Relationship and Transactions

Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
Pemegang Saham/ Shareholder	Dividen/ Dividend
Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Penempatan Giro dan Deposito/ Placement of Current Account and Deposit
Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Penempatan Giro/ Placement of Current Account

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Penempatan Giro dan Deposito, Fasilitas Modal Kerja/ <i>Placement of Current Account and Deposit, Working Capital Loan Facility</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Penempatan Giro dan Deposito, Fasilitas Modal Kerja/ <i>Placement of Current Account and Deposit, Working Capital Loan Facility</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas/ <i>Company that is controlled by an entity which has significant influence</i>	Penempatan Giro/ <i>Placement of Current Account</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Gross Amount from Customers, Accounts Payable, Other Payables, Revenue</i>
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Utang Usaha, Utang Lain-lain, Uang Muka Pemesan, Pendapatan, Pembelian/ <i>Account Receivables, Accounts Payable, Other Payables, Advance from Customers, Revenue, Purchase</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Utang Lain-lain/ <i>Account Receivables, Other Payables</i>
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Gross Amount from Customers, Revenue</i>
PT Pindad (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Gross Amount from Customers, Revenue</i>
PT Pabrik Gula Rajawali II	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja/ <i>Account Receivables, Gross Amount from Customers</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Gross Amount from Customers, Revenue</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Revenue</i>
PT PAL Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Accounts Payable, Revenue</i>
PT Bukit Asam Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Gross Amount from Customers, Revenue</i>
PT Perkebunan Nusantara	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Uang Muka Pemesan, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Gross Amount from</i>

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
PT Semen Tonasa	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas/ <i>Company that is controlled by an entity which has significant influence</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Pupuk Kujang	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas/ <i>Company that is controlled by an entity which has significant influence</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Puspetindo	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas/ <i>Company that is controlled by an entity which has significant influence</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Utang Usaha, Uang Muka Pemesan, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Gross Amount from Customers, Accounts Payable,</i>
PT Pembangkitan Jawa Bali	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas/ <i>Company that is controlled by an entity which has significant influence</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Gross Amount from Customers, Revenue</i>
PT Rekayasa Industri	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas/ <i>Company that is controlled by an entity which has significant influence</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Uang Muka Pemesan, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Gross Amount from Customers, Advance from Customers, Revenue</i>
PT Indonesia Power	Perusahaan yang dikendalikan oleh suatu entitas yang memiliki pengaruh signifikan pada entitas/ <i>Company that is controlled by an entity which has significant influence</i>	Piutang Usaha, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Revenue</i>
Koperasi Karyawan PT Bromo Steel Indonesia	Pemegang Saham/ <i>Shareholder</i>	Utang Usaha, Pembelian/ <i>Accounts Payable, Purchase</i>
PT Superintending Company of Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Utang Usaha/ <i>Accounts Payable</i>
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Pembiayaan Dana Talangan/ <i>Bailout Financing Activity</i>
PT Energy Management Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Uang Muka Pemesan, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Advance from Customers, Revenue</i>
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Revenue</i>
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja/ <i>Account Receivables, Gross Amount from Customers</i>
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja, Uang Muka Pemesan, Pendapatan/ <i>Gross Amount from Customers, Advance from Customers, Revenue</i>
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ <i>Controlled by Central Government of Republic Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pendapatan/ <i>Account Receivables, Revenue</i>

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transaction
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Utang Usaha/ Accounts Payable
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Utang Usaha/ Accounts Payable
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Utang Usaha/ Accounts Payable
PT Krakatau Steel (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Utang Usaha/ Accounts Payable
PT Asuransi Jasa Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by Central Government of Republic Indonesia	Utang Lain-lain/ Other Payables
Direksi/ Director	Manajemen Kunci/ Key Personnel	Utang Lain-lain/ Other Payables

b. Rincian Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi usaha dengan pemegang saham dan/atau manajemen yang sama. Transaksi-transaksi ini terutama berhubungan dengan pekerjaan konstruksi, penjualan dan pinjam-meminjam dana operasional.

Saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

b. Transactions and Balances Details with Related Parties

The Group has engaged in business transactions with shareholder and/or related management. These transactions consist mainly of constructions, trading and fund borrowing.

Balances and transactions with related parties are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	Persentase terhadap Jumlah Pendapatan/ Percentage to Total Revenue	
			2020 %	2019 %
Penjualan (Catatan 29)/ Revenue (Note 29)				
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik	48,162,527,757	--	19.96	--
PT Rekayasa Industri	46,281,226,894	459,560,000	19.18	0.17
PT Barata Indonesia (Persero)	13,393,573,200	27,130,456,489	5.55	10.18
PT Puspetindo	7,030,571,571	3,807,680,000	2.91	1.43
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	7,812,500,000	5,737,500,000	3.24	2.15
PT Perkebunan Nusantara	7,884,838,636	3,156,431,909	3.27	1.18
PT Pertamina	1,610,788,000	--	0.67	--
Badan Tenaga Nuklir Nasional	135,454,545	--	0.06	--
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	91,000,000	915,448,654	0.04	0.34
PT Wijaya Karya (Persero)	62,750,000	2,139,365,330	0.03	0.80
PT Bukit Asam (Persero)	--	61,495,419,645	--	23.07
PT Pembangkit Jawa Bali	--	11,893,921,660	--	4.46
PT Indonesia Power	--	6,681,871,000	--	2.51
PT Pindad (Persero)	--	2,238,997,000	--	0.84
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	--	1,344,972,000	--	0.50
PT Pupuk Indonesia (Persero)	--	309,250,000	--	0.12
PT PAL Indonesia (Persero)	--	174,000,000	--	0.07
Jumlah/ Total	132,465,230,603	127,484,873,687	54.89	47.84

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

			Persentase terhadap Jumlah Beban Keuangan/ Percentage to Total Financial Cost	
	2020 Rp	2019 Rp	2020 %	2019 %
Beban Keuangan (Catatan 33)/ Financial Cost (Note 33)				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6,509,863,976	3,616,319,347	59.21	63.00
PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero)	1,400,000,000	1,000,000,000	12.73	17.42
PT Asuransi Jasa Indonesia	936,971,745	--	8.52	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	300,555,795	--	2.73	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	163,826,667	--	1.49	--
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	129,600,000	36,600,000	1.18	0.64
Jumlah/ Total	9,440,818,183	4,652,919,347	85.87	81.06
	2020 Rp	2019 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset/ Percentage to Total Assets	
	2020 Rp	2019 Rp	2020 %	2019 %
Aset/ Assets				
Kas dan Setara Kas (Catatan 3)/ Cash and Cash Equivalents (Note 3)				
Rupiah:				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	28,930,502,520	1,971,252,619	3.16	0.25
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7,191,175,789	6,173,396,029	0.78	0.78
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,291,826,614	1,164,332,976	0.14	0.15
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	158,997,524	190,523,267	0.02	0.02
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	14,919,270	13,175,358	0.00	0.00
Dolar Amerika Serikat/ US Dollars:				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	302,524,429	1,224,849,777	0.03	0.15
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18,402,235	21,055,288	0.00	0.00
Sub Jumlah/ Sub Total	37,908,348,381	10,758,585,314	4.14	1.35
Deposito/ Time Deposits				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,900,628,600	24,000,000	0.21	0.00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,000,000	5,000,000	0.00	0.00
Sub Jumlah/ Sub Total	1,905,628,600	29,000,000	0.21	0.00
Jumlah/ Total	39,813,976,981	10,787,585,314	4.34	1.36
Piutang Usaha (Catatan 4)/ Accounts Receivable (Note 4)				
PT Barata Indonesia (Persero)	8,390,797,415	5,750,381,319	0.92	0.72
PT Wijaya Karya (Persero)	5,048,529,832	7,809,673,069	0.55	0.98
PT Puspertino	4,465,830,928	2,769,204,174	0.49	0.35
PT Bukit Asam (Persero)	4,713,687,905	7,225,316,599	0.51	0.91
PT Perkebunan Nusantara (Persero)	4,410,916,699	2,942,162,325	0.48	0.37
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	835,199,999	242,249,999	0.09	0.03
PT Pembangkit Jawa Bali	832,284,286	2,741,757,014	0.09	0.34
PT Rajawali II	426,135,310	303,182,810	0.05	0.04
PT PLN (Persero)	365,815,760	410,669,160	0.04	0.05
PT Pertamina	349,203,546	349,203,546	0.04	0.04
PT Pindad (Persero)	285,250,000	346,500,000	0.03	0.04
PT Adhi Karya	173,093,819	807,628,620	0.02	0.10
PT Semen Tonasa	114,571,867	114,571,867	0.01	0.01
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	94,148,040	94,148,040	0.01	0.01
PT Energy Management Indonesia (Persero)	59,250,000	--	0.01	--
Sub Jumlah (Dipindahkan)/ Sub Total (Transferred)	30,564,715,406	31,906,648,542	3.34	4.01

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

			Persentase terhadap Jumlah Aset/ Percentage to Total Assets	
	2020 Rp	2019 Rp	2020 %	2019 %
Sub Jumlah (Pindahan)/ Sub Total (To Transfer)	30,564,715,406	31,906,648,542	3.34	4.01
PT PAL Indonesia (Persero)	50,000,000	174,000,000	0.01	0.02
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2,481,818	--	0.00	--
PT Rekayasa Industri	--	2,027,379,183	--	0.25
PT Indonesia Power	--	680,975,643	--	0.09
PT Pupuk Kujang (Persero)	--	281,370,000	--	0.04
Sub Jumlah/ Sub Total	30,617,197,224	35,070,373,368	3.34	4.41
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(16,686,155,685)	--	(1.82)	--
Jumlah/ Total	13,931,041,539	35,070,373,368	1.52	4.41
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja (Catatan 5)/ Gross Amount Due from Customers (Note 5)				
Perusahaan Umum Badan Logistik	48,162,527,757	--	5.26	--
PT Barata Indonesia (Persero)	9,848,190,000	6,136,587,389	1.07	0.77
PT Rekayasa Industri	6,958,183,950	--	0.76	--
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	3,260,000,003	3,315,000,001	0.36	0.42
PT Wijaya Karya (Persero)	1,542,013,703	2,504,646,079	0.17	0.32
PT Pembangkitan Jawa Bali	429,929,635	843,565,999	0.05	0.11
PT Perkebunan Nusantara (Persero)	428,561,414	1,352,181,096	0.05	0.17
PT Perkebunan Gula Gorontalo	151,054,000	--	0.02	--
PT Puspetindo	162,788,200	--	0.02	--
PT Inka Multi Solusi Trading	17,900,000	--	0.00	--
PT Pindad (Persero)	17,500,000	1,259,212,000	0.00	0.16
PT Perkebunan Gula Kebon Agung Malang	15,350,000	--	0.00	--
PT Bukit Asam (Persero)	--	47,662,149,003	--	5.99
PT Rajawali II	--	111,775,000	--	0.01
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	--	24,818,178	--	0.00
Sub Jumlah/ Sub Total	70,993,998,661	63,209,934,745	7.75	7.95
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari Pemberi Kerja/ Allowance for Impairment Losses Gross Amount from Customers	(2,883,700,722)	--	(0.31)	--
Jumlah/ Total	68,110,297,939	63,209,934,745	7.43	7.95
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities				
	2020 Rp	2019 Rp	2020 %	2019 %
Liabilitas/ Liabilities				
Utang Usaha (Catatan 15)/ Accounts Payable (Note 15)				
Utang Subkontraktor/ Subcontractor's Debt				
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	14,856,701,279	16,356,701,279	1.88	2.31
PT PAL Indonesia (Persero)	5,892,553,000	538,460,000	0.74	0.08
PT Barata Indonesia (Persero)	2,362,671,848	3,127,018,541	0.30	0.44
PT Bhanda Ghara Rekasa (Persero)	1,658,400,000	1,658,400,000	0.21	0.23
PT Puspetindo	386,206,349	527,706,349	0.05	0.07
PT Surveyor Indonesia (Persero)	79,000,000	79,000,000	0.01	0.01
PT Biro Klasifikasi Indonesia	54,124,000	54,124,000	0.01	0.01
PT Superintending Company of Indonesia (Persero)	40,260,000	--	0.01	--
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	28,600,000	28,600,000	0.00	0.00
Sub Jumlah (Dipindahkan)/ Sub Total (Transferred)	25,358,516,476	22,370,010,169	3.20	3.16

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

			Persentase terhadap Jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities	
	2020 Rp	2019 Rp	2020 %	2019 %
Sub Jumlah (Pindahan)/ Sub Total (To Transfer)	25,358,516,476	22,370,010,169	3.20	3.16
Utang Material Lokal/ Local Material Debt				
PT Krakatau Steel (Persero)	2,394,163,931	291,411,120	0.30	0.04
Koperasi Karyawan PT Bromo Steel Indonesia	306,356,500	507,550,658	0.04	0.07
Sub Jumlah/ Sub Total	2,700,520,431	798,961,778	0.34	0.11
Jumlah/ Total	28,059,036,907	23,168,971,947	3.55	3.28
Utang Bank (Catatan 16)/ Bank Loans (Note 16)				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	84,139,893,303	68,725,814,377	10.63	9.71
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	--	1,600,000,000	--	0.23
Jumlah/ Total	84,139,893,303	70,325,814,377	10.63	9.94
Utang Lain-lain (Catatan 19)/ Other Accounts Payable (Note 19)				
PT Asuransi Jasa Indonesia	6,345,178,065	912,406,320	0.80	0.13
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	6,297,000,000	6,297,000,000	0.80	0.89
Direksi/ Director	437,834,375	482,834,375	0.06	0.07
PT Barata Indonesia (Persero)	--	998,611,898	--	0.14
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	--	2,102,931,330	--	0.30
Jumlah/ Total	13,080,012,440	10,793,783,923	1.65	1.53
Uang Muka Penjualan (Catatan 17)/ Deposits on Sales (Note 17)				
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik	66,110,809,609	--	8.35	--
PT Puspetindo	45,168,638,978	32,950,223,184	5.71	4.66
PT Energy Management Indonesia (Persero)	71,828,945	--	0.01	--
PT Perkebunan Nusantara	--	2,495,720,454	--	0.35
PT Rekayasa Industri	--	24,101,090,217	--	3.41
Jumlah/ Total	111,351,277,532	59,547,033,855	14.07	8.42
Utang Dana Kreditur (Catatan 21)/ Other Creditor Debts (Note 21)				
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	101,704,051,674	102,054,051,674	12.85	14.43
Jumlah/ Total	101,704,051,674	102,054,051,674	12.85	14.43

7. Persediaan

7. Inventories

	2020 Rp	2019 Rp	
Bahan Baku	1,139,340,600	4,777,436,692	Raw Materials
Bahan Pembantu	3,577,782,172	7,135,088,086	Indirect Materials
Suku Cadang	3,733,927,266	2,751,493,633	Spareparts
Persediaan Dalam Proses	100,532,183,440	43,066,275,551	Work in Process
Pekerjaan Dalam Konstruksi	2,312,224,286	4,210,499,170	Construction in Progress
Persediaan Dalam Perjalanan	1,091,917,500	--	Goods in Transit
Jumlah	112,387,375,264	61,940,793,131	Total

Persediaan Dalam Proses merupakan persediaan *job order* yang meliputi pembuatan atas H2S absorber, regenerator, material tower dan pressure vessel yang belum dapat diserahkan di tahun 2020.

Work in Process represents job order inventories which include the making of H2S absorber, regenerator, tower materials and pressure vessel that could not be handed over in 2020.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan
penyisihan atas penurunan nilai persediaan.

Management believes that allowance for declining in
value of inventories are not necessary.

8. Uang Muka

8. Advance

	2020 Rp	2019 Rp	
Pembelian Lokal	41,654,906,304	35,369,017,379	Purchase Local
Pembelian Impor	9,124,943,350	23,020,251,560	Purchase Import
Uang Muka Kerja	6,436,419,463	824,312,857	Cash Advance
Jumlah	57,216,269,117	59,213,581,796	Total

9. Kas Dibatasi Penggunaannya

9. Restricted Cash

	2020 Rp	2019 Rp	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,567,680,526	1,649,232,235	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	687,850,000	687,850,000	
Jumlah/ Total	2,255,530,526	2,337,082,235	

10. Properti Investasi

10. Investment Properties

31 Desember 2020/ December 31, 2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Revaluasi/ Revaluation	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	48,678,500,000	--	--	16,844,006,669	65,522,506,669 Land
Jumlah	48,678,500,000	--	--	16,844,006,669	65,522,506,669 Total

31 Desember 2019/ December 31, 2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	48,678,500,000	--	--	48,678,500,000	Land
Jumlah	48,678,500,000	--	--	48,678,500,000	Total

Merupakan tanah yang berlokasi di Jl. KHM Mansyur No. 229, Nyamplungan, Kec. Pabean, Surabaya, Jawa Timur dengan luas 7.489 m² yang disewakan kepada PT Krakatau Steel berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 8 Juli 2013 (Catatan 20).

Represents a land located at Jl. KHM Mansyur No. 229, Nyamplungan, Kec. Pabean, Surabaya, East Java with an area of 7,489 sqm that leased to PT Krakatau Steel based on Lease Agreement No. 8 dated July 8, 2013 (Note 20).

Grup menggunakan jasa penilai independen dari KJPP Toto Suharto dan Rekan dalam laporannya No. 00116/2.0055-02/PI/04/0176/1/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 untuk melakukan penilaian nilai wajar properti investasi pada 30 Desember 2020 dengan penetapan nilai wajar tanggal 25 Februari 2021. Kenaikan nilai investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp16.844.006.669 yang timbul dari perubahan

The Group uses the services of an independent appraiser from KJPP Toto Suharto and Partners in its report No. 00116/2.0055-02/PI/04/0176/1/VI/2021 dated June 18, 2021 to assess the fair value of investment properties on December 30, 2020 with a fair value determination on February 25, 2021. Increase in investment value for the year ended December 31, 2020 amounting to Rp16,844,006,669 arising from changes in the fair value of investment

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

nilai wajar properti investasi, dicatat pada *properties, was recorded in other comprehensive income.*
penghasilan komprehensif lain.

11. Aset Tetap

11. Fixed Assets

31 Desember 2020/ December 31, 2020						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Pengurangan/</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	267,508,054,139	--	--	134,944,169,192	402,452,223,331	Land
Bangunan	15,019,947,280	--	--	--	15,019,947,280	Buildings
Mesin dan Peralatan	125,302,437,191	--	128,866,187	--	125,173,571,004	Machinery and Equipments
Kendaraan	1,102,104,744	--	--	--	1,102,104,744	Vehicles
Perabotan dan Peralatan Kantor	5,816,143,716	48,075,000	--	--	5,864,218,716	Furniture and Office Equipments
Jumlah	414,748,687,070	48,075,000	128,866,187	134,944,169,192	549,612,065,075	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciations
Bangunan	8,664,135,246	339,075,410	--	--	9,003,210,656	Buildings
Mesin dan Peralatan	73,334,477,036	3,179,035,732	--	--	76,513,512,768	Machinery and Equipments
Kendaraan	1,029,882,431	27,777,777	--	--	1,057,660,208	Vehicles
Perabotan dan Peralatan Kantor	5,679,091,557	74,307,586	--	--	5,753,399,143	Furniture and Office Equipments
Jumlah	88,707,586,270	3,620,196,505	--	--	92,327,782,775	Total
Nilai Buku	326,041,100,800				457,284,282,300	Book Value

31 Desember 2019/ December 31, 2019						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>		
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	267,508,054,139	--	--	267,508,054,139		Land
Bangunan	13,689,798,434	1,330,148,846	--	15,019,947,280		Buildings
Mesin dan Peralatan	123,634,527,075	1,667,910,116	--	125,302,437,191		Machinery and Equipments
Kendaraan	1,002,104,744	100,000,000	--	1,102,104,744		Vehicles
Perabotan dan Peralatan Kantor	5,617,720,316	198,423,400	--	5,816,143,716		Furniture and Office Equipments
Jumlah	411,452,204,708	3,296,482,362	--	414,748,687,070		Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciations
Bangunan	8,365,182,064	298,953,182	--	8,664,135,246		Buildings
Mesin dan Peralatan	70,760,680,284	2,573,796,752	--	73,334,477,036		Machinery and Equipments
Kendaraan	958,357,501	71,524,930	--	1,029,882,431		Vehicles
Perabotan dan Peralatan Kantor	5,578,988,230	100,103,327	--	5,679,091,557		Furniture and Office Equipments
Jumlah	85,663,208,079	3,044,378,191	--	88,707,586,270		Total
Nilai Buku	325,788,996,629			326,041,100,800		Book Value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Beban Pokok Penjualan (Catatan 30)	2,940,540,613	2,544,739,418	Cost Goods Sold (Note 30)
Beban Penjualan (Catatan 31)	530,130,684	404,122,513	Selling Expenses (Note 31)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 32)	149,525,208	95,516,260	General and Administrative Expenses (Note 32)
Jumlah	3,620,196,505	3,044,378,191	Total

Aset berupa tanah dan bangunan dijadikan sebagai jaminan atas utang bank Bank Negara Indonesia dan PT Bank Bukopin Tbk pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 16).

Assets such as land and buildings are used as collateral for bank loans to Bank Negara Indonesia and PT Bank Bukopin Tbk dated December 31, 2020 and 2019 (Note 16).

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup telah mengasuransikan nilai bangunan kepada PT Asuransi Tri Pakarta dengan nilai pertanggungan masing-masing Rp38.401.730.000.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group has insured the building value with PT Asuransi Tri Pakarta for a total coverage of Rp38,401,730,000, respectively.

Grup telah melakukan revaluasi terhadap kewajaran nilai tanah 31 Desember 2020 yang dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan jasa penilai independen dari KJPP Toto Suharto dan Rekan dalam laporannya No. 00116/2.0055-02/PI/04/0176/1/VI/2021 bertanggal 18 Juni 2021 sedangkan Entitas Anak menggunakan jasa penilai independen dari KJPP Rizki Djunaedy dan Rekan dalam laporannya No. 00098/2.0017-00/PI/04/0292/1/VI/2021 bertanggal 24 Juni 2021. Nilai wajar aset tetap Grup pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Group has conducted revaluation on the fairness of the land value on December 31, 2020 which conducted with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the fair value at the end of the reporting period. The Company using the services of an independent appraisal from KJPP Toto Suharto and Partner in his report No. 00116/2.0055-02/PI/04/0176/1/VI/2021 dated June 18, 2021, while Subsidiary using the services of an independent appraisal from KJPP Rizki Djunaedy and Partner in its report No. 00098/2.0017-00/PI/04/0292/1/VI/2021 dated June 24, 2021. The fair value of the Group fixed assets as of December 31, 2020 is as follows:

	Nilai Buku 31 Desember 2020/ December 31, 2020 Book Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Surplus Revaluasi (Penghasilan Komprehensif Lain)/ Surplus on Revaluation (Other Comprehensive Income)	
	Rp	Rp	Rp	
Perusahaan	267,474,500,000	373,274,353,331	105,799,853,331	Company
Entitas Anak	33,554,139	29,177,870,000	29,144,315,861	Subsidiary
Jumlah	267,508,054,139	402,452,223,331	134,944,169,192	Total

12. Aset Hak-Guna

12. Right-of-Use Assets

31 Desember 2020/ December 31, 2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dampak Penerapan Awal PSAK 73/ Impact on Initial Implementation of PSAK 73	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Aset Hak Guna					Right of Used
Kendaraan	--	37,240,000	1,588,542,807	--	1,625,782,807 Vehicles
Bangunan	--	--	545,700,361	--	545,700,361 Office Buildings
Jumlah	--	37,240,000	2,134,243,168	--	2,171,483,168 Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciations
Aset Hak Guna					Right of Used
Kendaraan	--	--	537,016,029	--	537,016,029 Vehicles
Bangunan	--	--	204,637,635	--	204,637,635 Office Buildings
Jumlah	--	--	741,653,664	--	741,653,664 Total
Nilai Buku	--				1,429,829,504 Book Value

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

13. Aset Takberwujud

13. Intangible Assets

31 Desember 2020/ December 31, 2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Divisi Mesin dan Peralatan Industri	4,968,106,412	--	--	4,968,106,412	Industrial Equipment and Machinery Division
Jumlah	4,968,106,412	--	--	4,968,106,412	Total
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortizations
Divisi Mesin dan Peralatan Industri	4,314,584,409	653,522,003	--	4,968,106,412	Industrial Equipment and Machinery Division
Jumlah	4,314,584,409	653,522,003	--	4,968,106,412	Total
Nilai Buku	653,522,003			--	Book Value
31 Desember 2019/ December 31, 2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Divisi Mesin dan Peralatan Industri	3,397,283,376	1,570,823,036	--	4,968,106,412	Industrial Equipment and Machinery Division
Unit Bare Engine	1,372,981,705	--	1,372,981,705	--	Bare Engine Unit
UUM Tempa	33,192,182	--	33,192,182	--	UUM Forging
Jumlah	4,803,457,263	1,570,823,036	1,406,173,887	4,968,106,412	Total
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortizations
Divisi Mesin dan Peralatan Industri	2,549,067,523	1,765,516,886	--	4,314,584,409	Industrial Equipment and Machinery Division
Unit Bare Engine	1,372,981,705	--	1,372,981,705	--	Bare Engine Unit
UUM Tempa	33,192,182	--	33,192,182	--	UUM Forging
Jumlah	3,955,241,410	1,765,516,886	1,406,173,887	4,314,584,409	Total
Nilai Buku	848,215,853			653,522,003	Book Value

Beban amortisasi dialokasi sebagai berikut:

Amortization expense was allocated as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Beban Pokok Penjualan (Catatan 30)	653,522,003	1,765,516,886	Cost Goods Sold (Note 30)
Jumlah	653,522,003	1,765,516,886	Total

14. Aset Lain-lain

14. Other Assets

	2020 Rp	2019 Rp	
Aset Non-Operasional	53,899,006,582	53,899,006,582	Non-Operational Assets
Penurunan Nilai Aset Non-Operasional	(53,899,006,582)	(53,899,006,582)	Declining Value of Non-Operational Assets
Nilai Buku	--	--	Book Value
Piutang Lain-lain	13,474,895,052	13,474,895,052	Other Receivables
Cadangan Penurunan Nilai	(13,474,895,052)	(13,474,895,052)	Allowance of Impairment Losses
Sub Jumlah	--	--	Sub Total
Sub Jumlah (Dipindahkan)	--	--	Sub Total (Transferred)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Sub Jumlah (Pindahan)	--	--	Sub Total (To Transfer)
Tanah Hibah eks PT Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS)	8,103,568,784	8,103,568,784	Grant Land ex PT Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS)
Uang Jaminan	694,495,600	49,895,000	Security Deposit
Biaya Ditangguhkan	--	671,243,626	Deferred Expense
Sub Jumlah	8,798,064,384	8,824,707,410	Sub Total
Jumlah	8,798,064,384	8,824,707,410	Total

Tanah hibah eks PT BPIS merupakan tanah hibah dari PT BPIS yang dilikuidasi sesuai surat Menteri BUMN No. S-482/MBU/2004 tanggal 16 September 2004. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, manajemen masih menindaklanjuti proses permohonan penegasan izin pelepasan aset tanah kemayoran sesuai surat Menteri BUMN No. S-519/MBU/09/2014.

Grant Land ex PT BPIS represents grant land from PT BPIS which was liquidated according to the letter from the Minister of BUMN's No. S-482/MBU/2004 dated September 16, 2004. Until the date of financial reporting, management is still following up the application process for the affirmation of the permit for the release of kemayoran land assets in accordance with the letter of the Minister of BUMNs No. S-519/MBU/09/2014.

15. Utang Usaha

15. Accounts Payable

	2020 Rp	2019 Rp
a. Berdasarkan Pemasok/ By Suppliers		
Pihak Berelasi (Catatan 6)/ <i>Related Parties (Note 6)</i>	28,059,036,907	23,168,971,947
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
Subkontraktor/ <i>Subcontractor's</i>		
PT Sentosa Teknik Mandiri	12,329,456,367	7,164,864,126
PT Pandan Jaya Indonesia	6,228,886,510	4,231,032,119
PT Intikarya Melvisindo	3,300,000,000	--
CV Bangkit Mandiri	2,804,610,297	3,013,001,175
CV Utomodeck	2,151,653,165	2,145,149,237
CV Lintang Raya Timur	2,013,842,477	--
PT Jagaaman Sarana	1,522,650,000	1,665,750,000
CV Murni Guna Pratama	1,436,984,908	253,957,588
PT Bhakti Palma Persada	1,192,761,726	1,192,761,726
PT Angkasa Pura Logistik	1,142,310,000	779,010,680
PT Kharisma Mitra Enjiniring	1,125,500,000	1,778,067,500
PT Kase International	878,487,793	878,487,793
PT Samudra Buana Perkasa	856,667,000	1,106,667,000
PT Widya Cia Tehnik	743,796,173	799,329,723
PT Tugu Beton Semesta Abadi	725,600,000	725,600,000
PT Aditya Pratama Transport	697,065,125	755,065,125
CV Cahaya Hidup	538,497,538	613,597,538
PT Agility International	510,240,000	106,640,000
Bumi Karya Bengkel	477,177,000	401,452,000
Sub Jumlah (Dipindahkan)/ <i>Sub Total (Transferred)</i>	40,676,186,079	27,610,433,330

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp
Sub Jumlah (Pindahan)/ <i>Sub Total (Toransfer)</i>	40,676,186,079	27,610,433,330
CV Sinar Surya Sakti	455,486,290	455,486,290
PT Varian Persada Indonesia	427,709,516	427,709,516
PT Pandan Jaya Indonesia	408,043,750	408,043,750
PT Hanqia Lintas Sarana	405,000,000	--
PT Bondi Syad Mulia	402,405,514	101,612,314
Sumatra PA	389,885,000	328,005,000
PT Sampoerna Alam Samudra	388,107,221	593,541,326
PT Grogol Sarana Transjaya	319,000,000	319,000,000
PT Surabaya Express	308,800,000	308,800,000
Lain-lain (Di bawah Rp300 Juta)/ <i>Others (Below than Rp300 Million)</i>	18,698,201,364	17,094,519,453
Sub Jumlah Subkontraktor/ <i>Sub Total Subcontractor</i>	62,878,824,734	47,647,150,979
Material Lokal/ <i>Local Material</i>		
PT Allalloy Cahaya Dynaweld	1,836,680,100	851,771,730
PT Jotun Indonesia	1,806,110,225	1,895,340,790
PT Papasari	1,069,864,167	1,069,864,167
PT Sari Anjir Serapat	846,609,750	846,609,750
PT Bumi Karya	693,240,000	693,240,000
PT Sigma Utama	612,037,614	966,817,469
PT Lancar Pratama	588,429,860	588,429,860
PT Caprefindo	517,011,350	485,221,050
PT Intan Pertiwi Industri	482,235,160	482,235,160
PT Mitra Wira Pratama	467,489,000	138,131,000
PT Berkah Mandiri Globalindo	442,583,188	442,583,188
PT Gunawan Dianjaya Steel	381,824,408	1,232,372,108
PT Polar Sakti Jaya	362,199,510	362,199,510
PT Matesu Gotty Abadi	361,159,438	212,915,000
UD Sarana Tehnik	314,611,280	314,611,280
CV Sapta Sumber Lancar	313,039,390	765,003,940
Lain-lain (Dibawah Rp300 Juta)/ <i>Others (Below than Rp300 Million)</i>	9,310,781,197	23,697,621,169
Sub Jumlah Material Lokal/ <i>Sub Total Local Material</i>	20,405,905,637	35,044,967,171
Material Impor/ <i>Import Material</i>		
Doosan Infracore Co, Ltd	7,746,669,360	882,861,132
Dugwoo Co, Ltd	2,935,057,600	736,712,527
Topsteel Solution Asia Ptc, Ltd	1,478,789,747	555,287,822
Takraf GMBH	438,202,089	--
Elite + Project Engineering	309,647,828	309,647,828
Lain-lain (Di bawah Rp300 Juta)/ <i>Others (Below than Rp300 Million)</i>	598,466,789	21,230,618,405
Sub Jumlah Material Impor/ <i>Sub Total Import Material</i>	13,506,833,413	23,715,127,714
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ <i>Sub Total - Third Parties</i>	96,791,563,784	106,407,245,864
Jumlah/ Total	124,850,600,691	129,576,217,811
b. Berdasarkan Mata Uang/ By Currencies		
Rupiah	111,343,767,278	105,861,090,097
Dollar Amerika	13,506,833,413	23,715,127,714
Jumlah/ Total	124,850,600,691	129,576,217,811

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

16. Utang Bank

16. Bank Loan

	2020 Rp	2019 Rp
Perusahaan		
Pihak Berelasi (Catatan 6)/ Related Parties (Note 6)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Fasilitas Non Cash Loan/ Non Cash Loan Facility	81,139,893,303	65,725,814,377
Revolving Credit Facility	3,000,000,000	3,000,000,000
Sub Jumlah/ Sub Total	84,139,893,303	68,725,814,377
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bank Bukopin Tbk	1,358,400,000	--
Sub Jumlah/ Sub Total	1,358,400,000	--
Sub Jumlah/ Sub Total	85,498,293,303	68,725,814,377
Entitas Anak		
Pihak Berelasi (Catatan 6)/ Related Parties (Note 6)		
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk		
Kredit Modal Kerja/ Working Capital Loan	--	1,600,000,000
Sub Jumlah/ Sub Total	--	1,600,000,000
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bank Bukopin Tbk	3,000,000,000	5,500,000,000
Sub Jumlah/ Sub Total	3,000,000,000	5,500,000,000
Sub Jumlah/ Sub Total	3,000,000,000	7,100,000,000
Jumlah/ Total	88,498,293,303	75,825,814,377

Perusahaan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit dari PT Bank Negara Indonesia No. BIN/2.3/060/R tanggal 10 April 2017, Perusahaan mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum pinjaman Rp65.000.000.000 dan fasilitas *non-cash loan* (bank garansi) dengan maksimum limit Rp15.000.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit. Suku bunga Kredit 11%. Perjanjian ini telah dilakukan beberapa kali perpanjangan terakhir dengan Persetujuan Sub Alokasi *Plafond* Kredit Modal Kerja untuk Fasilitas *Plafond Non Cash Loan* No. BIN/2.3/368/R tanggal 21 Oktober 2020 yang terdiri:

- Fasilitas KMK *Plafond* maksimum kredit menjadi Rp24.000.000.000.
- Fasilitas *Non Cash Loan* menjadi Rp173.000.000.000.
- Fasilitas KMK RC maksimum kredit menjadi Rp3.000.000.000.

Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2021. Kredit ini dijamin dengan Tanah dan Bangunan Pabrik SHGN No. 1 di Jalan Imam

The Company

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Credit Agreement Approval Letter from PT Bank Negara Indonesia No. BIN/2.3/060/R dated April 10, 2017, the Company obtained a Working Capital Credit (KMK) facility with a maximum loan of Rp65,000,000,000 and non-cash loan (bank guarantee) facility with a maximum limit of Rp15,000,000,000. The term of the credit facility is 12 months from the signing of the credit agreement. The loan interest rate is 11%. This agreement has been extended several times with the approval of the Sub-Allocation of Working Capital Credit Ceiling for Non-Cash Loan Facility No. BIN/2.3/368/R dated October 21, 2020, which consists of:

- Maximum credit limit KMK facilities is Rp24,000,000,000.
- Non cash loan facility to Rp173,000,000,000.
- Maximum credit limit for KMK RC is Rp3,000,000,000.

This credit facility will mature on April 26, 2021. This credit is secured by Land and Factory Building SHGN No. 1 on Jalan Imam Bonjol 18

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Bonjol 18 Pasuruan, Tanah SHGB No. 2 di Jalan Cemara Pasuruan, Tanah dan Bangunan di Jalan Musi No. 39, Surabaya, serta Tanah dan Bangunan Pabrik serta Rumah di Jalan Soekarno Hatta 21, 21A, 21C, 21E Pasuruan.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu antara lain mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan tidak dapat mempertahankan rasio keuangan yang dipersyaratkan dan sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan telah mengajukan permohonan izin kepada Bank BNI atas pelampauan *covenant* fasilitas kredit yaitu *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan *Debt Service Coverage* melalui suratnya No. 956/1000/1310/122021 pada tanggal 15 Desember 2021 dan belum mendapat tanggapan dari Bank BNI.

PT Bank Bukopin Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit dari PT Bank Bukopin Tbk No. 002/SRB-BM-BRATANG/II/2020 tanggal 19 Februari 2020, Perusahaan mendapat fasilitas *Documentary Collections Invoice Financing Discount* dengan maksimum pinjaman Rp2.948.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan tagihan *Principal* kepada *Bouhwheer*. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit. Kredit ini dijamin dengan *Cash Collateral* sebesar 20% dari *plafond* yang diambil dari dana *dropping*. Saldo utang pada tanggal 31 Desember 2020 telah dilunasi pada tanggal 30 April 2021.

Entitas Anak

PT Bank Bukopin Tbk

a. Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari PT Bank Bukopin Tbk Cabang Probolinggo No. 088/PRB-PIM/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum kredit senilai Rp5.000.000.000 dengan suku bunga 13,5%/tahun. Jangka waktu pinjaman 9 bulan dengan jaminan berupa sebidang tanah serta bangunan sesuai SHGB No. 9-15. Berdasar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari PT Bank Bukopin Tbk Cabang Probolinggo No. 139/PRB-PIM/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 pinjaman ini telah diperpanjang dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Pasuruan, Land SHGB No. 2 on Jalan Cemara Pasuruan, Land and Building on Jalan Musi No. 39, Surabaya and Land and Building of Factory and Houses on Jalan Soekarno Hatta 21, 21A, 21C, 21E Pasuruan.

The loan agreement also includes certain conditions, among others, to maintain certain financial ratios which are calculated based on financial statements.

On December 31, 2020, the Company is unable to maintain the required financial ratio and until the financial reporting date, the Company has submitted a request for permission from BNI for exceeding covenant credit facilities, namely Current Ratio, Debt to Equity Ratio and Debt Service Coverage through this letter No. 956/1000/1310/122021 dated December 15, 2021 and the response from Bank BNI not yet received.

PT Bank Bukopin Tbk

Based on the Lending Approval Letter from PT Bank Bukopin Tbk No. 002/SRB-BM-BRATANG/II/2020 dated February 19, 2020, the Company received a Documentary Collections Invoice Financing Discount facility with a maximum loan of Rp2,948,000,000. This facility is used to finance Principal's claims to Bouhwheer. The term of the credit facility is 12 months from the signing of the credit agreement. This credit is secured by a Cash Collateral of 20% of the limit taken from the dropping funds. The outstanding balance as of December 31, 2020 has been paid on April 30, 2021.

Subsidiary

PT Bank Bukopin Tbk

a. *Based on the Letter of Approval for Lending Credit (SPPK) from PT Bank Bukopin Tbk, Probolinggo Branch No. 088/PRB-PIM/V/2019 dated May 22, 2019, the Subsidiary obtained a working capital credit facility with a maximum credit amounting to Rp5,000,000,000 with an interest rate of 13.5%/year. Loan term of 9 months with collateral in the form of a plot of land and building according to SHGB No. 9-15. Based on the Lending Approval Letter (SPPK) from PT Bank Bukopin Tbk, Probolinggo Branch No. 139/PRB-PIM/II/2020 dated February 17, 2020, this loan has been extended for a period of 12 months and will end on March 31, 2021.*

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

b. Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari PT Bank Bukopin Tbk Cabang Probolinggo No. 084/PRB-PIM/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit modal kerja Industri Pembuatan Mesin Pabrik dengan maksimum kredit senilai Rp500.000.000 dengan suku bunga 14,5%/tahun. Jangka waktu pinjaman 12 bulan dengan jaminan berupa sebidang tanah serta bangunan sesuai SHGB No. 9-15. Pada tanggal 29 Mei 2020, Perusahaan telah melunasi utang bank tersebut.

b. Based on the Letter of Approval for Lending Credit (SPPK) from PT Bank Bukopin Tbk Probolinggo Branch No. 084/PRB-PIM/V/2019 dated May 20, 2019, the Subsidiary obtained a working capital credit facility for the Manufacturing Machinery Factory Industry with a maximum credit of Rp500,000,000 with an interest rate of 14.5%/year. The loan period is 12 months with collateral in the form of a plot of land and building according to SHGB No. 9-15. On May 29, 2020, Company has paid off the bank loan.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit No. 022/OL/ADK-GRK/IX/2019 tanggal 25 September 2019, Entitas Anak memperoleh Fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dengan maksimum pinjaman Rp5.000.000.000. Utang ini dijamin dengan Cross Collateral dan Cross Default dengan fasilitas KMK PRK dan telah dilunasi pada tanggal 3 Agustus 2020.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Based on Letter of Credit Offering Decision No. 022/OL/ADK-GRK/IX/2019 dated September 25, 2019, the Subsidiary obtained working capital credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk With maximum loan of Rp5,000,000,000. This debt is secured by Cross Collateral and Cross Default with the KMK PRK facility and has been paid on August 3, 2020.

17. Uang Muka Penjualan

17. Deposits on Sales

	2020 Rp	2019 Rp
Berdasarkan Pelanggan/ By Customers		
Pihak Berelasi (Catatan 6)/ <i>Related Parties (Note 6)</i>	111,351,277,532	59,547,033,855
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
PT Kapuasindo Palm Industry (Catatan 38 dan 40b)/ <i>Notes 38 and 40b)</i>	10,940,248,429	10,940,248,429
PT Allied Process Technologies Indonesia	4,717,374,215	--
HEC-RDMP Balikpapan JO	3,847,018,004	--
PT Enviromate Technology International	2,151,300,000	--
PT Pemukasakti Manis Indah	1,615,550,000	--
PT JGC Indonesia	1,033,884,470	288,000,000
Peerless Asia Pacific Pte, Ltd	1,211,536,676	--
PT PG Gorontalo	631,362,000	1,010,432,000
PT Inka Multi Solusi Trading	510,548,050	510,548,050
Lain-lain (Dibawah Rp500 Juta)/ <i>Others (Below Rp500 Million)</i>	463,173,284	11,385,013,918
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	27,121,995,128	24,134,242,397
Jumlah/ Total	138,473,272,660	83,681,276,252

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

18. Beban Akruai

18. Accrued Expenses

	2020 Rp	2019 Rp	
Biaya Proyek dan Subkontraktor	119,205,954,812	87,184,637,941	Project Costs and Subcontractor
Gaji	6,505,880,225	7,694,915,426	Salaries
Jamsostek Ketenagakerjaan	2,474,591,955	--	Employment Social Security Contribution
Jasa Produksi	2,191,621,145	2,191,621,145	Performance
Detasering Karyawan	899,867,757	899,867,757	Employee Detachment
Pengganti Cuti	776,854,374	776,854,374	Leave Substitute
Pakaian Kerja	665,295,000	665,295,000	Uniform
Santunan Kematian	202,000,000	202,000,000	Bereavement Pay
Bunga Pinjaman	142,020,716	--	Loan Interest
Konsultan	128,627,693	--	Consultant
Biaya Pemeliharaan Gedung	--	550,000,000	Building Maintenance Costs
Jumlah	133,192,713,677	100,165,191,643	Total

19. Utang Lain-lain

19. Other Account Payables

	2020 Rp	2019 Rp
Berdasarkan Pelanggan/ By Customers		
Pihak Berelasi (Catatan 6)/ Related Parties (Note 6)	13,080,012,440	10,793,783,923
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Karyawan/ Employee	9,481,763,896	8,732,217,994
CV Saleh Amir	5,786,586,709	6,201,806,709
PT Sugico Graha	2,436,945,500	2,436,945,500
PT Intikarya Melvisindo	1,105,532,615	2,005,532,615
PT Atamora Teknik Makmur	1,951,768,000	2,551,768,000
PT SAS	704,505,786	704,505,786
Mitsubishi Power, Limited	617,378,584	617,378,584
PT Danan Jaya	--	2,000,000,000
PT Golden Pratama	--	1,500,000,000
Abbas Amhar Attamimi	--	650,000,000
PT Berkah Mekatek Jaya	--	500,000,000
Lain-lain (Dibawah Rp500 Juta)/ Others (Below Rp500 Million)	3,681,644,182	2,342,794,621
Sub Jumlah/ Sub Total	25,766,125,272	30,242,949,809
Jumlah/ Total	38,846,137,712	41,036,733,732

Utang Karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan utang kepada karyawan yang purna tugas dengan rincian sebagai berikut:

Employee Payables as of December 31, 2020 and 2019 represent the payables to the retired employees with detail as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Utang Karyawan	10,636,358,173	8,732,217,994	Employee Payables
Diskonto yang Belum Diamortisasikan	(1,154,594,277)	--	Unamortized Discount
Nilai Wajar	9,481,763,896	8,732,217,994	Fair Value

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Pendapatan Diterima di Muka

20. Unearned Revenue

	2020 Rp	2019 Rp
PT Krakatau Steel	49,615,882,096	52,578,024,304
Bagian Lancar/ <i>Current Portion</i>	(2,962,142,208)	(2,962,142,208)
Bagian Jangka Panjang/ <i>Long Term Portion</i>	46,653,739,888	49,615,882,096

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 8 Juli 2013 dengan akta dari Hajjah Eva Fitri Sagitarina, Notaris di Surabaya, PT Krakatau Steel menyewa lahan dan bangunan PT Boma Bisma Indra dengan seluas 12.437 m² dalam jangka waktu 24 tahun 2 bulan terhitung mulai 27 Juni 2013 dan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2037. Pembayaran atas sewa ini dilakukan dengan cara kompensasi utang PT Boma Bisma Indra kepada PT Krakatau Steel sejumlah Rp71.585.103.472 yang dibukukan sebagai pendapatan diterima dimuka.

Based on The Lease Agreement No. 8 dated July 8, 2013 with a deed from Hajjah Eva Fitri Sagitarina, Notary in Surabaya, PT Krakatau Steel leased the land and building of PT Boma Bisma Indra with an area of 12,437 sqm within a period of 24 years 2 months starting June 27, 2013 and ended on August 28, 2037. Payment of this lease is conducted by compensation of PT Boma Bisma Indra's loan to PT Krakatau Steel amounted to Rp71,585,103,472 which was recorded as unearned revenue.

21. Utang Dana Kreditur Lainnya

21. Other Creditors Debts

	2020 Rp	2019 Rp
Utang Pokok/ <i>Principal Loan</i>	67,829,047,752	67,829,047,752
Utang Bunga/ <i>Interest Loan</i>	33,875,003,922	34,225,003,922
Jumlah/ <i>Total</i>	101,704,051,674	102,054,051,674
Bagian Lancar/ <i>Current Portion</i>	(5,132,702,576)	(550,000,000)
Bagian Jangka Panjang/ <i>Long Term Portion</i>	96,571,349,098	101,504,051,674

Merupakan utang Perusahaan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) berdasarkan Akta Perjanjian Restrukturisasi Utang PT Boma Bisma Indra dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) No. 84 tanggal 21 Desember 2018 dari notaris Desman SH., M.Hum., MM., Notaris di Jakarta Utara, atas restrukturisasi saldo utang Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp115.913.099.291 yang terdiri dari utang tunggakan pokok sebesar Rp67.829.047.747, utang bunga sebesar Rp35.025.003.926, dan utang denda sebesar Rp13.059.047.618 dengan cara sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Utang tunggakan pokok sebesar Rp67.829.047.747 direstruktursasi dengan mengatur kembali penjadwalan pelunasannya kepada PT PPA serta penyesuaian tingkat suku bunga terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo, termasuk *grace period* selama 2 tahun.

Represents the Company's debt to PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) based on the Deed of Debt Restructuring Agreement PT Boma Bisma Indra with PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) No. 84 dated December 21, 2018 from notary Desman SH., M.Hum., MM., Notary in North Jakarta, for the restructuring of the Company's debt balance as of December 31, 2018 amounting to Rp115,913,099,291 which consists of principal arrears of Rp67,829,047,747, interest payable amounting to Rp35,025,003,926, and penalty payable amounting to Rp13,059,047,618 in the manner as stated in article 4 of the agreement as follows:

- a. *The principal arrears amounting to Rp67,829,047,747 were restructured by rearranging the repayment schedule to PT PPA and adjusting the interest rate from the effective date to the maturity date, including a grace period of 2 years.*

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

- b. Utang tunggakan bunga direstrukturisasi dengan mengatur penjadwalan pelunasannya kepada PT PPA tanpa dibebani secara angsuran, terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai jadwal pembayaran kembali utang tunggakan bunga.
- c. Utang denda direstrukturisasi dengan cara akan dihapuskan kewajiban pelunasannya dalam hal Perusahaan dalam 6 (enam) bulan pertama terhitung sejak tanggal efektif, telah membayar secara tertib dan sebagaimana mestinya. Dalam hal Perusahaan ternyata gagal dalam melakukan pembayaran angsuran bunga atas utang tunggakan pokok dan/atau angsuran utang tunggakan bunga dalam 6 (enam) bulan pertama terhitung sejak tanggal efektif, maka syarat dan ketentuan pelunasan utang denda akan ditetapkan kemudian oleh PT PPA dan dituangkan dalam suatu pengubahan atau addendum atas perjanjian restrukturisasi utang ini.

Tingkat suku bunga atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah 1,77% dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2028.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan telah melakukan pembayaran utang bunga.

Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, Perusahaan belum melakukan pembayaran atas utang pokok sebagaimana yang telah dijadwalkan yaitu setelah masa *grace periode* selesai pada tanggal 31 desember 2020 dan Perusahaan belum mendapat tanggapan dari PT PPA atas pengajuan penambahan *grace periode* atas angsuran tunggakan utang pokok selama satu tahun dalam suratnya No. 360/1000/05.2020 tanggal 20 Mei 2020.

- b. *Interest arrears payable were restructured by arranging the repayment schedule to PT PPA without being burdened with installments, starting from the effective date until the maturity date according to the schedule for repayment of interest arrears payable.*
- c. *Fines payable are restructured in a way that the obligation to pay off will be written off in the event that the Company, within the first 6 (six) months from the effective date, has paid in an orderly and proper manner. In the event that the Company fails to pay the interest installments on the arrears of principal and/or the interest arrears in the first 6 (six) months from the effective date, then the terms and conditions for the settlement of the fines payable will be determined later by PT PPA and set forth in a amendment or addendum to this debt restructuring agreement.*

The interest rate on this loan as of December 31, 2020 and 2019 is 1.77% and will mature on December 23, 2028.

As of December 31, 2020, the Company has paid the interest payments.

Until the date of financial reporting, the Company has not made payment on the principal debt as scheduled, namely after the grace period is completed on December 31, 2020 and the Company has not received a response from PT PPA on the submission of grace period for installment of principal debt arrears for one year in its letter No. 360/1000/05.2020 dated May 20, 2020.

22. Utang Bank Jangka Panjang

22. Long Term Bank Loan

	2020 Rp	2019 Rp
Jatuh Tempo dalam Tahun/ <i>Maturity in Year</i>		
2020	--	706,765,401
2021	808,309,521	808,309,521
2022	924,442,941	924,442,941
2022	1,057,261,765	1,057,261,765
2024	787,944,225	787,944,225
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	3,577,958,452	4,284,723,853
Bagian Lancar/ <i>Current Portion</i>	(808,309,521)	(706,765,401)
Bagian Jangka Panjang/ <i>Long Term Portion</i>	2,769,648,931	3,577,958,452

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Merupakan utang bank Entitas Anak berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari PT Bank Bukopin Tbk Cabang Probolinggo No. 084/PRB-PIM/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum kredit senilai Rp4.500.000.000 dengan suku bunga 13,5%/tahun. Jangka waktu pinjaman 60 bulan dengan jaminan berupa sebidang tanah serta bangunan sesuai SHGB No. 9-15. Utang tersebut tidak mensyaratkan *financial covenant*.

Represents Subsidiary's bank loan based on the Approval Letter for Credit Issuance (SPPK) No. 084/PRBPIMN/2019 dated May 20, 2019, The Company obtained working capital credit facilities with maximum credit amounting to Rp4,500,000,000 with an interest rate of 13.5%/year. This loan will due within 60 months with collateral of a plot of land and building according to SHGB No. 9-15. This loan has no financial covenant requirement.

23. Liabilitas Sewa

23. Lease Liability

Pembayaran liabilitas sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payments under finance leases together with the present value of the minimum lease payments as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Liabilitas Sewa Bruto -			Gross Lease Liabilities -
Pembayaran Minimum			Minimum Lease Payments
Kurang dari 1 Tahun	1,112,717,941	--	Less than 1 Year
Lebih dari 1 Tahun	772,426,178	--	Over than 1 Years
Sub Jumlah	1,885,144,119	--	Sub Total
Beban Keuangan di Masa Depan atas Sewa	(175,746,488)	--	Future Finance Charges on Leases
Nilai Kini Liabilitas Sewa	1,709,397,631	--	Present Value of Lease Liabilities
Bagian Lancar	(987,990,120)	--	Current Portion
Bagian Jangka Panjang	721,407,511	--	Long Term Portion

Tidak ada pembatasan signifikan yang ditetapkan oleh *lessor* dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Perusahaan terkait dengan penggunaan aset atau pencapaian kinerja keuangan tertentu.

There is no significant restriction imposed by lease arrangements between lessor and the Company on use of the assets or maintenance of certain financial performance.

Mutasi pinjaman adalah sebagai berikut:

The movements in borrowings are as follows:

	2020 Rp	
Saldo Awal	--	Beginning Balance
Penyesuaian Saldo Awal atas Penerapan PSAK 73	37,240,000	Opening Balance Adjustment upon Application of PSAK 73
Arus Kas:		Cash Flow:
Pembayaran Pinjaman	(462,085,537)	Payment of Borrowing
Penambahan Aset Hak Guna	2,134,243,168	Addition of Right of Use Assets
Saldo Akhir	1,709,397,631	Ending Balance

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

24. Utang Pembiayaan

24. Finance Liability

	2020 Rp	2019 Rp
Bagian Jangka Pendek/ Current Portion of:		
PT Bank Negara Indonesia Multifinance	217,560,385	--
PT Bank Rakyat Indonesia Multifinance	198,880,467	231,925,820
Jumlah/ Total	416,440,852	231,925,820
Bagian Jangka Panjang/ Long-Term Portion of:		
PT Bank Rakyat Indonesia Multifinance	54,577,366	279,806,025
Jumlah/ Total	54,577,366	279,806,025

PT Bank Negara Indonesia Multifinance

Berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan No. BNIMF/6.1.115 tanggal 31 Mei 2019, Perusahaan mendapat fasilitas *Factoring* atau Anjak Piutang dengan maksimum pinjaman sebesar Rp2.500.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Anjak Piutang. Saldo utang pada tanggal 31 Desember 2020 telah dilunasi pada tanggal 12 Maret 2021.

PT Bank Negara Indonesia Multifinance

Based on the Financing Decree No. BNIMF/6.1.115 dated May 31, 2019, the Company obtained Factoring facilities with a maximum loan of Rp2,500,000,000. The credit facility period is 12 months from the signing date of the Factoring Agreement. The outstanding balance as of December 31, 2020 has been paid on March 12, 2021.

PT Bank Rakyat Indonesia Multifinance

Merupakan Utang Pembiayaan Konsumen Entitas Anak berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen No. 002LA2019024 tanggal 22 April 2019, Perusahaan mengadakan ikatan dengan PT BRI Multifinance atas pengadaan *Forklift* merk Hangcha 10T dengan Isuzu A-6BG1 QP diesel engine and Chinese transmisssion tahun 2018 (baru) dengan nilai pembiayaan senilai Rp725.000.000 dengan bunga 15,15% per tahun. Perjanjian ini akan berakhir pada bulan Maret 2022.

PT Bank Rakyat Indonesia Multifinance

Represents Subsidiary's Customer Financing Liability based on the consumer financing agreement No. 002LA2019024 dated April 22, 2019, the Company entered into a partnership with PT BRI Multifinance for the procurement of the Hangcha brand Forklift 10T with Isuzu A-6BG1 QP diesel engine and chinese transmission in 2018 (new) with a financing value of Rp725,000,000 with interest regularly 15.15% per annum. This agreement due in March 2022.

25. Perpajakan

25. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2020 Rp	2019 Rp	
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai			Output Value Added Tax -
Keluaran - Wajib Pungut	28,149,372,387	34,350,688,153	Withholding Tax
Pajak Pertambahan Nilai Masukan	5,629,177,336	24,851,622,772	Input Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	4,961,588,243	5,257,802,459	Income Tax Article 4 (2)
Pajak Penghasilan Pasal 22	--	1,245,030,434	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan Pasal 23	--	1,802,128,551	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 28a			Income Tax Article 28a
Tahun 2018	573,687,787	573,687,787	Year 2018
Tahun 2019	1,458,482,241	1,458,482,241	Year 2019
Tahun 2020	748,819,729	--	Year 2020
Sub Jumlah (Dipindahkan)	41,521,127,723	69,539,442,397	Sub Total (Transferred)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Sub Jumlah (Pindahan)	41,521,127,723	69,539,442,397	Sub Total (To Transfer)
Entitas Anak			The Subsidiary
Pajak Penghasilan Pasal 28a	792,683,626	--	Income Tax Article 28a
Sub Jumlah	792,683,626	--	Sub Total
Jumlah	42,313,811,349	69,539,442,397	Total

Perusahaan telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, dengan laba neto fiskal masing-masing sebesar Rp14.375.154.376 yang mana tidak sama dengan laporan keuangan (*audited*) Perusahaan tahun yang berakhir 2019 di mana Perusahaan mengalami rugi fiskal masing-masing sebesar Rp26.148.583.717. Hal tersebut disebabkan perbedaan koreksi fiskal yang telah diperhitungkan dalam laporan keuangan (*audited*) dengan yang telah dilaporkan dalam SPT oleh Perusahaan.

The Company has reported an Corporate Annual Tax Return (SPT) for the year ended December 31, 2019 and 2018, respectively, to the Head Officer of Tax Office Taxpayer Besar Tiga, with a fiscal net profit of Rp14,375,154,376, which is different as the Company's financial statement (*audited*) for the years ended 2019 whereas the Company experienced fiscal loss amounting to Rp26,148,583,717. It was occur due to differences in fiscal corrections calculated in the financial statements (*audited*) with those reported in Annual Tax Return by the Company.

Pajak Pertambahan Nilai Keluaran (Wajib Pungut) merupakan pajak yang belum diterima Surat Setoran Pajak.

Output Value Added Tax (Withholding Tax) represents taxes which Tax Payment Slip has yet been received.

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2020 Rp	2019 Rp	
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan Wajib Pungut	35,024,178,177	28,416,236,539	Value Added Tax - Input Withholding Tax
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran Wajib Pungut	26,035,642,746	47,368,777,320	Value Added Tax - Output Withholding Tax
Pajak Penghasilan Pasal 21	867,940,731	603,585,027	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 22	2,513,632,316	--	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan Pasal 23	730,737,373	--	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final	4,748,820,614	--	Income Tax Article 4 (2) Final
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	--	798,038,441	Output Value Added Tax
Utang Pajak Bumi dan Bangunan	1,117,003,778	1,117,003,778	Land and Building Tax Payable
Sub Jumlah	71,037,955,735	78,303,641,105	Sub Total
Entitas Anak			The Subsidiary
Pajak Penghasilan Pasal 29			Income Tax Article 29
Tahun 2018	465,689,319	476,680,379	Year 2018
Tahun 2019	555,762,164	555,762,164	Year 2019
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	1,479,002,441	1,973,317,165	Output Value Added Tax
Sub Jumlah	2,500,453,924	3,005,759,708	Sub Total
Jumlah	73,538,409,659	81,309,400,813	Total

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

c. Pajak Penghasilan Badan

Rincian beban pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Perusahaan		
Pajak Kini	--	--
Manfaat Pajak Tangguhan	7,069,039,766	(5,549,563,489)
Sub Jumlah	7,069,039,766	(5,549,563,489)
Entitas Anak		
Pajak Kini	413,375,714	604,407,750
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	159,942,392	(44,785,996)
Sub Jumlah	573,318,106	559,621,754
Jumlah	7,642,357,872	(4,989,941,735)

Berikut adalah rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba (rugi) komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Rugi Konsolidasian Sebelum		
Pajak Penghasilan Badan	(65,816,098,900)	(48,090,184,260)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		
Entitas Anak	(168,128,789)	3,798,831,866
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		
Perusahaan	(65,647,970,111)	(51,889,016,126)
Penghasilan Final	(81,392,475,579)	(89,241,942,054)
Beban atas Penghasilan Final	89,162,186,989	116,419,710,432
Laba (Rugi) Sebelum Pajak yang		
Tidak Dikenakan Pajak Final	(57,878,258,701)	(24,711,247,748)
Perbedaan Tetap		
Beban Penjualan	33,538,641	52,074,083
Beban Administrasi dan Umum	756,326,446	2,144,454,136
Beban Lain-lain	30,785,080,233	3,497,770,332
Pendapatan Bunga Deposito	(269,626,237)	(219,162,759)
Pendapatan Sewa dan Jasa	(2,962,142,208)	(2,962,142,208)
Jumlah	28,343,176,875	2,512,993,584
Perbedaan Waktu		
Beban Penyusutan Aset Tetap	671,707,259	(762,927,907)
Cadangan Penurunan Nilai		
Piutang Usaha	21,329,288,948	--
Beban Imbalan Kerja	(2,311,646,396)	(3,187,401,607)
Diskonto Utang Karyawan	(1,154,594,277)	--
Beban Penyusutan		
Aset Hak Guna	91,985,844	--
Jumlah	18,626,741,378	(3,950,329,514)
Jumlah Koreksi Fiskal	46,969,918,253	(1,437,335,930)
Rugi Fiskal	(10,908,340,448)	(26,148,583,678)

c. Corporate Income Tax

Details of corporate income tax expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

The Company
Current Tax
Deferred Tax Benefits
Sub Total
The Subsidiary
Current Tax
Deferred Tax Expenses (Benefits)
Sub Total
Total
Consolidated Loss
Before Corporate Income Tax
Profit (Loss) Before Income Tax of
Subsidiaries
Profit Before Income Tax of
the Company
Final Income Before Expense
Expenses on Final Income
Profit (Loss) Before Tax
Non Final Tax Charged
Permanent Differences
Selling Expenses
General and Administrative Expenses
Other Expenses
Deposits Interest Income
Rental and Service Income
Total
Timing Differences
Depreciation Expenses of Fixed Assets
Allowance for Impairment of
Accounts Receivable
Employee Benefits Expenses
Employee Discounted
Depreciation Expenses of
Right of Use Assets
Total
Total Fiscal Corrections
Fiscal Loss

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Pembayaran Pajak di Muka			Advance Tax Payment
Pajak Penghasilan Pasal 23	412,006,729	129,495,142	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 22	336,813,000	1,328,987,099	Income Tax Article 22
Jumlah	748,819,729	1,458,482,241	Total
Lebih Bayar			Over Payment
Pajak Penghasilan - Perusahaan	<u>(748,819,729)</u>	<u>(1,458,482,241)</u>	of Income Tax - The Company
Kurang (Lebih) Bayar			Under (Over) Payment
Pajak Penghasilan - Entitas Anak	<u>(792,683,626)</u>	<u>555,762,164</u>	of Income Tax - Subsidiary

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

	Dikreditkan (Dibebankan)						
	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ Impact on Initial Implementation of PSAK 71	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited Income (Charged) to for the Year	ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the Year	Koreksi DPP/ DPP Adjustment	Koreksi Perubahan Tarif/ Correction of Tariff Changes		
	31 Desember 2019/ December 31, 2019 Rp					31 Desember 2020/ December 31, 2020 Rp	
Perusahaan							The Company
Liabilitas Imbalan Kerja	469,190,706	--	(508,562,207)	--	(47,605,213)	(86,976,714)	Employee Benefit Liabilities
Penyusutan Aktiva Tetap	(11,719,211,969)	--	147,775,597	--	2,330,408,249	(9,241,028,124)	Depreciation of Fixed Assets
Penyusutan Aset Hak Guna	--	--	20,236,886	--	(1,839,717)	18,397,169	Depreciation of Right of Use Assets
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	1,262,055,545	--	--	--	(252,411,111)	1,009,644,434	Allowance for Impairment Losses on Other Receivables
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha	24,948,437	11,560,575,953	4,692,443,569	--	(2,743,690,657)	13,534,277,301	Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable
Diskon Utang Karyawan	--	--	(254,010,741)	--	23,091,886	(230,918,855)	Discounted Employee Loan
Rugi Fiskal	12,656,544,396	--	(10,256,709,498)	--	(218,166,809)	2,181,668,089	Fiscal Loss
Sub Jumlah	2,693,527,115	11,560,575,953	(6,158,826,394)	--	(910,213,372)	7,185,063,301	Sub Total
Liabilitas Imbalan Kerja	6,128,293,953	--	--	638,145,812	--	(1,283,672,046)	Employee Benefit Liabilities
Sub Jumlah - Perusahaan	8,821,821,068	11,560,575,953	(6,158,826,394)	638,145,812	--	(2,193,885,418)	Sub Total - The Company
Entitas Anak							The Subsidiary
Aset Pajak Tangguhan							Deferred Tax Assets
Entitas Anak - Bersih	2,447,816,607	331,152,087	196,421,079	(334,350,504)	142,978,764	(499,342,235)	of the Subsidiary - Net
Sub Jumlah - Entitas Anak	2,447,816,607	331,152,087	196,421,079	(334,350,504)	142,978,764	(499,342,235)	Sub Total - The Subsidiary
Jumlah	11,269,637,675	11,891,728,040	(5,962,405,315)	303,795,308	142,978,764	(2,693,227,653)	Total

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Income for the Year Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprensensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the Year Rp	31 Desember 2019/ December 31, 2019 Rp	
Perusahaan					The Company
Liabilitas Imbalan Kerja	1,266,041,108	(796,850,402)	--	469,190,706	Employee Benefits Liabilities
Penyusutan Aktiva Tetap	(11,528,479,992)	(190,731,977)	--	(11,719,211,969)	Depreciation of Fixed Assets
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	1,262,055,545	--	--	1,262,055,545	Allowance for Impairment Losses on Other Receivables
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha	24,948,437	--	--	24,948,437	Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable
Rugi Fiskal	6,119,398,528	6,537,145,868	--	12,656,544,396	Fiscal Loss
Sub Jumlah	(2,856,036,374)	5,549,563,489	--	2,693,527,115	Sub Total
Liabilitas Imbalan Kerja	5,220,852,873	--	907,441,080	6,128,293,953	Employee Benefits Liabilities
Sub Jumlah - Perusahaan	2,364,816,499	5,549,563,489	907,441,080	8,821,821,068	Sub Total - The Company
Entitas Anak					The Subsidiary
Aset Pajak Tangguhan Entitas Anak - Bersih	2,319,463,905	44,785,996	83,566,706	2,447,816,607	Deferred Tax Assets of the Subsidiary - Net
Sub Jumlah - Entitas Anak	2,319,463,905	44,785,996	83,566,706	2,447,816,607	Sub Total - The Subsidiary
Jumlah	4,684,280,404	5,594,349,485	991,007,786	11,269,637,675	Total

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil
perkalian laba akuntansi sebelum pajak
dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai
berikut:

A reconciliation between the total tax expense
and the amounts computed by applying the
effective tax rates to income before tax as
follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Rugi Konsolidasian Sebelum Pajak Penghasilan Badan	(65,816,098,900)	(48,090,184,260)	Consolidated Loss Before Corporate Income Tax
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	(168,128,789)	3,798,831,866	Profit (Loss) Before Income Tax of Subsidiaries
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	(65,647,970,111)	(51,889,016,126)	Profit Before Income Tax of the Company
Penghasilan Final	(81,392,475,579)	(89,241,942,054)	Final Income Before Expense
Beban atas Penghasilan Final	89,162,186,989	116,419,710,432	Expenses on Final Income
Laba (Rugi) Sebelum Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Final	(57,878,258,701)	(24,711,247,748)	Profit (Loss) Before Tax Non Final Tax Charged
Tarif Pajak yang Berlaku 22% x (Rp57.878.258.701)	12,733,216,914	--	Effective Tax Rate 22% x (Rp57,878,258,701)
25% x (Rp24.711.247.748)	--	6,177,811,937	25% x (Rp24,711,247,748)
Pengaruh Pajak atas Beban yang Tidak Dapat Dikurangkan Menurut Pajak			Tax Effect on Non Deductible Expense
Beban Penjualan	(7,378,501)	(13,018,521)	Selling Expenses
Beban Administrasi dan Umum	(166,391,818)	(536,113,534)	General and Administrative Expenses
Beban Lain-lain	(6,772,717,651)	(874,442,583)	Other Expenses
Pendapatan Bunga Deposito	59,317,772	54,790,638	Deposits Interest Income
Pendapatan Sewa dan Jasa	651,671,286	740,535,552	Rental and Service Income
Jumlah Manfaat Pajak Penghasilan	6,497,718,002	5,549,563,489	Total Income Tax Benefit
Koreksi Perubahan Tarif	(910,213,372)	--	Correction of Tariff Changes
Estimasi Rugi Fiskal Yang Tidak Dapat Dipulihkan	(12,656,544,396)	--	Estimated Fiscal Loss Cannot be Recovered
Entitas Anak	(573,318,106)	(559,621,754)	Subsidiary
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(7,642,357,872)	4,989,941,735	Total Income (Expense) Tax Benefit

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

26. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Liabilitas Imbalan Kerja		
Perusahaan	26,978,955,021	26,389,938,635
Entitas Anak	10,049,341,198	10,019,160,106
Sub Jumlah	37,028,296,219	36,409,098,741
Bagian Lancar	(5,912,022,741)	(4,743,456,982)
Bagian Jangka Panjang	31,116,273,478	31,665,641,759

Grup telah melakukan perhitungan liabilitas imbalan pascakerja untuk karyawan tetap sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan yang berhak atas manfaat tersebut adalah 427 dan 447 karyawan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan melalui laporan aktuaris No. 445/IPK/KKA-TBA/VI-2021 tertanggal 4 Juni 2021 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan PT Binaputera Jaga Hikmah melalui laporan aktuaris No. 573/PSAK-BJH/XI-2019 tanggal 20 November 2019 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan pertimbangan asumsi utama sebagai berikut:

	2020	2019
Tingkat Diskonto per Tahun	6,03% - 6,06%	7,21% - 7,39%
Tingkat Kenaikan Gaji per Tahun	2,00% - 7,00%	2% - 7,5%
Tingkat Cacat	10% x Mortality Table	10% x Mortality Table
Mortality	TMI IV-2019 Unisex	TMI IV-2019 Unisex
Tingkat Pensiun Normal	56 tahun/ Years	56 tahun/ Years
Tingkat Pemutusan yang Lain	Nihil/ Nil	Nihil/ Nil

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi sehubungan dengan perhitungan imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Perusahaan		
Biaya Jasa Kini	1,031,269,521	1,074,804,997
Biaya Bunga	1,950,216,465	2,101,753,650
Sub Jumlah	2,981,485,986	3,176,558,647
Entitas Anak		
Beban Tahun Berjalan	1,265,403,437	1,248,735,689
Jumlah	4,246,889,423	4,425,294,336

26. Employee Benefits Liabilities

The employee benefits liabilities as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Employee Benefits Obligations
The Company
Subsidiary
Sub Total
Current Portion
Long Term Portion

The Group has calculated the post-employment benefits liability for permanent employees in accordance with Law No. 13/2003 concerning manpower. The number of employees entitled to these benefits is 427 and 447 employees for the periods ended December 31, 2020 and 2019.

Post-employment benefits liability is calculated by independent actuary Consultant Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan through actuary report No. 445/IPK/KKA-TBA/VI-2021 dated June 4, 2021 for the year ended December 31, 2020 and PT Binaputera Jaga Hikmah through actuary report No. 573/PSAK-BJH/XI-2019 dated November 20, 2019 for the year ended December 31, 2019.

The post-employment benefits liabilities are calculated using the "Projected Unit Credit" method with the following main assumptions into consideration:

Discount Rate per Annum
Salary Increment Rate per Annum
Disability Rate
Mortality
Normal Retirement Rate
Other Termination Rate

Amounts recognized in the income statements in respect of these employment benefits are as follows:

The Company
Current Service Cost
Interest Cost
Sub Total
Subsidiary
Expense for the Year
Total

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Mutasi imbalan kerja dalam laporan posisi
keuangan sebagai berikut:

*Movements in employee benefit liabilities recognized
in the statement of financial position are as follows:*

	2020 Rp	2019 Rp	
Perusahaan			The Company
Saldo Awal Tahun	26,389,938,636	25,947,575,921	Beginning of the Year
Beban Tahun Berjalan	2,981,485,986	3,176,558,647	Current Year Expense
Pembayaran Tahun Berjalan	(5,293,132,382)	(6,363,960,254)	Current Year Payment
Pengukuran Kembali			Remeasurement Actuarial
Kerugian Aktuarial Dibebankan ke Other Comprehensive Income	2,900,662,783	3,629,764,322	Loss Charged to Other Comprehensive Income
Sub Jumlah	26,978,955,023	26,389,938,636	Sub Total
Entitas Anak			Subsidiary
Saldo Awal Tahun	10,019,160,106	9,554,800,165	Beginning of the Year
Beban Tahun Berjalan	1,265,403,438	1,248,735,689	Current Year Expense
Pembayaran Tahun Berjalan	--	(1,118,642,568)	Current Year Payment
Pengukuran Kembali (Keuntungan)			Remeasurement Actuarial
Kerugian Aktuarial Dibebankan ke Other Comprehensive Income	(1,235,222,346)	334,266,820	(Gain) Loss Charged to Other Comprehensive Income
Sub Jumlah	10,049,341,198	10,019,160,106	Sub Total
Saldo Akhir Tahun	37,028,296,221	36,409,098,742	End of the Year

Rekonsiliasi rugi komprehensif lain dan
pengukuran kembali program imbalan pasti.

*Reconciliation loss on other comprehensive income
from the remeasurement of defined benefit
obligation.*

	2020 Rp	2019 Rp	
Perusahaan			The Company
Akumulasi Kerugian			Cumulative Amount of Actuarial
Aktuarial Awal Tahun	24,513,175,812	20,883,411,490	Losses Beginning of the Year
Kerugian Aktuarial pada Periode Berjalan	2,900,662,783	3,629,764,322	Actuarial Loss Recognized in Current Period
Sub Jumlah	27,413,838,595	24,513,175,812	Sub Total
Pajak Penghasilan Awal Tahun	(6,128,293,953)	(5,220,852,872)	Income Tax Beginning of the Year
Penyesuaian Tarif Pajak Tangguhan	1,283,672,046	--	Adjustment Deferred Tax Rate
Manfaat Pajak Tangguhan	(638,145,812)	(907,441,081)	Income Tax Benefit
Sub Jumlah	(5,482,767,719)	(6,128,293,953)	Sub Total
Entitas Anak			Subsidiary
Akumulasi Kerugian			Cumulative Amount of Actuarial
Aktuarial Awal Tahun	1,746,120,895	1,411,854,077	Losses Beginning of the Year
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial pada Periode Berjalan	(1,235,222,345)	334,266,818	Actuarial (Gain) Loss Recognized in Current Period
Sub Jumlah	510,898,550	1,746,120,895	Sub Total
Pajak Penghasilan Awal Tahun	(436,530,224)	(352,963,519)	Income Tax Beginning of the Year
Penyesuaian Tarif Pajak Tangguhan	62,601,598	--	Adjustment Deferred Tax Rate
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	271,748,916	(83,566,707)	Income Tax Expense (Benefit)
Jumlah Pajak Penghasilan	(102,179,710)	(436,530,226)	Total Income Tax
Akumulasi Kerugian Aktuarial Akhir Tahun	22,339,789,716	19,694,472,528	Cumulative Amount of Actuarial Losses End of Year

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan
kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto
dan kenaikan gaji yang diharapkan.

*Significant actuarial assumptions for the
determination of the defined obligation are discount
rate and expected salary increase.*

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban Imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

	2020	2019
	Rp	Rp
a. Tingkat Diskonto		
Kenaikan sebesar 1%	35,531,323,676	34,856,394,057
Penurunan sebesar 1%	38,653,580,693	38,087,794,063
b. Tingkat Kenaikan Gaji ke Depan		
Kenaikan sebesar 1%	38,591,714,221	38,265,153,049
Penurunan sebesar 1%	35,562,014,415	34,664,555,245

Analisa jatuh tempo liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Jatuh Tempo Manfaat		
Kurang dari 1 Tahun	5,912,022,741	4,743,456,982
1-5 Tahun	4,095,647,325	5,703,548,789
2-5 Tahun	12,899,578,293	11,373,269,641
Diatas 5 Tahun	14,121,047,860	14,588,823,329
Jumlah	37,028,296,219	36,409,098,741

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku pada tanggal-tanggal pelaporan.

Interest Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond. A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

a. Discount Rate	
An Increase of 1%	
An Decrease of 1%	
b. Increase of Future Salary Rate	
An Increase of 1%	
An Decrease of 1%	

Expected maturity analysis of employee benefit liabilities are as follows:

	2020	2019
	Rp	Rp
Jatuh Tempo Manfaat		
Kurang dari 1 Tahun	5,912,022,741	4,743,456,982
1-5 Tahun	4,095,647,325	5,703,548,789
2-5 Tahun	12,899,578,293	11,373,269,641
Diatas 5 Tahun	14,121,047,860	14,588,823,329
Jumlah	37,028,296,219	36,409,098,741

Management believes that the above amounts are adequate to cover the requirements at reporting dates.

27. Modal Saham

27. Share Capital

	31 Desember 2020 dan 2019/ December 31, 2020 and 2019			
	Jumlah Saham Lembar/ Number of Shares	Harga per Lembar Saham/ Price per Share	Jumlah/ Total	
Modal Dasar	1,300,000	1,000,000	1,300,000,000,000	Authorized Capital
Saham yang Belum Ditempatkan	(959,084)	1,000,000	(959,084,000,000)	Unissued Shares
Saham yang Ditempatkan dan Disetor	340,916	1,000,000	340,916,000,000	Issued and Paid Up Shares

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Para Pemegang Saham Perusahaan No. 41 tanggal 22 Oktober 2020 dari Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH Notaris di Surabaya, para pemegang Saham telah menyetujui perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham seri A Dwiwarna dan saham Seri B yang perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0401105 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 dengan susunan permodalan menjadi sebagai berikut:

Based on the Company's Notarial Deed of of The Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company No. 41 dated October 22, from Notary Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH Notary in Surabaya, the Shareholders have agreed the changes type of shares from no series type to consist of A Golden Stock series shares and B Series shares whose changes have been reported to and accepted by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Acknowledgement letter No. AHU-AH.01.03-0401105 Year 2020 dated October 23, 2020 the composition of capital stock are as follows:

2020

	Jumlah Saham Lembar/ Number of Shares	Nilai Nominal Saham/ Par Value	Jumlah Modal/ Total Share Capital	
Seri A Dwiwarna	1	1,000,000	1,000,000	Serie A Golden Stock
Seri B	340,915	1,000,000	340,915,000,000	Serie B
Jumlah	340,916		340,916,000,000	Total

Cadangan Likuiditas

Cadangan likuidasi berasal dari cadangan eks Likuidasi dari PN menjadi Persero tahun 1971 sebesar Rp35.170.071 berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-537/MK/011/1987 tanggal 9 Mei 1987. Sebagian cadangan likuidasi tersebut sebesar Rp2.426.093 dikonversikan sebagai tambahan setoran modal pemerintah, sehingga cadangan likuidasi yang tersisa menjadi Rp32.743.977.

Liquidity Reserves

The liquidation reserves came from the ex-liquidation reserves from PN to Persero in 1971 amounting to Rp35,170,071 based on the Minister of Finance's letter No. S-537/MK/011/1987 dated May 9, 1987. Part of the liquidation reserves amounting to Rp2,426,093 were converted as additional paid-in capital government, so the remaining liquidation reserve is Rp32,743,977.

Modal Hibah

Grant Capital

	31 Desember/ December 31, 2020 dan/ and 2019 Rp	
Sumbangan Peralatan I dari KHD untuk Pelaksanaan Kontrak PLN C di Unit Bisma	882,739,929	Donation of Tester Equipment from KHD for the Implementation of the PLN C Contract at the Bisma Unit
Sumbangan berupa Tools, Jig, Fixture dan Test Running Way dari Nichiment untuk Pengujian Diesel	591,364,817	Donations in the Form of Tools, Jigs, Fixtures and a Test Running Way from Nichiment for Diesel Testing
Sumbangan berupa Mesin dan Dana yang Digunakan untuk Investasi kepada Entitas Anak "PT Bromo Steel Indonesia"	13,244,845,407	Donations in the Form of Machine and Fund which Used to Investment to Subsidiary "PT Bromo Steel Indonesia"
Sumbangan Mesin Copy Board dan C.Itoh & Co. Ltd untuk Paket B	6,500,000	Donation of a Copy Board Machine and C.Itoh & Co. Ltd for Package B
Hibah Tanah di Kemayoran dari PT Badan Pengelola Industri Strategis	8,082,978,960	Land Grant in Kemayoran from PT Badan Pengelola Industri Strategis
Jumlah	22,808,429,113	Total

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Pada laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2020, Manajemen mencatat Modal Hibah sumbangan berupa mesin dan dana yang digunakan untuk investasi kepada Entitas Anak "PT Bromo Steel Indonesia" sejumlah Rp13.244.845.407. Pencatatan ini tidak sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Entitas Anak "PT Bromo Steel Indonesia" No. 54 tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp14.217.194.575 dikarenakan perbedaan pencatatan nilai mesin sejumlah Rp972.349.168.

In the consolidated financial statement as of December 31, 2020, Management recorded grant capital from donation in form of machine and fund which used to investment to Subsidiary "PT Bromo Steel Indonesia" amounting Rp13,244,845,407. This record doesn't agree to the deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholder of Subsidiary "PT Bromo Steel Indonesia" No. 54 dated September 29, 2020 amounting Rp14,217,194,575 due to the difference of recorded value of machine amounting to Rp972,349,168.

28. Kepentingan Non-Pengendali

Merupakan kepentingan *non-pengendali* sehubungan dengan investasi sebesar 0,60% pada PT Bromo Steel Indonesia. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	2020 Rp	2019 Rp
Nilai Tercatat - Awal	(49,593,189)	(67,524,248)
Dampak Penerapan PSAK 71 dan 72	(415,677)	--
Bagian Laba Bersih	3,150,140	17,931,059
Jumlah	(46,858,726)	(49,593,189)

28. Non-Controlling Interests

Represents non-controlling interest of 0.60% investment in PT Bromo Steel Indonesia. Balance as of December 31, 2020 and 2019 consist of:

Carrying Amount - Beginning
Impact In Implementation of
PSAK 71 and 72
Share of Net Profit
Total

29. Penjualan

29. Revenue

	2020 Rp	2019 Rp
a. Berdasarkan Divisi/ By Division		
Divisi Peralatan Industri dan Pengecoran/ <i>Industrial Equipment and Foundry Division</i>	78,240,931,252	71,030,385,040
Divisi Teknik, Pengadaan, Konstruksi dan Mesin/ <i>Engineering, Procurement, Construction and Machining Division</i>	76,313,639,078	123,670,209,106
Divisi Diesel/ <i>Diesel Division</i>	13,060,823,300	--
Divisi Jasa Pelaksana Konstruksi/ <i>Construction Services Division</i>	73,712,683,530	71,803,779,595
Jumlah/ Total	241,328,077,160	266,504,373,741
b. Berdasarkan Pelanggan/ By Customers		
Pihak Berelasi (Catatan 6)/ <i>Related Parties (Note 6)</i>	132,465,230,603	127,484,873,687
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>	108,862,846,557	139,019,500,054
Jumlah/ Total	241,328,077,160	266,504,373,741

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

30. Beban Pokok Penjualan

30. Cost of Goods Sale

	2020 Rp	2019 Rp	
Beban Bahan Baku, Bahan Pembantu dan Suku Cadang			Raw Material, Supplementary Material and Sparepart Expenses
Persediaan Bahan Awal	14,664,018,411	15,957,089,423	Inventory Beginning Balance
Pembelian Bahan	52,983,555,238	31,877,494,998	Purchase of Materials
Persediaan Bahan Akhir	(8,451,050,038)	(14,664,018,411)	Inventory Ending Balance
Sub Jumlah	59,196,523,611	33,170,566,010	Sub Total
Beban Tenaga Kerja	59,822,710,882	97,866,299,497	Labor Expenses
Beban Overhead			Overhead Load
Subkontraktor	109,153,549,834	52,112,848,526	Subcontractors
Beban Produksi Tak Langsung	28,135,483,634	32,409,679,358	Indirect Production Cost
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 13)	653,522,003	1,765,516,886	Amortization of Intangible Assets (Note 13)
Beban Operasional Order	23,919,405,088	31,935,065,654	Operational Order Cost
Penyusutan (Catatan 11)	2,940,540,613	2,544,739,418	Depreciation (Note 11)
Transportasi dan Pemetian	1,661,996,573	17,208,348,674	Transport and Packing
Sewa Alat	1,169,128,859	4,010,328,718	Equipment Rental Cost
Overhead Lapangan	--	1,287,344,787	Overhead
Sub Jumlah	167,633,626,604	143,273,872,021	Sub Total
Jumlah Beban Pokok Produksi	286,652,861,097	274,310,737,528	Total Production Costs
Persediaan Dalam Proses			Work in Process
Persediaan Barang pada Proses Awal	43,066,275,551	56,300,750,394	Work in Pocess at the Beginning Process
Persediaan Barang pada Proses Akhir	(100,532,183,440)	(43,066,275,551)	Work in Pocess at the End Process
Sub Jumlah Persediaan Dalam Proses	(57,465,907,889)	13,234,474,843	Sub Total Work in Porocess
Pekerjaan Dalam Konstruksi	(2,312,224,286)	(4,210,499,170)	Construction in Progress
Jumlah Beban Pokok Penjualan	226,874,728,922	283,334,713,201	Total Cost of Goods Sold

31. Beban Penjualan

31. Selling Expenses

	2020 Rp	2019 Rp	
Upah dan Gaji	2,380,956,197	2,566,859,889	Wages and Salaries
Beban Kantor	593,629,296	1,272,621,055	Office Expenses
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 11)	530,130,684	404,122,513	Fixed Assets Depreciation (Note 11)
Transportasi	222,834,730	228,998,797	Transportation
Kesejahteraan Pegawai	91,059,241	380,768,986	Employee Welfare
Lain-lain	128,000	320,260,219	Others
Jumlah	3,818,738,148	5,173,631,459	Total

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

32. Beban Umum dan Administrasi

32. General and Administrative Expenses

	2020 Rp	2019 Rp	
Upah dan Gaji	21,788,653,411	20,007,177,763	Wages and Salaries
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha (Catatan 4)	21,329,288,948	--	Allowance for Impairment of Trade Receivables (Note 4)
Beban Pajak	15,757,323,561	1,180,544,559	Tax Expenses
Beban Kantor	4,837,868,062	4,146,062,817	Office Expenses
Kesejahteraan Pegawai	2,831,552,160	3,398,312,346	Employee Welfare
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 12)	741,653,664	--	Depreciation of Right-of-Use Assets (Note 12)
Asuransi	631,326,446	664,746,045	Insurance
Beban Pemeliharaan	432,962,609	113,354,025	Maintenance Expenses
Transportasi	412,307,895	244,289,792	Transportation
Listrik dan Air	363,073,551	367,683,607	Electricity and Water
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 11)	149,525,208	95,516,261	Depreciation of Fixed Assets (Note 11)
Lain-lain	293,520,100	1,234,358,479	Others
Jumlah	69,569,055,615	31,452,045,694	Total

33. Beban Keuangan

33. Financial Cost

Merupakan beban bunga atas kredit bank, beban administrasi dan sewa yang terkait dengan perolehan pinjaman selama periode berjalan yang terinci sebagai berikut:

Represents interest expenses of bank loans, administrative expenses and lease related to the acquisition of loans during current period in which detailed as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Kredit Bank/ Credit Bank:			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6,509,863,976	3,616,319,347	
PT Bank Bukopin Tbk	1,265,187,245	862,450,024	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	300,555,795	--	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	163,826,667	--	
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	129,600,000	36,600,000	
Kredit Non Bank dan Sewa/ Credit Non Bank and Lease:			
PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero)	1,400,000,000	1,000,000,000	
PT Asuransi Jasa Indonesia	936,971,745	--	
Sewa/ Lease	128,382,178	--	
PT BRI Multifinance Indonesia	101,436,260	--	
Lain-lain/ Others	58,100,000	224,699,516	
Jumlah/ Total	10,993,923,866	5,740,068,887	

34. Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih

34. Others Income (Expense) - Net

	2020 Rp	2019 Rp	
Pendapatan Lain-lain			Others Income
Pendapatan Sewa dan Jasa Lainnya	6,395,017,797	14,381,785,056	Rental and Other Service Income
Penjualan Aval	1,330,428,759	1,285,079,500	Aval Sales
Pendapatan Diskonto			Gain on Discount of
Utang Karyawan (Catatan 19)	1,154,594,277	--	Employee Payable (Note 19)
Bunga Deposito dan Jasa Giro	463,330,498	249,179,824	Deposit Interest and Current Account Services
Sub Jumlah (Dipindahkan)	9,343,371,331	15,916,044,380	Sub Total (Transferred)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Sub Jumlah (Pindahan)	9,343,371,331	15,916,044,380	Sub Total (To Transfer)
Beban Lain-lain			Others Expense
Beban Denda Klaim	4,461,824,212	89,133,282	Penalty Claim Expense
Beban Selisih Kurs	209,527,192	30,037,579	Foreign Exchange Rate Expenses
Lain-lain	559,749,436	4,690,972,279	Others
Sub Jumlah	5,231,100,840	4,810,143,140	Sub Total
Jumlah	4,112,270,491	11,105,901,240	Total

Beban denda klaim merupakan denda klaim karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan mekanikal dan elektrik pabrik minyak kayu putih dengan PT Sanggaragro Karya Persada dan CV Dyaniel Engineering dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan *heavy machining center* dengan PT Barata Indonesia.

Penalty claim represent fines for claims due to delay in the completion of mechanical and electrical work at the eucalyptus oil factory with PT Sanggaragro Karya Persada and CV Dyaniel Engineering and delays in the completion of heavy machining center construction with PT Barata Indonesia.

**35. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan**

**35. Financial Instrument and Financial Risks
Management**

a. Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam transaksi normal Perusahaan, secara umum terekspos risiko keuangan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
3. Risiko Tingkat Suku Bunga
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Harga
6. Risiko Bisnis

Catatan ini menjelaskan mengenai eksposur Grup terhadap masing-masing risiko di atas dan pengungkapan secara kuantitatif termasuk seluruh eksposur risiko serta merangkum kebijakan dan proses-proses yang dilakukan untuk mengukur dan mengelola risiko yang timbul.

Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup dan secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Grup difokuskan pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Grup.

Kebijakan manajemen Grup mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

a. Risk Management Policy

In normal transaction, the Company is generally exposed to financial risks as follows:

1. Credit Risk
2. Foreign Exchange Rate Risk
3. Interest Rate Risk
4. Liquidity Risk
5. Price Risk
6. Business Risk

This note describes the exposure of the Group to each of the above risks and quantitative disclosures including risk exposures and summarizes the policies and processes for measuring and managing the risks that arised.

The director are responsible for implementing risk management policies and overall financial risk management program which focuses on uncertainty of financial market and minimize potential losses that will have an impact to the Group's financial performance.

The Group's policy on financial risk mangagement are as follows:

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan tagihan bruto dari pemberi kerja. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk meringankan risiko ini, Grup menetapkan kebijakan untuk transaksi Penjualan jasa kepada pelanggan dengan mengharuskan pemakai jasa/ pelanggan untuk memberikan uang muka sebelum bertransaksi, sehingga Grup lebih mudah memantau pendapatannya.

Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Grup akan menghentikan pelayanan jasa kepada pelanggan sebagai akibat gagal bayar. Tergantung pada penilaian Grup, penyisihan khusus dibuat jika terdapat bukti objektif tidak tertagih.

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020	Belum Jatuh Tempo/ Not yet Due	Telah Jatuh Tempo/ Past Due	Penurunan Nilai/ Impairment	Jumlah/ Total	December 31, 2020
Kas dan Setara Kas	41,892,570,344	--	--	41,892,570,344	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	762,970,000	1,492,560,526	--	2,255,530,526	Restricted Cash
Piutang Usaha	12,397,223,090	84,941,421,247	(63,819,703,825)	33,518,940,512	Accounts Receivable
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja	--	83,821,067,424	(5,079,148,636)	78,741,918,788	Gross Amount Due from Customers
Jumlah	55,052,763,434	170,255,049,197	(68,898,852,461)	156,408,960,170	Total

1. Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss come from their customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. The Group's financial instruments that have potential credit risk are cash and cash equivalent, restricted cash, accounts receivable and gross amount from customers. Maximum total credit risks exposure are equal to the carrying amount of the respective accounts.

To minimize this risk, the Group established a policy to deal with the sale of services to customers by requiring service users/ customers to pay deposit(s) before entering transaction and hence allow the Company to monitor their income easier.

In addition, receivable balances are monitored on a continuous basis to reduce the possibility of uncollectible receivables.

When a customer is unable to make payment within the specified time, the Group will contact the customer to follow up on receivables that are past due. If the customer does not pay the receivables within a specified time period, the Group will discontinue services to customers as a result of the default. Depending on the assessment of the Group, specific allowance is made when there is an objective evidence that it will not be collected.

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the statements of financial position are as follows:

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

31 Desember 2019	Belum Jatuh Tempo/ <i>Not yet Due</i>	Telah Jatuh Tempo/ <i>Past Due</i>	Penurunan Nilai/ <i>Impairment</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	December 31, 2019
Kas dan Setara Kas	15,166,334,047	--	--	15,166,334,047	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	762,970,000	1,574,112,235	--	2,337,082,235	Restricted Cash
Piutang Usaha	4,212,645,760	114,256,931,381	(99,793,747)	118,369,783,394	Accounts Receivable
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja	--	73,032,218,346	--	73,032,218,346	Gross Amount Due from Customers
Jumlah	20,141,949,807	188,863,261,962	(99,793,747)	208,905,418,022	Total

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing dari kas dan setara kas, investasi dan pinjaman.

Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko nilai tukar mata uang terutama terdiri dari kas dan setara kas, investasi dan pinjaman.

Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf di atas, fluktuasi dalam nilai tukar Rupiah dan Dolar AS menghasilkan nilai natural untuk laju nilai tukar Grup.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang Grup terutama disebabkan oleh Kas dan Setara Kas dan Utang Usaha. Utang Usaha dikompensasi dengan kenaikan nilai Kas dan Setara Kas yang sebagian besar didominasi dalam mata uang asing yang sama.

Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Grup. Beberapa liabilitas dan belanja modal Perusahaan diperkirakan akan terus didominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup:

2. Foreign Exchange Rate Risk

Foreign exchange rate risk is a risk that the fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates of cash and cash equivalents, investments and credit.

The Group's financial instruments that potentially containing foreign exchange rate risk are cash and cash equivalent, investments and loans.

However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the Rupiah and US Dollar provide some degree of natural hedge for the Group's foreign exchange exposure.

Exposure of currency exchange risk of Group is mainly from Cash and Cash Equivalents and Accounts Payable. Accounts Payable is offset by increasing of Cash and Cash Equivalents dominated in the same foreign currencies.

Foreign exchange had been, and would be expected give influence towards operation result and cash flow of the Group. Several liabilities and capital expenditures Entity are expected to continue dominated in United States Dollar.

The following table presents the Group's financial assets and liabilities:

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	2020			2019			
	Mata Uang	Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Mata Uang	Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent Rp	
Aset							Assets
Kas dan Setara Kas	USD	23,439	330,604,672		90,331	1,255,693,315	Cash and Cash Equivalents
Jumlah Aset			330,604,672			1,255,693,315	Total Asset
Kewajiban							Liability
Utang Usaha	USD	957,592	13,506,833,413		1,706,002	23,715,127,714	Accounts Payable
Jumlah Kewajiban			13,506,833,413			23,715,127,714	Total Liability
Kewajiban - Bersih			(13,176,228,741)			(22,459,434,399)	Liability - Net

Penguatan Rupiah sebesar 100 poin terhadap Dolar Amerika Serikat per 31 Desember 2020 dan 2019 akan meningkatkan laba tahun berjalan dan ekuitas masing-masing sebesar Rp93.415.305 dan Rp161.567.041.

A 100 point of strengthening the Rupiah against US Dollar as of December 31, 2020 and 2019 would have increased profit and equity by Rp93,415,305 and Rp161,567,041.

Pelemahan Rupiah sebesar 100 poin terhadap Dolar Amerika Serikat per 31 Desember 2020 dan 2019 akan memberikan efek kebalikan yang sama besarnya, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap sama.

A 100 point weakening of the Rupiah against US Dollar as of December 31, 2020 and 2019 would have had the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remain constant.

3. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

3. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, profil instrumen keuangan Grup yang dipengaruhi bunga adalah:

On the statement of financial position, the Group's profile of financial instruments that are affected by the interest are as follows:

	2020		2019		
	Rp		Rp		
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan Setara Kas					Cash and Cash Equivalents
Pihak Berelasi	39,813,976,981		10,787,585,314		Related Parties
Pihak Ketiga	1,733,710,933		3,630,938,734		Third Parties
Piutang Usaha					Accounts Receivable
Pihak Berelasi	13,931,041,539		35,070,373,368		Related Parties
Pihak Ketiga	19,587,898,973		83,299,410,026		Third Parties
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja					Gross Amount Due from Customers
Pihak Berelasi	68,110,297,939		63,209,934,745		Related Parties
Pihak Ketiga	10,631,620,849		9,822,283,601		Third Parties
Sub Jumlah (Dipindahkan)	153,808,547,214		205,820,525,788		Sub Total (Transferred)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Sub Jumlah (Pindahan)	153,808,547,214	205,820,525,788	Sub Total (To Transfer)
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang Dana Kreditur Lainnya			Other Creditors Debts
Jangka Pendek	5,132,702,576	550,000,000	Current
Jangka Panjang	96,571,349,098	101,504,051,674	Non-Current
Utang Bank			Bank Loans
Jangka Pendek	808,309,521	706,765,401	Current
Jangka Panjang	2,769,648,931	3,577,958,452	Non-Current
Utang Pembiayaan			Finance Liability
Jangka Pendek	416,440,852	231,925,820	Current
Jangka Panjang	54,577,366	279,806,025	Non-Current
Sub Jumlah	105,753,028,344	106,850,507,372	Sub Total
Jumlah Aset - Bersih	48,055,518,870	98,970,018,416	Total Assets - Net

Analisis sensitivitas terhadap risiko suku bunga

Sensitivity analysis on interest rate risk

	2020 Rp	2019 Rp	
Tingkat Bunga Tetap			Fixed Rate
Aset Keuangan	112,260,859,300	191,402,001,740	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	101,704,051,674	102,054,051,674	Financial Liabilities
Tingkat Bunga Mengambang			Variable Rate
Aset Keuangan	41,547,687,914	14,418,524,048	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	4,048,976,670	4,796,455,698	Financial Liabilities
Jumlah Aset - Bersih	48,055,518,870	98,970,018,416	Total Assets - Net

Kenaikan suku bunga 2% akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp749.974.225 dan Rp192.441.367. Penurunan 2% suku bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 akan memiliki sama tetapi berlawanan efek, atas dasar bahwa semua variabel lainnya tetap konstan.

A 2% increase in interest rates would have decreased equity and profit or loss for the periods ended December 31, 2020 and 2019 by Rp749,974,225 and Rp192,441,367, respectively. Decreasing 2% in interest rates for the periods ended December 31, 2020 and 2019 would have the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remain constant.

Grup mengelola risiko suku bunga melalui kombinasi pinjaman dengan suku bunga berfluktuasi dan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Grup.

The Group manages interest rate risk through combination of loans with fluctuating interest rates and monitoring the impact of the movements in interest rate to minimize the negative impact in the Group.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Grup menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

4. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk when the cash flow position of the Group indicated that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Grup untuk operasi normal Grup dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

The Group manages liquidity risk by maintaining an adequate level of cash and cash equivalent to cover Group's commitment in normal operation and also regularly evaluate the projected and actual cash flow, as well as maturity date schedule of their financial assets and liabilities.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Details of the maturities of financial liabilities are as follows:

31 Desember 2020	Belum Jatuh Tempo/ Not yet Due	Telah Jatuh Tempo/ Past Due	Penurunan Nilai/ Impairment	Jumlah/ Total	December 31, 2020
Utang Usaha	124,850,600,691	--	--	124,850,600,691	Accounts Payable
Utang Bank	85,498,293,303	--	--	85,498,293,303	Bank Loans
Utang Lain-lain	38,846,137,712	--	--	38,846,137,712	Other Accounts Payable
Beban Akrua	133,192,713,677	--	--	133,192,713,677	Accrued Expenses
Utang Dana Kreditur Lainnya	96,571,349,098	5,132,702,576	--	101,704,051,674	Other Creditor Debt
Utang Bank Jangka Panjang	2,769,648,931	808,309,521	--	3,577,958,452	Long Term Bank Loans
Utang Pembiayaan Konsumen	54,577,366	416,440,852	--	471,018,218	Consumer Financing Liability
Jumlah	481,783,320,778	6,357,452,949	--	488,140,773,727	Total
31 Desember 2019	Belum Jatuh Tempo/ Not yet Due	Telah Jatuh Tempo/ Past Due	Penurunan Nilai/ Impairment	Jumlah/ Total	December 31, 2019
Utang Usaha	129,576,217,811	--	--	129,576,217,811	Accounts Payable
Utang Bank	68,725,814,377	--	--	68,725,814,377	Bank Loans
Utang Lain-lain	41,036,733,732	--	--	41,036,733,732	Other Accounts Payable
Beban Akrua	100,165,191,643	--	--	100,165,191,643	Accrued Expenses
Utang Dana Kreditur Lainnya	101,504,051,674	550,000,000	--	102,054,051,674	Other Creditor Debt
Utang Bank Jangka Panjang	3,577,958,452	706,765,401	--	4,284,723,853	Long Term Bank Loans
Utang Pembiayaan Konsumen	279,806,025	231,925,820	--	511,731,845	Consumer Financing Liability
Jumlah	444,865,773,714	1,488,691,221	--	446,354,464,935	Total

5. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitannya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

5. Price Risk

Price risk is a risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market price, whether those changes are caused by factors specific to the individual instrument or its issues or factors affecting all instruments traded in the market.

Grup terkena dampak risiko harga yang terutama diakibatkan oleh pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan peralatan yang merupakan komponen utama biaya produksi.

Group is affected by price risk that is primarily attributable to the procurement and maintenance of port facilities and equipment which are the major component of production costs.

Harga pengadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permintaan pasokan, nilai tukar kondisi geografis dan nilai tukar. Dampak risiko harga tersebut mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Grup tidak serta merta dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggannya.

Procurement prices are influenced by several factors, such as rising demand and exchange rates. The impact of this price risk, results in the increasing production costs. The Group is unable to transfer these price increases directly to its customers.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko harga adalah antara lain dengan melakukan kerjasama usaha dan pembelian bersama antara Grup kepada pemasok agar mendapatkan harga yang menguntungkan.

Group set policies to minimize price risk, such as by conducting joint operations and joint purchase between the Group to suppliers in order to obtain a favorable price.

6. Risiko Bisnis

- Risiko keterlambatan penyerahan proyek: kemungkinan terjadinya peristiwa keterlambatan serah terima proyek dari waktu yang disepakati dalam klausul kontrak.
- Risiko terminasi kontrak: kemungkinan terjadinya peristiwa pemutusan kontrak oleh pemilik proyek.
- Risiko keterlambatan regenerasi: proses kerja tidak berjalan optimal, kurang optimalnya penggunaan tenaga muda untuk percepatan proses produksi, kurangnya jumlah tenaga kerja berkualitas.
- Risiko *over budget* proyek: kemungkinan terjadinya realisasi biaya proyek melebihi anggaran yang disediakan.
- Risiko turunnya kepercayaan pelanggan: kemungkinan pengenaan denda atas keterlambatan penyerahan proyek dan tidak adanya pemesanan kembali dari pelanggan lama.

6. Business Risk

- *Risk of late of project delivery: the possibility of delays in the handover event from the date of project agreed in the contract clause.*
- *Risk of contract cancellation: possibility of termination contract by project's owner.*
- *Risk of regeneration delay: working process less than optimal, young employee less than optimal to accelerate the production process, quality worker less than optimal.*
- *Risk over the budget project: possibility of realization of the project costs exceed the budget provided.*
- *Risk of loss of customer trust: possibility of penalty charges in connection with delay of project delivery and there are none repeat order from previous customer.*

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan
Estimasi nilai wajar**

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto. Instrumen keuangan Grup terdiri dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

**b. Fair Value of Financial Instruments
Fair value estimation**

Fair value is the amount for which a financial instrument could be exchanged between comprehends and willing parties to conduct fair transactions and is not a sales value due to financial difficulties or a forced liquidation.

The fair value derived from quoted prices or discounted cash flow models. Financial instruments of the Group are consists of financial assets and financial liabilities.

The table below shows the carrying values and fair values of the assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position for the periods ended December 31, 2020 and 2019:

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan:					Financial Assets:
Kas dan Setara Kas	41,892,570,344	41,892,570,344	15,166,334,047	15,166,334,047	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	33,518,940,512	33,518,940,512	118,369,783,394	118,369,783,394	Accounts Receivable
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	78,741,918,788	78,741,918,788	73,032,218,346	73,032,218,346	Gross Amount Due from Customers
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	2,255,530,526	2,255,530,526	2,337,082,235	2,337,082,235	Restricted Cash
Jumlah	156,408,960,170	156,408,960,170	208,905,418,022	208,905,418,022	Total
Liabilitas Keuangan:					Financial Liabilities:
Utang Usaha	124,850,600,691	124,850,600,691	129,576,217,811	129,576,217,811	Accounts Payable
Beban Akrua	133,192,713,677	133,192,713,677	100,165,191,643	100,165,191,643	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	38,846,137,712	38,846,137,712	41,036,733,732	41,036,733,732	Other Currents Payable
Bagian Jangka Pendek dari					Current Portion of
Utang Bank	85,498,293,303	85,498,293,303	68,725,814,377	68,725,814,377	Bank Loans
Utang Pembiayaan Konsumen	471,018,218	471,018,218	511,731,845	511,731,845	Consumer Financing Liability
Jumlah	382,858,763,601	382,858,763,601	340,015,689,408	340,015,689,408	Total

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount as the impact of discounting is not significant.

c. Manajemen Permodalan

Tujuan manajemen permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup (*going concern*), memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham.

Grup secara rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Grup, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

c. Capital Management

The purpose of capital management is to maintain the continuity of the Group's business (going concern), maximizing the benefits to the shareholders and other stakeholders and maintain an optimal capital structure to reduce costs.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders.

The Group routinely examines and manages the capital structure to ensure its capital structure and the return to shareholders is optimal, taking into account the need for future capital and capital efficiency of the Group, the profitability of the present and the future, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities.

36. Kelangsungan Usaha

Pada tahun 2020, Grup mengalami kerugian sebesar Rp73.458.456.772 dan akumulasi defisit pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp684.145.308.831 atau (201%) dari modal

36. Going Concern

In year 2020, the Group experienced a loss amounted to Rp73,458,456,772 and accumulated deficit as of December 31, 2020 amounted to Rp684,145,308,831 or (201%) of the paid-in

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

disetor. Disamping itu, rasio likuiditas Grup sebesar 60% dimana jumlah aset lancar Grup sebesar Rp366.123.737.812 tidak cukup untuk menutupi kewajiban lancar Grup sebesar Rp613.619.035.720.

Selain itu, sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, pandemi virus Covid-19 masih belum berakhir, Manajemen menyatakan bahwa Grup mengalami dampak signifikan per tanggal posisi keuangan. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian material atas kinerja Grup dimasa mendatang dan dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Sebagai upaya untuk tetap dapat menjaga kesinambungan kelangsungan usaha Grup, Manajemen akan melakukan langkah strategis sebagai berikut:

- a. Transformasi bisnis melalui fokus terhadap core business yaitu *Manufacture (Industry Equipment)* dan *Assembly/ Packager Subsystem Component Energy* yang berbasis *Diesel/ Gas Engine*;
- b. Peningkatan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri);
- c. Pengembangan produk unggulan yaitu dengan cara meningkatkan inovasi peralatan komponen migas yang berbasis diesel dan *gas engine (Gas Compressor, Gas Generator, Air Compressor, Dehydration Unit, CO2 Removal, DEG, GEG dan sebagainya)*;
- d. Pelaksanaan Investasi Baru di Pasuruan, *Assembly Line dan Software Engineering*);
- e. Memperluas Pangsa Pasar produk unggulan dengan kerjasama Klaster Manufaktur, OEM dan Partner Strategis;
- f. Melakukan Optimalisasi/ Pelepasan Aset;
- g. Restrukturisasi Utang.

Laporan keuangan konsolidasian terlampir disusun dengan asumsi bahwa Grup tetap akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dimana Grup dapat merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban dalam kondisi usaha normal.

Manajemen berkeyakinan bahwa langkah-langkah tersebut akan efektif dalam mengatasi dampak dari kondisi bisnis saat ini.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

capital. In addition, the Group's liquidity ratio is 60% where the Group's total current assets amounted to Rp366,123,737,812 are not sufficient to cover the Group's current liabilities amounted to Rp613,619,035,720.

In addition, as of the date of issuance of the consolidated financial statements, the Covid-19 virus pandemic has not yet ended, Management states that the Group experienced a significant impact as of the financial position date. This condition can lead to material uncertainty over the Group's future performance and raises substantial doubt about the Group's ability to continue business continuity.

In an effort to continue to maintain the continuity of the Group's business continuity, management will take strategic steps as follows:

- a. *Business transformation through a focus on core business, namely Manufacturing (Industry Equipment) and Assembly/ Packager Subsystem Component Energy based on Diesel/ Gas Engine;*
- b. *Increase in TKDN (Level of Domestic Content);*
- c. *Development of superior products by increasing the innovation of oil and gas component equipment based on diesel and gas engines (Gas Compressor, Gas Generator, Air Compressor, Dehydration Unit, CO2 Removal, DEG, GEG and so on);*
- d. *Implementation of New Investment in Pasuruan, Assembly Line and Software Engineering);*
- e. *Expanding the market share of superior products with the cooperation of Manufacturing Clusters, OEMs and Strategic Partners;*
- f. *Optimizing/ Disposal of Assets;*
- g. *Debt Restructuring.*

This consolidated financial statements have been prepared assuming that the Group remains to continue to operate as an entity that is capable of a going concern, whereby the Group can realize the assets and settle liabilities under normal business conditions.

The management believes that these mentioned measures will be effective in overcoming the effects of the current business condition.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

37. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting

a. Perjanjian Sewa Lahan dengan PT Krakatau Steel (Persero)

Berdasarkan Akta Notaris No. 08 oleh notaris Eva Fitri Sagitarina, S.H., pada tanggal 27 Juni 2013, PT Boma Bisma Indra (Persero) menandatangani perjanjian sewa menyewa lahan dan gudang kepada PT Krakatau Steel seluas 7.489 m² untuk jangka waktu 24 tahun dan 2 bulan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2037. Perusahaan menyewakan tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur No. 229, Surabaya. Perjanjian sewa menyewa ini dilakukan dalam hal kompensasi atas penyelesaian utang PT Boma Bisma Indra (Persero) kepada PT Krakatau Steel senilai Rp71.585.103.472.

b. Perjanjian Pembuatan dan Penjualan Dress Up/SKD Mesin dengan Doosan Infracore Co., LTD

Perusahaan melakukan perjanjian Pembuatan dan Penjualan Dress Up/SKD Mesin dengan Doosan Infracore Co., LTD sesuai perjanjian No. 037/SP.BBI-1000/08.2019 tanggal 21 Agustus 2019. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun setelah tanggal berlaku atau berakhir pada 21 Agustus 2021.

37. Significant Agreements and Commitments

a. Land Lease Agreement with PT Krakatau Steel (Persero)

Based on the Notary Deed No. 08 by notary Eva Fitri Sagitarina, S.H., on June 27, 2013, PT Boma Bisma Indra (Persero) signed a land and warehouse lease agreement to PT Krakatau Steel covering an area of 7,489 m² for a period of 24 years and 2 months until August 26, 2037. The Company rents out land and buildings which are located at Jalan KH. Mas Mansyur No. 229, Surabaya. This lease agreement was carried out in terms of compensation for the settlement of PT Boma Bisma Indra (Persero) debt to PT Krakatau Steel amounting to Rp71,585,103,472.

b. Dress Up/SKD Machine Manufacturing and Sales Agreement with Doosan Infracore Co., LTD

The Company entered into an agreement for the Manufacturing and Sales of Dress Up/SKD Machine with Doosan Infracore Co., LTD according to the agreement No. 037/SP.BBI-1000/08.2019 dated August 21, 2019. This agreement is valid for 2 years after the effective date or ends on August 21, 2021.

38. Kontinjensi

Pada tanggal 10 September 2018, PT Kapuasindo Palm Industri (KPI) (sebagai Penggugat) telah mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada PT Boma Bisma Indra (Persero) (sebagai Tergugat) terkait dengan jadwal penyelesaian pekerjaan pembangunan pabrik kelapa sawit yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 500/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Setelah melalui beberapa kali persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018, 9 Januari 2019, 16 Januari 2019 dan 23 Januari 2019, maka: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 18 Juni 2019 No. Perkara tingkat pertama: 500/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., telah memutuskan untuk Menolak Gugatan untuk seluruhnya.

Dan atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut, Pihak Penggugat (KPI) telah mengajukan permohonan Banding dengan No. 86/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst., pada tanggal 28 Juni 2019.

38. Contingencies

On September 10, 2018, PT Kapuasindo Palm Industri (KPI) (as Plaintiff) has submitted a Default Lawsuit to PT Boma Bisma Indra (Persero) (as Defendant) related to the schedule for construction work completion of a palm oil mill registered at the Central Jakarta District Court with No. 500/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

After going through several trials which were held on December 11, 2018, January 9, 2019, January 16, 2019 and January 23, 2019, then: The Central Jakarta District Court in its decision dated June 18, 2019 Case No. First Level: 500/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., has decided to Reject the Suit in its entirety.

And for the decision of the Central Jakarta District Court, the Plaintiff (KPI) has submitted an Appeal with No. 86/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst., on June 28, 2019.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengajuan permohonan tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan Banding No. 683/PDT/2019/PT.DKI tanggal 28 Januari 2020 dengan amar putusannya menguatkan seluruh putusan Pengadilan Negeri dan PT Kapuasindo Palm Industri (KPI) mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai surat permohonannya No. 39/Srt.Kas/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2020.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

The plead forementioned had been decided by High Court of Jakarta in Appeal Verdict No. 683/PDT/2019/PT.DKI dated January 28, 2020 which approved the District Court verdict consideration and PT Kapuasindo Palm Industri (KPI) sent a Cassation Plead to Supreme Court accordance with its application letter No. 39/Srt.Kas/2020/PN.Jkt.Pst dated April 14, 2020.

39. Informasi Penting Lainnya

Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi menerbitkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Perpres berupa aturan turunan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 sebagai Undang-Undang No. 11/2020. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diotorisasi, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

Perubahan Anggaran Dasar Entitas Anak

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Entitas Anak yang terdapat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bromo Steel Indonesia No. 54 tanggal 29 September 2020 dari Hj. Eva Fitri Sagitarina, S.H., Notaris di Surabaya dan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0067018.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 September 2020, para pemegang saham menyetujui peningkatan Modal Dasar PT Bromo Steel Indonesia yang semula Rp259.375.000 menjadi sebesar Rp51.875.000.000 yang terdiri dari 200.000 lembar saham dan setiap lembar saham bernilai nominal Rp259.375.

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor serta diambil bagian sebanyak 29,78% saham yang diambil bagian oleh PT Boma Bisma Indra sebanyak 59.557 lembar atau senilai Rp15.447.596.875 dan oleh Koperasi Karyawan (KABOSTO) sebanyak 6 lembar atau senilai Rp1.556.250.

39. Other Important Information

Job Creation Law

In February 2021, the Government officially issued 45 Government Regulations (PP) and 4 Perpres in the form of delegated legislation of the Job Creation Law which was previously ratified on November 2, 2020 as Law No. 11/2020. As at the authorization date of the consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of the implementing regulations of the Job Creation Law, as well as the impact on the Company's financial statements.

The Changes of Articles of Association of Subsidiary

Based on The Changes of Articles of Association of Subsidiary stated in Deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bromo Steel Indonesia No. 54 dated September 29, 2020 from Hj. Eva Fitri Sagitarina, S.H., Notary in Surabaya and received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0067018.AH.01.02.TAHUN 2020 dated September 29, 2020, the shareholders agreed to increase the Authorized Capital of PT Bromo Steel Indonesia from Rp259,375,000 to Rp51,875,000,000 consisting of 200,000 shares and each share has a nominal value of Rp259,375.

Of the authorized capital, 29.78% of the shares were subscribed and paid for as much as 59,557 shares of PT Boma Bisma Indra or a value of Rp15,447,596,875 and 6 shares by the Employee Cooperative (KABOSTO) or the value of Rp1,556,250.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Modal saham yang ditempatkan sejumlah Rp15.449.153.125 telah disetor penuh oleh PT Boma Bisma Indra (Persero) dan Koperasi Karyawan (KABOSTO) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebesar Rp257.818.750 merupakan setoran modal awal PT Boma Bisma Indra (Persero) dan sebesar Rp1.556.250, setoran modal awal yang telah dialihkan kepada Koperasi Karyawan (KABOSTO).
- Sebesar Rp10.589.194.575 penambahan modal dari PT Boma Bisma Indra (Persero) yang berupa pengalihan mesin-mesin sesuai surat Menteri Keuangan No. S-167/MK.011/1986 tanggal 19 Februari 1986.
- Sebesar Rp1.409.000.000 penambahan modal dari PT Boma Bisma Indra (Persero) yang berupa pelunasan utang pada Bank Bumi Daya Surabaya sesuai Surat Menkeu No. S-1479/MK.013/1989 tanggal 21 Desember 1989.
- Sebesar Rp2.219.000.000 penambahan modal dari PT Boma Bisma Indra (Persero) yang berupa pelunasan utang pada Bank Bumi Daya Surabaya sesuai surat Surat Menkeu No. S-712/MK.013/1990 tanggal 12 Juni 1990.
- Sebesar Rp972.583.550, penambahan modal dari PT Boma Bisma Indra (Persero) yang berupa nilai proyek revitalisasi dengan menggunakan dana PMN (Penyertaan Modal Pemerintah) sesuai RUPS tanggal 21 Januari 2011.

Pada laporan keuangan 31 Desember 2020, Entitas Anak mencatat tambahan setoran modal disetor yang berasal dari pengalihan mesin sejumlah Rp9.616.845.407. Pencatatan ini tidak sesuai dengan akta sebesar Rp10.589.194.575 dikarenakan perbedaan nilai pengalihan mesin sejumlah Rp972.349.168.

The subscribed paid capital amounting to Rp15,449,153,125 has been fully paid up by PT Boma Bisma Indra (Persero) and the Employee Cooperative (KABOSTO) in the following way:

- *A total of Rp257,818,750 represents an initial capital deposit of PT Boma Bisma Indra (Persero) and an amount of Rp1,556,250, an initial capital deposit that has been transferred to the Employee Cooperative (KABOSTO).*
- *A total of Rp10,589,194,575 additional capital from PT Boma Bisma Indra (Persero) in the form of a transfer of machinery agreed with Minister of Finance Letter No. S-167/MK.011/1986 dated February 19, 1986.*
- *As much as Rp1,409,000,000 additional capital from PT Boma Bisma Indra (Persero) in the form of debt repayment at Bank Bumi Daya Surabaya agreed with Minister of Finance Letter No. S-1479/MK.013/1989 dated December 21, 1989.*
- *In the amount of Rp2,219,000,000 additional capital from PT Boma Bisma Indra (Persero) in the form of debt repayment at Bank Bumi Daya Surabaya agreed with Minister of Finance Letter No. S-712/MK.013/1990 dated June 12, 1990.*
- *As much as Rp972,583,550, additional capital from PT Boma Bisma Indra (Persero) in the form of revitalization project value using PMN funds (Government Capital Participation) agreed with General Meeting of Shareholders on January 21, 2011.*

In the financial statements as of December 31, 2020, the Subsidiary recorded additional paid-up capital derived from the transfer of machinery amounting to Rp9,616,845,407. This record doesn't agree to the deed amounting to Rp10,589,194,575 due to the difference of recorded value of machine transferred amounting to Rp972,349,168.

40. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

a. Restrukturisasi Fasilitas Kredit dengan BNI

Berdasarkan Perjanjian Kredit pada tanggal 12 Juli 2021, Perusahaan mendapatkan persetujuan perpanjangan kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Surat No. KPS3/4.1279/R dengan merestrukturisasi fasilitas kredit menjadi sebagai berikut:

- Fasilitas *Term Loan* Restrukturisasi maksimum Rp92.041.138.591.
- Fasilitas *Non-Cash Loan* (NCL) maksimum Rp107.057.880.606.

40. Events After The Reporting Period

a. Restructuring Credit Facilities with BNI

Based on the Credit Agreement dated July 12, 2021, the Company obtained approval for a credit extension from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk through Letter No. KPS3/4.1279/R by restructuring the credit facilities as follows:

- *Maximum Restructuring Term Loan Facility* amounting to Rp92,041,138,591.
- *Non-Cash Loan (NCL) Facility* with a maximum of Rp107,057,880,606.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Jangka waktu perpanjangan Fasilitas kredit ini
96 bulan sejak penandatanganan Perjanjian
Kredit.

*The extension of this credit facility is due to
96 months after the Credit Agreement has been
signed.*

**b. Permasalahan Hukum dengan
PT Kapuasindo Palm Industry**

Berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 775 K/PDT/2021 Jo. No. 500/Pdt.G/2018/
PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 2021,
Mahkamah Agung mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari
PT Kapuasindo Palm Industry sebagai
Pemohon Kasasi; dan
- Menghukum PT Kapuasindo Palm Industry
sebagai Pemohon Kasasi untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp500.000.

**b. Legal Issues with PT Kapuasindo Palm
Industry**

*Based on the Release Notification of Verdict
Contents of the Republic of Indonesia Supreme
Court No. 775 K/PDT/2021 Jo. No.
500/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dated December 16,
2021, the Supreme Court adjudicated:*

- *To reject the cassation plea from
PT Kapuasindo Palm Industry as the
Cassation Pleader; and*
- *To sentence PT Kapuasindo Palm Industry as
the Cassation Pleader to pay court fees
amounting to Rp500,000.*

41. Reklasifikasi Akun

41. Accounts Reclassification

Perusahaan melakukan reklasifikasi akun
pada laporan posisi keuangan pada tanggal
31 Desember 2019 sehubungan dengan
penyesuaian penyajian laporan posisi keuangan
pada tanggal 31 Desember 2020.

*The Company reclassified the accounts in the
statement of financial position as of December 31,
2019 regarding with conformity with the statement of
financial position as of December 31, 2020.*

Berikut adalah rincian akun-akun dalam laporan
posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2019 sebelum dan sesudah
reklasifikasi:

*The following is the details of accounts in
the statement of financial position for the year
ended December 31, 2019 before and after
reclassification:*

	31 December 2019/ December 31, 2019			
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassified Rp	Reklasifikasi/ Resclassification Rp	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassified Rp	
ASET JANGKA PENDEK				CURRENT ASSETS
Piutang Usaha	105,897,628,758	12,472,154,636	118,369,783,394	Accounts Receivable
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja	85,504,372,981	(12,472,154,636)	73,032,218,346	Gross Amount Due from Customers
JUMLAH ASET	795,119,555,672	--	795,119,555,672	TOTAL ASSETS
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Beban Akrua	101,176,378,251	(1,011,186,608)	100,165,191,643	Accrued Expenses
Utang Karyawan	8,203,865,761	(8,203,865,761)	--	Employee Loan
Utang Lain-lain	31,821,681,363	9,215,052,369	41,036,733,732	Other Accounts Payable
Pendapatan Diterima di Muka	--	2,962,142,208	2,962,142,208	Unearned Revenue
Utang Dana Kreditur Lainnya	--	550,000,000	550,000,000	Other Creditors Debts
Utang Bank	--	706,765,401	706,765,401	Long-Term Bank Loans
Utang Pembiayaan	511,731,845	(279,806,025)	231,925,820	Finance Liability
Liabilitas Imbalan Kerja	--	4,743,456,982	4,743,456,982	Employee Benefits Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Pendapatan Diterima di Muka	52,578,024,304	(2,962,142,208)	49,615,882,096	Unearned Revenue
Utang Dana Kreditur Lainnya	102,054,051,674	(550,000,000)	101,504,051,674	Other Creditors Debts
Utang Bank	4,284,723,853	(706,765,401)	3,577,958,452	Long-Term Bank Loans
Utang Pembiayaan	--	279,806,025	279,806,025	Finance Liability
Liabilitas Imbalan Kerja	36,409,098,742	(4,743,456,982)	31,665,641,760	Employee Benefits Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	707,432,265,045	--	707,432,265,045	TOTAL LIABILITIES

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 December 2019/ December 31, 2019			
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassified Rp	Reklasifikasi/ Resclassification Rp	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassified Rp	
EKUITAS				EQUITY
Penghasilan Komprehensif Lain	293,480,596,957	(2,675,194,700)	296,155,791,657	Other Comprehensive Income
Defisit	(569,499,320,005)	2,676,760,862	(572,176,080,867)	Deficit
Kepentingan Non-Pengendali	(51,159,351)	(1,566,162)	(49,593,189)	Non-Controlling Interest
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	795,119,555,672	--	795,119,555,672	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
LABA (RUGI)				PROFIT (LOSS)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	5,073,508,443	(83,566,708)	4,989,941,735	Income Tax Benefit (Expenses)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Manfaat (Beban)				Related Income Taxes
Pajak Penghasilan Terkait	907,441,080	83,566,708	991,007,788	Benefit (Expenses)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(46,073,265,879)	--	(46,073,265,879)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR

42. Informasi Tambahan Terkait Arus Kas

42. Additional Information Related to Cash Flows

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat akun dalam laporan keuangan yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

As of the period ended December 31, 2020 and 2019, there are accounts in the financial statements that are recognized but does not affect cash flows as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Perolehan Aset Tetap melalui Kenaikan Utang Usaha	11,600,000	2,909,953,978	Acquisition of Fixed Assets through Increasing of Accounts Payable
Denda Klaim melalui Penyelesaian Piutang Usaha	2,358,167,049	--	Claim Fines through Accounts Receivable Settlement

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the period ended December 31, 2020 and 2019, as follows:

	2020				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flow	Non Kas/ Non Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Utang Bank					Bank Loans
Jangka Pendek	75,825,814,377	12,672,478,926	--	88,498,293,303	Current Liabilities
Jangka Panjang	4,284,723,863	(706,765,401)	--	3,577,958,452	Long Term Portion
Pembiayaan Konsumen	511,731,845	(40,713,627)	--	471,018,218	Consumer Finance
Jumlah	80,622,270,085	11,924,999,898	--	92,547,269,973	Total
	2019				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flow	Non Kas/ Non Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Utang Bank					Bank Loans
Jangka Pendek	51,724,462,094	24,101,352,283	--	75,825,814,377	Current Liabilities
Jangka Panjang	--	4,284,723,863	--	4,284,723,863	Long Term Portion
Pembiayaan Konsumen	--	511,731,845	--	511,731,845	Consumer Finance
Jumlah	51,724,462,094	28,897,807,991	--	80,622,270,085	Total

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**43. Standar Akuntansi Yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif**

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021.

Amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 73 (Amandemen 2020): "Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19".

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 22 (Amendemen 2019): "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): "Akuntansi Sukuk";
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): "Akuntansi Wa'd"; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2.

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual"; dan
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak".

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi".

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

43. Accounting Standards Issued But Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2021.

Amendments to standard effective for periods beginning on or after June 1, 2020, with early adoption is permitted as follows:

- PSAK 73 (Amendment 2020): "Leases regarding Rent Concessions related to Covid-19".

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 112: "Accounting for Endowments";
- PSAK 22 (Amendment 2019): "Business Combinations regarding Definition of Business";
- PSAK 110 (Improvement 2020): "Accounting for Sukuk";
- PSAK 111 (Improvement 2020): "Accounting for Wa'd"; and
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 22: "Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks"; and
- Amendments PSAK 57: "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs".

New standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: "Insurance Contract".

Until the date of the consolidated financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

*For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)*

**44. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan
Laporan Keuangan**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 29 Desember 2021.

**44. Responsibility and Authorization for
Issuance of the Financial Statements**

The Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized to be published on December 29, 2021.